



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 32 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen visi, misi, dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat berdasarkan acuan pada rencana kerja pemerintah.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
  - Bab IV : Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  - Bab VI : Penutup
- (5) Rincian uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib melaksanakan RKPD.

## Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Mei 2016

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR ISI** ..... i

**DAFTAR TABEL**.....v

**DAFTAR GAMBAR**..... xiii

**BAB 1 PENDAHULUAN**..... 1

    1.1 Latar Belakang ..... 1

    1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....6

    1.3 Hubungan Antar Dokumen.....8

    1.4 Sistematika Dokumen RKPD.....9

    1.5 Maksud dan Tujuan ..... 10

**BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN** ..... 12

    2.1 Aspek Geografi dan Demografi..... 12

        2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah..... 12

            2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... 12

            2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis ..... 14

            2.1.1.3 Topografi ..... 15

            2.1.1.4 Geologi..... 17

            2.1.1.5 Hidrologi ..... 21

            2.1.1.6 Klimatologi ..... 25

            2.1.1.7 Penggunaan Lahan ..... 26

            2.1.1.8 Peruntukan Lahan ..... 28

        2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah..... 29

        2.1.3 Wilayah Rawan Bencana..... 34

        2.1.4 Demografi ..... 36

    2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... 40

        2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi..... 40

        2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... 51

        2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga..... 65

    2.3 Aspek Pelayanan Umum..... 73

        2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ..... 73

            2.3.1.1 Urusan Pendidikan ..... 73

            2.3.1.2 Urusan Kesehatan..... 80

            2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum..... 86

2.3.1.4	Urusan Perumahan .....	95
2.3.1.5	Urusan Penataan Ruang .....	99
2.3.1.6	Urusan Perencanaan Pembangunan .....	101
2.3.1.7	Urusan Perhubungan.....	104
2.3.1.8	Urusan Lingkungan Hidup.....	106
2.3.1.9	Urusan Pertanahan .....	122
2.3.1.10	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	124
2.3.1.11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	128
2.3.1.12	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	137
2.3.1.13	Urusan Sosial .....	144
2.3.1.14	Urusan Ketenagakerjaan .....	149
2.3.1.15	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ..	160
2.3.1.16	Urusan Penanaman Modal.....	164
2.3.1.17	Urusan Kebudayaan.....	166
2.3.1.18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	182
2.3.1.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri.....	184
2.3.1.20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.....	186
2.3.1.21	Urusan Ketahanan Pangan .....	191
2.3.1.22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..	201
2.3.1.23	Urusan Statistik.....	204
2.3.1.24	Urusan Kearsipan .....	206
2.3.1.25	Urusan Komunikasi dan Informatika .....	213
2.3.1.26	Urusan Perpustakaan.....	215
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	222
2.3.2.1	Urusan Pertanian.....	222
2.3.2.2	Urusan Kehutanan .....	231
2.3.2.3	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral.....	233
2.3.2.4	Urusan Pariwisata .....	239
2.3.2.5	Urusan Kelautan dan Perikanan .....	243
2.3.2.6	Urusan Perdagangan.....	245
2.3.2.7	Urusan Industri .....	247
2.3.2.8	Urusan Ketransmigrasian .....	248
2.4	Aspek Daya Saing Daerah .....	251
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	251
2.4.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita.....	251
2.4.1.2	Nilai Tukar Petani (NTP).....	253
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	254
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi .....	262

	2.4.3.1	Angka Kriminalitas.....	262
	2.4.3.2	Jumlah Demonstrasi.....	264
	2.4.3.3	Lama Perizinan .....	266
	2.4.3.4	Pengenaan Pajak Daerah .....	267
	2.4.3.5	Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha.....	267
	2.4.4	Fokus Sumberdaya Manusia.....	268
2.5		Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	270
2.6		Permasalahan Pembangunan .....	404
	2.6.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	404
	2.6.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	412
<b>BAB 3</b>		<b>RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>429</b>
3.1		Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	429
	3.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi .....	429
	3.1.2	Struktur Sektor Ekonomi .....	432
	3.1.3	Struktur Pengeluaran dalam PDRB.....	435
		3.1.3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku .....	435
		3.1.3.2 PDRB atas dasar Harga Konstan.....	436
	3.1.4	Inflasi.....	436
	3.1.5	ICOR .....	439
		3.1.5.1 Nilai ICOR Total.....	439
		3.1.5.2 Nilai ICOR Sektoral.....	442
		3.1.5.3 Keterbandingan Nilai ICOR DIY dengan Wilayah Lain.....	443
		3.1.5.4 Proyeksi Nilai ICOR DIY .....	445
	3.1.6	Ketenagakerjaan.....	447
	3.1.7	Kemiskinan .....	451
	3.1.8	Ketimpangan Regional.....	454
	3.1.9	Ketimpangan Pendapatan.....	456
3.2		Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	458
	3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	458
	3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	460
	3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	465
	3.2.4	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	468
<b>BAB 4</b>		<b>TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 .....</b>	<b>470</b>

4.1	Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 .....	470
4.1.1	Dasar Perumusan Tema RKPD 2017 .....	470
4.1.2	RKPD Menjadi Bagian Integral dari RPJMN 2015-2019 ..	477
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	479
4.2.1	Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan DIY ..	479
4.2.2	Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional dan DIY ...	484
4.3	Pokok-pokok Pikiran DPRD .....	489
4.3.1	Tujuan Pokok-pokok Pikiran DPRD .....	490
4.3.2	Permasalahan Pembangunan DIY dari Sudut Pandang DPRD .....	491
4.3.3	Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD .....	492
<b>BAB 5</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 .....</b>	<b>495</b>
5.1	Program dan Kegiatan Strategis.....	495
5.1.1	Bidang Sosial Budaya .....	495
5.1.2	Bidang Perekonomian .....	497
5.1.3	Bidang Sarana dan Prasarana .....	499
5.1.4	Bidang Pemerintahan.....	500
5.2	Rencana Program dan Kegiatan.....	501
<b>BAB 6</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>712</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 .....	14
Tabel 2.2	Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis .....	14
Tabel 2.3	Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY.....	15
Tabel 2.4	Potensi Ketersediaan Air Sampai Tahun 2011 (dalam juta m <sup>3</sup> ) .....	23
Tabel 2.5	Debit Rerata Sungai di DIY .....	24
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 1971-2010 .....	37
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013 .....	38
Tabel 2.8	Kepadatan Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota, 2010-2014 (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) .....	39
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2009-2013 .....	40
Tabel 2.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2012-2014.....	42
Tabel 2.11	Lima Kontribusi Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah September 2014.....	42
Tabel 2.12	Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) .....	44
Tabel 2.13	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (%) .....	45
Tabel 2.14	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (%) .....	46
Tabel 2.15	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014 .	49
Tabel 2.16	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 .....	49

Tabel 2.17	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2014.....	51
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY, Tahun Ajaran 2010/2011 – 2014/2015 .....	54
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2010/2011-2014/2015.....	56
Tabel 2.20	Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 .....	60
Tabel 2.21	Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2011-2014 .....	64
Tabel 2.22	Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, Tahun 2010-2014 .....	65
Tabel 2.23	Perkembangan Aset-Aset Kebudayaan di DIY Tahun 2010-2014 .....	66
Tabel 2.24	Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 .....	68
Tabel 2.25	Perkembangan Pemuda dan Olah Raga di DIY Tahun 2010-2014 .....	69
Tabel 2.26	Perolehan Medali Kontingen DIY pada POPNAS 2015 .....	71
Tabel 2.27	Data Hasil Verifikasi Penduduk Buta Aksara (per Agustus 2015).....	75
Tabel 2.28	Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu Per 1.000 Balita DIY Tahun 2010-2014 .....	81
Tabel 2.29	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2014 .....	81
Tabel 2.30	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2014	82
Tabel 2.31	Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014.....	83
Tabel 2.32	Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2011-2014 .....	84
Tabel 2.33	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2014 .....	84

Tabel 2.34	Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penduduk DIY Tahun 2015 .....	86
Tabel 2.35	Data Kondisi Eksisting Urusan Pekerjaan Umum DIY Tahun 2010-2014 .....	87
Tabel 2.36	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon Sampai Dengan Tahun 2015 .....	93
Tabel 2.37	Filitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014 .....	96
Tabel 2.38	Sebaran Rusunawa di DIY Tahun 2013.....	97
Tabel 2.39	Data Luasan Wilayah Kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.....	98
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tata Ruang .....	100
Tabel 2.41	Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.....	103
Tabel 2.42	Jumlah Penumpang Terangkut dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2009-2014 ..	105
Tabel 2.43	Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet, 2014 .....	107
Tabel 2.44	Kosentrasi Parameter NO <sub>2</sub> di tiga titik sampel.....	115
Tabel 2.45	Kosentrasi Parameter So <sub>3</sub> di tiga titik sampel .....	116
Tabel 2.46	Kosentrasi Parameter CO di tiga titik sampel .....	116
Tabel 2.47	Kosentrasi Ox di tiga titik sampel .....	117
Tabel 2.48	Tabel Kosentrasi Parameter HC di tiga titik sampel.....	117
Tabel 2.49	Data Kependudukan DIY.....	127
Tabel 2.50	Perbandingan IPG terhadap IPM di DIY Tahun 2010- 2013 .....	130
Tabel 2.51	Capaian IDG DIY Tahun 2010-2013 .....	130
Tabel 2.52	Tabel Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014.....	131
Tabel 2.53	Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di DIY Tahun 2011-2014 .....	133
Tabel 2.54	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Tempat Kejadian Dan Lokasi Lembaga Layanan.	135

Tabel 2.55	Tabel Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY Tahun 2013-2014 .....	136
Tabel 2.56	Rasio Akseptor KB Tahun 2009-2014 .....	139
Tabel 2.57	Tabel Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010 - 2014 .....	141
Tabel 2.58	Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010 - 2014 .....	141
Tabel 2.59	Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2010-2014 ....	142
Tabel 2.60	Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-2014 .....	143
Tabel 2.61	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2012 - 2015 .....	145
Tabel 2.62	Jenis dan Jumlah PSKS di DIY, 2010-2014 .....	147
Tabel 2.63	Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY, Tahun 2011-2015 .....	151
Tabel 2.64	Tabel Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2014 .....	153
Tabel 2.65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) Menurut Kelompok Umur di DIY, Tahun 2011 – Februari 2015.....	156
Tabel 2.66	Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY.....	159
Tabel 2.67	Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di DIY, Februari 2013 – Februari 2015.....	160
Tabel 2.68	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2011-2015 .....	161
Tabel 2.69	Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2010-2015 .....	161
Tabel 2.70	Perkembangan Wirausaha Baru Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014 .....	162
Tabel 2.71	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2010-2014 .....	163
Tabel 2.72	Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2010-2014 .....	164
Tabel 2.73	Perkembangan Wirausaha Baru Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 .....	164
Tabel 2.74	Perkembangan Investasi di DIY .....	165
Tabel 2.75	Persebaran Benda, Bangunan dan Situs Cagar Budaya Tahun 2015.....	168

Tabel 2.76	Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan Tahun 2009-2015 .....	169
Tabel 2.77	Penanganan Cagar Budaya Tahun 2009-2015 .....	169
Tabel 2.78	Kawasan Cagar Budaya yang Mendapat SK Kepala Disbud DIY.....	170
Tabel 2.79	Daftar Museum Anggota Barahmus di DIY.....	173
Tabel 2.80	Daftar Museum Baru di DIY .....	175
Tabel 2.81	Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2009-2014 .....	178
Tabel 2.82	Desa Budaya .....	179
Tabel 2.83	Perkembangan Pelaku Budaya di DIY Tahun 2010-2015	182
Tabel 2.84	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2009-2015	182
Tabel 2.85	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di DIY, 2012-2014 .....	183
Tabel 2.86	Produksi Tanaman Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015 (Dalam Ton) .....	193
Tabel 2.87	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) di Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 .....	202
Tabel 2.88	Jumlah LSM Pemberdayaan Ekonomi Desa Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 .....	202
Tabel 2.89	Persentase Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/kota di DIY Tahun 2013-2015 .....	203
Tabel 2.90	Persentase PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015 .....	204
Tabel 2.91	Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2015.....	208
Tabel 2.92	Data Pengolahan Arsip Statis Hingga Tahun 2015.....	210
Tabel 2.93	Data Alih Media Hingga Tahun 2015.....	210
Tabel 2.94	Jumlah Perpustakaan Menurut Jenisnya.....	216
Tabel 2.95	Persentase Perpustakaan Desa Tiap-tiap Kabupaten/Kota Hingga Tahun 2014.....	217
Tabel 2.96	Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2010-2014	217
Tabel 2.97	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah DIY	217

Tabel 2.98	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan, 2014-2015 .....	224
Tabel 2.99	Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY, tahun 2014 - 2015 .....	226
Tabel 2.100	Populasi Ternak Provinsi DIY, 2014 - 2015 .....	228
Tabel 2.101	Populasi Ternak Provinsi DIY, 2014 – 2015 .....	229
Tabel 2.102	Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2015	231
Tabel 2.103	Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2011-2015 .....	232
Tabel 2.104	Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY 2011-2015 .....	232
Tabel 2.105	Tabel Capaian Energi Terbarukan Tahun 2013.....	235
Tabel 2.106	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY .....	240
Tabel 2.107	Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2011-2015 .....	245
Tabel 2.108	Perkembangan Jumlah Kumulatif SIUP Yang Terdaftar di DIY Tahun 2011-2015 .....	246
Tabel 2.109	Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional Tahun 2010-2014 .....	246
Tabel 2.110	Perkembangan IKM di DIY Tahun 2011-2015 .....	247
Tabel 2.111	Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2011-2015 .....	249
Tabel 2.112	Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi menurut Daerah Asal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2011 – 2015.....	250
Tabel 2.113	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di DIY, 2010-2014 .....	251
Tabel 2.114	Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di DIY, Tahun 2010-2014 .....	252
Tabel 2.115	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, 2010-2014.....	253
Tabel 2.116	Kondisi Jalan di DIY.....	256
Tabel 2.117	Luas Wilayah Produktif (Ha) .....	257
Tabel 2.118	Data Infrastruktur Persampahan Per Wilayah.....	259
Tabel 2.119	Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kasus di DIY Tahun 2010-2014 .....	263

Tabel 2.120	Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2011-2015 .....	265
Tabel 2.121	Rata-rata Lama Pengurusan Izin Tahun 2014 .....	266
Tabel 2.122	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di DIY .....	268
Tabel 2.123	Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010 – 2014.....	269
Tabel 2.124	Jumlah Penduduk DIY menurut dan Angka Ketergantungan di DIY, Tahun 2014.....	269
Tabel 2.125	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 .....	272
Tabel 2.126	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dan Tahun 2015 .....	352
Tabel 2.127	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 .....	356
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2016.....	430
Tabel 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2013-2016 (dalam %).....	431
Tabel 3.3	Proyeksi Nilai PDRB ADHK 2000 DIY Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah).....	431
Tabel 3.4	Kontribusi PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), Tahun 2013-2017 (%) .....	433
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000) Tahun 2013-2017 (%) .....	434
Tabel 3.6	Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2016 Menurut Penggunaan (dalam juta rupiah) .....	435
Tabel 3.7	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2016 Menurut Penggunaan (dalam juta rupiah) .....	436
Tabel 3.8	Inflasi DIY Tahun 2013 s/d 2015.....	437
Tabel 3.9	Proyeksi Inflasi DIY, Tahun 2016-2017 (%) .....	439
Tabel 3.10	ICOR Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, Tahun 2010-2014 .....	441
Tabel 3.11	ICOR Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, Tahun 2010-2014.....	441

Tabel 3.12	ICOR Sektoral Metode Standar Lag=0, Lag=1, Lag=2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, Tahun 2010-2014 .....	443
Tabel 3.13	ICOR di Provinsi Jabalnutra (Investasi = PMTB + $\Delta$ Inventori), Tahun 2010-2014.....	444
Tabel 3.14	ICOR di Provinsi Jabalnutra (Investasi = PMTB), Tahun 2010-2014 .....	445
Tabel 3.15	Proyeksi ICOR DIY Tahun 2015-2017 .....	446
Tabel 3.16	Angkatan Kerja DIY Tahun 2013 s/d 2015 (Agustus) ....	447
Tabel 3.17	Proyeksi Ketenagakerjaan DIY Tahun 2017.....	450
Tabel 3.18	Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk di DIY Tahun 2015-2017 .....	454
Tabel 3.19	Indeks Williamson DIY Tahun 2013 dan 2014.....	455
Tabel 3.20	Hasil Perhitungan Angka Proyeksi Indeks Williamson di DIY Tahun 2008-2017 .....	456
Tabel 3.21	Indeks Gini DIY Tahun 2013 dan 2014 .....	456
Tabel 3.22	Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2015-2017.....	457
Tabel 3.23	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2015-2018 .....	458
Tabel 4.1	Interkoneksi Pendekatan Prioritas dan Sasaran Pembangunan DIY .....	482
Tabel 4.2	Interkoneksi Sasaran Nasional dan Pemda DIY Tahun 2017 .....	486
Tabel 5.1	Rencana Program/ Kegiatan Bidang Sosial Budaya.....	495
Tabel 5.2	Isu Strategis Bidang Perekonomian .....	497
Tabel 5.3	Isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana.....	499
Tabel 5.4	Isu Strategis Bidang Pemerintahan.....	500



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pada Tahap Penyusunan RKPD .....	6
Gambar 1.2	Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD.....	9
Gambar 1.3	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD DIY ..	11
Gambar 2.1	Peta Daerah Istimewa Yogyakarta .....	13
Gambar 2.2	Komposisi Luas Wilayah DIY .....	13
Gambar 2.3	Peta Satuan Fisiografis DIY.....	17
Gambar 2.4	Peta Geologi DIY.....	20
Gambar 2.5	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di DIY .....	21
Gambar 2.6	Peta Aliran Sungai DIY .....	22
Gambar 2.7	Peta Iklim di DIY .....	26
Gambar 2.8	Peta Pola Ruang DIY.....	27
Gambar 2.9	Peta Peruntukan Lahan DIY .....	28
Gambar 2.10	Peta Kawasan Rawan Bencana DIY .....	36
Gambar 2.11	Perkembangan Jumlah Penduduk DIY Menurut Sensus Penduduk Antar Sensus Tahun 1971-2010 .....	37
Gambar 2.12	Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di DIY tahun 2014 – 2017 (ribu Jiwa) .....	39
Gambar 2.13	Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2010-2015.....	41
Gambar 2.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks KeperlahanKemiskinan DIY, 2010-2015 .....	43
Gambar 2.15	Pertumbuhan PDRB DIY, Tahun 2011-2015 .....	45
Gambar 2.16	Rasio Gini di DIY, Tahun 2010-2014.....	47
Gambar 2.17	Indeks Williamson DIY Tahun 2006-2014.....	48
Gambar 2.18	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional.....	50

Gambar 2.19	Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/Kota se- DIY Tahun 2014 .....	52
Gambar 2.20	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) DIY 2010-2014 .....	53
Gambar 2.21	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2014 .....	54
Gambar 2.22	Perbandingan Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Antar Provinsi 2012.....	58
Gambar 2.23	Perkembangan Jumlah Kematian Bayi DIY yang dilaporkan Tahun 2010-2014 .....	59
Gambar 2.24	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2010-2014.....	60
Gambar 2.25	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2008-2014 .....	62
Gambar 2.26	Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk DIY Tahun 2008-2013 .....	63
Gambar 2.27	Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang DIY Tahun 2011-2015 .....	63
Gambar 2.28	Pagelaran Seni dan Budaya .....	65
Gambar 2.29	Lokasi Youth Center Sebagai Percontohan Nasional .....	70
Gambar 2.30	Gelanggang Olah Raga Amongraga .....	70
Gambar 2.31	Grafik Angka Melek Huruf DIY dan Nasional .....	74
Gambar 2.32	Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota DIY 2014 .....	76
Gambar 2.33	Rata-Rata Lama Sekolah .....	77
Gambar 2.34	Nilai Angka Partisipasi Kasar .....	78
Gambar 2.35	Angka Partisipasi Murni (APM) SD,SMP, dan SLTA 2003-2014 .....	79
Gambar 2.36	Permukiman Padat di Kawasan Sungai Code .....	97
Gambar 2.37	Grafik Capaian IPM dan IPG DIY Tahun 2010 – 2013 .....	129
Gambar 2.38	Grafik Trend Komposisi Perempuan Pada Jabatan Birokratis Tahun 2011-2013 .....	132
Gambar 2.39	Perkembangan TFR DIY.....	138
Gambar 2.40	Grafik Perkembangan Unmet Need DIY Tahun 2010-2014	140

Gambar 2.41	Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin & Kegiatan Februari Tahun 2015.....	152
Gambar 2.42	Gambar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK ) di DIY Februari 2012-Agustus 2015.....	154
Gambar 2.43	Perkembangan TPAK di DIY Menurut Jenis Kelamin (Februari 2013-Agustus 2015) .....	155
Gambar 2.44	Perkembangan TPAK Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2011-2014(Agustus) .....	157
Gambar 2.45	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional Februari 2010- Februari 2015 (%) .....	158
Gambar 2.46	Pengembangan UKM di DIY .....	161
Gambar 2.47	Pengembangan UKM di DIY .....	163
Gambar 2.48	Persentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2015 Per Kabupaten/Kota .....	166
Gambar 2.49	Panggung Krapyak.....	170
Gambar 2.50	Beteng Kraton .....	170
Gambar 2.51	Persebaran Museum di DIY .....	172
Gambar 2.52	Museum Negeri Sonobudoyo II (Museum Condrokiranan)	173
Gambar 2.53	Salah Satu Isi di Museum Sandi.....	173
Gambar 2.54	Adat dan Tradisi yang Berkembang .....	177
Gambar 2.55	Beberapa Ragam Batik .....	180
Gambar 2.56	Pangan Lokal di DIY .....	192
Gambar 2.57	Grafik Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (Dalam Ton) Tahun 2011-2015 .....	193
Gambar 2.58	Ketersediaan Pangan per Kapita .....	195
Gambar 2.59	Grafik Produksi Telur Unggas Tahun 2011-2015* (angka sementara) .....	196
Gambar 2.60	Grafik Produksi Daging Ayam Tahun 2011-2015* (angka sementara) .....	196
Gambar 2.61	Grafik Jumlah Ketersediaan Pangan dalam Ukuran Energi di DIY Tahun 2011-2015 .....	197
Gambar 2.62	Grafik Ketersediaan Protein di DIY Tahun 2011-2015 ....	197
Gambar 2.63	Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2011-2015 ....	198

Gambar 2.64	Grafik Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2011-2015.....	199
Gambar 2.65	Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk DIY (Gram/Kapita/Hari) Tahun 2011-2015.....	200
Gambar 2.66	Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2011-2015 .....	200
Gambar 2.67	Gambar Arsip Foto .....	207
Gambar 2.68	Gambar Arsip Tekstual .....	208
Gambar 2.69	Gambar Preservasi Arsip .....	209
Gambar 2.70	Naskah Sumber Arsip .....	211
Gambar 2.71	Sistem Informasi Kearsipan Statis.....	212
Gambar 2.72	Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY .....	214
Gambar 2.73	Suasana Nyaman Ruang Koleksi Ghratama Pustaka, Gedung Perpustakaan Baru DIY.....	215
Gambar 2.74	GIS Perpustakaan DIY.....	218
Gambar 2.75	Aplikasi Jogja Library For All .....	219
Gambar 2.76	Jogja Library Center di Ruas Jalan Malioboro Nomor 175 .....	220
Gambar 2.77	Perpustakaan Jogja Expo Center.....	221
Gambar 2.78	Minapadi di Kab. Sleman .....	222
Gambar 2.79	Grafik Luas Sawah di DIY Tahun 2011-2015 .....	223
Gambar 2.80	Komoditas Pangan Lokal DIY.....	223
Gambar 2.81	Grafik Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar di DIY Tahun 2011-2015.....	225
Gambar 2.82	Jumlah Populasi Sapi Potong tahun 2011-2015 .....	228
Gambar 2.83	Kondisi Peternakan Sapi di DIY .....	229
Gambar 2.84	Grafik Populasi Sapi Perah, Kambing, Itik di DIY (Dalam Satuan Ekor) Tahun 2011-2015 .....	230
Gambar 2.85	Intensitas Konsumsi Final Provinsi DIY 2009-2012 .....	237
Gambar 2.86	Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY .....	240
Gambar 2.87	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan DTW di DIY.....	241
Gambar 2.88	Sebaran Pengunjung ODTW di Kabupaten/Kota .....	242

Gambar 2.89	Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2011-2015 .....	243
Gambar 2.90	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya DIY (Ton), Tahun 2011-2015 .....	245
Gambar 2.91	Nilai Tukar Petani DIY, 2010-2014.....	254
Gambar 2.92	Peta Sebaran Infrastruktur Persampahan KPY .....	260
Gambar 2.93	Jumlah Layanan Pengolahan Air Limbah Terpusat per Kecamatan.....	261
Gambar 3.1	Grafik Perkembangan Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2008-2017 .....	437
Gambar 3.2	Pola Inflasi DIY .....	438
Gambar 3.3	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan ICOR DIY, Tahun 2001-2014 .....	440
Gambar 3.4	ICOR DIY Tahun 2008-2017 .....	446
Gambar 3.5	Grafik Jumlah Penduduk dan Proyeksi Penduduk yang Bekerja di DIY tahun 2008-2017 .....	448
Gambar 3.6	Pengangguran Terbuka di DIY tahun 2008-2017 .....	449
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional.....	449
Gambar 3.8	Jumlah Angkatan Kerja di DIY tahun 2008-2017 .....	450
Gambar 3.9	Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2010 - September 2015 (dalam ribu orang) .....	452
Gambar 3.10	Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan di DIY dan Nasional Tahun 2010-2015 .....	453
Gambar 3.11	Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY Tahun 2008-2017 .....	453
Gambar 3.12	Grafik Hasil Perhitungan Angka Proyeksi Indeks Williamson di DIY Tahun 2008-2017.....	455
Gambar 3.13	Indeks Gini di DIY Tahun 2008-2017.....	457
Gambar 4.1	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017 .....	471
Gambar 4.2	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017.....	472
Gambar 4.3	Skema Perencanaan Pembangunan Menurut Permendagri 54 Tahun 2010 .....	490

Gambar 5.1 Konsep Pembangunan Perkonomian 2017..... 497

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta seperti halnya provinsi-provinsi lain di Indonesia, senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan di berbagai aspek masyarakat di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya seperti konservasi lingkungan, hak asasi manusia, dan teknologi informasi. Upaya tersebut dilaksanakan dalam proses pembangunan yang dilakukan tiap tahunnya. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, namun juga melihat konteks perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal dan regional, nasional maupun internasional dalam berbagai bentuk tantangan dan peluang. Perkembangan lingkungan yang dinamis baik di semua aspek kehidupan menghasilkan sebuah tantangan baru bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Daerah Istimewa Yogyakarta dihadapkan kepada kompleksitas permasalahan yang saling terkait antar sektor dan antar kepentingan, di lain pihak DIY mempunyai cita-cita akhir pembangunan yang harus dicapai yaitu berkarakter, berbudaya, maju, dan makmur. Untuk mengakomodir berbagai aspek lingkungan pembangunan tersebut, proses pembangunan membutuhkan suatu landasan pemikiran yang komprehensif untuk menangkap peluang dan tantangan yang ada dimana landasan ini mampu memetakan kerangka permasalahan secara jelas dan terukur dan juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di tengah kompleksitas.

Proses pembangunan juga mempertimbangkan upaya optimalisasi sumber daya-sumber daya yang dimiliki daerah dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat dan daerah setempat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Hal-hal tersebut telah menjadi tantangan yang harus diantisipasi di setiap proses pembangunan. Tantangan tersebut menuntut proses pembangunan di DI Yogyakarta untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebuah agenda pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat dan sektor di dalam DI Yogyakarta. Lebih lanjut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (2012) dalam rangka menyongsong peradaban baru yang mana DI Yogyakarta dihadapkan dengan realitas sosial yang begitu dinamis dan saling terkait, perlu kebijakan konkret untuk melaksanakan pembangunan

yang fokus, terarah, dan efektif melalui prioritas sektor yang dijelaskan di 9 bidang strategis dalam Arah Kebijakan Renaisans Yogyakarta. Prioritas Renaisans Yogyakarta terdiri dari: (1) Pendidikan, (2) Pariwisata, (3) Teknologi, (4) Ekonomi, (5) Energi, (6) Pangan, (7) Kesehatan, (8) Keterlindungan Warga, dan (9) Tata Ruang dan Lingkungan. Kesembilan sektor ini akan menjadi prioritas pembangunan dengan berpegang kepada Budaya Sebagai Payung dan Arus Utama dalam Pembangunan.

Secara umum, pemahanan tentang pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Hal itu berimplikasi bahwa pembangunan DIY harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis.

Pada tataran pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Perhatian yang besar dan mendalam layak diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD mengingat pentingnya RKPD secara strategis dalam keseluruhan tahap pembangunan daerah. Hal itu diupayakan agar dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Secara umum, dokumen RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.  
Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:
  - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
  - b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

### 2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

#### a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

#### b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

### 3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.

### 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum SKPD. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara SKPD, Bappeda

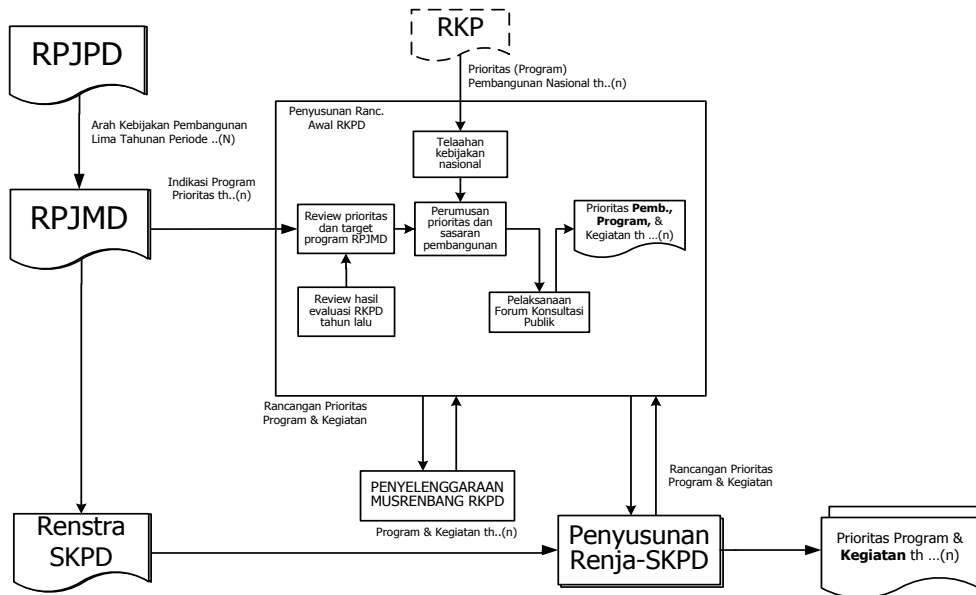
DIY dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
  - b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
  - c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
  - d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
  - e. Sinergi dengan RKP.
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.  
Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
6. Penetapan RKPD.  
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

Rancangan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Penyusunan RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ke-5 atau tahun terakhir dari RPJMD DIY 2012-2017. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyelarasan:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah DIY dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD DIY.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah DIY dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD DIY.

Sedangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.



Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

**Gambar 1.1 Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pada Tahap Penyusunan RKPD**

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2017 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang no 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

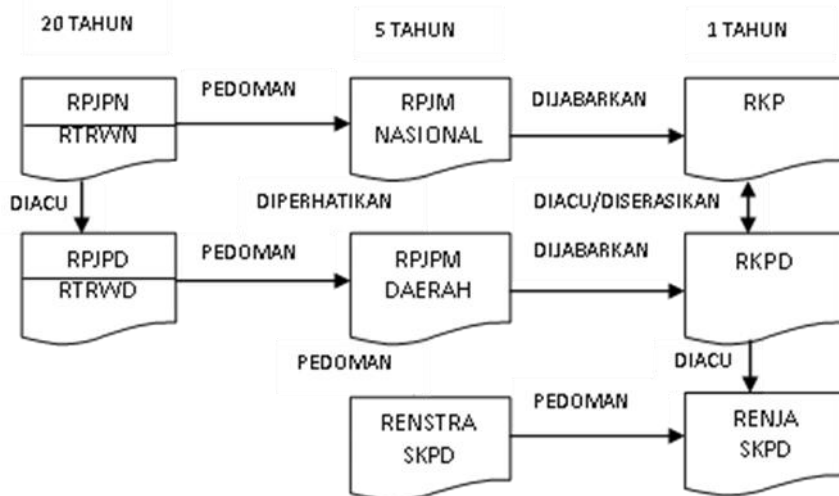
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ....Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY;
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

**Gambar 1.2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD**

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

#### 1.4 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun

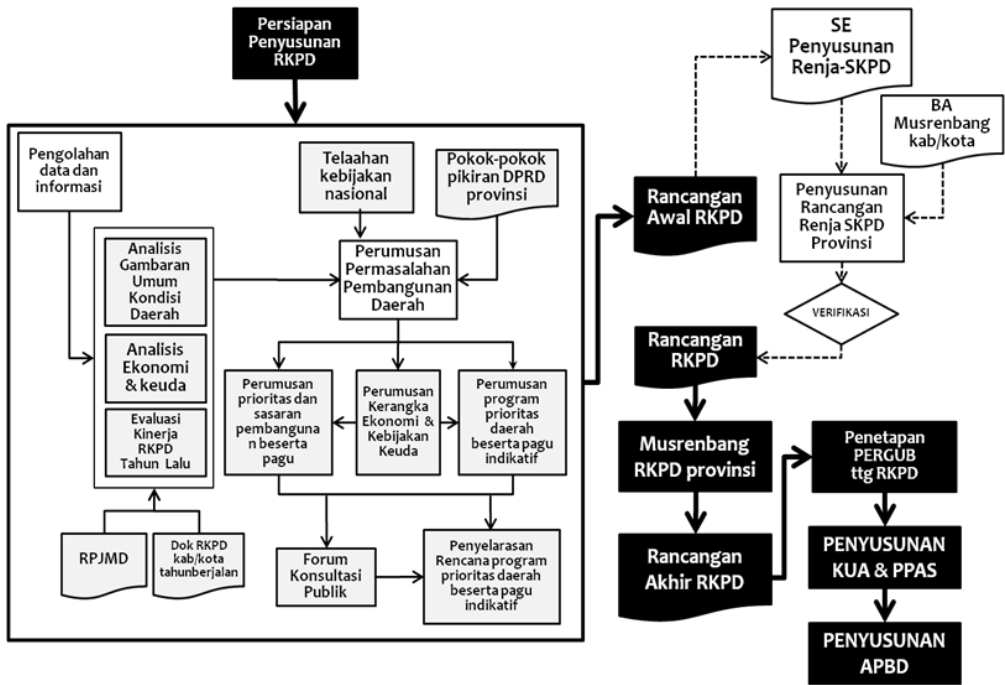
- berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.  
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
  4. Bab IV Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.  
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
  5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.  
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

### 1.5 Maksud dan Tujuan

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2017.





Gambar 1.3 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD DIY

## **BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

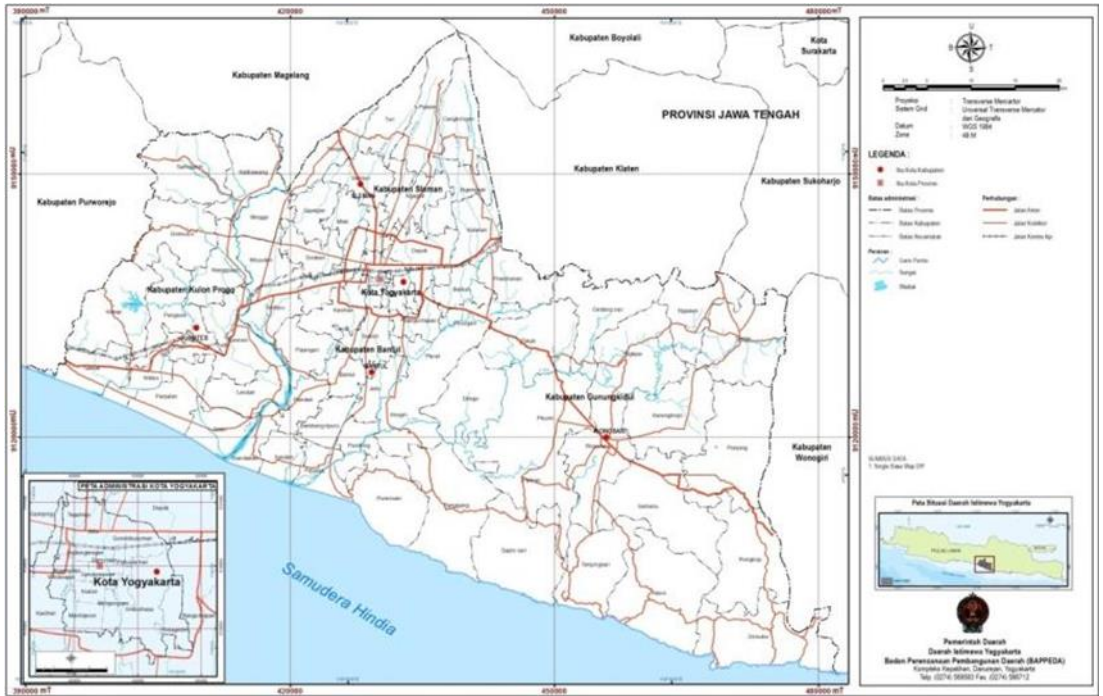
#### **2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah.

##### **2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

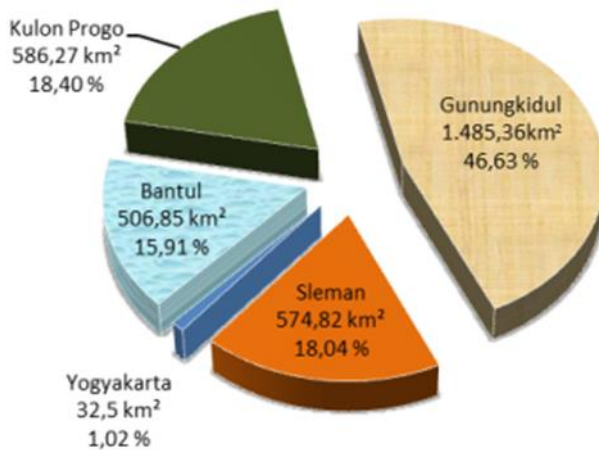
DIY secara astronomis terletak antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Sementara itu dilihat dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa Bagian Selatan. Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DIY memiliki batas-batas :

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02% dengan rincian pembagian proporsi luas wilayah seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014

Gambar 2.2 Komposisi Luas Wilayah DIY

Secara administratif, DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

**Tabel 2.1 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012**

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
Kulonprogo	Wates	12	88
Bantul	Bantul	17	75
Gunungkidul	Wonosari	18	144
Sleman	Sleman	17	86
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
DIY	Yogyakarta	78	438

Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis**

Kabupaten/Kota	Pesisir	Bukan Pesisir			Jumlah
		Lembah/ Daerah Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran	
Kulon Progo	10	-	22	56	88
Bantul	5	-	11	59	75
Gunungkidul	18	-	56	70	144
Sleman	-	-	11	75	86
Yogyakarta	-	-	-	45	45
DIY	33	0	100	305	438

Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014

Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan, hal ini menjadikan DIY berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIY memiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah DIY tersebut disajikan seperti dalam Tabel berikut ini.

**Tabel 2.3 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY**

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpina Lawang
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayungsiratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang
		Tepus	Timang
		Purwodadi	Ngondo Watupayungsiyung Watupanjang Watunglambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek
5	Girisubo	Jepitu	Watutogog Jungwok Watutopi Ngusalan
		Tileng	Kalong Amben
		Pucung	Watugrek
		Songbanyu	Gungunggandul Godeg Baron Layar Krokoh

### 2.1.1.3 Topografi

Topografi umumnya menampilkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identitas jenis lahan. Relief adalah bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan atau ditentukan berdasarkan perbedaan ketinggian (amplitude) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (landform). Sedang topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (landform) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng.

Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan. Penjabarannya adalah sebagai berikut :

### a. Kemiringan lahan

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km<sup>2</sup>, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km<sup>2</sup>.

### b. Ketinggian lahan

Luas wilayah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terbagi kedalam beberapa karakter topografis. Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.

DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

- Satuan Pegunungan Selatan, seluas  $\pm$  1.656,25 km<sup>2</sup>, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
- Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas  $\pm$  582,81 km<sup>2</sup>, ketinggian 80–2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas  $\pm$  215,62 km<sup>2</sup>, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo

sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumpuk pasir;

- Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas  $\pm 706,25 \text{ km}^2$ , ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Sumber : Bappeda DIY, 2013

Gambar 2.3 Peta Satuan Fisiografis DIY

#### 2.1.1.4 Geologi

Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000 tahun 1977. Formasi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (TmPk), Formasi Wonosari - Punung (Tmwl), Formasi Sentolo (TmPs), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tmss), Formasi Semilir (Tms), Formasi Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm).

Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (Tmpek). Patahan berupa sesar turun dengan pola *antithetic fault block*, terdapat antara lain pada terban Bantul.

a. Aluvium (Qa)

Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal.

Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.

b. Formasi Gunungapi Merapi (Qvm)

Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.

c. Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo)

Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.

d. Formasi Kepek (Tmpek)

Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.

e. Formasi Wonosari-Punung (Tmwl)

Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan.

Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batugamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu.

Karakteristik yang tersusun dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal



yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memiliki karakteristik mudah meloloskan air.

f. Formasi Sentolo (Tmps)

Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Kremlungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari dari batugamping dan batupasir napalan.

g. Formasi Oyo (Tmo)

Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ni terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.

h. Formasi Sambipitu (Tmss)

Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batulempung.

i. Formasi Semilir (Tms)

Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batulempung tufaan.

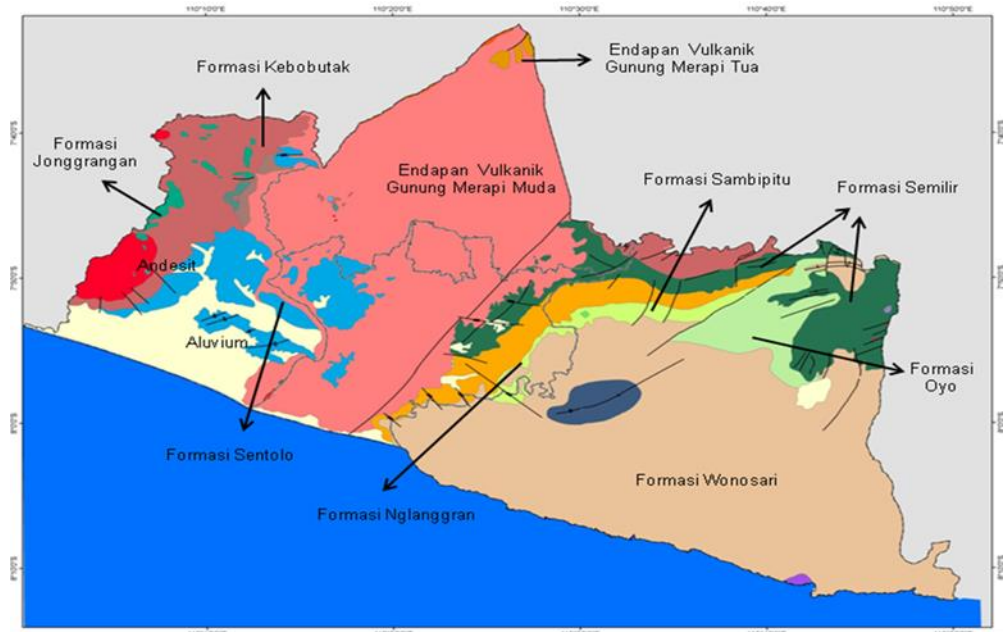
j. Formasi Kebo-Butak (Tomk)

Formasi Kebo-Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini terusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batupasir dan batu lempung andesit di bagian atasnya.

Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batu lanau) dengan bahan sedimen

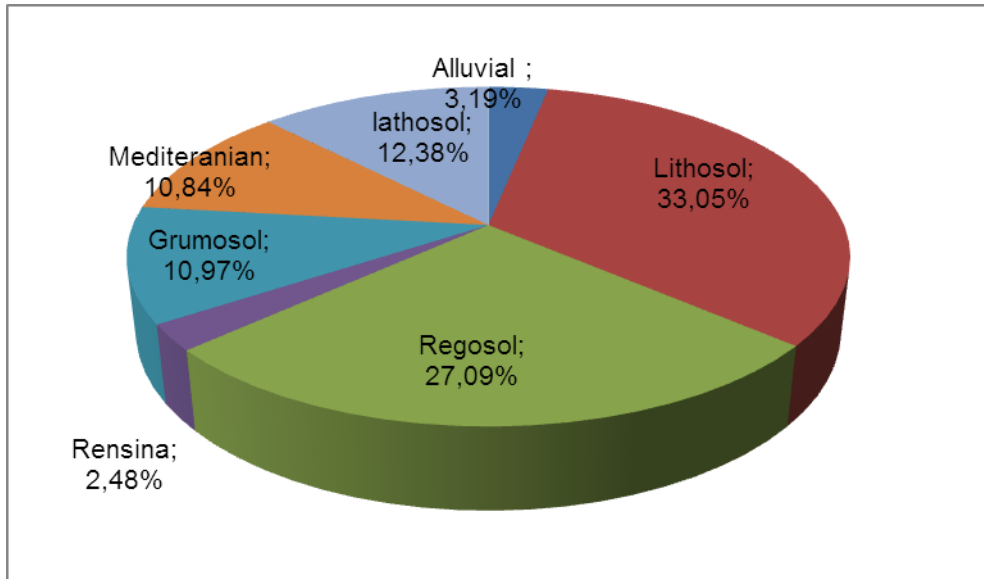
fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.



sumber: (BAPPEDA, 2013)

Gambar 2.4 Peta Geologi DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal ini disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunung Api Merapi yang mengandung tanah regosol seluas 863,06km<sup>2</sup> atau sekitar 27,09%. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sementara jenis tanah lain di DIY berupa tanah aluvial seluas 101,74 km<sup>2</sup>, lithosol 1.052,93km<sup>2</sup>, resina 78,83km<sup>2</sup>, grumusol 349,35km<sup>2</sup>, mediteran 345,40km<sup>2</sup>, dan lathosol 394,49km<sup>2</sup>.

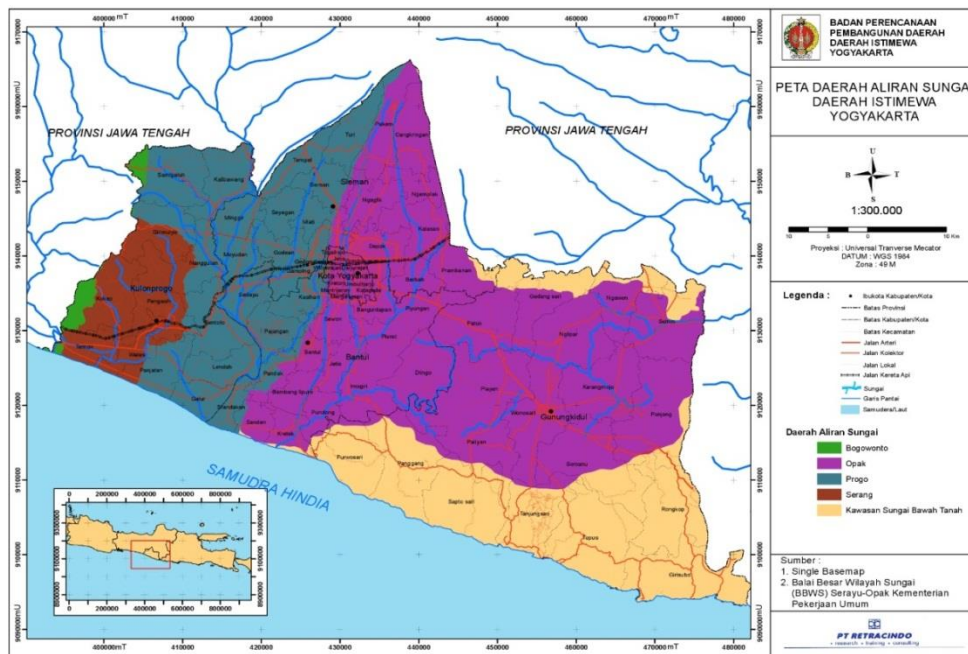


Sumber : DDA 2014, Provinsi DIY

**Gambar 2.5** Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di DIY

### 2.1.1.5 Hidrologi

Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 4 DAS, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan sedikit DAS Bogowonto. Hanya DAS Serang saja yang seluruh wilayahnya berada di DIY sedangkan DAS lainnya sebagian wilayahnya terutama bagian hulunya berada di Provinsi Jawa Tengah. Terminologi DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Peta pembagian DAS ini dapat dilihat pada Gambar Peta Aliran Sungai dibawah ini



Sumber : Roadmap Pengelolaan dan Pengendalian LH, 2014

### Gambar 2.6 Peta Aliran Sungai DIY

DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia melalui wilayah Kab. Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah :

- a) DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.
- b) DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- c) DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekikjamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat dari kondisi aquifer yang ada di wilayah tersebut. Pada

prinsipnya, akuifer di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) akuifer, yaitu :

- *Mayor Aquifer*, dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah mayor akuifer adalah: Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.
- *Minor aquifer*, dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah *minor aquifer* : Formasi Wates, Gumuk pasir
- *Poor aquifer*, dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesite tua.
- *Non aquifer*, dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah : Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggran, serta Formasi Nanggulan.

**Tabel 2.4 Potensi Ketersediaan Air Sampai Tahun 2011 (dalam juta m<sup>3</sup>)**

DAS	DAS Serang	DAS Progo	DAS Opak	DAS Oyo	DTA Karst
Volume Air Permukaan	311,59	3.964,59	610,48	1.455,37	1.478,18
Volume Air Tanah	51,12	458,12	432,01	2.224,41	1.013,73
Potensi Sumberdaya Air	362,70	4.422,71	1.042,49	3.679,78	2.491,91

Sumber: NSAD, Bappeda DIY, 2012

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

**Tabel 2.5 Debit Rerata Sungai di DIY**

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m <sup>3</sup> /det)					
	2012		2013		2014	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Sungai Progo (Duwet)	0,37	292,49	1,26	148,45	0,03	120,83
Sungai Bedog (Guwosari)	1,82	33,75	2,66	12,71	1,75	10,36
Sungai Code (Kaloran)	0,79	13,32	1,09	3,71	0,99	2,76
Sungai Winongo (Padokan)	0,07	11,96	0,21	5,01	0,26	4,59
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,17	11,71	0,43	2,67	0,26	2,48
Sungai Opak (Pulo)	0,002	3,93	0,02	0,89	0,05	0,74

Sumber: Bidang SDA, Dinas PUP ESDM 2014

Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk SBT Bribin sebesar 0,95 m<sup>3</sup>/det, SBT Ngobaran 0,70 m<sup>3</sup>/det, SBT Seropan 0,80 m<sup>3</sup>/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m<sup>3</sup>/det.

Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan CAT yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1200 km<sup>2</sup>, yang meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Perhitungan volume resapan air tanah yang dilakukan melalui rumusan kesetimbangan air dan pengukuran fluktuasi muka airtanah mendapatkan bahwa volume imbuhan air di cekungan ini mencapai 443 juta m<sup>3</sup> /tahun. Perhitungan volume air dalam akuifer mendapatkan bahwa 3,5 milyar m<sup>3</sup> air terkandung dalam akuifer. Hal ini menunjukkan bahwa, pada musim kemarau yang panjang eksploitasi terhadap airtanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air.

Total ketersediaan air di DIY adalah 11.999.000,58m<sup>3</sup>/tahundan pemanfaatannya untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian sebanyak 1.672.000,98 m<sup>3</sup>/tahun. (Neraca Sumber Daya Alam Daerah DIY; 2012)

Dalam rangka keperluan aktivitas pertanian, pemenuhan kebutuhan air irigasi juga dilaksanakan dengan memanfaatkan air tanah dalam atau sumur bor atau dikenal dengan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat pada 95 jaringan irigasi air tanah, Kabupaten Gunungkidul 51 buah dan Kabupaten Sleman 44 buah. (*Dinas PUP PSDM, 2012*)

#### 2.1.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim merupakan suatu potensi sangat berpengaruh pada daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu Angin musim barat daya (Muson Barat) dan Angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia, terjadi banyak penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Deskripsi klimatologi DIY yang diuraikan berupa curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin. Parameter iklim ini sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Menurut Catatan Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika, stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, dalam buku DDA 2015 yang diterbitkan oleh BPS, pada Tahun 2014 suhu udara rata-rata di DIY menunjukkan angka 26,3°C, dengan suhu minimum 21,2°C dan suhu maksimum 32,7°C.

Curah hujan sebagai input air ke permukaan bumi membawa akibat pada variasi potensi hidrologi daerah bersangkutan, sehingga uraian hidrologi daerah tidak boleh dipisahkan dengan kondisi klimatologisnya, terutama dengan curah hujan. Rata-rata curah hujan perbulan sekitar 169 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan 13 kali.

Untuk kelembaban udara tercatat minimum 42% pada bulan Agustus dan maksimum 100% pada bulan Januari, Februari, November dan Desember. Tekanan udara antara 1010,1 mb – 1019,9 mb, arah angin terbanyak

adalah Angin Barat Daya dengan kecepatan angin rata-rata 0,2 – 15,0 knot.



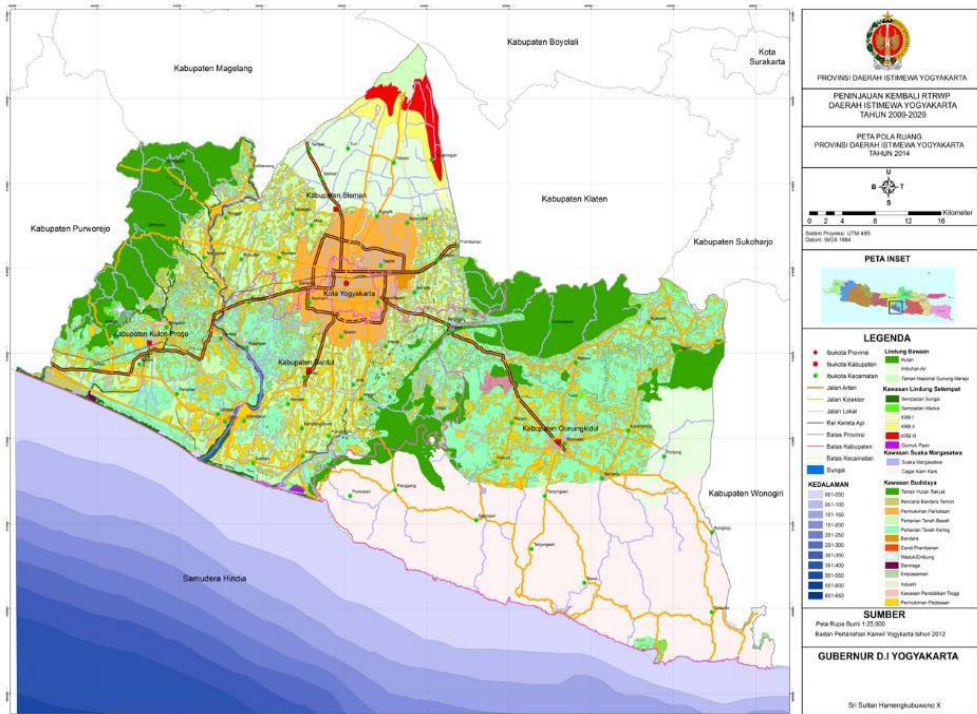
Sumber : Bappeda DIY, Tahun 2013

Gambar 2.7 Peta Iklim di DIY

### 2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Berdasarkan hasil analisis GIS dapat ditunjukkan bahwa kawasan lindung di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sekitar 39,64% dari keseluruhan luas wilayah, sedangkan sisanya adalah kawasan budidaya. Persentase luasan kawasan lindung tersebut cukup besar dibandingkan persentase kawasan budidaya dengan nilai sekitar 60,36% karena kawasan budidaya terdiri dari berbagai macam kawasan. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian. Penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan di dalam peta Pola Ruang di bawah ini.





Sumber : DPUP-ESDM DIY, Tahun 2014

### Gambar 2.8 Peta Pola Ruang DIY

Berdasarkan perhitungan necara sumberdaya lahan diperoleh hasil analisis bahwa penggunaan lahan di wilayah DIY mengalami perubahan penggunaan lahan sebesar 2.754,01 ha. Perubahan terbesar adalah penambahan areal permukiman baru seluas 1.595,94 ha, kemudian menyusutnya areal sawah seluas 1.207,49 ha dan pertanian lahan kering seluas 560,78 ha. Perhitungan tersebut dilakukan dengan teknik penginderaan jauh menggunakan CITRA SATELIT ASTER dari hasil perekaman tahun 2007 dan 2012, yang memiliki resolusi spasial 15 meter, (Sumber : Bappeda DIY, 2012).

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY disampaikan bahwa Kawasan Lindung direncanakan seluas lebih kurang 155.810,75 hektar atau sekitar 48,98% dari total luas wilayah DIY, dan kawasan budidaya direncanakan seluas lebih kurang 162.275 hektar atau sekitar 51,02% dari total luas wilayah DIY. Rencana luasan kawasan lindung dan kawasan budidaya tersebut mengalami perubahan setelah dilakukannya kegiatan peninjauan kembali Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY yang dimulai pada tahun 2014. Rencana luasan kawasan lindung berubah menjadi 122.296,73 hektar dan kawasan



Kawasan budidaya tanaman semusim/permukiman tersebut meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta (Kartamantul), yaitu di sebagian besar Kabupaten Sleman kecuali di sekitar puncak Gunung Merapi, sebagian kecil Kabupaten Gunungkidul (sekitar Wonosari, Karangmojo, Playen), dan sebagian kecil Kabupaten Kulon Progo (sekitar daerah Temon, Wates).

Peruntukan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan penyangga sebesar 30,17% yang tersebar di semua daerah kecuali Kartamantul. Kawasan penyangga yang dominan terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Peruntukan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan lindung sebesar 11,6% dan memiliki sebaran yang hampir sama dengan kawasan penyangga. Kawasan lindung terutama terdapat di kawasan bentang alam karst.

Selanjutnya peruntukan kawasan budidaya tahunan memiliki porsi paling kecil yaitu sekitar 8,27%. Kawasan budi daya tanaman tahunan terdapat terdapat di semua daerah dengan jumlah relatif sedikit.

### **2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah.

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial ekonomi, sistim pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas.

Prinsip-prinsip yang harus diacu dalam strategi pengembangan potensi wilayah merujuk pada strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Yogyakarta menyongsong peradaban baru adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pembangunan harus selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan tata ruang, dan pengelolaan aspek pertanahannya;
- Tata ruang dan infrastruktur (dalam bingkai wilayah maritim, agraris, dan niaga) mencakup hubungan sinergis antara fungsi ruang darat, laut, udara, dan sungai dengan bertumpu pada kerjasama niaga antar wilayah yang mengandalkan potensi darat, laut, udara, dan sungai;
- Implementasi ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan ekologis dan desentralisasi tata kelola lingkungan;
- Efektifitas kontrol lingkungan dalam skala komunitas lokal yang langsung memiliki interdependensi terhadap alam sekitar kehidupan mereka.

Wilayah pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/pembangunan/ *development*. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Kawasan budidaya memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, kawasan budidaya di DIY terdiri dari:

### 1) Kawasan Hutan Produksi

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diantaranya adalah:

- a. melestarikan kawasan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan papan, energi dan pangan;
- b. mengembangkan hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
- c. mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan produksi;
- d. mempertahankan fungsi kawasan hutan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diarahkan pada:

- a. Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,1000 ha;

b. Kabupaten Kulon Progo seluas 601,6000 ha.

## 2) Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering. Kebijakan pada kawasan pertanian lahan basah antara lain adalah:

- a. melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Kebijakan pada kawasan pertanian lahan kering diantaranya adalah:

- a. melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
- b. mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;
- c. mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan kering;
- d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum.

Penetapan kawasan pertanian di DIY diarahkan sebagai berikut:

- a. Kawasan pertanian lahan basah terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
- b. Kawasan pertanian lahan kering terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

DIY telah memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka melindungi lahan pertanian abadi dan mendukung ketahanan pangan. Adapun Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW Daerah ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha (merupakan lahan inti). Lahan di luar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di wilayah:

- a. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha;
- b. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha;
- c. Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan
- d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha.

### 3) Kawasan Pertambangan

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertambangan adalah memanfaatkan potensi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan diarahkan sebagai berikut:

Kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi dapat dilakukan di kawasan sebagai berikut:

- a. kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana alam;

- b. kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, kawasan industri, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Gunungkidul untuk pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong dan Panggang, sementara untuk pertambangan kaolin di Kecamatan Semin.
- b. Kabupaten Kulon Progo yaitu:
  - Perbukitan Menoreh untuk pertambangan emas di Kecamatan Kokap, mangan di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, dan Pengasih;
  - Kawasan Pesisir Pantai Selatan untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur.
- c. Kabupaten Sleman untuk pertambangan pasir di Kecamatan Pakem dan Minggir.

#### 4) Kawasan Industri

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi a) mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b) mengembangkan kegiatan industri yang tidak menimbulkan pencemaran. Arahan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

#### 5) Kawasan Pariwisata

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata adalah memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam. Arahan penetapan kawasan peruntukan pariwisata meliputi :

- a. Kawasan pariwisata budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
- b. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

- c. Kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

6) Kawasan Pendidikan Tinggi

Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan tinggi meliputi a) Memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada; b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendukung kawasan pendidikan tinggi. Arah penetapan kawasan pendidikan tinggi sebagai berikut:

- a. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru;
- b. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada terletak di kawasan perkotaan Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
- c. kawasan pendidikan tinggi baru terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

7) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan pariwisata, pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut. Arah penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY, yaitu:

- a. kawasan pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul
- b. kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul.

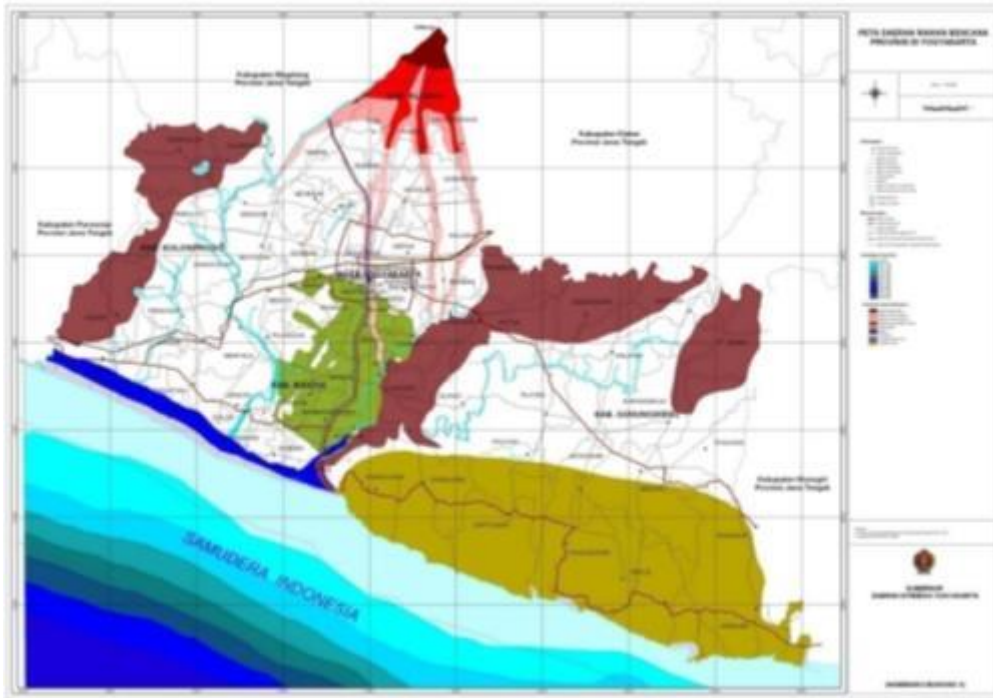
### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 menyebutkan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya pada pasal 14 disebutkan bahwa Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.



Wilayah rawan bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, meliputi:

- 1) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi.
- 2) Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.
- 3) Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
- 4) Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst.
- 5) Kawasan rawan bencana angin topan. Bencana alam akibat angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.
- 6) Kawasan rawan gempa bumi. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempa bumi.
- 7) Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut).



Sumber : RTRW DIY, Tahun 2009-2029

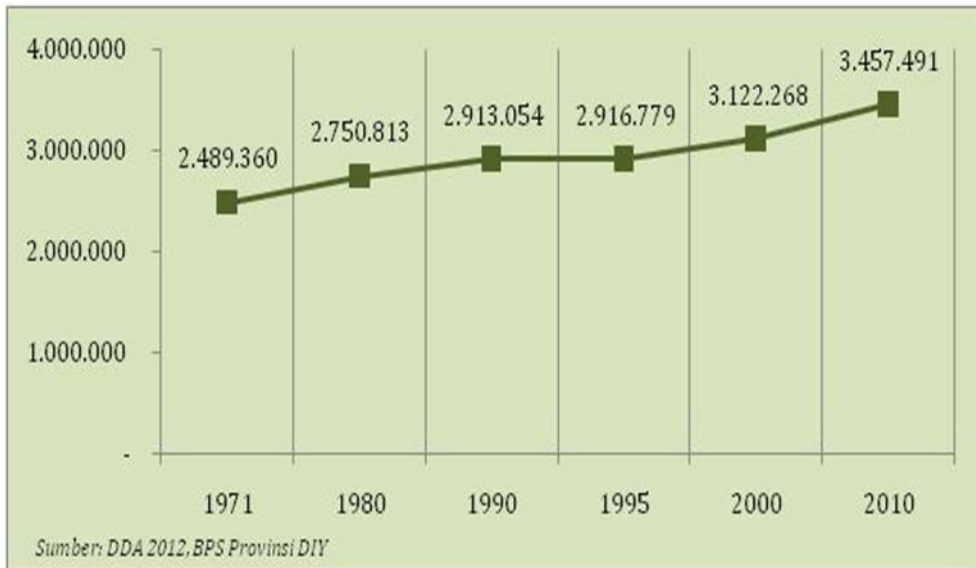
Gambar 2.10 Peta Kawasan Rawan Bencana DIY

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sedangkan potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yang mungkin terjadi di wilayah DIY antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan non-alam, selama ini masih relatif kecil.

#### 2.1.4 Demografi

Pertumbuhan penduduk DIY secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 1971 hingga 2010 jumlah penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk DIY tahun 1971 sebanyak 2.489.360 orang meningkat menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010 kemudian diperkirakan meningkat sebanyak 29.834 orang menjadi 3.487.325 orang pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dari hasil estimasi diperkirakan mencapai 3.514.762 jiwa.



**Gambar 2.11 Perkembangan Jumlah Penduduk DIY Menurut Sensus Penduduk Antar Sensus Tahun 1971-2010**

Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 1971-2010 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1990, struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

**Tabel 2.6 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 1971-2010**

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010
0 – 14	40,90	35,06	28,28	22,38	21,96

15 – 64	54,82	59,14	64,46	69,10	68,53
65 +	4,38	5,80	7,26	8,53	9,51
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS DIY, Tahun 2013

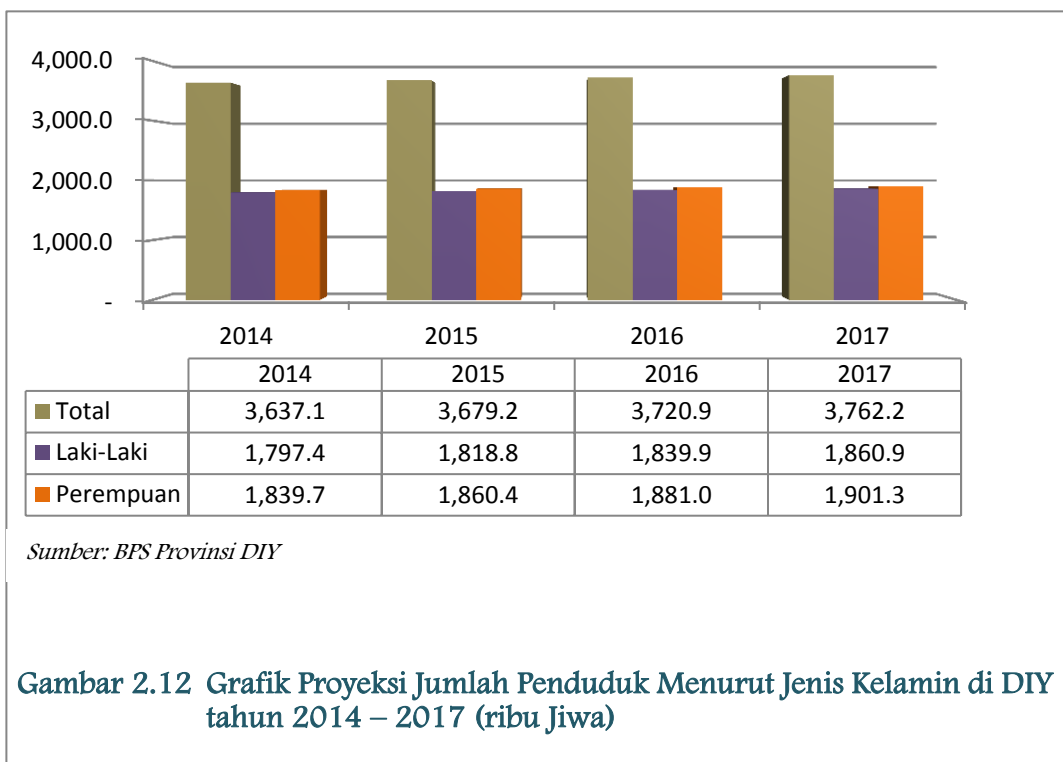
Pada tahun 2014, sebagian besar penduduk DIY tinggal di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.163.970 jiwa atau sebesar 32,00% dari total jumlah penduduk DIY di. Sedangkan daerah yang dihuni paling sedikit penduduk adalah Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 400.467 jiwa atau sekitar 11,00% dari total penduduk DIY.

**Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013**

Kab/Kota	2010					
	Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Sleman		1.093.110	1.107.304	1.114.833	1.147.037	1.163.970
Bantul		911.503	921.263	927.958	955.015	968.932
Gunungkidul		675.382	677.998	684.740	693.523	698.825
Kulon Progo		388.869	390.207	393.221	401.450	405.222
Kota Yogyakarta		388.627	390.553	394.012	397.828	400.467
<b>DIY</b>		<b>3.457.491</b>	<b>3.487.325</b>	<b>3.514.762</b>	<b>3.594.854</b>	<b>3.637.116</b>

Sumber: BPS DIY, Tahun 2013

Menurut angka proyeksi penduduk tahun 2014-2017 dari BPS, jumlah penduduk DIY pada tahun 2014 diproyeksikan sebanyak 3.637,1 ribu jiwa (penduduk perempuan 1.839,7 ribu jiwa dan laki-laki 1.797,4 ribu jiwa) dan pada tahun tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 3.762,2 ribu jiwa dengan penduduk perempuan sebanyak 1.901,3 ribu jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 1.860,9 ribu jiwa.



Sementara itu, Kota Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi (12.332 jiwa/Km<sup>2</sup>) di DIY meskipun jumlah penduduknya terkecil dibandingkan kabupaten lainnya karena wilayahnya yang sempit. Daerah yang paling tidak padat adalah Kabupaten Gunungkidul dengan tingkat kepadatan 470 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota, 2010-2014 (Jiwa/Km<sup>2</sup>)**

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Yogyakarta	11.958	12.077	12.234	12.241	12.322
Sleman	1.902	1.942	1.964	1.995	2.025
Bantul	1.798	1.819	1.844	1.869	1.911
Kulon Progo	663	672	680	685	691
Gunungkidul	455	461	466	467	470
<b>DIY</b>	<b>1.085</b>	<b>1.102</b>	<b>1.115</b>	<b>1.128</b>	<b>1.142</b>

\*) Angka Sementara

Sumber: DDA 2015, BPSProvinsi DIY

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu Pendekatan Perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendekatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

#### a. Penduduk Miskin

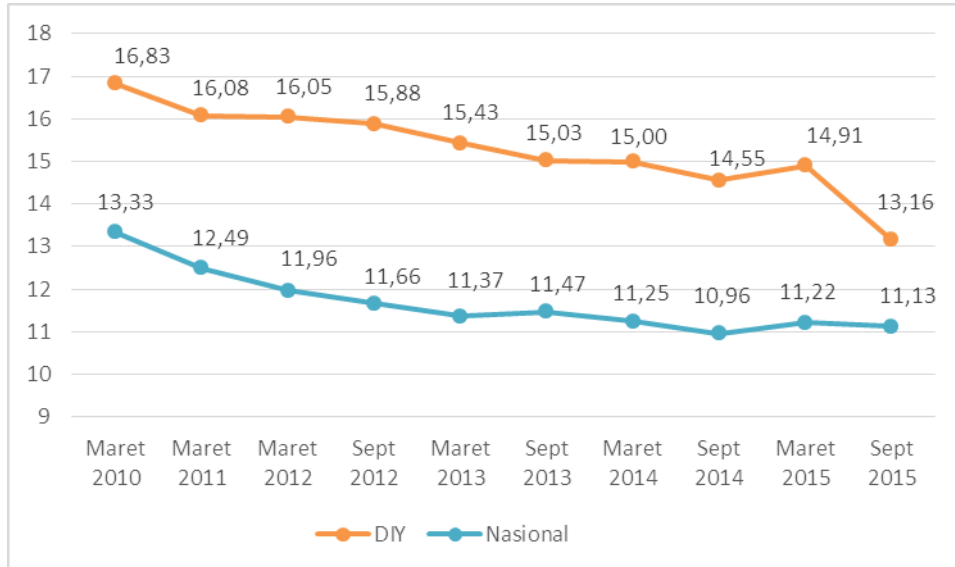
Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan DIY selama periode 2010-2015 mengalami peningkatan. Pada September 2014 garis kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp 321.056 per kapita per bulan. Sementara kondisi bulan September tahun 2015, tercatat garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 347.721 per kapita per bulan. Kenaikan tersebut dimungkinkan karena terjadinya inflasi. Jumlah penduduk miskin DIY, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan pada periode 2010 hingga 2015 cenderung mengalami penurunan dari 577,30 ribu orang pada Maret 2010 menjadi 485,56 ribu orang pada September 2015,

**Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2009-2013**

Periode Survey	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2010	234.282	577,30	16,83
Sept 2011	257.909	564,23	16,08
Maret 2012	260.173	565,32	16,05
Sept 2012	270.110	562,11	15,88
Maret 2013	283.454	550,19	15,43
Sept 2013	303.843	535,18	15,03
Maret 2014	313.452	544,87	15,00
Sept 2014	321.056	532,59	14,55
Maret 2015	335.886	550,23	14,91
Sept 2015	347.721	485,56	13,16

Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2014

Jika dilihat dari presentase penduduk miskin terhadap total penduduk DIY, tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan DIY tercatat sebesar 13,16% pada periode September 2015. Meskipun tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi, serta berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan di Pulau Jawa sebesar 10,52%. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.



Sumber: Susenas Maret 2010 – September 2015

**Gambar 2.13** Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2010-2015

Dilihat dari sebarannya, Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih kecil daripada di pedesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 11,93% mengalami penurunan 1,43 poin jika dibandingkan dengan keadaan September 2014 yang besarnya mencapai 13,36%. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2015 sebesar 15,62%, mengalami penurunan 1,26 poin jika dibandingkan dengan keadaan September 2014 yang mencapai 16,88%. Meskipun tingkat penduduk miskin di perkotaan lebih kecil, dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya arus urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan yang menyebabkan jumlah penduduk di kota meningkat pesat.

**Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2012-2014.**

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)
Maret 2010	308,36	13,98	268,94	21,95
Maret 2011	304,34	13,16	256,55	21,82
Maret 2012	305,89	13,13	259,44	21,76
September 2012	306,50	13,10	255,60	21,29
Maret 2013	315,47	13,43	234,73	19,29
September 2013	325,53	13,73	209,66	17,62
Maret 2014	333,03	13,81	211,84	17,36
September 2014	324,43	13,36	208,15	16,88
Maret 2015	329,65	13,43	220,57	17,85
September 2015	292,64	11,93	192,91	15,62

Sumber: Susenas, Maret 2010 – September 2015

Dilihat dari kontribusinya, lima komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di pedesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Dengan beras masih menjadi kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan, program-program terkait operasi pasar beras maupun beras untuk masyarakat miskin masih perlu dilanjutkan dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerima. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengeluaran untuk rokok kretek filter yang masih menempati urutan atas. Upaya-upaya promosi kesehatan untuk masyarakat perihal bahaya rokok harus terus diupayakan.

**Tabel 2.11 Lima Kontribusi Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah September 2014**

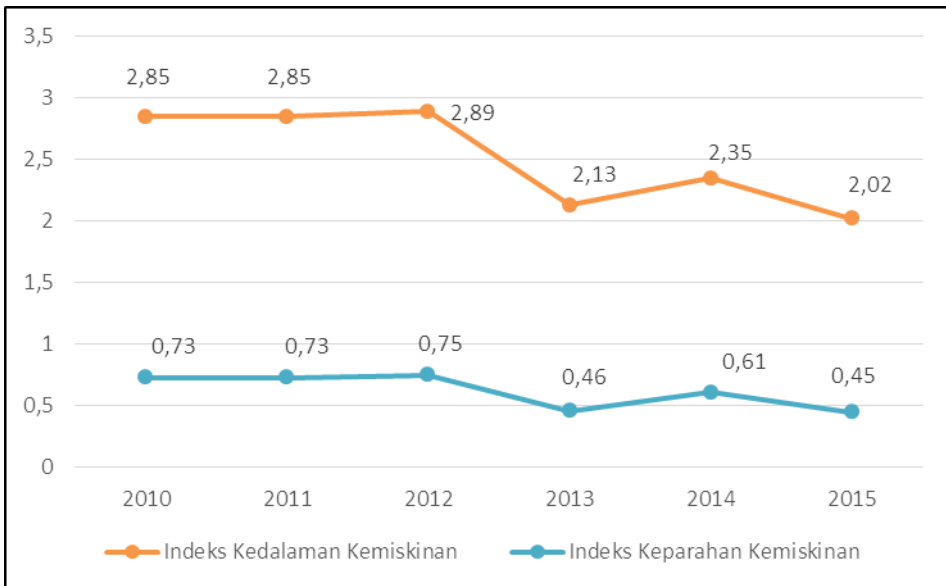
Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
<b>Makanan</b>		<b>Makanan</b>	
Beras	30,70	Beras	35,44
Rokok kretek filter	9,31	Rokok kretek filter	6,05
Daging ayam ras	5,58	Daging ayam ras	5,34
Telur ayam ras	5,56	Gula pasir	4,14
Tempe	4,06	Mie instan	3,91
<b>Non Makanan</b>		<b>Non Makanan</b>	
Perumahan	26,04	Perumahan	27,80



Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Bensin	16,75	Bensin	14,71
Pendidikan	9,46	Kesehatan	7,48
Listrik	7,59	Pakaian jadi anak-anak	6,98
Pakaian jadi anak-anak	4,97	Listrik	5,08

Sumber: Susenas September 2015

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan itu. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode September 2015 mengalami penurunan. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekat dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.



Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2014

Gambar 2.14 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan DIY, 2010-2015

**b. Pendapatan Perkapita**

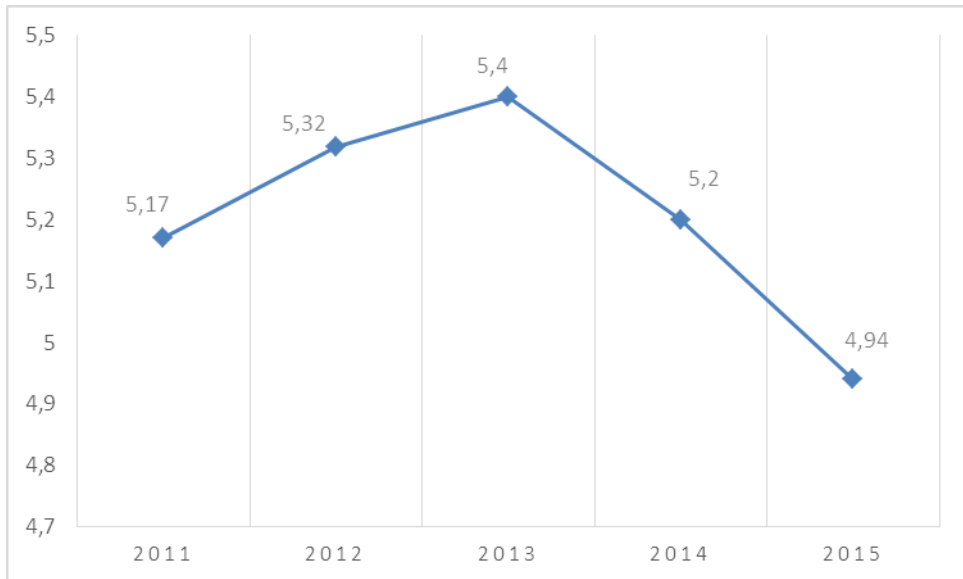
Kinerja perekonomian DIY selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh selalu meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 71,369 triliun dan pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 101,396 triliun. Ini berarti pula bahwa secara nominal PDRB meningkat sebesar 42,07% selama lima tahun.

**Tabel 2.12 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)**

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.805.134,5	8.640.411,7	9.449.019,7	9.769.112	10.848.369
Pertambangan dan Penggalian	455.989,7	467.147,5	495.039,5	537.599	573.133
Industri Pengolahan	10.280.006,9	10.242.467,7	11.563.733,8	12.614.921,0	13.236.292
Pengadaan Listrik dan Gas	91.000,6	90.992,0	86.515,1	89.669	92.610
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	79.885,1	83.130,3	89.645,3	102.670	109.697
Konstruksi	6.786.010,7	7.350.632,3	8.060.750,5	8.722.682	9.499.917
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.812.823,6	6.413.318,6	6.938.421,0	7.681.035	8.342.646
Transportasi dan Pergudangan	3.922.583,8	4.256.792,3	4.783.126,5	5.313.233	5.755.748
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.457.190,5	7.203.277,9	8.284.060,7	9.323.242	10.383.391
Informasi dan Komunikasi	6.700.372,8	7.331.839,4	7.572.218,9	7.897.507	8.244.242
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.412.032,7	2.696.113,0	3.170.932,7	3.602.561	4.028.358
Real Estate	4.891.400,5	5.429.459,0	5.815.245,1	6.497.271	7.143.655
Jasa Perusahaan	783.185,6	836.060,2	855.439,4	956.391	1.048.359
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.223.332,5	5.931.303,6	6.702.818,7	7.492.246	8.348.234
Jasa Pendidikan	6.050.414,1	6.364.491,8	6.816.002,1	7.600.855	8.598.744
Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	1.749.193,2	1.928.468,3	2.094.674,4	2.276.361	2.553.551
Jasa Lainnya	1.869.401,4	1.981.955,1	2.147.020,2	2.351.975	2.589.171
<b>PDRB</b>	<b>71.369.958,2</b>	<b>77.247.860,7</b>	<b>84.924.663,6</b>	<b>92.829.330</b>	<b>101.396.117</b>

Sumber: BPS DIY

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2011-2015 cenderung mengalami penurunan dari sebesar 5,17% pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 5,4% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,2 poin menjadi sebesar 5,2%. Bahkan menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 4,94%.



Sumber: BPS DIY

**Gambar 2.15** Pertumbuhan PDRB DIY, Tahun 2011-2015

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2015. Selama periode tahun 2011-2015 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik sebesar 34,66%. Nilai PDRB per kapita tahun 2011 tercatat sebesar Rp. 20,47 juta, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp. 27,56 juta di tahun 2015.

**Tabel 2.13** Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	71.369.958	77.247.861	84.924.543	92.829.330	101.396.117
Penduduk pertengahan	3.487.325	3.514.762	3.594.842	3.637.085	3.679.238

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
an tahun (orang)					
PDRB per kapita adh. Berlaku: (juta rupiah)	20,466	21,978	23,624	25,523	27,559
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	5,85	5,25	4,89	4,57	4,23

Sumber: BPS DIY, Tahun 2016

Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2010. Nilai riil PDRB per kapita terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp 19,51 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 22,68 juta di tahun 2015, atau terjadi kenaikan sebesar 16,25%. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

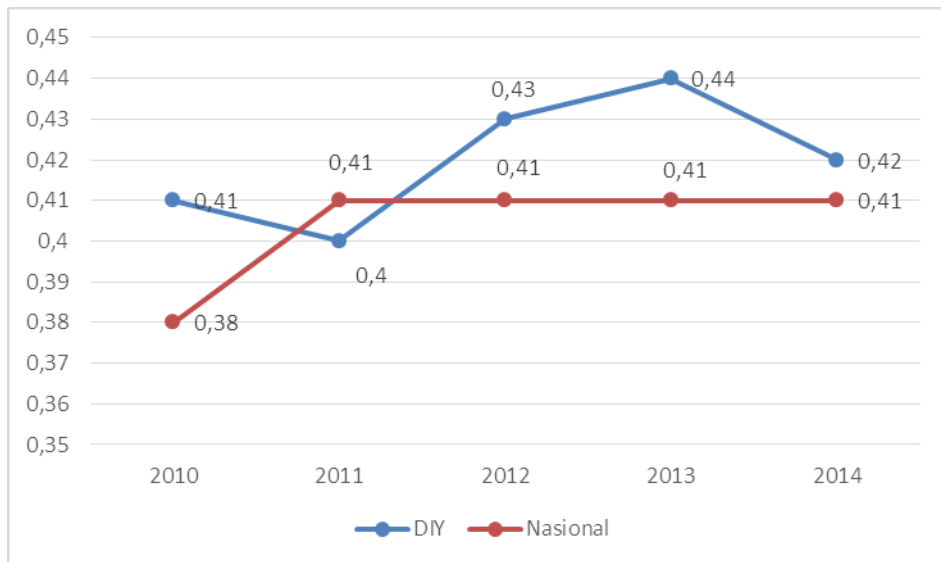
**Tabel 2.14 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (%)**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB adh. konstan 2010 (juta rupiah)	68.049.874	71.702.449	75.627.450	79.532.277	83.461.574
Penduduk pertengahan antahun (orang)	3.487.325	3.514.762	3.594.842	3.637.085	3.679.238
PDRB per kapita adh. konstan 2010 (juta rupiah)	9,513	20,400	21,038	21,867	22,684
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%)	5,58	5,36	5,06	4,94	4,74

Sumber: BPS DIY, Tahun 2016

**c. Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Regional**

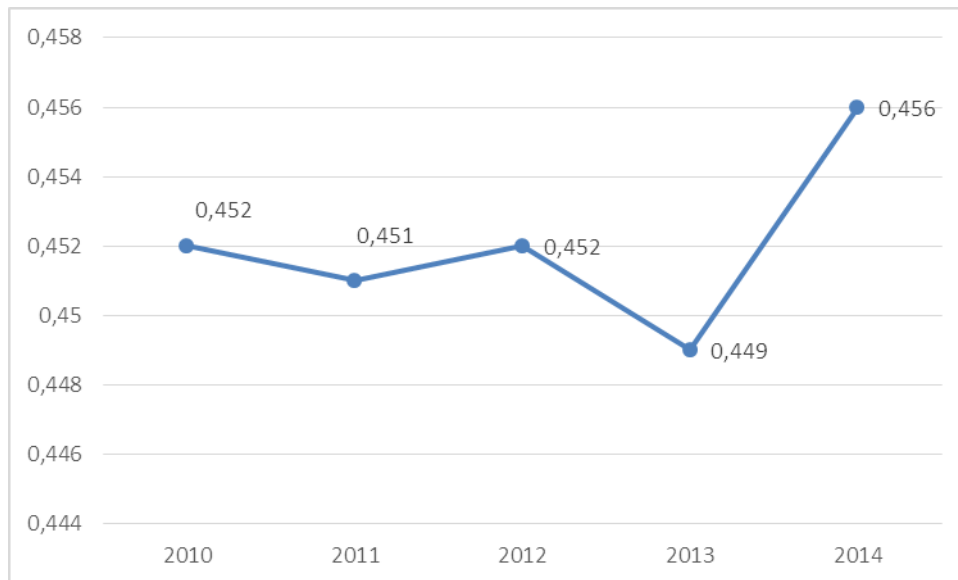
Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan di antaranya digunakan Rasio Gini dan Kriteria Bank Dunia yang paling lazim digunakan. Perkembangan rasio gini DIY tahun 2014 relatif menurun yaitu 0,42 dibandingkan Rasio Gini 2013 yang mencapai 0,44. Perkembangan Rasio Gini periode 2010-2014 masih cenderung meningkat dan berada di atas indeks Gini nasional atau distribusinya lebih timpang. Oleh karenanya masih perlu terobosan kebijakan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat golongan bawah untuk mengurangi kesenjangan dengan pendapatan masyarakat golongan atas.



Sumber: BPS DIY

**Gambar 2.16 Rasio Gini di DIY, Tahun 2010-2014**

Ketimpangan antar region yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2010-2014 menunjukkan kecenderungan peningkatan, yaitu dari 0,452 pada tahun 2010 menjadi 0,456 pada tahun 2014. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin memprihatinkan. Dengan demikian pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang ke depan lebih diarahkan untuk pemerataan ekonomi antar kabupaten/kota. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendorong program pembangunan di arahkan ke daerah-daerah yang tertinggal.



Sumber: BPS DIY

**Gambar 2.17 Indeks Williamson DIY Tahun 2006-2014**

Tabel nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota memperlihatkan perbandingan nilai nominal PDRB antar waktu dan antar daerah. Sebagai penyangga utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar secara relatif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sementara nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. Perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2014 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kondisi sebagian besar lahan pertanian pegunungan berbatu sehingga cara penanaman dan produktivitas komoditas pertaniannya juga tidak seperti di lahan pertanian subur. Sementara itu, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah terkecil tetapi mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar.

**Tabel 2.15 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013**)	2014
Kulonprogo	5.033.073,6	5.500.250,8	5.916.574	6.489.593,7	7.101.073,2
Bantul	12.114.059,1	13.290.666,6	14.510.832,4	16.138.755,1	17.977.499,1
Gunungkidul	8.848.037,9	9.739.094,4	10.545.354,5	11.530.340,8	12.715.578,4
Sleman	21.481.644	23.764.365,7	25.732.248,9	28.295.362,8	31.013.893,6
Kota Yogyakarta	17.202.154	18.997.186,1	20.536.855,5	22.537.791,9	24.691.267,4
<b>D I Y</b>	<b>64.678.968,6</b>	<b>71.291.563,6</b>	<b>77.241.865,3</b>	<b>84.991.844,3</b>	<b>93.499.311,7</b>

Sumber: BPS DIY

#### d. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

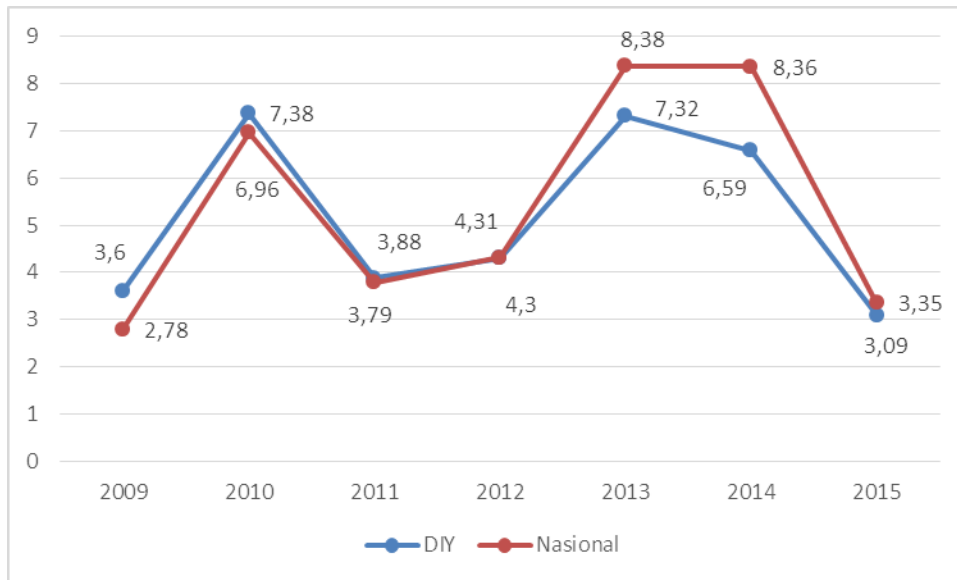
**Tabel 2.16 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014**

Bulan	Inflasi Bulanan				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jan	0,84	0,25	0,96	1,05	0,13
Feb	0,1	0,1	0,93	0,07	-0,40
Mar	0,21	0,36	0,79	0,14	0,15
Apr	-0,28	0,11	-0,3	0,07	0,38
Mei	0,13	0,05	-0,29	0,05	0,36
Jun	0,26	0,75	0,84	0,43	0,35
Jul	0,9	0,76	2,58	0,85	0,63
Agt	0,63	0,42	0,87	0,09	0,33
Sep	0,19	0,19	-0,24	0,49	0,04
Okt	0,04	0,38	0,61	0,28	0,01
Nov	0,33	0,2	0,2	1,13	0,13
Des	0,48	0,66	0,17	1,76	0,96
<b>Inflasi Tahunan</b>	<b>3,88</b>	<b>4,31</b>	<b>7,32</b>	<b>6,59</b>	<b>3,09</b>

Sumber: BPS DIY

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supplieside*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pola inflasi bulanan di Kota Yogyakarta seperti yang ditunjukkan oleh Tabel diatas selama tahun 2011-2015 biasanya mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, liburan tengah tahun dan liburan akhir tahun. Selain itu, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor seperti cuaca ekstrem, yang akan menyebabkan

gangguan pasokan pada beberapa komoditas sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang kemudian akan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.



Sumber: BPS DIY, 2016

**Gambar 2.18 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional**

Jika melihat pola inflasi tahunan selama tahun 2009-2015, inflasi Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pola inflasi kota Yogyakarta dapat dipertahankan lebih rendah dari inflasi nasional sejak tahun 2012.

Sementara itu jika dilihat dari kelompok pengeluaran, terjadi pergeseran kelompok yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi dari kelompok bahan makanan (pada tahun 2010 hingga 2014) menjadi kelompok sandang pada tahun 2015. Pada tahun 2015 laju inflasi tahunan kelompok sandang mencapai angka 5,87%. Setelah itu diikuti oleh kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau di bawahnya dengan laju inflasi pada tahun 2015 sebesar 5,04.



**Tabel 2.17 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2014**

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bahan Makanan	3,91	18,86	1,82	8,10	12,31	7,70	4,64
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	7,50	5,47	7,07	6,90	8,15	2,95	5,04
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	1,40	5,49	3,01	2,99	5,18	8,92	4,41
4	Sandang	5,81	5,41	9,40	3,56	0	3,61	5,87
5	Kesehatan	1,86	1,97	5,64	1,93	3,08	5,49	4,21
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	2,26	4,25	1,73	1,43	3,17	2,37	1,36
7	Transportasi & komunikasi	(1,23)	5,57	2,40	1,30	10,45	9,36	-2,51
	Inflasi Kota Yogyakarta	2,93	7,38	3,88	4,31	7,32	6,59	3,09

Sumber: BPS DIY, 2016

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial DIY terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Beberapa indikator yang mencerminkan pencapaian kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat antara lain : angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja.

#### a. Angka Harapan Lama Sekolah

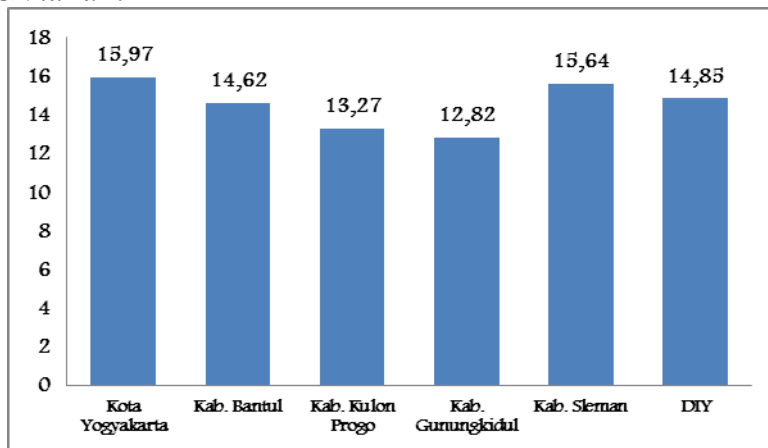
Mulai tahun 2014, BPS melakukan penyempurnaan beberapa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk metodologi penghitungannya.

Sebagai salah satu komponen penyusunan IPM, Angka Melek Huruf dianggap sudah tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi,

sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Indikator baru yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Capaian AHLS DIY tahun 2014 adalah 14,85 tahun. Untuk kabupaten/kota, capaian tertinggi oleh Kota Yogyakarta sebesar 15,97 tahun dan capaian terendah oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,82 tahun.



Sumber : BPS DIY, 2015

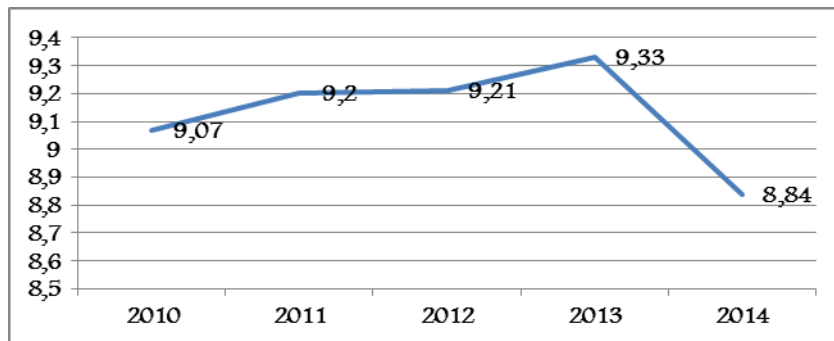
**Gambar 2.19** Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2014

### b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian angka rata-rata lama sekolah mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat lintas sektor seperti : tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, selain dari internal peserta didik sendiri. Pemda DIY telah menargetkan capaian wajib belajar 12 tahun di tahun 2017, untuk itu diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut.

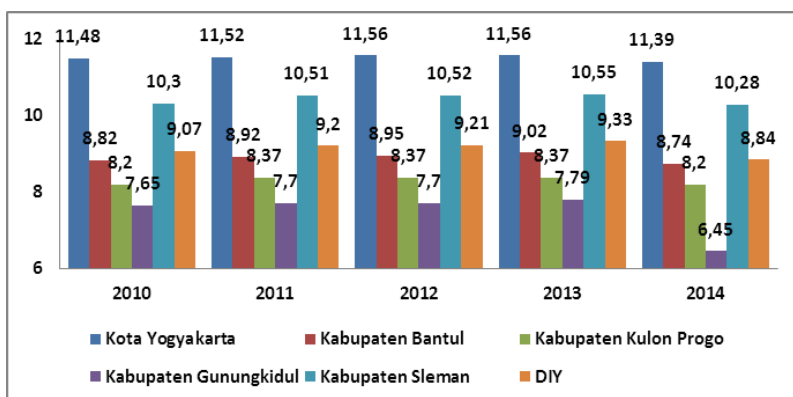
Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di DIY, selama 2010-2012 terjadi fluktuasi capaian yaitu dari 9,07 di tahun 2010 meningkat menjadi 9,33 di tahun 2013 tetapi kemudian menurun di tahun 2014 menjadi 8,84. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY tahun 2010-2014



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2015

**Gambar 2.20 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) DIY 2010-2014**

Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2014 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,39 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 6,45 tahun. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2010-2014 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam grafik berikut :



Sumber : BPSProvinsi DIY, 2015

**Gambar 2.21** Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2014

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2009/2010 – 2012/2013 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.18** Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY, Tahun Ajaran 2010/2011 – 2014/2015

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar				
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
<b>APK Tingkat SD (Termasuk Paket A)</b>					
Kota Yogyakarta	139,29	138,63	140,13	137,77	134,47
Kabupaten Bantul	104,76	105,29	105,9	106,57	107,43
Kabupaten Kulon Progo	106,92	106,58	105,87	104,79	104,03

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar				
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Kabupaten Gunungkidul	100,33	100,01	99,8	92,93	91,21
Kabupaten Sleman	116,5	116,53	117,34	116,81	117,27
<b>DIY</b>	<b>111,46</b>	<b>111,43</b>	<b>111,78</b>	<b>109,88</b>	<b>109,38</b>
<b>APK Tingkat SMP (Termasuk Paket B)</b>					
Kota Yogyakarta	131	141,25	148,78	151,14	144,98
Kabupaten Bantul	105,9	109,66	106,38	106,87	114,28
Kabupaten Kulon Progo	117,95	120,49	124,28	122,62	116,1
Kabupaten Gunungkidul	111,96	106,65	104,34	112,09	109,94
Kabupaten Sleman	114,43	113,68	113,72	113,84	114,9
<b>DIY</b>	<b>114,36</b>	<b>115,5</b>	<b>115,43</b>	<b>117,37</b>	<b>117,64</b>
<b>APK Tingkat SMA (Termasuk Paket C)</b>					
Kota Yogyakarta	130,04	129,49	124,23	123,8	125,78
Kabupaten Bantul	81,98	85,94	85,15	88,43	90,02
Kabupaten Kulon Progo	93,19	92,77	93,63	95,86	94,97
Kabupaten Gunungkidul	71,37	71,22	70,46	72,11	72,53
Kabupaten Sleman	76,61	76,56	77,35	76,66	79,03
<b>DIY</b>	<b>88,12</b>	<b>88,79</b>	<b>88,04</b>	<b>89,07</b>	<b>90,46</b>

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2014

Dari periode 2010/2011 sampai dengan periode 2014/2015, capaian APK SD DIY menunjukkan peningkatan dari 111,46 menjadi 109,38. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terdapat anak yang sekolah di SD umurnya diluar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Begitu pula APK SLTP juga diatas 100 persen. Karena banyak kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100 persen. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, periode

2014/2015 APK SD seluruh Kabupaten/Kota di DIY kecuali Kabupaten Gunungkidul mencapai di atas 100 persen.

Sedangkan untuk capaian APK SLTP DIY, menunjukkan tren peningkatan dari periode 2010/2011 sebesar 114,46 meningkat menjadi 117,64 di periode 2014/2015. Capaian APK SLTP tertinggi periode 2014/2015 adalah Kota Yogyakarta sebesar 144,98 dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 109,94.

Capaian APK SLTA DIY juga mengalami peningkatan dari 88,12 di periode 2010/2011 meningkat menjadi 90,64 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTA tertinggi periode 2014/2015 adalah Kota Yogyakarta sebesar 125,78 dan terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 72,53.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2009/2010 sampai dengan periode 2014/2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2010/2011-2014/2015**

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni				
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
<b>APM Tingkat SD (Termasuk Paket A)</b>					
Kota Yogyakarta	121,59	122,24	122,93	122,06	119,78
Kabupaten Bantul	91,71	92,45	92,54	93,27	94,51
Kabupaten Kulon Progo	91,46	91,18	90,92	90,4	90,95
Kabupaten Gunungkidul	88,72	88,45	88,45	81,81	81,25

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni				
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Kabupaten Sleman	100,87	101,58	101,59	101,74	102,49
<b>DIY</b>	<b>97,15</b>	<b>97,53</b>	<b>97,54</b>	<b>96,14</b>	<b>96,36</b>
<b>APM Tingkat SLTP (Termasuk Paket B)</b>					
Kota Yogyakarta	95,7	105,87	105,99	107,27	106
Kabupaten Bantul	71,71	74,65	75,78	77,05	84,57
Kabupaten Kulon Progo	87,92	84,47	82,55	82,41	82,29
Kabupaten Gunungkidul	78,24	73,97	71,47	80,3	79,85
Kabupaten Sleman	81,77	79,65	81,85	82,62	83,44
<b>DIY</b>	<b>81,06</b>	<b>81,08</b>	<b>81,13</b>	<b>83,74</b>	<b>84,32</b>
<b>APM Tingkat SLTA (Termasuk Paket C)</b>					
Kota Yogyakarta	88,18	88,11	88,65	90,65	92,34
Kabupaten Bantul	53,81	62,36	63,04	66,51	65,88
Kabupaten Kulon Progo	63,43	70,66	66,99	69,55	68,03
Kabupaten Gunungkidul	49,99	51,99	51,99	52,73	53,73
Kabupaten Sleman	54,06	54,04	55,06	53,52	53,13
<b>DIY</b>	<b>60,3</b>	<b>63,45</b>	<b>63,65</b>	<b>64,74</b>	<b>64,89</b>

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2014

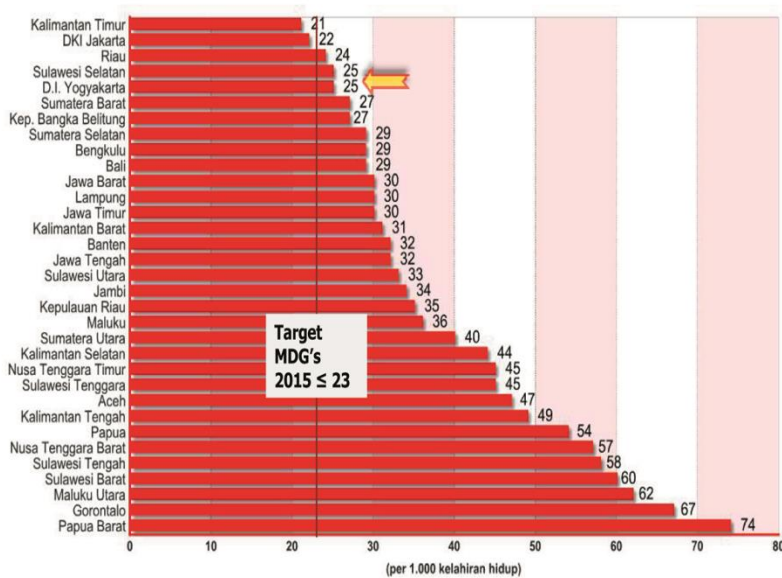
Secara umum capaian APM DIY periode 2014/2015 untuk semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari periode sebelumnya 2013/2014. Capaian APM tingkat SD periode 2014/2015 sebesar 96,36 naik dari periode sebelumnya 2013/2014 yang sebesar 96,14. Sedangkan untuk tingkat SMP, capaian APM periode 2014/2015 sebesar 84,32, mengalami kenaikan dari periode sebelumnya 2013/2014 yang mencapai 83,74. Capaian APM tingkat SMA juga mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yaitu 64,89 pada periode 2014/2015 meningkat dari periode 2013/2014 64,74

Dilihat capaian APM per kabupaten/kota, capaian APM tertinggi untuk semua jenjang pendidikan adalah Kota Yogyakarta. Sedangkan capaian APM terendah untuk semua jenjang pendidikan adalah Kabupaten Gunungkidul. Terdapat capaian APM yang melebihi 100 pada jenjang SD (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman) dan jenjang SMP (Kota Yogyakarta) dikarenakan adanya siswa yang berasal dari luar daerah tersebut menuntut ilmu di daerah tersebut.

e. Angka Kematian Bayi (AKB)

Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita menjadi perhatian global sebagaimana telah tercantum dalam Millennium Development Goals (MDGs) terutama tujuan 4. Target MDGs Nasional untuk AKB tahun 2015 adalah kurang lebih atau sama dengan 23 per 1.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan SDKI 2012 adalah 25 per 1000 kelahiran hidup. Secara nasional, angka ini berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur (21 per 1000 kelahiran hidup), Provinsi DKI Jakarta (22 per 1000 kelahiran hidup), dan Riau (24 per 1000 kelahiran hidup).

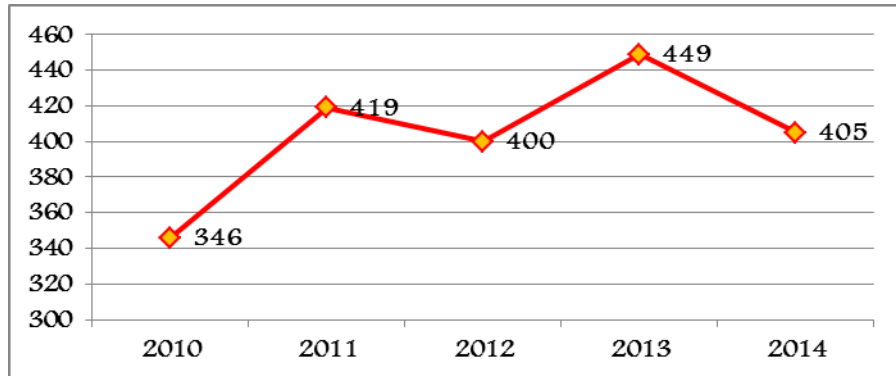


Sumber : SDKI, 2012

Gambar 2.22 Perbandingan Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Antar Provinsi 2012



Secara absolut, jumlah kematian bayi yang dilaporkan di DIY dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami fluktuasi. Jumlah kematian bayi di DIY tahun 2014 sebanyak 400 kasus dengan jumlah lahir hidup sebanyak 46.627 kelahiran hidup. Gambaran perkembangan jumlah kematian bayi di DIY disajikan dalam grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2015

**Gambar 2.23 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi DIY yang dilaporkan Tahun 2010-2014**

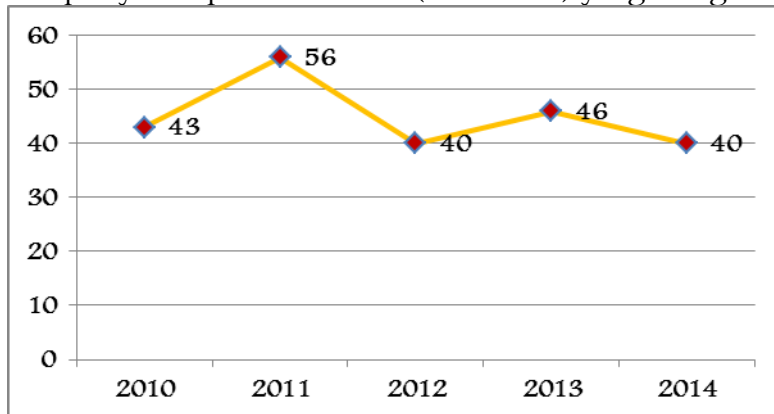
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, penyebab umum kematian bayi di DIY adalah berat bayi lahir rendah (BBLR) dan sepsis. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain asfiksi pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit.

Kebijakan kesehatan bayi difokuskan pada intervensi layanan kesehatan meliputi : peningkatan pelayanan neonatal dan ibu, peningkatan cakupan imunisasi, peningkatan upaya perubahan perilaku, dan penanganan permasalahan gizi bayi.

f. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKI) merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat derajat kesehatan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Jumlah kematian ibu di DIY dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi. Gambaran kasusnya adalah sebagai berikut: jumlah kematian ibu di 2010 sebesar 43 kasus naik cukup tajam di tahun 2011 menjadi 56 kasus dan menurun cukup tajam di tahun 2012 menjadi 40 kasus. Akan tetapi di tahun 2013 terjadi kenaikan

kasus menjadi 46 kasus dan menurun kembali di tahun 2014 menjadi 40 kasus. Masih terdapatnya kasus kematian ibu ini bertolak belakang dengan pencapaian indikator kesehatan ibu yang lain seperti cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan cakupan pelayanan pada ibu hamil (K1 dan K4) yang mengalami kenaikan.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2015

**Gambar 2.24 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2010-2014**

Apabila dilihat per kabupaten/kota, kasus kematian ibu tertinggi berada di kabupaten Bantul dan disusul oleh Kabupaten Sleman. Sedangkan kasus kematian ibu terendah berada di Kota Yogyakarta. Berikut adalah gambaran kasus kematian ibu per kabupaten/kota di DIY tahun 2014 :

**Tabel 2.20 Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014**

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kematian Ibu
Kota Yogyakarta	2
Kabupaten Bantul	14
Kabupaten Kulon Progo	5
Kabupaten Gunungkidul	7
Kabupaten Sleman	11

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2015

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, penyebab kematian ibu diakibatkan oleh permasalahan jantung (4 kasus), TBC (2 kasus), Asma (3

kasus), gangguan ginjal (1 kasus), Cancer (3 kasus), Emboli (3 kasus), tyroid (2 kasus), syok (1 kasus) dan selebihnya diakibatkan perdarahan dan pre eklamsia karena hipertensi dan keracunan.

AKI dipengaruhi oleh faktor medis dan non medis. Faktor medis mencakup aksesibilitas dan tindakan pelayanan kesehatan. Sedangkan faktor non medis dikaitkan dengan kondisi ekonomi, sosial budaya, dan peran serta keluarga dan masyarakat seperti kurangnya pemahaman terhadap permasalahan dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

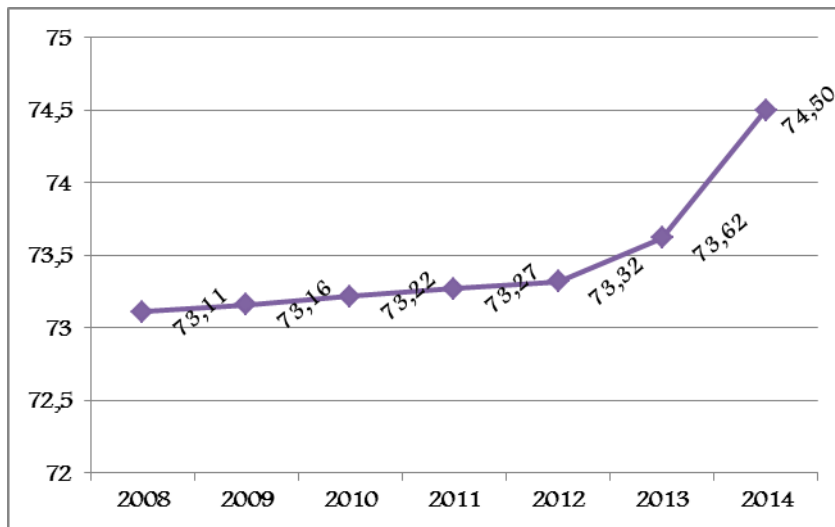
Untuk itu, selain peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui Puskesmas PONEK dan RS PONEK, partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pendampingan kepada ibu hamil sangatlah diperlukan.

g. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan.

AHH dipengaruhi dari beberapa faktor seperti faktor kesehatan, faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor pendidikan masyarakat. Peran sektor kesehatan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan.

Perkembangan Angka Harapan Hidup di DIY dalam kurun waktu 2008-2013 menunjukkan tren peningkatan. Dari 73,11 di tahun 2008 meningkat menjadi 74,50 di tahun 2014.



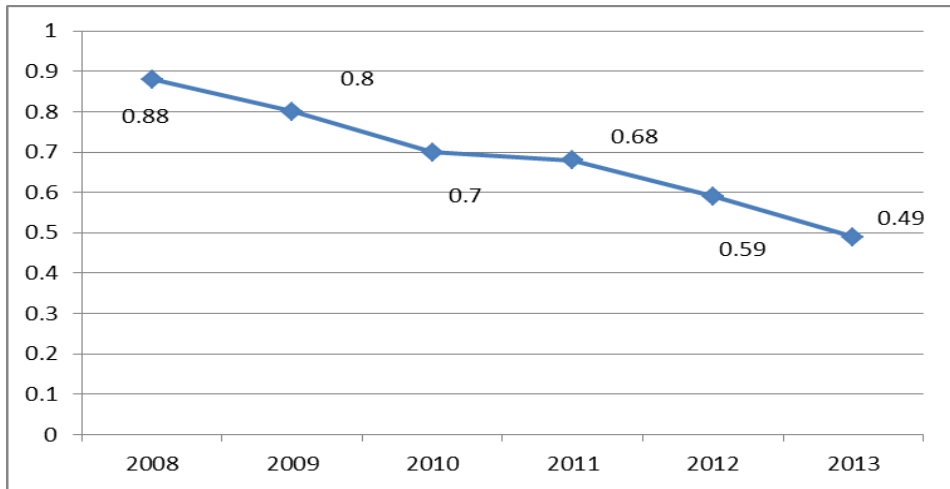
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2015

**Gambar 2.25** Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2008-2014

h. Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

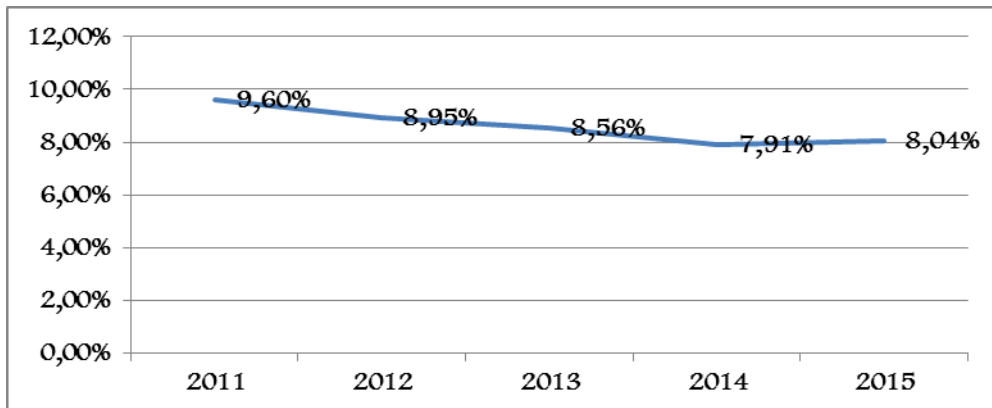
Prevalensi gizi buruk di DIY semua kabupaten/kota berada pada posisi kurang dari 1 %. Perkembangan prevalensi balita gizi buruk dalam kurun waktu 2008-2013 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012, prevalensi balita gizi buruk DIY adalah 0,59% menurun menjadi 0,49 di tahun 2013



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2014

**Gambar 2.26 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk DIY Tahun 2008-2013**

Sedangkan untuk capaian prevalensi balita kekurangan energi protein (KEP) yang biasa disebut balita kurang gizi di DIY bersifat fluktuatif, menurun dari 8,56% pada tahun 2013 menjadi 7,91 pada tahun 2014 kemudian naik menjadi 8,04% di tahun 2015. Perkembangan prevalensi balita KEP dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2015

**Gambar 2.27 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang DIY Tahun 2011-2015**

Penanganan permasalahan gizi pada balita difokuskan untuk peningkatan pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang anak, dan intervensi gizi mikro.

i. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Jumlah penduduk yang bekerja di DIY tahun 2013 sebanyak 1.886.071 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.949.243 orang dengan rasio penduduk yang bekerja 96,76. Sementara tahun 2014 penduduk yang bekerja dan angkatan kerja masing-masing sebanyak 1.956.043 orang dan 2.023.461 orang dengan rasio penduduk bekerja sebesar 96,66. Rasio tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja ada 96,67 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

**Tabel 2.21** Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2011-2014

Uraian	2011	2012	2013	2014
Penduduk yang Bekerja	1.872.912	1.911.720	1.886.071	1.956.043
Angkatan Kerja	1.933.917	1.988.539	1.949.243	2.023.461
Rasio Penduduk yang bekerja	96,85	96,14	96,76	96,67

*Sumber : BPS DIY, 2015*

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Seni, budaya dan olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kemajuan pesat baik seni tradisional maupun kontemporer. Kesenian tradisional perlu dipupuk agar tetap lestari sepanjang sejarah peradaban DIY.



Sumber: <http://bola.liputan6.com> dan Dinas Kebudayaan DIY

Gambar 2.28 Pagelaran Seni dan Budaya

Tabel 2.22 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, Tahun 2010-2014

Capaian Pembangunan	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	12,34	12,34	15,42	15,42	15,42
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,26	0,26	0,27	0,30	0,30
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008

Sumber: Disbud DIY & Disdikpora DIY

A. Budaya

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset-aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk terus menerus melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama (*mainstreaming*) dalam pembangunan di segala bidang. *Mainstreaming* kebudayaan dalam pembangunan diharapkan akan menghasilkan rennaisans Yogyakarta yang mana semangat inovasi, kreatif, teknologi bermunculan dalam berbagai bentuk karya nyata.

Komitmen bersama untuk mewujudkan Renaisans Yogyakarta dalam berbagai sektor dijiwai filosofi *hamêmayu-hayuning bawânâ*, dihidupi semangat gotong-royong yang mengacu pada konsep *aworing kawulâ-gusti* dan *golong-gilig*, serta diekspresikan oleh sikap satriyâ: *sawiji, grêgêt, sêngguh, ora-mingkuh*, memberikan vitalitas dan ruh baru, arah baru, nilai baru, serta kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke Timur, seraya meluruskan kembali ‘rasa keTuhanan’ kita”.

Gambaran umum kondisi eksisting sumber-sumber daya kebudayaan DIY yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan perpaduan harmonis alam DIY yang terbentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan dengan budaya masyarakat DIY yang berasal dari multicultural yang terbentuk dalam perjalanan lintas sejarah sejak zaman Prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, Kontemporer.

**Tabel 2.23 Perkembangan Aset-Aset Kebudayaan di DIY Tahun 2010-2014**

Aspek	Satuan	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah kunjungan museum	Orang	575.000	623.500	1.375.000	1.636.000	1.636.000
Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju	Organisasi	36	38	40	54	61
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Buah	214	220	225	230	412
Jumlah Gelar	Kali	790	920	980	1.025	1.200



Aspek	Satuan	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
Seni Budaya						
Jumlah Desa Budaya berkategori Maju	Desa	6	8	12	12	14
Jumlah Dokumen seni Budaya dankarya seni yang dilestarikan	Dokumen	91	104	120	120	120
Jumlah sumber sejarah yang terkelola	Sumber sejarah	300	500	700	700	700
Jumlah Gedung Seni Budaya	Gedung	94	94	96	107	107
Peristiwa Sejarah	kali	94	94	94	95	103
Pelaku Sejarah	orang	n/a	16	16	22	22
Ceritera Rakyat	buah	n/a	n/a	n/a	80	80
Naskah Kuno	buah	n/a	n/a	n/a	509	509
Upacara Adat	buah	358	358	447	459	459
Upacara Tradisi	buah	34	34	34	35	35
Organisasi Kepercayaan	buah	90	90	90	94	94
Motif Batik	buah	n/a	n/a	n/a	185	185
Motif Lurik	buah	n/a	n/a	n/a	64	64
Kerajinan Property Budaya	buah	178	178	178	246	241

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Perkembangan seni dan budaya menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.24 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014**

Kab/Kota	Rasio Grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio Gedung kesenian per 10.000 penduduk
Kabupaten Bantul	13,55	0,42
Kabupaten Sleman	9,73	0,25
Kabupaten Gunungkidul	11,58	0,17
Kabupaten Kulon Progo	16,71	0,23
Kota Yogyakarta	12,98	0,23
DIY	12,24	0,26

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2014

## B. Pemuda dan Olahraga

Masa depan suatu bangsa dapat diramalkan dengan melihat kondisi pemuda saat ini. Pemuda Indonesia ke depan harus memiliki kepribadian dan karakter yang kuat. Pemikiran dan semangat untuk terus membangun diri dengan berkompetisi secara sehat harus terus digemakan dalam pembangunan pemuda Indonesia, dimana pemuda Indonesia harus dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang kuat untuk mampu berdiri sebagai pemuda yang visioner kedepan (mampu melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas) untuk mengangkat harga diri, kehormatan dan kedaulatan bangsa di tingkatan internasional. Salah satu upaya menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda adalah dengan meningkatkan prestasi olahraga.

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera (amanat penderitaan rakyat). Olahraga akan menjadi lokomotif ekonomi baru.

**Tabel 2.25 Perkembangan Pemuda dan Olah Raga di DIY Tahun 2010-2014**

Uraian	Tahun					Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	
Organisasi Kepemudaan	35	35	35	37	39	Buah
Jumlah Karang Taruna	440	437	440	440	440	Buah
Jumlah Organisasi Olah Raga	51	51	50	50	50	Buah
Sarana Olah Raga						
1) Standar Internasional	0	0	0	0	0	Unit
2) Standar Nasional	3	3	3	3	3	Unit

Sumber : *Disdikpora DIY*

Banyak atlet nasional maupun internasional yang lahir dari DIY, yaitu antara lain Yayuk Basuki (atlet legendaris bidang tenis), Rita Subowo (atlet legendaris basket), Winarsih, Ivana Ardella Irmanto (Wushu), Felicia Alverina Monindra (Wushu) dan lain-lain.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongraga, Pondok Pemuda, GOR Sorowajan, Wanabhkati Yasa, GOR UNY, Stadion Maguwoharjo dan lain-lain.



Gambar 2.29 Lokasi Youth Center Sebagai Percontohan Nasional



Sumber : <http://kanaljogja.com>

Gambar 2.30 Gelanggang Olah Raga Amongraga

GOR Amongraga dapat digunakan oleh masyarakat umum atau instansi yang berminat untuk menyelenggarakan kegiatan, meliputi Olahraga (Bola Voli, Basket, Bulutangkis, Futsal dan lain-lain) minimal tingkat wilayah dan diutamakan tingkat nasional maupun internasional, serta kegiatan kreativitas lainnya.

Event-event olahraga yang diikuti oleh pemuda DIY adalah Kejurnas, OOSN (Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional) untuk SD, SMP, SLB, SMA/SMK, POPWIL (Pekan Olah Raga Wilayah), POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional), Lomba Senam Kesegaran Jasmani, Festival dan Lomba Olah Raga Tradisional, dan lainnya.

POPNAS 2015 yang diselenggarakan di Jawa Barat mempertandingkan 20 cabang olahraga yang meliputi atletik, angkat besi, bola basket, bola voli indoor, bola voli pasir, bulutangkis, dayung, gulat, judo, karate, panahan, pencak silat, renang, senam, sepakbola, sepaktakraw, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, dan tinju. Sebagai hasil dari POPNAS, DIY meraih peringkat 11 dengan total perolehan medali sebanyak 26 medali yang terdiri dari 6 medali emas, 6 medali perak, dan 14 medali perunggu. Rincian perolehan medali untuk kontingen DIY adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.26 Perolehan Medali Kontingen DIY pada POPNAS 2015**

No.	Cabang Olahraga	Emas	Perak	Perunggu
1.	Pencak silat	1	1	2
2.	Judo		1	1
3.	Atletik	3	2	2
4.	Angkat besi		1	
5.	Panahan	2		5
6.	Taekwondo			2
7.	Karate			1
8.	Gulat		1	
9.	Voli pasir			1

Pembinaan-pembinaan terhadap generasi muda tidak hanya melalui kegiatan olahraga, tetapi juga melalui wahana-wahana sebagai berikut: Karang Taruna, Sentra Pemberdayaan Pemuda, Sarjana Penggerak Pedesaan, Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan, Kapal Pemuda Nusantara, Kwartir Daerah Pramuka, Taruna Siaga Bencana, dan lainnya.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan. Dalam usaha untuk memberikan bekal kewirausahaan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya

menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan kelak para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan.

Wadah pengembangan generasi muda yang ada di tiap desa/kelurahan sudah difasilitasi Karang Taruna. Karang Taruna sebagai generasi muda hendaknya mampu menjadi pionir dalam aspek kebangsaan, kemajemukan, pluralitas yang terjadi di tempat domisili untuk bisa dipertahankan.

Sentra Pemberdayaan Pemuda menjadi salah satu wahana pemuda di luar kegiatan olahraga dengan munculnya kelompok-kelompok pemuda yang maju berkembang dan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, yang antara lain adalah: Forda (Kelompok Wirausaha Pemuda), Ngudi Makmur (Kelompok Tani Ternak Ayam Buras), Arto Konveksi (Pemberdayaan Pemuda Melalui Usaha Jasa Konveksi), Ikatan Dimas Diajeng Sleman, Ilalang Outbound (Pengadaan Alat Penunjang Kelompok Outbound Ilalang Desa Mangunan), Kp3 (Komunitas Pemuda Peduli Pendidikan), Komunitas Slenk (Suka Lelangen Edining Kebudayaan), P3S (Memberdayakan Potensi Desa Melalui Histori Ki Ageng Paker).

Wadah bagi intelektual muda yang akan ditempatkan di pedesaan agar generasi muda menjadi mandiri dan berkarya untuk bangsa melalui Sarjana Penggerak Pedesaan (SP2). Pada Tahun 2012 direkrut 5 pemuda sarjana dari berbagai latar belakang pendidikan yang ditempatkan di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan pada Tahun 2013 memberikan kesempatan kepada 10 pemuda sarjana untuk berkontribusi dalam membangun bangsa yang juga ditempatkan di Kabupaten Kulon Progo, yang pada tahun 2014 juga ditempatkan sebanyak 20 orang ke Kulon Progo.

Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan atau PSP3, yaitu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dilaksanakan bersama Dinas yang menangani kepemudaan di tingkat provinsi dalam rangka memberikan kesempatan bagi pemuda untuk membangun wilayah perdesaan diharuskan merencanakan kegiatan untuk pengembangan di desa tersebut. Program ini dilaksanakan dengan sistem kontrak selama 1 (satu) tahun.

Generasi muda juga mendapatkan peluang untuk berperan aktif dalam Kapal Pemuda Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi pemuda berlayar di perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan perwakilan sebanyak 2 - 5 orang untuk mengikuti program ini. Adapun kapal yang digunakan adalah kapal milik Angkatan Laut Republik Indonesia.

Sebagai usaha untuk melaksanakan pembinaan agar dapat membentuk mental dan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda melalui gerakan pramuka. Penguatan kepribadian generasi muda tentunya diperlukan sebagai filter terhadap dampak kemajuan zaman.

## **2.3 Aspek Pelayanan Umum**

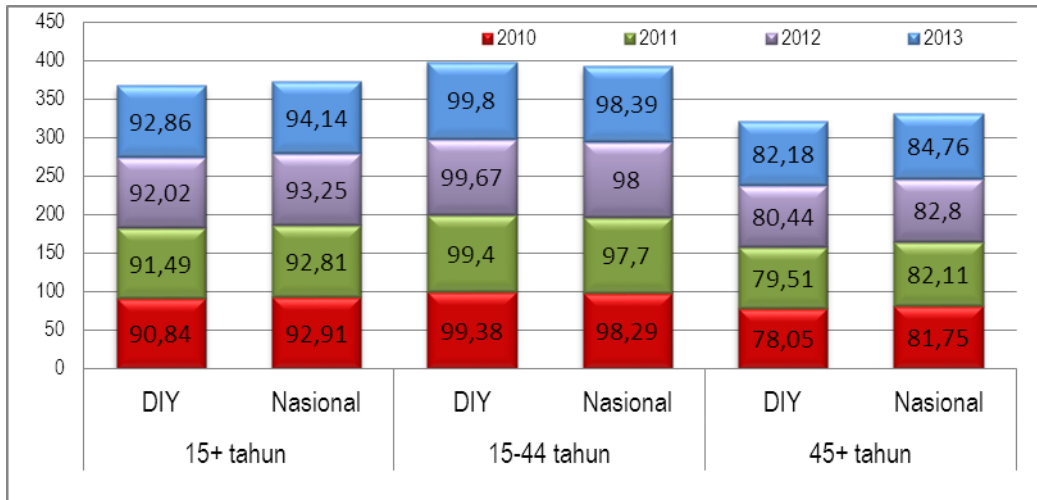
### **2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib**

#### **2.3.1.1 Urusan Pendidikan**

##### **a. Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator peningkatan kualitas hidup seseorang dalam mengakses layanan pendidikan. Angka melek Huruf dijadikan standar Internasional dalam menilai tingkat Sumber Daya Manusia pada suatu daerah. Menurut UNESCO, Melek aksara merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.

Guna mewujudkan mimpi DIY untuk memiliki SDM yang berkarakter, berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera maka pemberantasan buta huruf menjadi suatu program prioritas di sektor pendidikan. Capaian angka melek huruf di DIY tahun 2013 – 2015 secara gradual mengalami peningkatan. Menurut data BPS pada tahun 2013 nilai angka melek huruf di DIY pada kelompok umur diatas 15 tahun adalah 85, 75 % dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 92.86 %. Pada tahun 2014 angka melek huruf meningkat 1,5 % menjadi 94.4 %. Melihat capaian ini maka perlu dilakukan identifikasi dan sinergitas program antar sektor dan wilayah dalam penuntasan buta huruf 5.6 % penduduk DIY.



Gambar 2.31 Grafik Angka Melek Huruf DIY dan Nasional

Apabila dibandingkan dengan data nasional, angka melek huruf DIY masih berada dibawah capaian angka melek huruf nasional. Berdasarkan kelompok usia, maka terlihat cukup jelas penyebab tingginya AMH di DIY adalah andil dari AMH pada kelompok penduduk tua (>45 tahun). Pada tahun 2013, AMH pada kelompok ini tercatat sebesar 82,18 persen dan jauh lebih rendah dari AMH nasional pada kelompok umur yang sama yang sebesar 84,76 persen. Sementara, AMH penduduk DIY pada kelompok usia 15-44 tahun tercatat sebesar 99,80 persen dan lebih tinggi dibandingkan dengan AMH nasional pada kelompok umur yang sama yang sebesar 98,39 persen. Jadi persoalan tingginya tingkat buta huruf di DIY lebih terkait dengan komposisi penduduk berusia tua. Di satu sisi komposisi penduduk berusia tua cukup besar sebagai hasil dari harapan hidup yang tinggi, sementara di sisi yang lain belum semuanya berstatus belum melek huruf. Secara alamiah, komposisi penduduk berusia tua tersebut akan semakin berkurang sehingga AMH secara umum akan semakin meningkat.

Tahun 2014 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan kegiatan Verifikasi Data Sensus Penduduk Tahun 2014.



Tabel 2.27 Data Hasil Verifikasi Penduduk Buta Aksara (per Agustus 2015)

No	Kab/Kota	Jumlah penduduk buta aksara usia 15 – 59 th	Hasil Verifikasi (sasaran program penuntasan buta aksara)				Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Capaian (%)	
1	Yogyakarta	2.949	201	609	810	100	Tahap verifikasi di kab/kota
2	Bantul	22.008	1.173	7.162	8.335	100	Tahap verifikasi di kab/kota
3	Kulon Progo	7.939	1.038	1.622	2.660	100	Tahap verifikasi di kab/kota
4	Gunungkidul	31.543	1.538	4.372	5.910	80	Tahap validasi di DIY
5	Sleman	17.637	698	5.082	5.780	100	Tahap verifikasi di kab/kota
<b>Jumlah</b>		<b>82.076</b>	<b>4.648</b>	<b>18.847</b>	<b>23.495</b>	<b>96</b>	

Sumber : Data Dinas Dikpora DIY per 31 Agustus 2015

Data diatas menunjukkan bahwa, di Kota Yogyakarta terdapat 2.949 penduduk buta aksara, Kab. Bantul 22.008 orang, Kab. Kulon Progo 7.939 orang, Kab. Gunungkidul 31.543 orang dan Kab. Sleman 17.637 orang. Dari jumlah penduduk buta aksara 82.076 orang ternyata setelah diverifikasi hanya terdapat 23.495 penduduk buta aksara (28,62%).

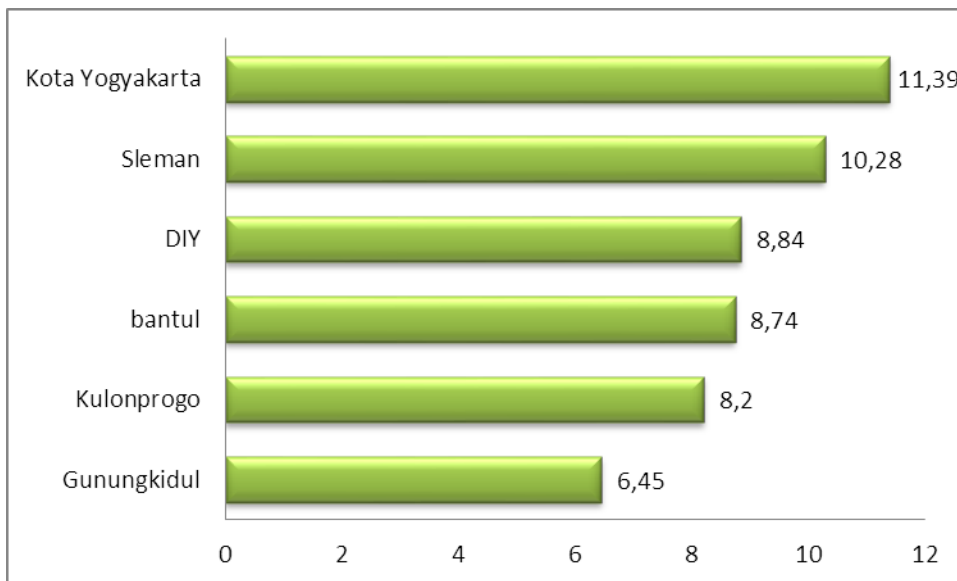
Terlihat dalam Tabel tersebut di atas, di Kota Yogyakarta terdapat 810 orang penduduk buta aksara, Kab. Bantul 8.335 orang, Kab. Kulon Progo 2.660 orang, Kab. Gunungkidul 5.910 orang dan Kab. Sleman 5.780 orang. Penurunan angka penduduk buta aksara tersebut disebabkan adanya beberapa kondisi, antara lain :

1. meninggal
2. pindah
3. telah/sedang mengikuti Program Keaksaraan Dasar
4. telah melek aksara
5. berkebutuhan khusus
6. gila/stres.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Kualitas modal manusia juga dapat dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif. RLS sampai tahun 2009 dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 15 tahun ke atas dan mulai tahun 2010 dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 25 tahun ke atas.

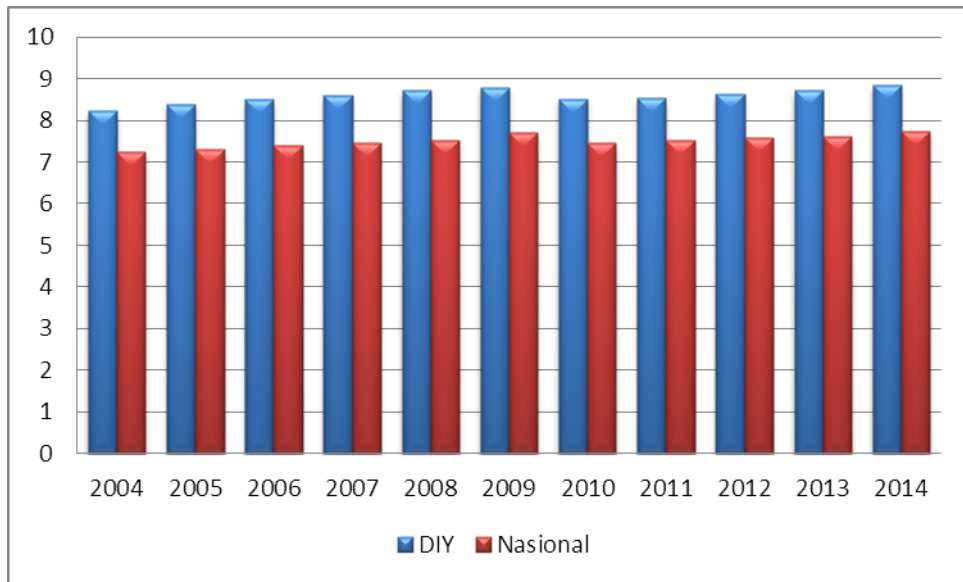
Pendekatan yang baru menghasilkan level RLS yang lebih rendah lebih rendah, tetapi lebih representatif karena pada umumnya penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan masa studinya. Semakin tinggi RLS di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga produktivitas perekonomian daerah juga bisa meningkat



**Gambar 2.32 Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota DIY 2014**

Gambar tersebut memperlihatkan capaian angka rata-rata lama sekolah di masing-masing kabupaten di DIY. Penduduk di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman pada usia lebih dari 15 tahun rata-rata menghabiskan pendidikan lebih dari 10 tahun atau menuntaskan

pendidikan dasar 9 tahun dan masuk ke pendidikan menengah. Nilai rata-rata lama sekolah terendah terdapat pada Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 6,45 tahun. Distribusi capaian angka rata-rata lama sekolah pada masing-masing kabupaten tersebut dapat menjadi dasar pemerintah DIY dalam menentukan prioritas wilayah pengembangan layanan pendidikan. Sehingga harapan pemerataan pendidikan pada semua warga dan kualitas layanan pendidikan di semua wilayah di DIY dapat terpenuhi.



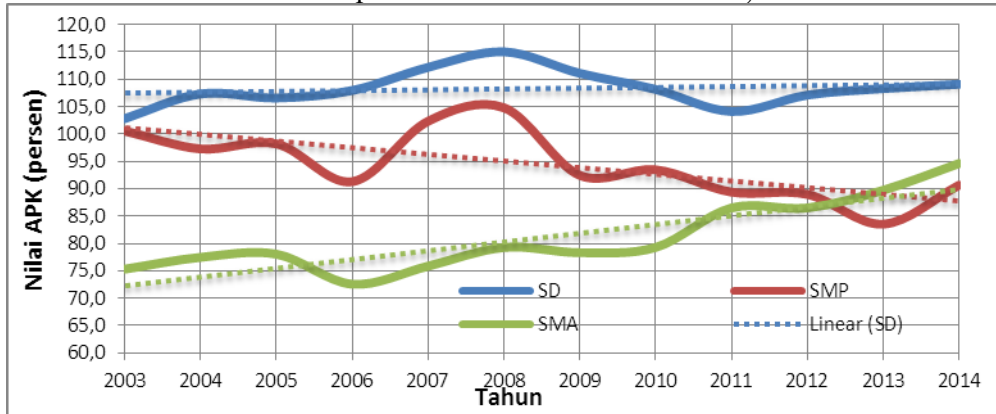
**Gambar 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah penduduk DIY berada pada peringkat ke 4 secara nasional setelah DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Grafik tersebut memperlihatkan capaian angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2004-2014. Secara gradual capaian angka rata-rata lama sekolah penduduk DIY makin meningkat. Peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2004-2014 sebesar 0,62 atau meningkat dari 8,22 ke 8,84. Nilai peningkatan ini tidak begitu signifikan dan masih jauh dari target angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2017, yaitu sebesar 12. Hal ini dapat menjadi catatan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi program dan perencanaan yang lebih tepat sasaran.

**c. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2003 –2014 dapat dilihat dari Grafik berikut,



Gambar 2.34 Nilai Angka Partisipasi Kasar

Grafik tersebut memperlihatkan perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasa (APK) pada jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA. Perkembangan APK SD terlihat perkembangan yang statis dari tahun 2003-2014. Rerata Nilai APK SD dari tahun 2003-2014 berada pada angka 108,3. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sebagian kelompok usia diluar 7-12 yang mengenyam pendidikan SD. Besar kemungkinan bahwa penduduk di kelompok usia kurang dari 7 tahun telah masuk di pendidikan SD. Selain itu, angka nilai APK juga berkontribusi dari penduduk berpendidikan kejar paket A.

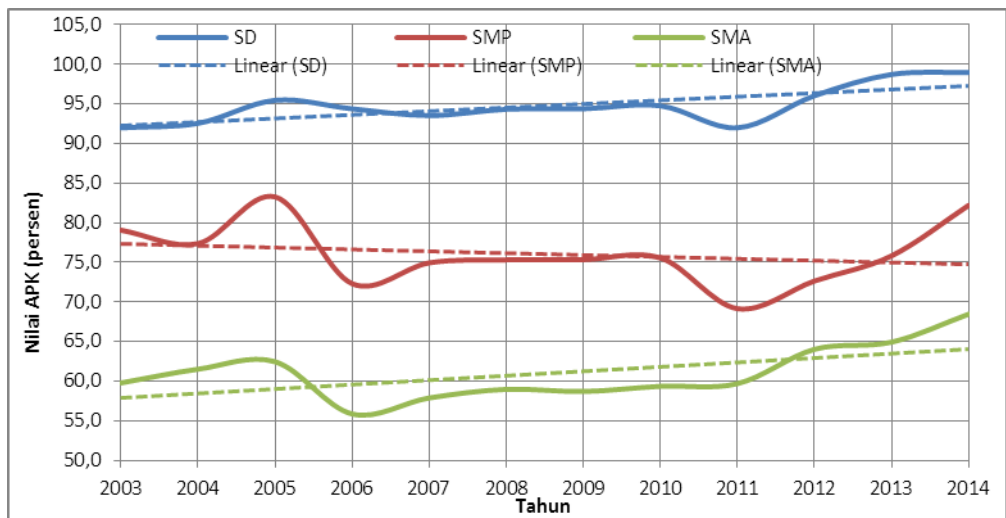
APK pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), memperlihatkan trend linier yang menurun dari tahun 2003-2014. Pada tahun 2003, APK SMP sebesar 100,57 %. Capaian APK SMP pada tahun 2014 turun 90,7% atau turun sebesar 9,9. Rerata nilai APK dari tahun 2003-2014 adalah sebesar 94,4 %. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kelompok usia 13-15 tahun di DIY tidak seluruhnya masuk di pendidikan SMP. Hal ini dapat di mungkinkan karena kondisi arus penduduk yang masuk SD kurang dari 7 tahun menyebabkan sebagian masuk di pendidikan SMP pada usia 12 tahun, dan lulus SMP paa usia 14 tahun. Kondisi ini juga ditambah dengan program akselerasi, yang berdampak pada percepatan pendidikan di jenjang SMP.

Capaian APK SLTA DIY memiliki perkembangan trend positif dari tahun 2003 – 2014. Rerata capaian APK SLTA DIY pada tahun 2003-2014 sebesar 81,1 %. Pada tahun 2014 APK SLTA sebesar 94,62 % atau naik 19,3

% dari tahun 2003. Melihat data hasil survey BPS tersebut memperlihatkan penduduk usia 16-18 tahun belum seluruhnya berpendidikan SLTA atau sederajat. Namun melihat tren yang dihasilkan, hal ini merupakan capaian positif DIY dalam upaya memperluas layanan pendidikan untuk seluruh penduduk sampai dengan 12 tahun (minimal sampai dengan SLTA/SMK), termasuk didalamnya kejar paket C

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2003 sampai dengan 2014 dapat dilihat dalam grafik berikut,



Gambar 2.35 Angka Partisipasi Murni (APM) SD,SMP, dan SLTA 2003-2014

Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2014 sebesar 99 % atau meningkat 7 % dari tahun 2003. Hal ini memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia 7-12 tahun di DIY sebanyak 99 % telah memasuki usia sekolah dasar. Kondisi ini memperlihatkan keberhasilan program penuntasan kelompok usia 7-12 tahun untuk menuntaskan pendidikannya.

adapun nilai sisanya (1 %) dimungkinkan siswa mengulang kelas atau siswa SD yang masuk sekolah sebelum usia (kurang dari 7 tahun).

Pada tabel xxx menggambarkan capaian APM SMP dari tahun 2003-2014. Rerata APM SMP dari tahun 2003-2014 sebesar 76,1 %, dan capaian tahun 2014 sebesar 82,2 % atau meningkat 3,1 % dari tahun 2003. Secara umum grafik APM SMP mengalami tren menurun. Capaian APM SLTA pada tahun 2014 sebesar 68,5%, nilai ini meningkat 8,7 % dari tahun 2003. Adapun rerata APM SLTA dari tahun 2003-2014 sebesar 61 %. Pada gambaran grafik capaian APM di atas terlihat bahwa makin tinggi jenjang pendidikan, maka makin menurun nilai APM. Kondisi ini dapat diakibatkan siswa sekolah di usia kurang dari jenjangnya, siswa mengulang kelas, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pada jenjang di atasnya. Hal ini dapat menjadi prioritas pemerintah daerah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan pada level yang lebih tinggi guna mengembangkan sumber daya manusia DIY yang lebih unggul dan berkompeten.

### 2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

#### a. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi, dan balita. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014, jumlah posyandu di DIY menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2014, jumlah posyandu di DIY tercatat sebanyak 5.702 posyandu. Dari jumlah posyandu tersebut melayani 215.200 balita dengan rasio posyandu per 1.000 balita adalah 26,50 atau dengan kata lain satu posyandu melayani 38 balita.

**Tabel 2.28 Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu Per 1.000 Balita DIY Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Posyandu	5.652	5.675	5.691	5.698	5.702
Jumlah Balita	215.200	211.500	213.100	214.800	215.200
Rasio Posyandu per 1.000 balita	26,26	26,83	26,71	26,53	26,50

Sumber : Proyeksi Penduduk SP 2010 BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY 2015, diolah

b. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Salah satu upaya pemerintah DIY dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat. Hasil survey Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2008 menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk DIY lokasi tempat tinggalnya hanya berjarak 1-5 km terhadap puskesmas dan lebih dari 70% penduduk hanya berjarak 1-5 km terhadap rumah sakit dan dokter praktek swasta. Tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km terhadap sarana pelayanan puskesmas, dokter praktek swasta dan bidan. Hal ini menunjukkan mudahnya akses jarak jangkauan penduduk terhadap sarana pelayanan.

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2014 sebanyak 442 unit dengan rasio sebesar 0,122. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 8.228 penduduk.

**Tabel 2.29 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2014**

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.457.491	3.487.325	3.514.762	3.594.854	3.637.116
Jumlah Puskesmas	120	121	121	121	121	121

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Puskesmas Pembantu	321	321	321	320	320	321
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	441	442	442	441	441	442
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0,129	0,128	0,127	0,125	0,123	0,122

Sumber : BFS DIY, 2015, diolah

c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk.

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit di DIY dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penambahan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaitu sebanyak 66 rumah sakit pada tahun 2011 dan 2012, menjadi 71 rumah sakit pada tahun 2013. Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.627.821 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 0,0195. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 50.635 jiwa.

Tabel 2.30 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2014

Kab/Kota	Jumlah RS	Jenis Rumah Sakit		Klasifikasi RS				
		Umum	Khusus	A	B	C	D	Belum Penetapan
Kota Yogyakarta	19	10	9	0	4	3	5	7
Kabupaten Bantul	14	10	4	0	2	3	4	5
Kabupaten Kulon Progo	8	8	0	0	1	0	1	6
Kabupaten Gunungkidul	5	5	0	0	0	2	0	3
Kabupaten Sleman	27	20	7	2	3	5	9	8
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>29</b>



Sumber : Dinas Kesehatan, 2015Error! Not a valid link. Dalam memberikan pelayanan yang baik, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang baik pula. Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Berdasarkan data sistem informasi rumah sakit Kementerian Kesehatan RI, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih tergolong rendah yaitu 58,28 % dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 5.364 TT (berdasarkan laporan 46 rumah sakit dari total 73 rumah sakit di DIY).

**Tabel 2.31 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014**

Kab/Kota	Jumlah RS	RS Lapor BOR	TT RS Lapor BOR	BOR Kab/Kota
Kota Yogyakarta	19	14	1.811	56,69
Bantul	14	6	525	64,10
Kulon Progo	8	5	388	50,32
Gunungkidul	5	4	295	66,50
Sleman	27	17	2.345	58,48
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>5364</b>	<b>58,28</b>

Sumber : SIM RS, Dirjen BUK, Kementerian Kesehatan RI, 2014 (<http://www.sirs.buk.depkes.go.id>)

d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2014, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 1.087 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk di tahun 2014 sebesar 29,89. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di DIY melayani 3.346 penduduk.

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2014 adalah sebanyak 1.216 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 33,43. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 2.991 penduduk.

Jumlah dokter gigi DIY tahun 2014 sebanyak 354 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 9,96 atau dapat diartikan bahwa 1 orang dokter gigi di DIY melayani 10.040 penduduk.

Terdapat penurunan mencolok terhadap data tahun 2014 dengan data tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan data tahun 2014 yang tersedia hanya berasal dari data dokter di pelayanan kesehatan negeri belum mencakup pelayanan kesehatan swasta.

**Tabel 2.32 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2011-2014**

Uraian	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk	3.487.325	3.514.762	3.594.854	3.637.116
Dokter Umum	1.011	997	1.354	1.087
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	28,99	28,37	37,66	29,89
Dokter Spesialis	820	825	1.262	1216
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	23,51	23,47	35,11	33,43
Dokter Gigi	428	432	453	354
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	12,08	12,36	12,85	9,96

Sumber : BPS Provinsi DIY, diolah

e. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2013 mencapai 99,74%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

**Tabel 2.33 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
--------	------	------	------	------	------

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Ibu yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	43.038	44.847	45.880	45.378	45.556
Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	44.057	44.968	45.948	45.496	45.618
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan (%)	97,69	99,73	99,85	99,74	99,86

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2015

#### f. Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah hal yang penting sebagai perlindungan atas resiko yang mengancam kesehatan. Hal ini telah ditegaskan melalui UU Nomor 40 tahun 2004 dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Tujuan dari penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan (Jamkesta) yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 dan 73 Tahun 2014. Pemda DIY berupaya menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) sebagai upaya untuk sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi menuju integrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan guna memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat.

Pelaksanaan jamkesta ditujukan untuk mengintegrasikan kepesertaan jaminan kesehatan yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kepesertaan jamkesta dibagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesmas, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesos, Coordination of Benefits (CoB), mandiri jamkesta, Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda kabupaten/kota. Sasaran PBI Jamkesmas, PBI Jamkesos, dan PBI Jamkesda ditujukan untuk masyarakat miskin. Coordination of Benefit (CoB) mengakomodir masyarakat yang rentan miskin, dengan pembiayaan sharing antara Pemda DIY dengan kabupaten/kota. Sedangkan kesertaan program mandiri jamkesta ditujukan untuk warga yang mampu dan dilaksanakan dengan iuran peserta. hal ini diharapkan akan sejalan dengan azas jamkesta yaitu azas gotong-royong dimana ada bentuk kepedulian

sosial melalui subsidi dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu.

Khusus untuk Jamkesus, program ini merupakan bentuk keberpihakan Pemda DIY bagi penyandang disabilitas dari sisi pelayanan jaminan kesehatan. Sasaran penerima Jamkesus adalah para penyandang disabilitas yang. Melalui jamkesus tersebut selain diberikan jaminan kesehatan umum, peserta juga diberikan paket manfaat berupa bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Berikut adalah data jumlah kepesertaan jaminan kesehatan penduduk DIY :

**Tabel 2.34 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penduduk DIY Tahun 2015**

Kabupaten/Kota	PBI JKN	Jamkesta			Jamkesda Kab/Kota
		PBI Maskin	PBI CoB	Jamkesus	
Kota Yogyakarta	105.632	-	22.000	1.861	68.188
Kab. Bantul	472.442	50.000	200.000	5.545	20.000
Kab. Kulon Progo	232.517	64.419	69.794	4.305	40.756
Kab. Gunungkidul	444.382	86.612	173.913	7.355	173.224
Kab. Sleman	317.181	66.772	-	6.104	86.953
DIY	<b>1.572.154</b>	<b>267.803</b>	<b>465.707</b>	<b>25.170</b>	<b>389.121</b>

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2015

### 2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Lingkup kegiatan urusan pekerjaan umum adalah melaksanakan ketugasan penanganan pembangunan di bidang sumber daya air, kebinamargaan, keciptakaryaan dan jasa konstruksi. Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, pada urusan pekerjaan umum terdapat 18 indikator yang merupakan Fokus Layanan Urusan Wajib sebagai bagian dari aspek pelayanan umum. Berikut adalah data terkait dengan beberapa indikator urusan pekerjaan umum yang dapat disajikan.

**Tabel 2.35 Data Kondisi Eksisting Urusan Pekerjaan Umum DIY Tahun 2010-2014**

No	Indikator	Kondisi eksisting					Keterangan
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	83.46%	83.89%	71.09%	72.72%	73.70%	tahun 2012 terjadi perubahan status jalan provinsi ke nasional
2	Rasio Jaringan Irigasi	2.38	2.38	2.38	2.38	2.42	tahun 2014 terjadi perubahan Jumlah DI dan luas DI kewenangan Provinsi
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	81.85%	83.14%	85.41%	86.28%	87.07%	Target SPM terlampaui (>) dan Target MDGs akan tercapai (=)
4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	63.11%	67.62%	68.03%	70.39%	70.76%	Pada tahun 2014 Sesuai dengan SPM Kem PU No. 14/PRT/M/2010, Tersedianya sistem penanganan sampah di Perkotaan sebesar 70% sudah terlampaui.
5	Rasio rumah layak huni	0.272	0.271	0.270	0.268	0.266	
6	Rasio permukiman layak huni	0.112	0.112	0.109	0.106	0.103	
7	Panjang jalan dilalui Roda 4	690.25	690.25	619.34	619.34	619.34	tahun 2012 terjadi perubahan status jalan provinsi ke nasional
8	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak	38.00%	41.33%	45.97%	50.41%	56.70%	Sesuai dengan SPM Kem PU No.14/PRT/M/2010, Tersedianya sistem jaringan

No	Indikator	Kondisi eksisting					Keterangan
		2010	2011	2012	2013	2014	
	tersumbat						drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. Target 2014 adalah 50%
9	Lingkungan Pemukiman	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & ESDM

Dari 18 indikator pada Permendagri tersebut hanya 9 indikator yang dapat disajikan dikarenakan beberapa indikator merupakan kewenangan kabupaten/kota dan beberapa lainnya lagi bukan merupakan tupoksi dari SKPD yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Dinas PUP-ESDM.

Dalam memenuhi tanggungjawab terkait bidang sumber daya air tergantung pada perencanaan suplai air baku, baik untuk irigasi maupun rumah tangga komersial dan industri. Perencanaan suplai air baku dipengaruhi oleh arah pengembangan wilayah. Kebutuhan air untuk irigasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi antara lain karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, diversikasi tanaman dari padi ke non padi, peningkatan efisiensi yang menyebabkan penghematan penggunaan air. Kebutuhan air untuk Domestik (Rumah tangga) mengalami peningkatan sebesar 72% (dari 5,152 m<sup>3</sup>/dt menjadi 8,88 m<sup>3</sup>/dt) selama kurun waktu dari tahun 2015 s/d 2035. Hal ini terjadi disamping karena adanya pertumbuhan populasi penduduk , juga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memicu peningkatan standar kuantitas dan kualitas pemakaian air bersih per kapita. Dengan adanya rencana pengembangan kawasan industri di beberapa lokasi di DIY, diprediksikan akan adanya peningkatan permintaan air untuk kegiatan ini. Demikian juga dengan perkembangan wilayah perkotaan dengan berbagai prasarannya akan menyebabkan peningkatan permintaan air untuk sektor komersial.

Penyediaan air baku sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 1.018,53 liter/detik. Melalui Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dan Program Penyediaan Air Baku telah dibangun 5 buah embung yang tersebar di

wilayah Kabupaten Bantul sebanyak 1 buah embung , di Kabupaten Gunungkidul 1 buah embung dan 3 buah embung di Kabupaten Kulon Progo. Dari 5 buah embung tersebut dapat diperoleh tambahan ketersediaan air baku sebesar 45,20 liter/detik.

Melalui program kegiatan yang didanai APBN, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) membangun 1 buah embung di Kota Yogyakarta, yang mampu menyediakan air baku sebesar 8,67 liter/detik. Adapun dalam pemanfaatan air sungai Progo pada program pengembangan Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional Sistem Bantar tahap I yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mampu menyediakan air baku sebesar 200 liter/detik. Sehingga pada tahun 2015 total penambahan air baku sebesar 253,69 liter/detik atau secara kumulatif ketersediaan air baku mencapai 1.272,40 liter/detik, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 1.200 liter/detik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY sebesar 13.987 Ha yang terbagi menjadi satuan Daerah Irigasi (DI) sejumlah 41 DI, terdiri dari daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota 4.909 Ha (35 DI), dan daerah irigasi utuh di Kabupaten 9.078 Ha (6 DI). Untuk meningkatkan layanan penyediaan air irigasi, ditetapkan target persentase luasan DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2015 sebesar 79,5 % atau seluas 11.119,67 Ha

Dalam rangka mendukung aksesibilitas di wilayah DIY maka perlu mengembangkan fungsi jalan dan mempertahankan jalan status provinsi dalam kondisi mantap. Fungsi jalan yang dikembangkan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Pengembangan Jalur Selokan Mataram, Jogjakarta Outer Ringroad (JORR), akses ke kawasan wisata dan budaya. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

Pembangunan JJLS bermanfaat untuk membuka seluruh potensi daerah selatan di DIY seperti potensi wisata, industri kelautan dan pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat untuk menyeimbangi pertumbuhan wilayah DIY yang selama ini cenderung berkembang ke arah Utara – Timur Laut. Selain itu, JJLS merupakan satu kesatuan jaringan jalan di pulau Jawa akan memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jalan. Berdasarkan data pekerjaan konstruksi sampai dengan tahun 2015 terdapat 14,48 Km dari total panjang JJLS sebesar 121,69 Km yang terbagi dalam 3 segmen jalan belum terhubung karena merupakan trase baru. Segmen tersebut yaitu Segmen Ngremang - Srandakan 3 – Pandansimo (4,48 Km); Segmen Samas – Parangtritis (5 Km); dan Segmen Parangtritis – Girijati (5Km). Dalam upaya

untuk mengatasi kesenjangan antara timur dan barat wilayah DIY Pemda DIY telah melakukan pembebasan lahan untuk Jalan Selokan Mataram seluas 3.918 m<sup>2</sup> dari 3.200 m<sup>2</sup>. Jalan yang dibangun berada pada sisi utara dan selatan selokan Mataram untuk menghubungkan jalan arteri utara barat sampai dengan jalan arteri utara timur.

JORR direncanakan sebagai jaringan lintas utama barang sehingga kendaraan dengan tonase besar tidak masuk ke perkotaan Yogyakarta. Keberadaanterminal/stasiun angkutan barang menjadi satu bagian dalam sistem distribusi logistik di DIY dengan *inland port* sebagai pusat distribusi dan kawasan industri sebagai bangkitan. Rute JORR sepanjang 110 Km terbagi dalam 2 wilayah yaitu Kabupaten Sleman dengan panjang 69,19 Km dan Kabupaten Bantul dengan panjang 41,81 Km. JORR di wilayah Kabupaten Sleman terdiri dari 4 ruas yaitu Klangon – Tempel; Tempel – Pakem; Pakem – Prambanan; Prambanan – Piyungan. Sedangkan JORR di wilayah Bantul yaitu ruas Sedayu – Pandak; Pandak – Palbapang; Palbapang – Barongan; Barongan – Singosaren; Singosaren – Sampakan.

Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 151/ KEP/2012 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, total panjang jaringan jalan berstatus Jalan Provinsi adalah 619,34 Km dan jembatan sejumlah 225 buah dengan panjang 4.557m. Jalan Provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2015 sepanjang 457,99 km atau 73,95% dari jaringan jalan berstatus provinsi. Kondisi tersebut dicapai melalui Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang telah dilakukan dengan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan pada 14 ruas dengan total 29,61 Km. Pada program yang sama juga dilakukan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan pada 2 jembatan dengan total 49,5 meter. Pemeliharaan Rutin Jalan juga dilakukan pada Ruas Jalan Provinsi dengan total 573,14 km. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di kabupaten/kota di wilayah DIY dengan total 3.7108.4 meter.

Untuk penyediaan akses bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 32,85 %. Melalui Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur, diupayakan penyediaan lahan untuk pembangunan jalan Selokan Mataram dan melalui dana keistimewaan telah diupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan JJLS dengan luas total lahan yang dibebaskan seluas 2,104 Ha. Secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2015 lahan yang telah disediakan/dibebaskan seluas 122,974 Ha atau 32,91%, telah melampaui target RPJMD yang ditetapkan untuk tahun 2015

Dalam rangka mendukung perencanaan Kawasan Malioboro sebagai kawasan semi pedestrian maka pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Perencanaan Peningkatan Jalan pada Kawasan Malioboro dan sekitarnya yang menghasilkan 3 dokumen DED (DED ruas Suryatmajan, DED ruas jalan Mataram dan DED ruas jalan Bhayangkara)



Pembangunan Keciptakaryaannya ditujukan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman berkualitas, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2019. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target *Millennium Development Goals (MDG's)* seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan total penduduk DIY. Bila asumsi laju pertumbuhan penduduk 1% per tahun dan jumlah penduduk DIY pada tahun 2015 sebesar 3.604.176 jiwa, maka estimasi penduduk DIY pada tahun 2018 sebesar 3.676.620 jiwa. Sedangkan target RPJMD 2017 adalah 88,40% penduduk berakses air minum, maka target jumlah penduduk DIY pada tahun 2017 yang harus berakses air minum adalah sebesar 3.250.132 jiwa. Sampai dengan tahun 2015, persentase penduduk berakses air minum ditargetkan sebesar 81,25%. Dalam mencapai target tersebut intervensi yang menjadi prioritas SPAM MBR, SPAM IKK dan SPAM Perdesaan yang penekanannya pada keberfungsian (kapasitas produksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air mengalir). Untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta membutuhkan pengembangan SPAM Regional. Pada tahun 2015 telah disusun Rencana Induk SPAM DIY melalui kegiatan perencanaan pengelolaan SPAM pada Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum. Pada program yang sama melalui kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum telah dilaksanakan pemasangan pipa jaringan distribusi Kartamantul sepanjang 15 Km untuk melayani 160.000 jiwa. Untuk mendukung pengembangan SPAM Regional Kartamantul telah dibuat DED SPAM Regional Kartamantul Sistem Kebonagung dan dokumen AMDAL SPAM regional Kartamantul.

Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Mulai tahun 2015 TPA Piyungan dikelola oleh Pemda DIY, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain adalah :

- Pengelolaan sampah yang masuk berdasarkan data pengelola Sekber Kartamantul mencapai 158,829 ton/th atau mencapai 435 ton/hr (data pengelola Sekber Kartamantul) dan cenderung semakin meningkat. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya pembiayaan

kebutuhan tanah urug untuk metode *sanitary landfill* sebagaimana yang disyaratkan.

- Keterbatasan lahan untuk melengkapi sarana dan prasarana TPA seperti area pemilahan dan area sampah B3 domestik.

Berdasarkan hal tersebut maka upaya yang dilakukan adalah :

1. Mendorong pemerintah kab/kota (Yogyakarta, Sleman dan Bantul) untuk mensosialisasikan secara luas terhadap perilaku 3R masyarakat yaitu dengan memilah sampah. Pengelolaan sampah yang ideal melibatkan peran aktif masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dimulai dari Rumah Tangga.
2. Mendorong pemerintah kab/kota (Yogyakarta, Sleman dan Bantul) untuk melakukan pengangkutan sampah dengan terpilah.
3. Perluasan lahan TPA.
4. Mencari alternatif teknologi *waste to energy* yang tepat.
5. Pembangunan TPST 3R skala lingkungan khususnya di kawasan perkotaan sangat sulit dilakukan karena keterbatasan lahan, juga terkait dengan pendanaan karena membutuhkan jumlah yang cukup besar. Oleh karenanya diperlukan pembangunan stasiun peralihan untuk kegiatan 3R dengan maupun *waste to energy* sebagai alternatif untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan

Selanjutnya untuk mengurangi beban di TPA Piyungan, maka telah dibangun TPST 3R di Wirokerten dan Piyungan Kabupaten Bantul melalui kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Persampahan pada tahun 2015, serta didukung pula oleh kegiatan pembangunan TPST 3R oleh dana APBN yang tersebar di 5 kabupaten/kota di DIY. Selain TPA Piyungan juga terdapat TPA di Kulonprogo dan Gunungkidul yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten melalui UPTD yang pembangunannya bersumber APBN. Terhadap 2 TPA tersebut maka difokuskan pada optimalisasi pengolahan melalui cakupan pelayanan.

Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah merupakan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dengan fokus penanganan pada wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelayanan sistem terpusat oleh IPAL Sewon. Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka potensi jumlah air limbah domestik akan semakin bertambah. Penanganan air limbah domestik dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Pengelolaan limbah cair domestik di DIY dapat dibagi menurut teknologi pengelolaan yang dilakukan yaitu teknologi *off site system* dan *on site system* berupa individual atau komunal. Penambahan

layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Sampai dengan tahun 2014 cakupan pelayanan IPAL Sewon telah mencapai sekitar 18.701 SR. Angka ini telah melampaui target di RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 15.800 SR. Pada tahun 2015, melalui koordinasi intensif dengan kabupaten kota sambungan rumah yang terpasang kumulatif mencapai 20.101 SR, jauh melampaui target RPJMD tahun 2015 sebesar 17.300 SR.

**Tabel 2.36 Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon Sampai Dengan Tahun 2015**

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)
1	Kabupaten Bantul	1.764
2	Kota Yogyakarta	16.170
3	Kabupaten Sleman	2.167
<b>Jumlah Total</b>		20.101

*Sumber Data: Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, 2015*

Dari capaian diatas, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2017 ), capaian kinerja tahun 2015 telah mencapai 95,71%.

Pada tahun anggaran 2105 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan pembangunan jaringan pipa lateral air limbah terpusat sepanjang 1,8 Km dan pembangunan pipa service air limbah sepanjang 2,2 Km. Sedangkan melalui pendanaan APBN telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Induk Air Limbah Terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sesuai skenario kesepakatan MSMHP (*Metropolitan Sanitation Management and Health Project*).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang amat pesat dan pembangunan tempat tinggal penduduk yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) seperti di daerah-daerah yang seharusnya jadi resapan/tempat parkir air (*Retarding Pond*) dan daerah-daerah bantaran sungai mengakibatkan peningkatan volume air yang masuk ke saluran drainase dan sungai sehingga terlampauinya kapasitas penyediaan prasarana dan sarana drainase perkotaan dan daya tampung sungai.

Akibat dari permasalahan tersebut diatas adalah terjadinya banjir atau genangan. Mengacu pada dokumen Masterplan Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Penanganan hingga tahun 2014 telah mencapai 49,20 % yang ditargetkan hanya 39,90 % dan 45,90 % pada tahun 2015. Berdasarkan pertumbuhan penanganan tersebut yaitu sebesar 13,91 % maka target akhir pada tahun 2017 sebesar 57,90 %. Penanganan infrastruktur dasar yang terkait dengan drainase dilakukan melalui kegiatan Perencanaan dan pembangunan pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. Pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong didapat output Dokumen Perencanaan Drainase di 5 titik. Sedangkan pada kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pada tahun 2015 telah dilakukan penanganan di 5 titik genangan melalui pembangunan saluran drainase di Kawasan Kotagede, Wirosaban, Sambilegi, Lempuyangan, dan Mlati, sehingga secara total telah tertangani sejumlah 30 titik genangan.

Pengembangan kawasan Agropolitan/Minapolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan dimana kawasan tersebut berada. Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan yang merupakan penguatan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasiskan kekuatan internal, akan mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi inter dan intra regional. Di wilayah DIY teridentifikasi 30 kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensial yang tersebar di Kabupaten Sleman (8 kawasan), Kabupaten Bantul (7 kawasan), Kabupaten Kulon Progo (7 kawasan) dan Kabupaten Gunungkidul (8 kawasan). Melalui Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan Dan Desa Potensi telah dilakukan kegiatan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan berupa pembangunan infrastruktur jalan Kawasan Agropolitan Nanggulan dan Kawasan Agropolitan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Sehingga pada tahun 2015 secara kumulatif telah terfasilitasi infrastruktur sebanyak 19 kawasan dari 30 kawasan agropolitan/minapolitan atau sebesar 63%, melampaui target RPJMD 2015 sebesar 46%.

Kinerja jasa konstruksi diukur dari terlaksananya pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi. Dari unsur pengaturan jasa konstruksi, telah disosialisasikan 6 peraturan dari target 7 peraturan yang telah tersosialisasikan, dari unsur pemberdayaan jasa konstruksi, telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi kumulatif sebanyak 3.515 org tenaga kerja konstruksi dari target sebanyak 4000 orang, dan dari unsur pengawasan jasa konstruksi telah dicapai target layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Jasa Konstruksi sebanyak 4 layanan dari target 7 layanan yang harus dipenuhi.

#### 2.3.1.4 Urusan Perumahan

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Pemerintahan daerah provinsidan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pelayanan dasar meliputi:

1. Rumah layak huni dan terjangkau;
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Indikator pencapaian ketersediaan rumah layak huni adalah sebesar 100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dengan waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.

Kebijakan pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017 melalui Misi IV, yakni memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Adapun arah kebijakan dari Misi IV untuk sektor perumahan adalah :

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan pihak pihak terkait dalam pemenuhan penyediaan perumahan;
2. Mensinergikan kebijakan dan mengkolaborasikan kelembagaan dalam upaya debottlenecking pemenuhan kebutuhan perumahan (keterjangkauan, kelembagaan dan ketersediaan lahan).

Pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, begitu juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 3.594.854 jiwa pada Tahun 2013 diperkirakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dibutuhkan rumah sekitar 898.713 unit rumah, dengan asumsi 1 rumah 4 jiwa.

Pembangunan/pengembangan unit baru yang dilakukan di DIY khususnya diperuntukkan bagi kaum MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang baru dapat dilaksanakan melalui program :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
3. Program Pengurangan Kawasan Kumuh.

Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu merupakan salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Perumahan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah rumah tidak layak huni di DIY dari kondisi awal pada tahun 2012 sebesar 8,5% menjadi 6% pada tahun 2017.

Berdasarkan data Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) DIY 2011 masih terdapat 91.200 keluarga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Dari jumlah tersebut yang tidak layak huni terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan.

Penanganan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni melalui pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulan sebagai berikut :

**Tabel 2.37 Filitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014**

No.	Kabupaten/Kota	Stimulan RTLH				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Gunung Kidul	80	180	488	317	400
2.	Bantul	80	140	400	323	291
3.	Kulonprogo	80	120	140	180	104
4.	Sleman	40	140	418	234	232
5.	Yogyakarta	40	40	88	110	72
	Jumlah	320	620	1.610	1.234	1.099
	Jumlah Total	4.883				

Sumber : DPUP & ESDM DIY, 2014

Perwujudan rumah sehat juga dilakukan melalui upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah secara swadaya, maka Pemerintah DIY setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan.

Jumlah komunitas perumahan total di DIY tercatat 438 komunitas. Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan fasilitasi bagi komunitas perumahan sebanyak 283 komunitas. Pada Tahun 2014 total Komunitas

Perumahan yang difasilitasi Pemerintah Daerah DIY melalui kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan adalah 64 Komunitas dengan rincian meliputi :

- Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat, telah dilakukan bagi komunitas perumahan di 15 (limabelas) Komunitas.
- Peningkatan kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan pada 49 (empatpuluhsembilan) komunitas.



**Gambar 2.36** Permukiman Padat di Kawasan Sungai Code

Pembangunan unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan telah mencapai 28 Twin Blok sampai dengan tahun 2013. Keseluruhan pembangunan Rusunawa bersumber dari APBN sedangkan untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebaran Rusunawa yang ada di DIY sebagian besar berlokasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Adapun peruntukan penggunaan dari Rusunawa tersebut adalah untuk; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, dan pendidikan. Rincian Rusunawa yang ada di DIY adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.38** Sebaran Rusunawa di DIY Tahun 2013

No	Nama Rusun	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Twin Blok	Unit	Dibangun
----	------------	--------------------	-----------	------	--------------	------	----------

No	Nama Rusun	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Twin Blok	Unit	Dibangun
1.	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	96	Kemen PU
2.	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	96	Kemen PU
3.	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	96	Kemen PU
4.	Pringwulung 1	Sleman	Depok	Condongcatur	2	196	Kemen PU
5.	Pringwulung 2	Sleman	Depok	Condongcatur	1	72	Kemen PU
6.	Panggungharjo	Bantul	Sewon	Panggung harjo	2	192	Kemen PU
7.	Cokrodirejan	Kota Yk	Danurejan	Suryatmajan	1	72	Kemen PU
8.	Tegalpanggung	Kota Yk	Danurejan	Tegalpanggung	1	68	Kemen PU
9.	Jogoyudan	Kota Yk	Jetis	Gowongan	1	96	Kemen PU
10.	Jogoyudan	Kota Yk	Jetis	Gowongan	1	96	Kemen PU
11.	U I I	Sleman	Ngemplak	Umbulmartani	1	96	Kemen PU
12.	U I I	Sleman	Ngemplak	Umbulmartani	1	96	Kemen PU
13.	U G M	Sleman	Depok	Caturtunggal	1	96	Kemen PU
14.	U G M	Sleman	Depok	Caturtunggal	1	96	Kemen PU
15.	U G M	Sleman	Depok	Caturtunggal	1	96	Kemenpera
16.	U M Y	Bantul	Kasihani	Tamantirto	3	288	Kemen PU
17.	U S T	Kota Yk	Umbulharjo	Tahunan	1	96	Kemenpera
18.	U A D	Kota Yk	Umbulharjo	Giwanangan	1	96	Kemenpera
19.	U N Y	Kulonprogo	Pengasih	Pengasih	2	192	Kemenpera
20.	Sanatadharma	Sleman	Maguwoharjo	Pilangan	1	96	Kemenpera
21.	Lanud	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	1	96	Kemenpera
22.	Adisucipto	Bantul	Kasihani	Ngestiharjo	1	96	Kemenpera
23.	Tambak Stikes	Sleman	Gamping	Ambarketawang	1	96	Kemenpera
					28	2616	

Sumber : Dinas PUP & ESDM, 2014

Sementara itu, pada akhir tahun 2014 diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun dan secara terus menerus telah melahirkan *dynamic phenomenon of urbanization*. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan, baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah. Kompetisi penggunaan lahan di daerah perkotaan mengakibatkan fenomena kawasan kumuh. Luasan kawasan kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.39 Data Luasan Wilayah Kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014**

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	Yogyakarta	278.70
2.	Sleman	41.41
3.	Bantul	27.29
4.	KulonProgo	32.61
5.	Gunungkidul	32.61
Jumlah		412.62

Sumber : Kabupaten/Kota di DIY dan DPUP & ESDM DIY, Tahun 2014

Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah DIY melakukan kegiatan penataan kawasan kumuh untuk mengurangi jumlah lokasi/luasannya dan telah dilakukan pada 42 titik lokasi, dari total jumlah titik lokasi kawasan kumuh sebanyak 107 titik lokasi.



### 2.3.1.5 Urusan Penataan Ruang

Dimensi ruang (spasial) mempunyai arti penting dalam konteks pengembangan wilayah, karena ruang yang terbatas dan kondisifisikgeografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya dapat menciptakan konflik namun juga dapat membawa kemajuan bagi individu dan masyarakat. Dalam kerangka pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi konflik keruangan maka kebijakan penataan ruang sangat diperlukan.

Pengembangan wilayah sendiri ditujukan untuk menyerasikan dan mensinkronisasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah. Memasuki masa otonomi daerah, di Indonesia masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan wilayah. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain:

- 1) kesenjangan dalam dan antar wilayah
- 2) keterbatasan akses ke kawasan terpencil atau tertinggal
- 3) sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral
- 4) lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya
- 5) belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah
- 6) pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah
- 7) terakumulasinya modal di kawasan perkotaan.

Target kinerja Program yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2012 – 2017 untuk urusan Tata Ruang sampai dengan akhir RPJMD adalah

- 1) tercapainya ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis sebanyak 19 kawasan strategis;
- 2) tercapainya 90% kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi; serta
- 3) tercapainya 100% pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawahan.

Sampai dengan tahun 2015 realisasi pelaksanaan RPKD DIY dapat dijelaskan seperti terlihat pada tabel berikut dibawah.

Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tata Ruang

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target dan realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun								Kondisi pada Akhir Periode (2017)	Kinerja Akhir RPJMD
		2012		2013		2014		2015			
		Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.		
1	Ketersediaan Rencana Tata Ruang Pada Kawasan strategis Provinsi	10	10	12	12	14	14	16	16	19	
2	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi	45%		50%	63,93%	60%	64,21%	70%	66%	90%	
3	Persentase Pengendalian Tata Ruang Pada Kawasan perkotaan dan Kawasan Lindung Bawah	10%		20%	20%	40%		60%	58,64	100%	

Pada tahun 2015 telah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029. Dinamika Dasar peninjauan kembali yaitu:

- 1) Adanya perubahan/penyempurnaan peraturan atau rujukan sistem penataan ruang yang berlaku mengikat bagi Pemerintah Daerah DIY dan belum pernah digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sebelumnya. Salah satunya yaitu amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana salah satu keistimewaan DIY yang ditetapkan adalah urusan Tata Ruang sebagai dasar dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang pada kawasan Kasultanan dan Kadipaten.
- 2) Terjadi perubahan kebijakan pemerintah/sector untuk pembangunan skala besar atau kegiatan penting sehingga tidak dapat ditampung oleh pola dan struktur ruang RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 - 2029 yang ada. Perubahan tersebut akan mengganggu rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga mungkin dapat menurunkan efisiensi pembangunan dan atau kerusakan lingkungan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain penentuan kawasan cagar alam geologi oleh Kementerian ESDM, pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), dan rencana pembangunan bandara baru.

- 3) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan seringkali radikal dalam hal memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan meminimalkan kerusakan lingkungan, sehingga kapasitas daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan oleh karena hal ini harus selalu diantisipasi untuk keperluan optimasi pola dan struktur tata ruang yang ada.
- 4) Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada, dan memerlukan relokasi kegiatan budaya maupun lindung yang ada untuk kepentingan pembangunan pasca bencana tersebut. Salah satu bencana alam yang berpengaruh terhadap struktur dan pola ruang yaitu erupsi gunung merapi pada tahun 2010 yang berakibat pada penetapan kawasan rawan bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, urusan Tata Ruang menjadi tugas dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Kinerja penataan ruang di DIY didukung oleh Program Perencanaan Tata Ruang; Program Pemanfaatan Ruang; dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Fokus Program Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 yaitu pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Program Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendorong/koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota untuk melegalkan perangkat pengendalian seperti Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

### **2.3.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawahdan dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pada perubahan anggaran Tahun 2015 Pemerintah Daerah DIY melakukan kegiatan review RPJMD 2012-2017. Review tersebut dilakukan karena terdapat beberapa indikator dalam RPJMD yang sudah melampaui target capaian dan adanya perubahan struktur kelembagaan di Pemda DIY yang akan berlaku pada tahun anggaran 2016. Adapun indikator dalam RPJMD yang sudah melampaui target capaian tersebut adalah:

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat  
Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2014.
2. Angka Harapan Hidup  
Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2015.
3. Jumlah Wisatawan Mancanegara  
Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2015.
4. Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya  
Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2016.
5. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah  
Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2016.
6. Jumlah Wisatawan Nusantara  
Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2017.

Perubahan RPJMD 2012-2017 telah diatur di dalam Peraturan Daerah DIY nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2012-2017 serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan target Pencapaian sasaran Tahunan Rencana jangka panjang Menengah Kebijakan Umum dan Program pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah daerah Tahun 2012-2017. Perubahan RPJMD DIY 2012-2017

telah mengkaji indikator kinerja sasaran pemda, indikator kinerja sasaran SKPD, sampai dengan program SKPD dengan melihat kembali alur pikir perencanaan dan perhitungan indikator kinerja tersebut.

Dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022, pada tahun 2016 dilakukan kegiatan penyusunan naskah *backgorund study* RPJMD tahun 2018-2022. Dalam kegiatan tersebut akan dilakukan penyusunan kerangka teoritik, konsep awal sampai dengan indikasi program prioritas daerah dengan pendekatan-pendekatan teknis maupun akademis. Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan, serta isu strategis pembangunan;
2. Melakukan analisis dengan pendekatan teknis dan akademis baik secara sektoral maupun kewilayahan;
3. Merumuskan indikasi visi, misi, tujuan, sasaran pemda, sasaran SKPD, strategi, kebijakan, serta indikasi program pembangunan, beserta indikasi target pembangunan 5 tahunan;

Perencanaan pembangunan daerah DIY tahun 2016 yang tertuang di dalam RKPD DIY tahun 2016, terdiri dari 230 program dan 1.969 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut terbagi di dalam 7 prioritas.

Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program kegiatan yang lain. Tujuan prioritas adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Ketujuh prioritas di dalam RKPD DIY tahun 2016 dengan total penganggaran sekitar 2,5 milyar rupiah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.41 Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016**

No.	Prioritas	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Persentase
1	Pertumbuhan ekonomi	39	188	8,67%
2	Kesehatan	31	80	6,52%
3	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	70	1.376	20,72%
4	Lingkungan Hidup dan	27	92	17,52%

No.	Prioritas	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Persentase
	Pemanfaatan Ruang			
5	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	28	80	14,61%
6	Pendidikan	20	110	28,81%
7	Sosial Budaya	15	43	3,16%

Sumber: *Jogja Plan, RKPD 2016*

### 2.3.1.7 Urusan Perhubungan

Sektor perhubungan sangat berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dari adanya interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Hal ini dikarenakan ketersediaan prasarana jalan sebagai jaringan aksesibilitas antar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah sangat mencukupi.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD-DIY) tahun 2013-2017, sektor perhubungan masuk dalam misi ke-4 dan mempunyai sasaran pembangunan untuk meningkatkan layanan publik terutama dalam hal penataan sistem transportasi dan peningkatan aksesibilitas masyarakat di pedesaan, dengan arah kebijakan yang ditetapkan adalah Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan.

Arah kebijakan tersebut, memiliki 3 (tiga) indikator besar yakni :

- a. Penumpang yang terlayani Angkutan Umum Perkotaan
- b. Penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan; dan
- c. Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi.

Ketiga indikator sasaran tersebut, mencerminkan hal besar yang menjadi fokus utama dalam penataan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta yang ter-integrasi, dimana secara garis besar dapat disampaikan bahwa transportasi perkotaan di Perkotaan Yogyakarta akan berhasil baik jika didukung 3 pilar yakni : angkutan umum, pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas dan penegakan hukum.

Penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, dilandasi pada kondisi lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta yang semakin didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, alternatif angkutan umum yang ada, masih sangat terbatas baik jumlah maupun jenis layanannya, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien.

Keberadaan layanan Trans Jogja dengan *konsep buy the service*-nya, tidak serta merta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, menyebabkan masyarakat masih leluasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan aktifitas dan mobilitas mereka. Dengan kata lain, penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan. Oleh karena itu, didalam mewujudkan penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, terdapat 2 program besar yang harus berjalan, bersinergi dan saling melengkapi, yakni :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dan
2. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas

Kedua program tersebut didukung penuh oleh Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan yang berperan sebagai fungsi regulator sehingga dapat menjamin kualitas layanan angkutan umum maupun ketertiban lalu lintas kendaraan bermotor di jalan.

Sampai dengan tahun 2015, penumpang yang terlayani oleh angkutan umum perkotaan, dalam hal ini Trans Jogja adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.42 Jumlah Penumpang Terangkut dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2009-2014**

No.	TAHUN	PENUMPANG/HARI	PENDAPATAN
1.	2008	10.326	Rp. 11.306.577.500,00
2.	2009	14.013	Rp. 15.344.428.000,00

No.	TAHUN	PENUMPANG/HARI	PENDAPATAN
3.	2010	15.984	Rp. 17.502.644.000,00
4.	2011	16.478	Rp. 18.043.004.000,00
5.	2012	15.897	Rp. 17.407.646.993,00
6.	2013	16.844	Rp. 18.444.304.884,00
7.	2014	18.427	Rp. 20.177.264.826,00
8.	2015	10.446 *)	Rp. 11.438.765.813,00 *)

\*) data sampai bulan juni 2015

Sumber : UFT Trans Jogja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY, Tahun 2009-2014

Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas, indikator yang digunakan adalah prosentase capaian kawasan yang telah disepakati untuk diterapkan manajemen rekayasa lalulintas.

Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalulintas di persimpangan, pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalulintas di persimpangan dengan konsep ATCS (area traffic control systems) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan saat ini telah terpasang 25 unit ATCS atau 45% dari 55 simpang yang direncanakan. Secara rinci, ATCS yang sudah terpasang adalah 16 unit yang dialokasikan melalui APBN, 1 unit melalui APBD-DIY dan 8 unit dari APBD Kota Yogyakarta. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan sinyal bus priority, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung sinyal *bus priority*. Integrasi sistem pengaturan lampu lalulintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY.

### 2.3.1.8 Urusan Lingkungan Hidup

#### A. Kondisi Kualitas Air

##### 1. Kondisi Kualitas Air Sungai

Kualitas air terutama air sungai terpengaruh oleh aktifitas manusia. Dari hasil pemantauan 10 sungai di DIY tahun 2014 terutama parameter bakteri koli tinja, total koli, BOD dan COD ada kecenderungannya dari waktu ke waktu bervariasi, terdapat 4 sungai yang mengalami peningkatan kualitas dan 6 sungai yang



mengalami penurunan kualitas. Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air sungai antara lain:

- a. Pembuangan limbah cair dan sampah ke sungai secara illegal baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM.
- b. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak.
- c. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.
- d. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kepadatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.

Analisis hasil pemantauan kualitas air untuk menentukan status mutu air sungai digunakan metode Storet. Hasil analisis Storet secara umum sungai-sungai di DIY sudah masuk kategori cemar berat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.43 Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet, 2014**

No.	Nama Sungai	Nilai Baku Storet	Nilai Eksisting Kualitas Air Sungai (2013)	Nilai Eksisting Kualitas Air Sungai (2014)	Keterangan
1	Winongo	≤ -31	-96 hingga -120	-75 hingga -106	Cemar Berat (turun)
2	Code	≤ -31	-86 hingga -112	-89 hingga -120	Cemar Berat (naik)
3	Gajahwong	≤ -31	-74 hingga -120	-78 hingga -108	Cemar Berat (turun)
4	Bedog	≤ -31	-84 hingga -108	-94 hingga -111	Cemar Berat (naik)
5	Belik	≤ -31	-100 hingga -126	-104 hingga -120	Cemar Berat (turun)
6	Konteng	≤ -31	-86 hingga -106	-94 hingga -116	Cemar Berat (naik)
7	Kuning	≤ -31	-83 hingga -90	-85 hingga -102	Cemar Berat (naik)
8	Oyo	≤ -31	-92 hingga -98	-92 hingga -111	Cemar Berat (naik)
9	Tambakbayan	≤ -31	-98 hingga -	-84 hingga -	Cemar Berat

No.	Nama Sungai	Nilai Baku Storet	Nilai Eksisting Kualitas Air Sungai (2013)	Nilai Eksisting Kualitas Air Sungai (2014)	Keterangan
			106	107	(turun)
10	Bulus	≤ -31	-70 hingga -76	- 93 hingga - 98	Cemar Berat (naik)

Sumber : SLHD, 2013 dan Laporan Analisa Data Kualitas Air Sungai di DIY, BLH, 2014

Parameter yang dominan terdeteksi melebihi baku mutu antara lain timbal, tembaga, zink, sulfida, fenol , klorin bebas, bakteri total koli dan bakteri koli tinja. Adapun nilai parameter bakteri koli tinja dan bakteri total koli masih melebihi baku mutu disinyalir berasal dari limbah domestik dan kotoran ternak.

Secara umum pada pemantauan kualitas air tahun 2014 terjadi penurunan tingkat pencemaran dari pemantauan periode bulan Februari sampai dengan September. Kondisi terburuk pada bulan Februari dengan dominasi cemar berat, sedangkan pada periode pemantauan bulan Juni dan September mengalami perbaikan menjadi cemar hingga cemar ringan.

## 2. Kondisi Kualitas Air Tanah

Pada tahun 2014 dilakukan pemeriksaan kualitas air tanah di beberapa lokasi permukiman penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Pengujian dilakukan dalam dua tahap yaitu bulan April dan bulan Juni dengan masing masing periode jumlah sampel yang diambil sebanyak 34 sampel, sehingga total sampel yang diambil adalah 68 sampel. Hasil analisis laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990.

Dari 68 sampel air sumur yang diuji dapat diketahui beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu, yaitu kekeruhan, pH, Nitrat, Mangan, Bakteri Coli (coliform). Untuk parameter kekeruhan, hanya ada satu sampel yang tidak memenuhi baku mutu (1,47%) yaitu sumur di Gambiran Yogyakarta. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan penyebab tingginya angka kekeruhan pada air sumur. Tingginya angka kekeruhan antara lain disebabkan oleh adanya zat koloid, partikel zat padat, zat organik, dan mikro organisme dalam air.

Untuk parameter pH sampel yang tidak memenuhi baku mutu sebanyak 16,18% atau sebanyak 11 sampel, antara lain ditemukan di Sleman 1 sampel, Yogyakarta 5 sampel, Bantul 1 sampel dan Kulon Progo 4 sampel. Air bersih sebaiknya mempunyai

pH yang netral, tidak terlalu asam ataupun terlalu basa. Tingginya tingkat keasaman air dapat disebabkan karena asam hasil biodegradasi kotoran ternak terlarut dalam akuifer air tanah dangkal. Air yang terlalu asam dapat menyebabkan pelarutan logam berat dan menyebabkan korosi pada jaringan distribusi air minum.

Untuk unsur mangan, dari 68 sampel yang diuji terdapat 6 sampel yang kandungan mangannya melebihi baku mutu. Berdasarkan keterangan PDAM Tirta Marta kandungan mangan di DIY cukup tinggi karena secara alami cukup tinggi, dapat juga disebabkan adanya limbah domestik dan pelarutan mineral.

Diantara parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi dari hasil pengujian 68 sampel air sumur dapat diamati hampir sebagian besar sampel air sumur tidak memenuhi baku mutu untuk parameter mikrobiologi, yaitu bakteri coliform/total koli dan bakteri koli tinja, hanya 22 sampel (15 sampel) yang memenuhi baku mutu untuk parameter bakteri koliform. Bakteri koliform merupakan mikroorganisme indikator yang digunakan untuk menentukan kualitas air. Keberadaan bakteri koli menunjukkan kemungkinan adanya kontaminasi mikroorganisme lain yang bersifat patogenik bagi kesehatan. Bakteri koli dapat digolongkan menjadi bakteri koli fekal/koli tinja dan non fekal. Contoh bakteri koli tinja adalah *Escherichia coli* yang berasal dari kotoran hewan dan manusia.

Tingginya jumlah bakteri koli termasuk koli tinja dalam air sumur yang diperiksa dikawatirkan membawa dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat pengguna sumber air tersebut. Salah satu penyakit yang disebabkan *Escherichia coli* adalah diare. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tingginya bakteri koli dalam air sumur, antara lain dengan memberikan chlor diffuser. (Laporan Analisa Data Air Tanah di DIY, BLH 2014)

### 3. Kondisi Kualitas Air Laut dan Pesisir

Laut dan pesisir DIY merupakan bagian dari pantai selatan Pulau Jawa yang memanjang dari ujung barat Kabupaten Kulon Progo hingga ujung timur Kabupaten Gunungkidul. DIY mempunyai panjang garis pantai 113 km dengan pantai yang datar - landai (kemiringan lereng 0-2 %) sepanjang kurang lebih 42 km yang berada di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dengan ketinggian berkisar 0 hingga 50 m dari permukaan laut (dpl). Pantai yang berada di Kabupaten Gunungkidul memiliki kemiringan lereng yang bervariasi 2% hingga lebih dari 40% dengan ketinggian berkisar 0 hingga 250 m sepanjang lebih kurang 71 km.

Kedalaman maksimum laut di selatan pantai D.I. Yogyakarta hingga sejauh 12 mil mencapai 500 m. Semakin ke arah selatan,

kedalaman perairan Samudra Hindia secara gradual bertambah lebih curam hingga mencapai kedalaman 4000 m. Daerah ini merupakan palung laut yang memanjang dari arah barat ke timur. Ini merupakan zona tumbukan antara lempeng tektonik samudra dengan lempeng tektonik benua Asia.

Berdasarkan hasil analisis sampel di lapangan kualitas air laut di DIY untuk parameter fisika, kimia dan biologi adalah sebagai berikut :

#### 1. Parameter Fisika

Parameter fisika yang diukur dalam pemantauan kualitas air laut adalah kekeruhan, temperatur, warna, baudi dan TSS air laut. Berikut ini akan dibahas satu persatu parameter fisika, kecuali bau. Hal ini dikarenakan dalam pemantauan ditemukan bahwa semua sampel yang diambil tidak berbau dan telah sesuai dengan baku mutu.

a) Kekeruhan (*turbiditas*) merupakan kandungan bahan organik maupun anorganik yang terdapat di perairan dan berpengaruh terhadap proses kehidupan organisme yang ada di perairan tersebut. Kekeruhan yang tinggi menyebabkan turunnya kandungan oksigen. Hal ini disebabkan intensitas cahaya matahari yang masuk dalam perairan menjadi terbatas karena kekeruhan yang tinggi oksigen. Terdapat 9 titik pemantauan yang kekeruhannya melebihi baku mutu, yaitu di pantai Glagah, Trisik, Kuwaru, Depok, Krakal pada periode April dan di pantai Samas, Depok, Baron, dan Indrayanti pada periode Agustus. Keruhnya air laut pada sebagian besar pantai menunjukkan bahwa kondisi di Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah hulu kurang baik. Hal ini sebagai akibat terjadinya erosi yang kemungkinan disebabkan tutupan pohon yang kurang memadai, pengambilan pasir yang intensif atau adanya sampah di aliran sungai.

#### b) Temperatur

Temperatur air laut terpantau pada dua belas pantai menunjukkan hasil antara 25,6 – 27,7°C. Pada pemantauan bulan Agustus rata-rata suhu lebih daripada pemantauan bulan April. Perbedaan rata-rata suhu bisa disebabkan oleh kelembaban udara. Fluktuasi suhu juga disebabkan oleh angin, semakin kencang angin bertiup maka suhu semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Hasil pengukuran temperatur tersebut masih berada dalam batas normal, tidak ada kenaikan temperatur maupun penurunan temperatur yang signifikan.

#### c) Warna

Warna air laut terjadi karena air laut menyerap warna. Warna yang diserap berasal dari cahaya, kandungan sedimen, dan kandungan zat organik atau anorganik. Kandungan zat organik dalam air laut misalnya adanya alga merah, hijau, dan biru. Sedangkan pada air yang jernih, sinar matahari dapat menembus hingga kedalaman 200 meter. Warna air laut yang jernih ini merupakan lingkungan yang baik bagi terumbu karang dan coral untuk berkembangbiak.

d) TSS

(Total Suspended Solid) Total suspended solid air laut adalah kandungan zat padat yang tersuspensi dalam air laut, dapat berupa pasir, lumpur, tanah maupun logam berat atau partikel tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi ataupun komponen mati seperti detritus dan partikel anorganik. Nilai TSS dapat dianggap sebagai indikator awal dalam mengevaluasi kondisi lingkungan pesisir. Diketahui bahwa konsentrasi TSS air laut terdapat lebih dari 50% lokasi pantai di DIY telah melebihi bakumutu yang berkisar antara 4,4 – 94,6 mg/L. Kandungan TSS yang tinggi terukur pada pantai-pantai yang relatif lebih padat pengunjungnya seperti pantai Depok, Baron, Krakal dan Indrayanti.

2. Parameter Kimia Pengukuran parameter kimia pada air laut yang diperuntukkan wisata bahari terdiri dari pH, salinitas, Minyak dan Lemak, Nitrat (NO<sub>3</sub>), Fosfat (PO<sub>4</sub>), BOD, DO, Fenol, Detergen, dan Amoniak. Uraian hasil pengukuran dan analisis parameter kimia sebagai berikut:

a.) Derajat Keasaman (pH)

Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion hydrogen dalam air. Baku Mutu pH untuk laut 0 20 40 60 80 100 Konsentrasi TSS (mg/L) Lokasi Pemantauan Nilai NAB TSS : 20 mg/L April Agustus Status Lingkungan Hidup Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2014 26 bahari berkisar antara 7 – 8,5, di luar nilai itu berarti air laut mengalami pencemaran. Hasil nilai pH pada 12 lokasi pemantauan nilai pH normal pada sebagian besar titik pemantauan, tetapi ada yang berada dibawah bakumutu atau bersifat asam yang terdeteksi di pantai Krakal, dan agak asam terdeteksi di pantai Baron. pH yang asam ini kemungkinan disebabkan oleh pencemaran udara, tanah dan air yang disebabkan limbah industri atau asap kendaraan.

b.) Salinitas

Berdasarkan pemantauan, kadar salinitas air laut berkisar antara 39 -55 ‰. Tidak ada batas maksimal salinitas yang ditentukan, sehingga semua masih dalam batas alami perairan. Musim penghujan dan kemarau pada tahun 2014 tidak menyebabkan perbedaan salinitas. Kadar salinitas paling tinggi ditemukan di Baron, Krakal dan Idrayanti.

c.) Nitrat (NO<sub>3</sub>)

Hasil pengukuran kadar Nitrat air laut menunjukkan bahwa kadar Nitrat telah melampaui baku mutu yang diperkenankan (0,008 mg/L), yaitu  $\leq 0,066$  mg/L. Tingginya kadar nitrat kemungkinan berasal dari kegiatan restoran yang banyak terdapat di tepian pantai yang mengalirkan limbahnya ke laut, atau berasal dari kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida. Kadar nitrat dari tahun ke tahun nilainya rata-rata hampir sama pada dua tahun terakhir, yaitu tahun 2012 dan 2013. Sedang tahun 2011 kadar nitrat air laut sangat berbeda, yaitu berkisar antara 0,387 – 2601,457 mg/L, tahun 2014 ini kadar nitrat menurun drastis yaitu  $\leq 0,066$  mg/L, namun tetap masih melebihi bakumutu. Kadar tertinggi pada tahun-tahun sebelumnya terdapat di pantai Glagah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pertanian pantai dengan sayuran dan buah yang sangat marak, membutuhkan pemupukan yang intensif sehingga menyumbang nitrat yang tinggi.

d.) BOD

Nilai BOD penting untuk menentukan tingkat pencemaran dari tingkat hulu sampai muara. Konsentrasi BOD air laut di DIY berkisar antara 0,14 – 0,91 mg/L, yang menunjukkan bahwa BOD air laut masih berada di bawah ambang batas (10 mg/L). Rendahnya kadar BOD menunjukkan bahwa bahan pencemar organik yang mudah membusuk yang terkandung dalam air laut masih dapat ditoleran, sehingga tidak menimbulkan pencemaran.

e.) DO (Dissolved Oxygen)

Adalah oksigen yang terlarut dalam air. kisaran kadar DO antara 0,29 – 9,42 mg/L dengan bakumutu minimal 5 mg/L. Hal ini menunjukkan bahwa kadar oksigen terlarut sangat rendah sebagian besar hasil pemantauan. Pada periode II di bulan Agustus, kadar DO jauh lebih rendah daripada kadar yang ditentukan. Kadar DO yang rendah ini kemungkinan disebabkan oleh kadar salinitas yang tinggi.

f.) Fosfat (PO<sub>4</sub>)

Fosfat merupakan bahan pengisi detergen, karena fosfat mempunyai sifat yang menguntungkan karena aman digunakan dan tidak beracun bagi hewan air, tidak korosif, tidak mudah terbakar sehingga aman digunakan dalam mesin cuci, aman dalam berbagai pewarna dan kain. Adanya fosfat di perairan dan pesisir berasal dari sungai. Kadar fosfat air laut selama dua periode pemantauan berkisar  $\leq 0,02$  -  $\leq 0,015$  mg/L. Kadar tersebut telah melampaui baku mutu (0,015 mg/L) yang diperkenankan, walaupun hanya kecil saja.

g.) Fenol

Senyawa ini sering ditemukan di perairan laut yang merupakan polutan dari tumpahan minyak mentah, tumpahan bahan bakar kapal, dan pembuangan limbah industri minyak bumi. Fenol menimbulkan bau tidak sedap, bersifat racun dan iritasi kulit. Disamping itu fenol menyebabkan gangguan pada manusia dan kematian organisme yang terdapat pada air dengan nilai konsentrasi tertentu. Senyawa Fenol tidak diperbolehkan dalam perairan wisata laut bahari atau ambang batas 0 mg/L. Terdapat empat lokasi yang kadar fenolnya melebihi bakumutu yaitu Pantai Glagah, Pantai Trisik, Pantai Kuwaru dan Pantai Ngrehan.

h.) Minyak dan Lemak

Merupakan padatan yang mengapung di atas permukaan air. Minyak dilaut berasal dari pembersihan dan pencucian kapal motor, pengeboran minyak di dekat laut, buangan pabrik, biasanya terbawa gelombang atau pembuangan limbah yang mengandung minyak di daerah pantai atau di daratan yang dialirkan ke pantai. Minyak dan lemak air laut di 12 pantai di DIY berkisar antara 0 – 6 mg/L, dan hampir 50% melebihi batas baku mutu yang ditentukan (1 mg/L). Kadar tertinggi di pantai Glagah pada periode pemantauan bulan Agustus. Rata-rata kadar minyak dan lemak pada periode April lebih rendah daripada bulan Agustus, bahkan pada lima lokasi tidak mengandung minyak dan lemak (nihil).

i.) Detergen

Pemakaian detergen ditengarai meningkat setiap tahunnya karena mempunyai efektifitas pembersihan yang lebih baik daripada sabun. Detergen digolongkan sebagai bahan pencemar karena limbah buangannya bersifat stabil, tidak berubah dalam berbagai media dan tidak mudah terurai dan meracuni ikan. Selain itu detergen juga menyebabkan terjadinya eutrikikasi karena kandungan fosfatnya, sehingga merangsang tumbuhnya

biota perairan yang tidak diinginkan. Data pengukuran detergen air laut di DIY pada 12 pantai berkisar antara  $\leq 0,0001 - 0,324$  mg/L, dimana sebagian besar telah melampaui baku mutu (0,001 mg/L). Lokasi pantai yang melebihi bakumutu mempunyai aktivitas restoran dan kamar mandi yang banyak sehingga limbah domestiknya cukup tinggi.

- j.) Amoniak ( $\text{NH}_3\text{-N}$ ), merupakan senyawa nitrogen yang menjadi  $\text{NH}_4$  pada pH rendah dan disebut ammonium. Amoniak berasal dari air seni dan tinja, dari oksidasi zat organis secara mikrobiologi yang berasal dari air alam atau air limbah industri dan penduduk. Kadar amoniak yang tinggi dalam perairan mengindikasikan adanya pencemaran, selain menimbulkan rasa tidak enak juga bau yang tidak sedap, amoniak tinggi akan menyebabkan kematian ikan. Sifat toksik dari Amoniak ini juga bergantung dengan pH air laut. Apabila pH rendah dan kadar Amoniak cukup tinggi maka akan menyebabkan racun, tetapi jika pH tinggi, hanya dengan kadar amoniak yang rendahpun sudah bersifat racun.

### B. Kondisi Kualitas Udara

#### 1. Kondisi Kualitas Udara Ambien

Sumber pencemar udara di DIY didominasi dari sumber pencemar yang bergerak (aktifitas transportasi) kurang lebih sekitar 75 persen, sedangkan 25 persen merupakan akumulasi dari sumber yang tidak bergerak, pembakaran sampah dan aktifitas rumah tangga dan sumber pencemar alami. Status Lingkungan Hidup Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2014 7 Jumlah kendaraan di DIY terus meningkat cukup signifikan dari waktu ke waktu. Penambahan kendaraan bermotor di DIY per tahun berkisar pada angka 100.000 unit baik roda empat maupun roda dua. Disamping itu DIY sebagai daerah tujuan wisata terutama pada hari-hari libur dikunjungi banyak wisatawan yang menggunakan kendaraan bus maupun kendaraan pribadi. Kondisi ini menyebabkan pencemaran udara di DIY cenderung terus mengalami peningkatan.

Pemantauan kualitas udara dilakukan untuk mengetahui kualitas udara ambien di 30 lokasi yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di tempat-empat yang padat lalu lintas dan juga di wilayah permukiman serta wilayah sekitar industri. Pemantauan kualitas udara dilaksanakan 2 periode di tiap-tiap lokasi, dengan parameter-parameter yang dipantau adalah parameter fisika dan kimia.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode pasif di ruas-ruas jalan protokol yang notabene mempunyai kadar



polutan udara lebih tinggi dari pada di wilayah permukiman, kompleks pertokoan dan pedesaan, secara umum untuk parameter kunci pencemaran udara ambient seperti karbonmonoksida (CO), Hidrokarbon (HC), Timah Hitam(Pb), Oksida Nitrogen (NO<sub>x</sub>) dan Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) menunjukkan konsentrasi zat pencemar udara tersebut masih di bawah baku mutu yang ditetapkan (kualitas udara ambient baik). Namun demikian sektor transportasi perlu tetap diwaspadai karena potensial menyebabkan pencemaran kualitas udara di DIY.

Secara lebih rinci, kondisi pencemaran udara di Tahun 2014 berdasarkan pengambilan sampel di 3 (tiga) lokasi dengan masing-masing parameter adalah sebagai berikut:

1. Parameter NO<sub>2</sub>,

pada pengambilan sampel di 3 (tiga) lokasi semuanya berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu sebesar 400 µg/m<sup>2</sup> . Seperti terlihat dalam tabel, lokasi dengan kadar NO<sub>2</sub> tertinggi berada di Depan Bank BRI Jalan Brigjend Katamso Yogyakarta pada Pukul 06.00-10.00 WIB dengan nilai 32,56 µg/m<sup>3</sup> . Untuk konsentrasi terendah berada di Halaman LPP Jalan Urip Sumoharjo pada jam 06.00-10.00 WIB dengan nilai 8,91 µg/m<sup>3</sup> .

**Tabel 2.44** Kosentrasi Parameter NO<sub>2</sub> di tiga titik sampel

Lokasi	Parameter NO <sub>2</sub>			
	06.00-10.00	10.00-14.00	14.00-18.00	18.00-22.00
Depan Kedaulatan Rakyat	15,78	13,56	17,37	11,10
Halaman LPP	8,91	14,93	10,87	15,43
Depan Bank BRI	32,56	29,94	14,02	13,56
Baku Mutu	400	400	400	400

Sumber : SLHD DIY, 2014

2. Parameter SO<sub>2</sub>,

pada pengambilan sampel di 3 (tiga) lokasi semuanya berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu sebesar 900 µg/m<sup>2</sup> . Seperti terlihat dalam tabel, lokasi dengan kadar SO<sub>2</sub> tertinggi berada di Depan Bank BRI Jalan Brigjend Katamso Yogyakarta pada Pukul 10.00-14.00 WIB dengan nilai 23,99 µg/m<sup>3</sup> . Untuk konsentrasi terendah berada di Depan Kedaulatan Rakyat Yogyakarta pada jam 06.00- 10.00 WIB dengan nilai 11,39 µg/m<sup>3</sup>.

Tabel 2.45 Kosentrasi Parameter So3 di tiga titik sampel

Lokasi	Parameter SO <sub>2</sub>			
	06.00-10.00	10.00-14.00	14.00-18.00	18.00-22.00
Depan Kedaulatan Rakyat	11,39	19,22	22,35	14,23
Halaman LPP	17,84	23,43	18,50	13,47
Depan Bank BRI	16,68	23,99	20,22	14,47
Baku Mutu	900	900	900	900

Sumber : SLHD DIY, 2014

### 3. Parameter CO

Parameter CO, pada pengambilan sampel di 3 (tiga) lokasi semuanya berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu sebesar 30000 µg/m<sup>2</sup> . Seperti terlihat dalam tabel, lokasi dengan kadar CO tertinggi berada di Depan BRI Jalan Brigjend Katamso Yogyakarta pada Pukul 10.00-14.00 WIB dengan nilai 1364,78 µg/m<sup>3</sup> . Untuk konsentrasi terendah berada di Depan Kedaulatan Rakyat Jalan Mangkubumi Yogyakarta pada jam 10.00-14.00 WIB dengan nilai 332,88 µg/m<sup>3</sup> .

Tabel 2.46 Kosentrasi Parameter CO di tiga titik sampel

Lokasi	Parameter CO			
	06.00-10.00	10.00-14.00	14.00-18.00	18.00-22.00
Depan Kedaulatan Rakyat	555,62	332,88	360,41	592,07
Halaman LPP	525,93	1325,69	1259,57	585,05
Depan Bank BRI	451,31	1364,78	695,11	755,93
Baku Mutu	30000	30000	30000	30000

Sumber : SLHD DIY, 2014

### 4. Parameter Ox

Parameter Ox pada pengambilan sampel di 3 (tiga) lokasi semuanya berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu sebesar 235 µg/m<sup>2</sup> . Seperti terlihat dalam tabel, lokasi dengan kadar Ox tertinggi berada di Halaman LPP Jalan Urip Sumoharjo pada Pukul 11.00-14.00 WIB dengan nilai 37,92 µg/m<sup>3</sup> . Untuk konsentrasi terendah berada di Depan BRI Jalan Brigjend Katamso Yogyakarta pada jam 11.00- 14.00 WIB dengan nilai 16,44 µg/m<sup>3</sup> .

Tabel 2.47 Kosentrasi Ox di tiga titik sampel

Lokasi	Parameter O <sub>x</sub>
	11.00-14.00
Depan Kedaulatan Rakyat	20,00
Halaman LPP	37,92
Depan Bank BRI	16,44
Baku Mutu	235

Sumber : SLHD DIY, 2014

5. Parameter HC

Parameter HC pada pengambilan sampel di 3 (tiga) lokasi, sebagian berada di bawah baku mutu namun sebagian lainnya berada di atas baku mutu yang ditetapkan yaitu sebesar 160 µg/m<sup>2</sup> . Seperti terlihat dalam tabel, lokasi dengan kadar HC tertinggi berada di Halaman LPP Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta pada Pukul 15.00-19.00 WIB dengan nilai 62,99 µg/m<sup>3</sup> . Untuk konsentrasi terendah di Depan Bank BRI Jalan Brigjend Katamso Yogyakarta pada jam 15.00-19.00 WIB dengan nilai 50,21 µg/m<sup>3</sup> . Dari ketiga lokasi yang tercatat melebihi baku mutu HC adalah pada pukul 10.00-15.00. Pada jam 06.00-10.00 dan pada pukul 15.00-19.00 tercatat parameter HC di bawah baku mutu.

Tabel 2.48 Tabel Kosentrasi Parameter HC di tiga titik sampel

Lokasi	Parameter HC		
	06.00-10.00	10.00-15.00	15.00-19.00
Depan Kedaulatan Rakyat	52,38	55,60	52,64
Halaman LPP	54,97	56,52	62,99
Depan Bank BRI	54,99	52,77	50,21
Baku Mutu	160	160	160

Sumber : SLHD DIY, 2014

C. Kondisi Hutan dan Lahan

Luas hutan di DIY 22.138 Ha atau 6,95% dari luas DIY. Hutan tersebut tersebar di 4 (empat) wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul dan Kulonprogo. Pengelolaan hutan di DIY dibagi menjadi 5 (lima) Bagian Daerah Hutan (BDH) untuk mempermudah pengelolaannya, yaitu : BDH Karangmojo, BDH Playen, BDH Panggang, BDH Paliyan, dan BDH Kulonprogo-Bantul.

Pada tahun 2014 luas lahan kritis di DIY, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan tercatat sebesar 25.789,75 ha atau mencapai 8,56% dari luas DIY. Hal tersebut menunjukkan hasil positif dimana pengurangan luasan lahan kritis yang terealisasi lebih besar dibandingkan target yaitu sebesar 27.000 ha dengan persentase realisasi sebesar 102,59%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 terdapat penurunan luas lahan kritis di DIY dari 27.291,81 ha dan pada tahun 2014 turun menjadi 25.789,75 ha. Dari angka tersebut luas lahan kritis mengalami penurunan sebesar 5,50%. Penurunan luas lahan kritis merupakan implikasi dari bertambahnya luas hutan di DIY terutama bertambahnya luas hutan rakyat. Dengan demikian upaya-upaya rehabilitasi lahan mampu memberikan hasil positif dalam menurunkan luasan lahan kritis di DIY. Rehabilitasi lahan kritis tidak serta merta dapat dilihat hasilnya pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya, namun baru dapat dilihat hasilnya setelah tahun ke 2 (  $n+2$  ) dari pelaksanaan penanaman karena keberhasilan tumbuh tanaman yang ditanam diperoleh setelah dilakukan pemeliharaan sampai dengan tahun ke dua. Dengan demikian data tahun 2014 merupakan hasil upaya rehabilitasi lahan kritis dari tahun 2012 dan 2014 dimana keberhasilannya dapat dilihat pada tahun 2014.

Rehabilitasi lahan kritis tidak serta merta dapat dilihat hasilnya pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya, namun baru dapat dilihat hasilnya setelah tahun ke 2 (  $n+2$  ) dari pelaksanaan penanaman karena keberhasilan tumbuh tanaman yang ditanam diperoleh setelah dilakukan pemeliharaan sampai dengan tahun ke dua. Dengan demikian data tahun 2014 merupakan hasil upaya rehabilitasi lahan kritis dari tahun 2012 dan 2014 dimana keberhasilannya dapat dilihat pada tahun 2014.

Upaya yang dilakukan di dalam kawasan hutan adalah dengan penanaman pada kawasan hutan yang bertumbuhan kurang, kawasan hutan dengan kriteria kritis dan pada tanah kosong atau kawasan hutan yang tidak terdapat tanaman. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan adalah meningkatkan usaha penanaman hutan rakyat serta peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui sosialisasi, gerakan tanam dan pembinaan petani sekitar hutan. Terjadinya kemarau basah merupakan sebuah keuntungan dalam upaya rehabilitasi lahan, dimana keberhasilan tumbuh tanaman terbantu dengan tingginya intensitas hujan pada tahun 2014.

Tantangan terbesar dalam upaya rehabilitasi lahan kritis di DIY adalah kondisi banyaknya lahan marginal atau lahan dengan

tingkat kesuburan yang rendah berupa karst dengan lapisan tanah (solum) yang dangkal. Kondisi tersebut menjadikan lahan sulit ditanami dengan tanaman rehabilitasi lahan karena terbatasnya jenis tanaman yang mampu bertahan dengan kondisi tersebut. Selain itu kondisi lapisan tanah yang dangkal dan berada pada kelerengan rawan terhadap kerusakan berupa longsor lahan dan tergerus erosi. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu diusahakan penggunaan tanaman pilihan yang cocok dengan kondisi lahan marginal, atau dengan menggunakan introduksi tanaman pioner untuk membantu pembentukan tanah baru kemudian ditanam tanaman rehabilitasi lahan yang sesuai. Sedangkan untuk mencegah kerusakan lahan akibat bencana atau erosi dapat diupayakan tindakan teknis pengelolaan lahan berupa pembuatan teras atau penanaman sejajar kontur untuk menghindari hilangnya tanah karena aliran air terutama air hujan.

Tolok ukur pencapaian sasaran Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terjaga adalah Persentase Kerusakan Hutan yang memberikan indikasi utuhnya kawasan hutan termasuk kelestarian sumberdaya di dalamnya Persentase kerusakan hutan pada tahun 2013 tercatat sebesar 9,97% dari total luas kawasan hutan, atau dari 18.715,06 ha terdapat 1.866,72 ha hutan yang mengalami kerusakan. Pada tahun 2014 kerusakan hutan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 8,56%. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 2014 terdapat penurunan angka kerusakan hutan sebesar 1,41 %.

Upaya perlindungan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi hutan baik dari sisi ekonomi, ekologi maupun sosial. Upaya yang dilaksanakan meliputi kegiatan perlindungan hutan dari gangguan keamanan hutan maupun upaya minimalisasi kerusakan hutan dari bencana terutama kebakaran, kegiatan rehabilitasi dan peningkatan peran masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya melalui penyuluhan dan kampanye konservasi melalui lomba konservasi alam wana lestari. Besarnya kerusakan hutan yang diakibatkan karena adanya lahan kritis mengharuskan adanya tindakan rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan yang dapat dilakukan dengan pengkayaan tanaman pada daerah hutan bertumbuhan kurang, penanaman tanaman pada tanah kosong. Tanah kosong merupakan hal harus yang harus diperhatikan karena adanya kawasan hutan tanpa tanaman dapat memicu penyerobotan lahan atau penggunaan lahan oleh masyarakat terutama masyarakat sekitar kawasan hutan.

Tantangan utama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati terutama sumberdaya hutan adalah tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat sekitar hutan yang memunculkan penyerobotan lahan hutan atau penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang relatif rendah sehingga memunculkan gangguan hutan terutama pencurian kayu. Tindakan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan arti penting kelestarian hutan berkaitan dengan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta meningkatkan upaya perlindungan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. (*Sumber SLHD DIY, 2014*)

#### D. Kondisi Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan di DIY, pada tahun 2014 masyarakat telah menunjukkan peran sertanya dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Penghijauan Sasaran penghijauan ini adalah untuk menambah ruang terbuka hijau. Penanaman dilakukan oleh kelompok masyarakat berupa tanaman perindang ataupun tanaman yang berkarakter Yogyakarta untuk mendukung program keistimewaan Yogyakarta yang nantinya pemeliharaan dan pengelolaan tanaman ini nantinya akan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.
2. Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) dan Lubang Resapan Biopori Sumur peresapan air hujan merupakan sarana untuk menampung dan meresapkan air hujan kembali ke tanah. Sesuai dengan fungsinya untuk memprluas ruang peresapan air, maka pembangunan SPAH ini diarahkan pada lahan-lahan sempit di perkotaan. Untuk pembangunan SPAH ini dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat, karena dalam pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan gotong-royong warga. Disamping itu, masyarakat dapat memperbanyak sendiri bangunan SPAHnya, karena bantuan dari Pemerintah hanya bersifat stimulan saja. Selain SPAH, ada pembuatan lubang resapan biopori yang lebih sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak dan ibu-ibu dengan menggunakan alat serupa bor biopori. Teknologi sederhana ini mudah diterapkan, namun manfaatnya sangat besar dalam upaya pelestarian sumberdaya air. Selama ini BLH DIY telah

menyalurkan banyak sekali alat pembuat lubang biopori kepada masyarakat

#### E. Kondisi Pentaatan / Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan meningkat frekuensinya seiring dengan semakin beragamnya aktivitas masyarakat termasuk di dalamnya kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal, karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Di sisi lain masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan berkecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengerahkan masa mendatangi kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Pemerintah mempunyai peranan penting sebagai fasilitator dan mediator menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan LH. Untuk itu Pemerintah DIY dalam hal ini Gubernur DIY bersama Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan Kepolisian Daerah Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY melakukan koordinasi penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui suatu wadah yaitu Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

Pada tahun 2014, masalah yang diadukan oleh masyarakat ada 5 aduan, dan kesemuanya telah ditindaklanjuti oleh BLH DIY. Adapun kasunya adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran air sungai, air sumur dan kolam ikan akibat Pengolahan Tailing (sisa pemrosesan tambang emas) di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo.
2. Pencemaran Air dari akibat limbah cair dari IPAL komunal Limbah Domestik di Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.
3. Pencemaran Air dan udara akibat dari limbah cair dan cerobong asap dari usaha pembuatan tahu di Desa Nitipuran, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
4. Pencemaran Air akibat usaha perdagangan/ Pengolahan Ikan di Desa kadangan, Garon, Panggungharjo, Sewon, Bantul Piyungan, Bantul.
5. Pencemaran udara akibat usaha pembuatan asesoris taman (air mancur) dari batu di Desa Bangi, Timbulharjo, Sewon, Bantul.

### 2.3.1.9 Urusan Pertanahan

Pemda DIY, sebagai daerah otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan :

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kelurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti magersari, ngindhung, hanganggo turun-temurun, dan hanggaduh (atau anggadhuh) melalui serat kekancingan.

Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan



agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun masyarakat yang menempati tanahnya.

Sasaran strategis Pemda DIY pada periode pembangunan 2013-2017 untuk urusan pertanahan adalah meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Indikator kinerja pada urusan pertanahan adalah bidang tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground, dan Tanah Kas Desa yang memiliki kepastian hukum.

Pada tahun 2015 untuk indikator bidang tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground, dan Tanah Kas Desa yang memiliki kepastian hukum dari target sebesar 10.535 bidang tanah, realisasinya sebesar 9.668 bidang tanah atau persentase realisasi sebesar 91,77%. Kendala umum yang dihadapi dalam proses pendataan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ada di DIY karena terhadap kedua jenis tanah tersebut belum diketahui secara pasti keluasannya, pemanfaatannya maupun penggunaannya.

Isu strategis yang dipetakan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan pada 2017 meliputi :

1. Lemahnya validitas data tanah baik terhadap obyek tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa, sehingga perlu penyempurnaan dan update berkala database pertanahan.
2. Secara fisik, kondisi tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa belum tergambar secara menyeluruh dan detail, baik keluasan maupun penggunaan lahannya, sehingga batas fisik tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa belum dapat teridentifikasi secara jelas di lapangan. Secara spasial, utamanya tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten bersinggungan secara ketat dengan tanah-tanah yang bersifat privat, sehingga memerlukan kegiatan inventarisasi secara komprehensif.
3. Masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa, sehingga perlu adanya kepastian data administrasi dalam rangka mengatur tentang kepastian hukum tanah kas desa di DIY.
4. Masih banyaknya permasalahan dan konflik di bidang pertanahan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah Daerah DIY untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan dan senantiasa memberikan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan dan konflik pertanahan.

5. Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu pengawasan lebih mendalam dalam hal perizinan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.

### 2.3.1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (adminduk), berimplikasi pada kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama dalam hal pendanaan. Karena seluruh kegiatan pokok adminduk seperti penyediaan blangko KTP-el dan penyediaan blangko adminduk dibiayai oleh Pusat melalui anggaran Tugas Pembantuan kepada Kabupaten/Kota. Begitu juga dengan penyediaan *ribbon colour KTP-el* yang dibiayai Pusat melalui Anggaran Dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi. Meski demikian, daerah tetap bisa mengalokasikan anggaran bersifat *supporting* seperti pelatihan petugas adminduk, penguatan database, pembuatan profil kependudukan, dan kajian kependudukan.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1), ditegaskan bahwa bidang adminduk dan pencatatan sipil menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga semua daerah juga wajib menyelenggarakan kegiatan adminduk. Bahkan kewenangan pemerintah daerah dalam adminduk bisa diperbesar sepanjang memenuhi syarat inovasi daerah (Bab XXI, Pasal 386 s.d. Pasal 390 UU 23 Tahun 2014).

Melalui usul inisiatif DPRD DIY, memperkuat kewenangan Pemda DIY dalam penyelenggaraan adminduk dengan diterbitkan Perda DIY Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adminduk dan Kartu Identitas Anak (KIA). Perda ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan adminduk, semakin berorientasi kepada pelayanan publik, melindungi hak keperdataan seluruh elemen penduduk, serta memberi ruang inovasi daerah.

Dasar urusan tersebut selanjutnya menjadi pijakan Pemda DIY untuk menciptakan ide kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik. Kegiatan tahun 2015 yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Database Kependudukan. Inti kegiatan ini adalah membangun jaringan konsolidasi data antara provinsi dan kab/kota se-DIY sehingga seluruh aktivitas penyelenggaraan adminduk yang tercatat di database SIAK Kab/Kota se-DIY tersimpan di database skala provinsi. Melalui kegiatan ini juga dibangun aplikasi akses pemanfaatan data kependudukan, yakni sistem informasi yang memfasilitasi SKPD (satuan

Kerja Pemerintah Daerah) instansi terakit yang memerlukan akses terhadap biodata penduduk *by name by address* dan *by NIK*. Selain itu, Pemda DIY juga telah memiliki website khusus yang menampilkan data dalam angka kependudukan sampai di tingkat desa, yang dikeluarkan setiap semester.

Di bidang pencatatan sipil, Pemda DIY pada 2015 memfasilitasi penerbitan 500 akta kelahiran bagi penduduk miskin di Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Difasilitasi juga sidang *istbat* bagi 75 pasangan berstatus keluarga tidak mampu di Gunungkidul untuk mendapatkan buku nikah atau akta perkawinan.

Sementara, di bidang pendaftaran penduduk Pemda DIY terus membangun koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Kesbanglinmas DIY, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY dalam rangka pengawasan penduduk orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Sasaran strategis Pemda DIY pada periode pembangunan 2013-2017 untuk urusan kependudukan dan catatan sipil adalah meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil. Indikator kinerja pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah persentase penduduk yang ber-KTP-el (wajib KTP-el yang telah perekaman biometrik).

Pada semester I 2015, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.685.344 orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.320.969 orang dan perempuan sebanyak 1.364.375 orang. Sementara itu jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 2.509.711 penduduk.

Artinya, pada semester I 2015 untuk indikator persentase penduduk yang ber-KTP-el (wajib KTP yang telah perekaman biometrik) dari target sebesar 95%, realisasinya sebesar 93,46% atau persentase realisasi terhadap target sebesar 98,38%. Sebagian besar Wajib KTP-el yang belum perekaman tersebut diduga telah pindah dari DIY, merekam di tempat lain, atau meninggal tetapi belum dilaporkan.

Sementara itu untuk dokumen administrasi kependudukan yang lain, kepemilikan akta (terutama akta kelahiran dan akta kematian) oleh penduduk, khususnya pada keluarga miskin masih rendah. Kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk di bawah 18 tahun jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 59,59% atau 544.468 orang dari total penduduk di bawah 18 tahun yang mencapai 913.642. Meskipun masih tergolong rendah, jumlah kepemilikan akta kelahiran meningkat tajam di banding semester I tahun 2014 yang hanya di angka 15,83%. Hal itu terjadi karena pada tahun 2014, Pemda DIY bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY menyelenggarakan pemutakhiran data kependudukan terutama pada elemen nomor akta kelahiran. Lebih dari itu masih banyak petugas

adminduk di kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang menganggap nomor akta kelahiran bukan merupakan elemen data penduduk yang penting untuk dicatat. Akibatnya jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk antara di database dengan di lapangan terdapat selisih yang tajam. Lebih dari itu, sosialisasi dan fasilitasi pembuatan akta kelahiran bagi penduduk miskin perlu terus ditingkatkan.

Di bidang penerbitan akta kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada semester I 2015 semakin tinggi, sebanyak 16.445 dokumen. Bandingkan dengan penerbitan akta kematian pada semester I 2014 yang hanya sebanyak 10.652 dokumen. Hal tersebut terjadi lantaran semakin banyak instansi yang mensyaratkan akta kelahiran untuk pengurusan pelayanan publik seperti waris tanah dan Taspen.

PERIODE	JUMLAH PENDUDUK			WAJIB KTP			PUNYA KTP-EL	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (SEMUA PENDUDUK)			KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK DI BAWAH 18 TAHUN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL WK		TIDAK PUNYA	PUNYA AKTA	TOTAL	TIDAK PUNYA	PUNYA AKTA	TOTAL
Semester I 2013	1.773.842	1.766.515	3.540.357	1.372.101	1.398.136	2.770.237	2.349.046	3.052.433	487.924	3.540.357	518.269	271.222	789.491
Semester I 2014	1.773.563	1.768.515	3.542.078	1.372.036	1.397.499	2.769.535	2.571.891	2.981.205	560.873	3.542.078	540.271	284.174	824.445
Semester I 2015	1.767.439	1.785.854	3.553.293	1.320.969	1.364.375	2.685.344	2.509.711	2.312.137	1.241.156	3.553.293	369.174	544.468	913.642

Tabel 2.49 Data Kependudukan DIY

### 2.3.1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

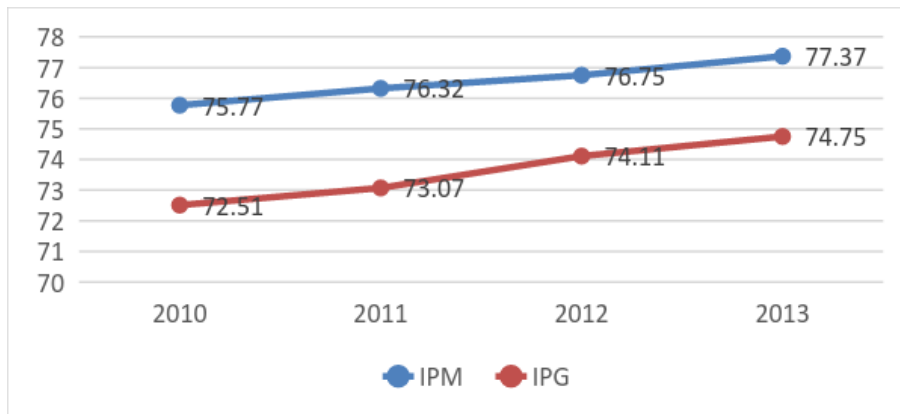
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi agenda pembangunan yang perlu mendapat perhatian besar karena merupakan bentuk pengejawantahan dari Nawacita, yakni sub agenda prioritas 2 dari agenda prioritas kedua yang berbunyi “meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan” serta sub agenda prioritas 8 dari agenda prioritas keempat yang berbunyi “melindungi anak, perempuan, dan kelompok masyarakat marjinal”.

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan pencapaian pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak, dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

#### 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.



Sumber : BPS, Kementerian PP&PA diolah

**Gambar 2.37 Grafik Capaian IPM dan IPG DIY Tahun 2010 – 2013**

Sebagaimana digambarkan pada grafik di atas, IPG di DIY selama kurun waktu 2010-2013 terus mengalami kenaikan. Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut terus mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

Meskipun demikian, pada kurun waktu tersebut juga terindikasi adanya kesenjangan yang cukup besar antara IPM dengan IPG di DIY. Grafik di atas menggambarkan bagaimana IPG selalu menunjukkan posisi yang lebih rendah dari angka IPM pada kurun waktu 2010-2013. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penduduk DIY secara umum mengalami peningkatan kapabilitas dalam memenuhi hak-hak dasarnya, kesenjangan gender masih terjadi di sini. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa DIY masih belum dapat mewujudkan tujuannya untuk menciptakan persamaan dan kesetaraan gender secara paripurna.

Oleh sebab itu, Pemerintah DIY perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kapabilitas dasar penduduk perempuan sehingga memperkecil *kesenjangan* yang terjadi. Namun demikian, disadari bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga upaya yang dilakukan harus terencana dan berkelanjutan.

Tabel 2.50 Perbandingan IPG terhadap IPM di DIY Tahun 2010-2013

Kabupaten/ Kota	2010			2011			2012			2013		
	IPG	IPM	RASIO	IPG	IPM	RASIO	IPG	IPM	RASIO	IPG	IPM	RASIO
DIY	72.51	75.77	95.70	74.11	76.32	95.74	74.11	76.75	96.56	74.75	77.37	96.61
Yogyakarta	77.56	79.52	97.54	78.71	79.89	97.53	78.71	80.24	98.09	79.04	80.51	98.17
Bantul	71.33	74.53	95.71	72.69	75.05	95.55	72.69	75.58	96.18	73.35	76.01	96.50
Kulon Progo	67.04	74.49	90.00	68.41	75.04	90.42	68.41	75.33	90.81	69.42	75.95	91.40
Gunungkidul	65.42	70.45	92.86	66.62	70.84	93.22	66.62	71.11	93.69	67.29	71.64	93.92
Sleman	74.17	78.2	94.85	75.76	78.79	94.87	75.76	79.31	95.52	76.45	79.97	95.60

Sumber: BPS, Kementerian PP PA diolah

## 2. Indeks Pemberdayaan Gender

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan data dari BPS, peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY yang diukur melalui IDG pada kurun waktu 2010-2013 memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tabel berikut diperlihatkan bagaimana capaian IDG DIY mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2012, namun kembali menguat pada tahun 2013. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih diperlukan upaya serius untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY.

Tabel 2.51 Capaian IDG DIY Tahun 2010-2013

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	2010	2011	2012	2013
D I YOGYAKARTA	77.70	77.84	75.57	76.36



Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	2010	2011	2012	2013
Kulon Progo	61.18	61.15	59.23	59.26
Bantul	67.85	68.46	68.52	68.88
Gunung Kidul	59.36	62.22	64.58	66.01
Sleman	70.74	70.52	69.66	72.30
Kota Yogyakarta	69.85	70.00	70.70	71.75

Sumber : Kementerian PP & PA. diolah

a. Partisipasi Perempuan di Legislatif

*Affirmative action* (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu agar kelompok tersebut memperoleh peluang yang setara dengan kelompok lain dalam suatu bidang. Dalam konteks politik, tindakan ini dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

Sebagai wujud dari komitmen ini, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) mewajibkan terselenggaranya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dengan kuota sebesar 30%.

**Tabel 2.52 Tabel Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014**

No	DPRD	2014			
		L	P	L+P	%P
1	Kota Yogyakarta	30	10	40	25
2	Kabupaten Bantul	42	3	45	6.6
3	Kabupaten Kulon Progo	34	6	40	15
4	Kabupaten Sleman	37	13	50	26
5	Kabupaten Gunungkidul		8	45	17.8
6	DPRD DIY	49	6	55	10.9
	Jumlah	192	46	275	16.7

Sumber: diolah dari berbagai sumber

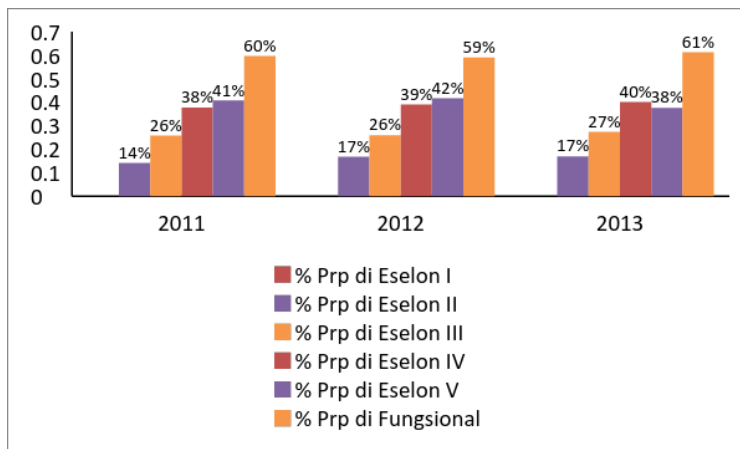
Dalam faktanya, baik DPRD DIY maupun DPRD kabupaten/kota masih belum mencapai kuota tersebut. Pada Pemilu 2014, rasio tertinggi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif terjadi di Kota Yogyakarta, yakni sebesar 25%. Sementara, rata-rata rasio keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di DIY berada pada angka 16.7%.

Selain tingkat elektabilitas yang rendah, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah masih adanya keengganan perempuan untuk tampil dalam bidang politik dan kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi lebih dalam ranah politik. Hal ini dikarenakan masih adanya stigma bahwa ranah politik adalah ranah laki-laki.

Dengan demikian, kebijakan untuk menumbuhkan kesadaran politik bagi perempuan dan strategi pembelajaran politik bagi warga perempuan di DIY masih diperlukan. Diharapkan, kebijakan dan strategi ini mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan di DIY dalam politik baik secara kualitas dan kuantitas.

b. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah

Keterwakilan perempuan di lingkungan birokrasi diharapkan akan menjadikan pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok minoritas yang lain. Keterwakilan ini bukan hanya pada aparatur di garda terdepan, namun juga pada level pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan pelayanan yang baik juga merupakan hasil dari kebijakan yang baik.



Sumber : Buku Profil Gender Anak DIY 2014

Gambar 2.38 Grafik Trend Komposisi Perempuan Pada Jabatan Birokratis Tahun 2011-2013

Jika dikaji dari Trend Komposisi Perempuan Pada Jabatan Birokratis di atas, dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan dalam jajaran birokrasi di DIY semakin rendah seiring dengan semakin tingginya tingkat jabatan struktural. Pada jabatan struktural eselon IV dan V, rasio partisipasi perempuan pada kurun waktu 2011-2013 sudah melebihi 30%. Bahkan, perempuan mendominasi posisi jabatan fungsional. Namun, rasio partisipasi perempuan mulai menurun pada jabatan struktural eselon III (berkisar pada angka 26-27%), dan semakin menurun pada jabatan struktural eselon II (berkisar pada angka 14-17%), hingga akhirnya tidak berpartisipasi sama sekali pada jabatan struktural eselon I karena terbatasnya jumlah pejabat eselon I di DIY.

c. Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) Perempuan

Perubahan pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang setara antara kaum perempuan dan laki-laki, serta semakin disadarinya peranan penting kaum perempuan dalam pembangunan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi. Namun, jika berkaca pada komposit IPG, diketahui bahwa kesenjangan berbasis gender masih terjadi pada area ekonomi. Jika dikaji dari Teori Segmentasi Pasar Tenaga Kerja yang dikemukakan oleh Chiplin dan Sloane (1982 sebagaimana dikutip dalam Hardiani, 1998), kesenjangan ini dikarenakan adanya stigma bahwa kaum perempuan merupakan pekerja sekunder yang tidak memiliki jaminan terhadap kualitas kerja yang stabil, memiliki kompensasi yang rendah, dan tidak berprospek.

Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) Perempuan merupakan instrumen yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi dengan total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

**Tabel 2.53 Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di DIY Tahun 2011-2014**

Kab./Kota	Partisipasi Angkatan Kerja							
	Agust-11		Agust-12		Agust-2013		Agust-2014	
	P	L	P	L	P	L	P	L
Angk.Kerja	830.449	1.042.463	867.492	1.077.366	860.441	1.050.518	896.341	1.127.120
Usia Kerja	1.393.149	1.330.480	1.404.126	1.340.946	1.418.947	1.355.062	1.455.004	1.392.750
%	59.61	78.35	61.78	80.34	60.64	77.53	61.60	80.93

Keterangan : P = Perempuan L = Laki-laki  
 Sumber : Pusdatinaker Kemenakertrans diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa partisipasi angkatan Kerja Perempuan di DIY pada kurun waktu 2011-2014 berada pada kisaran angka 61%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perempuan dalam kegiatan ekonomi sudah cukup baik. Namun, apabila dibandingkan dengan partisipasi angkatan kerja laki-laki, dapat dikatakan bahwa aktivitas perempuan dalam kegiatan ekonomi masih jauh tertinggal dari pada laki-laki. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih perlu terus dilakukan.

Dalam mengkaji PAK, perlu dipelajari pula sektor tempat perempuan bekerja. Dalam konsep Susenas, tenaga kerja sektor formal adalah mereka yang bekerja dengan status usaha sebagai buruh atau karyawan dengan jumlah jam kerja tetap, ada upah dan gaji yang jelas, serta ada aturan yang jelas dalam bekerja. Sementara, tenaga kerja sektor informal bekerja dengan status selain sebagai buruh atau karyawan dengan jumlah jam kerja yang tidak tetap dan tidak ada ketertarikan tertentu untuk memasuki atau keluar dari suatu usaha.

Berdasarkan data dari BPS/Satkernas pada tahun 2014, sektor formal lebih dikuasai oleh laki-laki dengan jumlah 557.504 orang, sementara perempuan di sektor ini hanya sebanyak 364.142 orang. Sementara itu, perbandingan angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan di sektor informal lebih seimbang. Pada tahun 2014, terdapat 525.929 laki-laki dan 508.468 perempuan bekerja pada sektor ini. Hal ini salah satunya didorong oleh kiprah perempuan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sektor ini cukup diminati karena dapat menjadi sebuah alternatif yang memfasilitasi kebutuhan perempuan akan aktivitas produktif yang juga bermanfaat secara ekonomi.

Selain itu, ditemukan juga fakta bahwa dari sejumlah tenaga kerja perempuan tersebut, banyak perempuan yang bermigrasi dengan tujuan bekerja. Bahkan, data tahun 2014 menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan bermigrasi untuk bekerja daripada laki-laki. Secara numerikal, data dari Disnakertrans DIY menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat 974 bekerja di luar daerah asalnya sementara hanya 591 laki-laki melakukan hal yang sama.

### 3. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Hal yang dinilai paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini angka kejadian kasus tersebut masih sangat tinggi. Komisi Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis data bahwa setiap dua jam terdapat tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Sementara, Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI) menemukan adanya 5066 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di seluruh Indonesia pada tahun 2014.

Pada level Provinsi, secara umum korban baru kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani di DIY pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, terdapat 1371 kasus baru korban kekerasan yang ditangani. Hal ini cukup jauh menurun dibandingkan jumlah korban kekerasan pada tahun 2015 yang mencapai angka 1509 korban. Dari jumlah tersebut, 855 diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan 455 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, ditemukan juga data bahwa mayoritas kasus kekerasan tersebut dilakukan dalam lingkungan rumah tangga, yakni sebesar 850 kasus. Fakta ini memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan cenderung berasal dari lingkungan terdekat korban. Analisis ini pun diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa 144 tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh pasangan dan 51 tindak kekerasan dilakukan oleh keluarga.

**Tabel 2.54 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Tempat Kejadian Dan Lokasi Lembaga Layanan**

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	TEMPAT KEJADIAN					
			2013			2014		
			Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1.	Kulonprogo	Laki-laki	3	0	1	4	0	5
		Perempuan	32	0	15	24	3	47
2.	Bantul	Laki-laki	7	0	13	7	1	11
		Perempuan	78	6	53	59	0	31
3.	Gunungkidul	Laki-laki	3	0	0	4	0	4
		Perempuan	32	1	11	42	6	14
4.	Sleman	Laki-laki	23	0	23	27	0	14
		Perempuan	139	6	52	133	5	45
5.	Yogyakarta	Laki-laki	36	0	8	17	0	48
		Perempuan	466	8	190	382	2	204
##	Provinsi	Laki-laki	23	2	18	25	0	14
		Perempuan	156	10	94	126	1	66
Jumlah		Laki-laki	95	2	63	84	1	96
		Perempuan	903	31	415	766	17	407
		Total	998	33	478	850	18	503

Sumber : Data Gender dan Anak DIY tahun 2015

Mengingat besarnya efek psikis dan fisik yang ditimbulkan dari kasus kekerasan terhadap kehidupan korban, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya preventif, represif, dan kuratif agar angka kejadian kasus ini dapat ditekan. Pada praktiknya, upaya ini diejawantahkan Pemerintah Daerah DIY melalui layanan pengaduan dan

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di unit pelayanan tindak kekerasan Rekso Dyah Utami.

4. Pernikahan di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, fenomena yang terjadi beberapa tahun ini adalah banyaknya permohonan nikah dari masyarakat dengan usia di bawah ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, Kantor Kementerian Agama melalui Kantor Urusan agama (KUA) harus mengeluarkan surat dispensasi nikah.

**Tabel 2.55** Tabel Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY Tahun 2013-2014

No	Wilayah	2013		2014	
		<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun
		P	L	P	L
1	Kota Yogyakarta	23	44	14	22
2	Kabupaten Bantul	53	95	156	153
3	Kab. Kulon Progo	24	41	22	27
4	Kab. Gunungkidul	51	77	48	78
5	Kab. Sleman	23	79	43	107
	DIY	174	336	283	387

Sumber : Kanwil Kemenag DIY sebagaimana dikutip BPPM 2015

Berdasarkan data dari BPPM, pada tahun 2014 terdapat 283 orang perempuan yang menikah pada usia di bawah 16 tahun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan peningkatan karena pada tahun 2013 angka pernikahan di bawah umur oleh warga perempuan adalah sebanyak 174 kasus. Sementara itu, pada tahun 2014 terjadi 387 kasus pernikahan laki-laki di bawah umur. Jumlah ini pun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terjadi sebanyak 336 kasus pernikahan di bawah umur

oleh warga laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa pernikahan usia pelajar masih banyak terjadi di DIY meskipun Pemerintah telah banyak melakukan program dan upaya penundaan usia perkawinan.

Ketika pergeseran nilai sosial budaya yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan pendidikan agama dan kesehatan reproduksi yang memadai, maka terdapat potensi semakin maraknya perilaku seks bebas di kalangan anak. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur. Jika masalah ini tidak ditangani dengan serius oleh Pemerintah, pada gilirannya fenomena ini akan mencederai hak pendidikan dan hak kesehatan reproduksi kaum perempuan. Sebuah kajian yang dilakukan oleh UNFPA (2005) menemukan bahwa ketika anak perempuan berusia 10-14 tahun mengalami kehamilan, ia berisiko lima kali lipat meninggal dunia saat hamil dan bersalin dibandingkan mereka yang hamil pada usia 20-24 tahun. Hal ini dikarenakan anatomi tubuh anak usia tersebut belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fenomena pernikahan di bawah umur ini berpotensi mencederai hak konstitusional perempuan selaku warga negara atas kelangsungan hidup dan berkembang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya serius demi mengatasi fenomena pernikahan di bawah umur.

#### **2.3.1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Di sisi lain, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Dalam praktiknya, pelaksanaan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera di DIY masih menemui beberapa masalah. Beberapa diantaranya adalah peningkatan jumlah Total Fertility Rate (TFR), masih tingginya *unmet need*, berbagai isu dalam hal kesehatan reproduksi, rendahnya kepesertaan KB oleh warga laki-laki, masih minimnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang, serta persoalan-persoalan terkait Sumber Daya Manusia dan Sarana Pelayanan. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan dalam perencanaan pembangunan agar tujuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai dan tepat sasaran.

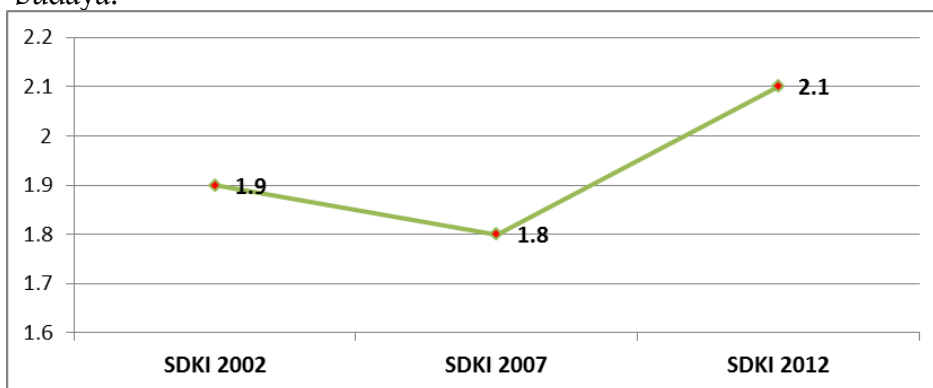
### 1. Total Fertility Rate (TFR)

TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan pada usia 15-49 tahun. Pemantauan terhadap angka TFR memberikan proyeksi bagaimana kelahiran anak berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan SDKI 2012, DIY memiliki total *fertility rate* (TFR) terendah di Indonesia. Namun, sesungguhnya TFR DIY pun mengalami lonjakan, dari 1,8 (SDKI 2007) menjadi 2,1 (SDKI 2012). Peningkatan TFR ini perlu mendapatkan perhatian karena peningkatan jumlah anak dalam sebuah keluarga berpotensi mendorong terjadinya permasalahan kependudukan di masa datang, antara lain permasalahan dalam hal kualitas penduduk, permasalahan lahan, dan permasalahan pangan.

Pengukuran fertilitas memang lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari satu orang bayi. Disamping itu seorang yang meninggal pada hari dan waktu tertentu, berarti mulai saat itu orang tersebut tidak mempunyai resiko kematian lagi. Sebaliknya, ketika seorang perempuan melahirkan seorang anak, tidak berarti resiko melahirkan dari perempuan tersebut menurun.

Hal lain yang membuat pengukuran fertilitas menjadi lebih kompleks adalah keberadaan banyak faktor yang mempengaruhi TFR, antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, tingkat urbanisasi, dan kondisi sosial budaya.



Sumber : BPS Provinsi DIY

**Gambar 2.39** Perkembangan TFR DIY

### 2. Akseptor KB

Data Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Selain itu, BPS DIY (2015) pun



menemukan bahwa pada tahun 2014, rasio kepadatan penduduk DIY terhadap tahun 2010 mencapai 0,98 persen. Dengan luas wilayah 3.185,80 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di DIY tercatat 1.142 jiwa per km<sup>2</sup>. Melihat tingkat kepadatan penduduk tersebut, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DIY mengencarkan berbagai upaya yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satunya adalah dengan melakukan penjarangan akseptor KB.

Dalam Kamus Kependudukan & Keluarga Berencana (BKKBN, 2015), dijelaskan bahwa akseptor merupakan Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Sementara, rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama di suatu wilayah.

Besarnya angka rasio akseptor memproyeksikan seberapa besar upaya pengendalian jumlah penduduk di sebuah wilayah. Di DIY, rasio akseptor KB DIY pada 2014 tercatat sebesar 80,05. Ini meningkat dari tahun 2013 yang menunjukkan rasio sebesar 79,87.

**Tabel 2.56 Rasio Akseptor KB Tahun 2009-2014**

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Peserta KB	432.024	430.231	432.989	438.788	441.981	441.858
Jumlah Pasangan Usia Subur	549.313	544.057	549.894	552.422	553.395	552.008
Rasio	78,65	79,08	78,74	79,43	79,87	80,05

Sumber : BKKBN Perwakilan DIY, diolah

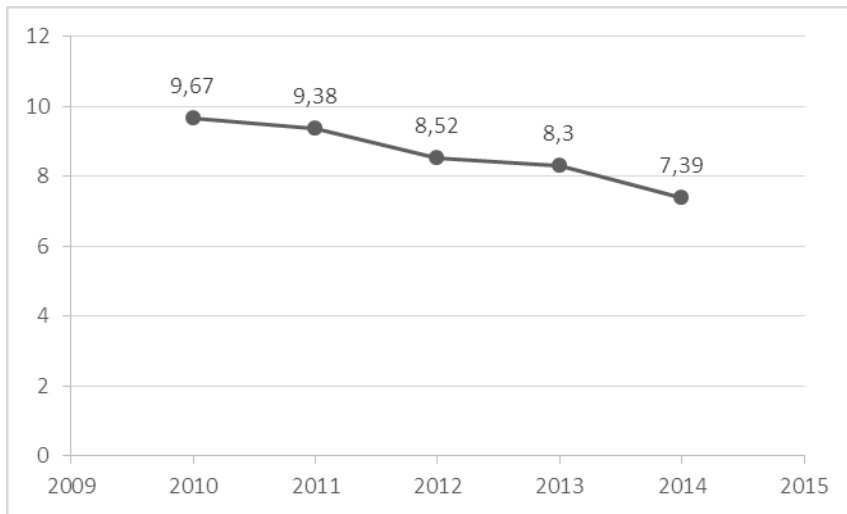
### 3. *Unmet Need*

Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa 11% perempuan berstatus menikah di Indonesia mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Di antara mereka, 4% sesungguhnya ingin menunda kelahiran berikutnya untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih, dan 7% sebenarnya tidak ingin mempunyai anak lagi. Namun, mereka memiliki beberapa alasan yang menyebabkan tidak melakukan KB, yang antara lain meliputi kekhawatiran terhadap kegagalan kontrasepsi dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

Pada level Provinsi, perkembangan *Unmet Need* DIY dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 9,67% menjadi 7,39% di tahun 2014. Capaian *Unmet*

*Need* DIY yang semakin turun menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan akses terhadap pelayanan kontrasepsi semakin mudah.

Namun penurunan ini belum mencapai target MDG's Tahun 2015 yang menargetkan capaian *Unmet Need* sebesar 5%. Dengan demikian, masih dibutuhkan upaya ekstra keras untuk mencapainya, terlebih karena *unmet need* ini berkorelasi dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman.



Sumber : BKKBN Perwakilan DIY

Gambar 2.40 Grafik Perkembangan Unmet Need DIY Tahun 2010-2014

#### 4. Sarana Pelayanan Keluarga Berencana

Pelayanan KB yang berkualitas ditandai dengan tingkat komplikasi, ketidakberlangsungan dan kegagalan yang rendah atau berada dalam batas toleransi. Penyediaan sarana serta prasarana penunjang pelayanan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kualitas Pelayanan KB. Keberadaan sarana dan prasarana ini dibutuhkan khususnya untuk memberikan akses yang memadai kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan pelayanan KB. Dalam pelaksanaannya, upaya memperluas jangkauan pelayanan dan mendekatkan tempat pelayanan medis KB kepada akseptor dilaksanakan di Rumah Sakit. Sedangkan, pelayanan non medis dilaksanakan melalui

Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD.

**Tabel 2.57 Tabel Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010 - 2014**

TAHUN	KLINIK KB				
	PKBRS	PEMERINTAH	SWASTA	PPKBD	Sub PPKBD
2010	45	162	88	5.277	27.378
2011	47	162	96	5.258	5.299
2012	54	165	124	438	5.296
2013	47	165	149	438	5.302
2014	45	166	174	438	5.316

Sumber : BPS 2015

Keterangan :

- a. PKBRS : Program KB Rumah Sakit
- b. PPKBD : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
- c. Sub PPKBD : Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (tingkat dukuh/dusun)

Dari data di atas secara umum kecenderungan pelayanan KB di DIY yang dilakukan Klinik KB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya pelayanan PKBRS yang mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014.

#### 5. Petugas Pelayanan Keluarga Berencana

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan pelayanan KB adalah petugas pelayanan KB. Pemerintah menargetkan tersedianya 100 bidan per 100.000 penduduk dan 40 dokter umum per 100.000 penduduk.

**Tabel 2.58 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010 - 2014**

Tahun	Petugas			Jumlah
	Dokter	Bidan	PKB	
2010	545	1.197	273	2.015
2011	151	651	261	1.063
2012	152	680	257	1.089
2013	142	680	246	1.068
2014	145	667	245	1.057

Sumber : BPS 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dokter dan Petugas KB jumlahnya fluktuatif dari tahun ke tahun. Sedangkan bidan mengalami penurunan tajam dari tahun 2010 sebesar 1.197 menjadi 651 pada tahun 2011, meskipun kemudian sedikit meningkat pada 2012 namun kembali menurun pada tahun 2013 dan 2014. Meskipun demikian, pada tahun 2013 Pusdatin menemukan bahwa rasio tenaga dokter di DIY merupakan terbaik kedua nasional, yakni sebanyak 35,5 dokter umum per 100.000 penduduk.

#### 6. Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. BKKBN (1994, hal.5) mengartikan Keluarga Sejahtera sebagai “keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran, melainkan juga menyangkut ketentraman spiritual dan keharmonisan keluarga.

Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN membagi keluarga Indonesia ke dalam lima tahapan keluarga, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Yang termasuk dalam tahapan Keluarga Pra Sejahtera selaku tahapan paling dasar Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*), seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Sementara, yang termasuk dalam tahapan Keluarga Sejahtera III yang merupakan tahapan paling tinggi adalah keluarga yang dapat memenuhi 21-23 indikator pengembangan keluarga.

Tabel 2.59 Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2010-2014

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK
1.	Pra S	187.277	225.823	225.823	222.299	267.571
2.	KS I	208.367	200.008	200.008	197.046	176.002
3.	KS II	198.237	146.038	146.038	150.670	158.482
4.	KS III	281.909	302.792	54.575	325.318	324.657

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK
5.	KS III Plus	53.665	54.575	54.575	55.541	53.708
	Jumlah KK	929.455	929.455	929.236	950.875	980.420

Sumber : BKKBN DIY, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III.

### 7. Program Bina Keluarga

Keluarga adalah lingkungan Pendidikan yang pertama dan utama. Namun, dalam kenyataannya masih banyak keluarga yang belum dapat memahami peran strategis tersebut. Oleh karena itu, demi mendorong terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dari lingkungan keluarga, Pemerintah mencanangkan program Bina Keluarga. Program ini terdiri dari tiga kategori, yakni: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Dalam program ini, keluarga difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang diperlukan dalam rangka membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar, serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua.

**Tabel 2.60 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-2014**

Kabupaten/ Kota	BKB				BKR				BKL			
	2013		2014		2013		2014		2013		2014	
	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)
Kota Yogyakarta	240	48	244	38	75	46	73	16	98	29	101	60
Bantul	310	65	310	55	81	27	82	23	103	26	103	29
Kulonprogo	391	35	403	73	126	26	128	22	95	25	101	29
Gunung	470	62	472	86	84	22	85	22	128	57	126	27

Kabupaten/ Kota	BKB				BKR				BKL			
	2013		2014		2013		2014		2013		2014	
	Jml BKB P*)	Jml BKB P*)	Jml BKB P*)	Jml BKB P*)	Jml BKR P*)	Jml BKR P*)	Jml BKR P*)	Jml BKR P*)	Jml BKL P*)	Jml BKL P*)	Jml BKL P*)	Jml BKL P*)
Kidul												
Sleman	219	69	230	69	255	61	155	44	210	52	210	62
Jumlah	1.630	279	1.659	321	621	182	523	127	634	159	641	207

Sumber Data : BPPM DIY diolah

\*) P= Percontohan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 BKB dan BKL di DIY mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sementara, pada tahun ini jumlah BKR mengalami penurunan sebesar 55 unit. Mengingat kompleksnya persoalan terkait penduduk usia remaja, penurunan jumlah BKR ini semestinya tidak terjadi. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, manusia mengembangkan jati diri dan mengalami puncak emosionalitas. Oleh karena itu, kemampuan orang tua sebagai pembimbing remaja dalam menghadapi masalah kehidupan sangat diperlukan. Oleh karena itu, upaya penguatan instansi pelaksana BKR dinilai perlu dilakukan mengingat dalam program ini diselenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan orang tua sehingga dapat lebih terampil dan bijaksana dalam pengasuhan remaja.

### 2.3.1.13 Urusan Sosial

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial tetapi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendorong peran dan partisipasi elemen masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang arena satu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

**Tabel 2.61 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2012 ~ 2015**

No	Jenis PMKS	Tahun				Kondisi tahun 2015 dibanding tahun 2014
		2012	2013	2014	2015	
1	Anak Balita Terlantar	2.569	2.443	2.273	1.978	Menurun
2	Anak Terlantar	26.165	26.149	23.396	20.089	Menurun
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	302	119	321	98	Menurun
4	Anak Jalanan	497	212	220	219	Menurun
5	Anak dengan Kedisabilitas	3.910	3.858	4.116	3.708	Menurun
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	919	796	653	411	Menurun
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	275	73	68	41	Menurun
8	Lanjut Usia Terlantar	37.199	36.698	38.448	33.752	Menurun
9	Penyandang Disabilitas	29.543	28.158	26.947	25.050	Menurun
10	Tuna Susila	166	158	144	47	Menurun
11	Gelandangan	161	121	112	82	Menurun
12	Pengemis	199	216	199	170	Menurun
13	Pemulung	116	126	171	256	Menurun
14	Kelompok Minoritas	733	216	1.541	1.541 *	Tetap
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakakatan	3.658	4.168	4.495	4.744	Meningkat
16	Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	1.408	1.797	2.045	3.491	Meningkat
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1.627	1.470	1.323	1.451	Meningkat

No	Jenis PMKS	Tahun				Kondisi tahun 2015 dibanding tahun 2014
		2012	2013	2014	2015	
18	Korban Trafficking	9	5	2	2	Tetap
19	Korban Tindak Kekerasan	4.325	4.070	3.514	3.153	Menurun
20	Pekerja Migran Bermasalah	760	292	598	939	Meningkat
21	Korban Bencana Alam	3.749	1.655	1.658	71 Keluarga	Tidak bisa dibandingkan karena perubahan satuan
22	Korban Bencana Sosial	16	158	157	376 Keluarga	Tidak bisa dibandingkan karena perubahan satuan
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.337	12.057	13.166	12.689	Menurun
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3.356	3.395	3.318	3.212	Menurun
25	Keluarga Miskin Fakir	361.081 (PPLS 2011)	361.081 (PPLS 2011)	361.081 (PPLS 2011)		Tetap (karena belum ada updating data PPLS)

Keterangan : \*) angka sementara  
 Sumber : Dinas Sosial DIY 2015

Dari data tersebut terdapat 16 jenis PMKS mengalami penurunan serta 4 jenis PMKS mengalami kenaikan jumlahnya. Empat kategori PMKS yang mengalami peningkatan yaitu Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban NAPZA, penderita HIV/AIDS, Pekerja Migran bermasalah.

Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan perlu direhabilitasi sosial agar mampu menjalankan kehidupannya secara wajar di masyarakat. Peningkatan Penyalahgunaan NAPZA yang cukup signifikan di DIY memperkuat fakta bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat narkoba. Upaya pencegahan dan terapi rehabilitasi korban serta pemberantasan peredaran gelap narkoba menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam rangka menekan terjadinya kasus penyalahgunaan NAPZA.



Untuk Kasus HIV/AIDS yang mengalami kenaikan ini artinya upaya penanggulangan HIV/AIDS masih perlu ditingkatkan termasuk rehabilitasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS

Penanganan lanjut usia terlantar dengan melihat data diatas bahwa jumlah lanjut usia terlantar di DIY jumlahnya masih tinggi seyogyanya masih menjadi fokus pada perencanaan tahun 2017.

Pekerja migran bermasalah ini di DIY tidak lepas dari rendahnya tingkat ekonomi dan kemampuan SDM nya. Penyiapan kapasitas SDM dan pemberdayaan bagi pekerja migran bermasalah menjadi urgen dilakukan.

- b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah segala hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. PSKS berperan dalam penanganan dan pencegahan berbagai permasalahan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu PSKS juga berperan membantu pelaksanaan program-program pemerintah.

**Tabel 2.62 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY, 2010-2014**

No	Jenis PSKS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pekerja Sosial Profesional/ Pekerja sosial fungsional	n/a	n/a	41	37	37	35
2	Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM	78	134	121	4.572	4.534	4.534*
3	Taruna Siaga Bencana	n/a	n/a	873	505	505	837
4	LKS / Orsos	10	88	83	354	395	403
5	Karang Taruna Desa/Kel	10	102	85	438	438	438
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	n/a	11	12	15	15	12
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	n/a	23	25	87	124	138
8	Penyuluh Sosial	n/a	n/a	7	7	5	5
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),	n/a	n/a	78	78	78	78
10	Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	43	135	100	45	26	42

Keterangan : \*) angka sementara

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2014

Tabel di atas menunjukkan secara umum kuantitas PSKS mengalami peningkatan. Peningkatan PSKS disebabkan peran kelompok masyarakat semakin besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping itu juga dipengaruhi peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberdayaan PSKS semakin optimal.

### c. Panti Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial apabila dilihat dari aspek lokusnya, lazim dikelompokkan dalam dua kategori yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam panti dan di luar panti. Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui panti, Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari

- a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari balai ini adalah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas/cacat;
- b. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita. Tupoksi balai ini yaitu perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*).
- c. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik.
- d. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Balai ini sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak. Balai ini sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak.

- f. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia
- g. Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra. Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza.

#### 2.3.1.14 Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan dengan demikian memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan baik daerah maupun nasional.

Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh *stakeholders*, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya, hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh), dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini akan diuraikan kondisi umum terkini pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di DIY. Pemahaman mengenai kondisi umum ini menjadi basis untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan pengembangan sektor ketenagakerjaan di DIY yang relevan dengan kondisi sektor ketenagakerjaan di DIY.

### a. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja sehingga terjadi ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di D.I.Yogyakarta selama periode 2011–2015, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sakernas, PUK DIY pada tahun 2011 adalah sebesar 2,747 juta orang dan pada akhir tahun pengamatan (Februari 2015) diperkirakan mencapai 2,87 juta orang.

Penduduk usia kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Data Sakernas pada tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja mempunyai proporsi mencapai lebih dari 70 persen setiap tahunnya dimana dari jumlah angkatan kerja ini lebih dari 90 persennya merupakan angkatan kerja yang bekerja sehingga menghasilkan penganggur terbuka yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja memberikan proporsi berkisar hampir 30 persen dari penduduk usia kerja pada tahun 2011-2015. Hal ini mengindikasikan cukup banyak penduduk usia kerja yang memilih untuk tidak bekerja. Kelompok ini didominasi oleh kelompok yang memilih untuk mengalokasikan sebagian besar waktunya demi mengurus rumah tangganya (umumnya ibu rumah tangga) dan bersekolah. Sebagian besar anggota kelompok bukan angkatan kerja ini memang cenderung tidak menghasilkan pendapatan nominal dan mungkin dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif. Meskipun demikian, mereka melakukan aktivitas investasi pendidikan bagi keluarganya (dengan menjadi ibu rumah tangga) dan bagi dirinya sendiri (dengan menjadi siswa sekolah formal pada jenjang SD hingga Universitas).

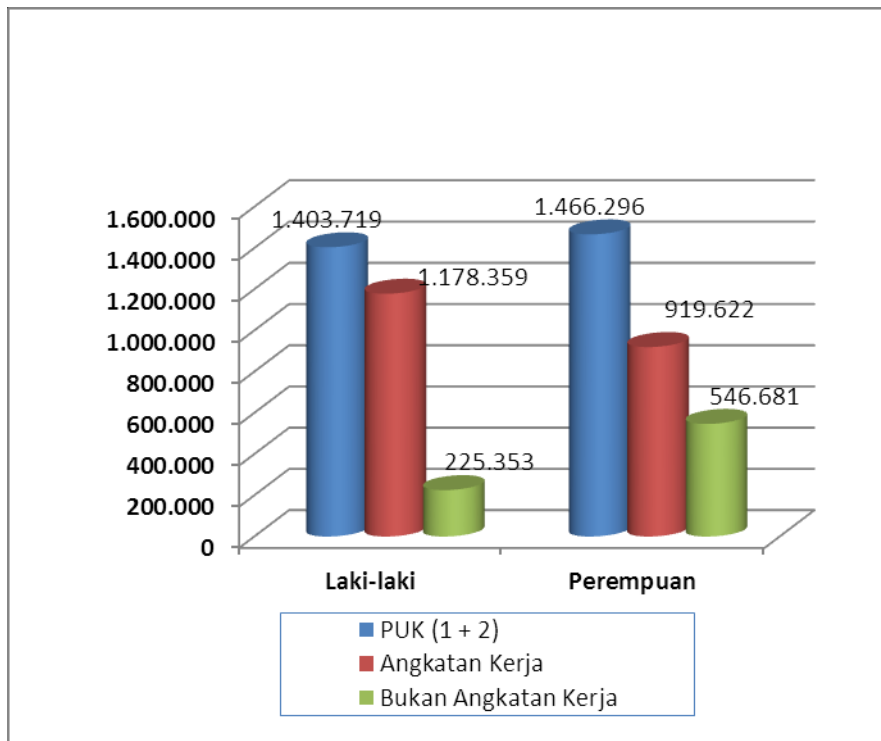
**Tabel 2.63** Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY, Tahun 2011–2015

JENIS KEGIATAN	2011	2012	2013	2014	2015*)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>1.933.917</b>	<b>1.988.539</b>	<b>1.949.243</b>	<b>2.023.461</b>	<b>2.097.981</b>
- Bekerja	1.850.436	1.911.720	1.886.071	1.956.043	2.012.742
- Penganggur	83.481	76.819	63.172	67.418	85.239
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>813.549</b>	<b>791.920</b>	<b>863.845</b>	<b>824.293</b>	<b>772.034</b>
- Sekolah	269.226	280.427	201.760	270.545	249.691
- Rumah Tangga	433.602	404.800	479.109	439.522	422.179
- Lainnya	110.721	106.693	182.976	114.226	100.164
<b>PENDUDUK USIA KERJA</b>	<b>2.747.466</b>	<b>2.780.459</b>	<b>2.813.088</b>	<b>2.847.754</b>	<b>2.870.015</b>
<b>TPAK (Persen)</b>	<b>70,39</b>	<b>71,52</b>	<b>69,29</b>	<b>71,05</b>	<b>73,10</b>
<b>TPT (Persen)</b>	<b>4,32</b>	<b>3,86</b>	<b>3,24</b>	<b>3,33</b>	<b>4,07</b>

\*) angka sementara (Februari 2015), Sumber: BPS, *DIY Dalam Angka dan Statistik DIY 2015*, berbagai tahun terbitan, diolah

Pengamatan terhadap sejumlah data Penduduk Usia Kerja di DIY menurut jenis kelamin untuk tahun terakhir pengamatan dapat dilihat berdasarkan pada data hasil Survey Angkatan Kerja (Sakernas) Februari 2015.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk 15 tahun keatas di D.I. Yogyakarta pada Februari 2015 diperkirakan mencapai 2,87 juta orang. Ditinjau dari aspek gender, jumlah penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 1,403 juta (48,90 persen) lebih rendah dari PUK perempuan yaitu 1,466 juta atau 51,09 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja. Berdasarkan wilayah domisilinya, sebagian besar PUK tinggal di daerah perkotaan. PUK di daerah perkotaan berjumlah sekitar 2,093 juta orang atau sekitar 72,94 persen, sedangkan sisanya sebesar 27,06 persen (776.546 ribu orang) tinggal di daerah perdesaan.



Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan DIY 2014-2015, diolah

**Gambar 2.41 Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin & Kegiatan Februari Tahun 2015**

Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan pada tahun 2011-2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan maksimum sekolah dasar. Pada tahun 2011 PUK berpendidikan maksimum sekolah dasar jumlahnya mencapai 973.041 orang dengan proporsi sebesar 35,42 persen. Pada tahun 2012 jumlah ini berhasil ditekan menjadi 955.525 orang, proporsinya menjadi sebesar 34,37 persen. Tahun 2013 dan 2014 menunjukkan penurunan yang cukup berarti menjadi 925.972 orang (32,92 persen) dan 908.976 orang ( 31,92 persen). Penurunan proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini mendorong peningkatan proporsi PUK yang berpendidikan di atasnya (SMTP s/d Universitas). Dengan masih besarnya proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini menunjukkan tingkat kualitas penduduk usia kerja di DIY masih relatif rendah.

**Tabel 2.64** Tabel Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2014

Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1. Maksimum SD	973.041	955.525	925.972	908.976
2. SMTP	563.558	589.905	608.439	598.082
3. SMTA Umum	486.108	491.780	492.343	509.957
4. SMTA Kejuruan	424.001	429.446	453.681	455.525
5. Diploma	98.470	102.986	102.057	110.780
6. Universitas	202.288	210.817	230.596	264.434
Jumlah	2.747.466	2.780.459	2.813.088	2.847.754

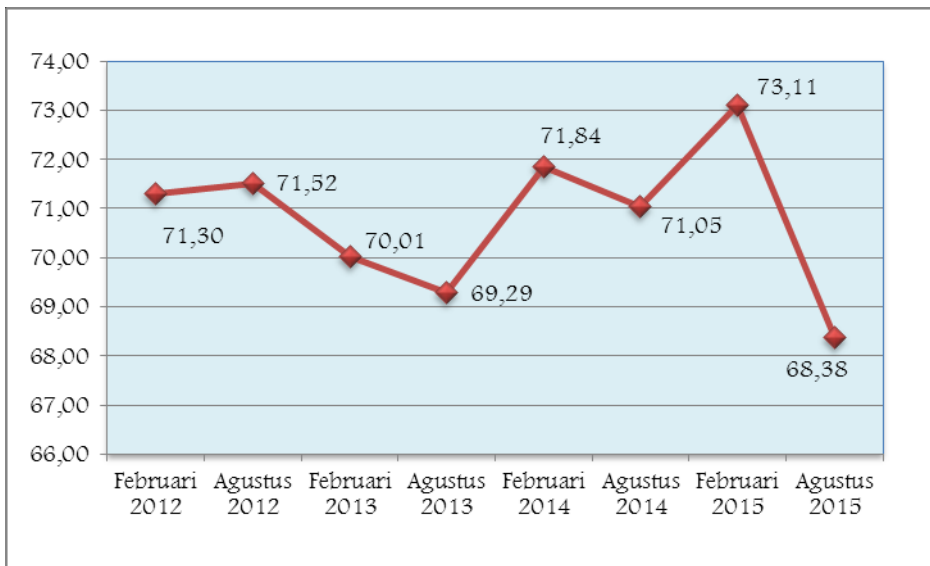
Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2011-2014 (Agustus)

#### b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

TPAK DIY pada periode 2011 hingga 2015 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada awal tahun pengamatan TPAK DIY adalah sebesar 69,76 persen, kemudian terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai angka 71,52 persen kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi 69,29 persen dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 71,05 persen. Namun pada akhir pengamatan (Agustus 2015) mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi hanya 68,38 persen. Angka TPAK sebesar 68,38 persen mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 68 orang adalah angkatan kerja. Angka ini merupakan angka terendah yang pernah terjadi selama periode 2011-2015.

Secara umum, terdapat pola TPAK di bulan Februari yang cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK bulan Agustus. Hal ini berkaitan dengan siklus masa puncak panen tanaman pangan yang terjadi pada triwulan pertama. Masa puncak panen mendorong peningkatan TPAK di daerah perdesaan, terutama pada sektor pertanian karena kebutuhan pekerja pada masa tersebut mengalami peningkatan.



Sumber: BPS, Sakernas Tahun Februari 2012 – Agustus 2015

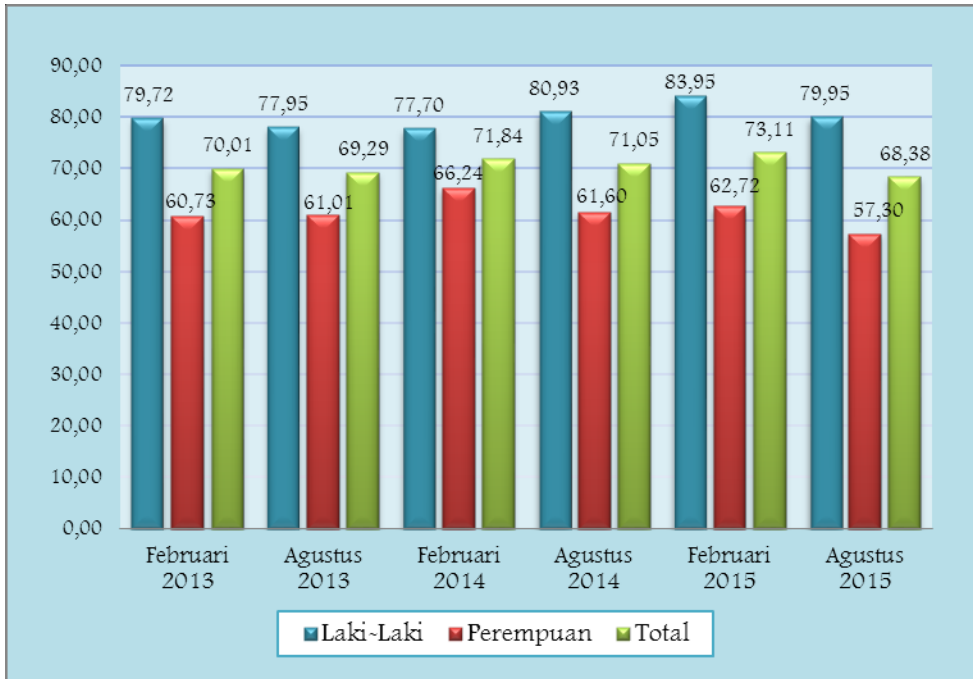
**Gambar 2.42** Gambar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK ) di DIY Februari 2012~Agustus 2015

Sementara bila TPAK dibedakan menurut jenis kelamin terdapat kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Sedangkan pola perkembangan TPAK menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih dominan (berfluktuasi pada kisaran 77-82 persen) dibandingkan TPAK perempuan (berada pada kisaran 57-67 persen). Fenomena menunjukkan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar aktivitas mengurus rumah tangga di DIY dilakukan oleh perempuan dan adanya pandangan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah tanggungjawab laki-laki. TPAK laki-laki pada Agustus 2015 mencapai sekitar 79,95 persen, sementara TPAK perempuan sebesar 57,30persen. Pola ini menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga

TPAK menurut wilayah menunjukkan kecenderungan TPAK di perdesaan selalu lebih tinggi dari daerah perkotaan. TPAK perdesaan berfluktuasi antara 73-82 persen, sementara TPAK perkotaan berada pada kisaran 62-72 persen. Hal ini berkaitan dengan adanya kecenderungan penduduk perkotaan yang lebih memilih menyelesaikan pendidikan sampai jenjang yang setinggi-tingginya sebelum memasuki pasar tenaga kerja serta lebih selektif memilih pekerjaan yang sesuai. Hal ini berbeda dengan penduduk perdesaan yang memiliki lama sekolah yang lebih singkat (jenjang pendidikan dasar atau menengah) dan kemudian masuk pasar kerja untuk membantu ekonomi keluarga meski hanya sebagai pekerja



keluarga atau bekerja di sektor informal dengan jumlah jam kerja yang relatif pendek.



Sumber: BRS November 2014, BPS Provinsi DIY

**Gambar 2.43 Perkembangan TPAK di DIY Menurut Jenis Kelamin (Februari 2013-Agustus 2015)**

Pola TPAK DIY menurut kelompok umur menyerupai kurva “U terbalik”, yaitu rendah pada usia 15-19 dan 60 tahun ke atas serta tinggi pada kelompok 25-54 tahun.

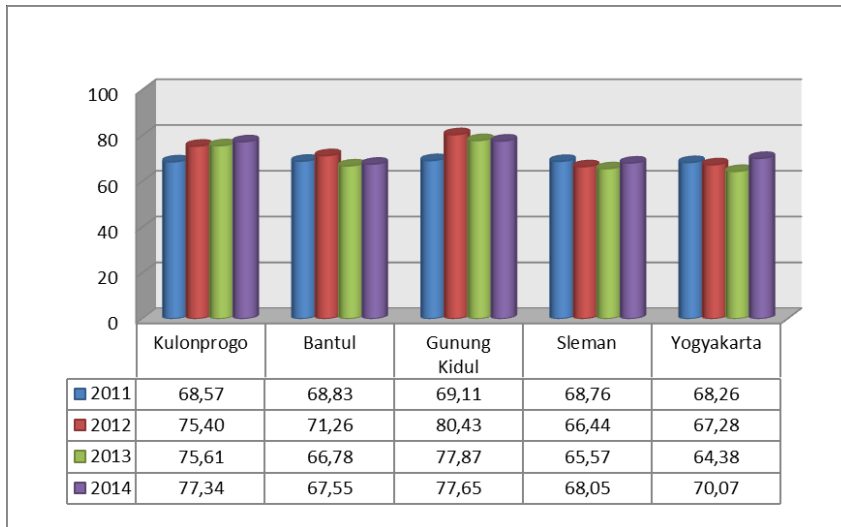
TPAK yang rendah pada kelompok usia 15-19 tahun mencerminkan tingginya penduduk pada kelompok ini yang melakukan kegiatan utama bersekolah, sehingga mereka tidak tergolong dalam kelompok angkatan kerja. Sedangkan pada usia produktif 30-49 tahun TPKA berada pada posisi tinggi karena kegiatan utama pada usia ini adalah bekerja. TPKA kelompok umur 50-59 tahun masih relatif tinggi karena pada umumnya masih produktif untuk bekerja.

**Tabel 2.65 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) Menurut Kelompok Umur di DIY, Tahun 2011 – Februari 2015**

Golongan Umur	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	Februari 2015
15-19	26,69	27,83	22,37	23,96	22,69
20-24	65,70	64,16	58,97	63,52	69,84
25-29	77,71	80,82	75,62	81,30	83,77
30-34	80,38	84,34	80,10	84,25	82,59
35-39	90,00	84,80	82,03	87,05	83,15
40-44	87,60	86,02	85,71	85,00	85,09
45-49	85,70	89,65	89,69	88,08	85,80
50-54	84,29	88,96	87,60	86,03	89,63
55-59	74,55	81,02	81,93	79,95	82,72
60+	46,36	53,19	54,82	53,69	60,48

*Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2011- 2015*

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, hampir semua kabupaten cenderung mengalami kenaikan TPAK pada Agustus 2014, hanya Kabupaten Gunungkidul yang mengalami penurunan sebesar 0,22 poin. Meskipun mengalami penurunan angka TPAK Gunungkidul merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 77,65 persen, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo 77,34 persen, Kota Yogyakarta 70,07 persen, Kabupaten Sleman 68,05, dan terendah Kabupaten Bantul 67,55 persen.



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik, November 2014

**Gambar 2.44 Perkembangan TPAK Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2011-2014(Agustus)**

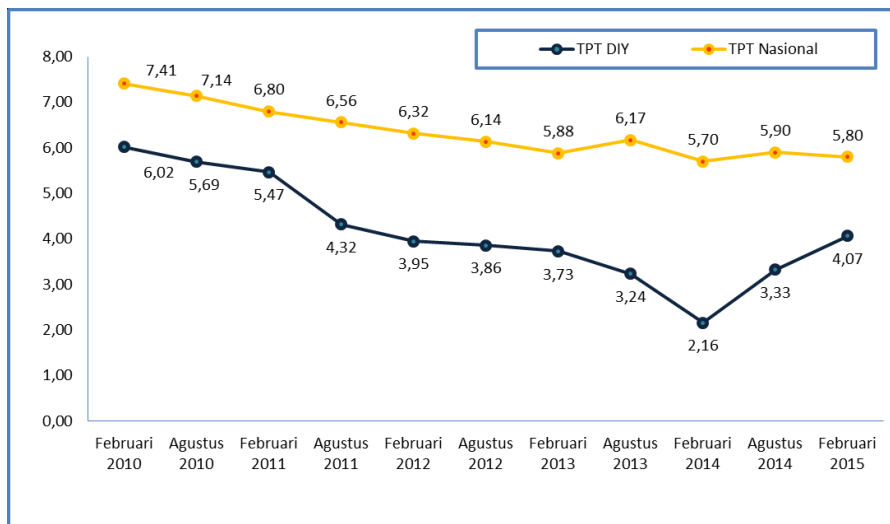
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta telah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja.

TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena TPT merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan angka pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari tahun 2010 hingga Februari 2014 menunjukkan trend penurunan dengan angka TPT berada pada kisaran 2,2–6,02 persen, namun kemudian mengalami peningkatan pada Agustus 2014 menjadi 3,33 persen dan mencapai 4,07 persen pada Agustus 2015. Angka TPT DIY ini masih lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang berada pada kisaran 5,2 sampai 7,41 persen. TPT Nasional pada Februari 2015 mencapai 5,80 persen turun 0,10 point dibandingkan Agustus 2014.

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dari TPT perempuan. Pada Februari 2015, TPT masing-masing sebesar 3,72 persen untuk laki-laki dan 2,65 persen untuk perempuan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan mencapai 4,54 persen.



Sumber :BRS Mei 2015, BPS Provinsi DIY

**Gambar 2.45** Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional Februari 2010- Februari 2015 (%)

Selama periode 2011 – 2015, perkembangan TPT menurut wilayah perkotaan dan perdesaan di DIY menunjukkan pola yang hampir sama, namun terdapat kecenderungan TPT di perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Hasil Sakernas DIY menunjukkan bahwa pada tahun 2010 TPT perkotaan menunjukkan angka 6,97 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 4,00 persen pada bulan Agustus 2014 dan meningkat 0,55 poin pada Agustus 2015 menjadi sebesar 4,55. Namun demikian, walaupun tingkat pengangguran di perkotaan cenderung menurun tetapi angkanya masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran di perdesaan. TPT di daerah perdesaan pada tahun

2010 adalah sebesar 4,01%, tahun 2014 turun menjadi 2,17 persen dan kembali meningkat menjadi 3,02 persen pada Agustus 2015.

Tingginya TPT Perkotaan dibandingkan di perdesaan disebabkan antara lain karena beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan dengan pindah atau mondok di perkotaan. Dengan demikian pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan. Sementara itu, penduduk daerah perdesaan biasanya tidak terlalu selektif dalam memilih lapangan pekerjaan, sehingga mereka akan melakukan kegiatan apa saja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga dan pekerja bebas pertanian. Penganggur yang tersisa di daerah perdesaan sebagian di antaranya memang mencari pekerjaan di perdesaan juga, dan sebagian lagi tetap tinggal di desanya sambil mencari pekerjaan dengan cara melaju (commute/pulang-pergi) ke perkotaan.

Berdasarkan kelompok umur, Tingkat Pengangguran Terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, antara 15-24 tahun. TPT usia muda pada Februari 2015 sekitar 10-22 persen, atau lebih dari 4 kali lipat TPT semua umur (DIY). Pada kelompok umur 15-19 tahun, TPT perempuan lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka laki-laki, sedangkan pada kelompok umur 25-29 tahun dan 40-49 tahun TPT perempuan lebih tinggi dari TPT laki-laki (Sakernas DIY 2014-2015)

**Tabel 2.66 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY**

Gol. Umur	Februari 2013			Agustus 2013			Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-19	16,14	8,42	13,27	22,78	23,19	22,97	18,65	10,04	14,07	27,14	13,27	21,59	19,41	15,08	21,59
20-24	8,86	20,08	13,71	17,60	13,96	15,87	10,96	13,00	11,94	9,34	11,22	10,19	20,98	11,86	10,19
25-29	6,31	7,12	6,66	4,13	2,15	3,29	6,24	0,00	3,30	8,30	5,07	6,91	7,82	7,95	6,91
30-34	3,84	9,07	6,02	2,59	2,61	2,60	2,55	0,00	1,45	1,80	2,56	2,11	3,53	1,16	2,11
35-39	2,84	2,17	2,55	1,75	0,93	1,43	0,00	1,63	0,77	1,43	1,17	1,33	4,35	0,00	1,33
40-44	2,09	1,60	1,86	1,55	1,11	1,34	0,00	0,00	0,00	1,06	0,73	0,90	0,00	0,79	0,90
45-49	1,33	2,16	1,73	1,10	0,00	0,56	2,91	0,00	1,49	2,74	0,50	1,75	0,00	0,68	1,75
50+	0,00	0,00	0,00	1,36	0,30	0,88	0,00	0,00	0,00	1,28	0,47	0,90	1,06	0,00	0,55
DIY	3,22	4,37	3,73	3,59	2,81	3,24	2,67	1,60	2,16	3,88	2,65	3,33	5,23	2,59	4,07

*Keterangan:*

*L = Laki-Laki ; P = Perempuan*

*Sumber: Sakernas DIY 2014-2015*

Jika dilihat dari status pendidikan terakhir yang ditempuh, sebagian besar pengangguran terbuka di DIY merupakan pengangguran terdidik karena didominasi oleh lulusan D1-3/S1-3. Pada Februari 2015 angka TPT lulusan D1-3/S1-3 adalah sebesar 7,02 persen, diikuti TPT SLTA sebesar 6,21 persen, dan TPT SLTP sebesar 5,47 persen.

**Tabel 2.67 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di DIY, Februari 2013 – Februari 2015**

Tingkat Pendidikan	Februari 2013			Agustus 2013			Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
≤ SD	0,00	0,00	0,00	1,13	0,25	0,62	1,64	0,04	0,63	0,93	0,00	0,39	1,60	0,00	0,74
SD	4,80	1,44	3,21	1,09	0,16	0,64	2,09	0,00	1,05	2,16	0,55	1,38	0,00	0,00	0,00
SLTP	0,00	1,35	0,53	3,00	2,23	2,68	1,37	0,00	0,85	2,73	1,50	2,26	7,13	2,63	5,47
SLTA	2,40	5,20	3,41	5,81	5,86	5,83	4,16	2,15	3,29	6,10	4,89	5,65	7,93	3,55	6,21
D1-3/S1-3	19,57	22,87	21,31	4,52	7,87	6,21	2,27	9,35	6,21	3,79	5,29	4,48	6,62	7,41	7,02
DIY	3,22	4,37	3,73	3,59	2,81	3,24	2,67	1,60	2,16	3,88	2,65	3,33	5,23	2,59	4,07

Sumber: Sakernas DIY 2014-2015

### 2.3.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selaras dengan UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi berperan dalam mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, serta memperkokoh perekonomian rakyat. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai keistimewaan DIY yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan koperasi di DIY mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Tercatat jumlah koperasi aktif pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 2.269 koperasi aktif pada tahun 2014 menjadi 2.369 koperasi aktif atau sebesar 4,41%. Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 88% dari total koperasi di DIY.

Sementara itu, dilihat dari volume usaha, terlihat adanya pertumbuhan volume usaha dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 pertumbuhan volume usaha seluruh koperasi di DIY sebesar 11 % dari Rp. 2.320.617 Juta menjadi Rp. 2.586.506 Juta.

**Tabel 2.68 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Koperasi Aktif	1.981	2.090	2.176	2.269	2.369
Koperasi Tidak aktif	485	427	499	341	316
Koperasi Beku	-	-	58	-	-
Modal Sendiri (Rp Juta)	929.556	1.015.396	1.440.948	594.124	1.318.800
Modal Luar (Rp Juta)	513.936	572.156	572.159	830.210	2.320.866
Volume Usaha (Rp Juta)	2.304.123	2.304.127	2.320.617	2.586.506	

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2015



**Gambar 2.46 Pengembangan UKM di DIY**

Jumlah UKM di DIY pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 83.279 UKM atau sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan data UMKM dalam rangka review RPJMD. Dilihat dari aspek jenis usaha, sektor Perdagangan mendominasi jumlah UKM di DIY sebesar 32% dari total UKM di DIY diikuti oleh sektor Industri Pertanian sebesar 27%, sektor Industri Non Pertanian sebesar 24%, dan sektor Aneka Usaha sebesar 18%.

**Tabel 2.69 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2010-2015**

No	Jenis Usaha Menurut Sektor	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Aneka Usaha	39.036	43.471	43.976	44.452	47.808	24.144
2	Perdagangan	52.420	57.858	58.363	58.601	63.026	43.553
3	Industri	49.554	54.991	55.496	55.767	59.977	36.991

No	Jenis Usaha Menurut Sektor	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
	Pertanian						
4	Industri Non Pertanian	41.222	45.655	46.160	46.390	49.892	32.736
	Jumlah	182.232	201.975	203.995	205.210	220.703	137.424

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2015

Pertumbuhan wirausaha baru pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang pesat apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Tercatat pada tahun 2015, jumlah wirausaha baru di DIY meningkat sebanyak 48.912 WUB dibanding tahun lalu yang hanya sebesar 16.421 WUB.. Pertumbuhan wirausaha baru paling pesat berasal dari Kota Yogyakarta sebesar 28% dari total wirausaha baru di DIY, diikuti oleh Kab. Bantul sebanyak 27%, Kab. Gunung Kidul sebanyak 19%, Kab. Sleman sebanyak 16%, dan terakhir Kab. Kulon Progo sebanyak 10%.

**Tabel 2.70 Perkembangan Wirausaha Baru Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014**

No.	Kab / Kota	Tahun					Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kota Yogyakarta	4.561	4.590	4.598	4.643	18.420	36.814
2	Sleman	2.541	2.587	2.592	2.608	10.365	20.693
3	Bantul	4.439	4.463	4.468	4.479	17.868	35.717
4	Kulon Progo	1.552	1.565	1.571	1.578	6.268	12.534
5	Gunung Kidul	3.096	3.099	3.105	3.113	12.412	24.823
	Jumlah	16.189	16.304	16.334	16.421	65.333	130.581

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2015

Penumbuhan wirausaha baru di DIY harus terus dilakukan terutama pada sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi. Perlunya pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi terciptanya persaingan yang sehat, mempermudah akses permodalan, serta penumbuhan inkubator bisnis sebagai upaya untuk mendorong lahirnya wirausaha baru yang berkualitas dari segi manajemen maupun SDMnya.

Koperasi dan UKM mendapatkan perhatian dalam pembangunan DIY mengingat perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di DIY. Peningkatan peran Koperasi dalam perekonomian DY ditunjukkan dengan peningkatan data keragaan koperasi selama 5 (lima tahun) terakhir baik dari aspek jumlah koperasi aktif maupun volume usaha. Sementara itu, perkembangan unit usaha di DIY yang didominasi skala kecil dan menengah menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.

Perkembangan jumlah koperasi dan UKM di DIY dari tahun 2009 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014,



jumlah koperasi aktif sebanyak 2.269 koperasi aktif, mengalami kenaikan sebesar 4% dibanding tahun 2013. Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 87% dari total koperasi di DIY. Sementara itu, dilihat dari volume usaha, terlihat adanya pertumbuhan volume usaha dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 pertumbuhan volume usaha seluruh koperasi di DIY sebesar 11 % dari Rp. 2.320.617 Juta menjadi Rp. 2.586.506 Juta.

**Tabel 2.71 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Koperasi Aktif	1.926	1.981	2.090	2.176	2.269
Koperasi Tidak aktif	484	485	427	499	341
Koperasi Beku				58	
Modal Sendiri (Rp Juta)	692.622	929.556	1.015.396	1.440.948	594.124
Modal Luar (Rp Juta)	415.550	513.936	572.156	572.159	830.210
Volume Usaha (Rp Juta)	2.296.146	2.304.123	2.304.127	2.320.617	2.586.506

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2015



**Gambar 2.47 Pengembangan UKM di DIY**

Jumlah UMKM pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan sebesar 15.493 UKM atau sebesar 8 % dibanding dengan tahun 2013. Dilihat dari jenis usaha, UKM di DIY didominasi oleh usaha Perdagangan dan Industri Pertanian. Komposisi ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jenis usaha perdagangan menguasai sebesar 28 % dari total UKM di DIY dan diikuti oleh industri pertanian sebesar 27%..

**Tabel 2.72 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2010-2014**

No	Jenis Usaha Menurut Sektor	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014*
1	Aneka Usaha	34.009	39.036	43.471	43.976	44.452	47.808
2	Perdagangan	48.292	52.420	57.858	58.363	58.601	63.025
3	Industri Pertanian	46.017	49.554	54.991	55.496	55.767	59.977
4	Industri Non Pertanian	36.529	41.222	45.655	46.160	46.390	49.892
	Jumlah	164.847	182.232	201.975	203.995	205.210	220.703

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014

Sebagai bentuk penumbuhan sektor UKM, telah dilakukan program pengembangan kewirausahaan. Hingga tahun 2013 telah dilakukan pembinaan terhadap 81.407 wirausaha baru. Berbagai Kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan pelatihan teknis penunjang telah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya.

**Tabel 2.73 Perkembangan Wirausaha Baru Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013**

No.	Kab / Kota	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Kota Yogyakarta	4.552	4.561	4.590	4.598	4.643	22.946
2	Sleman	2.534	2.541	2.587	2.592	2.608	12.862
3	Bantul	4.433	4.439	4.463	4.468	4.479	22.282
4	Kulon Progo	1.550	1.552	1.565	1.571	1.578	7.816
5	Gunung Kidul	3.090	3.096	3.099	3.105	3.113	15.501
	Jumlah	16.159	16.189	16.304	16.334	16.421	81.407

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014

### 2.3.1.16 Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkan modalnya disuatu daerah berikut serapan tenaga kerja local dan asing. Tentu saja untuk tingkat daerah semakin banyak PMDN dan serapan Tenaga kerja lokal lebih diutamakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun demikian peran PMA dan tenaga kerja asing tetap diperlukan untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi karena seringnya pemodal asing nilai investasinya bisa lebih besar dan

dengan tenaga kerja asing yang masuk ada percepatan pertukaran ilmu dan pemahaman akan tekonogi baru

Investasi DIY diutamakan untuk industri-industri berbasisan keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif serta industri yang ramah lingkungan. Sehingga dalam perkembangannya, investasi yang tumbuh di DIY sesuai dengan daya dukung lingkungan.

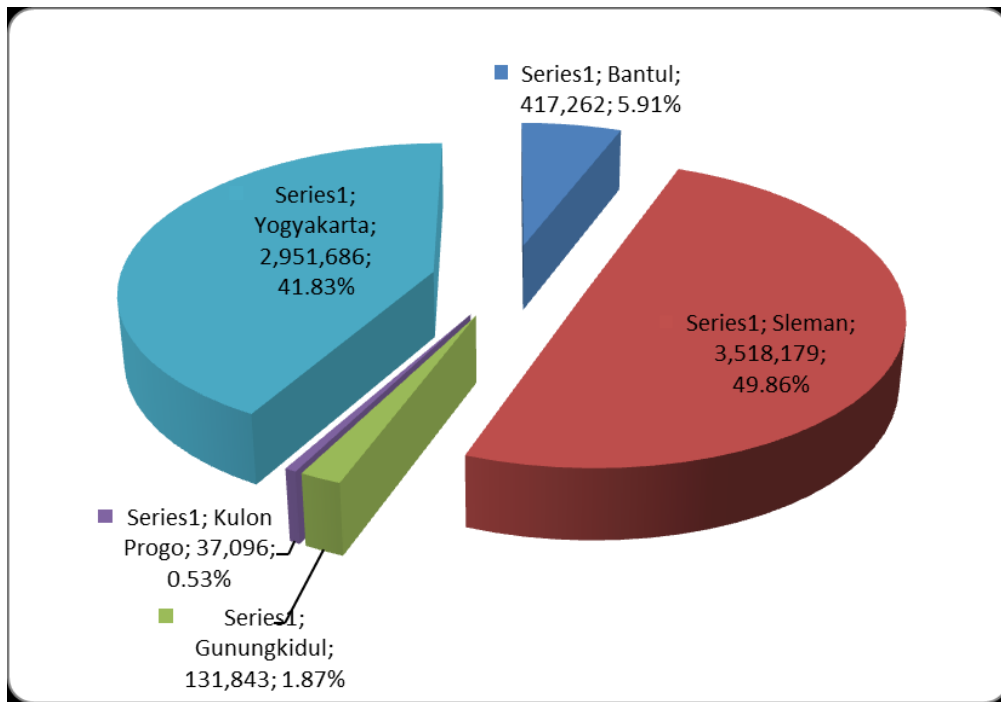
Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukan pertumbuhan yang positif walapun baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2015 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 14,88%. Total investasi di DIY tahun sampai dengan tahun 2015 adalah Rp. 11.189.658.018.827,- yang terdiri dari PMDN Rp.6.448.438.256.484 dan PMA sebesar Rp. 4.741.219.762.343,-. Adapun jumlah Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 218 perusahaan, yang terdiri dari 119 PMA dan 106 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 44.145 TKI dan 189 TKA.

**Tabel 2.74 Perkembangan Investasi di DIY**

Tahun	Investasi PMDN (Rp 000)	Investasi PMA (Rp 000)	Total Investasi (Rp 000)	Growth (Rp 000)	Investation Growth (%)
s.d 2011	2.313.141.695	4.110.436.324	6.423.578.020	1.842.605.192	40,22
s.d 2012	2.805.944.605	4.250.121.535	7.056.066.141	632.488.121	9,85
s.d 2013	2.864.654.491	5.203.115.642	8.067.770.134	1.011.703.992	14,34
s.d 2014	3.568.546.291	5.955.853.842	9.524.400.134	1.456.630.000	18,05
s.d 2015	6.448.438.256	4.741.219.762	11.189.658.018	1.665.257.884	14,88

Sumber: BKPM DIY, Tahun 2015

Meskipun secara keseluruhan investasi di DIY mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi presentasi di kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk lebih meratakan sebaran ivestasi di wilayah DIY agar gap kesejahteraan masyarakat di kab/kota semakin kecil.



Gambar 2.48 Persentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2015 Per Kabupaten/Kota

### 2.3.1.17 Urusan Kebudayaan

Perpaduan yang harmonis antara representasi masa klasik, masa sekarang, dan masa lalu akan menghasilkan Renaissance Yogyakarta. Renaissance Yogyakarta menuju masyarakat yang berperadaban baru dengan mengandalkan kekuatan kebudayaan perlahan-lahan menemukan titik simpulnya dengan kesadaran dan kemauan bersama untuk mempertahankan tanda-tanda kejayaan Yogyakarta di masa lalu sebagai bahan pembelajaran kepada generasi penerus dan masyarakat dunia tentang mozaik peradaban Yogyakarta yang menyemesta. Semangat *golong gilig* dan *manunggaling kawula lan gusti* telah mendasari pelaksanaan amanah-amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Proses cipta, rasa, karsa dan karya yang dihasilkan oleh para leluhur yang pernah mengenyam hidup di Yogyakarta berpadu dengan kreativitas dan inovasi antar generasi memperkaya dan menambah keragaman budaya di Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan kebudayaan. Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan DIY dapat dibuktikan dengan keberhasilannya menerjemahkan Revolusi Mental dalam Nawacita ke dalam kebijakan pembangunan segala bidang di DIY yang berpayung hukum pada kebudayaan.

Pasca dilaksanakannya UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta telah meningkatkan proses pembangunan kebudayaan di DIY. Hingga saat ini telah banyak perkembangan yang dihasilkan oleh DIY.

## **A. Sejarah, Purbakala dan Permuseuman**

### **Sejarah dan Purbakala**

Kekayaan sejarah semenjak zaman purbakala hingga kontemporer masih dapat dilihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehidupan manusia-manusia purba pernah terjadi di pegunungan selatan Yogyakarta. Tidak semua masyarakat yang pernah berdiam di DIY meninggalkan jejak-jejak yang masih dapat dilihat pada saat ini. Jejak-jejak yang ada pun belum tentu bertebaran pada satu kesatuan geografis tertentu, Peninggalan-peninggalan mereka dapat diklasifikasikan ke dalam situs, struktur, benda, bangunan maupun kawasan yang dalam bahasa UU No 11 Tahun 2010 disebut sebagai cagar budaya. Cagar budaya sangat bernilai bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri, ilmu pengetahuan, social ekonomi dan bahkan politik.

Masa dan kekuasaan yang berganti-ganti dari yang sifatnya tradisional, Hindu, Budha, Islam, Cina, masa kolonialisme Belanda dan Inggris hingga kemerdekaan, meninggalkan cagar budaya yang beragam. Saat ini tersedia sarana kebutuhan sehari-hari manusia yang ditinggalkan para leluhur. Contohnya : istana, masjid, gereja, candi, vihara, pabrik, perguruan tinggi, taman pendidikan. Kemajuan Yogyakarta yang ke arah business oriented akan dapat mengancam keistimewaan yang direpresentasikan dengan bangunan monumental tersebut.

Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat dilihat dari telah dijabarkannya UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa

Budaya Daerah, Pergub DIY No. 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Pergub DIY No. 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Perdais No 1 Tahun 2013.

Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mensyaratkan adanya Tim Ahli Cagar Budaya yang melakukan pengkajian sebelum menetapkan suatu satuan geografis tertentu untuk menjadi cagar budaya, maka sebelum Tim Ahli Cagar Budaya DIY dikukuhkan dengan formasi lengkap sebagai upaya awal perlindungan cagar budaya tersebut Kepala Dinas Kebudayaan DIY membuat surat ketetapan tentang cagar budaya, yaitu SK Kepala Dinas Kebudayaan DIY Nomor 188/38.A./2014.

Cagar budaya di DIY yang berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, kawasan cagar budaya, situs, tanpa struktur budaya dapat diindikasikan berjumlah 1.845. Masih dimungkinkan penemuan-penemuan kembali cagar budaya, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar. Kemunculan kelompok radikal spiritual, kapitalisme, laju demografi, belum lagi kekuatan alam yang sangat ekstrem tidak diragukan akan menggerus aset-aset budaya bendawi tersebut dan kekuatan tahan budaya masyarakat DIY.

**Tabel 2.75 Persebaran Benda, Bangunan dan Situs Cagar Budaya Tahun 2015**

NO	Kabupaten/Kota	Bangunan Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya	Situs
1	Kota Yogyakarta	617	49	2
2	Kabupaten Bantul	90	274	61
3	Kabupaten Gunungkidul	27	63	26
4	Kabupaten Kulon Progo	44	84	15
5	Kabupaten Sleman	103	279	80
	DIY	881	764	184

Sumber : [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com) (Dinas Kebudayaan)

**Tabel 2.76 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan Tahun 2009-2015**

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cagar Budaya yang ditetapkan	511	511	515	517	517	588	588
Bangunan Cagar Budaya	511	511	511	520	947	877	881
Benda Cagar Budaya	746	746	747	747	762	763	764
Kawasan Cagar Budaya	12	13	13	16	16	16	16
Situs	95	95	95	95	176	184	184
Monumen Sejarah Perjuangan	44	44	44	44	52	65	70
Museum	34	34	38	42	42	43	47

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com) (Dinas Kebudayaan)

**Tabel 2.77 Penanganan Cagar Budaya Tahun 2009-2015**

Aspek	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	194	214	220	225	230	412	422
Total benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	1.272	1.279	1.279	1.410	1.446	1.824	1845

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com) (Dinas Kebudayaan)

Satuan geografis potensial kawasan cagar budaya di DIY terdapat sekitar 21-an kawasan, namun belum semuanya diintervensi secara intensif. Pada tahun 2011 Pemda DIY melalui SK Gubernur No 186/Kep/2011 menetapkan Kawasan Cagar Budaya yang masuk kewenangan provinsi yaitu antara lain : Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Imogiri, Kotagede, Kotabaru yang mewakili masa peradaban klasik Islam, tradisional Jawa, kolonialisme, Pecinan. Pada tahun 2014 melalui SK Kepala Dinas Kebudayaan No 188/38.A telah menetapkan warisan budaya sebagai perlindungan pertama terhadap aset-aset budaya DIY sebelum formasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana yang diatur UU Cagar Budaya dapat beranggotakan lengkap. Tahapan untuk menjadi cagar budaya harus melalui kajian dan registrasi yang prosedural, sedangkan DIY sangat kaya akan aset budaya bendawi, sehingga perlu dibuat penetapan warisan budaya.

**Tabel 2.78 Kawasan Cagar Budaya yang Mendapat SK Kepala Disbud DIY**

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
1	Kawasan Kraton	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
2	Kawasan Malioboro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
3	Kawasan Pakualaman	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
4	Kawasan Kotagede	Yogyakarta dan Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
5	Kawasan Kotabaru	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
6	Kawasan Imogiri	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
7	Kawasan Parangtritis	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
8	Kawasan Pleret	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
9	Kawasan Jetis	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
10	Kawasan Pengok	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
11	Kawasan Baciro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
12	Kawasan Prambanan	Sleman	SK Kadis. No. 188/ 38.A
13	Kawasan Ratu Boko	Sleman	SK Kadis. No. 188/ 38.A
14	Kawasan Sokoliman	Gunungkidul	SK Kadis. No. 188/ 38.A

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY



**Gambar 2.49 Panggung Krapyak**



**Gambar 2.50 Beteng Kraton**

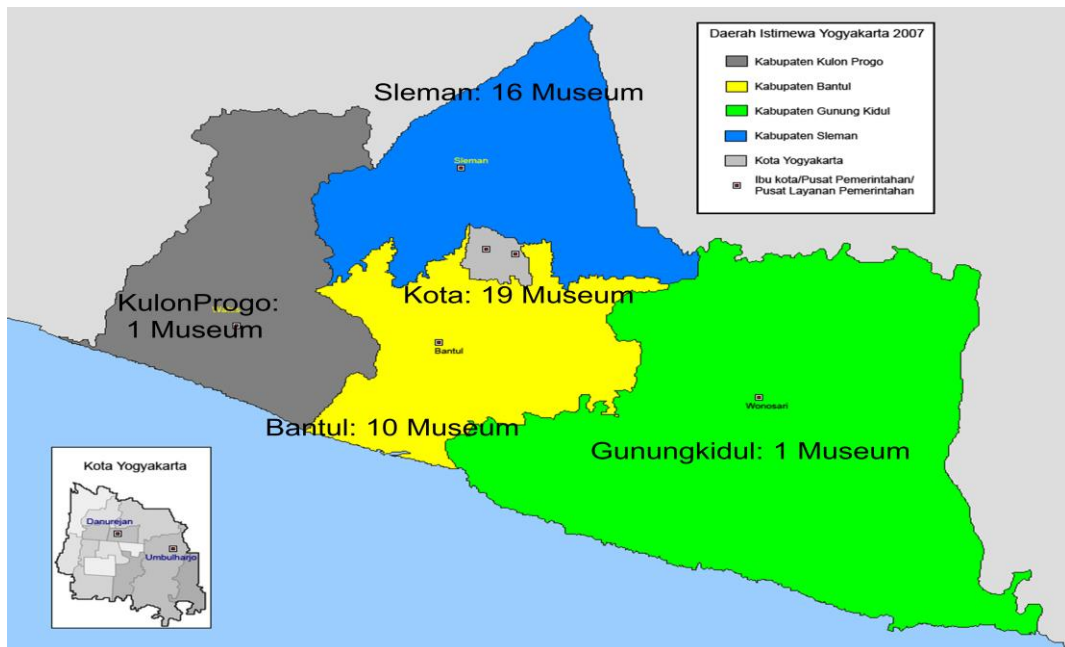


## **Museum**

Museum sebagai kekuatan keistimewaan, sebagai nafas keistimewaan, menguatkan keistimewaan, dan jati diri bangsa. Museum menurut definisi ICOM adalah sebuah lembaga atau wadah permanen yang melaksanakan fungsi pelestarian dan menyajikan berbagai koleksi dan bukti-bukti material manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi. Dengan kata lain, museum merupakan lembaga tempat penyimpanan, perawatan, dan pengamanan dan pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Museum juga merupakan lembaga non profit yang terbuka untuk umum, tempat memamerkan dan mengkomunikasikan benda-benda bukti keberadaan manusia dan lingkungannya guna kepentingan pendidikan dan edukasi kultural, serta rekreasi.

DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional, 14 % museum di Indonesia berada di Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan terbanyak koleksinya kedua setelah museum nasional. Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional. Revitalisasi museum negeri Sonobudoyo dilakukan secara multiyears. Museum di DIY cenderung bertambah walaupun banyak menemui permasalahan dalam aspek kelembagaan pengelola dan SDM. Pada tahun 2015 ini terdapat 47 museum dan 3 semi museum yang tersebar sebagian besar di wilayah Sleman, Kota dan Bantul. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih jarang ditemukan museum.

Museum negeri yang berada di bawah Pemda DIY: Sonobudoyo, Purbakala Pleret; yang di bawah Kemendikbud: Benteng Vredeburg, Perjuangan; yang di bawah TNI adalah Museum TNI AD, Museum Sudirman. Museum Diponegoro, Museum TNI AU, Museum Sandi, Museum Istana Negara Gedung Agung, Museum MMTC, Museum Gedung Bank Indonesia. Pemerintah kabupaten Sleman memiliki Museum Gunung Merapi. Museum milik Pemerintah Kulon Progo masih dalam proses studi. Pemerintah Kabupaten Bantul sedang mengupayakan pendirian Museum Sumber Karahayon. Pemerintah Kota telah mengembangkan Museum Taman Pintar.



Sumber : Barahmus, 2015

**Gambar 2.51** Persebaran Museum di DIY

Lembaga-lembaga pendidikan juga mengembangkan museum. UGM yang memiliki museum UGM, Biologi, Peta, Geospasial, Paleoantropologi, Wanagama. UII yang diuntungkan dengan ditemukannya candi kimpulan. UPN Veteran telah mengembangkan Geoteknologi Mineral dan mereka juga mengadakan penelitian tentang geoheritage. UNY memiliki museum pendidikan Indonesia. Museum di lembaga pendidikan belum memiliki lembaga yang mengurus museum, belum memiliki pengelola khusus, kepala museum, tetapi yang ada hanya tenaga administratif dan hanya dititipkan di Fakultas.



Gambar 2.52 Museum Negeri Sonobudoyo II (Museum Condrokiranan)



Sumber : Barahmus, 2015

Gambar 2.53 Salah Satu Isi di Museum Sandi

Tabel 2.79 Daftar Museum Anggota Barahmus di DIY

No	Nama Museum	Lokasi	Jenis	Status	Kategori
1	Bebadan Museum Karaton Ngayogyakarta	Kota	Khusus	Bebadan	Budaya
2	Museum Negeri Pemda DIY Sonobudoyo	Kota	Umum	Negeri	Budaya
3	Bebadan Museum Pura Pakualaman	Kota	Khusus	Bebadan	Budaya
4	Museum Batik	Kota	Khusus	Swasta	Budaya

No	Nama Museum	Lokasi	Jenis	Status	Kategori
	Yogyakarta				
5	Museum Affandi	Sleman	Khusus	Swasta	Budaya
6	Museum Ullen Sentalu	Sleman	Khusus	Swasta	Budaya
7	Museum Wayang Kekayon Yogyakarta	Bantul	Khusus	Swasta	Budaya
8	Museum Tani Jawa Indonesia	Bantul	Khusus	Swasta	Pendidikan
9	Tembi Rumah Budaya	Bantul	Khusus	Swasta	Budaya
10	Museum Pendidikan & Mainan Kolong Tangga	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
11	Museum Bahari	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
12	Museum Biologi	Kota	Khusus	Negeri	Pendidikan
13	Museum Dewantara Kirti Griya	Kota	Khusus	Swasta	Perjuangan
14	Museum KRKB Gembira Loka	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
15	Museum Dr Yap	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
16	Museum Peta	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
17	Museum Pendidikan Indonesia UNY	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
18	Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
19	Museum Gunung Merapi	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
20	Museum Gumuk Pasir / Lab Geospasial	Bantul	Khusus	Negeri	Pendidikan
21	Museum Wanagama	Gunung kidul	Khusus	Negeri	Pendidikan
22	Museum Benteng Vredeburg	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
23	Museum Sasmitaloka Pangsar Sudirman	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
24	Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
25	Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia	Sleman	Khusus	Swasta	Perjuangan
26	Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala	Sleman	Khusus	Negeri	Perjuangan
27	Museum Perjuangan	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan

No	Nama Museum	Lokasi	Jenis	Status	Kategori
28	Museum Sandi	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
29	Museum Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan	Sleman	Khusus	Negeri	Perjuangan
30	Museum Monumen Yogya Kembali	Sleman	Khusus	Swasta	Perjuangan
31	Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
33	Museum Sejarah Purbakala Pleret	Bantul	Khusus	Negeri	Budaya

Sumber : Barahmus, 2015

Tabel 2.80 Daftar Museum Baru di DIY

No	Nama Museum	Lokasi
1	Museum Rumah Garuda	Bantul
2	Museum Memorial HM Soeharto	Bantul
3	Museum Taman Wisata Candi Prambanan	Sleman
4	Museum Gempa Prof DR Sarwidi	Sleman
5	Museum UII Candi Kimpulan	Sleman
6	Museum Paleoantropologi UGM	Sleman
7	Museum Sumber Karahayon	Bantul
8	Museum Batik Ciptowening Imogiri	Bantul
9	Museum Kulonprogo	Kulonprogo
10	Museum Istana Negara Gedung Agung	Kota
11	Museum Tino Sidin	Bantul
12	Museum MMTC	Sleman
13	Museum Taman Pintar Yogyakarta	Kota
14	Museum Gedung BI	Kota

Sumber: Barahmus, 2015

Tiga lokasi sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai museum, karena museum harus memiliki koleksi, pengelola, pameran secara rutin, sedangkan lokasi tersebut lebih pada hiburan dan galeri tanpa koleksi tetap, namun diidentikkan sebagai museum, yaitu Jogja National Museum, Museum De Mata Trick Eye, Museum De Arca.

Hal-hal yang dilakukan untuk menggiatkan kunjungan ke museum antara lain : Festival Museum: Karnaval & Pameran (2007), Karnaval Museum (2009), Festival Museum: Opera Karnaval (2010), Museum Goes

To Mall (2011), Museum Goes To Istana (2012), Museum Goes To Campus (2013), Museum Goes To School (2014). Promosi museum juga dilakukan dengan pemilihan duta museum.

Perjuangan pengembangan museum masih memerlukan strategi yang tepat karena diindikasinya berbagai persoalan yang mengurangi daya tarik dan daya saing museum sebagai tempat tujuan kunjungan yang favorit bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sebagai berikut: citra Museum yang masih rendah, museum masih dianggap sekedar memelihara barang tidak terpakai atau sekedar menjadi gudang penyimpanan, museum disejajarkan obyek wisata alam atau wisata lainnya, banyak museum kekurangan anggaran operasional, belum adanya standar pelayanan, kurangnya informasi keberadaan museum, belum terpadunya aspek pembelajaran museum dengan kurikulum di sekolah, belum adanya kebijakan terpadu antar instansi terkait, perlu adanya Grand Disain Permuseuman DIY yang melibatkan seluruh stakeholder.

### **B. Adat Istiadat, Tradisi dan Sistem Nilai Budaya Lainnya**

Peradaban baru yang hendak diwujudkan bagi masyarakat DIY yang memiliki keunggulan dalam nilai mental dan tata laku adalah peradaban yang dijiwai dan digerakkan oleh visi akbar yang dilandasi filosofi universal “Hamêmayu-Hayuning Bawânâ”, yang di dalamnya terkandung kewajiban Tri Satyâ Brâtâ. Pertama, rahayuning buwânâ kapurbâ waskitaning manungsâ (kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa), harmoni hubungan manusia dengan alam, baik dalam lingkup dunia (world) sebagai kewajiban ”Hamangku Buwânâ”, maupun seluruh alam semesta (universe) sebagai kewajiban ”Hamêngku Bawânâ”.

Kedua, darmaning manungsâ mahanani rahayuning nêgârâ (tugas hidup manusia adalah menjaga keselamatan negara), sebagai kewajiban manusia selama hidup di dunia, dimana kehidupan merupakan dinamika manusia, yaitu ”Hamêngku Nagârâ”. Ketiga, rahayuning manungsâ dumadi karânâ kamanungsané (keselamatan manusia oleh kemanusiaannya sendiri).

Sehingga dapat dimengerti jika filosofi itu menyandang misi akbar bagi manusia dalam tiga substansi tersebut, yaitu: ”Hamêngku Nagârâ, Hamangku Buwânâ, Hamêngku Bawânâ”. Bahwa kewajiban ”Hamêngku Nagârâ” itu, karena Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda, bergolong-golong dan bersuku-suku, sehingga diperlukan eksistensi negara dan pemerintahan yang mengaturnya, agar tidak terjadi seling-surup dan saling-silang antarmanusia.

Basis keunggulan sebuah bangsa, atau komunitas, nyata-nyata dan tak bisa lain, ialah manusia yang unggul spiritualitas, intelektualitas, dan etos kerjanya. Manusia-manusia unggul demikianlah yang menghasilkan kitab Sutasoma, Nêgarakêrtagama, Sêrat Cênthini, candi Borobudur dan Prambanan. Dan manusia-manusia unggul itulah kini yang menghasilkan invensi di bidang sains dan teknologi, inovasi di bidang industri, masterpiece di bidang seni, serta tata kelola yang baik di bidang pemerintahan.

Nilai-nilai tersebut telah diwujudkan dalam adat istiadat, tradisi, dan sistem nilai budaya lainnya. Nilai-nilai ketradisional telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY. Masyarakat DIY masih mempertahankan 473 upacara adat, 35 tradisi, 34 permainan tradisional, 181 permainan tradisional, walaupun dilaksanakan tidak secara merata. Daerah-daerah tertentu mengupayakan dapat mengaplikasikan beberapa jenis adat dan tradisi. Upacara adat yang sangat menarik masyarakat antara lain tradisi nguras enech atau mengganti air gentong di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, saparan bekakak, upacara Grebeg, tradisi cupu panjala, jamanan kereta pusaka.

Upacara adat kolosal diselenggarakan tahun 2015 dalam Festival Upacara Adat DIY 2015 yang dihadiri lina kabupaten/kota. Bakda Mangiran Srandakan mewakili upacara adat di Bantul, Wilujengan Gadhung Mlaten mewakili upacara adat di Gunungkidul, Siraman Sendhang Pengilon dari Kulon Progo, sedangkan Sleman menggelar Merti Sendang Tohino, serta Kota Yogyakarta yang mengandalkan Mbedhol Keprajan Kotagede. Festival-festival upacara adat dapat memberikan ruang ekspresi bagi para pelaku ritual adat, meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal, mendorong apresiasi masyarakat.



Sumber : Koleksi Dr. Daud Tanudirdjo, 2015

**Gambar 2.54** Adat dan Tradisi yang Berkembang

Tabel 2.81 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2009-2014

Jenis Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Upacara Adat	358	358	447	447	459	473
Upacara Tradisi	34	34	35	35	35	35
Organisasi Penghayat Kepercayaan	90	90	90	90	94	115
Makanan Tradisional	137	137	137	137	137	181
Jenis Permainan Tradisional	34	34	34	34	34	34
Jenis Pakaian	15	15	15	15	35	35
Sanggar Rias	349	349	405	405	405	405

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY ([www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com))

Desa Budaya di DI Yogyakarta terdapat 43 desa budaya, baru 32 desa yang memiliki predikat sebagai Desa Bina Budaya berdasarkan SK Gubernur No. 325/KPTS/1995. Desa Bina Budaya (Desa Budaya) tersebut diharapkan dapat menjadi wahana bagi upaya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian segala potensi budaya yang ada di desa. Desa budaya diartikan sebagai "wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan menkonservasinya dengan saksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural. Desa budaya yang sudah berpredikat maju ada 17 desa budaya yang lainnya masih dalam tahap tumbuh dan berkembang.

Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkatkan potensi dan eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat setempat. Desa budaya tidaklah sama dengan desa wisata karena desa wisata lebih menonjolkan pada peningkatan nilai jual sebuah desa daripada pelestarian nilai-nilai di dalamnya. Ditargetkan dari 438 desa/kelurahan di 78 kecamatan dapat mencapai 50 % yang menjadi desa budaya. Pengelolaan desa budaya yang sudah eksis dan rintisan-rintisan desa budaya dilakukan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tahun 2016 akan membentuk tim akreditasi untuk menilai kelayakan sebuah desa ditetapkan sebagai Desa Budaya.



Tabel 2.82 Desa Budaya

NO.	DESA BUDAYA	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Sinduharjo	Ngaglik	Sleman
2.	Bangunkerto	Turi	Sleman
3.	Sendang Mulyo	Minggir	Sleman
4.	Argomulyo	Cangkringan	Sleman
5.	Wedomartani	Ngemplak	Sleman
6.	Banyurejo	Tempel	Sleman
7.	Mulyodadi	Bambanglipuro	Bantul
8.	Trimurti	Srandakan	Bantul
9.	Srigading	Sanden	Bantul
10.	Dlingo	Dlingo	Bantul
11.	Triwidadi	Pajangan	Bantul
12.	Seloharjo	Pundong	Bantul
13.	Pagerharjo	Samigaluh	Kulonprogo
14.	Tanjungharjo	Nanggulan	Kulonprogo
15.	Banjarharjo	Kalibawang	Kulonprogo
16.	Sidorejo	Lendah	Kulonprogo
17.	Sukoreno	Sentolo	Kulonprogo
18.	Glagah	Temon	Kulonprogo
19.	Sendang Sari	Pengasih	Kulonprogo
20.	Jatimulyo	Girimulyo	Kulonprogo
21.	Brosot	Galur	Kulonprogo
22.	Hargomulyo	Kokap	Kulonprogo
23.	Semin	Semin	Gunungkidul
24.	Semanu	Semanu	Gunungkidul
25.	Bejiharjo	Karangmojo	Gunungkidul
26.	Kemadang	Tanjungsari	Gunungkidul
27.	Putat	Patuk	Gunungkidul
28.	Girisekar	Panggang	Gunungkidul
29.	Giring	Paliyan	Gunungkidul
30.	Katongan	Nglipar	Gunungkidul
31.	Kepek	Wonosari	Gunungkidul
32.	Jerukwudel	Girisubo	Gunungkidul
33.	Wonokerto *)	Turi	Sleman
34.	Margodadi *)	Sayegan	Sleman
35.	Pandowoharjo *)	Sleman	Sleman
36.	Sendangagung *)	Minggir	Sleman
37.	Selopamioro *)	Imogiri	Bantul
38.	Sitimulyo *)	Piyungan	Bantul
39.	Sabdodadi *)	Bantul	Bantul
40.	Tambakromo *)	Ponjong	Gunungkidul
41.	Wiladeg *)	Karangmojo	Gunungkidul
42.	Bugel *)	Panjatan	Kulon Progo
43.	Tuksono*)	Sentolo	Kulon Progo

\*) Desa Budaya atas usulan Kabupaten

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2015

### C. SENI DAN PERFILMAN

Kegiatan berkesenian di DIY telah dieksplorasi dengan berbagai cara dan media, diwujudkan dalam berbagai bentuk dan ragam, entah berupa seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan, bahkan terkadang campuran berbagai bentuk dan ragam, atau apa pun namanya. Semua itu berakar pada rasa, dan diwujudkan untuk melayani rasa pula, yakni rasa keindahan. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. Dalam pengkategorian cabang seni sampai saat ini belum ada pembakuan yang pasti. Untuk kepentingan penyusunan sistem informasi budaya, data yang akan dilihat adalah organisasi seni, usaha kerajinan, permainan tradisional, tokoh seniman dan budayawan, penghargaan seniman dan budayawan, dan gallery seni rupa.

Beberapa tahun terakhir semarak even seni sangat menonjol sekali di DIY. Perhelatan seni dapat disaksikan di lingkungan Kraton, Kampus, Kampung maupun Kantor. Lomba, festival, karnaval, pameran sebagai wadah kreativitas dan inovasi seni masyarakat. Bentuk-bentuk seni yang biasanya berkembang di Kraton, biasanya hanya dipertunjukkan bagi kalangan tertentu, kini sudah dapat ditonton oleh seluruh anggota masyarakat. Tempat-tempat yang tidak mungkin dimasuki seni tradisional pun sudah mulai ada penajangan untuk ruang budaya tradisional.



Sido Mukti

Semen Romo

Ceplok Truntum Cantel

Sumber : Koleksi Hadikusumo Amijoyo

#### Gambar 2.55 Beberapa Ragam Batik

Karya seni yang telah menjadi warisan budaya dunia adalah batik, keris, wayang, gamelan. Selain sebagai karya seni, warisan karya tersebut juga merupakan pusaka Indonesia yang diakui dunia internasional. Wayang kulit sebagai seni pertunjukan tradisional yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa dimainkan oleh seorang dalang dengan menggerakkan karakter-karakter tertentu yang terdapat dalam Kitab Mahabarata dan Ramayana telah diakui UNESCO pada tahun 2008. Keris diakui dunia pada tahun 2005. Batik tercatat dalam daftar UNESCO pada

tahun 2009. Gamelan diakui dunia internasional sebagai karya budaya Indonesia pada tahun 2014, bersamaan waktunya dengan penetapan Sekaten.

Seni yang juga berkembang pesat saat ini di DIY adalah dunia film. Banyak film yang telah diproduksi di DIY baik nasional maupun internasional, seperti film Sang Pencerah, film Turis Romantis, Surga yang Tak dirindukan, Java Heat, The Philosophers yang mengambil lokasi di kawasan-kawasan cagar budaya. Pada tahun 2015 DIY telah memproduksi karya budaya film unggul yaitu antara lain : Amarta (Gadis dan Air), Bawang Kembar, Ilalang ingin Hilang Waktu Siang, Jaranan, Kirana, Kitorang Basudara, Natalan, Neng Kene Aku Ngenteni Kowe, Pulang Tanpa Alamat, Sasi Takon.

Kelompok pembuat film di Yogyakarta beragam dari segi umur, organisasi, bentuk organisasi, maupun ukuran organisasi. Dari segi umur, hampir semua kelompok pembuat film didirikan pasca reformasi. Komunitas film sangat mempengaruhi perkembangan perfilman di DIY. Beberapa contoh komunitas yang menyelenggarakan program pelatihan kine klub yang berbasis kampus seperti di UGM, ISI Yogyakarta, APMD, UAJY, UIN, dan UMY. Komunitas apresiasi dan kajian film yang tidak berbasis kampus antara lain : De Javu, Ki noki, Montase, Rumah Sinema, Forum Film Dokumenter. Komunitas film yang sudah berorientasi pada produksi misalnya Limaenam Films, Studio Kasat Mata dan Fourcolours Films.

Daerah Istimewa Yogyakarta diuntungkan dengan keberadaan 129 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 200 ribu orang. Keberadaan perguruan tinggi seperti universitas, akademi dan berbagai sekolah vokasi tersebut memungkinkan perjumpaan orang-orang yang berminat pada produksi film dan mendukung kemunculan kelompok-kelompok film yang berorientasi pada seni, selain untuk mencari pendapatan. Film bagi kelompok pembuat film di DIY bukan saja soal ekonomi, tetapi juga soal ungkapan seni budaya. Hasil produksi film di Yogyakarta tidak melayani pasar bioskop sebagaimana industri perfilman nasional yang banyak berbasis di Jakarta. Film produksi Yogyakarta lebih banyak melayani berbagai kebutuhan dari rumah produksi luar negeri, perusahaan iklan, instansi pemerintah, festival film, hingga lembaga swadaya masyarakat internasional. Pemda DIY mestinya mengintervensi melalui aspek distribusi dan pameran yang masih jarang mendapat perhatian banyak pihak. Produktivitas kelompok pembuat film di DIY harus dipertemukan dengan pasar sebagai cara mempertemukan film dan penontonnya. Kelompok pembuat film di DIY membutuhkan perluasan pasar dari aspek distribusi maupun pameran yang perlu disediakan bersama oleh para pihak baik swasta maupun Pemda.

**Tabel 2.83 Perkembangan Pelaku Budaya di DIY Tahun 2010-2015**

Jenis Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Organisasi Sinematografi	14	14	14	42	42	42
Organisasi Seni Pertunjukkan	4.219	4.269	4.269	5.226	5.252	5440
Organisasi Seni Rupa	25	25	25	16	17	17
Galeri seni rupa	29	29	29	29	29	29
Perusahaan Film	10	10	10	20	20	20
Kerajinan Property Budaya	178	178	178	246	241	244
Perusahaan Bioskop	4	4	4	2	3	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	37	37	37	38	38	38
Tokoh Seniman Budayawan	369	369	486	486	487	489
Penghargaan seniman Budayawan	258	258	260	275	290	295

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com) (Dinas Kebudayaan)

**Tabel 2.84 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2009-2015**

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	720	720	720	980	1.025	1.200	1.200
Prasarana Budaya	92	92	92	107	107	107	107
Lembaga Budaya	107	107	105	105	82	82	98
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	31	31	31	43	49

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com) (Dinas Kebudayaan)

### 2.3.1.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan / pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Capaian pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga di DIY sebenarnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Untuk dibidang olahraga, terdapat pembagian yang cukup jelas dalam bidang penanganannya. Untuk olahraga prestasi, para atlet langsung berada dalam binaan KONI DIY sedangkan untuk olahraga anak usia sekolah berada dalam binaan Balai Pemuda dan Olahraga yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Terkait prestasi dibidang olahraga, DIY telah membuat suatu langkah besar dengan menjadi peringkat ke 9 di PON Remaja yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2014 dengan perolehan medali 3 emas, 6 perak dan 5 perunggu.

Untuk semakin menujung prestasi para atlet DIY, Pemda DIY mulai meningkatkan sarana dan prasarana yang ada antara lain dengan pembangunan kawasan olahraga yang antara lain penataan kawasan Mandala Krida.

Untuk masalah kepemudaan, BPO bekerjasama dengan oragnaisasi – organisasi pemuda yang ada menggerakkan para pemuda melalui beberapa kegiatan yang bersifat menumbuhkan kewirausahaan dan jiwa kepemimpinan.

Untuk fasilitas kepemudaan yang ada saat ini memang dirasa belum dapat mengakomodir semua kegiatan kepemudaan yang ada. Pada tahun ini, telah dilakukan penataan kawasan Youth Center yang nantinya dapat dipergunakan untuk aktivitas kepemudaan serta penataan kawasan bumi perkemahan babarsari. Hal ini dilakukan agar potensi yang ada di DIY dapat lebih dikembangkan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

**Tabel 2.85    Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di DIY, 2012-2014**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Jumlah klub olahraga	485	244	825
2	Jumlah gedung olahraga	720	1002	1002
3	Jumlah organisasi pemuda	35	35	35
4	Jumlah kegiatan kepemudaan	440	440	440
5	Jumlah kegiatan olahraga	14	14	14
6	Jumlah Gelanggang/balai remaja	5	10	10

### 2.3.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri

DIY selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut DIY perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa.

Selain pembinaan kesatuan bangsa, Pemerintah DIY juga melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik yang ada dalam upaya membentuk masyarakat madani. Suasana kondusif, sejuk, aman, tenteram, diantaranya meningkatnya penanaman modal, kunjungan wisata, pendidikan.

Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis 2015 menunjukkan capaian demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menggembirakan. Indeks demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta melampaui rerata nasional (82,71 dari rerata 73,04). Angka ini naik 10,35 poin dibandingkan dengan IDI DIY yang dirilis tahun 2014 sebesar 72,36 dan mengalami perubahan tingkat demokrasi. Lebih detail, capaian kebebasan sipil (86,25 dari rerata nasional 82,62), capaian hak-hak politik (76,07 dari rerata nasional 63,72) dan lembaga demokratis (88,82 dari rerata nasional 75,81).

Dari hasil Indeks tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke dalam kategori baik dimana skor Indeks yang diperoleh lebih dari 80. Namun demikian tingkat demokrasi di DIY berdasarkan penghitungan indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 masih berada pada kategori “sedang”.

Secara lebih rinci, pada IDI yang dirilis tahun 2014-2015 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat bahwa aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan berturut-turut 25,42 dan 5,13 poin. Sementara nilai indeks kebebasan sipil cenderung mengalami penurunan 4,53 poin. Indeks hak-hak politik yang berubah banyak karena digunakannya informasi hasil Pemilu Legislatif 2014.

Untuk Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkembang dan telah terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mengalami perubahan jumlah yang fluktuatif. Pada Tahun 2009 terdapat 31 organisasi, tahun 2010 terdapat 33 organisasi, tahun 2011 terdapat 29 organisasi, tahun 2012 terdapat 18 organisasi, tahun 2013 34 organisasi, dan hingga pertengahan Juni 2014 terdapat 7 organisasi. Dari data ini bisa diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan yang sudah resmi terdaftar memiliki keragaman sifat baik dalam kekhususan organisasi ataupun kesamaan latar belakang baik dari kesamaan profesi, agama, lingkup budaya, sosial dan kemasyarakatan

lainnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat DIY. Sejak berlakunya Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pendaftaran Ormas dan LSM sudah tidak lagi berada di Kesbanglinmas DIY, namun sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Unjuk rasa yang terjadi di DIY ditangani dengan cara-cara yang persuasif dan sinergis antar petugas yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan cara penanganan yang persuasif dan sinergis, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diminimalisir.

Untuk jumlah pelanggaran Perda pada tahun 2013 sebanyak 305 pelanggaran, sementara di tahun 2014 sebanyak 289 pelanggaran. Untuk Tahun 2015 sebanyak 303 pelanggaran. Jumlah pelanggaran ini juga tetap harus diikuti dengan proses penanganan dan penyelesaian penegakan Perda. Namun kondisi di lapangan, proses tersebut masih berjalan timpang. Di tahun 2013 jumlah penyelesaian penegakan Perda sebanyak 12 kali, sedangkan di tahun 2014 meningkat menjadi 14 kali. Sedangkan di tahun 2015 jumlah penyelesaian penegakan Perda tetap sebanyak 14 kali. Dari perbandingan pelanggaran dan penyelesaian ini menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah agar ke depan semakin sedikit angka pelanggaran yang dilakukan sehingga amanat dalam Perda bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

Proses penegakan Perda ini tentunya juga berkaitan dengan kapasitas sumber daya aparatur dari penegak Perda itu sendiri dimana dalam tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memegang peranan penting. Sementara ini jumlah personil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja masih belum maksimal. Pada tahun 2013 tercatat terdapat 120 orang, sedangkan pada tahun 2014 tercatat terdapat 118 orang. Di tahun 2015 jumlah personil tetap 120 orang. Ke depan perlu dimaksimalkan lagi kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja baik melalui penguatan kapasitas anggota dan bila memungkinkan adanya penambahan personil yang menggantikan personil yang memasuki masa purna tugas

### 2.3.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pemda DIY dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam pasal 411 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 2 Oktober 2014, sehingga tidak ada masa transisi yang menjembatani dalam implementasinya . Dan sampai saat ini Peraturan Pelaksana urusan pemerintahan pun belum dikeluarkan.

Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tidak ada masa transisi, namun dalam pasal 408 disebutkan bahwa “semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

Disamping kejelasan urusan pemerintahan, penyelenggaraan sub urusan otonomi daerah ini juga menysasar penyelesaian permasalahan P3D. Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / Kota dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pemda DIY dalam implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terlambat atau belum keluarnya Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Selain itu



akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi semangat untuk lahirnya beberapa regulasi baru. Salah satu poin penting dari undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berimplikasi pada pengalihan beberapa urusan dari dan atau antar tingkat pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur sipil negara.

Penyelenggaraan urusan tersebut tentunya berdampak pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan sesuai bidangnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur sipil negara yang diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan serta peningkatan skor IKM pada unit pelayanan publik.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, pada tahun 2015 Pemda DIY mendukung gerakan one agency one innovation dengan menerbitkan SE Gubernur DIY Nomor 065/12017 tentang inovasi pelayanan publik. Hal tersebut juga diikuti dengan penyusunan regulasi pedoman teknis penyusunan inovasi pelayanan publik yang diharapkan menjadi panduan bagi unit layanan dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan dan replikatif. Peningkatan pelayanan publik pada tahun 2015 secara nyata dibuktikan dengan nilai IKM yang melebihi target serta keberhasilan Pemda DIY dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai salah satu 25 *Top Inovator* se-Indonesia (*Jogja Plan*).

Dalam hal kelembagaan daerah pada tahun 2015, indikator kinerja persentase kelembagaan yang efektif dan efisien tercapai sebesar 103,16%, dari target sebesar 85% tercapai sebesar 87,69%. Capaian ini terdapat kenaikan sebesar 7,69% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Angka capaian tahun 2015 ini berkontribusi sebesar 97,43% terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Capaian indikator ini diantaranya didukung oleh dukungan anggaran, komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan serta meningkatnya kapasitas SDM aparatur pelaksana.

Untuk indikator persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik, capaian indikator sebesar 102,94%. Target di tahun 2015 sebesar 85% tercapai sebesar 87,50% dan berkontribusi sebesar 97,22% terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Faktor pendukung pencapaian target indikator tersebut di tahun 2015 diantaranya adanya ekspose hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2014 dari 63 unit layanan dan RS Grhasia yang mampu mendorong masing-masing unit layanan untuk berupaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pemda DIY memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan surat maupun naskah-naskah dinas di Pemda DIY. Proses pengurusan surat, mulai dari surat masuk, agenda acara pimpinan, pendistribusian sampai dengan penyimpanan dilakukan dengan komputerisasi yang terhubung dengan server online jaringan kearsipan. Dengan demikian, proses pelacakan dan penemuan kembali surat atau naskah dinas akan lebih mudah dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Melalui cara pengelolaan yang demikian diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah serta instansi-instansi di Pemda DIY.

Dalam reformasi birokrasi, fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam bidang keuangan daerah, kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi tidak bisa dilepaskan dari faktor keuangan daerah karena suatu pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu keuangan dapat menjadi kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara itu untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

Dari uraian diatas, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Daerah mempunyai hak untuk mencari sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut tetapi juga dalam kerangka yang lebih besar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan secara lebih khusus untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah terbaik se Indonesia.

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi dan memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam jenjang karir. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. Reward diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. Penilaian kinerja mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu. Formulasi penilaian kinerja PNS dikembangkan secara proporsional dari tahun ke tahun. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penegakan peraturan perundangan sesuai peraturan yang berlaku.

Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan salah satu hal utama yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri serta pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

Peran pegawai dalam hal ini sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pegawai ASN Berfungsi Sebagai:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam bidang penanggulangan bencana, Pemda DIY mendukung upaya pengurangan risiko bencana. DIY memiliki 12 potensi bencana dengan kerentanan beragam untuk setiap jenis potensi bencana. Kerentanan bencana ditinjau dari komponen sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan. Penghitungan kerentanan suatu kawasan bila terpapar oleh suatu ancaman bencana terdiri dari 3 indeks kerentanan. Indeks tersebut adalah Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian dan Indeks Kerusakan Lingkungan.

Berdasarkan hasil kajian diperoleh data bahwa indeks kerugian fisik dan ekonomi di DIY pada kategori skala tinggi, dan tingkat ancaman multibencana pada kategori skala sedang.

Berdasarkan hasil kajian kapasitas, maka diperoleh perlu upaya Prioritas Penanggulangan Bencana DIY sebagai berikut:

1. Memberdayakan forum/jaringan untuk pengurangan risiko bencana,
2. Membangun sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama,
3. Menyusun dan mereview dokumen kajian resiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko,
4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi),
5. Menyusun instrumen untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur,
6. Menyusun dan mereview rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana.

Pelaksanaan urusan penanggulangan bencana di DIY ditujukan untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. Penyelenggaraan pengarus-utamaan penanggulangan bencana (PU-PRB) adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat meminimalisasi jatuhnya korban jiwa dan hilang atau rusaknya aset serta harta benda akibat bencana baik melalui upaya mitigasi bencana (pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan) ataupun upaya mengurangi kerentanan (fisik, materi, sosial, kelembagaan dan perilaku/sikap).

Pada tahap sebelum bencana, PRB ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan daya tahan masyarakat untuk melindungi hidupnya melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif. Pada tahap tanggap darurat, PRB dilakukan untuk upaya penyelamatan korban dan harta benda guna mengurangi terjadinya korban lebih banyak. Pada tahap pasca bencana, PRB diintegrasikan pada pemulihan dan rehabilitasi.

Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana di DIY diukur dengan Indeks Ketahanan Daerah. Pada tahun 2015 dari target Indeks Ketahanan Daerah sebesar 50,00 dalam realisasinya tercapai sebesar 53,36 atau sebesar 106,72% dari target. Isu strategis dalam bidang penanggulangan bencana untuk tahun 2017 adalah memperkuat dan meningkatkan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.

Pelaksanaan Urusan Persandian di Pemda DIY untuk mengelola berita yang masuk maupun keluar yang bersifat rahasia atau terbatas serta untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi peralatan sandi di masing-masing SKPD di lingkungan Pemda DIY sebagai bagian dari Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (SISDINA).

### **2.3.1.21 Urusan Ketahanan Pangan**

Kedaulatan Pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pembangunan ketahanan pangan adalah mewujudkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.



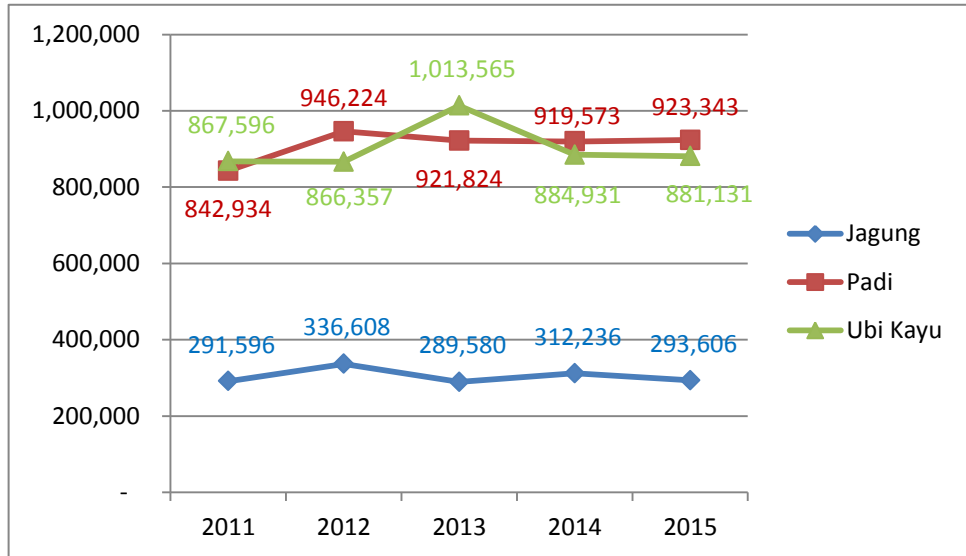
Gambar 2.56 Pangan Lokal di DIY

Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

### 1) Ketersediaan Pangan

Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, DIY mengalami trend peningkatan produksi pangan nabati pada komoditas utama yaitu padi dan ubi kayu. Peningkatan produksi padi pada kurun waktu 2011-2015 mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan produksi, hal ini disebabkan oleh adanya fenomena perubahan iklim secara global, sehingga mempengaruhi pola penanaman padi. Pada tahun 2015 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 923.343 ton, namun bila dilihat dari produksi pertanian sawah dan ladang, pertanian ladang mengalami penurunan sebesar 2.052 ton bila dibandingkan dengan tahun 2014, hal ini disebabkan karena adanya musim kemarau panjang pada tahun 2015 sehingga terjadi gagal panen pada pertanian ladang. Sementara produksi ubi kayu mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 dikarenakan peningkatan produktivitasnya. Di sisi lain, produksi jagung selama

lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Bahkan produksi pada tahun 2013 dan 2014 menurun dibandingkan tahun 2012. Hal ini juga diakibatkan oleh musim kemarau basah yang mengganggu produksi dan penyusutan lahan pertanian.



Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2015

Gambar 2.57 Grafik Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (Dalam Ton) Tahun 2011-2015

Produksi tanaman pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86 Produksi Tanaman Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015 (Dalam Ton)

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (TON)					RATA2 PER-TUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	<i>Padi Sawah</i>	653,434	737,446	721,674	719,194	725,016	2.80
	<i>Padi Ladang</i>	189,500	208,778	200,150	200,379	198,327	1.28
	Total Padi	842,934	946,224	921,824	919,573	923,343	2.46
2	Jagung	291,596	336,608	289,580	312,236	293,606	0.83

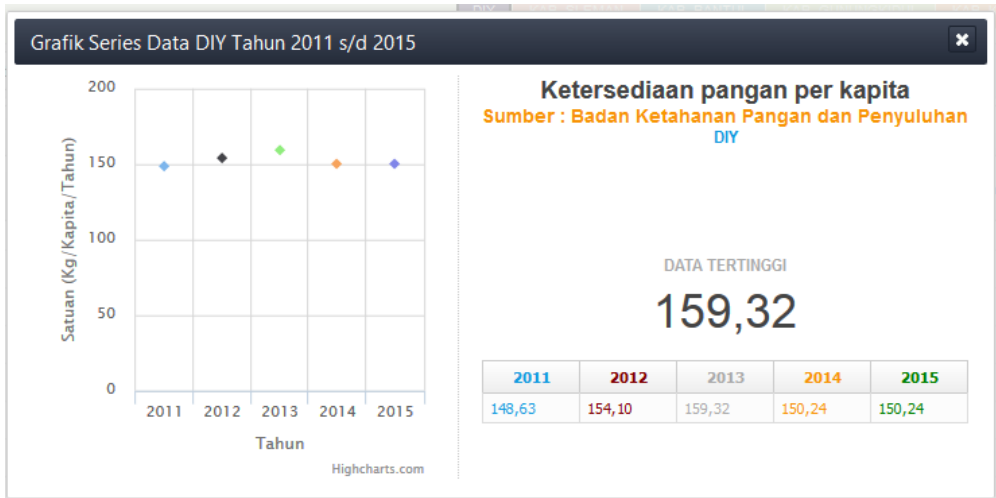
NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (TON)					RATA2 PER-TUMBUHAN (%)
		2011	2012	2013	2014	2015*	
3	Kedelai	32,795	36,033	31,677	19,579	17,892	-12.26
4	Kacang Tanah	64,046	62,901	70,834	71,582	81,227	6.34
5	Kacang Hijau	371	300	318	261	238	-9.97
6	Ubi Kayu	867,596	866,357	1,013,565	884,931	881,131	0.93
7	Ubi Jalar	4,584	5,047	4,951	5,237	5,754	5.96
8	Cantel/Sorghum	96	211	135	145	44	5.38

Sumber: BPS DIY, 2015

Berdasarkan pada Neraca Bahan Makanan yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Ketersediaan kelompok padi – padian tahun 2014 sebesar 1.944 kal/kap/hari lebih rendah dibanding tahun 2013 (2.108 kal/kap/hari), hal ini dikarenakan penurunan produksi GKG dari tahun 2013 (921.824 ton) menjadi 919.573 ton (tahun 2014). Penurunan produksi padi ini disebabkan turunnya produktivitas akibat tingginya curah hujan utamanya di SR3 yang berakibat pada gangguan penyerbukan padi, gangguan OPT dan keterlambatan pemupukan khususnya di Kabupaten Sleman yang terjadi pada padi sawah.

Dari ketersediaan energi kelompok daging tahun 2014 sebesar 326 kkal/kap/hari lebih tinggi dibanding tahun 2013 (151 kkal/kap/hari), hal ini dikarenakan peningkatan produksi daging unggas yaitu daging ayam ras, buras, serta itik. Produksi daging ayam buras tahun 2013 (2.238 ton) meningkat pada tahun 2014 (6.160 ton); ayam ras tahun 2013 (16.563 ton) meningkat pada tahun 2014 (40.395 ton); itik tahun 2013 (194 ton) meningkat pada tahun 2014 (492 ton). Peningkatan produksi dikarenakan adanya peningkatan dalam hal sanitasi kandang serta kesehatan dari ternak itu sendiri. Sedangkan untuk komoditi daging sapi pada tahun 2014 (8.612 ton) lebih rendah dibanding tahun 2013 (9.020 ton), hal ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah pemotongan yang dilaksanakan dan dipasarkan di DIY.

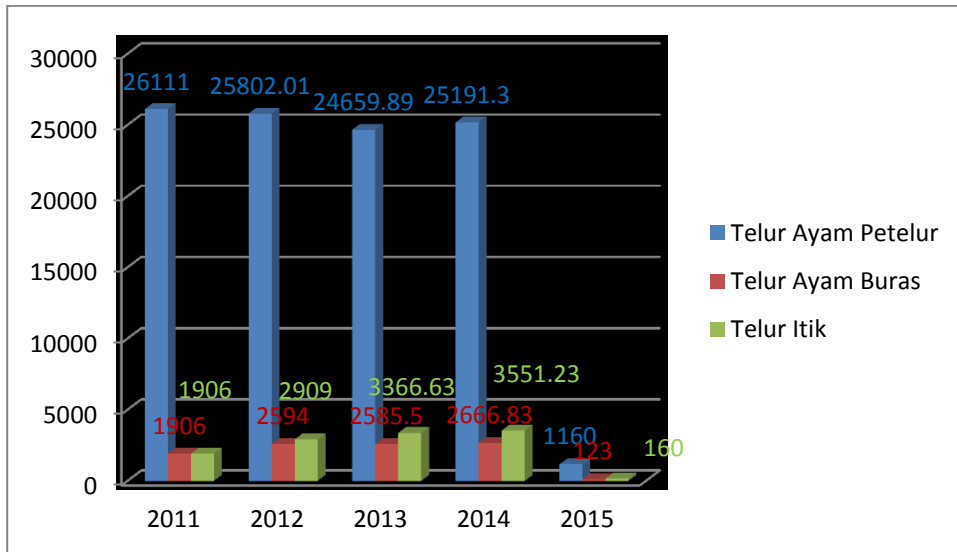




Gambar 2.58 Ketersediaan Pangan per Kapita

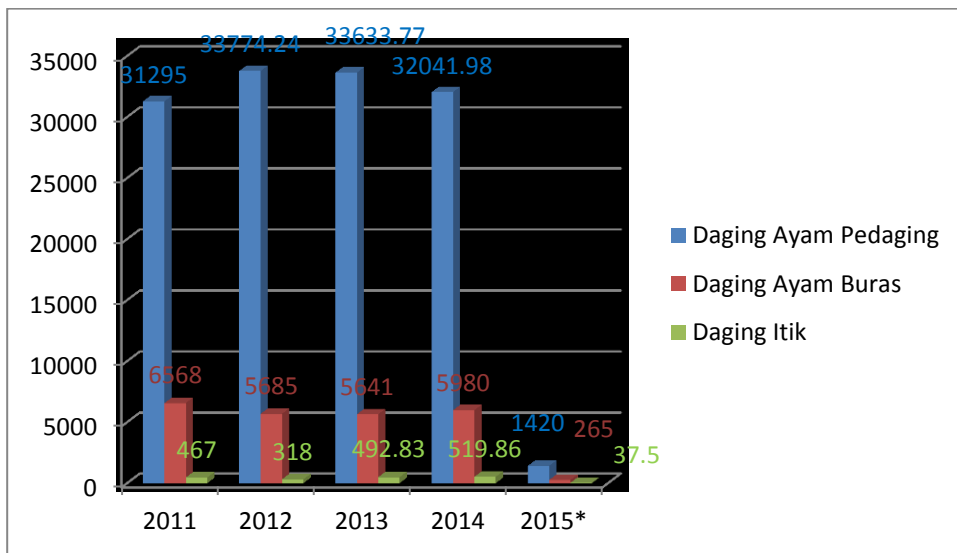
Ketersediaan energi kelompok telur pada tahun 2014 sebesar 33 kkal/kap/hari sedikit lebih rendah dibanding tahun 2013, hal ini dikarenakan adanya penurunan penyediaan dalam negeri pada komoditi ayam ras petelur pada tahun 2014 (28.043 ton) sedangkan tahun 2013 (32.889 ton). Pada tahun 2013 terdapat angka impor telur sebesar 20.405 ton dan ekspor sebesar 107 sedangkan pada tahun 2014 impor sebesar 1.656 ton dan ekspor (107 ton).

Seiring dengan peningkatan populasi unggas, produksi dari unggas, baik berupa daging maupun telur juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Sumber : Dataku Bappeda DIY 2015

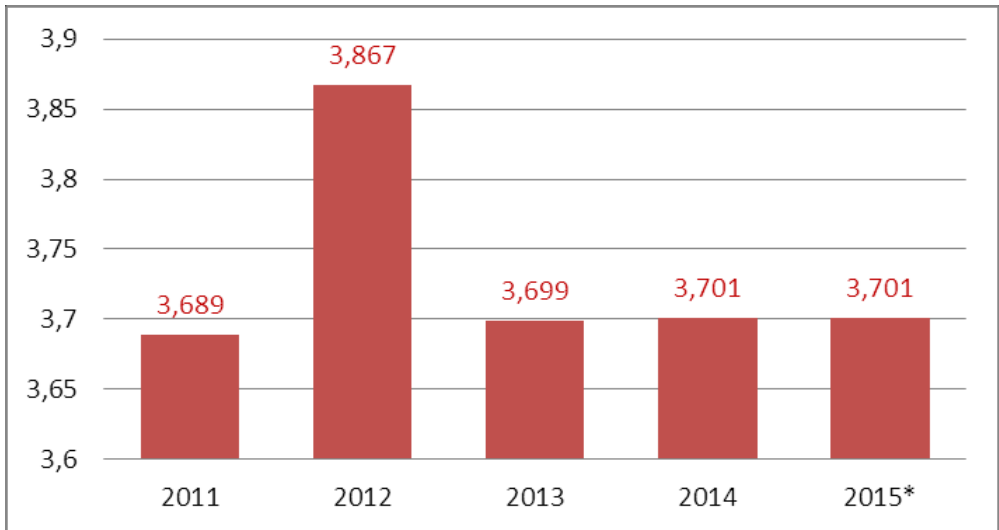
Gambar 2.59 Grafik Produksi Telur Unggas Tahun 2011-2015\* (angka sementara)



Sumber : Dataku Bappeda DIY 2015

Gambar 2.60 Grafik Produksi Daging Ayam Tahun 2011-2015\* (angka sementara)

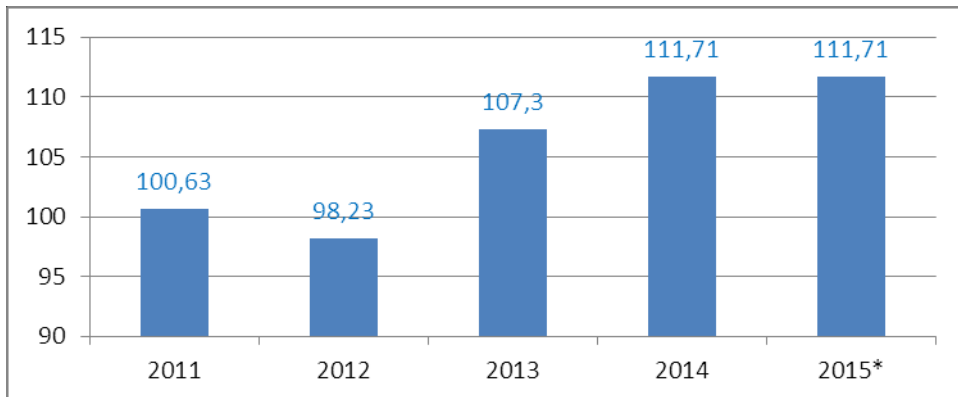
Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2200 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 55 gram/kapita/hari, maka posisi DIY jauh melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2015 sebesar 3.701 Kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein ketersediannya sebesar 111.71 gram/kapita/hari.



Sumber : Dataku Bappeda DIY 2015

\*) data sementara

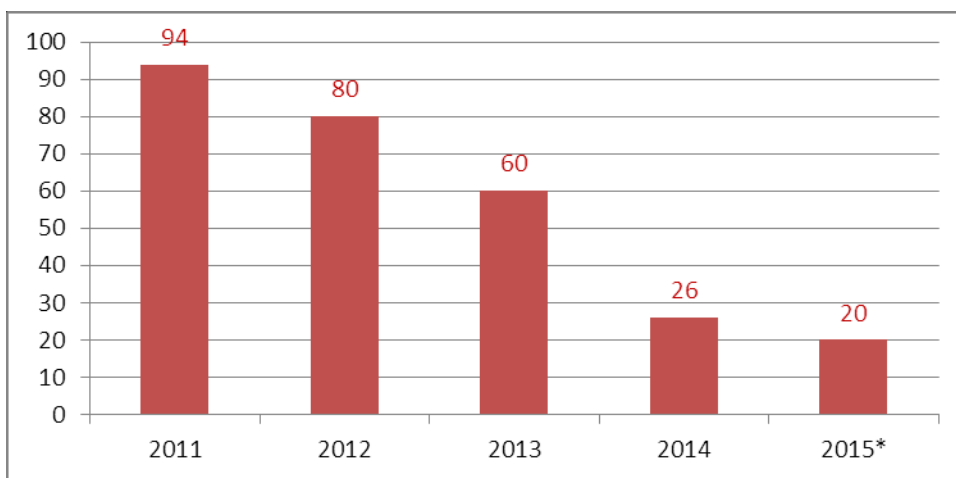
**Gambar 2.61** Grafik Jumlah Ketersediaan Pangan dalam Ukuran Energi di DIY Tahun 2011-2015



Sumber : BPS DIY 2014 \*) data sementara

**Gambar 2.62** Grafik Ketersediaan Protein di DIY Tahun 2011-2015

Jumlah desa rawan pangan di DIY terus menurun dari 103 desa pada tahun 2010 menjadi 60 desa pada tahun 2013 dan menurun menjadi 26 desa pada tahun 2014, pada tahun 2015 DIY masih memiliki 20 desa rawan pangan. Jumlah desa rawan pangan terbanyak berada di Kulon Progo sejumlah 27 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Hal tersebut dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa rawan pangan diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut.



Sumber : Dataku Bappeda DIY

**Gambar 2.63** Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2011-2015

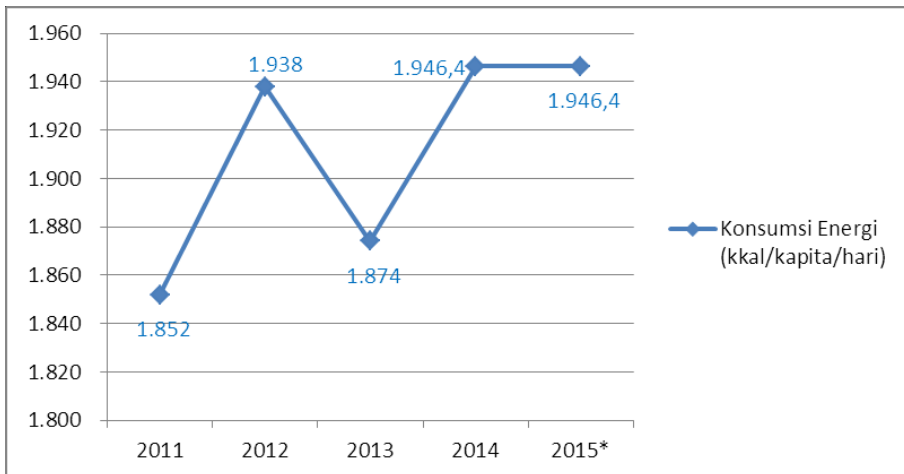
### 2) Distribusi Pangan

Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum penyelenggaraan distribusi pangan di DIY telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sekaligus pemberian/hibah kepada keluarga pra sejahtera yang dapat disalurkan memadai sesuai sasaran yang ditetapkan. Dalam upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, telah dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Sampai dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga

komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mengendalikan stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

3) **Konsumsi dan Pengawasan Pangan**

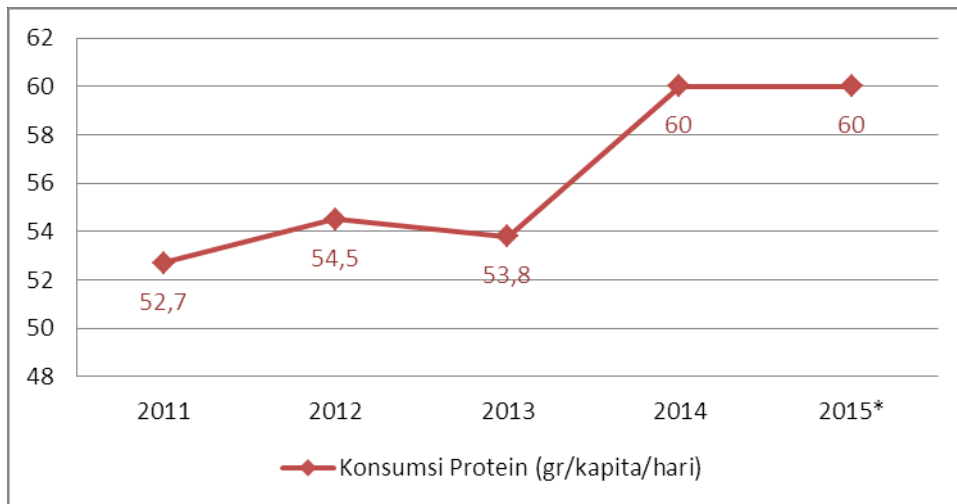
Jumlah konsumsi energi penduduk DIY mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 1.946,40 Kkal/kapita/hari, namun masih berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2015 (diolah)  
\*) data sementara

**Gambar 2.64** Grafik Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2011-2015

Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2015 mencapai sebesar 60 gram/kapita/hari. Konsumsi protein tersebut masih berada di bawah angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari.

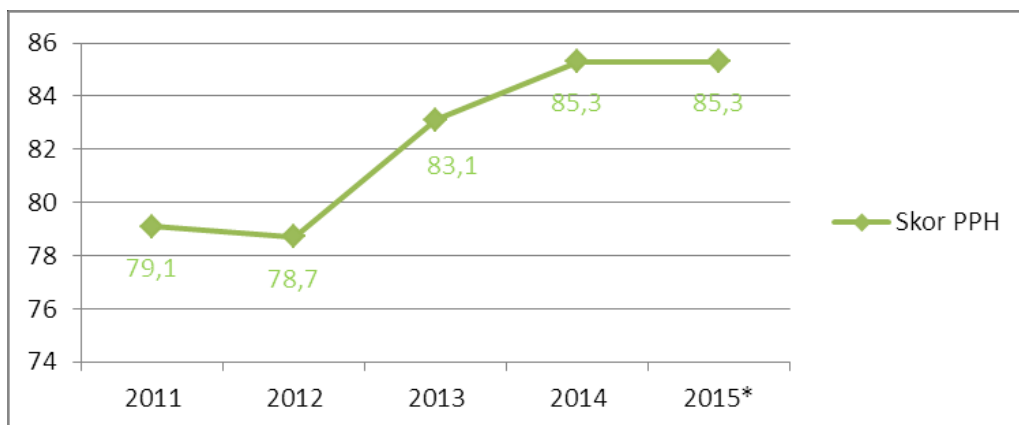


Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2015 (diolah)

\*) data sementara

**Gambar 2.65 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk DIY (Gram/Kapita/Hari) Tahun 2011-2015**

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2015 adalah 85,3. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2015 (diolah)

\*) data sementara

**Gambar 2.66 Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2011-2015**

Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya kurang dari yang dianjurkan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganeekaragaman pangan di DIY.

### 2.3.1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga.

#### a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)

LPMD/K adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tugas dari lembaga ini adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Saat ini telah terbentuk LPMD/K di seluruh desa dan kelurahan di DIY. Di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/K. Tabel berikut menunjukkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah DIY menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2011:

**Tabel 2.87 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) di Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014**

No	Kab/Kota	Jumlah LPMD/LPMK		Asosiasi LPMD/LPMK	Jumlah
		LPMD	LPMK		
1	Kota Yogyakarta	-	45	1	46
2	Kab. Bantul	75	-	1	76
3	Kab. Kulon Progo	88	-	1	89
4	Kab. Gunungkidul	144	-	1	145
5	Kab. Sleman	86	-	1	87
6	DIY	-	-	1	1
	Total	393	45	6	444

Sumber : BPPM DIY, 2014

Agar mampu berpartisipasi secara optimal sebagai mitra pemerintah di tingkat desa/kelurahan, perlu adanya perhatian pemerintah terkait peningkatan kapasitas anggota.

**b. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Desa**

Selain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat desa, dibentuk pula lembaga pemberdayaan ekonomi desa seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Lumbung Pangan, Pasar Desa, dan Badan Kredit Desa.

Fungsi dari lembaga ekonomi desa selain untuk mengatasi permasalahan permodalan, juga sebagai wadah pengembangan potensi dan sumberdaya pedesaan dalam meningkatkan ekonomi produktif desa. Kondisi jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi desa di DIY tahun 2014 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.88 Jumlah LSM Pemberdayaan Ekonomi Desa Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014**

Kab/Kota	Jumlah LSM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif				Jumlah
	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	Lumbung Pangan	Pasar Desa	Badan Kredit Desa	
Kota Yogyakarta	45	44	31	0	120
Kab.Bantul	75	48	55	10	160
Kab. Kulon Progo	88	72	41	20	232
Kab. Gunungkidul	144	77	138	15	304
Kab. Sleman	86	69	43	35	238
Jumlah DIY	438	310	308	80	1.136

Sumber : BPPM DIY, 2014

Catatan :

- Badan Kredit Desa merupakan binaan dari Bank Rakyat Indonesia
- Pasar Desa merupakan binaan dinas pasar



- c. *Lumbung pangan merupakan binaan bppm akan tetapi terkait dengan cadangan pangan pemerintah daerah (isi dari Lumbung pangan) menjadi kewenangan BKPP*

Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

- c. **Posyandu Aktif**

Posyandu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya kesehatan bayi dan balita. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan persentase posyandu aktif di DIY.

**Tabel 2.89 Persentase Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/kota di DIY Tahun 2013-2015**

Kabupaten /Kota	2013			2014			2015		
	Jumlah Posyandu								
	Total	Aktif	Proporsi %	Total	Aktif	Proporsi %	Total	Aktif	Proporsi %
Kota Yogyakarta	625	625	100	624	624	100	625	625	100
Kab. Bantul	1.128	744	65,96	1.123	786	68,39	1.137	856	75,28
Kab. Kulonprogo	961	862	89,7	961	868	90,32	961	891	92,71
Kab. Gunungkidul	1.465	1.303	88,94	1.463	1.313	89,75	1.465	1.335	91,12
Kab. Sleman	1.519	1.232	81,11	1.519	1.248	82,16	1.519	1.282	84,40
DIY	5.698	4.766	85,14	5690	4839	85,04	5707	4989	87,42

Sumber : *Profil Kesehatan DIY 2011 – 2015*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah posyandu yang aktif semakin meningkat dari 4.642 posyandu pada tahun 2012 menjadi 4.766 posyandu pada tahun 2013 dengan jumlah persentase lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah posyandu di masing-masing kabupaten/kota. Cukup tingginya persentase Posyandu aktif di DIY ini cukup berarti signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan balita.

d. PKK Aktif

PKK merupakan sebuah lembaga yang memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Cakupan PKK aktif di DIY pada tahun 2014 menunjukkan angka yang menggembirakan dimana dari 522 kelompok PKK seluruhnya tergolong aktif (100%) seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.90 Persentase PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015**

Kabupaten/Kota	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%
Kota Yogyakarta	60	60	100
Kab.Bantul	93	93	100
Kab. KulonProgo	101	101	100
Kab. Gunungkidul	163	163	100
Kab. Sleman	104	104	100
DIY	1	1	100
Jumlah DIY	522	522	100

Sumber : BPPM DIY, 2015

### 2.3.1.23 Urusan Statistik

Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data dan informasi statistik yang berkualitas tidak hanya menjadi rujukan bagi pemerintah saja, namun juga bagi kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha, penelitian, evaluasi pembangunan, dan beragam kebutuhan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008, Bappeda DIY merupakan instansi Pemerintah Daerah DIY yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD

provinsi/kabupaten/kota di DIY. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini dituangkan dalam program pengembangan statistik daerah.

Salah satu isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah adalah belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel. Untuk itu diperlukan program yang mendukung optimalnya ketersediaan data. Program tersebut adalah

Program pengembangan statistik daerah yang dijabarkan dalam 2 kegiatan, yaitu kegiatan Pengolahan, Analisis, Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah dan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. Dalam 2 kegiatan tersebut, diantaranya dihasilkan produk DIY Dalam Angka (DDA), Analisis PDRB DIY, dan Data Perencanaan Pembangunan DIY.

Upaya peningkatan kualitas data DIY menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan eksternal yang cukup menonjol adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi/lembaga dalam memberikan data maupun informasi secara jujur. Hal ini menyebabkan kualitas data yang dihasilkan belum optimal. Permasalahan yang lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro.

Secara spesifik, dalam proses perencanaan pembangunan daerah juga menghadapi permasalahan terkait urusan statistik, yaitu :

1. Ketersediaan data statistik yang tidak tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam perencanaan adalah data  $n-5$  hingga  $n+2$  sementara itu data yang tersedia baru sampai  $n-1$ .
2. Beberapa data capaian indikator yang menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah ketersediaannya bergantung pada pihak di luar kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga ketersediaannya tidak bisa tepat pada waktu yang dibutuhkan.
3. Urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sehingga dalam rangka pertanggungjawaban produk data, sering terjadi perbedaan angka atau data. Hal tersebut disamping karena perbedaan definisi data yang berbeda.

Sebagai solusi atas permasalahan di atas, ada beberapa hal yang telah dilakukan sebagai berikut, :

1. Untuk memenuhi data perencanaan dilaksanakan penyusunan analisis untuk menyediakan data proyeksi.
2. Perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, agar terjadi komunikasi yang jelas dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik.
3. Telah dibentuk UPT yang secara khusus menangani supporting terkait statistik daerah di SKPD Bappeda DIY, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah.

Sangat disadari pula bahwa Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh para stakeholder. Koordinasi antar instansi yang masih belum optimal, menyebabkan terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien. Permasalahan penting lainnya adalah belum optimalnya implementasi 4 prinsip dasar dari 10 prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain:

1. National Statistics Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.
2. Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.
3. Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.
4. Kerja sama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.

### 2.3.1.24 Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola kearsipan dan pelestarian warisan budaya akan menghasilkan banyak manfaat bagi pemerintah, organisasi dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya, pada setiap kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk

kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lain.

Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah, lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Selain itu melakukan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota.

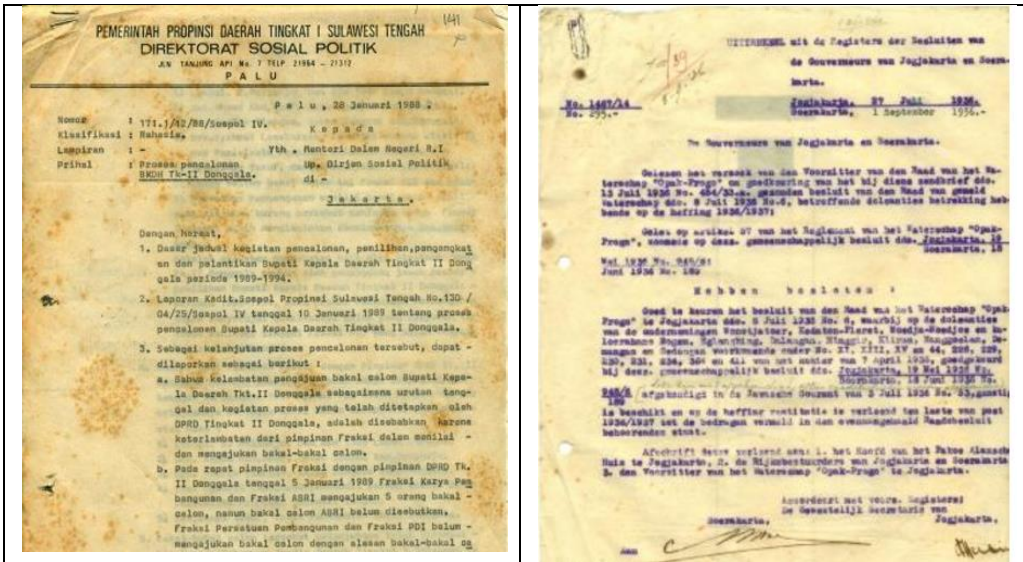
Arsip merupakan bukti dari dinamika perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke, dari zaman kerajaan klasik hingga pasca kemerdekaan. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya, dan harkat serta terwujudnya wawasan kebangsaan yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Sumber : BPAD

**Gambar 2.67 Gambar Arsip Foto**

Potensi kearsipan di DIY dipengaruhi oleh sejarah panjang DIY baik sebagai provinsi maupun sebagai kerajaan. Penguatan keistimewaan DIY perlu dikuatkan melalui strategi pengelolaan arsip yang optimal. Bukti-bukti otentik perjalanan peradaban DIY terkandung di dalam arsip-arsip. Banyak pihak bertanggung jawab atas penyelamatan arsip. Keberadaan arsip-arsip di DIY tersebar di seluruh kabupaten / kota, di kota lain, bahkan di negara lain. Pengadaan arsip-arsip yang hilang menjadi tantangan semua pemangku kepentingan di daerah.



Sumber : BPAD

Gambar 2.68 Gambar Arsip Tekstual

Seringkali masih terdapat persepsi yang salah dan kurang proporsional terhadap masalah kearsipan. Sebagian orang memposisikan arsip sebagai residu kegiatan setelah kegiatan dianggap selesai dan tidak menempatkan pada indikator akuntabilitas kinerja. Pemanfaatan arsip masih cenderung dilihat secara pragmatis dalam arti arsip hanya diposisikan sementara sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ketika tujuan telah tercapai, maka dianggap pekerjaan sudah selesai, dengan demikian arsip-arsip yang menyertai kegiatan tidak perlu diurus sebagai materi yang juga harus dipertanggungjawabkan. Ketidaktahuan atau sikap meremehkan terhadap pengelolaan arsip menyebabkan tidak efektifnya manajemen kearsipan di sebagian besar lembaga pemerintahan maupun swasta. Bagi aparat pemerintah, sikap meremehkan arsip berakibat fatal yaitu hilangnya dokumen Negara, karena arsip yang tercipta di lingkungan pemerintahan merupakan dokumen pemerintah atau dokumen Negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Arsip yang diciptakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan harus mengikuti tata kelola yang telah ditentukan sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan. Sedangkan ketidaktaatan terhadap ketentuan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Tabel 2.91 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2015

No	Pengolahan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengelolaan arsip secara baku	-	-	-	19	20	21
2	Jumlah arsiparis	-	15	15	15	15	15

Sumber : BPAD DIY

Sesuai dengan misi Pemda DIY yaitu “Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya”, maka diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna melestarikan nilai-nilai tradisional tersebut, salah satunya adalah melalui perpustakaan dan kearsipan dokumen. Hal ini dikarenakan perpustakaan dan kearsipan merupakan wujud nyata dalam upaya pentransformasian nilai-nilai tradisional tersebut melalui bahan pustaka kepada generasi berikutnya. Dengan peningkatan peranan/fungsi perpustakaan dan kearsipan, diharapkan nilai-nilai budaya lokal yang sudah berbentuk secara tertulis menjadi bahan pustaka dapat ditanamkan sedini mungkin pada diri seseorang. Keberadaan arsip tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari pelestarian kearsipan yang dimilikinya.



Sumber : BPAD DIY, 2015

**Gambar 2.69** Gambar Preservasi Arsip

Dewasa ini perkembangan kearsipan tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam manajemen terutama dalam bidang pengelolaan informasi. Kearsipan merupakan organisasi publik yang memiliki peran strategis dalam upaya menguatkan jati diri daerah. Eksistensi dari lembaga kearsipan ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat yang beragam. Sementara itu kegiatan pengolahan arsip dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, akusisi, preservasi, akses dan layanan perlu juga dikemas dengan suatu sistem tertentu agar dapat dipergunakan secara cepat dan tepat. Kebutuhan masyarakat akan pengelolaan informasi pada perpustakaan dan kearsipan makin lama akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu kearsipan harus mampu membangun layanan yang bermutu, yaitu layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang meliputi materi, format, waktu, aturan dan pelayanan. Kearsipan harus mampu menjadi media transformasi informasi dari zaman ke zaman kepada publik

secara prima dalam rangka menjalankan fungsinya. Salah satunya informasi tentang pelestarian budaya.

**Tabel 2.92 Data Pengolahan Arsip Statis Hingga Tahun 2015**

No	Pengolahan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Arsip Tekstual	2842	2641	2540	2800	7.000	27.000
2	Arsip Foto	326	264	474	674	1.000	1500
3	Arsip Rekaman	0	0	0	0	0	2
4	Arsip Audiovisual	12	0	0	0	0	0

Sumber : BPAD DIY

Hingga akhir tahun 2015, jumlah khasanah arsip yang berhasil di akuisisi adalah sebanyak 276 meter/lari. Jumlah akuisisi arsip tersebut berasal dari arsip-arsip gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, arsip sejarah keistimewaan DIY, Arsip pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles, arsip seniman, arsip pemilu legislatif, arsip pengairan di masa Hindia Belanda, arsip pelantikan gubernur, arsip museum di DIY. Penelusuran dan Akuisisi Arsip Seniman pada tahun 2015 antara lain terhadap 1) Kusbini, berupa 12 lembar softcopy piagam, dan arsip - arsip yang berada di Bapak Sapta Kuswara; 2) Soetopo: 4 album softcopy foto, 2 buah softcopy piagam, dan 1 buah katalog pameran; 3) Yuningsih (Yu Beruk); 4) Untung Moeljono : kaset asli (tari - tarian kreasi Bapak Untung Moeljono) dan softcopy arsip tekstual, dan softcopy foto; 5) Hasmi : buku berjudul "Bundala", softcopy sertifikat; 6) Bakdi Sumanto : buku, softcopy arsip foto dan arsip tekstual.

**Tabel 2.93 Data Alih Media Hingga Tahun 2015**

No	Pengolahan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Alih Media	7.193	7.193	9.619	11.619	33.939	76.085
2	AlihTulisan	4.295	5.048	5.799	6.549	7.299	7.826
3	Alih Bahasa	2.680	3.183	4.208	5.131	6.260	8.260
4	Arsip Inaktif Tekstual	35.106	40.219	45.739	50.800	57.800	77.800
5	Arsip Inaktif Kartografi	1.568	1.568	2.153	2.691	4.691	4.691
6	Arsip Inaktif Foto	11.658	11.758	15.587	39.308	40.308	40.808

Sumber : BPAD DIY, Hasil Monev Pembangunan 2015



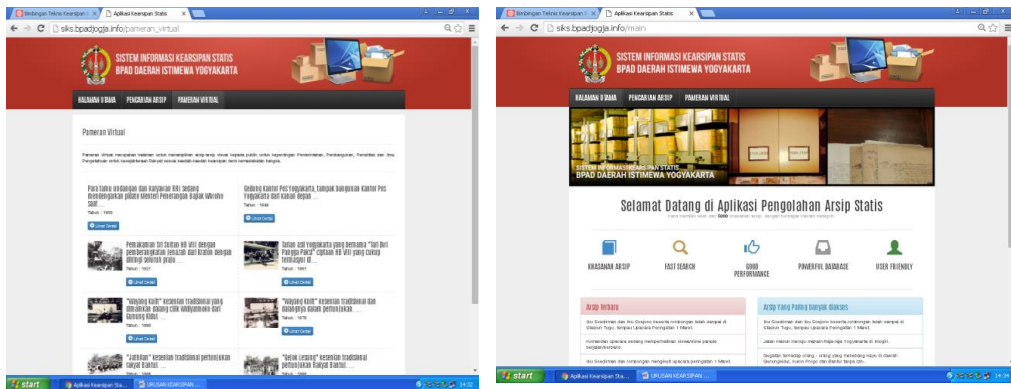


Sumber : BPAD DIY

**Gambar 2.70 Naskah Sumber Arsip**

Sosialisasi juga dilakukan dengan pembangunan sistem aplikasi informasi kearsipan statis melalui portal <http://siks.bpadjogja.info>. Sistem ini dapat diibaratkan Pameran Virtual Kearsipan DIY yang merupakan mozaik peradaban DIY dari masa ke masa untuk kepentingan Pemerintahan, Pembangunan, Penelitian dan Ilmu Pengetahuan untuk

kesejahteraan Rakyat sesuai kaedah-kaedah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.



Sumber : BPAD DIY

### Gambar 2.71 Sistem Informasi Kearsipan Statis

Depo arsip yang menjadi impian Pemda DIY yang akan menjadi pusat pengelolaan dan pelayanan arsip daerah secara terpadu dengan sistem yang lebih optimal belum dapat diwujudkan tahun ini. Depo arsip ini nantinya akan dilengkapi diorama-diorama yang menunjukkan sejarah terbentuknya DIY. Diharapkan semua ragam arsip dari zaman ke zaman dapat terlestarikan baik secara informasi maupun fisik arsipnya.

Ada beberapa faktor penyebab mengapa penyelenggaraan kearsipan tidak berjalan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu masyarakat masih memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang arti pentingnya arsip. Faktor lainnya adalah para pemimpin organisasi dan penyelenggara pemerintahan belum menempatkan bidang kearsipan seimbang dengan nilai pentingnya arsip yang sebenarnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berakibat pada alokasi sumber daya pendukung untuk penyelenggaraan kearsipan dirasakan masih sangat kurang memadai di setiap satuan organisasi pemerintah.

Belum jelasnya pembagian tugas antara ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Propinsi, LKD Kabupaten/Kota menyebabkan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar Lembaga Kearsipan yang belum memiliki pola yang menunjukkan harmonisasi dan produktifitas kerja yang memadai.

### 2.3.1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) tersebut, telah dijabarkan tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan. Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Daerah DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 telah menetapkan *Blueprint Jogja Cyber Province* yang dititikberatkan pada program *Digital Government Services* (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka pengembangan DGS, pada tahun 2011 telah dilakukan *Updating Blueprint Digital Government Services* (DGS). Penerapan konsep *e-government* ini akan meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraksi melalui jaringan elektronik sehingga akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Konsep inilah yang dinamakan layanan teknologi berbasis *Citizen Centris*.

Terkait dengan infrastruktur fisik, pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/*global area network*) di Pemerintah DIY telah dimulai sejak tahun 2002 dan hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksi tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Untuk mendukung pembangunan tersebut, kebijakan pembangunan di sektor komunikasi dan informatika adalah pembangunan jaringan *fiber optic* pada kawasan Perkotaan Yogyakarta yang menghubungkan antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan jaringan fiber optik (FO) ini, nantinya akan bersifat multi fungsi dan dapat digunakan untuk mendukung system informatika di jajaran Pemerintah DIY. Pembangunan jaringan FO ini akan dapat menutupi kelemahan yang ada, jika Pemerintah

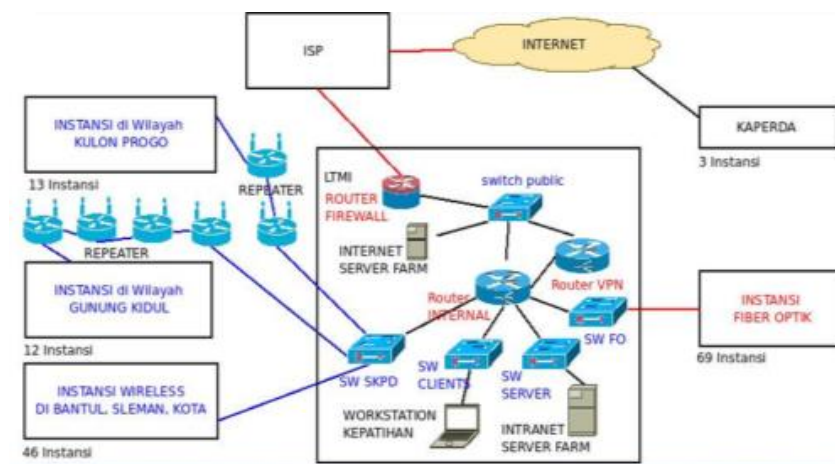
DIY menyewa jasa layanan ISP (*internet service provider*) terutama pada control manajemen jaringan dan ketergantungan yang sangat besar pada pihak ketiga/penyediajasa ISP.

Manfaat yang diperoleh dari adanya jaringan fiber optik yang dikelola sendiri oleh Pemerintah DIY, antara lain :

- ~ Menambah bandwidth Internet dan Intranet SKPD.
- ~ Memberikan kontrol yang lebih besar pada penggunaan bandwidth baik internet dan Intranet pada pengelolaan jaringan PEMPROV DIY
- ~ Memberikan Opsi yang lebih banyak pada penyediaan Bandwidth Provinsi DIY baik VPN maupun Internet
- ~ Penambahan Firewall Router untuk menambah lapisan keamanan pada Server PEMPROV DIY.
- ~ Mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga (*vendor*).

Penguatan jaringan IT di Pemda DIY; Untuk Penguatan jaringan IT di Pemda DIY telah dilaksanakan penambahan jaringan *fiber optik* sebanyak 55 titik lokasi dari 61 titik lokasi, serta jaringan *wireless* sejumlah 46 titik, serta HFC 1 titik pada 2014 melalui Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi.

Tingkat capaian indikator pada tahun 2014 sebesar 85,80% dari target 60%. Terjadi peningkatan indikator sebesar 43,80% dibanding tahun 2013. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2017, capaian pada tahun 2014 adalah sebesar 85,80% dan dengan persentase capaian ini, diharapkan target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat terpenuhi.



Gambar 2.72 Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY

### 2.3.1.26 Urusan Perpustakaan



Sumber : BPAD DIY, 2015

**Gambar 2.73** Suasana Nyaman Ruang Koleksi Ghuratama Pustaka, Gedung Perpustakaan Baru DIY.

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia belum merupakan budaya di masyarakat karena baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan IEA-*International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca.

Padahal Alvin dan Heidi Toffler dalam “*Future Shock*” (1970) dan “*The Third Wave*” (1980), mengungkapkan bahwa perubahan peradaban masyarakat di dunia berlangsung dengan cepatnya pada masa gelombang peradaban ke tiga yang mana mobilitas informasi berlangsung sangat cepat daripada mobilitas barang dan manusia dengan didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradabannya melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan asset negara).

Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa bibliofil adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang

baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dapat menjadi icon peradaban baru dan Rennaisans Yogyakarta . Pembangunan perpustakaan juga dijiwai oleh amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat DIY didukung oleh perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lainnya. Pemerintah DIY memiliki sejumlah perpustakaan yang keberadaannya menyebar, seperti unit perkantoran Jalan Tentara Rakyat Mataram 29, Perpustakaan Wilayah Unit Badran berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram 4 yang diutamakan koleksi ilmiah, perpustakaan unit Malioboro yang mengutamakan koleksi humaniora, Rumah Belajar Modern Sewon, Banguharjo, Bantul.

Perpustakaan utama memberikan layanan sirkulasi, ruang baca, referensi, koleksi UT, koleksi langka, bimbingan pembaca, ekstensi (keliling), warintek dan internet, deposit, paket buku. Jogja Learning Park menjadi salah satu layanan di sana yang mengandalkan ruang-ruang belajar di luar ruang, berupa gazebo-gazebo dengan layanan internet.

Perkembangan perpustakaan di DIY tergolong baik selain jumlahnya cenderung meningkat juga beragam jenisnya. Hingga tahun 2013 DIY telah memiliki 3.322 perpustakaan dari 3.240 buah pada tahun 2012. Penghitungan tersebut belum memperhitungkan perpustakaan perguruan tinggi baik di tingkat pusat, fakultas maupun jurusan atau program studi.

**Tabel 2.94 Jumlah Perpustakaan Menurut Jenisnya**

Jenis Perpustakaan	2012	DIY							Jumlah Total
		KP	Btl	GK	Slmn	Kota Yk	DIY		
1 Desa	322	71	60	110	66	45	N/A	352	
2 Umum	6	1	1	1	1	1	1	6	
3 Departemen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4 Sekolah									
SD	2009	376	372	562	515	184	N/A	2 009	
SLTP	505	78	107	135	121	64	N/A	505	
SLTA	398	55	79	74	109	81	N/A	398	
PT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5 Keliling	N/A	3	5	3	2	1	5	19	
6 Internet	N/A	3	5	10	8	4	3	33	
Jumlah	3.240	587	629	895	822	380	9	3 322	

Sumber : BPS DIY, 2014, p.236, disesuaikan dengan data BPAD DIY

Perkembangan minat baca masyarakat terutama yang menjangkau hingga pedesaan DIY didukung oleh peningkatan perpustakaan desa. Perpustakaan desa menjadi wahana belajar masyarakat. Daerah Istimewa

Yogyakarta telah memiliki 380 perpustakaan desa atau 86,76 % dari 438 desa/kelurahan.

**Tabel 2.95 Persentase Perpustakaan Desa Tiap-tiap Kabupaten/Kota Hingga Tahun 2014**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Perpustakaan Desa					
			2012	% per kab/kota	2013	% per kab/kota	2014	% per kab/kota
1	Kota Yogyakarta	45	43	95,56	45	100	45	83,72
2	Bantul	75	51	68,00	60	80,00	66	86,76
3	Gunungkidul	144	106	73,61	110	76,39	120	83,72
4	Kulon Progo	88	67	76,14	71	80,68	77	86,76
5	Sleman	86	55	63,95	66	76,74	72	83,72
	Jumlah	438	322	73,52	352	80,37	380	86,76

Sumber : BPAD DIY, 2015

Kunjungan masyarakat ke Perpustakaan dinilai semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Koleksi perpustakaan pun semakin beragam dan memiliki keunikan.

**Tabel 2.96 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2010-2014**

Tahun	Jumlah Kunjungan	Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani	Rata-rata kunjungan setiap orang
2010	194.118	3 000	65
2011	194.116	2 750	70
2012	201.881	2 500	81
2013	662.196	3 000	243
2014	702.270	2.500	245
2015	1.190.928.	2.719.	.48

Sumber : BPAD DIY, 2015

Pembangunan perpustakaan di DIY telah berhasil melestarikan pustaka lama sehingga mampu menerobos zaman modernisasi dan komputerisasi. Hingga 2014, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY sebagai berikut :

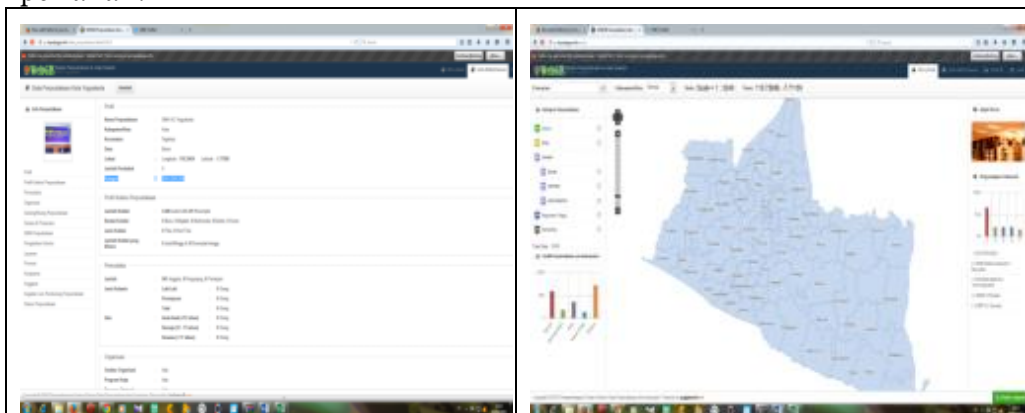
**Tabel 2.97 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah DIY**

Tahun	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah
2010	154.355	332.746
2011	179.609	367.095

Tahun	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah
2012	191.988	388.484
2013	169.683	381.371
2014	169.683	387.541
2015	182.900..	280.119

Sumber : BPAD DIY, 2015

Layanan-layanan unggulan perpustakaan DIY yang lainnya antara lain adalah *Center of Excellence, Kyoto Corner, Yogyasiana, Pustaka Nusantara, Jogja Library for Allyang* memadukan konsep perpustakaan, kearsipan dan permuseuman untuk koleksi pustaka dan arsip. Pengelolaan pustaka di DIY sudah menunjukkan inovasi teknologi melalui pelayanan pustaka dari manual ke digital, *Radio Frequency Identification (RFID), Jogja Library for All, Webgis, Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital* dan lainnya. Otomasi pelayanan perpustakaan sudah dikembangkan secara perlahan.



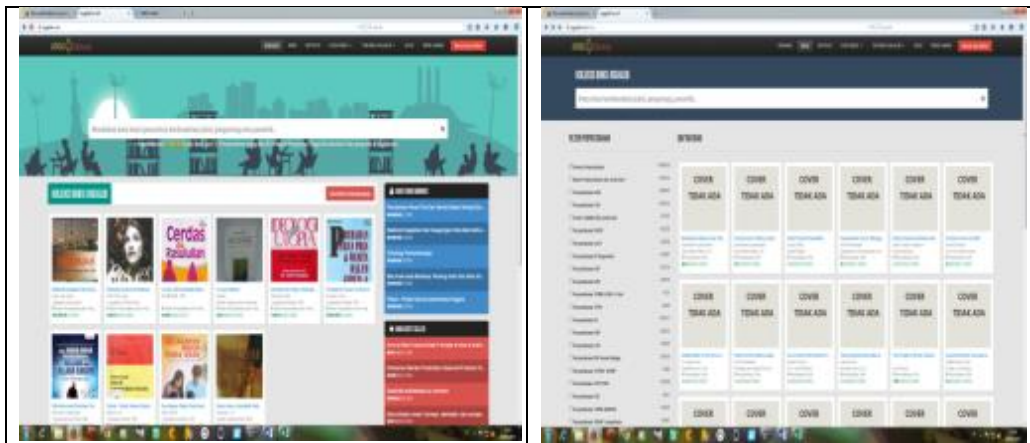
Sumber : <http://gis.bpadjogja.info/main>

Gambar 2.74 GIS Perpustakaan DIY

Jogja Library for All (JLA) sebagai salah satu bentuk layanan digital merupakan sebuah aplikasi dimana data katalog bukunya bersumber pada 35 Perpustakaan di Jogja sehingga muatan informasi sangat banyak. Berbagai macam informasi dari mulai pendidikan, teknologi, sosial budaya semua ada di aplikasi jogjalib sehingga masyarakat pada umumnya bisa menjadikan acuan portal informasi jogja tentang pendidikan maupun ilmu pengetahuan yang lain. yang mulai dirintis sejak tahun 2006. Awalnya mencakup 18 perpustakaan perguruan tinggi hingga saat ini menjadi



sekitar 35 perpustakaan yaitu seperti UGM, UNY, UII, ISI, USD, UAD, UKDW, UMY, UIN Sunan Kalijaga, STMIK Amikom.



Sumber : BPAD DIY, 2015

### Gambar 2.75 Aplikasi Jogja Library For All

Biaya pendaftaran, masuk dan baca bagi anggota silang layanan Jogjalib menjangkau semua lapisan masyarakat, layanan internet lebih cepat dan mudah terakses. Bagi Mahasiswa yang institusi pendidikannya tergabung dalam anggota Jogjalib, maka persetujuan untuk menjadi member sangatlah mudah dan cepat dikarenakan setiap anggota Jogjalib mempunyai hak akses untuk melakukan persetujuan member melalui account admin universitas/sekolah tinggi/sekolah menengah atas di jogjalib. Pemustaka dapat memanfaatkan sumber informasi Jogja Library for All, memanfaatkan sarana, prasarana dan akses informasi Perpustakaan Unit. Kartu Anggota Jogja Library for All tidak dapat digunakan untuk meminjam buku, hanya sebagai kartu pass/kunjung perpustakaan.

Jogja Library Center yang berdiri pada masa revolusi kemerdekaan merupakan cikal bakal perpustakaan negara dan menyimpan koleksi-koleksi Yogyasiana yang berupa dokumen-dokumen yang bernilai sejarah. JLC melayani audiovisual baik film, Compact Disc, VCD, radio dan televisi. Layanan surat kabar dan majalah yang terbit tempo dulu hingga kontemporer tersedia di JLC Malioboro ini. Selain itu, bangunan JLC merupakan juga peninggalan bersejarah (*heritage*). Lingkungan yang mendukung minat baca dengan ruang berlantai kayu yang sejuk, koneksi internet dan wifi area, mini theater atau ruang audio visual, dan ruang diskusi. Sudut-sudut layanan yang ada di JLC antara lain adalah *Center of Excellent*, *Kyoto Corner*, Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital.



Gambar 2.76 Jogja Library Center di Ruas Jalan Malioboro Nomor 175

Layanan *Center of Excellence* Budaya Jawa menyediakan layanan perpustakaan dan informasi yang merepresentasikan khazanah pustaka budaya se-Jawa, tidak hanya dari Yogyakarta. Koleksi berupa buku dan audiovisual yang hanya dinikmati di tempat. Kegiatan-kegiatan yang mendukung layanan *Center of Excellence* ini antara lain adalah diskusi tentang kebudayaan Jawa, macapat dan bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa. Selain itu ada layanan pustaka Nusantara yang menyajikan koleksi buku, majalah, audio visual tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia.

Bentuk kerjasama dalam penyediaan layanan pustaka dilakukan antara Pemda DIY dan Prefektur Kyoto adalah Kyoto Corner (Kedai Buku Kyoto) yang memiliki koleksi 481 judul, 581 eksemplar.

Rumah belajar modern Sewon ini merupakan proyek percontohan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya akan dikembangkan pula di Kabupaten/Kota di DIY. Fasilitas yang ada di Rumah Belajar Modern Bantul antara lain, perpustakaan anak yang sangat lengkap, arena permainan anak yang lengkap pula setelah anak membaca buku mereka bisa bermain diarena permainan atau bermain games maupun berinternet, perpustakaan keluarga, ruang kreativitas bagi masyarakat umum yang mana masyarakat membaca sekaligus mengaplikasikan kandungan bacaan seperti menyulam, merajut, membatik dan memasak, membuat hantaran pengantin dan souvenir. Selain itu disediakan juga ruang aula, arena olahraga, ruang pertunjukan, ceramah.



**Gambar 2.77 Perpustakaan Jogja Expo Center**

Gedung Perpustakaan yang menyediakan satu kesatuan pelayanan yang terpadu untuk layanan perpustakaan, perkantoran, depo arsip, sehingga menjadi pusat referensi daerah dan rumah belajar modern yang representatif di daerah sudah berdiri megah di pusat perkotaan Jogja Expo Center. Kualitas layanan perpustakaan terpadu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan (UU 43 Tahun 2007 Pasal 29 ayat1). Optimalisasi fungsi kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Perpustakaan baik di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintah sangat mendukung internasionalisasi perpustakaan.

Tantangan ke depan dalam pengembangan perpustakaan di DIY adalah menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Setiap tahun UNESCO dan tiga penerbit buku raksasa the International Publishers Association (IPA), the International Booksellers Federation (IBF), the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) menetapkan ibukota buku dunia untuk kurun masa 12 bulan antara dua perayaan yaitu hari buku Internasional dan hari Hak Cipta Internasional (23 April). Kota-kota yang pernah menjadi Ibu kota Buku Dunia berturut-turut adalah: Madrid (Spanyol-Eropa) tahun 2001 (23 April 2001 sampai dengan 22 April 2002), Alexandria (Mesir-Afrika) tahun 2002, New Delhi (India-Asia) tahun 2003, Antwerp (Belgia-Eropa) tahun 2004, Montreal (Kanada-Amerika) tahun 2005, Turin (Italia-Eropa) tahun 2006 (23 April 2006 sampai dengan 22 April 2007), giliran berikutnya yaitu Bogota (Colombia-Amerika) tahun 2007, Amsterdam (Belanda-Eropa) tahun 2008, Beirut-Libanon (2009), Ljubljana-Slovenia (2010) Buenos Aires, Argentina (2011), Yerevan-Armenia(2012), Bangkok-Thailand (2013), Port Harcourt-Nigeria (2014), Incheon-Korea (2015). Sebutan Ibukota Buku

Dunia ini dipilih dan ditetapkan berdasarkan program dan peran kota-kota yang dinominasikan dalam usaha mereka memandangi dan menjadikan peran penting buku dandalam rangka mengupayakan minat membaca di kota-kota tersebut Proses menuju Ibukota Buku di dunia perlu dimulai sejak sekarang dengan menggalang dukungan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota, penerbit, penulis, perpustakaan, dunia pendidikan, dunia kebudayaan, masyarakat, dan lainnya.

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.3.2.1 Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan basis sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam



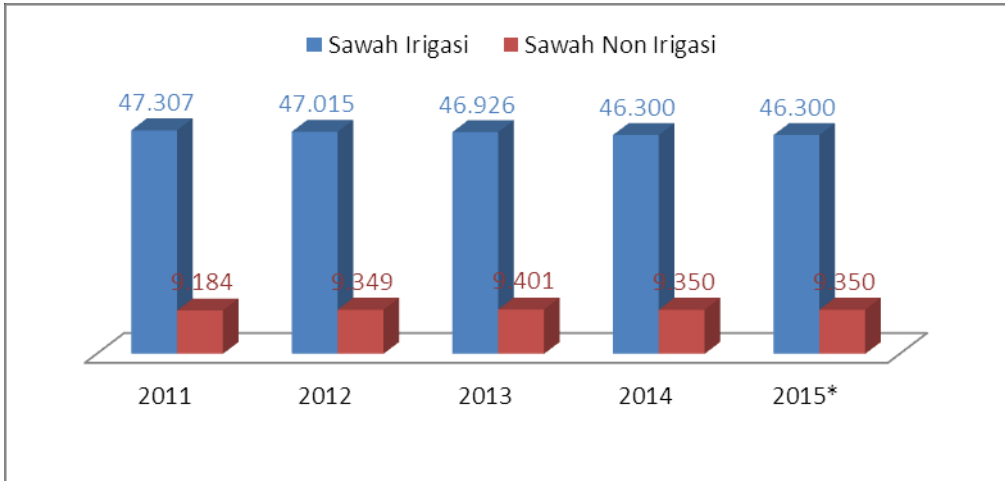
Sumber: Dinas Pertanian DIY

**Gambar 2.78 Minapadi di Kab. Sleman**

perekonomian DIY. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY yang menempati posisi ketiga setelah sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasa-jasa.

Kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2010 - 2014. Hal ini diakibatkan adanya kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan laju 0,31% per tahun selama kurun waktu 2010-2014. Alih fungsi lahan itu lebih banyak terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Pada tahun 2014 luas lahan pertanian sawah (*wetland*) mengalami penurunan luas wilayah dari 56.539 Ha pada tahun 2013 menjadi 55.650 Ha pada tahun 2014. Namun luas lahan pertanian bukan sawah (*dryland*) justru mengalami peningkatan

dari 182.621 Ha pada tahun 2013 menjadi 187.288 Ha pada tahun 2014. Hal ini didukung adanya peningkatan luas lahan pertanian bukan sawah di Sleman. Faktapenurunan luas wilayah pertanian tetap merupakan tantangan cukup berarti dalam pembangunan sektor pertanian ke depan, yang juga dibayang-bayangi dengan problem semakin rendahnya kualitas & kuantitas SDM produktif, harga yang tidak stabil, anomaly iklim, dan skema jejaring pasar yang tidak berpihak pada petani.



Sumber: analisa data Dinas Pertanian DIY\*) angka sementara

**Gambar 2.79 Grafik Luas Sawah di DIY Tahun 2011-2015**

#### A. Tanaman Pangan



**Gambar 2.80 Komoditas Pangan Lokal DIY**

Arah pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan, ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara kewilayahan. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas

atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi renaissans pangan yang

berintegrasi dengan strategi renaissance ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Komoditas padi secara nasional dan wilayah DIY, memiliki peran sebagai bahan pangan strategis. Karena peran strategis itu produksi produksi dan harga dikendalikan oleh Pemerintah. Masih ada dua komoditas lainnya yang memiliki peran strategis yaitu jagung dan kedelai, sebagai bahan baku industri dan sebagai pakan ternak. Upaya peningkatan produksi padi kedelai dan jagung terus memenerus diupayakan.

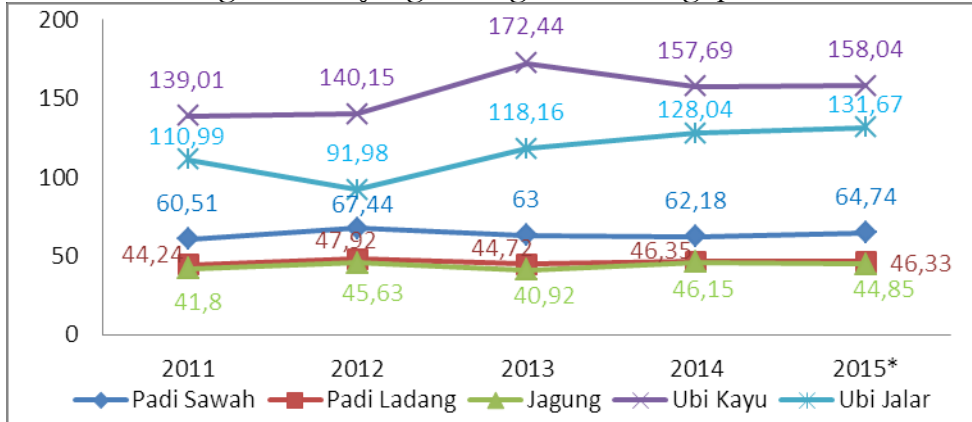
**Tabel 2.98 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan, 2014-2015**

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2014*	2015**	2014*	2015**	2014*	2015**
1	Padi Sawah	115.667	111.996	62,18	64,74	719.194	725.016
2	Padi Ladang	43.236	42.811	46,35	46,33	200.379	198.327
3	Padi	158.903	154.807	57,87	59,64	919.573	923.343
4	Jagung	67.657	65.465	46,15	44,85	312.236	293.606
5	Kedelai	16.337	13.948	11,98	12,83	19.579	17.892
6	Kacang Tanah	67.532	71.582	10,60	11,35	71.582	81.227
7	Kacang Hijau	439	403	5,95	5,91	261	238
8	Ubi Kayu	56.120	55.754	157,69	158,04	884.931	881.131
9	Ubi Jalar	409	437	128,04	131,67	5.237	5.754
10	Sorghum	452	138	3,21	3,15	145	44

Keterangan \* = Angka Tetap 2014, \*\* Angka Ramalan II = 2015  
 Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2015

Catatan produksi berdasarkan Angka Ramalan II tahun 2015, produksi padi naik dari tahun 2014. Kenaikan ini disumbang oleh kenaikan produksi padi sawah yang mencapai 725.016 ton atau 5.822 ton (0,81%) lebih tinggi dari angka 2014 produksi. Untuk padi ladang produksi lebih rendah 2.052 ton dari tahun 2014 (-1,02%). Kenaikan produksi padi sawah terjadi karena upaya khusus (UPSUS) melalui penerapan pengelolaan tanaman terpadu melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP PTT), rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bantuan benih, pupuk urea dan NPK. Catatan angka produksi

jagung dan kedelai tahun 2015 lebih rendah dari 2014. Penurunan produksi jagung terkait dengan adanya peralihan ke tanaman kacang tanah, sedangkan untuk produksi tanaman kedelai terkait dengan minat tanam dan harga kedelai yang kurang menarik bagi petani.



Sumber: Analisa Data BPS Provinsi DIY

**Gambar 2.81** Grafik Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar di DIY Tahun 2011-2015

### B. Tanaman Hortikultura

Wilayah DIY juga merupakan sentra tanaman sayuran terutama untuk komoditas bawang merah dancabai(cabai merah besar dan cabai rawit). Kedua komoditas tersebut memiliki luasan panen terluas dari total 16 komoditas sayuran di DIY. Untuk bawang merah sebagian besar menjadi komoditas unggulan daerah Bantul (67%) dan Kulon Progo (26%). Sedangkan untuk komoditas cabe besar menjadi sentra pada wilayah Kulonprogo (53.48%) dan Sleman (25.68%). Peningkatan produktifitas yang berpengaruh pada peningkatan produksi menunjukkan bahwa aspek teknis budidaya komoditas tanaman sayuran senantiasa mengalami peningkatan dengan dukungan lahan yang subur, ketinggian yang memadai, pengairan yang cukup, dan iklim/temperatur yang cocok. Salah satu problem dalam pengembangan komoditas sayuran adalah fenomena anomaly iklim, yang mengakibatkan tingkat cekaman yang tinggi dan munculnya hama penyakit serta turunnya harga akibat dari kualitas panen yang buruk.

Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura dilakukan dengan penambahan areal tanam, penerapan teknologi dan peningkatan ketersediaan sarana prasarana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air pada musim kemarau. Pada tahun 2015, Pemerintah juga memberikan fasilitasi kepada para petani cabe rawit dan cabe merah agar mampu

berproduksi pada musim penghujan. Dasar pemikiran hal itu adalah pada musim ini harga cabai relatif tinggi sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani cabai, di lain pihak para petani menghadapi kendala curah hujan, dan memerlukan sarana pelindung air hujan (rain shelter). Dengan penyediaan fasilitas yang berupa sarana produksi dan rain shelter, para petani cabe diharapkan dapat melakukan penanaman pada bulan September – Oktober sehingga akan panen pada bulan Nopember – Desember – Januari. Harga jual bulan pada saat panen itu biasanya relatif lebih tinggi sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani.

Dalam rangka menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean mulai 31 Desember 2015, Pemerintah Daerah DIY terus mendorong para petani hortikultura untuk memproduksi barang berkualitas, aman konsumsi dan mampu bersaing di pasar Asean. Upaya itu dilakukan dengan penerapan cara berbudidaya yang baik (sesuai GAP-SOP ), untuk semua komoditas hortikultura.

Komoditas cabai (merah dan rawit) serta bawang merah memiliki pengaruh yang cukup tinggi pada terjadinya inflasi di DIY. Oleh karena itu kedua komoditas ini menjadi prioritas utama dalam program kegiatan hortikultura baik melalui dana APBD maupun APBN. Untuk komoditas salak masih menjadi buah unggulan untuk DIY, sedangkan pisang merupakan komoditas yang banyak diusahakan oleh masyarakat. Komoditas hortikultura yang lain seperti biofarmaka dan tanaman hias khususnya krisan juga masih menjadi skala prioritas dalam pengembangannya.

Luas panen dan produksi tanaman hortikultura pada tahun 2014 dan 2015 selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.99 Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY, tahun 2014 - 2015**

No	Komoditas	Luas Panen			Produksi		
		Satuan	2014	2015*	Satuan	2014	2015*
1	Cabe besar	ha	2.791	2.310	Ton	17.759	23.189
2	Cabe rawit	ha	956	817	Ton	3.168	3.239
3	Bawang merah	ha	1.287	1.029	Ton	12.359	8.783
4	Salak	rumpun	5.829.257	5.287.277	Ton	75.751	73.282
5	Pisang	rumpun	1.085.152	1.140.055	Ton	56.061	52.548
6	Jahe	m2	1.669.449	2.319.732	Ton	3.374	4.614



No	Komoditas	Luas Panen			Produksi		
		Satuan	2014	2015*	Satuan	2014	2015*
7	Krisan	m2	65.328	68.047	tangkai	4.121.064	5.312.785

*Keterangan \* = Angka Tetap 2014, \*\* Angka Sementara = 2015*

*Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2015*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa produksi cabe merah pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 30,57% dibandingkan tahun 2014 walaupun luas panennya mengalami penurunan, demikian pula dengan cabe rawitnya. Hal tersebut sebagai akibat dari petani semakin sadar dalam menerapkan budidaya cabe secara baik dan benar karena selalu diberikan sosialisasi tentang GAP/SOP.

Untuk produksi bawang merah bawang merah tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 28,93% dari tahun 2014, karena penurunan luas panen di sentra produksi Bantul akibat banjir pada bulan Maret-April 2015 sehingga sebagian pertanaman bawang merah puso.

Komoditas salak produksi tahun 2015 untuk sementara mengalami penurunan sebesar 3,26%, hal ini disebabkan oleh penurunan luas panen dan siklus produksi tahunan. Produksi jahe mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya luas panen, hal ini disebabkan harga jahe relatif konstan dibanding komoditas biofarmaka yang lain, sehingga petani beralih ke komoditas jahe. Krisan meningkat bantuan Pemerintah, memiliki prospek ekonomi yang tinggi dengan sentra produksi Sleman dan rintisan di Kulonprogo. Upaya peningkatan krisan juga juga mendukung daerah tujuan wisata.

### C. Peternakan

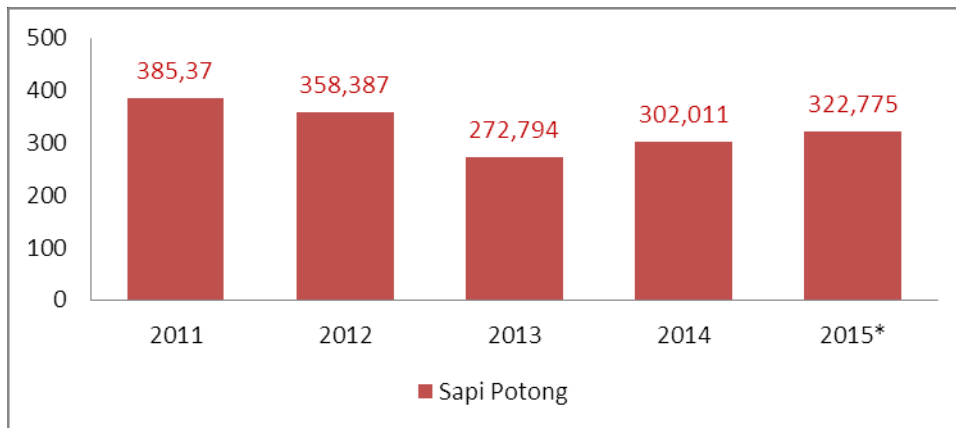
Sementara itu, untuk sub sektor peternakan, wilayah DIY memiliki sebaran ternak besar maupun kecil pada sejumlah kabupaten dan kota. Komoditas strategis peternakan di DIY adalah sapi potong untuk mendukung Program kecukupan pangan asal hewan dan agribisnis peternakan. Kawasan pengembangan sapi potong berada di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman. Tahun 2015 di Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai sentra pembibitan sapi Peranakan Onggol (PO), kondisi saat ini kisaran populasi 45 hingga 48% dari populasi sapi potong di DIY berada di Kabupaten Gunungkidul. Data populasi sapi potong di Provinsi DIY tahun 2014 dibandingkan dengan 2015 adalah sbb.:

Tabel 2.100 Populasi Ternak Provinsi DIY, 2014 - 2015

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2014	2015*
1.	Sapi Potong	302.011	322.775

Keterangan \* = Angka Tetap 2014, \*\* Angka Sementara = 2015  
 Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2015

Populasi sapi potong tahun 2015 naik 6,87% dibanding dengan tahun 2014. Kenaikan populasi sapi potong disebabkan adanya kegiatan optimalisasi inseminasi buatan (IB), insentif sapi betina bunting, pelarangan pemotongan sapi betina produktif dan kegiatan penunjang lain seperti penanggulangan penyakit gangguan reproduksi, gerakan pengembangan pakan berkualitas dan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pakan hijauan. Memberikan memotivasi peternak untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam meningkatkan populasi ternak sapi.



Sumber : Dinas Pertanian DIY  
 \*) angka Sementara

Gambar 2.82 Jumlah Populasi Sapi Potong tahun 2011-2015

Sapi perah, kambing dan itik menjadi komoditas unggulan DIY. Sentra produksi utama sapi perah di Kabupaten Sleman merupakan penyumbang 92% dari total populasi sapi perah DIY. Sedangkan sentra populasi kambing berada di kabupaten Kulonprogo (terutama jenis kambing PE) dan kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, sentra populasi itik DIY ada di kabupaten Bantul dan Sleman. Data populasi sapi perah, kambing dan itik tahun 2014 dibandingkan dengan 2015 adalah sbb.:

Tabel 2.101 Populasi Ternak Provinsi DIY, 2014 – 2015

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2014	2015*
1.	Sapi Perah	3.990	4.044
2.	Kambing	386.198	397.125
3.	Itik	553.668	567.881

Keterangan \* = Angka Tetap 2014, \*\* Angka Sementara = 2015

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2015

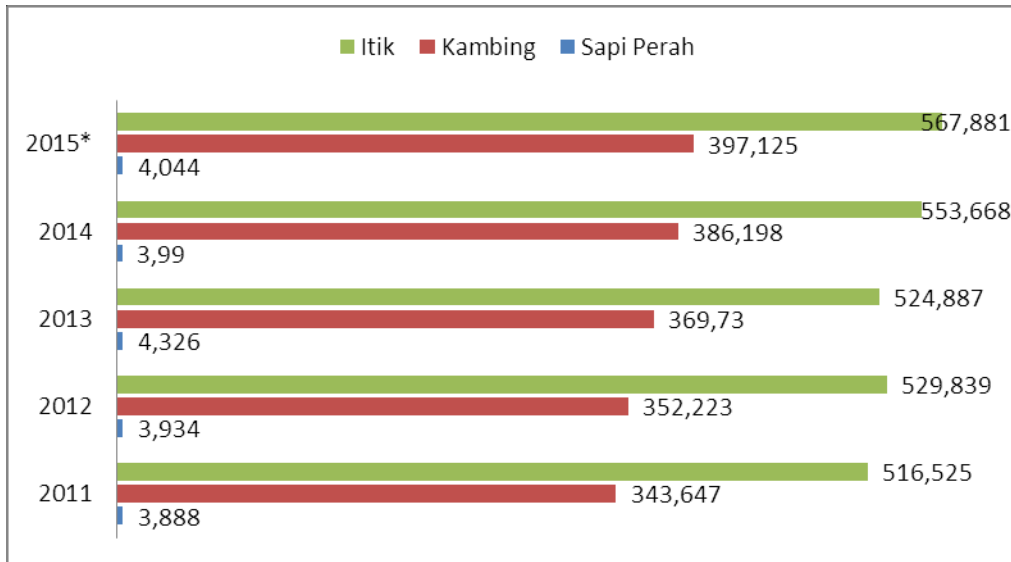
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa populasi sapi perah pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan 1,36% dibandingkan dengan 2014. Penyebab naiknya populasi ini adalah sebagian besar sapi perah terwadahi di 3 koperasi susu yang menangani sapi perah yaitu Koperasi susu Warga Mulya, Koperasi susu UPP Kaliurang dan Koperasi susu Saroni Makmur. Selain itu peningkatan juga adanya kegiatan Village Breeding Stock / VBC sehingga menjaga agar induk kering bunting dan bakal calon pedet tidak lari keluar daerah. Selain itu juga ada kegiatan uji zuriat yang menjadi salah satu upaya percepatan produksi bibit dengan menghasilkan pejantan unggul sebagai penghasil bibit sapi perah yang cocok dengan kondisi dan agroklimat di Indonesia.



Gambar 2.83 Kondisi Peternakan Sapi di DIY

Populasi kambing pada tahun 2015 mengalami kenaikan 2,84% dibanding 2014 disebabkan oleh upaya-upaya penanganan kesehatan kambing, bantuan di sentra perbibitan kambing, peningkatan kualitas pakan baik hijauan maupun pakan penguat/konsentrat, dan peningkatan manajemen pemeliharaan dengan sistem kandang “panggung”. Tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo diusulkan sebagai kawasan sentra pembibitan kambing PE.

Populasi itik pada tahun 2015 mengalami kenaikan 2,57% dibanding 2014. Peningkatan ini didukung oleh kegiatan pengembangan ternak itik di sentra pengembangan itik turi di kabupaten bantul. Tahun 2015 itik Bantul di tetapkan sebagai plasma nutfah itik turi di DIY. Ternak itik merupakan salah satu ternak sebagai penghasil telur dan daging sehingga ternak itik dapat berkontribusi sebagai penyumbang kebutuhan bahan pangan yang bergizi bagi masyarakat.



Sumber : Dinas Pertanian DIY 2014

\*) angka sementara

Gambar 2.84 Grafik Populasi Sapi Perah, Kambing, Itik di DIY (Dalam Satuan Ekor) Tahun 2011-2015

**2.3.2.2 Urusan Kehutanan**

Menurut analisis data Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2015 seluas 94,871.51Ha. Dari luas tersebut, luas hutan rakyat sangat dominan dengan luasan 76.156,45 ha dan sisanya 18.715,06 Ha merupakan hutan negara. Keberadaan wilayah hutan (baik hutan rakyat dan hutan negara) pada wilayah DIY, sangat dominan ditemui pada wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki peran sebagai wilayah hulu dari DAS Opak (sub DAS Oya). Luasan hutan pada Kabupaten Gunungkidul sebesar 56.849,43 Ha, terdiri dari 41.953,93 Ha (hutan rakyat) dan 18.715,06 ha (hutan negara, termasuk hutan AB). Luasan hutan di Kabupaten Gunungkidul sangat strategis karena memiliki proporsi dominan sebesar 62,47% dari luas hutan total di DIY, namun di dalamnya masih menyimpan beberapa persoalan, seperti: adanya lahan kritis, ancaman pencurian hasil hutan, potensi bencana alam, dan ancaman kebakaran hutan.

**Tabel 2.102 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2015**

Kabupaten	Hutan Negara (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Total Hutan (Ha)	% Total hutan
Gunungkidul	14.895,50	41.953,93	56.849,43	60,58
Bantul	1.052,60	8.570,00	9.622,60	10,25
Sleman	1.729,46	4.418,69	6.148,15	6,55
Kulonprogo	1.037,50	20.177,69	21.215,19	22,62
HUTAN di DIY	18.715,06	76.156,45	94,871.51	100,00

*Sumber : analisa data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2015 angka sementara*

Berdasarkan wilayah administrasi kehutanan, kawasan hutan negara tersebar pada 4 wilayah yaitu Kabupaten Gunungkidul seluas 14.895,50 Ha (ditambah 1.773 ha sebagai wilayah hutan AB), Kabupaten Bantul 1.052,60 Ha, Kabupaten Sleman 1.729,46 ha dan Kabupaten Kulon Progo seluas 1.037,50 Ha. Sedangkan berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas: hutan produksi 13.411,70 Ha, Hutan lindung 2.312,80 Ha, Hutan konservasi 2.990,56 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,60 Ha). Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts-II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB dikelompokkan menjadi hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi di DIY memiliki kekhususan dibandingkan wilayah lain karena dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dishutbun DIY). Potensi hutan produksi (13.411,70 ha) di DIY didominasi oleh tanaman jati (50,79%) dan tanaman kayu putih (34,32%).

Saat ini, hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Problem pengembangan tanaman kayu putih di DIY adalah produktifitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat setempat dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan.

**Tabel 2.103 Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2011-2015**

Tahun	Produksi daun (ton)	Produksi MKP (liter)	Nilai Pejualan (Rp.)
2011	4.667,99	44.957,00	6.473.306.400
2012	4.774,48	46.321,00	7.581.060.000
2013	4.743,77	44.669,00	7.561.000.000
2014	5.003,50	47.641,00	9.973.126.000
2015	4.532,00	43.825,00	8.374.957.500

Sumber : analisa data Dishutbun DIY, 2015

Luas lahan kritis di DIY pada tahun 2015 adalah 25.378,25 Ha, lebih baik dari target pada tahun 2015 seluas 26.000 Ha. Hal ini dikarenakan tingkat rehabilitasi hutan di DIY meningkat sebesar 0,01%.

Wilayah DIY yang memiliki luasan lahan kering dengan kontur yang bergelombang (berbukit/bergunung) menyebabkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, diantaranya: kelapa, kakao, kopi, tembakau, tebu, dan seterusnya. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut, memiliki cakupan luas yang cukup besar, prospek pasar yang potensial, memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu).

**Tabel 2.104 Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY 2011-2015**

Komoditas Perkebunan Strategis (Ha)	2011	2012	2013	2014	2015*)
Kelapa	42,903.95	43,371.38	43,815.39	43,453.02	42,967,49

Kakao	4,693.39	4,811.00	5,012.15	5,117.13	5,182,95
Kopi	1,407.44	1,778.84	1,725.92	1,746.50	1,770,5
Tembakau	2,154.86	2,209.52	2,310.90	2,396.14	2,055,31
Tebu	3,620.60	3,613.13	3,602.66	3,400.54	3,425,62

Sumber: analisa data Dishutbun DIY & BPS Provinsi DIY. \*) Angka Sementara

Untuk itu, desain agribisnis perkebunan yang berdaya saing dengan nilai tambah yang berkelanjutan, akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, perbaikan produktifitas dan penanganan mutu produk yang dihasilkan, fokus pada pengolahan produk yang memiliki nilai tambah, dan upaya pemasaran hasil yang memadai melalui branding yang tepat, serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai. Penerapan agribisnis ini dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna dan penguatan tingkat kemampuan petani serta kelembagaan petani dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis yang memadai.

Efisiensi usaha tani dalam rangka penguatan desain agribisnis diharapkan dapat tercapai apabila produksi yang optimal dapat diimbangi dengan biaya produksi yang efisien. Pemanfaatan peluang pasar yang baik bisa dicapai dengan penanganan pengolahan hasil melalui integrasi nilai tambah yang sesuai dengan selera pasar, penguatan system informasi, dan branding produk yang berkelanjutan. terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di DIY, maka langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk mampu memenuhi permintaan dan selera pasar.

### 2.3.2.3 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

#### Rasio Elektrifikasi

Pada tahun 2012, jumlah Rumah Tangga tercatat 1.037.976 RT, dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD pada tahun 2012, dapat dilaksanakan penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 225 RT sehingga terdapat peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 0,023% dari target sebesar 0,015%. Sedangkan melalui dana APBN jumlah rumah tangga berlistrik meningkat sebanyak 5.851 RT atau terjadi peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 0,564%. Secara total ratio elektrifikasi pada tahun 2012 tercapai 76,80%, meningkat sebesar 0,59% dari tahun 2011.

Usaha peningkatan rasio elektrifikasi pada tahun anggaran 2014 fokus pada (1) pembangunan listrik pedesaan, dengan prioritas Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul, serta (2) pemasangan instalasi listrik rumah bagi masyarakat tidak mampu, dengan prioritas Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul, serta sebagian kecil di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pada akhir tahun 2013, rasio elektrifikasi di DIY tercapai sebesar 80,60 %. Realisasi rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2014 sebesar 82,70%, sehingga selama tahun 2014 terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 2,10% atau penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 22.799 RT yang dicapai melalui :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan APBD DIY tahun 2014, sebanyak 577 RT;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten tahun 2014, sebanyak 248 RT;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan APBN 2014, sebanyak 1.300 RT;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gunungkidul, sebanyak 48 RT;
- e. Dari dana Non PLN dan swadaya masyarakat, sebanyak 20.626 RT.

Sementara itu, update terbaru kondisi elektrifikasi disampaikan oleh Dinas PUP-ESDM DIY melalui forum Musrenbang, Maret 2015 dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. jumlah RT lebih kurang 1,07 juta,
- b. rasio Desa Berlistrik 100%,
- c. dusun dengan sebagian RT yang belum berlistrik 649 dusun, dan
- d. jumlah RT belum berlistrik 69.194 (6,4%).

### **Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan**

Di DIY telah dibangun banyak fasilitas pemanfaatan energi terbarukan. Tabel 3 berikut memperlihatkan capaian dalam tahun 2013. Capaian Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Tahun 2013 sebesar 114.035,02 SBM.



Tabel 2.105 Tabel Capaian Energi Terbarukan Tahun 2013

*sumber: LKPD PU ESDM 2013*

Sementara itu, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan tahun 2014 dilakukan di antaranya dengan: (1) pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan kurang baik, (2) pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan, dan (3) pemanfaatan bioenergi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG dan sebagai pembangkit listrik bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar. Realisasi tahun 2014 sebesar 116.543,20 SBM dari target sebesar 112.000 SBM. Realisasi pencapaian target di tahun 2014 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dari Dana

- Alokasi Khusus Kementerian ESDM sebesar 15 kW di Kabupaten Gunungkidul atau setara 206,54 SBM;
- b. Pemasangan 65 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari APBD DIY di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY atau setara 179,00 SBM;
  - c. Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 15 kW dari APBD DIY di Kabupaten Kulonprogo atau setara 206,54 SBM;
  - d. Pembangunan 85 unit Digester Biogas dari APBD DIY di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Sleman atau setara 590.19 SBM;
  - e. Pembangunan 120 unit Digester Biogas dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Sleman atau setara 722.80 SBM;
  - f. Pembangunan 89 unit Digester Biogas dari Kementerian ESDM di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Sleman atau setara 602.975 SBM.

Masih terdapat banyak sumberdaya energi terbarukan yang belum dimanfaatkan. Salah satunya adalah sampah. Pengelolaan sampah di DIY dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Hingga saat ini di DIY telah terbangun dua TPA Sanitary Landfill yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahun 2013 pencapaian target pengelolaan sampah ramah lingkungan DIY secara kumulatif sebesar 53%. Pada tahun 2014 melalui program Pengelolaan Persampahan telah dibangun Prasarana Dan Sarana Persampahan sejumlah 2 unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R. Melalui dukungan APBN dilakukan pembangunan TPST 3R sejumlah 3 unit, optimalisasi TPST 3R sejumlah 3 Unit dan optimalisasi TPA sanitary landfill di 2 lokasi, sehingga total persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan mencapai 57,26%. Capaian ini telah melampaui target 2014 sebesar 55%.

### **Konservasi Energi**

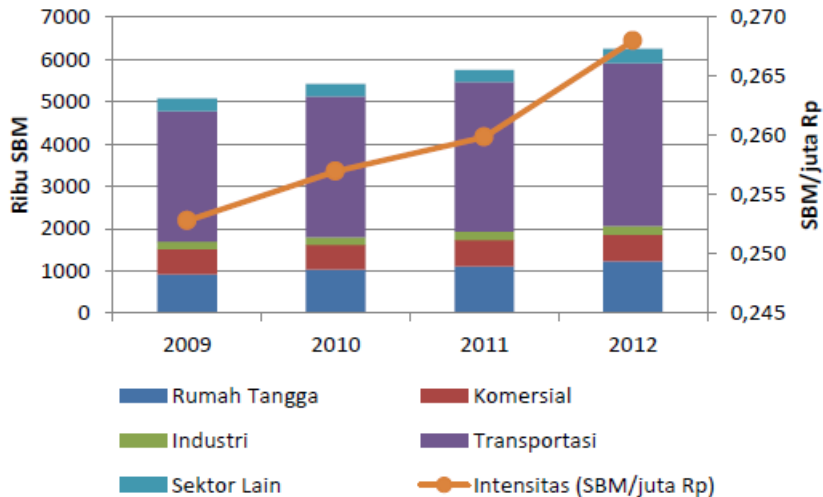
Sedangkan untuk mewadahi kegiatan konservasi energi yang diamanatkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait konservasi energi, maka disusun program baru yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi. Program ini bertujuan untuk implementasi dan penerapan konservasi energi dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas.

Pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050.

Untuk mencapai target pelaksanaan konservasi energi dilakukan pendekatan konservasi energi di berbagai sektor. Prioritas pelaksanaan konservasi energi tahun 2014 di sektor publik yaitu gedung pemerintah dilakukan melalui pelaksanaan audit energi gedung pemerintahan khususnya milik pemerintah daerah. Dari hasil pelaksanaan audit energi tersebut dihasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik.

Capaian kinerja pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan melalui kegiatan audit energi di Tahun 2013 sebesar 3,33% (5 gedung pemerintah terhadap 150 gedung pemerintah). Target sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 6% (9 gedung pemerintah), dengan realisasi sebesar 10 % (15 gedung pemerintah).

Secara menyeluruh Haryono (2014) memaparkan bahwa konsumsi energi provinsi DIY masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang mengkonsumsi energi sangat besar tapi tidak banyak mempengaruhi pembentukan PDRB. Bisa juga dikatakan bahwa sektor-sektor pembentuk PDRB di provinsi DIY adalah sektor-sektor yang intensif energi, dalam hal ini adalah yaitu sektor transportasi. Perkembangan intensitas konsumsi energi final (tidak termasuk biomassa) provinsi DIY disampaikan pada Gambar 1 Intensitas energi menggambarkan konsumsi energi untuk kegiatan ekonomi suatu daerah yang dinyatakan sebagai konsumsi energi per PDRB. Intensitas energi dapat dijadikan tolok ukur efisiensi kegiatan ekonomi suatu daerah. Makin tinggi intensitas energi makin tidak efisien penggunaan energi di daerah tersebut untuk pertumbuhan PDRB.



sumber: Haryono, 2014

Gambar 2.85 Intensitas Konsumsi Final Provinsi DIY 2009-2012

Elastisitas energi provinsi DIY rata-rata per tahun dalam periode 2009 – 2012, adalah sebesar 1,4; masih lebih kecil daripada rata-rata elastisitas Indonesia 1,63. Elastisitas energi merepresentasikan rasio prosentase pertumbuhan konsumsi energi terhadap prosentase pertumbuhan PDRB pada tahun yang sama. Kondisi yang diinginkan adalah elastisitas energi yang rendah (kurang dari 1), yang berarti bahwa untuk menumbuhkan ekonomi 1% pertumbuhan konsumsi energi kurang dari 1% (Haryono, 2014).

### **Pencapaian Kinerja Pengelolaan Bahan Bakar**

Berdasarkan hasil pelaksanaan program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar pada tahun 2012, realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tercatat jenis premium 504.632 KL atau 99,7% dari kuota, solar 130.527 KL atau 108,8% dari kuota, serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 61.961,06 Ton atau 102,8% dari kuota. Kelancaran distribusi Bahan Bakar Bersubsidi didukung melalui koordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, Kabupaten/Kota, PT. Pertamina (Persero), dan HISWANA MIGAS DIY.

Untuk menjamin pasokan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi di DIY, pemerintah di tahun 2014 menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT Aneka Kimia Raya (AKR) selaku badan usaha untuk melakukan distribusi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi jenis premium, solar, dan LPG tabung 3 Kg. Untuk bahan bakar minyak bersubsidi didistribusikan melalui 96 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan 2 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan melalui 43 agen anggota Hiswana Migas DIY beserta 3.713 pangkalannya.

Sampai tahun 2013 telah dilakukan pembinaan terhadap 270 penyalur (45 % dari 600 penyalur bahan bakar yang perlu ditingkatkan kinerja kelancaran distribusinya). Target peningkatan kinerja Pengelolaan Bahan Bakar tahun 2014 sebesar 50% (300 penyalur) dengan realisasi sebesar 60 % (360 penyalur). Capaian realisasi tersebut dilakukan melalui:

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian distribusi bahan bakar bersubsidi terhadap 90 penyalur;
- b. Pembangunan 5 unit pangkalan LPG tabung 3 Kg di Kabupaten Kulon Progo.

### **Pengelolaan Usaha Pertambangan**

Pengelolaan usaha pertambangan tahun 2014 dilakukan melalui 1) pemberian bantuan alat pengolah hasil tambang, 2) meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial kelompok masyarakat, serta 3) menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kegiatan operasi serta produksi pertambangan.

Produksi tujuh mineral non logam dan batuan pada tahun 2012 yang banyak diusahakan di DIY saat ini adalah sirtu/pasir dengan produksi 741.783 m<sup>3</sup>, batu gamping/kapur dengan produksi 146 m<sup>3</sup>, tanah liat dengan produksi 789 m<sup>3</sup>, andesit dengan produksi 109.280 m<sup>3</sup>, zeolit dengan produksi 350 m<sup>3</sup>, breksi batuapung dengan produksi 600 m<sup>3</sup>, dan tanah urug dengan produksi 70.463 m<sup>3</sup>. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012, total peningkatan nilai produksi bahan galian dari tujuh mineral non logam dan batuan sebesar Rp 551,39 juta atau meningkat 1,84 % dari target yang hanya sebesar 0,37%. Sampai dengan tahun 2013, telah dicapai peningkatan nilai tambah komoditas tambang melalui fasilitasi pengolahan komoditas tambang batuan sebesar 9 % (10 lokasi dari total 22 lokasi kegiatan pertambangan yang potensial dikembangkan). Target Peningkatan nilai tambah di tahun 2014 sebesar 10 % (11 lokasi) dengan realisasi sebesar 11 % (12 lokasi). Capaian realisasi peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan dilakukan melalui pemberian bantuan alat pengolah batu sebanyak dua lokasi yaitu di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman. Namun demikian, secara keseluruhan sektor pertambangan belum bisa menjadi salah satu sumber penggerak perekonomian di DIY.

Lebih jauh lagi, selama perizinan penambangan masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, baru 22 penambangan yang dinyatakan legal. Sisanya, yaitu sekitar 70% penambangan di DIY masih berstatus ilegal.

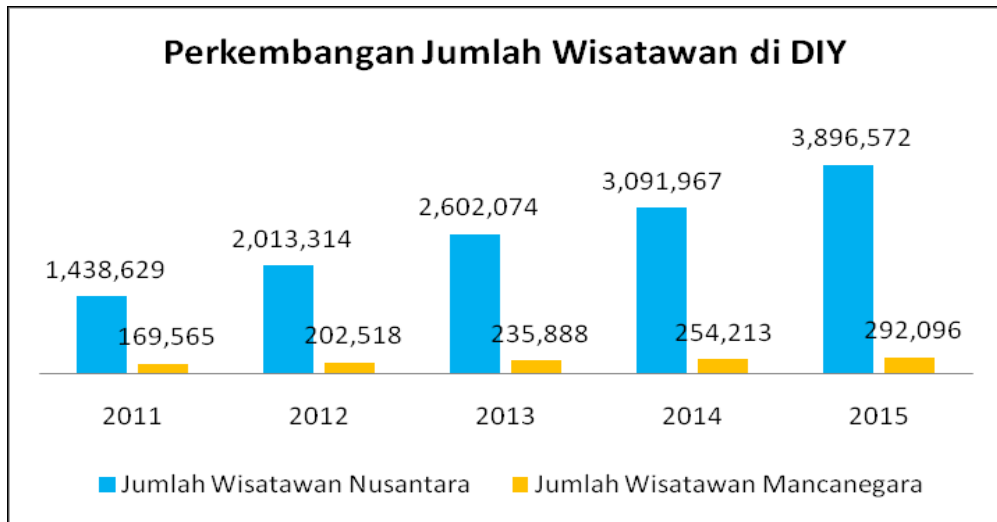
Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan memberikan izin pertambangan, yang sebelumnya ada di pemerintah kabupaten kota, diserahkan kepada provinsi. Sejak pengalihan kewenangan perizinan tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2015, Pemerintah DIY melalui Dinas PU P dan ESDM di Tahun 2015 telah mengeluarkan 42 ijin penambangan batu dan pasir. Bantul 13 ijin penambangan, Sleman 7 ijin penambangan, Kulonprogo 19 ijin penambangan, Perbatasan Sleman-Kulonprogo 3 ijin penambangan.

#### **2.3.2.4 Urusan Pariwisata**

Sesuai dengan visi Pembangunan DIY, tujuan yang ingin dicapai dalam sektor Pariwisata DIY adalah mewujudkan pariwisata yang kreatif dan inovatif. Salah satu indikator perhitungan perkembangan pariwisata DIY yang digunakan adalah dengan peningkatan jumlah wisawatan di DIY.

Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan jumlah wisawatan di DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada jumlah wisawatan nusantara. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 4.188.668 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 3.896.572 orang dan wisatawan mancanegara

sebanyak 292.096 orang. Secara keseluruhan jumlah tersebut meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lima besar wisatawan mancanegara yang mengunjungi DIY adalah wisatawan yang berasal dari Negara Belanda, Jepang, Malaysia Perancis, dan Singapura.



Gambar 2.86 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY

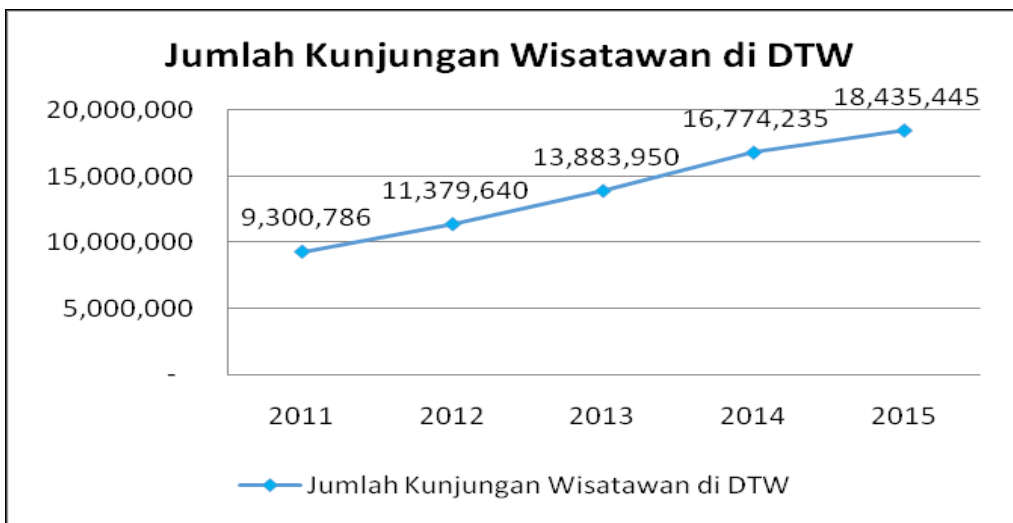
Sementara indikator lama tinggal wisatawan di DIY pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya meskipun belum signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola kecenderungan wisatawan memanfaatkan libur pendek akhir pekan (*weekend*). Selain itu faktor ketergantungan yang kuat dengan destinasi lainnya, dalam hal ini DIY masih menjadi daerah wisata alternatif setelah Bali bagi wisatawan mancanegara.

Tabel 2.106 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,98	1,82	1,90	1.95	2.07
lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,72	1,56	1,59	1.58	1.85

Sumber: Dinas Pariwisata DIY Tahun 2016

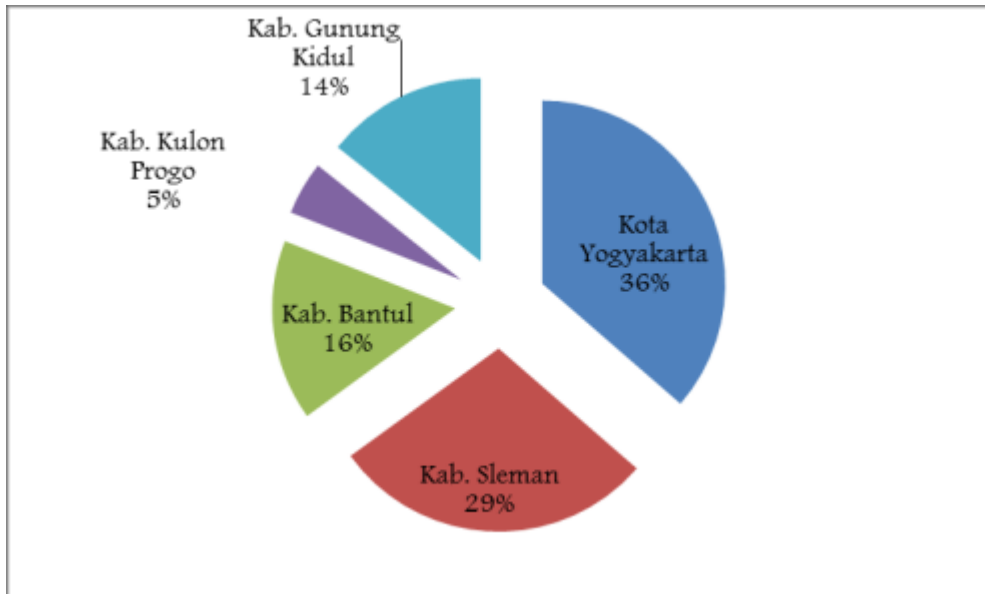
Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan di DTW Kab/Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan di DTW mengalami kenaikan dari 16.774.235 orang pada tahun 2014 menjadi 18.435.445 orang pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 9,9%. Peningkatan tersebut tergolong belum signifikan karena jumlah daya tarik wisata baru di DIY yang masih stagnan untuk tahun 2015 sebanyak 89 DTW atau tetap apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah pembatasan kegiatan penyelenggaraan Meetings Incentives Conferencing Exhibitions (MICE) di Hotel bagi aparatur pemerintah.



Gambar 2.87 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan DTW di DIY

Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Kab/kota, pada tahun 2014 peningkatan sebesar 31% jika dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013 jumlah pengunjung daya tarik wisata (DTW) sebesar 12.759.153 orang, sementara untuk tahun 2014 berhasil dicapai 16.774.235 orang pengunjung. Peningkatan tersebut tidak jauh berbeda dengan kinerja peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan wisatawan yang datang ke DTW wilayah DIY mulai mengalami kejenuhan terhadap daya tarik wisata yang ada. Pertumbuhan pariwisata DIY yang sebelumnya didorong dari peningkatan penyelenggaraan Meetings Incentives Conferencing Exhibitions (MICE) pada tahun 2014 diperkirakan mengalami penurunan jumlah kegiatan MICE terkait pembatasan kegiatan pertemuan di Hotel. Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah adanya peningkatan batas bawah tarif

pesawat yang dimungkinkan berdampak pada melambatnya pertumbuhan kunjungan wisatawan di DIY.



Gambar 2.88 Sebaran Pengunjung ODTW di Kabupaten/Kota

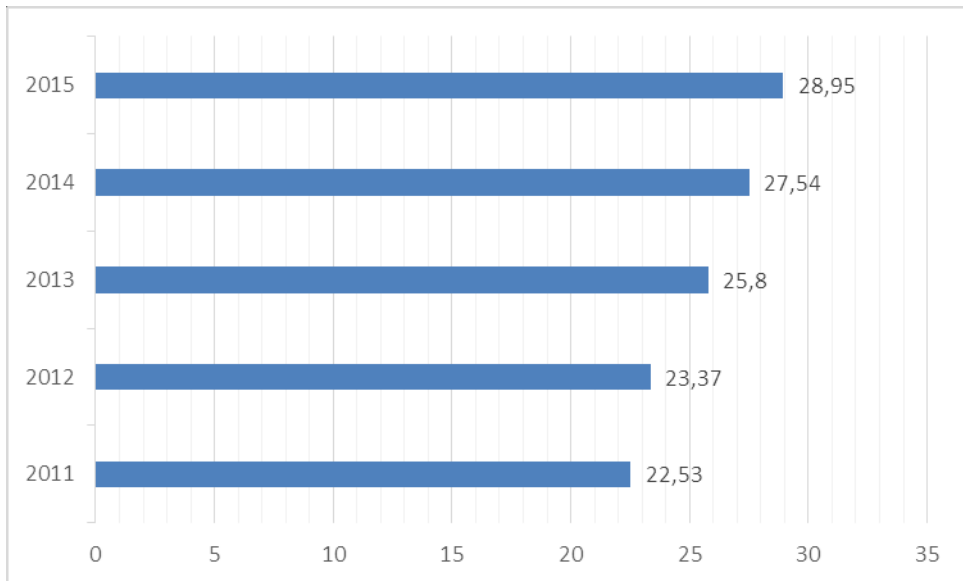
Kedepannya, pengembangan kepariwisataan di DIY harus dikembangkan dan dikelola pada pemasaran yang lebih tersegmentasi (*mass tourist, special interest tourist*) baik pada daya tarik wisata alam, budaya, maupun minat khusus. Pengembangan kepariwisataan di DIY sudah seyogyanya dikembangkan secara *sustainable tourism development*, dimana dalam pengembangan destinasi baru harus menjaga kelangsungan destinasi yang ada dan membentuk reputasi destinasi untuk menciptakan keunikan dan keunggulan. Untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan manajemen SDM dan kelembagaan yang memadai melalui pelatihan-pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata.

Selain itu penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi-lokasi daya tarik wisata (jaringan jalan, area parkir, penataan rute jalur/ rute wisata dan angkutan umum) perlu dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat menumpuknya wisatawan yang berkunjung di satu lokasi daya tarik wisata.



### 2.3.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Peningkatan ketersediaan ikan untuk dikonsumsi oleh penduduk DIY dari tahun ke tahun dapat mengindikasikan adanya upaya dalam pemenuhan kebutuhan akan protein hewani dari ikan. Ketersediaan ikan per kapita DIY mengalami kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di DIY yang terus bertumbuh walaupun masih disertai dengan adanya pasokan ikan yang masuk ke wilayah DIY dari luar daerah. Tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



\*) Angka Sementara

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Tahun 2016

**Gambar 2.89 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2011-2015**

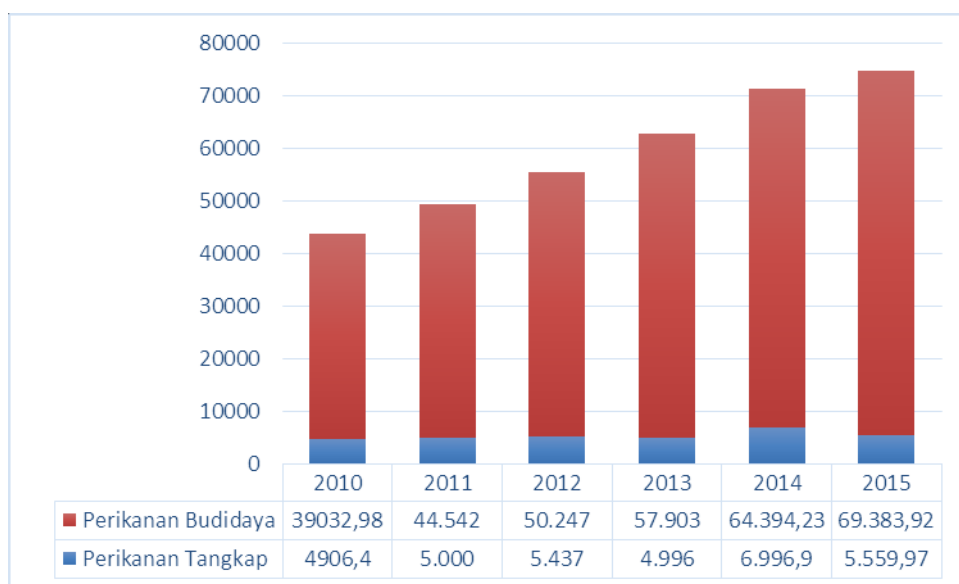
Tingkat konsumsi ikan perkapita juga cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diinisiasi Pemda DIY memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan DIY terus mengalami peningkatan

sejak tahun 2011. Jumlah produksi perikanan DIY selama periode 2011-2015 rata-rata tumbuh sebesar 11,71%.

Produksi perikanan budidaya mendominasi jumlah produksi perikanan DIY secara keseluruhan. Kontribusi rata-rata perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan DIY selama lima tahun terakhir mencapai 91,15%, bahkan pada tahun 2015 mencapai 93,36%. Hal ini dikarenakan keberhasilan budidaya perikanan air tawar khususnya di kabupaten Sleman yang selama ini menjadi basis pengembangan perikanan budidaya. Selain itu didukung pula dengan bertambahnya usaha budidaya lahan kering di Gunungkidul dan Kulon Progo dengan menggunakan sistem terpal. Sementara kontribusi perikanan tangkap cenderung menurun dari 10,11% pada tahun 2011 menjadi 6,64% pada tahun 2015. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan sering terjadinya *over fishing* dan *illegal fishing* serta belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap seperti Kapal Inka Mina 30 GT. Di sisi lain, budaya melaut yang masih tergolong baru ditambah dengan nelayan tangkap DIY yang sebagian besar merupakan nelayan sambilan bertani menyebabkan upaya peningkatan aktivitas penangkapan ikan di laut tidak mudah dilakukan dan masih memerlukan waktu lebih lama. Namun demikian, faktor cuaca yang tidak menentu adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY dikarenakan menyebabkan berkurangnya jumlah trip nelayan untuk melaut.

Untuk mengetahui pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di DIY dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: DinasKelautandanPerikanan DIY, 2016

**Gambar 2.90** Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya DIY (Ton), Tahun 2011-2015

### 2.3.2.6 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan memberikan andil yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY selama tahun 2011 hingga 2015 dapat dilihat pada perkembangan ekspor. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2015 tercatat 242,47 Juta US\$. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh 3 (tiga) komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan, dan barang-barang darikulit. Tujuan ekspor komoditas DIY terutama pada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Prancis.

**Tabel 2.107** Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Volume (Juta kg)	27	33,54	34,03	57,51	56,90
Nilai (Juta US \$)	144	177,07	211,76	233,25	242,47
Komoditi	102	108	127	166	110

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Negara	87	98	111	114	115
Eksportir	208	235	286	310	325

Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2015

Sementara itu, perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri tercatat pada tahun 2011-2015 secara umum mengalami perkembangan positif, yaitu terlihat dari perkembangan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan jumlah pasar di DIY. Realisasi jumlah penerbitan SIUP sepanjang tahun 2015 sebanyak 292 buah, sehingga jumlah kumulatif menjadi 46.607 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh pengusaha mikro dan kecil sebesar 87,67%.

**Tabel 2.108 Perkembangan Jumlah Kumulatif SIUP Yang Terdaftar di DIY Tahun 2011-2015**

No	Golongan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengusaha Besar	988	1.040	1.057	1.607	1.076
2	Pengusaha Menengah	1.999	2.316	2.629	2.717	2.684
3	Pengusaha Kecil	36.607	38.589	40.132	40.710	40.861
4	Pengusaha Mikro		872	1.644	1.821	1.986
Jumlah		39.594	42.817	45.462	46.315	46.607

Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2015

Perkembangan sektor perdagangan DIY, didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Perkembangan sarana perdagangan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah toko modern hingga tahun 2014 sejumlah 416 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 361 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan sarana penunjang di pasar-pasar tradisional diperlukan agar pasar tradisional memiliki daya saing dan tidak ditinggalkan pembeli.

**Tabel 2.109 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional Tahun 2010-2014**

Jenis Toko	2010	2011	2012	2013	2014
Toko Modern	405	405	416	416	416
Pasar Tradisional	331	331	333	333	361
Jumlah	736	736	749	749	777

Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2015

### 2.3.2.7 Urusan Industri

Kontribusi sektor industri pengolahan pada struktur PDRB DIY Tw III mencapai 12,5% . Dengan kontribusi sebesar itu, sektor Industri urutan ke dua setelah sektor pertanian. Industri di DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan jumlah unit usaha hingga tahun 2015 sebesar 88.637 IKM.

Jumlah IKM mengalami pertumbuhan yang positif dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah IKM meningkat sebesar 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah unit usaha tersebut diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.5% dari sebesar 318.858 pada tahun 2014 menjadi 326.669 orang pada tahun 2015.

**Tabel 2.110 Perkembangan IKM di DIY Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Unit Usaha	80.056	81.523	84.234	86.087	88.637
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	295.461	300.539	310.173	318.858	3263669
Nilai Investasi (Rp Milyar)	1.003.678	1.010.585	1.064.180	1.151.443	1.187.754
Nilai Produksi (Rp Milyar)	3.053.031	3.199.224	3.294.485	3.399.909	3.489.769
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Milyar)	1.352.479	1.388.023	1.449.435	1.524.806	1.550.832

Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2015

Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi (output) dengan nilai bahan baku dan penolong lainnya (input). Pada tahun 2015 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp. 1.550.8832 Milyar. Sementara itu, untuk Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp. 3.489.769 Milyar. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY bernilai sebesar Rp. 1.938.937 Milyar pada tahun 2015. Nilai tambah tersebut meningkat sekitar 3,4% dibandingkan dengan tahun 2014.

Perkembangan indikator kinerja sektor industri yang cukup positif tersebut harus dapat dimanfaatkan terlebih dengan adanya momentum diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Terbukanya pasar perdagangan bebas di ASEAN menjadi tantangan bagi DIY mengingat tidak ada lagi hambatan tarif bagi perdagangan antar negara di ASEAN. Dengan demikian, peluang ekspor DIY mestinya semakin meningkat. Namun demikian, peredaran produk-produk asing juga akan meningkat di pasar domestik DIY. Untuk itu perlu dioptimalkan kembali program-program terutama terkait dengan peningkatan daya saing produk

seperti penjaminan mutu, sertifikasi dan standarisasi sehingga pasar memiliki preferensi untuk memilih produk-produk berkualitas dari DIY.

### 2.3.2.8 Urusan Ketransmigrasian

Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimaksud Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi dengan diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah.

Dengan demikian, program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tapi juga meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dalam meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan.

Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi.

Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi

Konsekuensi dari perubahan pendekatan tata pemerintahan dari semula sentralistik menjadi desentralistik memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam kaitannya dengan urusan ketransmigrasian, dominasi peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan transmigrasi telah diambil alih oleh pemerintah daerah. UU No. 29 Tahun 2009 mempertegas perubahan peran tersebut dimana pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyediaan kawasan, pembangunan kawasan hingga pengembangan kawasan transmigrasi.

Peyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh Pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri.

Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana (*rowing*), sedangkan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, yaitu pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat yang melibatkan Pemerintah Provinsi dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigrasi telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin.

Hingga saat ini, animo masyarakat DIY untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi melebihi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meskipun dengan kecenderungan menurun hingga tahun 2014 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2015

**Tabel 2.111 Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2011-2015**

KAB/ KOTA	2011		2012		2013		2014		2015	
	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar
	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)
<b>Yogyakarta</b>	149	131	95	65	74	48	59	39	71	47
<b>Sleman</b>	562	540	491	480	465	465	468	468	281	281
<b>Bantul</b>	1.178	589	1.206	683	260	130	334	167	210	105
<b>Kulon Progo</b>	609	138	531	259	312	122	338	133	343	137
<b>Gunungkidul</b>	134	72	162	87	104	50	155	98	40	30
<b>JUMLAH</b>	2.632	1.470	2.485	1.574	1.215	815	1.354	905	945	600

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Selama kurun 2011-2015, Pemerintah DIY telah memberangkatkan transmigrasi total sebanyak 843 KK, dengan perincian sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Jika dilihat dari daerah asal transmigrasi, selama kurun waktu 2011 hingga 2015 mayoritas transmigrasi berasal dari Bantul dengan jumlah 271 KK atau 900 jiwa, sedangkan jumlah terendah dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 76 KK (244 jiwa)

Sebelum pemberangkatan telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Dasar Umum (PDU) bagi calon transmigran.

**Tabel 2.112 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi menurut Daerah Asal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2011 – 2015**

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2011		2012		2013		2014		2015	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	25	85	19	59	15	46	5	15	12	39
Sleman	70	233	56	170	10	31	11	36	22	82
Bantul	75	265	80	264	53	168	23	73	40	128
Kulon Progo	49	154	53	162	47	138	19	65	27	85
Gunungkidul	40	129	40	126	25	75	12	41	15	56
<b>JUMLAH</b>	<b>259</b>	<b>866</b>	<b>248</b>	<b>781</b>	<b>150</b>	<b>458</b>	<b>70</b>	<b>230</b>	<b>116</b>	<b>390</b>

*Sumber: BPS, DIY dalam Angka, beberapa tahun terbitan dan Disnakertrans DIY*

Untuk mempermudah evaluasi transmigrasi, pemerintah perlu menetapkan kriteria daerah tujuan dan tolak ukur keberhasilan transmigrasi dengan lebih jelas. Komitmen daerah penempatan dalam pengusulan program pembangunan transmigrasi baru harus benar-benar sudah memenuhi kriteria kelayakan program yaitu 2C (Clear & Clean) dan 3L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang), adanya kejelasan status lahan dan tidak adanya tumpang tindih peruntukan lahan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari. Berkaitan dengan adanya otonomi daerah di Indonesia pelaksanaannya harus mengakomodasikan program ini yang antara lain dengan mengedepankan peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijaksanaan penempatan transmigrasi.

Untuk menjamin terpenuhinya harapan transmigran berupa peningkatan kesejahteraan, maka pemerintah menempuh kebijakan sebagai berikut (Disnakertrans DIY):

- a. Perlu adanya jaminan yang lebih konkrit tentang peningkatan kesejahteraan transmigran dengan penguatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar daerah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- b. Perlu dilakukan seleksi secara menyeluruh dan diberikan pelatihan sesuai dengan potensi di lokasi penempatan.
- c. Peningkatan perbekalan calon transmigran oleh daerah pengirim
- d. Perlu adanya perlindungan/advokasi dan pendampingan secara lebih baik kepada transmigran oleh daerah pengirim.



## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita dari tahun 2010 hingga tahun 2014 cenderung meningkat. Pengeluaran Konsumsi per Kapita gabungan perkotaan dan perdesaan pada tahun 2014 meningkat sebesar 35,08% dibandingkan tahun 2010. Peningkatan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Proporsi rata-rata pengeluaran non makanan selama kurun waktu lima tahun sebesar 54,11% dan sisanya sebesar 45,89% untuk komoditas makanan. Sementara itu pengeluaran per kapita di perkotaan senantiasa lebih besar dibandingkan pengeluaran di perdesaan setiap tahunnya.

**Tabel 2.113 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di DIY, 2010-2014**

Tahun	Daerah	Makanan	Non Makanan	Jumlah
2010	Perkotaan (K)	270.886	385.305	656.191
	Perdesaan (D)	195.603	174.305	369.908
	K + D	244.003	309.963	553.966
2011	Perkotaan (K)	302.958	399.829	702.787
	Perdesaan (D)	223.946	248.219	472.165
	K + D	276.322	348.722	625.044
2012	Perkotaan (K)	361.214	440.296	801.510
	Perdesaan (D)	260.840	241.638	502.478
	K + D	327.242	373.055	700.297
2013	Perkotaan (K)	383.303	496.532	879.835
	Perdesaan (D)	313.167	230.101	543.268
	K + D	359.522	406.192	765.714
2014	Perkotaan (K)	368.752	465.447	834.199
	Perdesaan (D)	329.872	252.242	582.114
	K + D	355.504	392.800	748.304

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Berdasarkan golongan pengeluaran perkapita per bulan, jumlah rumah tangga di DIY tahun 2014 yang memiliki pengeluaran lebih dari 500 ribu rupiah per bulan sebanyak 673.757 rumah tangga atau sebesar 60,68%. Hal ini berarti terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 59,09% sehingga dapat diasumsikan bahwa terjadi sedikit peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, jumlah rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita sebulan kurang dari 500 ribu rupiah sebanyak 436.654 rumah tangga atau sebanyak 39,32% dengan rincian seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.114 Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di DIY, Tahun 2010-2014**

Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan	Jumlah Rumah Tangga				
	2010	2011	2012	2013	2014
< 100.000	193	-	10	-	-
100.000 – 149.999	8.821	7.495	6.873	413	585
150.000 – 199.999	59.040	46.381	35.259	13.950	7.299
200.000 – 299.999	217.222	175.341	172.813	126.127	96.384
300.000 – 499.999	328.385	302.419	283.642	296.365	332.386
> 500.000	433.212	510.289	567.685	630.864	673.757
Jumlah	1.046.873	1.041.925	1.066.282	1.067.719	1.110.411

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Jika dilihat dari kelompok komoditas non makanan, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan lebih didominasi oleh kelompok barang-barang dan jasa. Proporsi terbesar dalam pengeluaran konsumsi Rumah Tangga non makanan adalah Kelompok Barang dan Jasa dengan rata-rata proporsi selama 5 tahun (2010–2014) sebesar 41,71%. Kemudian disusul oleh Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan, dan Air dengan rata-rata proporsi selama 5 tahun sebesar 35,30%. Proporsi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non makanan sebagian besar diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Di sisi lain, Kelompok Pajak Pemakaian dan Premi Asuransi merupakan kelompok dengan proporsi terkecil sebesar 3,38%.

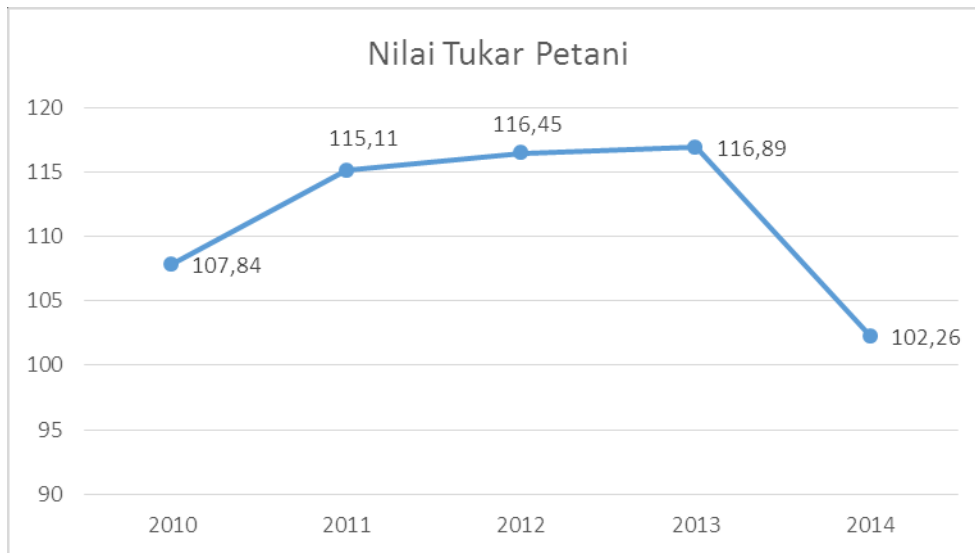
**Tabel 2.115 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, 2010-2014**

Kelompok	Nilai (Rupiah)				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	109.997	121.996	135.795	147.181	146.720
2. Barang-Barang & Jasa	124.291	151.625	170.509	170.005	166.528
3. Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	15.912	14.128	20.967	20.665	19.987
4. Barang Tahan Lama	40.722	34.823	64.473	37.403	29.126
5. Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	10.601	12.348	14.191	13.577	12.604
6. Keperluan pesta dan upacara	8.440	13.802	12.580	17.361	17.835
	<b>309.963</b>	<b>348.722</b>	<b>418.515</b>	<b>406.192</b>	<b>392.800</b>

*Sumber: BFS Provinsi DIY, 2011-2015*

#### 2.4.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani. NTP DIY selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan kecenderungan meningkat, di mana tahun 2010 tercatat sebesar 107,84 dan kemudian menjadi 116,89 pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014, NTP menurun menjadi 102,26.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2011-2015

Gambar 2.91 Nilai Tukar Petani DIY, 2010-2014

#### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan daya saing daerah adalah aspek fasilitas kewilayahan dan infrastruktur.

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.

2. Modal alamiah baik berupa kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
3. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah yang berfokus pada fasilitas wilayah/infrastruktur terkait dengan pembangunan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijabarkan dalam:

1. Aksesibilitas Daerah;
2. Penataan Wilayah;
3. Fasilitas Bank dan Non Bank;
4. Ketersediaan Air Minum;
5. Fasilitas Listrik;

### **Aksesibilitas Daerah**

Infrastruktur merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Ketersediaan secara kuantitas dan kualitas infrastruktur sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di suatu daerah sehingga berpengaruh juga terhadap daya saing suatu wilayah. Infrastruktur kunci dalam meningkatkan daya saing adalah infrastruktur transportasi terutama kondisi dan jaringan jalan, pelabuhan dan bandar udara. Kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi dapat mencerminkan kelancaran mobilitas orang dan barang di wilayah tersebut.

Permasalahan transportasi perkotaan umumnya meliputi kemacetan lalu lintas, parkir, angkutan umum, polusi dan masalah ketertiban lalu lintas. Kemacetan lalu lintas akan selalu menimbulkan dampak negatif, baik terhadap pengemudinya sendiri maupun ditinjau dari segi ekonomi dan lingkungan. Masalah transportasi perkotaan yang lain adalah masalah parkir. Masalah ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja. Masalah lain yang tak kalah pentingnya ialah fasilitas angkutan umum. Angkutan umum perkotaan, yang saat ini didominasi oleh angkutan bus masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang efisien.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi yang mempunyai daya tarik wisata cukup tinggi akan menarik banyaknya pengunjung di pusat-pusat wisata dan pusat kota (Yogyakarta). Tidak dipungkiri di lain sisi, Yogyakarta sebagai kota pendidikan akan tetap dibanjiri oleh penduduk pendatang karena daya tariknya. Konsekuensi dari semua itu adalah bahwa kota menjadi tempat dengan pergerakan orang dan kendaraan makin menjadi sulit dan mahal.

Untuk mendukung konektivitas antar wilayah dalam rangka pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting. Saat ini di DIY telah terbangun jaringan Jalan Provinsi sepanjang 619,34 Km dan jembatan sejumlah 225 buah sepanjang 4.557 m. Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan pada akhir tahun 2015 diperoleh data bahwa jalan Provinsi dalam kondisi mantap sepanjang 457,99 km atau 73,95%. Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2015 disajikan dalam tabel

**Tabel 2.116 Kondisi Jalan di DIY**

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	57,99	73,95	Baik	233,90	37,77
				Sedang	224,09	36,18
2	Tidak Mantap	161,35	26,05	Rusak Ringan	141,69	22,88
				Rusak Berat	19,66	3,17
<b>JUMLAH</b>		<b>619,34</b>	<b>100,00</b>	<b>Jumlah</b>	<b>619,34</b>	<b>100,00</b>

## Penataan Wilayah

### A. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karenanya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang sangat diperlukan guna mewujudkan tata kelola ruang yang baik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang hingga akhir tahun 2015 diketahui kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY sebesar 69,83 %,capaian tersebut dibawah target yang ditetapkan sebesar 70 % . Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan dari sawah ke permukiman, sehingga perlu ditetapkannya lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) lengkap dengan Peraturan Zonasi (PZ) yang dapat digunakan sebagai acuan operasionalisasi Rencana Tata Ruang dan acuan perijinan.

### B. Luas wilayah produktif

Dilihat dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sehingga untuk tercapainya tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan pengendalian dalam

pemanfaatan wilayah produktif secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Berikut data luas wilayah produktif menurut Dinas PUP&ESDM per Kabupaten / Kota di DIY.

**Tabel 2.117 Luas Wilayah Produktif (Ha)**

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)		
	Luas wilayah budidaya (Ha)	Luas wilayah produktif (Ha)	Rasio (%)
Kabupaten Kulon Progo	37,685.23	24,433.41	64.84
Kabupaten Bantul	49,809.89	29,093.00	58.41
Kabupaten Gunungkidul	25,419.00	139,471.00	18.23
Kabupaten Sleman	24,889.61	56,218.16	44.27
Kota Yogyakarta	2,549.60	2,843.42	89.67

### Ketersediaan Air Minum

Peningkatan kebutuhan air minum akibat pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan aspek lainnya di DIY menyebabkan kebutuhan air baku untuk air minum diproyeksikan sebesar 6.998 L/det hingga tahun 2030. Cakupan pelayanan air minum D.I. Yogyakarta pada tahun 2012 sudah mencapai 72,78% dengan proporsi 75,98% di perkotaan dan 70,58% di perdesaan. Di sisi lain pertumbuhan penduduk perkotaan akan semakin meningkat pada lima tahun mendatang, yang berdampak pada semakin besarnya tingkat kebutuhan pelayanan air minum dan keterbatasan ketersediaan air baku untuk air minum. Oleh karena itu perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan provinsi di dalam penyediaan air minum adalah dalam hal Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota. Beberapa langkah strategis sudah dipersiapkan Pemerintah Daerah DIY dalam rangka memenuhi kebutuhan cakupan dan peningkatan kualitas air minum. Kewenangan Pemerintah Daerah DIY tertuang dalam rencana spam regional untuk melayani kawasan perkotaan, kawasan strategis provinsi dan kawasan industry antara lain :

1. SPAM regional kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY); kota yogyakarta, kabupaten sleman dan kabupaten bantul (kartamantul), kapasitas 700 L/DT;
2. SPAM regional kapet kulonprogo (bandara; pelabuhan; pasir besi) – kawasan industry pajangan, kabupaten bantul, kapasitas 1.400 l/dt;

3. SPAM regional system banyusoco/sungaioyo; pelayanan wilayah tenggara kabupaten bantul dan gunung kidul bagian barat, kapasitas 100 l/dt;
4. SPAM regional system sungai bawah tanah gunung kidul; pelayanan wilayah selatan gunung kidul, bantul utara, dan sleman selatan, kapasitas 300 l/dt.

### **Pengelolaan Persampahan**

Permasalahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah akhir-akhir ini telah mengemuka secara nasional, hal tersebut menunjukkan tingkat keterpurukan masalah penanganan sampah. Tanpa adanya komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari para pelaksana pembangunan bidang persampahan, kondisi demikian dikhawatirkan akan menghambat pembangunan. Persoalan TPA sampah pada dewasa ini terletak pada masalah pengelolaannya diluar masalah infrastruktur tentunya.

Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan persampahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dalam hal ini adalah Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi sebagian dari Kabupaten Sleman, Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta, dan sebagian Wilayah Kabupaten Bantul.

Pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dilayani oleh TPA Piyungan yang umur rencananya berakhir pada tahun 2015. Berakhirnya umur rencana TPA Piyungan tentunya akan membawa dampak yang sangat merugikan dalam proses pembangunan. Pada tahun 2015 untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan perluasan TPA Piyungan seluas 2,5 Ha. Akan tetapi Pemda DIY dalam mengatasi permasalahan persampahan tidak hanya dengan menambah kapasitas infrastrukturnya. Beberapa hal yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan antara lain melalui teknik pengelolaan sampah perkotaan SNI 19-2454-1991 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah ( Balitbang ) pewadahan sampai tahap pembuangan akhir sudah terpadu.

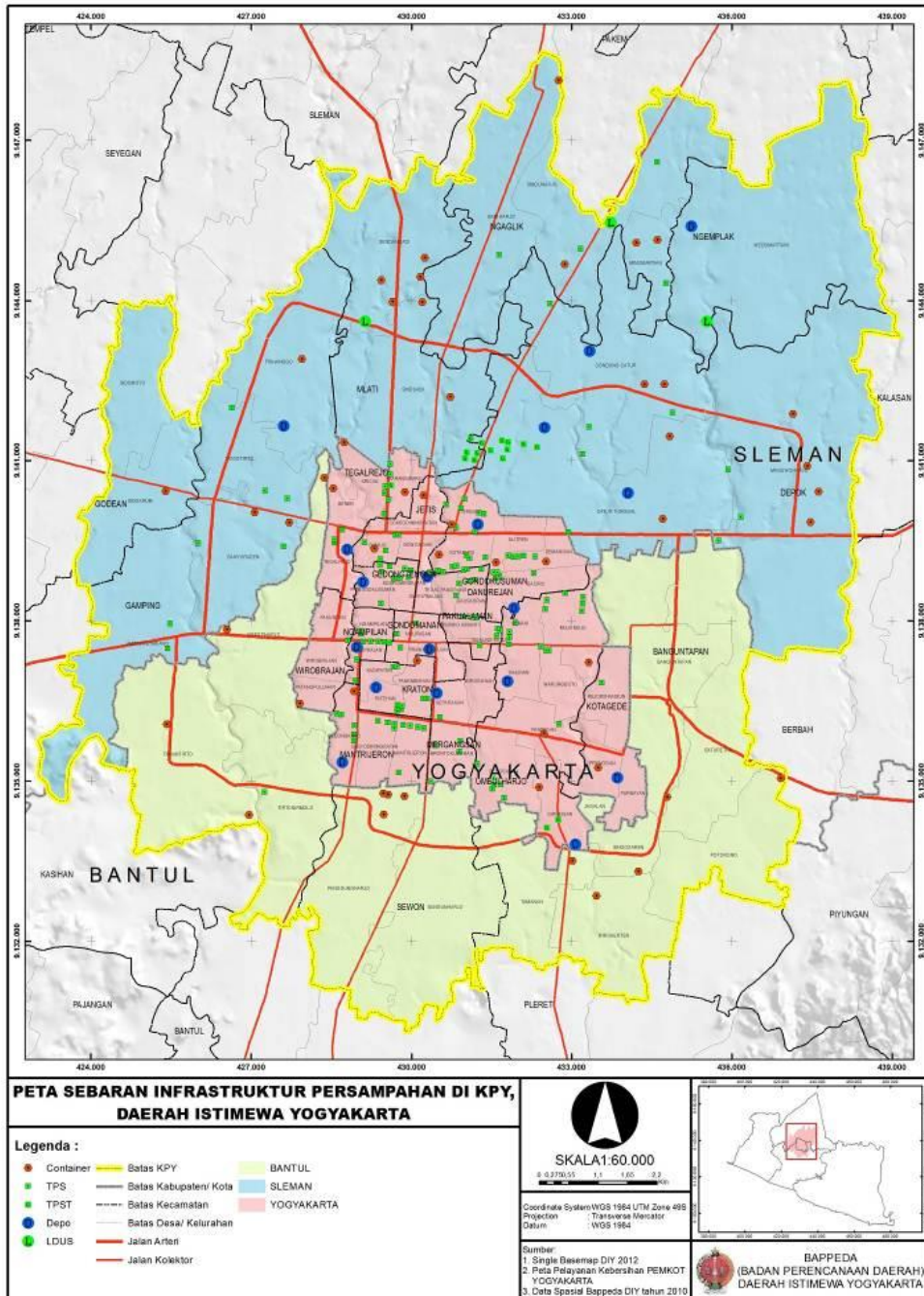
Teknik operasional persampahan meliputi pewadahan sampah, penumpukan sampah, pemindahan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir. Pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA. Tujuan Pewadahan yaitu (1) untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga tidak berdampak buruk kepada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan estetika (2) memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpul sampah.



Tabel 2.118 Data Infrastruktur Persampahan Per Wilayah

KABUPATEN	JENIS	KAPASITAS (m <sup>3</sup> )	JUMLAH INFRASTRUKTUR
BANTUL	Container	78	13
BANTUL	TPS	24	1
BANTUL Total		102	14
SLEMAN	Container	132	22
SLEMAN	Depo	800	5
SLEMAN	LDUS	72	3
SLEMAN	TPS	435,24	19
SLEMAN	TPST	156	13
SLEMAN Total		1595,24	62
YOGYAKARTA	Container	96	16
YOGYAKARTA	Depo	1300	13
YOGYAKARTA	TPS	438,48	123
YOGYAKARTA	TPST	45	4
YOGYAKARTA Total		1879,48	156
<b>Grand Total</b>		<b>3576,72</b>	<b>232</b>

Sumber : BAPPEDA DIY 2014

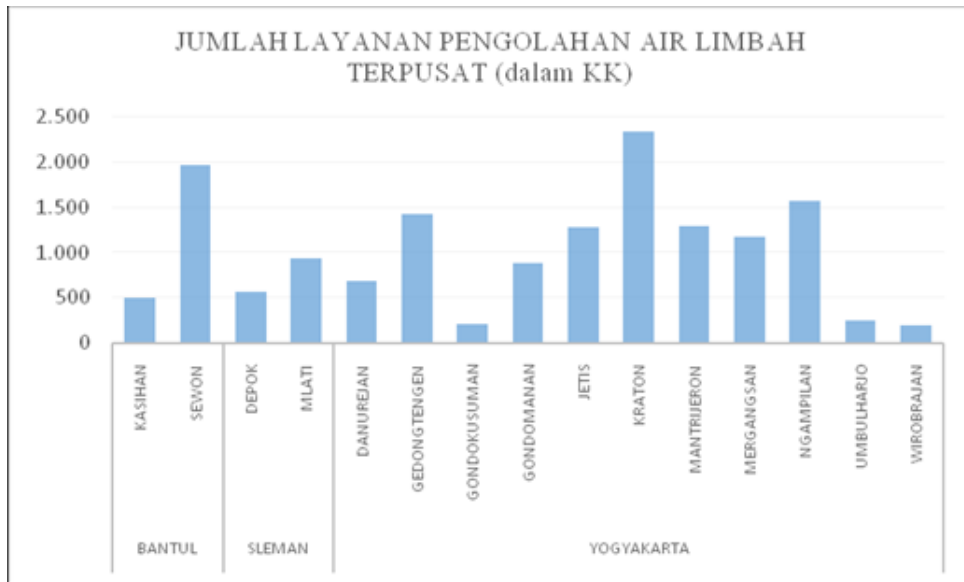


Gambar 2.92 Peta Sebaran Infrastruktur Persampahan KPY

**Layanan Air Limbah**

Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat atau Off-site adalah suatu sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah. Diterapkan untuk penduduk yang berada pada wilayah padat dan secara teknis bisa dilayani oleh sistem terpusat kota. Pengolahan limbah terpusat merupakan sistem pengolahan yang menggunakan jaringan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari masing masing rumah penduduk dan kemudian dialirkan ke IPAL. Pengolahan air limbah dengan sistem terpusat terdiri dari sambungan rumah tangga dan non rumah tangga, jaringan pengumpul, sistem penggelontor, dan jaringan perpipaan yang mengalirkan limbah menuju IPAL Sewon Bantul.

Pelayanan pengelolaan limbah sistem terpusat di KPY sampai tahun 2014 sudah melayani 15.309 KK, dengan distribusi di Kabupaten Bantul sebesar 2.485 KK, Kabupaten Sleman sebesar 1.520 KK, dan Kota Yogyakarta sebesar 11.304 KK. Cakupan layanan infrastruktur limbah sistem terpusat per kabupaten/kota, kecamatan dan desa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 2.93** Jumlah Layanan Pengolahan Air Limbah Terpusat per Kecamatan

### Rasio Elektrifikasi

Ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan provinsi di dalam penyediaan ketenagalistrikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. Pada akhir tahun 2014, pencapaian rasio elektrifikasi di DIY adalah sebesar 82,70%. Sedangkan realisasi rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2015 sebesar 87,49%, sehingga selama tahun 2015 terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 4,79% atau penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 51.992 RT, yang dicapai melalui :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan APBD DIY tahun 2015, sebanyak 1500 RT;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten tahun 2015, sebanyak 31 RT;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan APBN 2015, sebanyak 2.257 RT;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gunungkidul, sebanyak 49 RT;
- e. Dari dana Non PLN dan swadaya masyarakat, sebanyak 48.155 RT.

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### 2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menjadi ukuran untuk mendeskripsikan terjadinya ketimpangan kehidupan sosial di masyarakat dan merupakan fenomena sosial masyarakat yang memerlukan penanganan serius. Suatu daerah dengan angka kriminalitas tinggi akan menanggung *opportunity cost* (biaya peluang) berupa penurunan minat investasi atau penurunan peluang usaha. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi akan menanggung *opportunity cost* yang berasal dari terganggu/

terhambatnya keleluasaan aktivitasnya karena timbulnya rasa was-was/ketakutan terhadap tindak kejahatan. Bagi dunia usaha dan kepentingan investasi, tingkat kriminalitas tinggi akan mendorong sektor bisnis meningkatkan biaya keamanan untuk mengamankan aset, dan sumber daya manusia-nya dari gangguan keamanan. Biaya tersebut akan menimbulkan *opportunity cost* akibat menurunnya permintaan produk karena harga penawaran suatu produk menjadi lebih tinggi (Sulistyo, 2014).

Untuk menangani persoalan tersebut, Pemerintah Daerah berupaya menciptakan upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas sebagai suatu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Rasa aman, ketertiban umum, dan penanggulangan kriminalitas akan menjamin pemerintahan di daerah terselenggara dengan baik. Adapun jumlah dan ragam tindak kejahatan di DIY dapat dipaparkan sebagai berikut,

**Tabel 2.119 Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kasus di DIY Tahun 2010-2014**

No	Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah kasus narkoba	266	262	257	336	389
2	Jumlah kasus pembunuhan	14	10	9	12	10
3	Jumlah kejahatan seksual	18	13	20	21	21
4	Jumlah kasus penganiayaan (ringan-berat)	579	536	461	442	499
5	Jumlah kasus pencurian (curat, curanmor, curas, pencurian ringan-biasa)	3.902	3.042	2.446	2460	2183
6	Jumlah kasus penipuan	1.428	1.301	1.364	1.403	1296
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	5	6	4	3	1
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	3.719	3.072	4.561	4.677	4399

No	Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013	2014
9	Jumlah penduduk	3.457.491	3.487.325	3.514.762	3.594.854	3.637.116
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,18	0,15	0,13	0,13	0,12

Jumlah kasus kriminal meningkat pada 2012 dan 2013, namun kemudian kembali turun pada tahun 2014. Dalam lima tahun terakhir kasus kejahatan narkoba cenderung meningkat. Proporsi kejahatan narkoba hanya 5,16% (2013) dibandingkan perkara penipuan - curang sebanyak 21,54 persen, disusul oleh perkara curat 13,39 persen, curanmor 11,41 persen, pencurian ringan 10,30 persen, dan penganiayaan ringan 6,11 persen. Namun demikian kejahatan narkoba perlu mendapat perhatian karena mengancam keberlangsungan generasi muda penerus bangsa.

Dalam temuan riset Sulisty (2014: h.101), tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Sehingga keberhasilan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan akan berdampak terhadap penurunan tingkat kriminalitas di Indonesia. Termasuk halnya dengan Pemda DIY secara kolektif perlu melanjutkan dan meningkatkan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung penurunan angka kriminalitas di DIY. Selain itu Pemda DIY dapat meningkatkan proporsi anggaran belanja Pemda untuk fungsi ketertiban dan ketentraman dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas. Karena peningkatan proporsi anggaran belanja pemerintah daerah provinsi untuk fungsi ketertiban dan ketentraman berpengaruh negatif terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia (Sulistyo,2014: h.101). Pemda DIY perlu dukungan dari Pemerintah dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dalam menekan angka kriminalitas dengan upaya peningkatan persentase personel polisi aktif dibanding jumlah penduduk sesuai standar PBB yakni dengan rasio 1:400 atau setara dengan 0,250 persen. Secara umum rasio Polisi di Indonesia (2011) masih berada pada rasio 1:648 setara dengan 0,1543 persen (Sulistyo,2014: h.101).

#### 2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan ekspresi hak kebebasan berpendapat setiap warga yang dilindungi oleh Negara dan dijamin oleh Undang-Undang dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa (UUD 1945 pasal 28 E Ayat 3; UU 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat(2)). Pasca reformasi 1998, aksi unjuk rasa/demonstrasi dalam kehidupan sosial politik Indonesia

dipandang sebagai hal yang lumrah sebagai cerminan masyarakat modern yang demokratis. Adanya perbedaan pendapat/ perselisihan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik tidak jarang berakhir dengan aksi demonstrasi terutama dari pihak yang merasa dalam posisi yang lemah atau kalah (Saputro, 2015).

Demonstrasi dapat menjadi alat kontrol kepada Pemerintah/ kekuasaan dan penyeimbang terhadap praktik tata kelola pemerintahan serta tata kelola usaha/bisnis yang dijalankan oleh sektor swasta. Meskipun demikian demonstrasi bukan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa/ persoalan. Terlebih lagi apabila unjuk rasa tersebut dipergunakan sebagai alat politik atau alat tunggangan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan individu atau kelompok kemudian memprovokasi massa, mendorong tindakan yang anarkis, menebar suatu fitnah, permusuhan, serta merendahkan wibawa pemerintah di mata rakyat dan lain sebagainya (Rety, 2013) . Unjuk rasa yang anarkis tentunya akan menimbulkan kerugian masyarakat secara luas.

Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di DIY relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar lain di Indonesia. Penanganan aksi unjuk rasa di DIY (dalam kasus di Kota Yogyakarta) memiliki dampak positif terhadap stabilitas wilayah, yaitu tetap terselenggaranya aktivitas berbagai macam aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari sudut pandang tidak terjadinya bentrokan antara polisi, masyarakat dan pengunjung rasa (Saputro, 2015). Dalam kurun 2011-2015 hanya terdapat 4 (1,4%) unjuk rasa anarkis dari 283 unjuk rasa yang tercatat sampai dengan tahun 2015. Dari data yang ada unjuk rasa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar berlangsung damai.

**Tabel 2.120 Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2011-2015**

Tahun	Jumlah Unjuk Rasa
2011	267
2012	318
2013	244
2014	283
2015	204*

\* angka sementara

Sumber: Sumber: SIPD DIY, 2013 dan Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah, DIY dalam Aplikasi Dataku, 2015

Jumlah unjuk rasa yang terjadi di DIY dari kurun waktu 2009–2015 berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan, terutama pada tahun 2015 (data sementara). Unjuk rasa di DIY di dominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi dengan proporsi rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 74,6%. Sementara itu unjuk rasa di bidang politik mempunyai proporsi rata-rata 6,42% selama 5 tahun. Namun pada tahun 2013 terjadi pergeseran dalam proporsi unjuk rasa dimana terjadi penurunan proporsi cukup signifikan dalam unjuk rasa di bidang politik dan ekonomi masing-masing menjadi sebesar 2,23% dan 49,55%. Sementara di sisi lain, proporsi unjuk rasa di bidang lainnya meningkat signifikan menjadi 48,21% pada tahun 2013.

### 2.4.3.3 Lama Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Upaya dilakukan Pemerintah Daerah DIY melalui Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikelola oleh Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Daerah DIY. Selain prosedur perizinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada.

Tabel 2.121 Rata-rata Lama Pengurusan Izin Tahun 2014

Jenis Izin usaha	Rata-rata Lama Pengurusan Izin (hari)
Izin Prinsip	3
Izin Usaha	7
Izin Kawasan Industri	14
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kapasitas 2000-6000 m <sup>3</sup> /tahun	30
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya	30
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan	30
Izin Usaha Pertambangan	30
Izin Usaha Pengolahan/Pengawetan Ikan Laut	7
Izin pendirian koperasi primer dan sekunder	90

Sumber: BKPM DIY



Dengan rata-rata lama pengurusan izin (hari) tersebut tercapai target penyelesaian Jumlah Surat Persetujuan/ Ijin Prinsip sebesar 354 ijin (2013) dan 379 ijin (2014). Capaian tahun 2014 tersebut melebihi target (109,22%) dari target 347 ijin (LKPJ 2014, 2015).

#### 2.4.3.4 Pengeanaan Pajak Daerah

- 1) Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui pajak daerah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah terdiri atas 16 jenis, yang meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota. Adapun, Pajak Daerah yang menjadi kontributor PAD DIY adalah: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, obyek retribusi terdiri atas: (1) Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi Jasa Usaha; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu.

#### 2.4.3.5 Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Sejalan dengan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan pengaturan melalui regulasi yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Regulasi dalam bentuk Perda tersebut haruslah mengandung prinsip bertanggungjawab, transparan, serta akuntabel. Perda tersebut juga diharapkan dapat melindungi semua pemangku kepentingan yaitu, Pemda, dunia usaha, masyarakat, serta lingkungan. Jumlah Perda DIY yang mendukung iklim usaha dalam kurun waktu 2008 hingga 2015 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.122 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di DIY Tahun 2014**

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Perda terkait perizinan	0	3	2	1	1	--

*Sumber: Biro Hukum Setda DIY*

Dari 10 peraturan daerah yang dihasilkan pada tahun 2014 terdapat 1 peraturan daerah terkait perizinan yakni Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

#### 2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

##### a. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti : motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku.

Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Perkembangan angkatan kerja di DIY berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.123 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
< SD	719.214	632.127	668.553	643.959	650.195
SMP	364.612	332.781	355.630	339.721	370.007
SMTA	570.088	653.353	661.685	651.291	683.232
Diploma	77.298	79.403	69.710	77.796	86.478
Universitas	151.084	175.248	189.280	198.192	233.549

*Sumber : Pusdatinaker, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2015*

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa struktur angkatan kerja di DIY didominasi oleh lulusan SMTA dan tidak tamat SD. Sedangkan lulusan DI/DII/DIII dan universitas baru mencapai sekitar 15,82% di tahun 2014. Sehingga program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti pelatihan kerja dan kewirausahaan mutlak diperlukan agar angkatan kerja di DIY mampu bersaing di dunia kerja.

#### **b. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

**Tabel 2.124 Jumlah Penduduk DIY menurut dan Angka Ketergantungan di DIY, Tahun 2014**

Uraian	Jumlah
usia 0-14 tahun	795.300
usia 15-64 tahun	2.507.200
usia 65 tahun keatas	334.600
Total	3.637.100
Rasio Ketergantungan	45,07

*Sumber : BPS DIY, 2015*

Pada tahun 2014, angka Rasio Ketergantungan DIY sebesar 45,07 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 orang penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan DIY tergolong tinggi hal ini terkait dengan semakin tingginya capaian angka harapan hidup dan peningkatan *Total Fertility Rate* (TFR) di DIY. Peningkatan jumlah penduduk yang belum dan tidak produktif di DIY diikuti oleh Pemda DIY dengan beberapa kebijakan dan program terkait pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup.

### 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Kondisi ideal bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah dilaksanakan secara sinergis baik Antara tingkatan maupun antar tahapan. Pertahanan pembangunan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) direncanakan dalam RPJMD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode lima tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui program/kegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Secara umum faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah adanya beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah 100% dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) penting untuk menjadi acuan didalam pelaksanaan program/kegiatan,

- b) Indikator keluaran yang berupa jumlah orang/volume harus didukung dengan data yang akurat dan didukung dengan analisis tren.

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pengawalan pelaksanaan supaya tidak melampaui tahapan waktu kritis pengumuman lelang dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya gagal lelang.

Tabel 2.125 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
1	WAJIB												
1	1	Pendidikan											
	5	Program Pendidikan Anak Usia Dini*)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	88	96	84	99.21	118.11	86	86	100	Disdikpora
	6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	Persen	86.56	84.34	84.92	NA	NA	85.75	85.75	100	Disdikpora
	7	Program Pendidikan Menengah*)	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	Persen	80.63	80.71	79.71	99.93	125.37	80.17	80.17	100	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12

	8	Program Pendidikan Non Formal dan Informal*)	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	orang	10000	7000	8000	8000	100	9000	9000	100	Disdikpora
	9	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	Persen	72.11	80.99	71.22	99.77	140.09	71.66	71.66	100	Disdikpora
	10	Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar	Persen	Tidak ditemukan	0	0						Disdikpora
	11	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	Persen	75.17	83.13	74.71	NA	NA	74.94	74.94	100	Disdikpora
	12	Program Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan aksesibilitas Pendidikan Tinggi	Persen	59	60	58	67.02	115.55	58.5	58.5	100	Disdikpora

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
13	Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka*)	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Persen	60	70	50	100	200	55	55	100	Disdikpora
14	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar	peserta didik	1977	1892	1904	NA	NA	1942	1942	100	Disdikpora
15	Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya*)	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Persen	40	5	10	14.16	141.6	20	20	100	Disdikpora
16	Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	Persen	40	5	10	27.78	277.8	20	20	100	Disdikpora



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	17	Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan	Persen	45	-	35	48.82	139.49	40	40	100	Disdikpora
1	2	Kesehatan										
	5	Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Persen	NA	99.96	99	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
	6	Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan	Persen		96	96						Dinas Kesehatan
	7	Program Pelatihan Kesehatan dan Peningkatan Mutu Diklat Kesehatan	Persen	87	77.35	79	84.77	107.304	84	84	100	Dinas Kesehatan

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	8	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	Persen	54.31	57						Dinas Kesehatan	
	9	Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase cakupan penjangkaran kesehatan siswa sekolah	Persen	99.69	98						Dinas Kesehatan	
	10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*)	Persentase Rumah Tangga ber FHBS	Persen	52.4	48						Dinas Kesehatan	
	11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat*)	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	Persen	7.91	8.7						Dinas Kesehatan	
	12	Program Pencegahan dan pengendalian Masyarakat*)	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	Persen	73.44	94.92	64.44	69.55	107.93	65.68	65.68	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	13	<b>Program Pembinaan Lansia</b>	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada Usila (FSU)	Persen	70.25	80						Dinas Kesehatan	
	14	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	Persen	100	100						Dinas Kesehatan	
	15	<b>Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita</b>	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	Persen	100	99.63	98.5	99.64	101.157	100	100	100	Dinas Kesehatan
	16	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapeljamkesos</b>	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapeljamkesos	Persen	60.8	69.6							Dinas Kesehatan

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Ghrasia	Persentase penderita jiwa yang dirawat di RSJ Ghrasia	Persen	9.13	53.66	8.62	8.64	100.23	8.8	8.8	100	RSJ Ghrasia
18	Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	Persen		43.69	41.5						Dinas Kesehatan
19	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	Persen		100	100						Dinas Kesehatan
20	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	Persen		94.53	100						Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12		
1	3		Pekerjaan Umum											
	5		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	74.8	73.7	73.24	73.24	100	74.2	74.2	100	Dinas PUPESDM
	6		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,											
	7		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPESDM
	8		Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Persentase Penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	Persen	63.75	32.55	32.85	32.85	100	54.04	54.04	100	Dinas PUPESDM

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	9	Program Pemngembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi	Persen	82.5	79.74	79.5	79.5	100	81	81	100	Dinas PUPESDM
	10	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Penambahan penyediaan air baku	l/det	2100	1018.53	1200	1200	100	1600	1600	100	Dinas PUPESDM
	11	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya											
	12	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Persentase Penduduk berakses air minum	Persen		77.93	80.85						Dinas PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	13	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	SR	18441	17300						Dinas PUPESDM
	14	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	Persen	64.75	60						Dinas PUPESDM
	15	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	Persen	76	65						Dinas PUPESDM

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	16	<b>Program Pengembangan Kawasan Perdesaan</b>	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	Persen	52.8	51						Dinas PUPESDM
	17	<b>Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan Desa Potensi</b>	Dukungan Infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	Persen	40	46						Dinas PUPESDM
	18	<b>Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>	Pengurangan jumlah titik genangan	Persen	49.2	45.9						Dinas PUPESDM



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	19	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen	84	84						Dinas PUPESDM
	20	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	titik	72	80						Dinas PUPESDM
	21	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	Persen	81.25	87.5						Dinas PUPESDM
	22	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	Persen	94.94	82.5						Dinas PUPESDM

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	23	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Persen		79.65	80						Dinas PUPESDM
1	4	Perumahan										
	1	Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Persen	51	39.25	40	40	100	46	46	100	DINAS PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	2	Program pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persen	64	64.61	54	54	100	59	59	100	DINAS PUPESDM
	3	Program Pengembangan Perumahan	Persen	6.75	7.49	7	7	100	7	7	100	DINAS PUPESDM
1	5	Penataan Ruang										
	1	Program Perencanaan Tata Ruang	kawasan strategis	19	14	16	16	100	18	18	100	DINAS PUPESDM
	2	Program Pemanfaatan Ruang	Persen	NA	64.21	70	70	100	NA	NA	NA	DINAS PUPESDM

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Peningkatan pengaturan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi (nama indikator baru)	Persen	90	NA	NA	NA	NA	80	80	100	DINAS PUPESDM
	3	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan ruang</b>	Persen	NA	66.2	60	60	100	NA	NA	NA	DINAS PUPESDM
		Tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di DIY (indikator baru)	Persen	86	NA	NA	NA	NA	71	71	100	DINAS PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
1	6	Perencanaan Pembangunan										
	5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen		-	17.04						BAPPEDA
	6	Program Perencanaan Pembangunan pemerintahan	Persen	2.62	NA	0.81	5.63	695.06	3.52	3.52	100	BAPPEDA

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
7	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	Persen	1.09	NA	4.06	2.35	57.88	1.47	1.47	100	BAPPEDA
8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	Persen	3.05	NA	10.55	6.57	62.27	4.11	4.11	100	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	9	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana</b>	Persen	1.31	NA	1.62	2.35	145.06	1.76	1.76	100	BAPPEDA
	10	<b>Program Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	Persen	NA	66.67	84	83.56	99.47	NA	NA	NA	BAPPEDA

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan (indikator baru)	Persen	79.41	NA	NA	NA	NA	77	77	100	BAPPEDA
	11	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	Persen	NA	76.38	80	NA	NA	NA	NA	NA	BAPPEDA
1	7	<b>Perhubungan</b>										
	5	<b>Program Peningkatan manajemen dan Rekayasa Lalulintas</b>	Persen	42	16.8	25.2	25.2	100	33.6	33.6	100	DISHUBKOMINFO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	6	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	Persen	87	82.68	84	NA	NA	85	85	100	DISHUBKOMINFO
	7	Program Pengaturan Sistem Simbang Bersinyal	Pengendalian sistem simbang bersinyal di perkotaan Yogyakarta	Persen	60	39,47	40	NA	NA	50	50	100	DISHUBKOMINFO
	8	Program Peningkatan Pelayanan angkutan	Load Factor penumpang angkutan umum perkotaan Yogyakarta	Persen	NA	37.82	38.57	NA	NA	NA	NA	NA	DISHUBKOMINFO
			Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan (Indikator baru)	Persen	10.145	NA	0.49	0.49	100	9.75	9.75	100	

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi di DIY	Persen	82.5	40	44.17	44.17	100	65.83	65.83	100	DISHUBKOMINFO
	10	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan Pelayanan transportasi antar moda	Persen	50	36.44	40	NA	NA	45	45	100	DISHUBKOMINFO
	11	Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	DISHUBKOMINFO
	12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	Persen	100	100	100	NA	NA	100	100	100	DISHUBKOMINFO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	Persen	100	100	100	NA	NA	100	100	100	DISHUBKOMINFO
1	8	Lingkungan Hidup											
	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Persen	NA	6.15	9.43	9.43	100	NA	NA	NA	BLH
			Persentase Peningkatan kualitas air	Persen	18.69	NA	NA	NA	NA	14.95	14.95	100	BLH

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH	Persentase peningkatan akses informasi sumber daya air dan lingkungan hidup	Persen	11	NA	25	NA	NA	10	10	100	BLH
7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	Persen	NA	NA	7	7	100	NA	NA	NA	BLH
		Persentase Peningkatan kualitas udara (Indikator Baru)	Persen	11.26	NA	NA	NA	NA	9.01	9.01	100	
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	unit usaha	NA	370	380	NA	NA	NA	NA	NA	BLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Jumlah Penambahan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri	Kelompok	60	NA	NA	NA	NA	50	50	100	
	9	Program Pengelolaan RTH	Persen	NA	16.94	35	28.09	80.26				BLH
		Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan	Persen	58.33	NA	NA	NA	NA	46.47	46.47	100	
	10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Ha		9	27	27	100				BLH

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
1	9		Pertanahan	Luas Lahan Yang Terkonservasi	Ha	45	NA	NA	NA	36	36	100	
		1	Program Perbaikan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah	Persentase Kecamatan yang memiliki sistem informasi terpadu pertanahan terpadu	Persen	12.82	60						Biro Tata Pemerintahan
		2	Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	Persen	28	25						Biro Tata Pemerintahan
		3	Program Pengembangan Sistem informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	Bidang	9168	9653						Biro Tata Pemerintahan
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	1	Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang ber-KTP (NIK)	Persen	94.91	89						Biro Tata Pemerintahan
1	1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	Orang	-	644						BPPM
	6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	Anak	-	329						BPPM

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*)	Persen		-	36.2						BPPM
	8	Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Persen		-	96.66						BPPM
	9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen	100	-	75.14	75.28	100.19	87.64	87.64	100	BPPM



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan	Persen		-	-						BPPM
	11	Program Pendidikan politik bagi Perempuan	Persen		-	11.06						BPPM
1	1 2	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
	1	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*)	Persen		79.85	71.72						BPPM

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RRPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RRPD Tahun 2015	Realisasi RRPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	2	Program Kesehatan reproduksi remaja	Persentase penurunan pernikahan usia di bawah 20 tahun	Persen	0.37	0.51						BPPM
	3	Program Peningkatan kesejahteraan Keluarga	Persentase tahapan keluarga sejahtera	Persen	45.24	44.1						BPPM
	4	Program Pengembangan Bina Keluarga	Persentase lembaga bina keluarga berkategori percontohan	Persen	23.28	23						BPPM
	5	Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR	Terlaksananya program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persen	0	0						BPPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	6	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	Persen		0	0						BPPM
1	13	Sosial										
	5	Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial *)	Persen		-	8.34						Dinas Sosial
	6	Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia terlantar	Persen		-	8.51						Dinas Sosial

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	7	Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	Persen	-	9.34						Dinas Sosial
	8	Program Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Korban tindak Kekerasan, Pekerja Migran bermasalah Sosial psikologis, dan korban Trafficking	Persentase Keberfungsian sosial bagi korban tindak kekerasan, dan pekerjaringan bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial	Persen	-	6.34						Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	9	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	Persen		-	5.15						Dinas Sosial
	10	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya)	Persen		-	4.57						Dinas Sosial

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
11	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS lainnya*)	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	Persen		-	10.84						Dinas Sosial
12	Program Pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS*)	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	Persen		-	67.5						Dinas Sosial
13	Program Pembinaan Pelestarian Nilai-NilaiKepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial *)	Persentase PSKS terbina, dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	Persen		-	55						Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	14	Program Pembinaan Panti Sosial/jompo	Persentase Pelayanan panti asuhan/jompo sesuai setandar pelayanan	Persen	-	2.28						Dinas Sosial
	15	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	-	39.72						Dinas Sosial
	16	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pembinaan anak terlantar	Persen	0	0						Dinas Sosial
	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persen	0	0						Dinas Sosial

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	1 4	Ketenagakerjaan										
	1	Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat'	%	26.66	25						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	Program Peningkatan Kesempatan kerja	presentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	%	10.51	9.5						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	%		0	0						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan	%		62.23	50						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5	Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%		100	65						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
6	Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	%		17	15.6						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Koperasi dan Usaha kecil Menengah											
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UKM	unit usaha		220703	229,467						Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	koperasi		2,269	2,351						Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	UMKM	172	180						Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
1	6	Penanaman Modal										
	1	Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rp. (000)	-	10,467,183,000						BKPM
	2	Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi	Jumlah Surat Persetujuan/Ijin Prinsip	ijin	-	354						BKPM
1	7	Kebudayaan										
	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase organisasi budaya berkategori maju	%	1.11	1.24						Dinas kebudayaan

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	%	-	50.29						Dinas kebudayaan
	3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	13	15						Dinas kebudayaan
	4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase implementasi hasil kesepakatan	%	7	15						Dinas kebudayaan
	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	%	29	40						Dinas kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	18	Kepemudaan dan Olahraga											
	1	Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda	Dokumen pembangunan kepemudaan	%	0	0						Dinas Pendidikan dan Olahraga	
	2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	sentra	15	12	13	NA	NA	14	14	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda	Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda	kelompok	405	345	365	NA	NA	385	385	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
	4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	orang	2400	2.100	2200	NA	NA	2300	2300	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga	%	66.67	45	58.69	NA	NA	63.13	63.13	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
6	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	medali	30	23	27	NA	NA	28	28	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
7	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	organisasi	NA	39	41	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan dan Olahraga
		Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda" (Indikator Baru)	Persen	100	NA	NA	NA	NA	100	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
1 9	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi dalam Pemilu	%	100	-	73			NA	NA	NA	Badan Kesbanglinmas
		Prosentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	%	100		NA	NA	NA	100	100	100	Badan Kesbanglinmas
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah kab./Kota yang telah terbentuk Community Policing	Kab/kota	NA	-	3	3	100	NA	NA	NA	Badan Kesbanglinmas

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Skor Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY)	angka	0.15	NA	NA	NA	NA	0.17	0.17	100	Badan Kesbanglinmas
3	Program Pemeliharaan kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan kasus tindak kriminal	kasus	NA	-	948	133	185.97	NA	NA	NA	Satuan Polisi Pamong Praja



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani	%	25	NA	NA	NA	NA	20	20	100	
	4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penurunan kasus pelanggaran Perda	kasus	NA	-	250			NA	NA	NA	Satuan Polisi Pamong Praja
		Prosentase meningkatnya jumlah korban laka/musibah yang selamat	%	86.4		84.1	86.05	102.32	85.2	85.2	1	Bakesbanglinmas
	5 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Penurunan kasus pekat	kasus	NA	-	314	478	47.77	NA	NA	NA	Satuan Polisi Pamong Praja

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Peningkatan Penyakit Masyarakat yang tertangani	%	25	NA	NA	NA	NA	20	20	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	kasus	NA	-	22			NA	NA	NA	Badan Kesbanglinmas
		Penurunan aktifitas radikalisme dan separatisme	kasus	6		5.5	6.25	113.64	7	7	100	Badan Kesbanglinmas
20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah dan Kepegawaian dan Persandian										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	unit	NA	-	2			NA	NA	NA	Biro Organisasi
		Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	%	90	NA	85	87.5	102.94	87	87.5	100.575	Biro Organisasi
13	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	90	-	85	85	100	90	90	100	Biro Organisasi
2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase untuk kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	%		-	50						Biro Umum dan Protokol

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	%	NA	-	30		NA	NA	NA	Inspektorat	
			Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	%	5	NA	5	0.53	189.4	5	0.53	189.4	Inspektorat
		Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	%	90	NA	NA	NA	80	80	100	Inspektorat	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	30	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	%	NA	100			NA	NA	NA	Inspektorat
	4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	%	-	95			NA	NA	NA	Biro Umum dan Protokol
			Kelancaran, ketertiban dan keamanan Pelayanan Keprotokolan (UHP)	%	100	95	97.76	102.91	100	100	100	Biro Umum dan Protokol
	5	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase prolegda yang terselesaikan	%	85.8	95			NA	NA	NA	Sekretariat DPRD
			Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	%	100	56.14	62.75	111.77	97.5	97.5	100	Sekretariat DPRD

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	%	100	-	100	133.88	133.88	100	100	100	Biro Hukum
7	Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang dibatalkan	%		-	0						Biro Hukum
		Persentase tindak lanjut atas klarifikasi dan konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota	%	NA		100			NA	NA	NA	Biro Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Persentase Tindak lanjut atas konsultasi, evaluasi dan klarifikasi Produk hukum Kab/Kota	%	100	NA	100	133.88	133.88	100	100	100	Biro Hukum
8	Program Analisis Kebijakan Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	%	NA	-	36.45	46.52	127.64	NA	NA	NA	Biro Adm. Kesra dan Masyarakat, Biro Am. Perekonomian & SDA, Biro Adm. Pembangunan
9	Program Pencegahan Dini Bencana	Peningkatan jumlah desa tangguh	desa	70	-	40			55	55	100	BPBD
10	Program Penanggulangan Korban Bencana	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	%	NA	-	72			NA	NA	NA	BPBD

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Prosentase Kawasan Rawan Bencana yang sudah terintegrasi Sistim Peringatan Dini	%	75	NA	NA	NA	NA	50	50	100	BPBD
	<b>Program Pemulihan Pasca bencana</b>	Persentase pemulihan wilayah rawan bencana	%	10	NA	NA	NA	NA	7	7	100	BPBD
	11 <b>Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah</b>	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	%		-	11.71	13.65	116.57	NA	NA	NA	DPPKA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah	%	46.25	NA	51.31	53.11	103.51	49.18	49.18	100	DPPKA
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan PAD	%	NA	11,49 (target)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPKA
		Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	%	100	NA	100	100	100	100	100	100	DPPKA
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	%	54.46	NA	NA	NA	NA	54.03	54.03	100	DPPKA

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase capaian Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)	%	NA	NA	70	100	142.86	NA	NA	NA	DPPKA
	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD	%	NA		100	98.42	98.42	NA	NA	NA	DPPKA
	12 Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah serta Lembaga Keuangan Mikro	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	NA	26,13 (target)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	19.36		18.34			18.57	18.57	100	DPPKA
27	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kab./Kota	Peningkatan Pengelolaan Keuangan kab./Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu	%		-	100						DPPKA
14	Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	%	NA	-	25			NA	NA	NA	Badan Diklat
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai	%	70	NA	NA	NA	NA	55	55	100	Badan Diklat

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
		dengan Analisis Kebutuhan Diklat											
	15	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Kelancaran Pindah/Purna Tugas PNS	%	100	-	100		100	100	100	BKD	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda	Persentase pemenuhan kompetensi pegawai	%	71	NA	41.74	28.45	146.71	70	70	100	BKD
	31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008	%		-	100	100	100				Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	%	NA	82 (target)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BKD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemda	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	%	86.92	NA	79.03			87.15	87.15	100	BKD
	16 Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	%	75	-	65	190	292.31	70	70	100	BKPM

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
17	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kasus konflik antar daerah yang terselesaikan	%	75	-	100			70	70	100	Biro Tata Pemerintahan
18	Program Penataan Daerah Baru	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (norma standar, prosedur dan kriteria)	%	100	-	100			100	100	100	Biro Tata Pemerintahan
19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Permasalahan Desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	%	100	-	100			100	100	100	Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	20	Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Gubernur/Wagub	%	100	-	100		100	100	100	Biro Tata Pemerintahan
	21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan urusan kab/Kota dan provinsi	%		-	100					Biro Tata Pemerintahan
	22	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD terlayani tata kearsipan berbasis TI	%	100	-	100	100	100	100	100	Biro Umum, Humas dan Protokol
	23	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	%	NA	-	100	100	100	NA	NA	Biro Umum dan Protokol

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	24	<b>Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum</b>	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	%	NA	-	100		NA	NA	NA	Biro Hukum	
			Pemberian Bantuan dan Layanan Hukum	%	100	NA	NA	96	104.39	108.7395 833	100	100	Biro Hukum
	25	<b>Program Pengawasan Produk Hukum</b>	Persentase tindak lanjut atas klarifikasi dan konsultasi rancangan produk hukum Kab./Kota	%	NA	-	100		NA	NA	NA	Biro Hukum	
			Persentase Tindak lanjut atas konsultasi, evaluasi dan klarifikasi	%	100	NA	NA	100	133.88	133.88	100	100	Biro Hukum



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Produk hukum Kab/Kota										
	26	<b>Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah</b>	Persentase tindaklanjut pelaksanaan diklat atas kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar DIY	%	NA	-	100		NA	NA	NA	Badan Diklat
		Jumlah rekrutmen peserta diklat melalui pola kemitraan per tahun	orang	520	NA	740	200	27.0270 27	640	640	100	

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	Target		Realisasi
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	28	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	%	NA	-	100	100	100	NA	NA	NA	Badan Diklat, Biro Adm. Pembangunan
			Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	95	NA	NA	NA	NA	90	90	100	Biro Adm. Pemb.
	29	<b>Program Pengembangan Kehidupan Beragama</b>	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	%	NA	-	100	100	100	NA	NA	NA	Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
		Persentase kelompok masyarakat dan lembaga Keagamaan yang terlayani	%	100	NA	NA	NA	NA	100	100	100	Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan	
2		<b>Ketahanan Pangan</b>											
1		<b>Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan</b>	Jumlah desa rawan pangan	desa	14	-	53	20	162.26	18	18	100	BKPP
2		<b>Program Peningkatan Ketersediaan dan Keamanan Pangan</b>	Ketersediaan dan cadangan pangan	ton beras		-	360	360	100.00				BKPP
		<b>Program Peningkatan Ketersediaan &amp; Cadangan Pangan</b>	Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras)	Ton Setara beras	450	NA	360	360	100	405	405	100	BKPP

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	3	Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Presentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	90		80	100	125	85	100	117.65	BKPP
	4	Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan	Presentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	100	-	100	100	100	100	100	100.00	BKPP
	5	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	%	100	-	74	74	100	87	87	100	BKPP
2 2		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa	%	NA	-	37.7			NA	NA	NA	BPPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Persentase Desa yang telah membentuk badan usaha milik desa (Bumdes)	%	43.36	NA	NA	NA	NA	38.26	38.26	100	BPPM
	2	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa</b>	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	%	NA	27,96 (target)	NA		NA	NA	NA	BPPM
		Persentase Lembaga pemberdayaan masyarakat aktif	%	31.57		29.16			30.37			
	3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa</b>	Persentase profil desa sesuai standar	%		-	70					BPPM

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Persentase Desa yang memiliki profil	%	100		70			85			
	4	<b>Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	%	37	-	35		36			BPPM
	5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%		0	0					BPPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	6	Program peningkatan prasarana/sarana dan penataan administrasi pemerintahan desa	Terselenggaranya peningkatan prasarana/sarana dan penataan administrasi pemerintahan desa	%	0	0						BPPM	
	2 3	Statistik											
	1	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	%	100	-	97		98			Bappeda	
	2 4	Kearsipan											
	1	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	SOPD	NA	-	20		0	NA	NA	BPAD	
			Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DIY	SKPD	%	88.24	NA	NA	NA	73.53	73.53	100	BPAD

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	%	10	-	11			8		BPAD	
	3	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	%	30	-	20			25		BPAD	
	2 5	Komunikasi dan Informatika											
	1	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	urusan/ bidang	14	-	12	10.46	87.17	13	13	100	Dishubkominfo
	2	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY	%	100	-	80	80	100.00	90	90	100	Dishubkominfo



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12		
	3	Program Fasilitasi Pos Telekomunikasi Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik		Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	%	75	-	70	67.96	97.09	75	75	100	Dishubkominfo
	4	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT	%	100 (target)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dishubkominfo
				Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	%	100		100			100	100	100	Biro Adpem
26		Perpustakaan												
	1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan		Peningkatan Fasilitas Perpustakaan	%	76	-	85			75			BPAD

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
	2	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan desa	%	-	80						BPAD
			Persentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan	%	100	80	270.18	337.725	90	270.18	300.2	BPAD
	3	Program Pengembangan Budaya Baca	Peningkata pemustaka	%	NA	20	243.26	1216.3	NA	NA	NA	BPAD
			Peningkatan pengunjung perpustakaan	orang	934,722	NA	NA	NA	849747	849747	100	BPAD
2		Urusan Pilihan										
2	1	Pertanian										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	5	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	Persen	NA	-	1.7	0.052	3.06	NA	NA	NA	Dinas Pertanian
			Rerata NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	%	99	NA	NA	NA	NA	98.55			Dinas Pertanian
	6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	Komoditas	3	-	3	9	300	3	9	300	Dinas Pertanian
	7	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	2,208,665	-	2,356,600	2,253,821	95.64	2,203,677	2,203,677	100	Dinas Pertanian

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	8	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi pertanian hortikultura	ton	394,800	-	387,000	323,373.08	83.56	390,900	390,900	100	Dinas Pertanian
	9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi peternakan	AU	641,416	-	700,516	612,000	87.36	620,320	620,320	100	Dinas Pertanian
2	2	Kehutanan											
	5	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan	Ton	80,152	-	88,000	82,379.82	93.61	80,125	82,379.82	102.81	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	6	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	NTP sektor perkebunan	-	117	-	128	139.75	109.18	116	139.75	120.474	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis	Ha	24,000	-	26,000	25,378.25	102.39	25,000	25,000	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	8	Program Penataan Kawasan Hutan	Persentase luas hutan	Persen	27.85	-	27.63	29.94	108.36	27.77	29.94	107.814	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	9	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan produksi hasil hutan	Persen	7.37	-	5.59	5.29	94.63	6.48	6.48	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	10	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Persentase jumlah industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah dilakukan pembinaan	Persen	90	-	80	90	112.50	85	90	105.882	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase kerusakan hutan	Persen	23.77	-	29.14	7.03	175.88	26.44	7.03	173.411	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	3	Energi dan Sumber Daya Mineral											
	1	Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pencapaian rasio elektrifikasi	%	NA	-	78.6			NA	NA	NA	Dinas PUPESDM

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Rasio elektrifikasi	%	88.1		84.5			86.3			Dinas PUPESDM
	2	Program Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	SBM (000 SBM)	130.1	-	117.95			123.59			Dinas PUPESDM
	3	Program Pembinaan Pengawasan Pengendalian Pengelolaan Pendayagunaan Air Tanah	%	< 20	-	<20			< 20			Dinas PUPESDM
	4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi	%	15	-	9			12			Dinas PUPESDM
	5	Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar	%	NA	-	60			NA	NA	NA	Dinas PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Peningkatan Kinerja Pengelolaan Bahan Bakar	%	80	NA	NA	NA	NA	70	70	100	
	6	Pembinaan dan Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan	%	13	-	11			12	12	100	Dinas PUPESDM
	4	Pariwisata										
	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	orang	22,198,333	-	16,785,128	18,435,445	109.83	19,302,898	19,302,898	100	Dinas Pariwisata
	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	unit	93	-	89	88	98.88	91	91	100	Dinas Pariwisata
	3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	kelompok	96	-	86	86	100	91	91	100	Dinas Pariwisata
	4	Program Pengembangan Desa Wisata	Desa	90	-	80	80	100	85	85	100	Dinas Pariwisata

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
5	Kelautan dan Perikanan											
1	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaannya	kg/kapita/th dan kg/kapita/yh	NA	115,09 dan 101,36	15,63 dan 28,55	28.55	100	NA	NA	NA	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Ketersediaan Ikan Perkapita	kg/kap/thn	31.32	NA	28.55	28.95	101.40	29.94	29.94	100	
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	8,400	7,048.50	6,900	6,285.78	91.10	7,600	7,600	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen		302	300	304	101.33	NA	NA	NA	Dinas Kelautan dan Perikanan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
		Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen	300	302	300	304	101.33	300	300	100	
	4	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	ton	88,500	-	70,500	72,000.27	102.13	79,000	79,000	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5	<b>Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar</b>	ha	16	115.38	14	14	100.00	15	15	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	<b>program peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan</b>	rasio	106	100.58	116.89	122.34	104.66	105	105	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	7	<b>Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut</b>	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	orang dan desa terisolir	NA	-	1.530 orang dan 57 desa	1,530	100.00	NA	NA	NA	Dinas Kelautan dan Perikanan
			jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim	Orang	1890	NA	NA	NA	NA	1710	1710	100	
	8	<b>Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam</b>	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	rasio	0.17	-	0.11	1.42	1290.91	0.14	1.41	1007.14	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RRPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RRPD Tahun 2015	Realisasi RRPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12
6	Perdagangan											
1	Program Peningkatan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	Juta US\$	221.95	233.25	207.59	242	116.58	214.44	214.44	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah SIUP	SIUP	48,787	-	45,106	46,607	103.33	46,910	46,910	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP	247,500	-	234000	261,366	111.69	240,500	240,500	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
7	Industri											

# RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2016 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)*	11	12	
	1	Program Pengembangan IKM	Jumlah IKM	IKM	82,292	36.456	81,907	88,637	108.22	82,087	82,087	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Nilai Produksi	Ribu Rp.	3,431,546,985	3,399,909,000	3,337,453,545	3,489,769,674	104.56	3,384,173,260	3,489,769,674	103	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	3	Program Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah IKM Industri Kreatif	IKM	34,157	36.456	34,018	38,489	113.14	34,082	38,489	113	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	8	Ketransmigrasian											
	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	%	8	7.38	20	15.48	77.40	7.85	7.85	100	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian di arahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya. Berikut dapat dilihat hasil capaian target pembangunan (Indikator Kinerja Utama) Gubernur.

Tabel 2.126 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dan Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2014			2015	
				Target 2014	Capaian 2014	Realisasi	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	Persen	74.57%	65,73	88,15	67,28	67,28
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.	Persen	92,6	93,68%	101,17	93,25	93,85
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.	Persen	10	9,46	94,60	10,80	10,80
4	Daya Saing Pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Persen	5%	5%	100	10	10
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	Tahun	74,41	73,74	99,10	73,54	73,81
6	Pendapatan masyarakat meningkat. (ADHK)	Pendapatan perkapita pertahun.	Juta	7,4	7,10	95,95	7,80	7,80
7	Ketimpangan Antar Wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	Persen	0,4515	0,4479	100,80	0,4501	0,4465
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	Persen	0,295	0,435	52,54	0,2898	0,2898
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara.	Orang	2.754.981	3.091.967	112,23	2.877.493	3.581.860
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	249.854	254.213	101,74	261.053	261.053

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2014			2015	
				Target 2014	Capaian 2014	Realisasi	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara.	Hari	2,15	1,58	73,49	2,35	2,35
		Lama tinggal wisatawan mancanegara.	Hari	2,25	1,95	86,67	2,30	2,30
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		B+	A	133,33	A (78)	A (78)
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.		WTP	WTP	100	WTP	WTP
13	Layanan public meningkat, terutama pada penataan system transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	Persen	36,57%	37,82%	103,42	38,57	38,57
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Persen	6,29%	6,29%	100	9,43	9,43
15	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	Persen	63,42%	64,21%	101,25	64,25	70

Hasil evaluasi Indikator Sasaran Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dan memerlukan perhatian didalam penyusunan kebijakan perencanaan ke depan khususnya di Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
2. Aksesibilitas pendidikan meningkat;
3. Pendapatan masyarakat meningkat (ADHK);
4. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
5. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

Tidak tercapainya Sasaran Gubernur tersebut terkait dengan hasil implementasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Pembangunan yang memiliki korelasi terhadap indikator sasaran pada masing-masing Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD).

Lebih lanjut secara lebih spesifik pada program/kegiatan SKPD faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada dana keistimewaan memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, sehingga tidak semua keluaran dapat terpenuhi. Selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat.

Deviasi keuangan pada umumnya disebabkan karena kebijakan/regulasi seperti SE Menpan No. 11 / 2014 tentang pembatasan kegiatan / rapat diluar kantor, sisa lelang, sisa pembelian/pembayaran (selisih pembelian ATK, sisa perjalanan dinas, tagihan listrik, telepon, air, pemeliharaan peralatan/kendaraan dinas) serta penganggaran melebihi kebutuhan sebenarnya/melebihi ASB dan atau SHBJ.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

Kebijakan perlu diambil dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk mengatasi



permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah target dapat disimpulkan sebagai berikut :

- c) Kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan, dimana kegiatan tersebut hanya dapat melaksanakan termin 1 dan 2 maka waktu perencanaan program/kegiatan dengan dana keistimewaan harus disesuaikan,
- d) Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), pengendalian internal, pengawalan terhadap capaian indikator kinerja dan pelaporan secara sistematis dan tepat waktu;
- e) Penyelesaian sejumlah program strategis (*multiyears*) yang sudah ditetapkan, diharapkan memperhatikan : skala prioritas terhadap pencapaian indikator kinerja, isu strategis wilayah, kepastian tahapan penyelesaiannya, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah;

Terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa agar dilakukan upaya akselerasi dengan pengumuman sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) tepat waktu, kaji ulang dokumen terkait, pelaksanaan pengadaan dan pengendalian kontrak.

Tabel 2.127 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
1		WAJIB											
1	1	Pendidikan											
	5	Program Pendidikan Anak Usia Dini*)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	84	95,31	82	96	117,07	84	84	100	Disdikpora
	6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	Persen	84,92	83,51	84,92	84,34	99,32	84,92	84,92	100	Disdikpora
	7	Program Pendidikan Menengah*)	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	Persen	79,71	78,85	79,25	80,71	101,84	79,71	79,71	100	Disdikpora
	8	Program Pendidikan Formal dan Informal*)	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	orang	8000	10000	7000	7000	100	8000	8000	100	Disdikpora
	9	Program Pendidikan	Persentase kinerja	Persen	71,22	80,61	70,78	80,99	114,42	71,22	71,22	100	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
		Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	pelayanan PKPLK										
	10	Program Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar	Persen	0	85,32	0	0	0	0	0	Disdikpora	
	11	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	Persen	74,71	79,32	74,47	83,13	111,63	74,71	74,71	100	Disdikpora
	12	Program Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan aksesibilitas Pendidikan Tinggi	Persen	58	57,2	57,5	60	104,35	58	58	100	Disdikpora
	13	Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka*)	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Persen	50	66,36	45	70	155,56	50	50	100	Disdikpora
	14	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar	peserta didik	1904	1796	1849	1892	102,33	1904	1904	100	Disdikpora

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunberjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	15	Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya*)	Persen	10	NA	5	5	100	10	10	100	Disdikpora
	16	Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	Persen	10	NA	5	5	100	10	10	100	Disdikpora
	17	Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan	Persen	35	NA	30	-	-	35	35	100	Disdikpora
1	2	Kesehatan										
	5	Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Persen	99	99,92	98	99,96	102	99	99	100	Dinas Kesehatan
	6	Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan	Persen	96	95,14	95,5	96	100,52	96	96	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		Pengendalian Makanan	fasyankes dasar									
	7	Program Pelatihan Kesehatan dan Peningkatan Mutu Diklat Kesehatan	Persen	79	74,33	70	77,35	110,5	79	79	100	Dinas Kesehatan
	8	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persen	57	73,27	52,56	54,31	103,33	57	57	100	Dinas Kesehatan
	9	Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Persen	98	99,71	98	99,69	101,72	98	98	100	Dinas Kesehatan
	10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*)	Persen	48	36,27	42	52,4	124,76	48	48	100	Dinas Kesehatan
	11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat*)	Persen	8,7	8,56	8,8	7,91	110,11	8,7	8,7	100	Dinas Kesehatan
	12	Program Pencegahan dan pengendalian Masyarakat*)	Persen	64,44	109,87	65,03	94,92	145,96	64,44	64,44	100	Dinas Kesehatan

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
13	Program Pembinaan Lansia	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada Usia (PSU)	Persen	80	61,16	62	70,25	113,31	80	80	100	Dinas Kesehatan
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15	Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	Persen	98,50	99,69	98	99,63	101,66	98,50	98,50	100	Dinas Kesehatan
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapeljamkesos	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapeljamkesos	Persen	69,60	69,36	63,9	60,8	95,15	69,60	69,60	100	Dinas Kesehatan
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Ghrasia	Persentase penderita jiwa yang dirawat di RSJ Ghrasia	Persen	54,87	48,55	51,04	53,66	105,13	54,87	54,87	100	RSJ Ghrasia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPDP Tahunberjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun2014	Realisasi RKPDP Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	18	Program Pembiayaan Kesehatan	Persen	41,5	46,04	40,3	43,69	108,41	41,5	41,5	100	Dinas Kesehatan
	19	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Persen	100	-	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	20	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Persen	100	-	100	94,53	94,53	100	100	100	Dinas Kesehatan
1	3	Pekerjaan Umum										
	5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	Persen	73,24	72,87	72,64	73,7	101,46	73,24	73,24	100	Dinas PUPESDM
	6	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan										Dinas PUPESDM

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPDP Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGU NG JAWAB
						Target RKPDP Tahun2014	Realisasi RKPDP Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	7	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPESDM
	8	Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Persen	32,85	28,55	29,91	32,55	108,83	32,85	32,85	100	Dinas PUPESDM
	9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persen	79,5	76,81	78,00	79,74	102,23	79,5	79,5	100	Dinas PUPESDM
	10	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya	l/det	1200	767,6	900	1018,53	113,17	1200	1200	100	Dinas PUPESDM
	11	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku										Dinas PUPESDM
	1	Program	Persen	80,85	74,25	77,36	77,93	100,74	80,85	80,85	100	Dinas



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	2	Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Penduduk berakses air minum									PUPESDM	
	13	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	SR	17300	16.191	15800	18441	116,72	17300	17300	100	Dinas PUPESDM
	14	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	Persen	60	53	55	64,75	117,73	60	60	100	Dinas PUPESDM
	15	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	Persen	65	64	61	76	124,59	65	65	100	Dinas PUPESDM
	16	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	Persen	51	47	47	52,8	112,34	51	51	100	Dinas PUPESDM

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	17	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan Desa Potensi	Dukungan Infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	Persen	46	34	40	40	100	46	46	100	Dinas PUPESDM
	18	Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pengurangan jumlah titik genangan	Persen	45,90	35,29	39,90	49,2	123,31	45,90	45,90	100	Dinas PUPESDM
	19	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen	84	82	82	84	102,44	84	84	100	Dinas PUPESDM
	20	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	titik	80	43	60	72	120	80	80	100	Dinas PUPESDM
	21	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	Persen	87,5	75	81,25	81,25	100	87,5	87,5	100	Dinas PUPESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	2 2	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persen	82,5	78,34	80	94,94	118,68	82,5	82,5	100	Dinas PUPESDM
	2 3	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Persen	80	75	77,50	79,65	100	80	80	100	Dinas PUPESDM
1	4	Perumahan										
	1	Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Persen	40	32,71	34	39,25	115,44	40	40	100	DINAS PUPESDM
	2	Program pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persen	54	50	49	64,61	131,86	54	54	100	DINAS PUPESDM

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun		SKPD PENANGGU NG JAWAB	
						Target RKPD Tahun2014	Realisasi RKPD Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	3	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	Persen	7	8,00	7,50	7,49	100,13	7	7	100	DINAS PUPESDM
1	5	<b>Penataan Ruang</b>											
	1	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	kawasan strategis	16	12	14	14	100,00	16	16	100	DINAS PUPESDM
	2	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi	Persen	70	63,93	60	64,21	107,02	70	70	100	DINAS PUPESDM
	3	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan ruang</b>	Persentase Pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	Persen	60	20	40	66,2	165,5	60	60	100	DINAS PUPESDM
1	6	<b>Perencanaan Pembangunan</b>											
	5	<b>Program Perencanaan</b>	Persentase kesenjangan	Persen	17,04	26,82	20,45	-	-	17,04	17,04	100	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJMD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPJMD Tahun 2014	Realisasi RKPJMD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	<b>Pembangunan Daerah</b>	pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan										
	6 <b>Program Perencanaan Pembangunan pemerintahan</b>	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	Persen	0,81	12,73	0,97	-	-	0,81	0,81	100	BAPPEDA
	7 <b>Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian</b>	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	Persen	4,06	3,64	4,87	-	-	4,06	4,06	100	BAPPEDA

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RPKD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RPKD Tahun 2014	Realisasi RPKD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	8	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	Persen	10,55	6,82	12,66	-	-	10,55	10,55	100	BAPPEDA
	9	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana</b>	Persen	1,62	3,64	1,95	-	-	1,62	1,62	100	BAPPEDA
	10	<b>Program Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	Persen	84	77	79	66,67	84	84	84	100	BAPPEDA
	11	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	Persen	80	71,24	70	76,38	109,11	80	80	100	BAPPEDA
1	7	<b>Perhubungan</b>										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	5	Program Peningkatan manajemen dan Rekayasa Lalulintas	Persen	25,2	8,40	16,80	16,8	100	25,2	25,2	100	DISHUBKOMINFO
	6	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persen	84	80,65	82	82,68	100,83	84	84	100	DISHUBKOMINFO
	7	Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal	Persen	40	20	30	39,47	132	40	40	100	DISHUBKOMINFO
	8	Program Peningkatan Pelayanan angkutan	Persen	38,57	34,49	36,57	37,82	103,42	38,57	38,57	100	DISHUBKOMINFO
	9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	44,17	27,08	30,42	40	131	44,17	44,17	100	DISHUBKOMINFO
	10	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	40	30	35	36,44	104,11	40	40	100	DISHUBKOMINFO

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1 1	Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Persen	100	90	100	100	100	100	100	100	DISHUBKO MINFO
	1 2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	DISHUBKO MINFO
	1 3	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	DISHUBKO MINFO
1	8	Lingkungan Hidup										
	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	9,43	3,14	6,29	6,15	97,77	9,43	9,43	100	BLH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPDP Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGU NG JAWAB
						Target RKPDP Tahun2014	Realisasi RKPDP Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH	Persen	25	15	20			25	25	100	BLH
	7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persen	7	3	5			7	7	100	BLH
	8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	unit usaha	380	360	370	370	100	380	380	100	BLH
	9	Program Pengelolaan RTH	Persen	35	10	23,33	16,94	73	35	35	100	BLH
	10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Ha	27	17	18	9	50	27	27	100	BLH
1	9	Pertanahan										
	1	Program Perbaikan Penataan, Penguasaan,	Persen	60	0	40	12,82	32,05	60	60	100	Biro Tata Pemerintahan

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGU NG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
		Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah	informasi pertanahan terpadu										
	2	Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	Persen	25	15	20	28	140	25	25	100	Biro Tata Pemerintahan
	3	Program Pengembangan Sistem informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	Bidang	9653	8426	9229	9168	99,34	9653	9653	100	Biro Tata Pemerintahan
1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil											
	1	Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang ber-KTP (NIK)	Persen	89	95	87	94,91	109	89	89	100	Biro Tata Pemerintahan
1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	Orang	644	795	657	-	-	644	644	100	BPPM
	6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	Anak	329	301	316	-	-	329	329	100	BPPM
	7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*)	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	Persen	36,2	35,5	36,1	-	-	36,2	36,2	100	BPPM
	8	Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	96,66	96,65	96,58	-	-	96,66	96,66	100	BPPM
	9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase pembinaan organisasi perempuan	Persen	75,14	50,14	62,64	-	-	75,14	75,14	100	BPPM

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGU NG JAWAB
						Target RKPD Tahun2014	Realisasi RKPD Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	10	Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPM
	11	Program Pendidikan politik bagi Perempuan	Persen	11,06	8,61	11,06	-	-	11,06	11,06	100	BPPM
1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
	1	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*)	Persen	71,72	80,22	71,60	79,85	111,52	71,72	71,72	100	BPPM
	2	Program Kesehatan reproduksi remaja	Persen	0,510	0,520	0,515	0,37	128,16	0,510	0,510	100	BPPM
	3	Program Peningkatan kesejahteraan Keluarga	Persen	44,1	44,1	44,60	45,24	98,57	44,1	44,1	100	BPPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun2014	Realisasi RKPD Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	4	Program Pengembangan Bina Keluarga	Persentase lembaga bina keluarga berkatagori percontohan	Persen	23	21,49	22,13	23,28	105,2	23	23	100	BPPM
	5	Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR	Terlaksananya program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	BPPM
	6	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	Terlaksananya program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	BPPM
I	13	Sosial											
	5	Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial *)	Persentase Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	Persen	8,34	9,76	7,55	-	-	8,34	8,34	100	Dinas Sosial

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGU NG JAWAB
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	6	Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia terlanjar	Persen	8,51	6,79	7,85	-	-	8,51	8,51	100	Dinas Sosial
	7	Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Persen	9,34	51,61	8,54	-	-	9,34	9,34	100	Dinas Sosial
	8	Program Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Korban tindak Kekerasan, Pekerja Migran bermasalah Sosial psikologis, dan korban Trafficking	Persen	6,34	4,22	5,95	-	-	6,34	6,34	100	Dinas Sosial
	9	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	Persen	5,15	2,04	4,90	-	-	5,15	5,15	100	Dinas Sosial
	1	Program	Persentase	4,57	5,43	3,77	-	-	4,57	4,57	100	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	0	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya)	keberfungsian sosial bagi tuna sosial										
	11	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya*)	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	Persen	10,84	8,76	9,33	-	-	10,84	10,84	100	Dinas Sosial
	12	Program Pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*)	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	Persen	67,50	71,54	66,40	-	-	67,50	67,50	100	Dinas Sosial
	13	Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial *)	Persentase PSKS terbina, dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	55	33,34	45,00	-	-	55	55	100	Dinas Sosial

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	14	Program Pembinaan Panti Sosial/jompo	Persen	2,28	1,91	2,07	-	-	2,28	2,28	100	Dinas Sosial
	15	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial	Persen	39,72	25,34	38,56	-	-	39,72	39,72	100	Dinas Sosial
	16	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persen	0	NA	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
	17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persen	0	NA	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
14		Ketenagakerjaan										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1	<b>Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	%	25	19,29	24,2	26,66	110,17	25	25	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	<b>Program Peningkatan Kesempatan kerja</b>	%	9,50	5,96	9	10,51	116,78	9,50	9,50	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	%	0	71,89	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	%	50	NA	48,35	62,23	128,71	50	50	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RPKD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RPKD Tahun 2014	Realisasi RPKD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	5	Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	65	NA	60	100	166,67	65	65	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6	Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	%	15,6	NA	14,35	17	118,47	15,6	15,6	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	15	Koperasi dan Usaha kecil Menengah											
	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UKM	unit usaha	229.467	205.210	220.641	220703	100,03	229.467	229.467	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2	Program Peningkatan	Jumlah Koperasi Aktif	koperasi	2.351	2.176	2.261	2.269	100,35	2.351	2.351	100	Dinas Perindustria

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunberjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
		Kualitas Kelembagaan Koperasi										n Perdagangan Koperasi dan UKM	
	3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	UMKM	180	87	130	172	132,31	180	180	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	16	Penanaman Modal											
	1	Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rp. (000)	10.467.183.000	8.067.134.638	8.946.874.000	-	-	10.467.183.000	10.467.183.000	100	BKPM
	2	Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi	Jumlah Surat Persetujuan/Ijin Prinsip	ijin	354	354	347	-	-	354	354	100	BKPM
	17	Kebudayaan											
	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase organisasi budaya berkategori maju	%	1,24	1	1,11	1,11	100	1,24	1,24	100	Dinas kebudayaan

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunberjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGU NG JAWAB
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	2	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	%	50,29	NA	46,42	-	-	50,29	50,29	100	Dinas kebudayaan
	3	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	%	15	14	13	13	100	15	15	100	Dinas kebudayaan
	4	<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	%	15	5	7	7	100	15	15	100	Dinas kebudayaan
	5	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan</b>	%	40	20,76	30	29	97	40	40	100	Dinas kebudayaan
18		<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>										
	1	<b>Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda</b>	%	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGU NG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	sentra	13	10	12	12	100	13	13	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda	Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda	kelompok	365	NA	345	345	100	365	365	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
	4	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	orang	2200	2.000	2.100	2.100	100	2200	2200	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga	%	58,69	NA	44,29	45	101,6	58,69	58,69	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
	6	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	medali	27	NA	23	23	100	27	27	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
	7	Program	Peningkatan	organisasi	41	37	39	39	100	41	41	100	Dinas

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda										Pendidikan dan Olahraga
19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										
	1	Program Pendidikan Masyarakat	%	73	NA	70	-	-	73	73	100	Badan Kesbanglinmas
	2	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	NA	3	NA	2	-	-	3	3	100	Badan Kesbanglinmas
	3	Program Pemeliharaan kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	kasus	948	NA	964	-	-	948	948	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	kasus	250	155	260	-	-	250	250	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	5	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	kasus	314	NA	315	-	-	314	314	100	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan kasus konflik sosial	kasus	22	10	25	-	-	22	22	100	Badan Kesbanglinmas
20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
	1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	unit	2	NA	2	-	-	2	2	100	Biro Organisasi
	2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase untuk kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	%	50	NA	35	-	-	50	50	100	Biro Umum Humas dan Protokol
	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	%	30	61,76	45	-	-	30	30	100	Inspektorat

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH											
	4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	%	95	NA	90	-	-	95	95	100	Biro Umum Humas dan Protokol
	5	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase prolegda yang terselesaikan	%	95	99,16	93	85,8	92	95	95	100	Sekretariat DPRD
	6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Biro Hukum
	7	Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang dibatalkan	%	0	NA	0	-	-	0	0	100	Biro Hukum
	8	Program Analisis Kebijakan Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	%	36,45	NA	31,77	-	-	36,45	36,45	100	Biro Adm. Kesra dan Masyarakatan, Biro Am. Perekonomian & SDA, Biro Adm. Pembangunan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGU NG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	9	Program Pencegahan Dini Bencana	Peningkatan jumlah desa tangguh	desa	40	10	25	-	-	40	40	100	BPBD
	10	Program Penanggulangan Korban Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	72	NA	70	-	-	72	72	100	BPBD
	11	Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	%	11,71	11,53	11,57	-	-	11,71	11,71	100	DPPKA
	12	Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah serta Lembaga Keuangan Mikro	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	22,95	25,34	26,13	-	-	22,95	22,95	100	DPPKA
	13	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	85	NA	80	-	-	85	85	100	Biro Organisasi
	14	Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	%	25	NA	22,5	-	-	25	25	100	Badan Diklat
	15	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Kelancaran Pindah/Purna Tugas PNS	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	BKD

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
16	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	%	65	69,23	60	-	-	65	65	100	BKPM
17	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kasus konflik antar daerah yang terselesaikan	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Biro Tata Pemerintahan
18	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (norma standar, prosedur dan kriteria)	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Biro Tata Pemerintahan
19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Permasalahan Desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	20	<b>Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Biro Tata Pemerintahan
	21	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Biro Tata Pemerintahan
	22	<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Biro Tata Pemerintahan
	23	<b>Program Kerjasama dengan Mass Media</b>	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Biro Umum Humas dan Protokol

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	24	<b>Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum</b>	%	100	126,8	100	-	-	100	100	100	Biro Hukum
	25	<b>Program Pengawasan Produk Hukum</b>	%	100	120	100	-	-	100	100	100	Biro Hukum
	26	<b>Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah</b>	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Badan Diklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	27	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kab./Kota	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	DPPKA
	28	Program Penelitian dan Pengembangan	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Badan Diklat, Biro Adm. Pembangunan
	29	Program Pengembangan Kehidupan Beragama	%	100	100	100	-	-	100	100	100	Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
	30	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Inspektorat

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Badan Diklat
	21	Ketahanan Pangan											
	1	Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan	desa	53	60	62	-	-	53	53	100	BKPP
	2	Program Peningkatan Ketersediaan dan Keamanan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan	???	360	172,5	290	-	-	360	360	100	BKPP
	3	Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	???	80	85	78	-	-	80	80	100	BKPP
	4	Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	???	100	96,87	99,15	-	-	100	100	100	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	5	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	%	74	48	61	-	-	74	74	100	BKPP
	2 2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa	%	37,7	35,18	33,08	-	-	37,7	37,7	100	BPPM
	2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	%	29,16	26,76	27,96	-	-	29,16	29,16	100	BPPM
	3	Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase profil desa sesuai standar	%	70	39,95	55	-	-	70	70	100	BPPM
	4	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	%	35	36,36	34	-	-	35	35	100	BPPM

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPJ Tahun 2014	Realisasi RKPJ Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	0	NA	0	0	0	0	0	0	BPPM
	6	Program peningkatan prasarana/sarana dan penataan administrasi pemerintahan desa	%	0	NA	0	0	0	0	0	0	BPPM
	23	Statistik										
	1	Program Pengembangan Statistik Daerah	%	97	92,39	96	-	-	97	97	100	Bappeda
	24	Kearsipan										
	1	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	SOPD	20	19	15	-	-	20	20	100	BPAD
	2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	%	11	11,67	9	-	-	11	11	100	BPAD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunberjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	3	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	%	20	7,16	15	-	-	20	20	100	BPAD
	25	Komunikasi dan Informatika											
	1	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	urusan/bidang	12	10	11	-	-	12	12	100	Dishubkominfo
	2	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	Penguatan jaringan IT di Pemda DIY	%	80	42	60	-	-	80	80	100	Dishubkominfo
	3	Program Fasilitas Pos Telekomunikasi Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	%	70	60	65	-	-	70	70	100	Dishubkominfo
	4	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT	%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Dishubkominfo
	26	Perpustakaan											

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	%	85	73,13	82,5	-	-	85	85	100	BPAD
	2	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	%	80	NA	70	-	-	80	80	100	BPAD
	3	Program Pengembangan Budaya Baca	%	20	14,51	18	-	-	20	20	100	BPAD
2		Urusan Pilihan										
2	1	Pertanian										
	5	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	Persen	1,7	0,96	1,7	-	-	1,7	1,7	100	Dinas Pertanian
	6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Komoditas	3	3	3	-	-	3	3	100	Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPDP Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun2014	Realisasi RKPDP Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	7	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	2.356.600	2.332.884	2.321.800	-	-	2.356.600	2.356.600	100	Dinas Pertanian
	8	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi pertanian hortikultura	ton	387.000	383.678	383.200	-	-	387.000	387.000	100	Dinas Pertanian
	9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi peternakan	AU	700.516	568.127	671.634	-	-	700.516	700.516	100	Dinas Pertanian
2	2	Kehutanan											
	5	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan	Ton	88000	78.619,81	86.300	-	-	88000	88000	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	6	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	NTP sektor perkebunan	-	128	113,38	125,86	-	-	128	128	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis	Ha	26000	27.291,871	27000	-	-	26000	26000	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	8	Program Penataan Kawasan Hutan	Persentase luas hutan	Persen	27,63	29,45	27,5	-	-	27,63	27,63	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	9	Program Pemanfaatan Potensi Sumber	Peningkatan produksi hasil hutan	Persen	5,59	230,77	4,7	-	-	5,59	5,59	100	Dinas Kehutanan dan

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
		Daya Hutan										Perkebunan	
	10	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Persen	80	70	75	-	-	80	80	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
	11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persen	29,14	9,97	31,84	-	-	29,14	29,14	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
	3	Energi dan Sumber Daya Mineral											
	1	Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	%	78,60	80,6	78	-	-	78,60	78,60	100	Dinas PUPESDM	
	2	Program Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	SBM	117,95	114,035 (000)	112 (000)	-	-	117,95	117,95	100	Dinas PUPESDM	
	3	Program Pembinaan Pengawasan Pengendalian Pengelolaan Pendayagunaan Air Tanah	%	<20	<20	<20	-	-	<20	<20	100	Dinas PUPESDM	
	4	Pembinaan dan	Pencapaian	%	9	3,33	6	-	-	9	9	100	Dinas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGU NG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
		Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi	Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi									PUPESDM	
	5	Pembinaan dan Pengembangan Bahan Bakar	pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	%	60	45	50	-	-	60	60	100	Dinas PUPESDM
	6	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	%	11	9	10	-	-	11	11	100	Dinas PUPESDM
	4	Pariwisata											
	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	orang	16.785.128	13.883.950	14.595.763	-	-	16.785.128	16.785.128	100	Dinas Pariwisata
	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	???	89	86	87	-	-	89	89	100	Dinas Pariwisata
	3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis	kelompok	86	77	81	-	-	86	86	100	Dinas Pariwisata
	4	Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah Desa Wisata	Desa	80	71	75	-	-	80	80	100	Dinas Pariwisata

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RPKD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RPKD Tahun 2014	Realisasi RPKD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
5	Kelautan dan Perikanan											
1	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaannya	kg/kapita /th dan kg/kapita /yh	15,63 dan 28,55	25,80	14.91 dan 27.17	17,16 dan 27,54	115,09 dan 101,36	15,63 dan 28,55	15,63 dan 28,55	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	6.900	4.996,4	6.400	7.048,5	110,13	6.900	6.900	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen	300	300	300	302	100,67	300	300	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	ton	70.500	57.902,72	63.000	-	-	70.500	70.500	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar	Luas Kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	ha	14	15	13	15	115,38	14	14	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	program peningkatan Kualitas SDM dan	NTP sektor perikanan	rasio	116,89	116,31	115,42	116,09	100,58	116,89	116,89	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPJ Tahunber jalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGU NG JAWAB	
						Target RKPJ Tahun2014	Realisasi RKPJ Tahun2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	7	Kelembagaan Perikanan dan Kelautan											
	7	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	orang dan desa terisolir	1.530 orang dan 57 desa	1,170 orang dan 45 desa	1,350 orang dan 51 des	-	-	1.530 orang dan 57 desa	1.530 orang dan 57 desa	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	8	Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	rasio	0,11	0	0,08	-	-	0,11	0,11	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	Perdagangan											
	1	Program Peningkatan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	Juta US\$	207,59	211,76	201,15	233,25	115,96	207,59	207,59	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

## RKPD DIY Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah SIUP	SIUP	45.106	43.818	43.371	-	-	45.106	45.106	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP	-	204.511	45.106	-	-	-	-	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	7	<b>Industri</b>											
	1	Program Pengembangan IKM	Jumlah IKM	IKM	81.907	84.243	81.751	86.087	105,3	81.907	81.907	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Nilai Produksi	Ribu Rp.	3.337.453.545	3.294.485.488	3.290.733.829	3399909.000	103,32	3.337.453.545	3.337.453.545	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	3	Program Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah IKM Industri Kreatif	IKM	34.018	34,978	33.964	36.456	107,34	34.018	34.018	100	Dinas Perindustrian Perdagangan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014			Target program /kegiatan RKPDP Tahun berjalan (tahun 2015)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
												Koperasi dan UKM	
	8	<b>Ketransmigrasian</b>											
	1	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	%	20	15,58	19,62	7,38	37,61	20	20	100	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	2	<b>Program Transmigrasi Regional</b>	Jumlah calon transmigran yang mendapat pelatihan dasar umum	KK	0	150	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Sumber : Bappeda DIY, Tahun 2014

## 2.6 Permasalahan Pembangunan

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :

### 2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Prioritas : Hukum dan Aparatur; Sasaran : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat; Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

#### 1. Pemerintahan dan Politik

- a) Peningkatan kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah;
- b) Peningkatan komitmen antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat realisasi pembangunan daerah;
- c) Kapabilitas SDM Pemerintah dalam mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (e-Gov) belum optimal;
- d) Peningkatan implementasi *Good Governance*.

#### 2. Hukum

- a) Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- b) Kapasitas dan kapabilitas aparaturnya penegak hukum pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- c) Kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
- d) Peningkatan ancaman penyalahgunaan narkoba;
- e) Peningkatan ancaman terorisme;
- f) Penegakan supremasi hukum.

#### 3. Kerjasama

- a) Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
- b) Implementasi yang lebih bermanfaat dari kerjasama dengan para pihak di luar negeri masih kurang;

- c) Kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri belum optimal.
2. Prioritas : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Sasaran : Aksesibilitas Pendidikan Meningkatkan; Daya saing Pendidikan Meningkatkan; Peningkatan melek huruf masyarakat
- a) Pemerataan pendidikan di semua kabupaten/kota;
  - b) Kebijakan perubahan kurikulum 2013 kembali ke kurikulum 2006 memerlukan kesiapan semua pihak;
  - c) Kegiatan pembelajaran dalam proses pendidikan masih cenderung mekanistik;
  - d) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
  - e) Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan dunia kerja belum optimal;
  - f) Pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal masih kurang;
  - g) Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, masih sangat kurang;
  - h) Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
  - i) Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
  - j) Pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum maksimal;
  - k) Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik untuk pengembangan riset/penelitian guna mendukung produktifitas dan daya saing daerah belum optimal;
  - l) Kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar *stake holders* masih kurang;
  - m) Penanggulangan kejahatan teknologi informasi masih lemah.

3. Prioritas : Sosial Budaya; Sasaran : Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan; Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya meningkat

1. Kesehatan

- a) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga medis di wilayah pedesaan belum merata;
- b) Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
- c) Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
- d) Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedic, bidan, ahli gizi dan ahli sanitasi;
- e) Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat Yogyakarta belum optimal;
- f) Peningkatan perhatian dan pelayanan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.

2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial

- a) Tingkat kemiskinan masih diatas rata-rata nasional;
- b) Ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah;
- c) Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
- d) Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
- e) Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih belum optimal;
- f) Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
- g) Masih terdapat potensi konflik ditengah masyarakat baik karena sentimen agama maupun persoalan lainnya;

3. Kebudayaan

- a) Upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi belum berjalan optimal;

- b) Arus globalisasi dan budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan budaya lokal cenderung semakin meningkat;
  - c) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) semakin terancam kelestariannya;
  - d) Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset untuk menarik kunjungan wisata belum optimal;
  - e) Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
  - f) Penataan bangunan dan lingkungan pada area kawasan budaya masih belum optimal;
  - g) Sarana dan Prasarana serta manajemen pengelolaan aset budaya masih belum memadai;
4. Prioritas : Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana; Sasaran : Kualitas Lingkungan hidup meningkat
- 1. Tingginya konversi/alih fungsi lahan pertanian/hutan menjadi lahan terbangun (area pemukiman, industri, dll.);
  - 2. Perkembangan kawasan perkotaan Yogyakarta yang terus meningkat dan semakin berkurangnya kawasan terbuka hijau;
  - 3. Belum optimalnya pengendalian terhadap penambangan dan pembangunan di kawasan lindung karst;
  - 4. Peningkatan pencemaran dan peningkatan konflik pemanfaatan sumber daya air;
  - 5. Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan hutan;
  - 6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah;
  - 7. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah secara kewilayahan;
  - 8. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca;
  - 9. Semakin meningkatnya limbah cair, padat dan B3;
  - 10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - 11. Masih lemahnya kelembagaan pengelola air irigasi;

12. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, kekeringan dan potensi bahaya tsunami.
- 
5. Prioritas : Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; Sasaran : Ketimpangan Antar Wilayah Menurun; Pemanfaatan Ruang Terkendali
    1. Tata Ruang
      - a) Pengaturan tata ruang dan wilayah belum optimal;
      - b) Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
      - c) Disparitas antar wilayah masih tinggi;
      - d) Perlunya percepatan pengembangan kawasan strategis;
      - e) Masih belum optimalnya perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat;
      - f) Belum optimalnya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten;
      - g) Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan.
      - h) Penataan bangunan dan lingkungan pada area kawasan budaya masih belum optimal;
    2. Daerah tertinggal
      - a) Ketimpangan antar wilayah masih tinggi;
      - b) Masih terdapat daerah dengan akses ke pusat pemerintahan/bisnis yang minim;
      - c) Sebaran infrastruktur pelayanan publik belum merata ke seluruh kawasan.
  6. Prioritas : Penyediaan Sarana dan Prasarana ; Sasaran : Meningkatnya layanan publik bagi masyarakat; Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun
    1. Transportasi
      - a) Beberapa ruas jalan kondisinya mulai mengalami penurunan;

- b) Terjadinya kemacetan pada titik-titik simpangan yang merupakan akses utama masyarakat;
- c) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
- d) Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal;
- e) Perlunya penyiapan terhadap konektivitas transportasi di lokasi bandara baru.

## 2. Keciptakaryaan

- a) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
- b) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
- c) Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang layak;
- d) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan;
- e) Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
- f) Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
- g) Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal.

## 3. Komunikasi dan Informatika

- a) Masih minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang layanan teknologi informasi dalam rangka implementasi DGS;
- b) Masih belum optimalnya layanan unggulan DGS;
- c) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi.

## 4. Energi

- a) Minimnya sumberdaya energi di wilayah DIY;
- b) Upaya untuk penyediaan energi terbarukan belum maksimal;
- c) Gerakan penghematan energi belum berjalan efektif;

d) Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal.

7. Prioritas : Ekonomi; Sasaran : Pendapatan masyarakat meningkat; Kunjungan wisatawan, investasi dan pengembangan industri serta UKM meningkat

1. Pariwisata

- a) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan;
- b) Masih belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
- c) Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam menghadapi globalisasi;
- d) Standarisasi kualitas pelayanan wisata belum maksimal;
- e) Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata;
- f) Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
- g) Pengembangan produk pariwisata cenderung stagnan karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
- h) Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata;
- i) Masih tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain.

2. Koperasi dan UMKM

- a) Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
- b) Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
- c) Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- d) Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah;
- e) Akses pemodalannya bagi koperasi dan UMKM masih rendah.

3. Investasi

- a) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
- b) Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
- c) Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan untuk lokasi proyek;
- d) Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;



- e) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
- f) Masih tingginya ketimpangan investasi antar kabupaten/kota.

#### 4. Industri

- a. Daya saing produk UMKM belum kuat;
- b. Penggunaan bahan baku lokal belum optimal;
- c. Ketergantungan terhadap bahan baku/penolong impor masih tinggi;
- d. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- e. Kemampuan teknologi IKM masih kurang.

#### 5. Perdagangan

- a) Akses pasar masih rendah;
- b) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
- c) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
- d) Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;
- e) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk lokal;
- f) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.

#### 6. Pertanian

- a) Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- b) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
- c) Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
- d) Produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

7. Perikanan dan Kelautan

- a) Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat;
- b) Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
- c) SDM dan kelembagaan usaha perikanan belum memadai;
- d) Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai;
- e) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal;

8. Ketahanan Pangan

- a) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- b) Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
- c) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan local masih kurang;
- d) Masih adanya daerah rawan pangan;
- e) Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh masih rendah.

**2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

**A. Pendidikan**

- 1. Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan semakin berkurang setiap tahunnya karena memasuki masa pensiun sedangkan formasi pengangkatan baru sangat terbatas dan tidak dilaksanakan setiap tahun (moratorium PNS)
- 2. Banyaknya peserta didik yang masuk kategori miskin atau tidak mampu secara ekonomi;
- 3. Penyiapan sekolah dan guru untuk pelaksanaan kurikulum 2013 (K13) untuk semua sekolah masih perlu dilaksanakan;
- 4. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- 5. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan dunia kerja belum optimal;

6. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal masih kurang;
7. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, masih sangat kurang;
8. Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
9. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
10. Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik untuk pengembangan riset/penelitian guna mendukung produktifitas dan daya saing daerah belum optimal;
11. Kerjasama pengembangan pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan masih kurang;
12. Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar masih belum optimal.
13. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya atau ada kecenderungan terjadi kapitalisme pendidikan;
14. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi
15. Pendidikan cenderung mekanistik;
16. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY masih belum optimal;
17. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
18. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
19. Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;

20. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
21. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;
22. Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
23. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
24. Penanganan secara terpadu bagi anak berkebutuhan khusus belum memadai.

### **B. Kesehatan**

1. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan kunjungan neonatus pertama (KN-1) belum optimal.
2. Mutu layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
3. Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum masih perlu ditingkatkan.
4. Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional yang berlangsung cepat dan dinamis, belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
5. Rasio kemampuan pelayanan kesehatan dan tenaga medis di wilayah perdesaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat belum merata;
6. Masih adanya kasus pemasangan penderita gangguan jiwa berat di Yogyakarta yang belum dibebaskan karena penolakan keluarga;
7. Masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa maupun eks penderita gangguan jiwa.

### **C. Pekerjaan Umum**

1. Beberapa ruas jalan kondisinya mulai mengalami penurunan;

2. Terjadinya kemacetan pada titik-titik simpangan yang merupakan akses utama masyarakat;
3. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
4. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal;
5. Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
6. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
7. Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang layak;
8. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan;
9. Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
10. Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
11. Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal;
12. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung mitigasi bencana belum optimal.

#### **D. Perencanaan Pembangunan**

1. Perlunya perencanaan pembangunan yang terintegrasi, lintas sektor dan memiliki tolok ukur kinerja yang dapat memberikan kepastian keberhasilan pembangunan;
2. Perlunya pengendalian pembangunan yang lebih objektif dalam mendukung capaian kinerja pembangunan.

#### **E. Pertanahan**

1. Belum optimalnya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten disebabkan Basis data tanah kasultanan dan kadipaten belum tersedia secara lengkap dan komprehensif sebagai acuan dan lokasi keberadaannya tersebar;

2. Masih banyaknya kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
3. Permohonan izin pelepasan tanah yang diakibatkan adanya tukar-menukar antara Pemerintah desa dengan orang perorangan belum disertai pernyataan penguasaan masing-masing obyek tanah, sehingga proses lebih lanjut harus menunggu kelengkapan berkas tersebut;
4. Adanya permasalahan pemanfaatan tanah dan kejelasan status tanah kas desa.

#### **F. Lingkungan Hidup**

1. Jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan yang berdampak bagi kualitas udara;
2. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lerang tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung api Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama,
3. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun,
4. Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut,
5. Pencemaran air tanah meningkat menyebabkan tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi,
6. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin rebuk, banjir, tanah longsor, tsunami serta kekeringan menjadi tantangan di masa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan,
7. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan, serta sumberdaya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisannya lahan,
8. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri,

9. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak,
10. Peningkatan limbah cair, padat dan B3,
11. Masih adanya sumber pencemar air sungai yang berasal dari limbah rumah tangga yang masuk ke aliran sungai,
12. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan Perkotaan.

#### G. Kependudukan

1. Masih banyak data ganda yang belum dibersihkan dari database SIAK yang mempengaruhi kualitas data kependudukan;
2. Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman biometrik tidak menunjukkan perkembangan signifikan;
3. Masih terdapat instansi atau lembaga swasta layanan publik belum melaksanakan tertib administrasi kependudukan
4. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia,
5. Terjadinya ketimpangan penyebaran penduduk karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota khususnya kelompok usia muda produktif, dan lebih terdidik sehingga menghadapi kekurangan tenaga kerja dan sumber daya potensial untuk pembangunan wilayah, bahkan beberapa wilayah pedesaan mengalami pertumbuhan berkurang (*depopulasi*),
6. Pertambahan penduduk di kota juga diakibatkan oleh lulusan lembaga-lembaga pendidikan berasal dari luar daerah yang tidak ingin kembali kedaerahnya sesudah menamatkan pendidikannya,
7. Ketimpangan distribusi penduduk yang semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan social, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.

#### H. Penanaman Modal

1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
2. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;

3. Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan belum siap;
4. Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;
5. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
6. Masih tingginya ketimpangan investasi antara kabupaten/kota;
7. Masih ditemukannya kendala pelaporan realisasi penanaman modal oleh investor kepada pemerintah daerah.

#### **I. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

1. Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
2. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
3. Kualitas kelembagaan dan SDM koperasi dan UMKM masih kurang;
4. Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih kurang;
5. Daya saing produk UMKM belum kuat,
6. Penggunaan bahan baku lokal belum optimal dan tergantung bahan baku/penolong impor,
7. Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan,
8. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI),
9. Kemampuan teknologi IKM masih kurang.
10. Akses pasar masih rendah,
11. Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung,
12. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan dan perlindungan konsumen masih kurang,
13. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor,
14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri,
15. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestic;



16. Perlunya penguatan terhadap dampak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

**J. Ketahanan Pangan**

1. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
2. Belum optimalnya pemantauan, distribusi, harga dan akses pangan masyarakat;
3. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
4. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah.

**K. Pertanian**

1. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
2. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
3. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
4. Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan.

**L. Kelautan dan Perikanan**

1. Permasalahan pokok pada produksi perikanan budidaya adalah terkendala harga pakan yang relatif mahal dan harganya cenderung selalu naik;
2. Masih adanya tambak udang yang dibangun pada lokasi yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukannya antara lain: terlalu dekat dengan JJLS, di daerah sependan pantai, di Gumuk Pasir, kawasan konservasi;

3. Pelabuhan Tanjung Adikarta yang belum dapat operasional terkendala pengerukan;
4. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat;
5. Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
6. SDM dan kelembagaan usaha perikanan kurang memadai;
7. Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai;
8. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal;
9. Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan dan pengkayaan sumberdaya serta system ekologisnya secara berkerlanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

**M. Kehutanan**

1. Perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal;
2. Perbaikan ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu diperbaiki;
3. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, social, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal;
4. Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal.

**N. Pariwisata**

1. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan;
2. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
3. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan meadai dalam menghadai globalisasi;
4. Suasana kondusif masih sering terganggu oleh munculnya isu politik, keamanan dan kesehatan;
5. Kualitas pelayanan wisata belum standar;
6. Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata;
7. Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata;

8. Masih tingginya ketergantungan pada destinasi wisata di daerah lain;
9. Perlunya reaktualisasi wisata DIY guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya industrialisasi wisata yang tidak berpihak kepada pelaku-pelaku lokal.

**O. Sosial**

1. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang sejatinya merupakan hak semua orang masih kurang dan belum merata.;
2. Penurunan angka kemiskinan masih perlu terus diupayakan secara terpadu melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dengan mengedepankan program-program pemberdayaan;
3. Pola-pola Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial masih belum optimal;
4. Cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial masih belum optimal;
5. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sesuai amanat Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum berjalan seperti yang diharapkan;
6. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
7. Perlunya solusi yang komprehensif terhadap keberadaan gelandangan, pengemis dan orang terlantar.

**P. Kebudayaan**

1. Pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara optimal bahkan beberapa terancam keberadaannya;
2. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya

- budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya local;
3. Pengelolaan dan Pembinaan desa budaya sebagai beteng pertahanan nilai tradisional yang berpredikat maju masih jauh dari harapan;
  4. Belum optimalnya upaya untuk melakukan penggalian, revitalisasi dan aktualisasi terhadap nilai budaya, adat dan tradisi sebagai *way of life* bagi masyarakat pada umumnya;
  5. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;
  6. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia;
  7. Upaya regenerasi pelaku seni tradisi terkendala kurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisi.

**Q. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

1. Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal;
2. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dengan jenis kekerasan yang semakin beragam serta bersifat lintas daerah;
3. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
4. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
5. Jumlah kasus penyimpangan reproduksi remaja semakin meningkat
6. Perlunya aktualisasi program keluarga berencana untuk mengatasi lonjakan jumlah penduduk dan berbagai dampak sosial yang disebabkan.

**R. Kepemudaan dan Olah Raga**

1. Terbatasnya sarana untuk kegiatan kepemudaan, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan;
2. Angka dan bentuk kenakalan remaja cenderung meningkat dan semakin mengkhawatirkan;
3. Perlunya apresiasi untuk kegiatan positif pemuda guna mengurangi angka kenakalan remaja;
4. Prestasi keolahragaan cenderung stagnan dan perlu ditingkatkan;
5. Perlunya peningkatan sikap sportivitas, disiplin dan semangat juang atlet yang masih belum memadai;
6. Masih minimnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif.

**S. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

1. Perlunya peningkatan kapabilitas pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakatnya setelah terbitnya UU 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu lebih dioptimalkan;
3. Perlunya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan serta revitalisasi peran Posyandu dan PKK sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat desa.

**T. KETENAGAKERJAAN**

1. Laju pertumbuhan keselamatan kerja sektor formal belum sebanding dengan laju pertumbuhan pencari kerja;
2. Belum optimalnya daya saing pencari kerja DIY dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
3. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi kebutuhan di pasar kerja. Kesenjangan ini membuat pencari kerja sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan;
4. Perluasan kesempatan kerja belum optimal;

5. Minat penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan.

**U. Transmigrasi**

1. Besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi dan jumlah pendaftar calon transmigrasi belum sebanding dengan kuota/ alokasi penempatan transmigrasi oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi;
2. Kerja sama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal. Kondisi daerah penempatan yang sudah disiapkan sering kali tidak sesuai dengan azas 2 C (*Clear and Clean*) dan 4 L (Layak huni, Layak berkembang, Layak lingkungan dan Layak usaha);
3. Perlunya jalinan kerjasama yang intensif serta efektif dengan Pemda lokasi transmigrasi untuk mengantisipasi semua permasalahan yang muncul di lapangan;

**V. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

1. Masih terdapat potensi konflik di masyarakat yang berlatar belakang sentimen agama maupun sebab lainnya;
2. Perlunya untuk terus menjaga kerukunan antar warga masyarakat;
3. Peningkatan kemampuan SAR/Linmas guna mendukung kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan gangguan;
4. Pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini masyarakat perlu ditingkatkan.

**W. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dst.**

1. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
2. Belum optimalnya implementasi *Good Governance*
3. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;

4. Internalisasi Budaya Satrya Pemerintahan belum cukup efektif;
5. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
6. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
7. Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
8. Penegakan supremasi hukum masih lemah, sementara gangguan kamtibmas cenderung meningkat.
9. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
10. Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;
11. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.

#### **X. Perhubungan**

1. Sistem transportasi yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
2. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu, yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal;
3. Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
4. *Load factor* angkutan umum belum sesuai harapan disebabkan oleh minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang masih rendah;
5. Semakin banyaknya titik-titik kemacetan di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga.

#### **Y. Energi dan Sumber Daya Mineral**

1. Upaya pemenuhan kebutuhan energi di DIY melalui penyediaan energi baru terbarukan masih belum maksimal;
2. Upaya konservasi air tanah belum menjadi prioritas utama bagi semua pihak;

3. Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
5. Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air;
6. Upaya peningkatan penyediaan air baku belum sebanding dengan meningkatnya kebutuhan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perkotaan di DIY;
7. Kelembagaan pengelola irigasi dan pengairan belum berfungsi secara optimal;
8. Beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya kekeringan.

#### **Z. Perumahan**

1. Terbatasnya akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan perumahan/lahan perumahan yang layak;
2. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perumahan sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terkendali;
3. Sarana dan prasarana untuk pengembangan perumahan dan permukiman belum dijalankan secara terpadu.
4. Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan;
5. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan di kawasan permukiman;
6. Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
7. Belum tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan budaya;
8. Masih terdapatnya lokasi genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta;
9. Belum optimalnya layanan jasa konstruksi.



**AA. Penataan Ruang**

1. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai peruntukannya;
2. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain;
3. Masih tingginya disparitas antar wilayah membutuhkan percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah;
4. Kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial;
5. Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan;
6. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal, dan keberpihakan kepada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan.

**BB. Komunikasi dan Informatika (Kominfo)**

1. Pelaksanaan Program *Digital Government System* (DGS) belum sesuai dengan harapan, yakni belum terintegrasinya Program DGS di setiap SKPD;
2. Belum optimalnya layanan unggulan DGS;
3. Perlunya edukasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara bijak;
4. Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi.

**CC. Perpustakaan dan Kearsipan**

1. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana penunjang keperpustakaan yang representatif guna mendukung keunggulan DIY sebagai kota Pendidikan;
2. Banyaknya arsip/pustaka bernilai tinggi yang perlu dikelola secara baik dan benar untuk memperkaya khasanah budaya dan sumber ilmu pengetahuan;

**DD. Industri dan Perdagangan**

1. Upaya penyediaan kawasan khusus industri di DIY belum cukup optimal;
2. Perlunya peningkatan daya saing industri lokal dalam menghadapi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
3. Pengembangan industri kreatif sebagai salah satu keunggulan DIY belum optimal;
4. Perlunya peningkatan perlindungan konsumen terutama terkait semakin banyaknya produk dari negara lain yang masuk pasca diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

## **BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif merupakan salah satu misi RPJMD 2012–2017. Misi itu dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Lebih lanjut, sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut membutuhkan arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian DIY terkini dan proyeksinya di beberapa tahun mendatang yang dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi.

#### **3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB DIY menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha

masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 24,57 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40% dan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp 25,90 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%.

Nilai proyeksi PDRB tahun 2015 sebesar Rp 27.13 triliun dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 28,75 triliun dan Tahun 2017 sebesar Rp 30,5 triliun. Perkembangan PDRB DIY mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di DIY semakin mengalami kemajuan. Kenaikan PDRB DIY ini di sebabkan berbagai faktor, salah faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB DIY adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi DIY baik industri, pariwisata, perdagangan, ataupun pendidikan.

Selain itu jumlah industri dan tenaga kerja juga merupakan faktor pendukung dari pertambahan PDRB DIY. Selain faktor internal tersebut faktor eksternal juga dapat mempengaruhi PDRB DIY seperti *regional spillover* atau pengaruh daerah batas. Perkembangan daerah perbatasan atau daerah sekitar DIY tersebut juga akan dapat berpengaruh positif atau dapat menjadi faktor pendorong tumbuhnya PDRB DIY.

Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi Renaisans Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di DIY. Peningkatan PDRB tersebut harus dilandasi semangat Renaisans Yogyakarta, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan.

**Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2016**

Uraian	2013	2014*	2015*	2016*
PDRB DIY (Juta Rp)	24.567,480	25,824,099	27,407,014	30,496,232
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,1	5,83	6,07

Keterangan: \* adalah angka proyeksi

Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,83% dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 5,97% pada tahun 2016. Sedangkan pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota ditunjukkan

pada Tabel 3.2. Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul adalah dua daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi terendah. Di tahun 2016, ekonomi Kulonprogo tumbuh 5,39% dan Gunungkidul tumbuh 5,01%. Sementara itu pada tahun 2017, Bantul adalah daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sekitar 6,15%.

**Tabel 3.2**      **Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2013-2016 (dalam %)**

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Kulon Progo	5,05	4,68	5,30	5,39
Bantul	5,57	5,44	6,14	6,15
Gunung Kidul	5,16	4,78	4,89	5,01
Sleman	5,7	5,86	5,93	6,11
Yogyakarta	5,64	5,64	6,20	6,40
DIY	5,41	5,1	5,07	5,97

*Keterangan: angka tahun 2015 dan 2016 adalah hasil proyeksi*

Pertumbuhan positif ekonomi DIY tahun 2014 – 2016 didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: *pertama*, terus berjalannya pembangunan di DIY, baik di sektor publik maupun swasta; *kedua*, tren positif kondisi perekonomian DIY akan semakin menarik adanya investasi yang lebih besar lagi baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); *ketiga*, semakin bertambahnya tenaga terampil dan pemanfaatan teknologi yang optimal berakibat pada meningkatnya kinerja sektor perindustrian; *keempat*, faktor proses politik lokal dan nasional sebagai dampak kebijakan pemerintahan baru baik di eksekutif maupun legislatif melalui visi dan misi pembangunan ekonomi yang lebih baik. Sementara itu upaya peningkatan pertumbuhan pada wilayah potensial (Gunungkidul dan Kulon Progo) diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian DIY yang selama ini memiliki disparitas wilayah yang cukup tinggi dan daya saing yang belum optimal dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

**Tabel 3.3**      **Proyeksi Nilai PDRB ADHK 2000 DIY Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)**

TAHUN PDRB	2015	2016	2017
PDRB Kulonprogo	2.273.114	2.395.635	2.526.676
PDRB BANTUL	5.198.817	5.518.544	5.860.694
PDRB GK	4.017.707	4.218.994	4.435.006
PDRB SLEMAN	8.377.437	8.889.298	9.435.990
PDRB YOGYA	7.262.316	7.727.104	8.237.866

PDRB \ TAHUN	2015	2016	2017
DIY	27.129.391	28.749.575	30.496.232

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan PDRB riil, proyeksi kapasitas ekonomi masih menunjukkan bahwa kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih merupakan daerah yang menghasilkan output tertinggi di DIY. Pada tahun 2017, perkiraan PDRB riil Kabupaten Sleman adalah Rp9,44 trilyun dan Kota Yogyakarta adalah Rp8,24 trilyun. Sementara itu Kabupaten Kulonprogo merupakan daerah yang mencapai PDRB riil terkecil yaitu Rp2,53 trilyun.

Perkembangan perekonomian di DIY akan menarik investasi lebih besar dengan terus naiknya PMA dan PMDN. Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN ini sangat diperlukan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk mengembangkan pariwisata DIY. Sektor lain yang juga membutuhkan investasi adalah sektor industri industri untuk dapat mengembangkan usahanya terutama pada industri - industri kecil dan menengah. kedua sektor andalan DIY tersebut (Pariwisata dan Industri) apabila terus dipacu untuk berkembang maka akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi di DIY yang cukup baik apabila terus dipertahankan dan ditingkatkan maka akan mengundang banyak investor untuk terus menanamkan dananya di DIY. Kemudian untuk meningkatkan kinerja suatu industri agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan juga tenaga kerja yang terampil. Selain faktor investasi dan tenaga terampil tersebut, faktor konsumsi juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi DIY, semakin tinggi konsumsi maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

### 3.1.2 Struktur Sektor Ekonomi

Capaian pada tahun 2013, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor keuangan real estate dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalian. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi di bawah dua persen dari total PDRB. Proporsi kontribusi tersebut relatif sama pada tahun 2014 di mana proyeksi kontribusi antar sektor tidak berubah secara signifikan dibandingkan tahun 2013.

**Tabel 3.4 Kontribusi PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), Tahun 2013-2017 (%)**

Lapangan Usaha	2013	2014*	2015*	2016*	2017*
1. Pertanian	13,91	15,97	15,57	15,17	14,76
2. Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,67	0,66	0,65	0,64
3. Industri Pengolahan	13,77	12,17	11,94	11,70	11,46
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,25	0,95	0,95	0,95	0,96
5. Konstruksi	10,85	9,84	9,92	10,00	10,07
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	20,65	21,96	22,17	22,39	22,60
7. Pengangkutan dan dan Komunikasi	8,48	11,04	11,18	11,33	11,48
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	10,27	10,09	10,25	10,41	10,57
9. Jasa-jasa	20,16	17,31	17,36	17,41	17,47
PDRB	100	100	100	100	100

Keterangan: \* adalah angka proyeksi

Sumber: BRS BFS DIY No 11/02/34/Th.XVI &Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2015 diproyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang sampai tahun 2017, mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor karena beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat melalui perluasan pasar dan peningkatan daya saing, sehingga diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada tren meningkat dengan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era *golden age* angkatan kerja Indonesia.

Secara sektoral seperti ditampilkan dalam Tabel 3.3., pertumbuhan PDRB menunjukkan dinamika di hampir semua sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian yang proyeksi pertumbuhannya selalu di bawah tiga persen tiap tahunnya. Trend tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus karena pertumbuhan aktual sector pertanian pada beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tertekan (bahkan pernah mengalami kontraksi pada tahun 2010-2011), berkaitan dengan adanya dampak anomaly iklim. Pertumbuhan output sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap

rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian. Namun, sektor pertanian diharapkan masih memberikan kontribusi besar dalam perekonomian DIY karena kontribusi tenaga kerja sektor pertanian masih cukup dominan dan luasan lahan pertanian (terutama pertanian lahan kering) yang masih cukup dominan di DIY serta kaitan erat sektor strategis ini dengan problem ketahanan pangan.

**Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000) Tahun 2013-2017 (%)**

Lapangan Usaha	2013	2014*	2015*	2016*	2017*
1. Pertanian	4,44	3,13	3,19	3,23	3,24
2. Pertambangan dan Pengalihan	2,92	4,06	4,18	4,29	4,36
3. Industri Pengolahan	2,37	3,67	3,77	3,86	3,89
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6,93	6,22	6,36	6,51	6,57
5. Konstruksi	6,68	6,53	6,66	6,79	6,85
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,88	6,70	6,84	6,99	7,06
7. Transportasi dan Komunikasi	7,73	7,02	7,18	7,36	7,44
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	6,47	7,36	7,48	7,64	7,70
9. Jasa-jasa	4,58	6,01	6,15	6,24	6,45

*Keterangan: \* adalah angka proyeksi*

*Sumber: BRS BPS DIY No 11/02/34/Th.XVI & Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018*

Secara makro regional, kondisi internal domestik DIY yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi DIY adalah misi dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan *good governance* sebagai misi utama seperti yang tertuang pada RPJMD. Perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan membuat lompatan perbaikan iklim investasi pada wilayah potensial sebagai penopang perekonomian makro yang senantiasa tumbuh secara berkualitas di DIY dalam satu dasawarsa mendatang.



### 3.1.3 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

#### 3.1.3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Komponen terbesar peningkat nilai PDRB atas dasar harga berlaku selama tahun 2013 – 2016 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan ekspor barang dan jasa, pembentukan modal tetap domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba dan perubahan inventori. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga di tahun 2013 adalah Rp33,29 trilyun naik menjadi Rp48,39 trilyun di tahun 2017. Komponen peningkat nilai PDRB juga senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode yang sama.

Sementara itu, nilai impor sebagai pengurang nilai PDRB juga senantiasa mengalami kenaikan. Nilai impor di tahun 2013 adalah Rp36,372 trilyun yang terus mengalami kenaikan menjadi Rp52,86 trilyun di tahun 2016. Kenaikan yang cukup besar tersebut menyebabkan nilai ekspor neto DIY selalu mengalami defisit mengingat nilai ekspor selalu di bawah nilai impor. Gambaran perubahan komponen pengeluaran PDRB atas dasar harga berlaku disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6 Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2016 Menurut Penggunaan (dalam juta rupiah)**

Jenis Penggunaan	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	33.293.526	37.475.193	42.451.899	48.390.920
Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	2.269.996	2.555.108	2.894.426	3.299.356
Pengeluaran pemerintah konsumsi	16.809.335	18.920.587	21.433.241	24.431.752
Pembentukan modal tetap domestik bruto	19.908.292	22.408.774	25.384.659	28.935.972
Perubahan Inventori	994.294	1.119.178	1.267.804	1.445.170
Diskrepansi Statistik	-120.913	-136.100	-154.174	-175.743
Ekspor barang-barang dan jasa-jasa	26.907.824	30.287.447	34.309.620	39.109.536
Dikurangi :				
Impor barang-barang dan jasa-jasa	36.372.036	40.940.364	46.377.244	52.865.420
P D R B	63.690.318	71.689.822	81.210.231	92.571.542

Sumber : BPS dan Diolah

Keterangan: - Angka tahun 2013 adalah angka sangat sementara  
Angka tahun 2014 – 2016 adalah hasil olahan berdasarkan tren

### 3.1.3.2 PDRB atas dasar Harga Konstan

Komponen terbesar dalam PDRB riil adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, sementara yang paling kecil adalah perubahan inventori. Pada tahun 2013, nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar Rp11,94 triliun yang meningkat terus menjadi Rp14,47 triliun di tahun 2016. Sementara itu perubahan inventori justru mengalami penurunan dari Rp677 milyar di tahun 2013 menjadi Rp314,02 milyar di tahun 2016. Sementara itu, komponen-komponen penggunaan lain PDRB nilai konstan secara umum selalu mengalami kenaikan. Komponen ekspor mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2013 – 2016, namun mengalami tren menaik setelah tahun 2014. Gambaran komposisi seluruh komponen penggunaan disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2016 Menurut Penggunaan (dalam juta rupiah)**

Jenis Penggunaan	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	11.937.089	13.299.458	14.189.053	14.468.970
Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	763.630	896.219	986.152	1.034.991
Pengeluaran konsumsi pemerintah	4.923.539	5.440.243	5.757.181	5.838.785
Pembentukan modal tetap domestik bruto	6.413.761	6.955.250	7.302.539	7.358.908
Perubahan Inventori	677.428	540.879	462.415	314.016
Diskrepansi Statistik	-472.215	-300.793	-376.320	-888.226
Ekspor barang-barang dan jasa-jasa	10.938.463	10.631.980	11.023.754	12.963.936
Dikurangi :				
Impor barang-barang dan jasa-jasa	10.614.219	11.565.680	12.215.385	12.341.807
P D R B	24.567.476	25.897.555	27.129.390	28.749.574

Sumber : BPS dan Diolah

Keterangan:

Angka tahun 2013 adalah angka sangat sementara

Angka tahun 2014 – 2016 adalah hasil olahan berdasarkan tren

### 3.1.4 Inflasi

Inflasi pada tahun 2015 cukup rendah dibandingkan angka inflasi tahun 2014. Realisasi inflasi DIY tahun 2015 tersebut cukup rendah karena di bawah angka psikologis inflasi yaitu 10 persen dan di bawah inflasi tahun 2013.

Berdasarkan data dari BI (2015), penurunan inflasi (TW III) tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah untuk menurunkan tarif listrik, harga bahan bakar rumah tangga dan bensin, serta berlalunya masa liburan. Sementara itu sumber tekanan inflasi (TW III) berasal dari peningkatan harga bahan makanan terutama beras, seringi dengan produksi akibat dampak El Nino. Selain itu, kelompok makanan, minuman, rokok dan tembakau juga mengalami kenaikan peningkatan

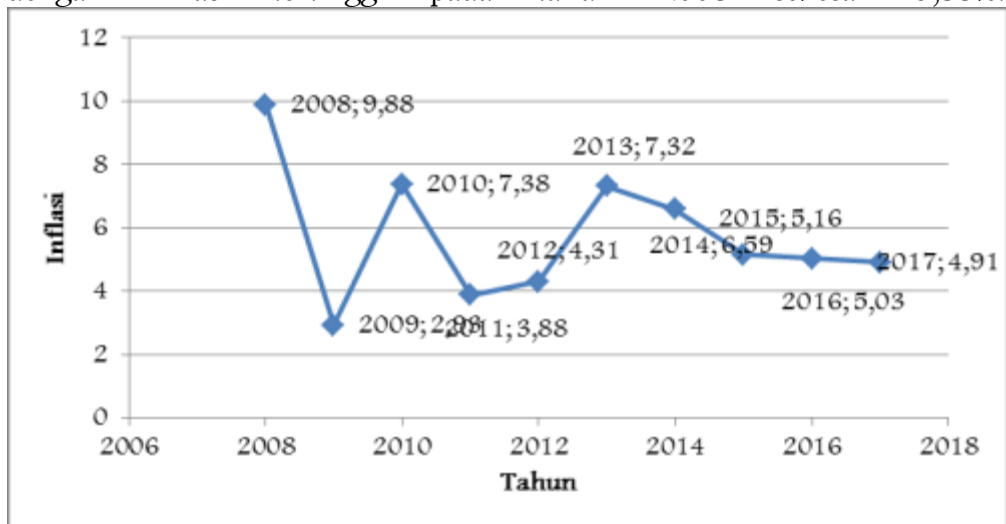
harga terutama dari komoditas nas dengan lauk sebagai dampak lanjutan dari kenaikan harga beras.

**Tabel 3.8      Inflasi DIY Tahun 2013 s/d 2015**

Nilai \ Tahun	2013	2014	2015
Proyeksi	n.a	6,88**	7,45**
Realisasi (%)	7,32	6,59	5,23*(3,09)
Perubahan (%)	-	-0,29	-2,29

*Sumber : Analisis Makro Ekonomi DIY 2014 dan 2015*

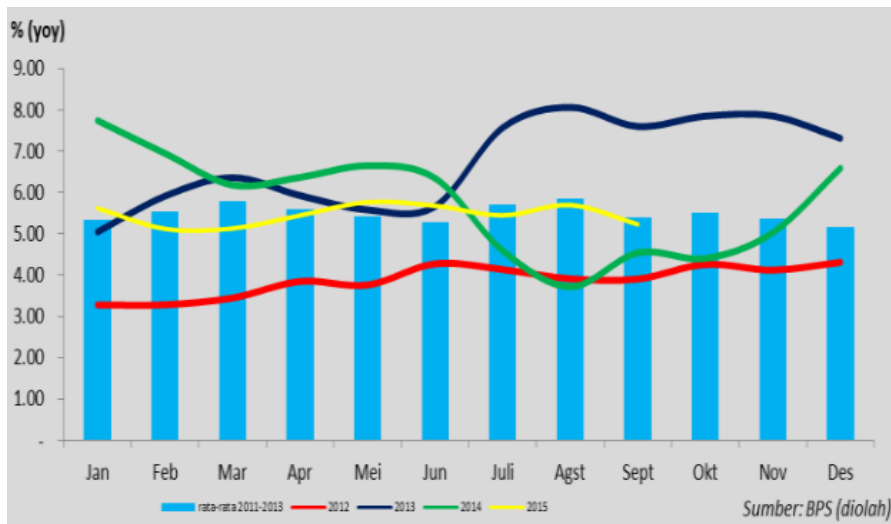
Perkembangan data Inflasi tahun 2008-2015 dan proyeksi inflasi tahun 2015-2017 mengalami perubahan dan perkembangan fluktuatif, dimana untuk nilai proyeksi inflasi DIY cenderung mengalami penurunan. Sedangkan nilai inflasi pada tahun 2008-2015 cenderung fluktuatif dengan inflasi tertinggi pada tahun 2008 sebesar 9,88%.



*Sumber: BPS Provinsi DIY*

**Gambar 3.1      Grafik Perkembangan Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2008-2017**

Pola inflasi 2012 s/d Triwulan III, 2015 dapat dideskripsikan sebagai berikut



Sumber: BPS diolah dalam Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan III, 2015

### Gambar 3.2 Pola Inflasi DIY

Proyeksi inflasi DIY mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 5,16 persen kemudian menurun lagi di tahun 2016 menjadi 5.03 persen dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 4.93 persen. Meskipun harga BBM mengalami fluktuasi, tetapi TPID terus melakukan antisipasi agar inflasi DIY stabil. Upaya TPID DIY di antaranya memastikan pasokan dari Pertamina aman, koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mencegah penimbunan, peninjauan kembali tarif angkutan darat serta memastikan pasokan beras dan gula aman. Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran supply dan distribusinya perlu terus diperhatikan pemerintah karena iklim yang cenderung kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di DIY. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9 Proyeksi Inflasi DIY, Tahun 2016-2017 (%)**

Indikator	2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Inflasi (%)	5.03	5.06	4.91	4.93

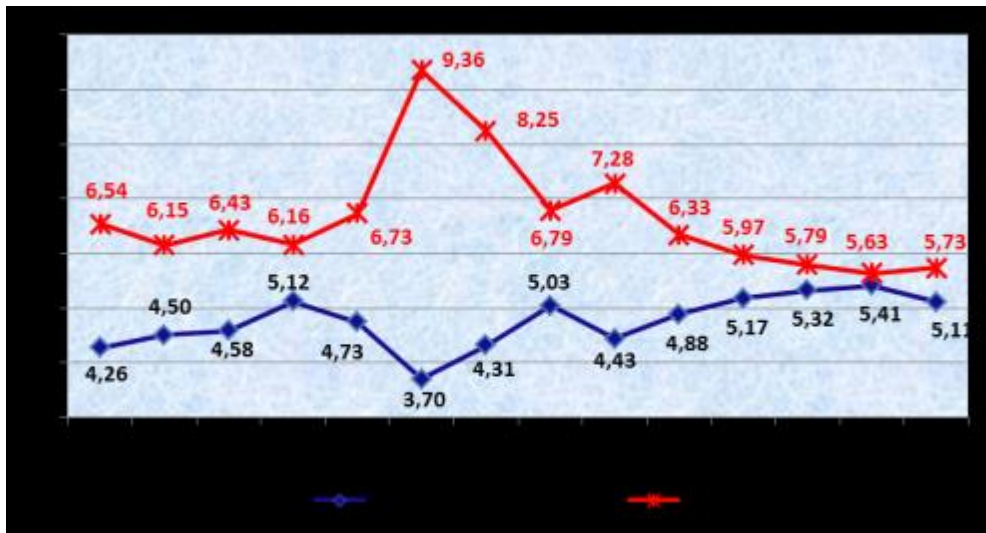
*Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2015, Bappeda DIY*

### 3.1.5 ICOR

#### 3.1.5.1 Nilai ICOR Total

Pada tahun 2014 angka ICOR DIY meningkat dari 5,63 pada tahun 2013 menjadi 5,73. Dapat dilihat pula bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan 2010 angka ICOR DIY per tahun relatif tinggi di atas 6 (enam). Hal ini berarti kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di DIY dapat dikatakan relatif kurang efisien. Pada tahun 2001 ICOR DIY sebesar 6,54 dan cenderung mengecil sampai dengan tahun 2004 sebesar 6,16. Kemudian ICOR DIY mencapai puncaknya ketika terjadi musibah gempa 2006 sebesar 9,36 dan kemudian menurun menjadi 6,79 di tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 2009 angka ICOR mengalami kenaikan menjadi 7,28 yang kemudian terus menurun hingga tahun 2013 menjadi 5,63.

Angka koefisien ICOR pada tahun 2006 yang mencapai 9,36 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun tersebut banyak investasi dilakukan tetapi output yang dihasilkan hanya mengalami pertumbuhan positif yang relatif kecil. Seperti diketahui, bahwa pada tahun 2006 terjadi gempa bumi di DIY yang menghancurkan sebagian besar bangunan, mesin dan peralatan produksi sehingga pelaku ekonomi harus melakukan penggantian atau perbaikan barang-barang modal tersebut. Sebagai akibatnya nilai investasi pada tahun itu relatif menjadi besar sementara produksi menurun karena belum pulihnya kapasitas produksi. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.3 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan ICOR DIY, Tahun 2001-2014

Sementara itu, membaiknya angka ICOR pada tahun 2007 dan 2008 dikarenakan barang modal dan peralatan yang rusak pada tahun 2006 sudah diperbaiki dan mulai memproduksi secara normal. Sedangkan memburuknya angka ICOR pada tahun 2009 kemungkinan disebabkan oleh krisis ekonomi global yang menyebabkan kegiatan investasi semakin mahal tetapi pemasaran produk/output mengalami kendala karena penurunan daya beli secara global.

Pada tahun 2014 angka ICOR DIY sebesar 5,73, sedikit meningkat dari tahun 2013 yang mencapai 5,63. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada tahun 2014 relatif kurang efisien dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2014, untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 (satu) unit diperlukan tambahan investasi sebesar 5,73 unit, sedangkan pada tahun 2013 hanya diperlukan tambahan investasi sebesar 5,63 unit. Secara umum, angka ICOR DIY masih relatif tinggi yang menandakan proses produksi relatif kurang efisien. Angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4.

Pada level kabupaten/kota, tampak bahwa pada tahun 2014 ICOR tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman 6,94, diikuti Kabupaten Bantul sebesar 5,60, Kabupaten Gunungkidul 4,76, Kota Yogyakarta 4,43, dan terendah Kabupaten Kulon Progo sebesar 3,63. Tingginya ICOR di Kabupaten Sleman antara lain disebabkan oleh jenis investasi yang ditanamkan biasanya padat modal. Sektor yang dominan di Kabupaten

Sleman adalah sektor perdagangan, jasa-jasa dan industri (Lampiran 13). Sebaliknya, rendahnya ICOR di Kabupaten Kulon Progo antara lain disebabkan oleh jenis investasi di Kabupaten Kulon Progo masih didominasi oleh sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di wilayah ini. Seperti diketahui, sektor pertanian adalah sektor yang mempunyai proses produksi lebih pendek, tergantung pada alam, dan merupakan sektor padat tenaga kerja sehingga ICOR agregat di kabupaten ini lebih rendah.

Rata-rata ICOR kabupaten/kota di DIY selama periode 2010-2014 sejalan dengan nilai ICOR kabupaten/kota pada tahun 2014. Selama periode pengamatan, rata-rata ICOR Kabupaten Sleman mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 8,10; diikuti oleh Kabupaten Bantul 6,01; Kabupaten Gunungkidul 5,12; Kota Yogyakarta 4,41; dan terendah Kabupaten Kulon Progo sebesar 3,81.

**Tabel 3.10 ICOR Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, Tahun 2010-2014**

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013*	2014**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	5,10	3,31	3,49	3,52	3,63	3,81
Bantul	6,58	6,08	6,05	5,73	5,60	6,01
Gunungkidul	5,75	5,46	5,03	4,62	4,76	5,12
Sleman	9,72	8,53	7,86	7,47	6,94	8,10
Yogyakarta	4,88	4,26	4,25	4,24	4,43	4,41
DI Yogyakarta	6,33	5,97	5,79	5,63	5,73	5,89

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: \* Angka Sementara; \*\*Angka Sangat Sementara

Angka ICOR dengan pendekatan investasi hanya terdiri dari PMTB saja menghasilkan angka ICOR dengan urutan yang sama. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Sleman mempunyai ICOR tertinggi di DIY. Sebaliknya, Kabupaten Kulon Progo mempunyai ICOR terendah di DIY sejak tahun 2011 hingga 2014.

**Tabel 3.11 ICOR Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, Tahun 2010-2014**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013*	2014**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	4,56	2,99	3,07	3,82	3,96	3,68
Bantul	5,88	5,49	5,32	5,15	5,28	5,43
Gunungkidul	5,14	4,93	4,42	4,15	4,35	4,60

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013*	2014**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sleman	8,69	7,70	6,91	6,71	6,75	7,35
Yogyakarta	4,37	3,85	3,74	3,81	4,08	3,97
DI Yogyakarta	5,68	5,35	5,19	5,09	5,41	5,34

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: \* Angka Sementara; \*\*Angka Sangat Sementara

### 3.1.5.2 Nilai ICOR Sektoral

Hasil penghitungan koefisien ICOR dengan asumsi investasi yang ditanam pada tahun tertentu baru akan menghasilkan *output* yang diinginkan setelah satu tahun dan dua tahun berikutnya. Secara total koefisien ICOR dengan time lag 1 dan time lag 2 mengalami penurunan, yaitu dari 5,89 pada lag 0 menjadi 5,78 pada lag 1, dan menjadi 5,58 pada lag 2. Hal ini mengindikasikan produktivitas kapital yang semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan ICOR standar dengan lag=0, ada enam sektor yang mengalami penurunan ICOR dengan lag=1 maupun lag=2, yaitu: sektor penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan. Keenam sektor tersebut mengalami peningkatan produktivitas kapital setelah satu atau dua tahun. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan produktivitas kapital dicerminkan dengan kenaikan koefisien ICOR yaitu pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; serta jasa-jasa.

Dalam melakukan penentuan nilai ICOR Total dilakukan dengan melakukan penentuan nilai ICOR melalui metode standar Lag 2. Dalam hal ini dilakukan dengan justifikasi bahwa ditinjau menurut kelompok sektor, rata-rata porsi investasi terbesar terjadi pada kelompok sektor tersier, yaitu 78,69 persen, diikuti kelompok sektor sekunder (20,50 persen), dan sektor primer (0,82 persen). Sektor primer meliputi sektor pertanian dan penggalian; sektor sekunder terdiri dari sektor industri, listrik dan konstruksi. Sedangkan sektor tersier mencakup sektor perdagangan, pengangkutan dan komunikasi; keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Dominasi sektor tersier dan sekunder mengindikasikan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh kebanyakan unit usaha di DIY tidak langsung menghasilkan produk pada tahun yang sama dengan waktu investasi dilakukan atau ada lag waktu antara proses realisasi investasi dengan saat output dihasilkan. Secara lebih jelasnya data dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.12 ICOR Sektoral Metode Standar Lag=0, Lag=1, Lag=2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, Tahun 2010-2014**

Sektor/Subsektor	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Pertanian</b>	<b>3,06</b>	<b>3,45</b>	<b>3,89</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	3,02	3,41	3,86
b. Tanaman Perkebunan	3,01	3,30	3,62
c. Peternakan Dan Hasil-Hasilnya	3,46	3,76	4,09
d. Kehutanan	8,00	8,61	9,27
e. Perikanan	3,93	4,19	4,48
<b>2. Pertambangan &amp; Penggalian</b>	<b>4,36</b>	<b>3,94</b>	<b>3,44</b>
<b>3. Industri Pengolahan</b>	<b>4,91</b>	<b>4,28</b>	<b>3,64</b>
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	<b>18,02</b>	<b>14,43</b>	<b>11,86</b>
a. Listrik	17,78	15,18	12,51
b. Air Bersih	22,66	19,12	15,65
<b>5. Konstruksi</b>	<b>4,28</b>	<b>3,96</b>	<b>3,60</b>
<b>6. Perdag., Hotel &amp; Restoran</b>	<b>3,04</b>	<b>3,21</b>	<b>3,42</b>
a. Perdagangan Besar & Eceran	2,87	2,96	3,04
b. Hotel	4,05	4,38	4,74
c. Restoran	2,91	3,16	3,42
<b>7. Pengangkutan &amp; Komunikasi</b>	<b>11,22</b>	<b>10,25</b>	<b>9,37</b>
a. Pengangkutan	15,91	14,86	13,73
b. Komunikasi	7,34	6,56	5,73
<b>8. Keuangan, Real Estat &amp; Jasa Perusahaan</b>	<b>5,32</b>	<b>5,18</b>	<b>5,01</b>
a. Bank	4,50	4,32	4,09
b. Lainnya	5,84	5,73	5,55
<b>9. Jasa-Jasa</b>	<b>7,32</b>	<b>7,62</b>	<b>7,90</b>
a. Pemerintahan Umum	9,34	9,71	10,06
b. Swasta	2,60	2,74	2,86
PDRB	5,89	5,78	5,58

Sumber : Analisis ICOR DIY, Tahun 2014

### 3.1.5.3 Keterbandingan Nilai ICOR DIY dengan Wilayah Lain

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), pada tahun 2014 ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka tertinggi ketiga di bawah Provinsi NTB dengan ICOR 12,13 dan DKI Jakarta yang mencapai 6,43. Relatif tingginya ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta dibanding provinsi lain tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh: (1) pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang hampir selalu di bawah Provinsi lain di Jabalnusra selama lima tahun terakhir, (2) dari sisi investasi, belum sebgas provinsi lain di Jawa, baik dari segi nilainya, infrastruktur, akses perijinan dan penataan kawasannya, dan (3) skala usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh perusahaan mikro kecil (UMK) sehingga jika dilihat tingkat produktivitas/efisiensinya biasanya lebih rendah dari pada

perusahaan yang mempunyai skala usaha menengah/besar (UMB) dalam hal penerapan teknologi produksi.

**Tabel 3.13 ICOR di Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB +  $\Delta$  Inventori), Tahun 2010-2014**

Provinsi	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI	5,92	5,80	6,11	6,44	6,43
JABAR	2,95	3,09	3,33	3,71	3,97
JATENG	3,36	3,30	3,23	3,64	3,89
<b>DIY</b>	<b>6,56</b>	<b>5,80</b>	<b>5,43</b>	<b>5,26</b>	<b>5,73</b>
JATIM	3,28	2,89	2,92	3,10	3,06
BANTEN	2,98	2,92	3,29	3,68	4,64
BALI	3,94	3,75	4,49	5,40	5,38
NTB	5,25	-11,48	-27,26	5,96	12,13
NTT	4,24	4,63	4,31	4,37	4,94
<b>Indonesia</b>	<b>4,08</b>	<b>4,05</b>	<b>4,58</b>	<b>4,95</b>	<b>5,58</b>

Sumber : BPS DIY

Keterangan: \* Angka Sementara; \*\*Angka Sangat Sementara

Berdasarkan hasil penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan perubahan inventori diperoleh urutan angka ICOR di Provinsi Jabalnusra sebagai berikut: pada tahun 2010 dan 2011 berada di urutan tertinggi; pada tahun 2012 berada pada urutan kedua setelah DKI Jakarta; dan tahun 2013 dan 2014 menempati posisi ketiga tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat.

Demikian pula penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB saja menghasilkan urutan angka ICOR yang relatif hampir sama dengan kondisi memperhitungkan perubahan inventori. Pada 2010 ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan tertinggi, pada tahun 2011 dan 2012 kembali menempati urutan kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2013 menempati urutan tertinggi keempat setelah DKI Jakarta, NTB, dan Bali, dan pada tahun 2014 menempati urutan ketiga setelah NTB dan DKI Jakarta.

Tabel 3.14 ICOR di Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB), Tahun 2010-2014

Provinsi	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI	5,64	5,63	5,94	6,35	6,37
JABAR	2,95	2,91	3,08	3,20	3,53
JATENG	3,33	3,28	3,19	3,53	3,80
<b>DIY</b>	<b>5,68</b>	<b>5,35</b>	<b>5,19</b>	<b>5,09</b>	<b>5,41</b>
JATIM	2,88	2,74	2,67	2,95	3,16
BANTEN	2,91	2,86	3,22	3,61	4,55
BALI	4,63	4,48	4,93	5,61	5,25
NTB	4,87	-11,36	-32,22	6,33	11,61
NTT	2,91	2,86	3,11	3,10	3,92
<b>Indonesia</b>	<b>4,08</b>	<b>3,99</b>	<b>4,26</b>	<b>4,59</b>	<b>5,13</b>

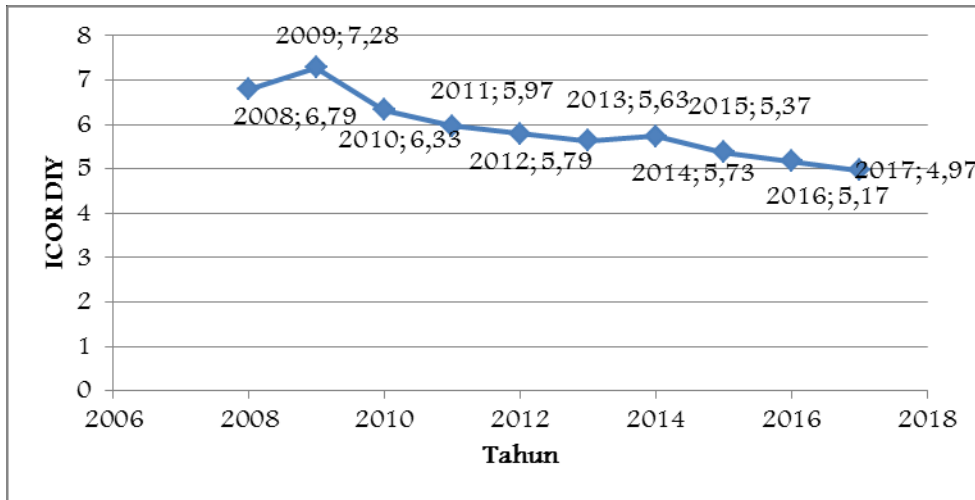
Sumber : BPS DIY

Keterangan: \* Angka Sementara; \*\*Angka Sangat Sementara

### 3.1.5.4 Proyeksi Nilai ICOR DIY

Proyeksi ICOR DIY untuk tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan, yaitu masing-masing 5.37; 5.17 dan 4.97. Penurunan angka ICOR ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY. Hal ini menunjukkan juga bahwa ketika ICOR rendah maka dengan investasi yang sama akan dapat menghasilkan output yang lebih besar sehingga nilai PDRB akan dapat naik. Jika nilai PDRB naik maka dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Faktor-faktor lain yang akan dapat menentukan ICOR antara lain adalah besarnya penambahan Investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat.

Nilai ICOR DIY mengalami penurunan, meskipun demikian nilai ICOR di DIY cenderung tinggi. Banyak hal yang menyebabkan nilai ICOR masing cenderung tinggi meskipun setiap tahunnya menurun, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi DIY yang relatif kecil di antara pulau Jawa, penggunaan teknologi yang masih rendah karena DIY lebih dominan industri UMKM. Kemudian dengan semakin gencarnya pertumbuhan investasi di DIY seperti pembangunan hotel-hotel, mall dan apartemen, diharapkan akan menurunkan nilai ICOR DIY.



Gambar 3.4 ICOR DIY Tahun 2008-2017

Grafik di atas terlihat ICOR tahun 2008-2013 dan proyeksi ICOR tahun 2015-2017. Grafik di atas menunjukkan nilai ICOR yang mengalami penurunan baik nilai realisasi maupun proyeksi.

Tabel 3.15 Proyeksi ICOR DIY Tahun 2015-2017

Tahun \ Indikator	2015		2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
ICOR	5.37	6.18	5.17	5.95	4.97	5.71

Sumber : Analisis ICOR DIY, Tahun 2014

Terkait dengan hasil perhitungan dan analisis nilai ICOR di DIY tersebut, maka terdapat beberapa strategi pembangunan DIY kedepan kaitannya dengan pengembangan investasi wilayah maupun peningkatan efisiensi sektoral, diantaranya :

1. Peningkatan efisiensi pada beberapa sektor dapat dikurangi dengan melancarkan transportasi dan komunikaskasi agar proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Peningkatan infrastruktur transportasi dan komunikasi merupakan upaya pembangunan yang tepat dengan disertai ketepatan lokasi alokasinya;
2. Mengingat nilai ICOR yang masih cukup tinggi dan dominasi usaha mikro kecil pada sruktur usaha di DIY maka perlu rekayasa teknologi

tepat guna yang efisien dan efektif yang bisa diadopsi oleh kalangan pengusaha mikro kecil sehingga proses produksi mereka menjadi semakin efisien. Selain itu diperlukan pembinaan manajerial dalam pembiayaan, pengelolaan usaha, dan informasi pasar. Perlu dibangun semangat kewirausahaan bagi masyarakat DIY.

### 3.1.6 Ketenagakerjaan

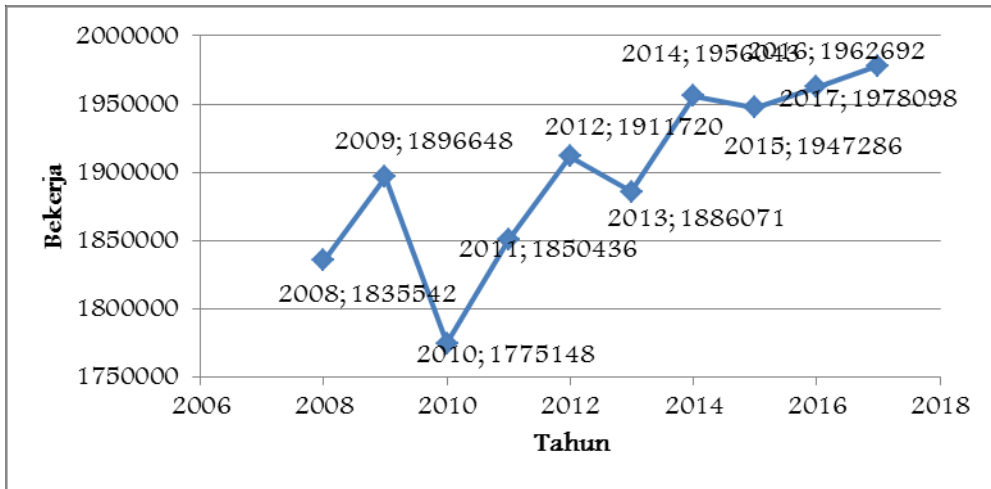
Jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 dan 2014 angkatan kerja mengalami peningkatan. Meningkatnya angkatan kerja DIY diakibatkan meningkatnya penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Sedangkan untuk tahun 2013 nilai realisasi lebih tinggi dibandingkan nilai proyeksinya. Pada tahun 2014 realisasi angkatan kerja naik menjadi 2.023.461 orang. Perlu kesiapan pihak yang berwenang menanggulangi kenaikan angkatan kerja, agar tidak menambah tingkat pengangguran.

**Tabel 3.16 Angkatan Kerja DIY Tahun 2013 s/d 2015 (Agustus)**

Nilai \ Tahun	2013	2014	2015
Proyeksi (orang)	1.946.438	1.953.928	1.961.418
Realisasi (orang)	1.949.243	2.023.461	1.971.463
Perubahan (orang)	2.805	69.553	10.045

*Sumber : Analisis ICOR DIY, Tahun 2014, Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 (BPS, 2015)*

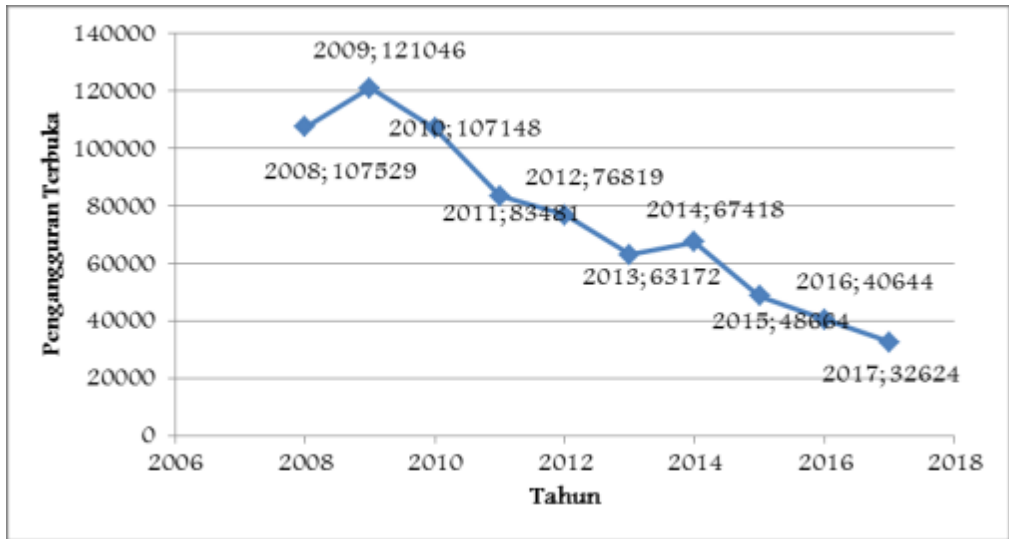
Lebih lanjut selama periode 2008-2015 realisasi orang yang bekerja di DIY cenderung fluktuatif, orang yang bekerja terendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 1.775.148 orang. Sedangkan untuk proyeksi 2015-2017 nilai proyeksi cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 proyeksi sebesar 1.947.286 orang dan meningkat pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 1.962.692 orang dan 1.978.098 orang. Secara lebih lanjut dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 3.5 Grafik Jumlah Penduduk dan Proyeksi Penduduk yang Bekerja di DIY tahun 2008-2017

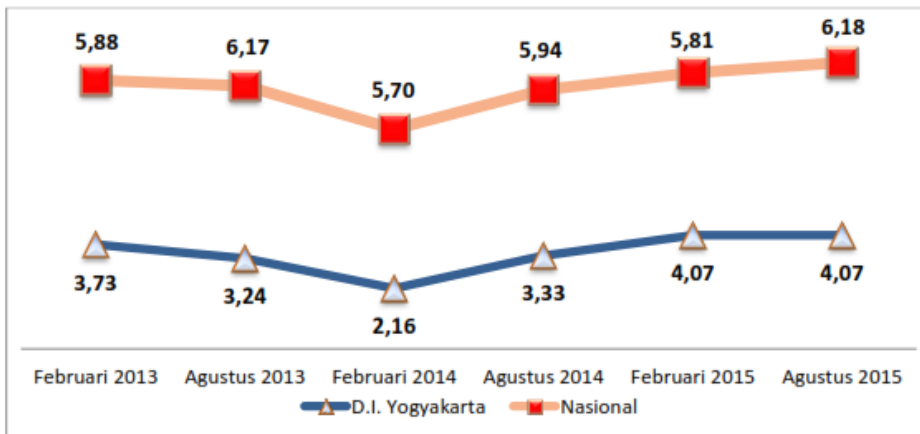
Terkait dengan masalah ketenagakerjaan di DIY tercatat bahwa masih terdapat pengangguran terbuka di DIY selama 2008-2013 cenderung mengalami penurunan. Namun kemudian angka pengangguran terbuka kembali naik pada tahun 2014 sebesar 67.418 kemudian turun pada tahun 2015 sebesar 48.664.

Proyeksi pengangguran terbuka tahun 2015 sampai 2017 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi bilamana kualitas pertumbuhan ekonomi di DIY dapat semakin baik dengan terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar, penyediaan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta tingkat upah yang terus membaik.



Gambar 3.6 Pengangguran Terbuka di DIY tahun 2008-2017

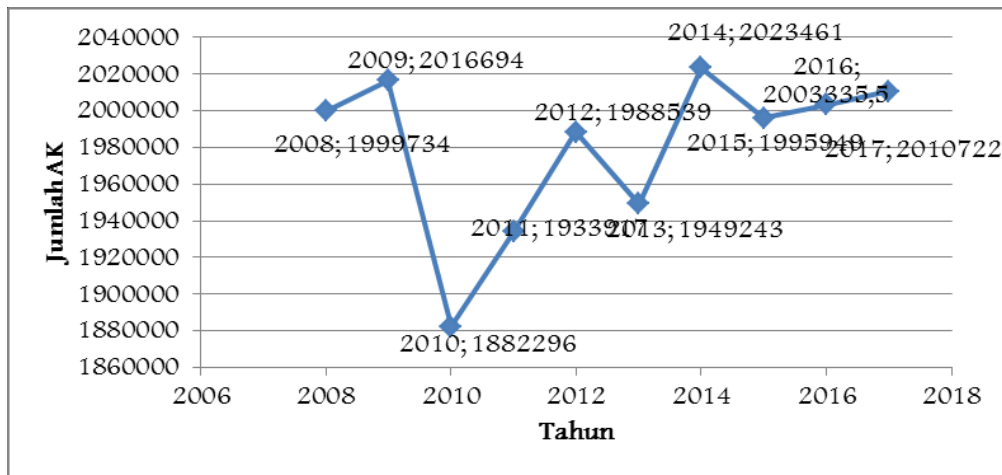
Proyeksi pengangguran tersebut dapat dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang cenderung naik yang berturut-turut sebesar 63.172 (2013), 67.418 (2014) dan naik menjadi 80.245 (2015). Dengan tingkat pengangguran terbuka sebagai berikut,



Sumber: Sakernas Februari 2013 – Agustus 2015

Gambar 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional

Selaras dengan perkembangan jumlah orang bekerja dan pengangguran terbuka yang terjadi selama periode 2008-2015 yang fluktuatif maka perkembangan angkatan kerja di DIY juga fluktuatif. Jumlah angkatan kerja terbesar terjadi di tahun 2015 sebanyak 1.971.463 orang (BPS DIY, 2015). Angka tersebut lebih rendah daripada angka yang disajikan oleh Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 sebesar 1.995.940 (2015) secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini,



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Gambar 3.8 Jumlah Angkatan Kerja di DIY tahun 2008-2017

Proyeksi untuk tahun 2015 dan 2017 angkatan kerja di DIY terus mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan juga kondisi di DIY akan terus membaik, baik dari sisi tingkat kesehatan, usia harapan hidup yang lebih panjang, kesempatan kerja yang semakin terbuka, dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi maupun kesiapan calon pekerja masuk ke angkatan kerja. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17 Proyeksi Ketenagakerjaan DIY Tahun 2017

Tahun	2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Bekerja	1.962.692	1.668.288	1.978.098	1.681.383
Pengangguran Terbuka	40.644	34.547	32.624	27.731
Jumlah Angkatan Kerja	2.003.336	1.702.835	2.010.722	1.709.114

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

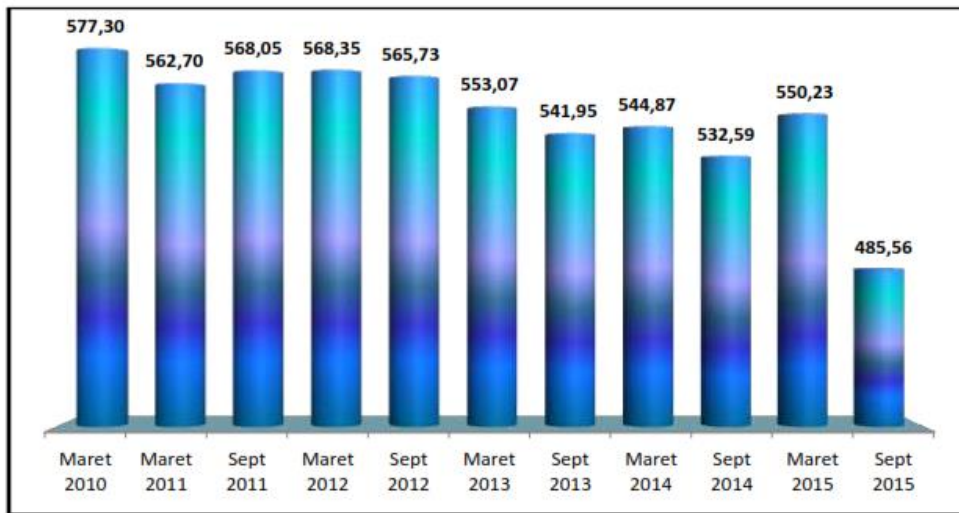


Jumlah angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketenagakerjaan di DIY di antaranya adalah tingkat upah, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan elastisitas penyerapan tenaga kerja.

Dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat pendidikan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta upah yang cukup maka akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja DIY, sehingga akan dapat membantu menurunkan tekanan permasalahan dari pengangguran di DIY. Proyeksi tahun 2015 hingga 2017 untuk DIY tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dan orang yang bekerja sama-sama mengalami kenaikan, dengan pengangguran terbuka yang diproyeksi mengalami penurunan. Ini menggambarkan adanya optimisme yang kuat pada kualitas laju pertumbuhan ekonomi DIY, khususnya kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, kegiatan pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan di wilayah DIY diharapkan dapat menyerap tenaga kerja atau dengan kata lain investasi di DIY diharapkan bersifat *Labour intensive*.

### 3.1.7 Kemiskinan

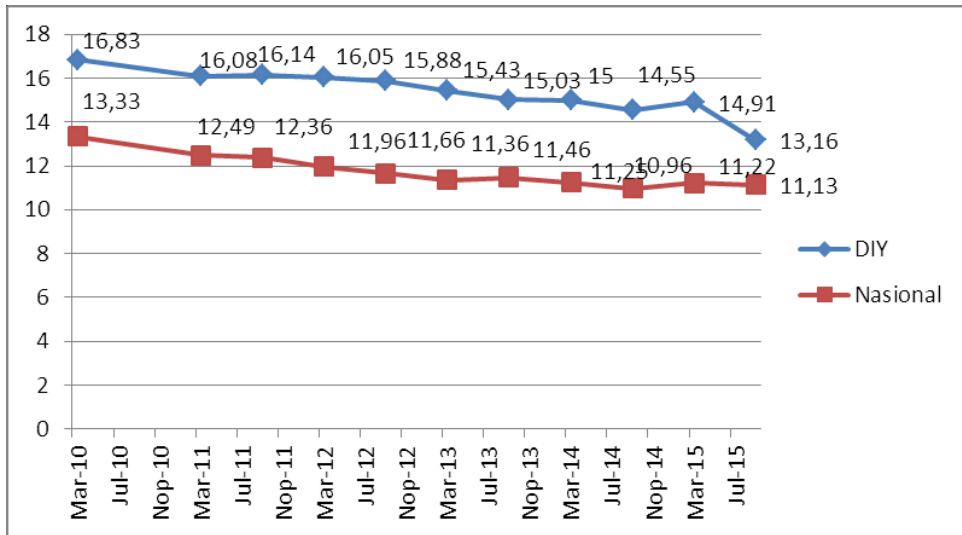
Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode Maret 2010 - September 2015 mengalami fluktuasi, meskipun ada kecenderungan menurun. Pada periode Maret 2010 - Maret 2011 terjadi penurunan, tetapi dari September 2011- Maret 2012 mengalami kenaikan dan turun kembali sampai periode September 2013. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2010 tercatat 577,30 ribu orang dan pada Maret 2011 turun menjadi 562,70 ribu, namun sampai dengan kondisi bulan Maret 2012 jumlah penduduk miskin naik menjadi 568,35 ribu. Sementara pada periode September 2012 - September 2015 mengalami fluktuasi dan ada kecenderungan penurunan. Pada periode Maret hingga September 2015 terjadi penurunan dari semula 550 Perkembangan jumlah penduduk miskin seperti terlihat pada gambar berikut,



Sumber: Susenas, Maret 2010 – September 2015, BPS Provinsi DIY, 2015

**Gambar 3.9** Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2010 - September 2015 (dalam ribu orang)

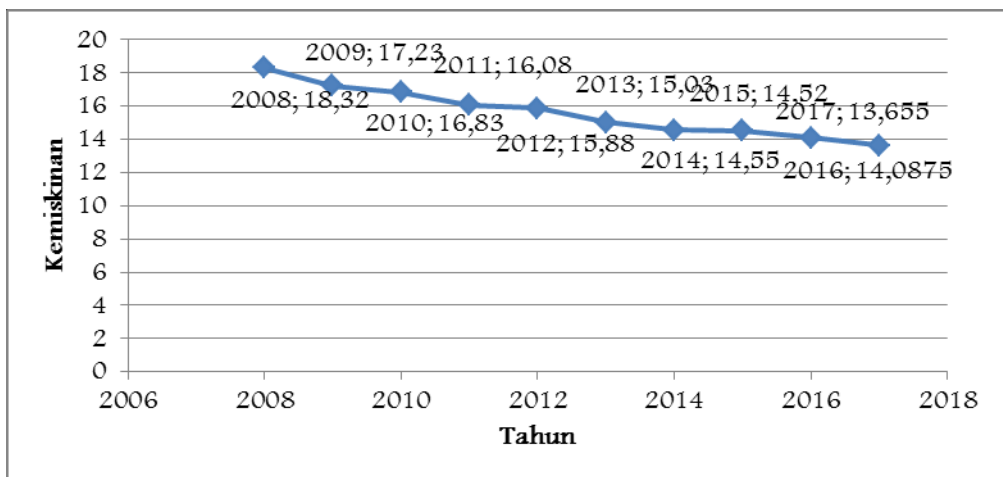
Tingkat kemiskinan DIY masih tergolong tinggi karena masih jauh berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Selama periode 2009-2014, penurunan kemiskinan DIY sebesar 2,68 poin sementara penurunan rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 3,19 poin. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan DIY masih rendah. Pada tahun 2015 gap antara tingkat kemiskinan DIY dibandingkan dengan tingkat nasional semakin pendek daripada tahun-tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan tersebut dapat dipresentasikan sebagai berikut,



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3.10 Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan di DIY dan Nasional Tahun 2010-2015

Nilai realisasi maupun proyeksi tingkat kemiskinan DIY mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pemerintah telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan dengan program-program yang ada. Akan tetapi nilai kemiskinan DIY masih terbilang cukup tinggi. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Gambar 3.11 Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY Tahun 2008-2017

Nilai proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY untuk tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY di proyeksikan sebesar 14,52 persen dan pada tahun 2016 menjadi 14,09 persen kemudian pada tahun 2017 menjadi 13,65 persen. Pada periode September 2015 (BPS RI, 2016) tingkat kemiskinan DIY terrealisasi 13,16%, lebih rendah dari Jawa Tengah (13,32%) pada periode yang sama. Meskipun demikian kemiskinan di DIY perlu menjadi perhatian karena tingginya kemiskinan di DIY berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tinggi persentase penduduk miskin di DIY diakibatkan oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha produktif yang meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal. Selain itu tingginya kemiskinan DIY diakibatkan oleh pertumbuhan sektor ekonomi yang cenderung padat modal dan dikuasai investor tertentu.

**Tabel 3.18** Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk di DIY Tahun 2015-2017

Tahun Indikator	2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Kemiskinan (%)	14.09	16.20	13.66	15.70

*Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015*

Program-program pemerintah daerah harus lebih digalakan untuk mngentaskan kemiskinan, misalkan dalam hal investasi. Investasi yang di iijinkan hanya investasi yang bersifat Labour intensive bukan Capital intensivse, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap dan pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan di DIY.

### 3.1.8 Ketimpangan Regional

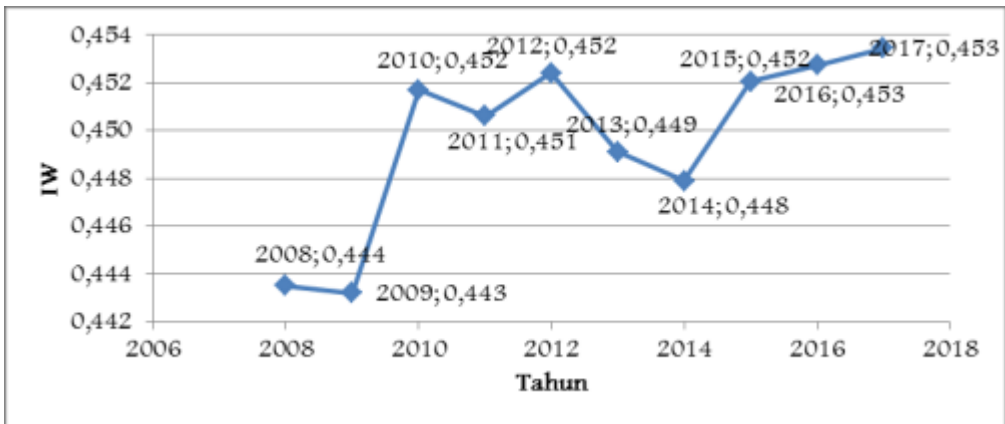
Ketimpangan regional DIY dilihat dari Indeks Williamson (IW) menunjukkan bahwa ketimpangan perekonomian kabupaten/kota di DIY cenderung mengalami penurunan. Realisasi IW pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing adalah 0,449 dan 0,448. Pada tahun 2014 realisasi IW lebih rendah 0,001 dibandingkan 2013. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di DIY semakin berkurang karena ketersediaan sarana prasarana dasar pada wilayah tertinggal semakin meningkat, sehingga mendukung akses masyarakat pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian wilayah. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19 Indeks Williamson DIY Tahun 2013 dan 2014

Tahun \ Nilai	2013	2014
Proyeksi	0,455	n.a
Realisasi	0,449	0,448
Perubahan	-0,006	-

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Terkait dengan proyeksi kesenjangan/ketimpangan wilayah di DIY dari nilai IW DIY untuk tahun 2008-2017 cenderung mengalami peningkatan, meskipun angka IW-nya masih di bawah 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa di DIY kesenjangan antar wilayahnya semakin tinggi, dengan adanya kegiatan ekonomi yang semakin maju, meskipun kesenjangan tersebut masih tergolong rendah. Perhatian semua pihak untuk menselaraskan keberhasilan pembangunan yang didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dengan pemerataan pembangunan dan hasilnya untuk kabupaten/kota di DIY menjadi sangat penting. Grafik terlihat IW tahun 2008-2014 dan proyeksi IW tahun 2015-2017 yang dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Gambar 3.12 Grafik Hasil Perhitungan Angka Proyeksi Indeks Williamsson di DIY Tahun 2008-2017

Hasil proyeksi Indeks Williamsson (IW) DIY menunjukkan bahwa IW di DIY dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan, yaitu dari 0,452 di tahun 2015 menjadi 0,453 di tahun 2016 dan 2017. Kenaikan IW ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi DIY maka akan dapat berdampak pada terjadinya kesenjangan antar wilayahnya

semakin tinggi. Namun indeks Williamson di DIY masih lebih kecil dari 0,5 yang berarti ketimpangan antar wilayah masih relatif kecil. Hal yang menyebabkan naiknya IW ini di antaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di DIY yang semakin tinggi dan PDRB perkapita di kabupaten/kota di DIY yang tidak merata. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.20 Hasil Perhitungan Angka Proyeksi Indeks Willamson di DIY Tahun 2008-2017**

Tahun Indikator	2015		2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
IW	0,452	0,520	0,453	0,521	0,453	0,521

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

### 3.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan penduduk DIY dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah indeks gini dan kriteria Bank Dunia. Pada tahun 2012, realisasi IG sebesar 0,4275 yang masih dalam kelompok ketimpangan sedang ( $0,3 < IG < 0,5$ ). Dan untuk tahun 2013 realisasi IG sebesar 0,4164. Indeks Gini DIY tahun 2013 ini masih terbilang sedang karena masih berada di sekitaran angka  $0,3 < 0,4 < 0,5$ . Tahun 2014 IG di DIY naik menjadi 0,4350.

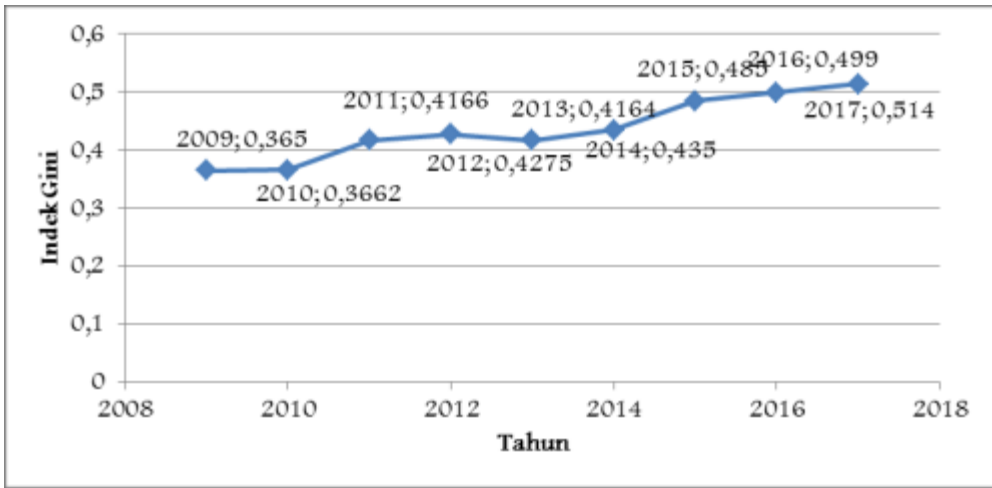
Pertumbuhan ekonomi DIY cukup tinggi, sektor perdagangan hotel dan restoran; sektor jasa-jasa; dan sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan mampu tumbuh di atas rata-rata nasional. Akan tetapi pertumbuhan ini hanya terjadi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta saja atau dapat dikatakan bahwa telah terjadi aglomerasi aktivitas ekonomi DIY. Bahkan sejak 2007 pertumbuhan ekonomi Sleman mampu mengungguli pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta. Sedangkan kontribusi Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul tergolong rendah. Hal inilah yang menciptakan ketimpangan daerah atau dengan kata lain adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak dibarengi dengan pemerataan ekonomi daerah telah menyebabkan ketimpangan daerah terjadi..

**Tabel 3.21 Indeks Gini DIY Tahun 2013 dan 2014**

Tahun Nilai	2013	2014
Proyeksi	n.a	n.a
Realisasi	0,4164	0,4350
Perubahan	-	-

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Dari grafik berikut terlihat selama periode 2009-2014 Indeks Gini DIY terlihat fluktuatif, dan indeks Gini memiliki nilai tertinggi sebesar 0,4350 pada tahun 2014. Untuk nilai proyeksi indeks Gini tahun 2015 hingga 2017 mengalami trend peningkatan. Secara keseluruhan indeks Gini DIY masih tergolong sedang.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

**Gambar 3.13** Indeks Gini di DIY Tahun 2008-2017

Melihat proyeksi Indeks Gini di DIY tahun 2015 yang berada di angka 0,485 maka hal ini mengindikasikan ketimpangan di DIY terbilang sedang. Demikian juga melihat proyeksi IG di DIY tahun 2016 yang sebesar 0,499, maka ketimpangan distribusi di DIY tahun 2016 juga masih masuk kategori sedang. Kemudian di tahun 2017 meningkat sebesar 0,514 yang juga berarti ketimpangan di DIY tahun 2017 tergolong tinggi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IG antara lain; pendapatan dan pengeluaran. Secara lebih jelasnya proyeksi indeks gini di DIY Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.22** Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2015-2017

Tahun \ Indikator	2015		2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
IG	0,485	0,557	0,499	0,574	0,514	0,591

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

#### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.23** Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2015-2018

Uraian	Jumlah			Proyeksi Tahun 2018 (N+1)
	Tahun 2015 (N-2)	Tahun 2016 (N-1)	Proyeksi Tahun 2017 (N)	
PENDAPATAN	3.424.276.009.601,00	3,921,068,617,127.00	2,649,256,217,531.63	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.453.213.230.863,00	1,553,180,369,527.00	1,586,145,129,531.63	
<b>Pajak Daerah</b>	1.296.531.743.697,00	1,377,156,182,800.00	1,415,038,910,355.00	
Hasil Retribusi Daerah	40.376.417.845,00	36,998,728,297.00	36,363,286,815.00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.978.161.721,00	57,398,373,585.00	62,174,778,277.44	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.326.907.600,00	81,627,084,845.00	72,568,154,084.19	
DANA PERIMBANGAN	1.046.869.045.263,00	1,768,771,681,000.00	1,049,737,731,000.00	



Uraian	Jumlah			Proyeksi Tahun 2018 (N+1)
	Tahun 2015 (N-2)	Tahun 2016 (N-1)	Proyeksi Tahun 2017 (N)	
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	87.240.283.263,00	108,902,297,000.00	108,902,297,000.00	
Dana Alokasi Umum	920.544.722.000,00	940,835,434,000.00	940,835,434,000.00	
Dana Alokasi Khusus	39.084.040.000,00	719,033,950,000.00	0.00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	<b>924.193.733.475,00</b>	<b>599,116,566,600.00</b>	<b>13,373,357,000.00</b>	
Pendapatan Hibah	9.015.333.475,00	10,956,017,600.00	13,373,357,000.00	
Dana Darurat	-	0.00	0.00	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	0.00	0.00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	915.178.400.000,00	588,160,549,000.00	0.00	
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	0.00	0.00	
<b>BELANJA</b>	<b>3.696.264.876.876,12</b>	<b>4,189,992,196,186.80</b>	<b>2,714,711,590,583.53</b>	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.796.753.921.956,90</b>	<b>2,069,762,008,354.80</b>	<b>1,301,331,803,431.50</b>	
Belanja Pegawai	526.621.883.306,00	632,402,208,576.00	695,713,910,183.00	
Belanja Bunga	-	0.00	0.00	
Belanja Subsidi	-	0.00	0.00	
Belanja Hibah	579.125.390.975,00	768,176,097,750.00	18,750,000,000.00	
Belanja Bansos	9.134.490.000,00	4,683,000,000.00	1,000,000,000.00	
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	511.457.704.735,90	561,340,599,397.80	573,367,893,248.50	
Bantuan Keuangan	147.414.452.940,00	91,814,410,931.00	0.00	
Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000,00	11,345,691,700.00	12,500,000,000.00	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.899.510.954.919,22</b>	<b>2,120,230,187,832.00</b>	<b>1,413,379,787,152.03</b>	
Belanja Pegawai	137.325.260.158,00	151,013,364,228.00	0.00	
Belanja Barang dan Jasa	1.063.344.945.512,00	1,021,811,028,457.00	0.00	
Belanja Modal	698.840.749.249,22	947,405,795,147.00	0.00	
<b>DEFISIT/ SURPLUS</b>	<b>(271.988.867.275,12)</b>	<b>(268,923,579,059.80)</b>	<b>(65,455,373,051.90)</b>	
<b>PEMBLAYAAN</b>	<b>271.988.867.275,12</b>	<b>268,923,579,059.80</b>	<b>65,455,373,051.90</b>	
<b>PENERIMAAN PEMBLAYAAN</b>	<b>281.988.867.275,12</b>	<b>405,923,579,059.80</b>	<b>158,955,373,051.90</b>	
<b>SILPA</b>	<b>281.988.867.275,12</b>	<b>405,923,579,059.80</b>	<b>158,955,373,051.90</b>	
Pencairan Dana Cadangan	-	0.00	0.00	

Uraian	Jumlah			
	Tahun 2015 (N-2)	Tahun 2016 (N-1)	Proyeksi Tahun 2017 (N)	Proyeksi Tahun 2018 (N+1)
Hasil Penjualan	-	0.00	0.00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0.00	0.00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0.00	0.00	
Penerimaan Piutang Daerah	-	0.00	0.00	
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	0.00	0.00	
Penerimaan dari Penyusutan	-	0.00	0.00	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>137,000,000,000.00</b>	<b>93,500,000,000.00</b>	
Pembentukan Dana Cadangan	-	0.00	0.00	
Penyerfaan Modal	10.000.000.000,00	137,000,000,000.00	93,500,000,000.00	
Pembayaran Hutang	-	0.00	0.00	
Pemberian Pinjaman Daerah	-	0.00	0.00	
DPAL	-	0.00	0.00	
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	-	0.00	0.00	

### 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan

penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
  - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
  - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 63%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2016 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

#### a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumberpungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
- 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- 8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- 9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

- 1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah,
- 1) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2016 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPJMD DIY 2012-2017. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah

ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- c. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.



- e. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- f. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- g. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

#### b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

### 3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus

terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

## BAB 4    **TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017**

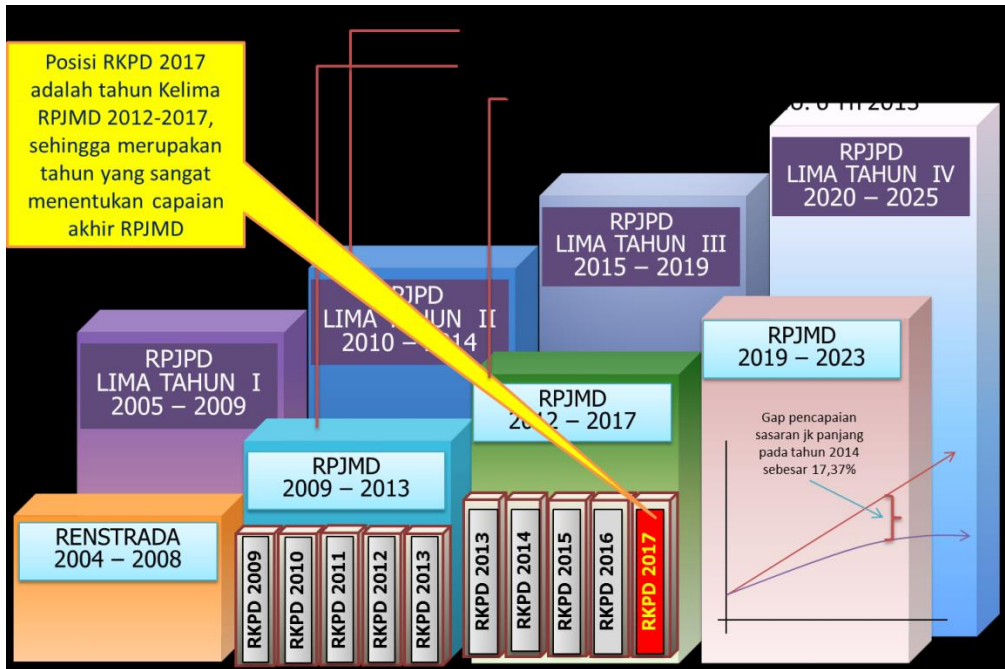
### **4.1 Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017**

#### **4.1.1 Dasar Perumusan Tema RKPD 2017**

Didalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.

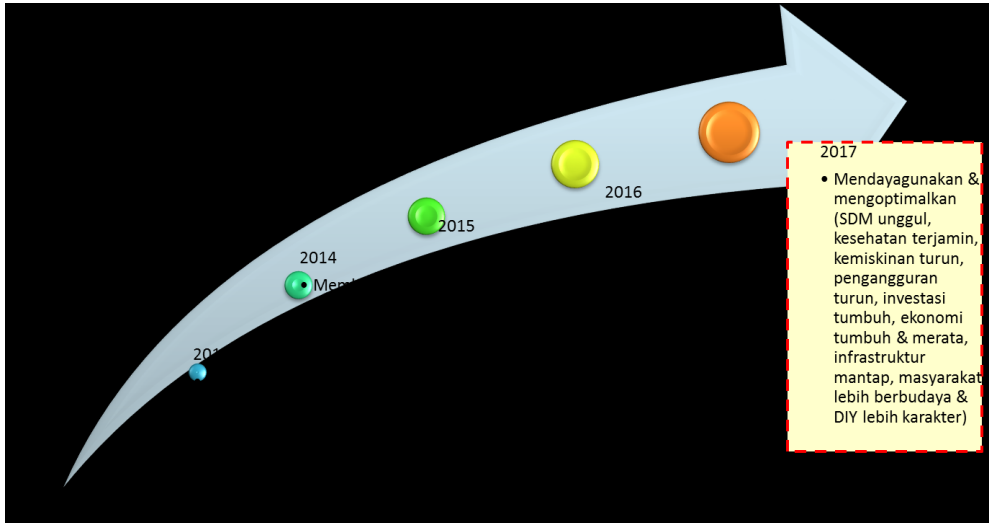
#### **1. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2017**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 merupakan bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan ke-5 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 yang *inline* dengan tahapan pembangunan tahunan ke-5, yaitu Tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2017.



Gambar 4.1 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017

Didalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 masuk dalam tahapan pembangunan ke-5 yang sudah memuat indikasi tema pembangunan yang dapat menjadi bagian integral perencanaan pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017

## 2. Internalisasi Renaissance Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2017

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 pada prinsipnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mewujudkan : *Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru*. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dilandasi oleh filosofi Hamemayu Hayuning Bawono yang mengandung makna kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia. Prinsip dasar filosofi tersebut secara prinsip diinternalisasi pula didalam visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejalan dengan dasar filosofi tersebut, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 juga dimaknai pula oleh *Renaissance* Yogyakarta yang mengacu pada konsep aworing kawulagusti dan golong-gilig, serta diekspresikan oleh sikap satria: sawiji, greget, sungguh ora-mingkuh, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan kita. *Renaissance* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 9 strategi (pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energy, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan)

- memberikan perpektif paradigma pembangunan baru untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban baru yang unggul dengan strategi budaya : membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).
3. Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2017
- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat enam nilai dasar budaya, meliputi Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Nilai-nilai budaya dasar tersebut tidak lepas dari *renaissance* sebagai bagian dari upaya mewujudkan perubahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta enam nilai dasar budaya tersebut telah didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif (penjelas bagi entitas budaya yang telah terjadi kemarin dan saat ini) dan sekaligus sebagai nilai rujukan preskriptif (menjadi dasar perbuatan karya budaya ke depan sekaligus sebagai nilai yang akan dituju dalam pengembangan budaya Yogyakarta dimasa depan). Tentunya semangat keistimewaan dalam kerangka pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus dapat menjadi roh sekaligus menjiwai paradigma pembangunan masa kini khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Tahun 2016.
4. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2017 dengan Tema RKPD Tahun 2017
- Tematik pembangunan dibangun berdasarkan pendekatan *Snowballing* melalui *focus group discussion* pada penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tematik yang disusun dalam memberikan fokus perencanaan pembangunan multidimensi yang menjadi kerangka dasar dalam perumusan tema pembangunan Tahun 2017. Adapun tematik yang diangkat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2017, meliputi :
- a. Tematik Pemerintahan;
  - b. Tematik Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Tematik perekonomian;
  - d. Tematik Sarana dan Prasarana.

Dari 4 bidang sektor tersebut, tematik menjadi bagian integral perencanaan yang akan menjadi warna didalam membangun konsep perencanaan Tahun 2017, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan.

### 5. Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2017

Internalisasi pembangunan kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (*regional and urban planning*), serta dimensi administratif yang lebih cenderung melihat dimensi pembangunan pada wilayah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendekatan kewilayahan yang bersifat multidimensi dalam mengelola pembangunan berbasis kewilayahan berkaitan dengan peningkatan kerjasama dalam pembangunan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :

- a. Pendekatan sektor strategis untuk ditangani dengan beberapa prioritas sektor, meliputi :
  - Prioritas 1 : Keuangan, Persewaan dan Jasa Perus.;
  - Prioritas 2 : Jasa-jasa;
  - Prioritas 3 : Konstruksi;
  - Prioritas 4 : Perdagangan Hotel dan restoran;
  - Prioritas 5 : Pengangkutan dan Komunikasi.
  - Prioritas 6 : Listrik, Gas, dan Air Bersih;
  - Prioritas 7 : Pertanian.
- b. Pendekatan *backward and forward linkage* sebagai bagian dari kerangka pembangunan lintas sector yang dalam arti membangun sector strategis dan unggul dan strategis yang memberikan implikasi (*multiplier effect*) pada pembangunan sektor lain.
- c. Pendekatan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten/kota sebagai mitra provinsi yang lebih fokus pada beberapa aspek, meliputi :
  - Penanggulangan Kemiskinan;
  - Pengembangan Investasi Infrastruktur;
  - Pengendalian Konversi Lahan Terbangun;
  - Reformasi Birokrasi;



- Pengembangan Industri Kreatif.
- d. Pendekatan prioritas kewilayahan yang lebih fokus pada memberikan skala prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota melalui pertimbangan variabel tertentu, meliputi :
  - Nilai Inflasi;
  - Angka Kemiskinan;
  - Nilai ICOR;
  - Ketimpangan Regional.

Didalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, aspek kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2016, sehingga aspek tersebut sinergis.

Sehingga didalam perumusan tema pembangunan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 menjadi salah satu pertimbangan rumusan dengan memperhatikan pula dasar filosofi keistimewaan, *renaissance*, fokus tematik, serta fokus prioritas kewilayahan sehingga dapat membangun sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai kata kunci dari tema pembangunan Tahun 2017 setidaknya harus memuat 4 fokus tematik yang telah dibangun didalam proses perencanaan yang telah dilakukan pada Tahun 2016, sehingga tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah, sebagai berikut :

***“Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”***

Tema diatas mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu :

#### 1. Pembangunan Berkeadilan

Pembangunan berkeadilan dalam hal ini dimaknai dengan pembangunan yang mengarah pada upaya mewujudkan pemerataan pembangunan baik peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibilitas, peningkatan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi local wilayah yang bertujuan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran,

ketimpangan wilayah, penurunan inflasi, dan ketimpangan pendapatan.

### 2. Sumberdaya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusia dalam hal ini dimaksudkan adalah pengembangan sumberdaya manusia dengan pendidikan, kualifikasi, serta kapasitas yang memadai, mampu bersaing dalam era globalisasi, serta menghadapi tantangan global. Mendayagunakan dan memantapkan sumberdaya manusia unggul dalam hal ini memberikan makna pula pada usaha dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat DIY, serta upaya membangun kemampuan akademik maupun teknis sumberdaya yang siap dalam menghadapi tantangan persaingan global.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah DIY melalui pengembangan sektor-sektor unggul khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata DIY sebagai sektor strategis yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor jasa sebagai salah satu sektor basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY.

### 4. Perbaikan Layanan Publik

Kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam aspek pembangunan wilayah DIY, dimana kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan DIY. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan distribusi barang dan komoditas, serta membuka aksesibilitas antar wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kewilayahan di DIY. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat juga akan berkorelasi dengan upaya mengurangi penyakit masyarakat, serta permasalahan-permasalahan sosial lainnya.

Lebih lanjut tema tersebut tentunya tidak dapat lepas dari aspek pendekatan budaya yang merupakan cikal bakal dari upaya mewujudkan semangat renaissance di DIY dan prinsip-prinsip pembangunan Keistimewaan DIY. Budaya dan renaissance menjadi landasan penting pembangunan di DIY yang dalam hal ini sebagai bagian dari semangat keistimewaan DIY seperti yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. *Renaissance* Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun dengan 9 strategi, meliputi pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energy, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan yang menjadi warna didalam pembangunan keistimewaan DIY dengan perpektif paradigma pembangunan baru membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritim, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).

#### 4.1.2 RKPD Menjadi Bagian Integral dari RPJMN 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dimana visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 adalah : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Lebih lanjut untuk mencapai visi pembangunan nasional disusun pula misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan (2015-2019). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan pada wilayah provinsi yang dalam hal ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Daerah Istimewa Yogyakarta menginternalisasikan tema pembangunan berikut sasaran prioritas pembangunan dengan sasaran pembangunan nasional, serta agenda pembangunan nasional maupun agenda pembangunan bidang sektoral.

Didalam konteks keselarasan antara Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 dengan visi dan misi jangka menengah nasional Tahun 2015-2019. Tema RKPD Tahun 2016 dalam “mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik” sejalan dengan visi dan misi dan misi jangka menengah nasional 2015-2019 dimana antara visi dan misi nasional sudah memiliki interkoneksi yang jelas, sedangkan hubungan tema tahunan didalam RKPD Tahun 2017 dengan misi jangka menengah nasional dapat dijelaskan bahwa Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan sejalan dengan usaha untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan usaha mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional yang interpretasinya diwujudkan melalui :

1. Pengembangan sumberdaya manusia sejalan denganb upaya dengan usaha mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan usaha untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
3. Perbaikan layanan public yang sejalan dengan misi nasional untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

### 4.2.1 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan DIY

Dalam konteks perencanaan pembangunan tema pembangunan Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian integral dengan prioritas pembangunan Tahun 2017 yang dalam hal ini memiliki interkoneksi dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Prioritas pembangunan nasional Tahun 2017 disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas pembangunan daerah sebagai agenda daerah untuk mewujudkan pembangunan bidang sektoral yang terintegrasi dalam mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta berkarakter dan berbudaya, serta upaya mewujudkan konsep Among Tani Dagang Layar. Among Tani Dagang Layar menjadikan Pantai Selatan sebagai halaman depan yang memberikan pemahaman bahwa konsentrasi pembangunan akan mengedepankan wilayah selatan baik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur maupun dalam pengembangan aspek sosial kemasyarakatan (salah satunya adalah upaya menangani kemiskinan). Meskipun demikian konsep among tani dagang

layar tidak serta merta hanya mengedepankan wilayah Selatan dan mengesampingkan wilayah lainnya, namun pemerataan pembangunan juga menjadi prioritas pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Didalam konteks perencanaan pembangunan nasional konsep Among Tani Dagang Layar tersebut secara prinsip sejalan dengan misi pembangunan nasional salah satunya adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, serta sejalan dengan agenda prioritas nasional, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Agenda pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 terkait dengan prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan *trigger* pertumbuhan ekonomi wilayah. Agenda prioritas pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi beberapa pendekatan prioritas, yaitu :

### 1. Sosial Budaya

Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 2. Kesehatan

Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :

1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

### 3. Pendidikan

Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui:

1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;

2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.
4. Pertumbuhan Ekonomi
 

Kebijakannya diarahkan membuat skema pada peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.
5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur
 

Pengembangan wilayah perlu mendapatkan penekanan kebijakan pada pengembangan kawasan-kawasan pedesaan dengan menciptakan potensi ekonomi local wilayah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang
 

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung pula oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi
 

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;

2. Harapan hidup masyarakat meningkat;
3. Melek huruf masyarakat meningkat.
4. Aksesibilitas pendidikan meningkat.
5. Daya Saing Pendidikan meningkat.
6. Pendapatan masyarakat meningkat.
7. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
8. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
9. Ketimpangan Antar Wilayah menurun
10. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan
11. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.
12. Kualitas lingkungan hidup meningkat.
13. Pemanfaatan Ruang terkendali.
14. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
15. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan DIY berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1 Interkoneksi Pendekatan Prioritas dan Sasaran Pembangunan DIY**

No	Nawa Cita	Pendekatan Prioritas	No	Sasaran DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Sosial dan Budaya	1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Kesehatan	2	Harapan hidup masyarakat meningkat.
3	Melakukan revolusi karakter bangsa.	Pendidikan	3	Melek huruf masyarakat meningkat.
			4	Aksesibilitas pendidikan meningkat.



No	Nawa Cita	Pendekatan Prioritas	No	Sasaran DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5	Daya Saing Pendidikan meningkat.
4	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	Pertumbuhan Ekonomi.	6	Pendapatan masyarakat meningkat.
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.		7	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
			8	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
6	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur.	9	Ketimpangan Antar Wilayah menurun.
			10	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.
			11	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.
			Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.	12
			13	Pemanfaatan Ruang terkendali.
7	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Kinerja aparatur dan Birokrasi.	14	Akuntabilitas pemerintah meningkat. kinerja daerah
8	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.			
9	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.			
			15	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

### 4.2.2 Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional dan DIY

Lebih lanjut prioritas pembangunan Tahun 2017 yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 diterjemahkan kemudian didalam sasaran pokok pembangunan. Dalam hal ini sasaran pokok tersebut juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Sasaran Makro, meliputi : pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro melalui pembangunan manusia dan masyarakat, serta ekonomi makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi : kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan (melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi : kedaulatan pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energy, maritim dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai Negara maritime, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritime dan kelautan), pariwisata dan manufaktur (pariwisata dan industri manufaktur), ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan);
4. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan, meliputi menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui perlindungan social bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja);
5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, meliputi : pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional (peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, pembangunan kawasan perkotaan), pembangunan perdesaan,

pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan;

6. Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan keamanan.

Sasaran pokok pembangunan nasional tersebut tentunya dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional dan sasaran pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dalam kerangka membangun ketercapaian terhadap target sasaran pokok nasional.

Sasaran Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 tersebut merupakan sasaran Pemda yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Interkoneksi sasaran nasional dan sasaran Pemda DIY Tahun 2017 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Interkoneksi Sasaran Nasional dan Pemda DIY Tahun 2017

No	Sasaran Pembangunan	Mencapai	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2017	
<b>A.</b>	<b>Sasaran Makro</b>	<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>				
1	Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK	WTP	
		Politik dan Demokrasi				
		Penegakan Hukum				
		Pertahanan dan Keamanan				
2	Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	A	
		Kependudukan dan Keluarga Berencana	Melek huruf masyarakat meningkat	Angka Melek huruf	95,00%	
		Pendidikan		Aksesibilitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah	12,00%
				Daya Saing Pendidikan meningkat	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	40,00%
				Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup

No	Sasaran Pembangunan	Mencapai	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2017	
		Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	70,00%	
		Perlindungan Anak				
		Pembangunan Masyarakat				
<b>B.</b>	<b>Sasaran Makro</b>	<b>Ekonomi Makro</b>				
1	Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar Wilayah	Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	Ketimpangan Antar Wilayah menurun	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,4455	
2	Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan	Kedaulatan Energi	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara	4.561.646 Orang	
		Pariwisata dan Industri Manufaktur		Jumlah wisatawan mancanegara	272.162 Orang	
				Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan mancanegara	2,69 Hari
				Lama tinggal wisatawan nusantara	2,60 Hari	
		Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat	42,57%

## RKPD DIY Tahun 2017

No	Sasaran Pembangunan	Mencapai	Sasaran Pembangunan DIY	Indikator Sasaran DIY	Target 2017	
			Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	15,72%	
			Pemanfaatan Ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat	64,75%	
			Maritim dan Kelautan	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita pertahun	8,50 Juta Rupiah
			Kedaulatan Pangan			
3	Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan	Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan	0,2878	
	Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu					

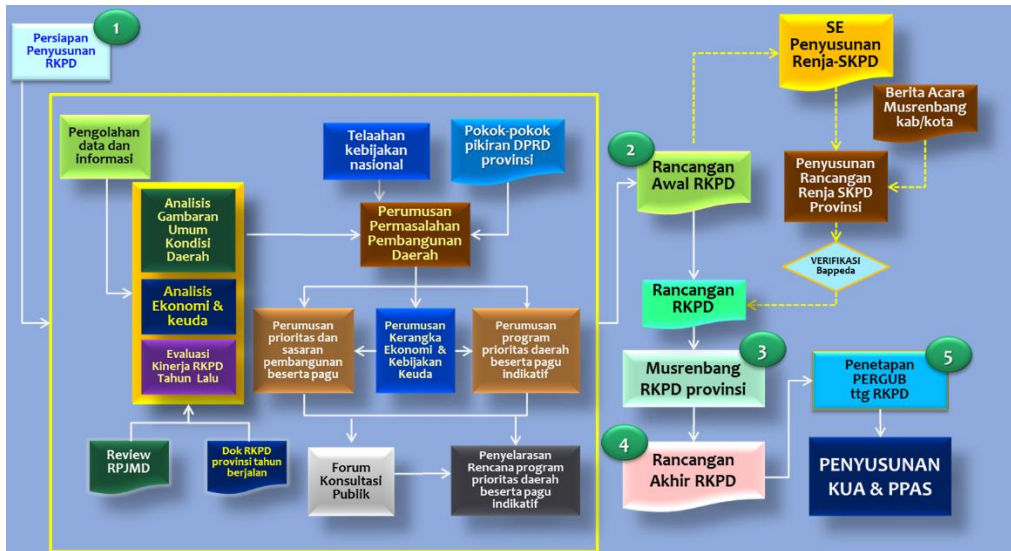
Rencana program/kegiatan dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek-aspek terkait dengan aspek teknokratis dan aspek politis. Berkaitan dengan aspek politis dalam hal ini rancangan teknokratis Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan pasca rapat paripurna DPRD.

### 4.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pasal 5 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Lebih lanjut didalam pasal 5 ayat (3) juga dijabarkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan (RKPD) DIY Tahun 2017 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY Tahun 2012-2017 yang dalam prosesnya memperhatikan salah satunya adalah pokok-pokok pikiran DPRD DIY. Pokok-pokok pikiran DPRD DIY tersebut disusun sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 107 ayat (1) bahwa perumusan rancangan awal RKPD untuk provinsi mencakup (pada huruf f) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut didalam kerangka penyusunan Rancangan Awal RKPD menjadi bahan pertimbangan perumusan permasalahan pembangunan daerah.

Pertimbangan lebih lanjut dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2017 Pokok-pokok Pikiran DPRD yang berisi sejumlah rekomendasi kebijakan arahan strategis pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Gubernur, karena dapat berpengaruh terhadap mekanisme penyusunan dokumen-dokumen turunan berikutnya. Pokok-pokok Pikiran DPRD tidak akan memiliki fungsi yang baik dan optimal apabila penyampaiannya kepada gubernur terlambat walaupun penyusunan materinya dapat dilakukan dengan baik dan benar.



Gambar 4.3 Skema Perencanaan Pembangunan Menurut Permendagri 54 Tahun 2010

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi acuan dalam penyusunan draf awal RKP.

#### 4.3.1 Tujuan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dari sudut pandang DPRD dapat disampaikan bahwa tujuan dari pokok-pokok pikiran DPRD DIY dalam perencanaan pembangunan Tahun 2017 adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menyusun dokumen awal draf RKP Tahun Anggaran 2017.
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2017.
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi DIY melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2017.
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD DI. Yogyakarta, khususnya basis konstituen dan kelompok



masyarakat marginal yang belum bisa mengakses forum-forum musrenbang diberbagai level.

6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih baik.

#### 4.3.2 Permasalahan Pembangunan DIY dari Sudut Pandang DPRD

Menurut pandangan DPRD DIY pendapatan dalam APBD DIY Tahun 2016 sejumlah Rp 3,9 Trilyun, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 12,70 persen (Angka Koreksi pada RPJMD DIY 6,20 persen). Proyeksi APBD DIY Tahun 2017 diperkirakan dapat mencapai Rp 4,4 Trilyun atau bertambah sekitar Rp 496 Milyar. Lebih lanjut terdapat beberapa pandangan DPRD terhadap permasalahan pembangunan Tahun 2017, meliputi :

1. Tahun 2017 merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2012 – 2017 DI. Yogyakarta, sehingga pada tahun 2017 pencapaian indikator pembangunan DI. Yogyakarta seharusnya bisa terselesaikan selama 5 tahun sejak RPJMD ditetapkan
2. Semangat membangun Yogyakarta, terus dilakukan dengan visi baru, among tani dagang layar dengan menempatkan kawasan selatan sebagai halaman muka pembangunan DI. Yogyakarta, tentu saja proses ini membutuhkan pembenahan dokumen srategis pembangunan daerah cukup banyak, munculnya persoalan sosial baru, hingga pada perubahan kultur masyarakat
3. Hingga sekarang, angka kemiskinan cukup tinggi di DI. Yogyakarta. kemiskinan tersebut disebabkan karena banyak usia renta yang tidak tertangani dengan baik, meningkatnya pengangguran terbuka, minimnya lapangan kerja baru, dan krisis ekonomi nasional yang menyebabkan kemunduran ekonomi lokal. Sejumlah persoalan sosial masyarakat makin marak karena kemiskinan hingga konflik sosial horisontal
4. Bidang pendidikan. Meningkatnya anak putus sekolah di tahun 2015 cukup tinggi, khususnya dialami oleh banyak siswa perempuan. Ini harus menjadi perhatian serius bersama. Sisi lainnya adalah capaian target pendidikan wajib belajar 12 tahun pada akhir RPJMD menjadi pekerjaan rumah bersama untuk bisa segera terwujud.
5. Bidang kesehatan. Banyak masyarakat masih mengeluh mengenai layanan kesehatan, khususnya akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. Juga pada alokasi anggaran kesehatan masih dirasa kurang, contoh nya pada layanan BPJS.
6. Bidang pertanian, peternakan dan ketahanan pangan masih menyisakan sejumlah persoalan. Menurunnya hasil pertanian pangan, konversi lahan pertanian produktif tak terkendali, hingga

pada persoalan daerah rawan bebas rawan pangan belum tercapai dengan baik.

7. Bidang infrastruktur menuntut banyak pembenahan, khususnya persoalan perluasan panjang dan lebar jalan di DI. Yogyakarta. sedangkan pengembangan kawasan baru juga membutuhkan perhatian penuh karena munculnya konflik penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat.
8. Kesenjangan pembangunan daerah semakin terlihat karena ketimbangan pembangunan daerah, khususnya penguatan bidang infrastruktur yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan merata.
9. Bencana alam lokal makin meningkat karena lemahnya daya dukung lingkungan. Sisi lainnya, kesadaran sosial masyarakat terhadap penjagaan lingkungan semakin rendah.
10. Bidang pemerintahan juga masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari perbaikan layanan publik, dan penguatan SDM aparatur pemerintah, hingga pada agenda kebijakan daerah lainnya untuk menyesuaikan dengan perubahan status DI. Yogyakarta dalam UU Keistimewaan Yogyakarta
11. Khusus untuk persoalan kebijakan implementasi UU Keistimewaan Yogyakarta, hingga saat ini masih menyisakan polemik antara DPRD dan pemerintah daerah DI. Yogyakarta dalam kebijakan maupun implementasinya. DPRD selama ini belum terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pelaksanaan danais, maupun implementasinya. Sedangkan danais sendiri menjadi tanggung jawab DPRD secara langsung karena nomenklatur anggarannya masuk dalam APBD DI. Yogyakarta. Kesempatan untuk terlibat aktif DPRD dalam pengelolaan danais mulai terbuka setelah ada konsultasi dari kementerian keuangan dan DPR RI. Kedepan, DPRD DI. Yogyakarta perlu mengambil inisiatif untuk terlibat aktif dan mengawal pelaksanaan danais agar lebih optimal. Tentu saja program dan kegiatannya menjadi agenda pembahasan DPRD dalam kurung waktu mendatang.

### 4.3.3 Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Berkaitan dengan pemahaman DPRD DIY terhadap permasalahan pembangunan Tahun 2017 terdapat beberapa usulan pokok-pokok pikiran pada RKPD Tahun 2017, meliputi

1. DPRD terus mendorong kebijakan pembangunan daerah yang mengusung nilai nilai *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro ecology* sebagai basis dasar pemikiran kebijakan pembangunan daerah dalam implementasinya mencapai visi pembangunan daerah DI. Yogyakarta yang dituangkan dalam RPJMD dan rencana pembangunan tahunan.

2. Program-program pembangunan daerah, khususnya layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang diatur dalam UU harus menjadi tekanan. Bidang kesehatan diarahkan pada perbaikan layanan kesehatan, subsidi layanan, hingga pada jaminan sosial kesehatan. Jika alokasi jaminan berkurang, hendaknya ditingkatkan alokasi anggarannya seperti BPJS.
3. Dibiidang pendidikan, DPRD menegaskan pemerintah daerah harus bisa mencapai target wajar 12 tahun yang sudah dicanangkan dalam dokumen RPJMD. Selain itu, persoalan putus sekolah yang banyak dialami oleh anak didik perempuan hendaknya menjadi perhatian serius dan sebisa mungkin segera terselesaikan.
4. Penguatan program-program sosial kemasyarakatan hendaknya ditujukan pada penguatan program welfare community, dimana masyarakat DI. Yogyakarta sudah kuat pondasi sosialnya. Penguatan kelembagaan sosial kemasyarakatan juga menjadi perhatian serius untuk mengurangi konflik-konflik yang berkembang.
5. Dibiidang ekonomi, perhatian pemerintah daerah harus ditujukan pada dukungan pembukaan lapangan kerja baru, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, hingga pada kemudahan investasi dengan basis industri padat kerja.
6. Pembangunan infrastruktur harus diperkuat dengan membangun rencana strategis pembangunan daerah lima tahun kedepan, dan perbaikan dokumen tata ruang dan tata wilayah yang berkeadilan sosial.
7. Di bidang ketahanan pangan, pemerintah daerah hendaknya fokus pada peningkatan produksi pangan dengan cara penguatan sektor pertanian, perlindungan lahan produktif, hingga melakukan kreasi baru inovasi pasca panen untuk mendorong nilai lebih pada sektor pertanian.
8. Di bidang lingkungan dan bencana alam, program ditujukan pada kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan dengan cara konservasi agar mengurangi bencana alam lokal.
9. Di bidang ekonomi, pemerintah hendaknya mendorong ekonomi produktif kerakyatan dengan cara penguatan usaha kecil menengah. Kemudahan aksesibilitas permodalan, pembukaan pasar, hingga pada penguatan sumberdaya para pelaku ekonomi produktif.
10. Di bidang pemerintahan, dorongan untuk selalu membangun good governance menjadi faktor utama. Penguatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan menjadi penting untuk meningkatkan layanan publik. Penguatan lembaga kebijakan publik seperti DPRD juga perlu dilakukan untuk mendorong kebijakan daerah yang lebih baik dan pro rakyat.

11. Di bidang governance reform, isu Keistimewaan Yogyakarta menjadi penting, dimana pengembangan Yogyakarta sebagai daerah istimewa masih harus terus diperbaiki untuk mendorong Yogyakarta menjadi daerah berbudaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Pemerataan kesejahteraan melalui penguatan pembangunan masyarakat desa perlu menjadi pemikiran bersama dengan adanya Undang-Undang pemerintahan desa yang baru dan menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan. DPRD meyakini, dengan pengutan pembangunan desa dengan tema “DESA MEMBANGUN” akan mengurangi disparitas ekonomi dan sosial antara desa dan kota.
13. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta, dan berdasarkan hasil konsultasi menteri keuangan dan DPR RI, maka DPRD bisa melakukan inovasi atas program dan kegiatan dana Keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang tertunda seperti kebudayaan dan pertanahan di DI. Yogyakarta segera bisa terselesaikan.

Berkaitan dengan skema pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan DPRD dalam kerangka mendukung perencanaan pembangunan Tahun 2017 ke depan, beberapa hal tersebut diatas akan ditelaah lebih lanjut sebagai bahan perencanaan pembangunan Tahun 2017.

## BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017

### 5.1 Program dan Kegiatan Strategis

Pada rancangan awal ini akan dikemukakan program dan kegiatan strategis dan prioritas pada tahun 2017 sebagai berikut,

#### 5.1.1 Bidang Sosial Budaya

Isu bidang sosial budaya terkait dengan peningkatan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan dan pengembangan Sumberdaya Manusia yang dapat direncanakan program/ kegiatan strategis sebagai berikut,

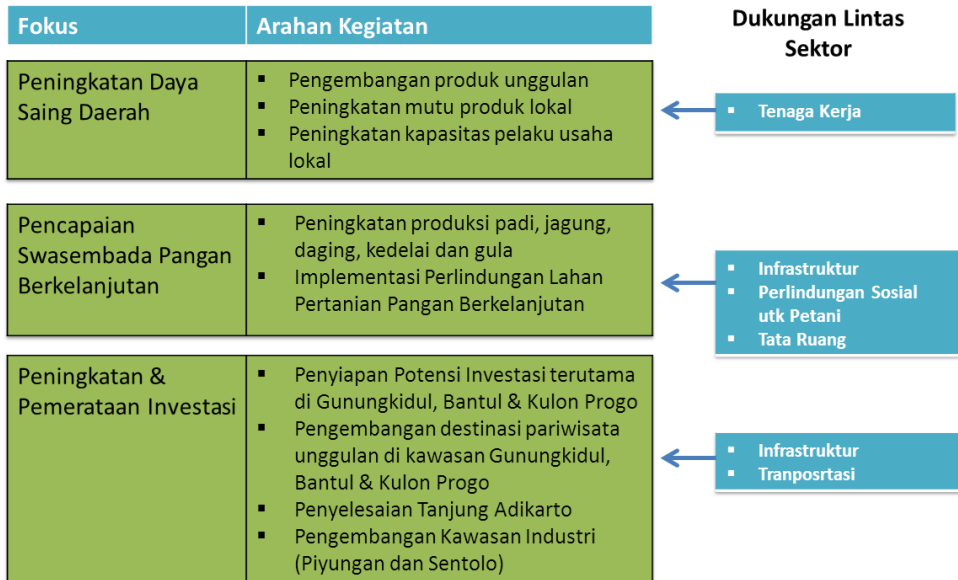
**Tabel 5.1 Rencana Program/ Kegiatan Bidang Sosial Budaya**

No	SKPD	Usulan Isu Strategis/ Program/ Kegiatan
1.	Disdikpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan P3D sesuai UU 23 Tahun 2014 dengan mengkaji kembali pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) bagi sekolah jenjang pendidikan dasar (SD) dan pendidikan menengah (SMP) karena kewenangan sekolah dasar menengah adalah di Kabupaten-Kota berdasarkan ketentuan tersebut.</li> <li>b. Standarisasi operasional pelaksanaan pembelajaran untuk sekolah menengah se-DIY dengan <i>kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)</i></li> <li>c. Pusat pengembangan kualitas keilmuan, kreativitas dan kesenian bagi siswa di DIY dengan <i>Pembinaan Siswa, Berbakat dan Berkebutuhan khusus</i></li> <li>d. Terselenggarakan pembangunan sarana prasarana olahraga publik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dengan kegiatan <i>Penyelesaian Pembangunan Mandala Krida</i></li> <li>e. Terselengkapannya sarana prasarana untuk pemuda dengan kegiatan <i>Penyelesaian Pembangunan Youth Center</i>.</li> <li>f. Terselengkapannya sarana prasarana untuk pendidikan berbasis komunitas dengan <i>Penyelesaian Pembangunan Akademik Komunitas</i>.</li> <li>g. Tersedianya sarana prasarana aktivitas kepramukaan dan aktivitas out door untuk masyarakat dengan penyelesaian <i>Pembangunan Babarsari</i>.</li> </ul>
2	Dinas Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penciptaan pola dan tata ruang museum yang lebih</li> </ul>

No	SKPD	Usulan Isu Strategis/ Program/ Kegiatan
		nyaman terintegrasi dan mewujudkan pengembangan museum berstandar internasional dengan <i>Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sono Budoyo</i>
3	BPPM	a. Perbaikan gedung berdasar penilaian teknis dinas terkait (2014, Dinas PUP ESDM) terhadap kondisi kerusakan bangunan gedung kantor pasca Gempa 2006 melalui <i>Pembangunan Gedung Perkantoran</i> baru
4	RS Jiwa Ghrasia	a. Penanganan Penyalahgunaan NAPZA dengan <i>Pelayanan Penangan IPWL</i> (institusi Penanganan Wajib Laporan);
5	RS RESPIRA	a. Penanganan pengidap Tuberculosis <i>multidrug resistance</i> (TB MDR) dan TB dengan HIV (TB HIV) dengan <i>Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS Respira</i> diantaranya dengan penyediaan ruang isolasi untuk karantina. Diharapkan ke depan RS Respira dapat menjadi Rumah sakit Sub Rujukan dari RSUP Dr. Sardjito pada kasus tersebut.
6	Dinas Sosial	<p>a. Pemandangan Camp Assesment Gelandangan Pengemis (Gepeng) melalui kegiatan <i>Penanganan Gelandangan Pengemis</i>. Lokasi Camp Assesment saat ini dipergunakan untuk Pembangunan Akademi Komunitas (Disdikpora)</p> <p>b. Kejelasan penanganan rehabilitasi NAPZA dan HIV AIDS terkait P3D sesuai UU 23/ 2014 dengan kegiatan <i>Penyerahan urusan rehabilitasi NAPZA dan HIV AIDS kepada Pemerintah Pusat ( Balai Rehabilitasi NAPZA)</i></p> <p>c. Kejelasan penanganan rehabilitasi sosial oleh Pemda DIY terkait P3D sesuai UU 23/ 2014 dengan kegiatan <i>Penyerahan urusan rehabilitasi sosial didalam panti oleh Kabupaen/Kota kepada Propinsi</i></p>
7	BPAD	<p>a. Pelayanan Kearsipan kepada masyarakat dan pengelolaan kearsipan dapat berjalan lebih optimal dengan melanjutkan <i>Pembangunan Depo Arsip</i>,</p> <p>b. Penambahan khasanah arsip bersejarah di DIY dengan <i>Pelimpahan digitalisasi dan pencetakan bahan arsip Rafless</i>.</p>

### 5.1.2 Bidang Perekonomian

Isu strategis bidang perekonomian terkait dengan upaya-upaya Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dijabarkan dalam konsepsi sebagai berikut,



Gambar 5.1 Konsep Pembangunan Perkonomian 2017

Dimana konsep pembangunan perekonomian berfokus pada Peningkatan Daya Saing Daerah, Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Peningkatan dan Pemerataan Investasi yang akan menarik Dukungan lintas sektor dari sektor Ketenagakerjaan, Infrastruktur, Perlindungan Sosial khususnya untuk Petani, Tata Ruang, dan Transportasi. Adapun program/kegiatan yang menyertainya dapat direncanakan sebagai berikut,

Tabel 5.2 Isu Strategis Bidang Perekonomian

No	SKPD	Usulan Isu Strategis/ Program/ Kegiatan
1.	Dislautkan	a. Penyelesaian infrastruktur dan kelembagaan pendukung pelabuhan <i>Tanjung Adikarto</i> b. Penanganan tambak udang yang beresiko abrasi, merusak ekosistem dan persoalan sosial dengan <i>Relokasi Tambak Udang</i> .
2	Dishutbun	a. Problem kewenangan pengelolaan berkaitan dengan UU 23/2014 dan penyediaan Palaeoekosistem dalam

No	SKPD	Usulan Isu Strategis/ Program/ Kegiatan
		<p><i>Pengembangan Tahura Bunder</i></p> <p>b. Pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi wilayah secara terpadu berbasis kawasan dengan pengelolaan dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan produk berdaya saing melalui <i>pengembangan model desa Kakao</i></p> <p>c. Perlunya pengembangan agrowisata dalam satu kawasan yang mengintegrasikan sektor pertanian (hortikultura, kehutanan) dengan destinasi wisata dan cagar budaya untuk mendukung DIY sebagai pusat pariwisata dan budaya melalui <i>Pengembangan wana wisata budaya mataram.</i></p>
3	Dinas Pertanian	<p>a. Optimalisasi Implementasi Perda No 10/2011 tentang PLP2B terkait tindak lanjut Pemkab/Pemkot, penyediaan lahan abadi, <i>land banking</i>, kajian sistem sewa/ beli lahan pertanian produktif dan perlunya dukungan para pihak terkait <i>Perlindungan Lahan Pertanian Produktif Berkelanjutan (PLP2B)</i></p> <p>b. Pengembangan agrowisata dalam satu kawasan yang mengintegrasikan sektor pertanian (pengembangan perbenihan hortikultura serta pengolahan produk peternakan dan perkebunan) dengan wisata dengan <i>Pengembangan Kawasan Ngipiksari</i></p>
4	BKPM	Penyelesaian dan tindak lanjut dukungan sarana prasarana, kelembagaan, penyediaan lahan dan penetapan kawasan terkait <i>Pengembangan kawasan industri Sentolo dan Piyungan</i>
5	Disperindag	<p>a. Pengembangan batik sebagai aset penting kebudayaan dan perekonomian DIY di kancah internasional melalui <i>Jogja Kota Batik</i>.</p> <p>b. Penyelesaian dukungan perijinan, pengelolaan limbah, fasilitasi standarisasi produk, pengembangan kerjasama dan peningkatan kapasitas terkait <i>IKM Logam Aluminium</i></p>
6	Dinas Koperasi dan IKM	<p>a. Penanganan dukungan akses permodalan dan peningkatan kapasitas bagi wirausaha baru melalui <i>Inkubator Bisnis melalui Optimalisasi PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)</i></p> <p>b. Penguatan kelembagaan koperasi di sektor-sektor riil dan pertanian, pengelolaan dana bergulir, dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (Dinas Sosial), dukungan Pemberdayaan UPK (Unit Pengelola Keuangan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan) Pasca PNPM (BPFM)n dukungan terhadap Gapoktan,(Dinas Pertanian) dan Pokdakan (Dislautkan) melalui <i>Revitalisasi Koperasi</i></p>
7	Dinas Pariwisata	Pengembangan destinasi unggulan dengan pembangunan sarana prasarana destinasi beserta pendukungnya (jalan, talud, drainase, dll), penyusunan masterplan-DED, penataan lahan, pengembangan kuliner, pembuatan landmark/ letter lokasi, dukungan akses dengan



No	SKPD	Usulan Isu Strategis/ Program/ Kegiatan
		menyesuaikan kebutuhan pada lokasi destinasi: a. Kawasan Geosite Lembah Mulo, Geopark Gunungsewu, Gunungkidul b. Kawasan Geosite Gunungbatur, Geopark Gunungsewu, Gunungkidul c. Kawasan Taman Hutan Raya Bunder, Gunungkidul d. Kawasan Pendukung Wanawisata Budaya Mataram di Mangunan Dlingo, Bantul e. Kawasan Depok - Samas, Kretek, Bantul f. Kawasan Candi Ijo, Taman Breksi, dan Lava Bantal, Prambanan dan Berbah, Sleman g. Kawasan Kiskendo, Banjaroya, dan Suralaya h. Kawasan Kotagede
8	BKPP	a. Peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan konsumsi pangan non beras dengan produk pangan lokal, optimalisasi kawasan hutan untuk penyediaan tanaman pangan (di bawah tegakan) untuk warga sekitar hutan dengan <i>Diversifikasi Pangan dengan optimalisasi Pemanfaatan Lahan dibawah tegakan hutan (ketahanan pangan)</i> ; b. Penanganan kemiskinan wilayah rawan pangan secara berkelanjutan menjadi desa mandiri pangan dengan <i>Penanganan Desa Rawan Pangan</i>
9	Badan Diklat	Mengatasi gap kompetensi SDM Aparatur Pemda DIY
10	Inspektorat	ZI dan WBK pada unit layanan publik terpilih
11	Dinas Kominfo	DIY sebagai <i>Cyber Province</i> , pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan inovasi kerja dan pelayanan publik

### 5.1.3 Bidang Sarana dan Prasarana

Isu strategis sarana prasarana terkait penyediaan upaya penyediaan fasilitas publik yang menjamin terciptanya pembangunan berkeadilan. Adapun program/ kegiatan yang direncanakan antara lain

Tabel 5.3 Isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana

No	SKPD	Usulan Isu Strategis
1.	Lintas Sektor SKPD	Rencana Tata Ruang Wilayah DIY sebagai Arahan Pemanfaatan Ruang Lintas Sektor melalui, a. Pengembangan kawasan Perkotaan Yogyakarta b. Pengembangan Koridor Tempel-Parangtritis c. Pengembangan Koridor Temon-Prambanan d. Pengembangan Koridor Pantai Selatan
2	Lintas Sektor SKPD	Konektivitas Antar Wilayah sebagai Penggerak Perekonomian yang menghubungkan, a. Jogja Outer Ringroad

No	SKPD	Usulan Isu Strategis
		b. Kawasan Industri Sentolo c. Kawasan Industri Piyungan d. Bandara Udara Baru Temon Kulonprogo dengan dukungan sistem jaringan jalan, sistem jaungan jalan rel dan sistem logistik. e. Pelabuhan Tanjung Adikarto f. Jalur Jalan pantai selatan
3	Lintas Sektor SKPD	Peningkatan Kualitas Lingkungan (Air dan Udara) dengan usaha-usaha, a. Peningkatan Kualitas Air Sungai Melalui Upaya Mendorong Pelaksanaan Program Kali Bersih Berbasis Masyarakat b. Peningkatan Konservasi Air Tanah melalui upaya pembangunan/pengembangan telagadesa dan wanadesa c. Peningkatan/Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dengan Lebih Bersinergi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

#### 5.1.4 Bidang Pemerintahan

Isu strategis bidang pemerintahan terkait dengan reformasi pelayanan publik dan perbaikan-perbaikannya. Adapun rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain,

Tabel 5.4 Isu Strategis Bidang Pemerintahan

No	SKPD	Usulan Isu Strategis
1.	Biro Tapem	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Admindukcapil) yang <i>update</i> , valid, dan aksesibel; Utilisasi data dukcapil
2	Biro Hukum	Pelayanan Hukum yang update, valid, responsif, dan aksesibel
3	Biro Organisasi	Pola Hubungan antar-Lembaga (Pemda, Kraton, PA), Arah Kebijakan Kelembagaan 2018-2022
4	Satpol PP	Peningkatan ketentraman, & ketertiban umum; Revitalisasi PPNS untuk Penegakan Perda
5	Badan Kesbangpol	Yogyakarta istimewa sebagai Jogja Inklusif dan Toleran terkait Dinamika politik, potensi konflik, dan kerentanan ideologi. Penguatan Ketahanan Budaya Masyarakat
6	BPBD	Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
7	BKD	Mengatasi gap kompetensi dan gap kebutuhan SDM
8	Badan Diklat	Mengatasi gap kompetensi SDM Aparatur Pemda DIY
9	Inspektorat	ZI dan WBK pada unit layanan publik terpilih
10	Dinas Kominfo	DIY sebagai <i>Cyber Province</i> , pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan inovasi kerja dan pelayanan publik

## 5.2 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan pembangunan Tahun 2017 yang diusulkan didalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Rincian Urusan dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Masa Pelaksanaan	Jumlah Page	Keterangan				
					Hasil Program		Kelembagaan					Target	Masa Pelaksanaan	Target	Masa Pelaksanaan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1															
1.01	<b>Wajib</b>														
1.01.1.01.01.01.00	<b>PENDIDIKAN</b>														
1.01.1.01.01.01.00.01	<b>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</b>														
1.01.1.01.01.01.00.01.001	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>														
1.01.1.01.01.01.00.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 40.195.159.800,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.001.002	Penyediaan Jasa Komputer dan Printer Daya Ar Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 34.584.204.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Kantor	Ukuran aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 45.970.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keagamaan	Ukuran aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 665.962.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 2.286.881.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 243.100.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.011	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 309.995.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 71.075.200,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.014	Penyediaan Pevalhan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 465.826.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perawatan Urudagan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 20.385.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 179.467.200,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
1.01.1.01.01.01.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Hemat-jet	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	Rp. 386.947.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang/Usaha Penerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Target	Tolok Ukur	Kekurangan Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	Tolok Ukur	Pagu Indikatif	Praktikan Mgu	Keragaman	
					Hasil Program		Kekurangan Kegiatan					Hasil Kegiatan						Keragaman	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target					SKPD	1/2/3
1.01.1.01.01.00.01.022	Pembelian Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	(3)	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Jasa keamanan kantor/tempat kerja	(8)	12 bulan, 13 unit	100%	Kemampuan dan keamanan kantor	(10)	(11)	(13)	Rp. 1.643.445.000,00	(14)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	(15)	Sedang
1.01.1.01.01.00.02	<b>PROGRAM PERALIHAN RUTIN/BEKALA DAN PRASARANA APARATUR</b>																		
1.01.1.01.01.00.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1. Tempat pertemuan dan ruang kelas	576 m2	100%	Kebutuhan sarana pasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 2.439.022.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.005	Perbaikan Keadaan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2. Dcd cabang dinas	5 DEE	100%	Kebutuhan sarana pasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 1.230.450.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.007	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1. Kebutuhan dinas/operasional mobil roda empat	5 unit roda 4	100%	Kebutuhan sarana pasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 857.690.000,00	Rp. 943.450.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.009	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2. Kebutuhan dinas/operasional mobil roda dua	1 unit roda 2	100%	Kebutuhan sarana pasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 422.873.000,00	Rp. 422.873.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.010	Pengadaan Mebeleur	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Mebeleur	3 jenis	100%	Kebutuhan sarana pasarana aparatur (mebeleur) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 497.371.000,00	Rp. 497.371.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Umbulharjo	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Rumah Dinas terpelihara	1 unit	100%	Kebutuhan pemeliharaan sarana pasarana aparatur (rumah dinas) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 22.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Gedung kantor terpelihara	5 unit	100%	Kebutuhan pemeliharaan sarana pasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 488.390.000,00	Rp. 488.390.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1. Kebutuhan roda empat dinas/operasional terpelihara	19 unit roda empat	100%	Kebutuhan pemeliharaan sarana pasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 542.964.000,00	Rp. 542.964.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2. Kebutuhan roda dua dinas/operasional terpelihara	26 unit roda dua	100%	Kebutuhan pemeliharaan sarana pasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 199.200.000,00	Rp. 219.120.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3. Kebutuhan roda enam dinas/operasional terpelihara	1 unit roda enam	100%	Kebutuhan pemeliharaan sarana pasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 242.770.000,00	Rp. 242.770.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Mebeleur bisa dipergunakan kembali	6 jenis	100%	Kebutuhan pemeliharaan sarana pasarana aparatur (mebeleur) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 85.987.000,00	Rp. 85.987.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.042	Rehabilitasi Gedung/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Rehabilitasi gedung kantor	2 unit	100%	Kebutuhan rehabilitasi sarana pasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	(10)	(11)	(13)	Rp. 1.512.500.000,00	Rp. 1.512.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang
1.01.1.01.01.00.02.098	Pemeliharaan Kesp Das	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemat/efektif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(5)	100%	Mempelthy sarana pasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Pengalangan asap dan penyisatan asap	6000 bebas	100%	berkas bebas asap terdapat dengan baik	(10)	(11)	(13)	Rp. 157.342.000,00	Rp. 173.076.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Sedang

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang/Usaha Pendaftaran Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Jumlah Pagi : Rp. 736.767.969.200,00			
					Hasil Program		Kekurangan Kegiatan		Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
1.01.1.01.01.00.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR</b> Bimtek Pengelolaan dan Administrasi Keuangan	(3)	Kemanglat	DIY	100%	1. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi PPTK 2. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi PJKK 3. Bimbingan teknis perbaikan keuangan bagi pengelola keuangan sekolah 4. Penyusunan dan pendataan anggaran berbasis TI 5. Pembinaan PPTK, PJKK dan sekolah	182 orang 200 orang RHPB 2018 penyusunan jumlah esai DPA 2018 menjadi 10% 800 orang	1568 orang	Rp. 1.374.486.500,00	Rp. 1.395.000.000,00	(13)	(14)	(15)	Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.05.087	Kinerja aparatur pemerintah daerah brokasi	(4)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	100%	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	151 orang	Kualitas sumberdaya aparatur	Rp. 1.485.500,00	Rp. 95.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.05.088	Bimtek Pengelolaan Administrasi, Ases, dan Tata Naskah	(3)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	100%	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	151 orang	400 orang	Rp. 415.000.000,00	Rp. 475.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.06	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN KEMERDEKAAN</b> Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	(3)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	100%	Terwujudnya perata usaha keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75	4,72%	Rp. 45.000.000,00	Rp. 50.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.06.016	Kinerja aparatur pemerintah daerah brokasi	(4)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	100%	Terwujudnya perata usaha keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0%	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.06.017	Kinerja aparatur pemerintah daerah brokasi	(4)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	100%	Terwujudnya perata usaha keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	88%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 275.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.06.018	Kinerja aparatur pemerintah daerah brokasi	(4)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	100%	Terwujudnya perata usaha keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	13,30%	Rp. 70.000.000,00	Rp. 95.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.06.019	Melakukan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	(3)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	100%	Terwujudnya perata usaha keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3 lembaga	3 lembaga	Rp. 1.710.000.000,00	Rp. 1.889.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.15	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USAHA DULU</b> Pengembangan Model PAUD	(3)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Banguntan Danurejan	88%	PAUD PAUD	3 lembaga	3 lembaga	Rp. 300.000.000,00	Rp. 350.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.15.092	Pendidikan	(4)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	88%	1. Lomba dan Pembinaan Gugus PAUD 2. Lomba dan Pembinaan Berdis PAUD 3. Gelar PAUD	3 lembaga	4 kegiatan	Rp. 950.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.15.095	Pendidikan	(4)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	88%	1. Lomba dan Pembinaan Gugus PAUD 2. Lomba dan Pembinaan Berdis PAUD 3. Gelar PAUD	3 lembaga	4 kegiatan	Rp. 200.000.000,00	Rp. 231.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.15.097	Penyusunan Standar Layanan Pendidikan Berbasis Budaya	(3)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	88%	Identifikasi, sosialisasi dan pembinaan teknis standar layanan pendidikan berbasis budaya	Dokumen pedoman pengendalian mutu pada KB, TPA dan SPS 17 cabang	Dokumen pedoman pengendalian mutu pada KB, TPA dan SPS	Rp. 260.000.000,00	Rp. 308.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.15.098	Penyusunan Standar Implementasi Perencanaan Nalar Lahir Bangsa	(3)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	88%	Identifikasi, sosialisasi dan pembinaan teknis standar implementasi perencanaan nalar-lahir bangsa	4 dokumen : PAUD, Kelembagaan, Kelembagaan PAUD 2, Dokumen standar implementasi Kelembagaan 1. Kegiatan implementasi perencanaan nalar-lahir bangsa	4 dokumen : PAUD, Kelembagaan, Kelembagaan PAUD 2, Dokumen standar implementasi Kelembagaan	Rp. 260.000.000,00	Rp. 308.000.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
1.01.1.01.01.00.16	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN</b>	(3)	Almabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	88%	Identifikasi, sosialisasi dan pembinaan teknis standar implementasi perencanaan nalar-lahir bangsa	4 dokumen : PAUD, Kelembagaan, Kelembagaan PAUD 2, Dokumen standar implementasi Kelembagaan	4 dokumen : PAUD, Kelembagaan, Kelembagaan PAUD 2, Dokumen standar implementasi Kelembagaan	Rp. 9.114.230.000,00	Rp. 9.750.950.000,00				Sidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Unsur/Bidang/Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jumlah Pagu : Rp. 736.767.969.200,00	Keterangan			
					Hasil Program		Keukuran Kegiatan					Hasil Kegiatan		SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target		
1.01.1.01.00.16.063	<b>DASAR SBRHELAN</b> Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS / BOSDA) Pendidikan Dasar	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	APK dikdas	100%	BOS dan BOSDA	2 satuan pendidikan	2 satuan pendidikan	Rp. 450.000.000,00	Rp. 450.730.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Belgian		
1.01.1.01.00.16.135	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba SD	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan Luar DIY	APK dikdas	100%	10. Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa (PMBI ) 1. OGSN SD Tingkat Nasional 2. OSN SD Tingkat Nasional 3. FLSN SD 4. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional SD 5. Pembinaan Sekolah Sehat 6. Dokter Kecil 7. Lomba Budaya Muti SD 8. Lomba Klub Olahraga SD 9. Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat SD	3 Jenis ( Olahraga, seni, Sains ) 11 Cabang 9 cabang lomba 3 cabang lomba 4 Jentilan 25 peserta 16 sekolah 5 Klub Olahraga SD 15 sekolah , 45 siswa 9 Cabang	9 medali 9 medali	Rp. 4.263.600.000,00	Rp. 3.876.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Belgian		
1.01.1.01.00.16.136	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiman Lomba SMP	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan Luar DIY	APK dikdas	100%	1. OSN SMP 2. FLSN SMP 3. OSN SMP 4. Lomba motivasi belajar mandiri SMP 5. Gladi & lomba (PSN (Lomba Perebutan Siswa Nasional ) Smp 6. Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat Smp 7. Penyelenggaraan Pembinaan Lomba Kenya Jurnalistik Siswa Smp 8. Pembinaan Sekolah PMBI ( Bidang Sains, Olahraga dan Seni ) 1. Pembinaan dan Pengembangan Bank Soal SD/MI 2. Pengembangan Kurikulum TK dan SD 3. Pembinaan Satria dan Budaya Daerah TK dan SD 4. Tabloid Gambar	Wakil DIY mampu bersaing dalam Lomba tingkat Nasional 16 cabang 3 bidang IPA, IPS, Matematika 3 sekolah 3 Bidang 8 banyang 50 orang 15 SMP 60 orang, 3 mapel (E, Ind, Mak, IPS) kelas III dan IV 60 orang 60 orang guru 4 edisi	7 medali	Rp. 3.122.000.000,00	Rp. 3.075.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Belgian		
1.01.1.01.00.16.137	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SD	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	APK dikdas	100%	1. Pengembangan Bank Soal SMP 2. Pembinaan MCHP SMP 3. Pengembangan dan Pembinaan TKP SMP	Mutu dan ketrif pendididkan dan terapan kependidikan SD Nasional	75% ( Guru dapat menyusun soal dengan baik , siswa memahami soal dengan baik )	Rp. 1.150.850.000,00	Rp. 1.055.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Belgian		
1.01.1.01.00.16.138	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMP	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	APK dikdas	100%	1. Pengembangan Bank Soal SMP 2. Pembinaan MCHP SMP 3. Pengembangan dan Pembinaan TKP SMP	Mutu dan ketrif pendididkan dan terapan kependidikan SMP	125 Guru	Rp. 764.500.000,00	Rp. 695.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Belgian		
<b>1.01.1.01.01.00.17</b>	<b>PRISMA Y PENDIDIKAN MENDUKUNG</b>									<b>Rp. 395.967.118.000,00</b>	<b>Rp. 395.967.118.000,00</b>				
1.01.1.01.00.17.118	Penyediaan BOS/BOSDA SH	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	APK Dikmen	93%	BOS dan BOSDA	2 satuan pendidikan	2 satuan pendidikan	Rp. 0,00	Rp. 329.657.675.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Belgian		
1.01.1.01.00.17.130	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiman Lomba SMA	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan Luar DIY	APK Dikmen	93%	1. Lomba OSN SMA 2. Lomba OOSN SMA 3. Lomba FLSN SMA 4. Lomba Debat Bahasa (net & Inpres)	Wakil DIY mampu bersaing dalam Lomba tingkat Nasional 10 bidang 8 bidang 2 bidang	7 jenis lomba	Rp. 5.332.032.000,00	Rp. 4.847.300.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Belgian		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 735.767.969.200,00		Keterangan			
Nomor	Unsur/Bidang/Usaha Penerimaan Dana dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kekurangan Kegiatan			Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Praktekan Mgu	Jenis Kegiatan	1/2/3	1/2/3	
					Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Target	Took Ukur	Target						
1.01.1.01.00.17.131	Peningkatan Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMK	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Heningkat	DIY dan Luar DIY	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
						5. Lomba Cerdas Cermat UED nasional	1 bidang lima besar nasional					Rp. 4.250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Anggaran			
						6. Lomba Cerdas Cermat SMA	2 bidang bahasa jawa & mata pelajaran umum)										
						7. OPEL (olimpiade penelitian dan sains Indonesia)	50 siswa, peringkat 1										
						1. OOSN SMK	8 cabor (16 mata lomba)										
						2. FLSN SMK	9 bidang lomba										
						3. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa	9 Bidang Lomba										
						4. Lomba Bahasa	7 Bidang Lomba										
						5. Pengembangan Kreativitas Siswa SMK (tk Proweis) - klink sains	50 Karya										
						6. FLSJ DIY	6 Bidang Lomba										
1.01.1.01.00.17.135	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Heningkat	DIY		93%						Rp. 36.297.475.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Anggaran			
						1. Kartu cerdas	20.000 siswa										
						2. Beasiswa prestasi	3.000 siswa										
1.01.1.01.00.17.138	Pembinaan Pembelajaran SMA	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Heningkat	DIY		93%						Rp. 1.400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Anggaran			
						1. Pengembangan kurikulum	1. 350 org ( 159 kurikulum sesuai jumlah sekolah @ 2 org/sk)										
						2. Birek MGMP	2. 150 bahan ajar (6 mapel)										
						3. Birek Klinik Sains	3. 6 bidang (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Ekonomi, Geografi)										
1.01.1.01.00.17.139	Pembinaan Pembelajaran SMK	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Heningkat	DIY		93%						Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Anggaran			
						4. Birek SDH (Guru)	4. 4 bidang (bahasa, IPA, IPS, Matematika)										
						1. sosialisasi kebijakan nasional dan hasil pengembangan kurikulum	220 sekolah										
						2. Birek ToT	5 model kurikulum										
						3. pembedayaan MGMP SMK	bahan ajar sesuai dengan materi yang dikembangkan kurikulumnya										
1.01.1.01.00.17.140	Pembinaan Manajemen SMA	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Heningkat	DIY		93%						Rp. 235.920.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Anggaran			
						1. Birek Pengawas	55 orang										
						2. Forum pengawas.	55 orang										
						3. Workshop pengawas MKKS	50 orang										
						4. Pendampingan dan pengawas ke sekolah (kurikulum, manajemen ds)	150 sekolah dan laporan pengawasannya										
1.01.1.01.00.17.141	Pembinaan Manajemen SMK	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Heningkat	DIY		93%						Rp. 350.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Anggaran			
						1. pendampingan dan pengawas	Laporan kepengawasan sebanyak 220 sekolah										
						2. Pembedayaan Kepala sekolah SMK	laporan Tirtek Lanjut ke PTU tembak pengawas terhadap mata HIV AIDS dan NPSA										
						3 Birek Pengawas dan penyusunan pedoman kepengawasan	Tingkat pemahaman kepengawasan instrument kepengawasan dan pedoman kepengawasan										
						4. Forum pengawas SMK	evaluasi hasil kepengawasan										



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Unsur/Bidang/Usuan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktekan Mgu	Jumlah Pagu : Rp. 736.787.969.200,00	Keterangan			
					Hasil Program		Keukuran Kegiatan					Hasil Kegiatan		SKPD	1/2/3
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)				Took Ukur (10)	Target (11)		
1.01.1.01.00.17.142	Pembinaan Kesiswaan SMA	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	DIY	APK Dikmen	93%	1. Dilhat tidak Bangsa MPPSA 2. Pengembangan Penelitian 3. Pusat Pengembangan Menat Bakat Istimewa 4. Penerimaan Majalah BIAS (Siswa menengah) 5. Penerimaan Jurnal Karya ilmiah SAGASTIAS	500 siswa, termasuk konten HIV/AIDS dan MPPSA 4 bidang ilmu 15 PPKRI dan 3 bidang kewilayahan 40 Rencana Tindak Lanjut siswa pasca pelatihan 4 edisi 2 edisi	1. 900 siswa, termasuk konten HIV/AIDS dan MPPSA 4 bidang ilmu 15 PPKRI dan 3 bidang kewilayahan 40 Rencana Tindak Lanjut siswa pasca pelatihan 4 edisi 2 edisi	500 siswa	14	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan		
1.01.1.01.00.17.143	Pembinaan Kesiswaan SMK	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	DIY	APK Dikmen	93%	1. PIR (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) 2. Young Ladies Leadership Programme (untuk SMA dan SMK) 3. Pusat pengembangan Menat dan bakat Istimewa SMK 4. Satek, pembinaan, pengimban OSN ke Provinsi 5. Satek, pengimban OSN ke Provinsi 6. Satek, pengimban FLSSN ke Provinsi 7. Satek, pengimban Debat Bahasa ke Provinsi 8. Satek, pengimban LCC UUD 1945 ke tingkat Provinsi 9. Satek, pengimban LCC SK ke Provinsi	1 jenis layanan 40 Rencana Tindak Lanjut siswa pasca pelatihan 15 PPKRI dan kewilayahan 40 Rencana Tindak Lanjut siswa pasca pelatihan 15 PPKRI dan kewilayahan 40 Rencana Tindak Lanjut siswa pasca pelatihan 4 edisi 2 edisi	80 orang	Rp. 1.040.700.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan			
1.01.1.01.00.17.144	Pembinaan dan Pengembangan Lomba SMA Tingkat Daerah	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta	APK Dikmen	93%	1. OSN SMK 2. FLSSN SMK 3. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa 4. Lomba Bahasa (inggr, Jerman, mandarin, prancis, jepang, indonesia, Korea) 5. Pengembangan Kreativitas Siswa SMK (di Provinsi) - satek selris 6. FLS DIY - unt SMK non Seni 1. Pengembangan kurikulum 2. Birek MQSP 3. Birek Klatik Satek 4. Birek SDK (Baru) 5. Birek SDK (Baru)	1. 9 bidang 2.10 bidang 3. 8 bidang 4. 2 bidang 5. 1 bidang 6. 2 bidang 1. 8 satek (16 mata lomba) 2. 9 bidang lomba 3. 9 Bidang Lomba 4. 7 Bidang Lomba - peringkat 10 5. 50 Karya 6. 6 Bidang Lomba 4 keg x 5 KK 70 org x 5 KK 6 bid x 6 kali x 5 KK 4 bidang x 5 KK	6 jenis lomba 6 jenis lomba	Rp. 3.094.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan			
1.01.1.01.00.17.145	Pembinaan dan Pengembangan Lomba SMA Tingkat Daerah	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta	APK Dikmen	93%	1. OSN SMK 2. FLSSN SMK 3. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa 4. Lomba Bahasa (inggr, Jerman, mandarin, prancis, jepang, indonesia, Korea) 5. Pengembangan Kreativitas Siswa SMK (di Provinsi) - satek selris 6. FLS DIY - unt SMK non Seni 1. Pengembangan kurikulum 2. Birek MQSP 3. Birek Klatik Satek 4. Birek SDK (Baru) 5. Birek SDK (Baru)	1. 9 bidang 2.10 bidang 3. 8 bidang 4. 2 bidang 5. 1 bidang 6. 2 bidang 1. 8 satek (16 mata lomba) 2. 9 bidang lomba 3. 9 Bidang Lomba 4. 7 Bidang Lomba - peringkat 10 5. 50 Karya 6. 6 Bidang Lomba 4 keg x 5 KK 70 org x 5 KK 6 bid x 6 kali x 5 KK 4 bidang x 5 KK	6 jenis lomba 6 jenis lomba	Rp. 5.157.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan			
1.01.1.01.00.17.146	Pembudayaan SMA di Cabang Dinas	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	DIY	APK Dikmen	93%	1. OSN SMK 2. FLSSN SMK 3. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa 4. Lomba Bahasa (inggr, Jerman, mandarin, prancis, jepang, indonesia, Korea) 5. Pengembangan Kreativitas Siswa SMK (di Provinsi) - satek selris 6. FLS DIY - unt SMK non Seni 1. Pengembangan kurikulum 2. Birek MQSP 3. Birek Klatik Satek 4. Birek SDK (Baru) 5. Birek SDK (Baru)	1. 9 bidang 2.10 bidang 3. 8 bidang 4. 2 bidang 5. 1 bidang 6. 2 bidang 1. 8 satek (16 mata lomba) 2. 9 bidang lomba 3. 9 Bidang Lomba 4. 7 Bidang Lomba - peringkat 10 5. 50 Karya 6. 6 Bidang Lomba 4 keg x 5 KK 70 org x 5 KK 6 bid x 6 kali x 5 KK 4 bidang x 5 KK	6 jenis lomba 6 jenis lomba	Rp. 3.600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan			
1.01.1.01.00.17.147	Pembudayaan SMK di Cabang Dinas	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	DIY	APK Dikmen	93%	1. OSN SMK 2. FLSSN SMK 3. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa 4. Lomba Bahasa (inggr, Jerman, mandarin, prancis, jepang, indonesia, Korea) 5. Pengembangan Kreativitas Siswa SMK (di Provinsi) - satek selris 6. FLS DIY - unt SMK non Seni 1. Pengembangan kurikulum 2. Birek MQSP 3. Birek Klatik Satek 4. Birek SDK (Baru) 5. Birek SDK (Baru)	1. 9 bidang 2.10 bidang 3. 8 bidang 4. 2 bidang 5. 1 bidang 6. 2 bidang 1. 8 satek (16 mata lomba) 2. 9 bidang lomba 3. 9 Bidang Lomba 4. 7 Bidang Lomba - peringkat 10 5. 50 Karya 6. 6 Bidang Lomba 4 keg x 5 KK 70 org x 5 KK 6 bid x 6 kali x 5 KK 4 bidang x 5 KK	6 jenis lomba 6 jenis lomba	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan			
1.01.1.01.00.17.148	Pengembangan Berkeadilan Jaringjaring SMA	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	DIY	APK Dikmen	93%	1. OSN SMK 2. FLSSN SMK 3. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa 4. Lomba Bahasa (inggr, Jerman, mandarin, prancis, jepang, indonesia, Korea) 5. Pengembangan Kreativitas Siswa SMK (di Provinsi) - satek selris 6. FLS DIY - unt SMK non Seni 1. Pengembangan kurikulum 2. Birek MQSP 3. Birek Klatik Satek 4. Birek SDK (Baru) 5. Birek SDK (Baru)	1. 9 bidang 2.10 bidang 3. 8 bidang 4. 2 bidang 5. 1 bidang 6. 2 bidang 1. 8 satek (16 mata lomba) 2. 9 bidang lomba 3. 9 Bidang Lomba 4. 7 Bidang Lomba - peringkat 10 5. 50 Karya 6. 6 Bidang Lomba 4 keg x 5 KK 70 org x 5 KK 6 bid x 6 kali x 5 KK 4 bidang x 5 KK	6 jenis lomba 6 jenis lomba	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan			
1.01.1.01.00.17.149	Pengembangan Berkeadilan Jaringjaring SMK	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	DIY	APK Dikmen	93%	1. OSN SMK 2. FLSSN SMK 3. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa 4. Lomba Bahasa (inggr, Jerman, mandarin, prancis, jepang, indonesia, Korea) 5. Pengembangan Kreativitas Siswa SMK (di Provinsi) - satek selris 6. FLS DIY - unt SMK non Seni 1. Pengembangan kurikulum 2. Birek MQSP 3. Birek Klatik Satek 4. Birek SDK (Baru) 5. Birek SDK (Baru)	1. 9 bidang 2.10 bidang 3. 8 bidang 4. 2 bidang 5. 1 bidang 6. 2 bidang 1. 8 satek (16 mata lomba) 2. 9 bidang lomba 3. 9 Bidang Lomba 4. 7 Bidang Lomba - peringkat 10 5. 50 Karya 6. 6 Bidang Lomba 4 keg x 5 KK 70 org x 5 KK 6 bid x 6 kali x 5 KK 4 bidang x 5 KK	6 jenis lomba 6 jenis lomba	Rp. 244.520.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan			
<b>1.01.1.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN JARINGJARING</b>								<b>Rp. 5.338.420.000,00</b>						
1.01.1.01.00.18.024	Pembinaan dan Pengembangan Jaringjaring Gender	Pendidikan	Melaku Monev Masyarakat	DIY	Penyaji dan Informan non formal dan informal	10000orang	1. Sosialisasi Bahan Ajar Responsif Gender	150 orang	150 orang	Rp. 320.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Jumlah Pagi : Rp. 735.767.969.200,00	Keragaman			
					Hasil Program		Kekurangan Kegiatan					Hasil Kegiatan		Jenis Kegiatan	
					Took Ukur	Target	Took Ukur	Target				Took Ukur	Target	SKPD	1/2/3
1.01.1.01.00.18.021	Bidang Pendidikan	(3)	Meningkat	(5)	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	100000orang	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	
1.01.1.01.00.18.021	Jambore PTK - PNF	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	DIY dan Luar DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	100000orang	100000orang	16 jenis lomba	10 kategori	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.18.047	Pengembangan Paket Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	100000orang	100000orang	13 MTHP	13 MTHP	6 model satuan pendidikan responsif gender	13 MTHP	Rp. 120.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.18.053	Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Keakraban	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	100000orang	100000orang	13 MTHP	13 MTHP	10 kategori	13 MTHP	Rp. 1.295.920.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.18.055	Penyenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba Keagamaan	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	100000orang	100000orang	13 MTHP	13 MTHP	10 kategori	13 MTHP	Rp. 925.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.18.066	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PNF	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	DIY dan Luar DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	100000orang	100000orang	13 MTHP	13 MTHP	10 kategori	13 MTHP	Rp. 260.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.18.068	Selamatan BAP PUD dan PNF	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	100000orang	100000orang	13 MTHP	13 MTHP	10 kategori	13 MTHP	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.18.069	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	100000orang	100000orang	13 MTHP	13 MTHP	10 kategori	13 MTHP	Rp. 720.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.18.070	Peningkatan Pendidikan Teknik Pengendalian Mutu Layanan Pendidikan	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	100000orang	100000orang	13 MTHP	13 MTHP	10 kategori	13 MTHP	Rp. 231.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
<b>1.01.1.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN NON KHUSUS</b>											<b>Rp. 25.388.757.000,00</b>	<b>Rp. 24.025.000.000,00</b>		
1.01.1.01.00.19.061	Uraian Operasional Sekolah	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	DIY	Penertasan kinerja pelayanan PPKL	72.11%	72.11%	1. BOSDA SLB	3719 siswa	kegiatan proses belajar mengajar	76 SLB	Rp. 7.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.19.086	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Yogyakarta	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	Megangan	Penertasan kinerja pelayanan PPKL	72.11%	72.11%	2. Pembinaan PHAS	1527 siswa	kegiatan proses belajar mengajar	1 tahun	Rp. 800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.19.087	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Yogyakarta	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	Gondomanan	Penertasan kinerja pelayanan PPKL	72.11%	72.11%	3. Diikuti TOT Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2	1 tahun	kegiatan proses belajar mengajar	1 tahun	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.19.088	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN Pembina	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	Umbulharjo	Penertasan kinerja pelayanan PPKL	72.11%	72.11%	4. Diikuti TOT Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2	1 tahun	kegiatan proses belajar mengajar	1 tahun	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.19.089	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Butut	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	Kaohlan	Penertasan kinerja pelayanan PPKL	72.11%	72.11%	5. Diikuti TOT Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2	1 tahun	kegiatan proses belajar mengajar	1 tahun	Rp. 1.350.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	
1.01.1.01.00.19.090	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Butut	Pendidikan Menengah Atas	Meningkat	Sewon	Penertasan kinerja pelayanan PPKL	72.11%	72.11%	6. Diikuti TOT Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2	1 tahun	kegiatan proses belajar mengajar	1 tahun	Rp. 1.350.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Nomor	Uraian/Bidang/ Urusan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Praktekan Maju	Jumlah Pagu : Rp. 735.767.969.200,00	Keterangan		
						Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				SKPD	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.19.091	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLB N 1 Sleman	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	Pakem	Persentase kinerja pelayanan PPK-UK	72,11%	1. pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar	1 tahun	kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar	1 tahun	Rp. 675.110.000,00	Rp. 675.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang
1.01.1.01.01.00.19.092	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLB N 1 Gunungkidul	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	Wonorejo	Persentase kinerja pelayanan PPK-UK	72,11%	1. pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar	1 tahun	kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar	1 tahun	Rp. 750.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang
1.01.1.01.01.00.19.093	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLB N 1 Kulon Progo	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	Pangreh	Persentase kinerja pelayanan PPK-UK	72,11%	1. pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar	1 tahun	kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar	1 tahun	Rp. 945.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang
1.01.1.01.01.00.19.095	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLB N 2 Gunungkidul	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	Playen	Persentase kinerja pelayanan PPK-UK	72,11%	1. pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar	1 tahun	kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar	1 tahun	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang
1.01.1.01.01.00.19.099	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PPK-UK	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	DIY	Persentase kinerja pelayanan PPK-UK	72,11%	1. Pembinaan Forum Masyarakat (Forum)	950 orang	Rapat/kegiatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PPK-UK	1638 orang	Rp. 2.341.330.000,00	Rp. 2.400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang
							10. Binake Peningkatan Manajemen Kelembayuan	60 sekolah						
							2. Pengembangan Kurikulum	80 guru						
							3. Pembinaan Layanan Kesehatan Siswa SLB	1.998 siswa						
							4. Dilat Guru Sekolah Reguler Penyelenggara Inklusif	120 guru						
							5. Pendidikan Kesehatan Reproduksi	80 guru						
							6. Dilat Guru Ketramplilan SLB	80 guru						
							7. Pelebaran Penilaian Soal Ujian	50 orang						
							8. Binake Peningkatan Manajemen Kepala SLB	78 SLB						
							9. Binake Peningkatan Manajemen Kepala SMP	100 sekolah						
1.01.1.01.01.00.19.101	Penyenggaraan, pembinaan dan Peningkatan Mutu PPK-UK	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pelayanan PPK-UK	72,11%	1. Lomba FL2N, O2SN, Kemahiran dan Festival Lomba Lerasi dan 2. Olimpiade Olahraga Siswa Tuna Grahita	37 cabang	Wakil DIY siap bersaing dalam lomba tingkat nasional	6 kontingen	Rp. 1.992.445.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang
1.01.1.01.01.00.19.102	Penyediaan Basisdata PPK-UK	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	DIY	Persentase kinerja pelayanan PPK-UK	72,11%	1. Basisdata Masing	80 regu	Aksesibilitas layanan pendidikan khusus dan layanan khusus	2794 siswa	Rp. 1.860.000.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang
1.01.1.01.01.00.19.103	Pengembangan Pusat Layanan Pendidikan Khusus	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidikan Menengah	Mengayasan Sombolo	Persentase kinerja pelayanan PPK-UK	72,11%	1. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pusat Layanan Adis	1 tahun	anak membutuhkan khusus siap masuk ke sekolah reguler dan mahir di bidang yang diminati	200 anak	Rp. 2.308.341.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang
1.01.1.01.01.00.22.007	Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan	Pendidikan	Melek Huruf Masyarakat Menengah	Umbulharjo	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	75,17%	1) Koordinasi, diseminasi dan Launching produk baru program BTSP dengan jalinan pendidikan dan mitra 2) pengembangan web BTSP 3) penelitian buletin 4) penerbitan Jurnal 5) Pendayagunaan sekolah dalam penerbitan TK	1000 orang	7 kegiatan	Sinkronisasi program BTSP dengan lembaga mitra, jalinan dengan pemangku kebijakan	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang
1.01.1.01.01.00.22.027	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah	Pendidikan	Melek Huruf Masyarakat Menengah	DIY	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	75,17%	1. Sosialisasi kebijakan dan program akreditasi	950 orang	600 sekolah/madrasah	600 sekolah/madrasah	Rp. 3.250.000.000,00	Rp. 3.300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD - Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Nomor	Unitas/Bidang/Usana Penerimaan Dana dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif			Praktikan Maju	Jumlah Pagi : Rp. 735.767.969.200,00	Keterangan	
						Hasil Program	Target	Tolok Ukur	Kekurangan Kegiatan	Target	Tolok Ukur			Target	SKPD
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Penyelenggaraan Ujian	Pendidikan	Melak Huruf Asyarakat Heninglat	DIY	Penentase Kinerja Pengetahuan Muta Pendidikan	75,17%	1. Sosialisasi Jletris uljan 2. Penyuaran soal ulja 3. pengendalian naseh soal uljan 4. Pelaksanaan uljan pada jenjang SD/MI/SLB/Paket A/Ula	590 orang 315 orang 600 sacolah/madrash	Darah Istimewa Yogyakarta	1 kegiatan	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Melak Huruf Asyarakat Heninglat	DIY	Penentase Kinerja Pengetahuan Muta Pendidikan	75,17%	Inesentif GTP/PTT di lingkungan dinas Dipora DIY 1. drf di atas pendidikan 2017 2. Pengelaban web Dinas Dipora DIY 3. Pengelaban apodak 4. Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Bidang Pengabdian Masyarakat Guru Nasional, dan Gebyar Pendidikan Nasional	18850 orang	Kesejahteraan GTP dan PTT di Lingkungan Dinas Dipora DIY	18850 orang	Rp. 42.639.043.000,00	Rp. 45.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Pengelolaan Data dan Berkomunikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Melak Huruf Asyarakat Heninglat	Umbulharjo	Penentase Kinerja Pengetahuan Muta Pendidikan	75,17%	1. di atas pendidikan 2017 2. Pengelaban web Dinas Dipora DIY 3. Pengelaban apodak	1 draf 1 tahun	Syaran data dan informasi berkomunikasi pendu dan olahraga	1 tahun	Rp. 556.960.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Aprelasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Melak Huruf Asyarakat Heninglat	DIY	Penentase Kinerja Pengetahuan Muta Pendidikan	75,17%	Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Bidang Pengabdian Masyarakat Guru Nasional, dan Gebyar Pendidikan Nasional	3650 or	Melak atas Prestasi pelajar, Pemuda dan Mahasiswa serta paman dan alang seni bidang pendidikan	4 kegiatan	Rp. 3.850.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Pengadaan Koleksi dan Bingkai Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan	Melak Huruf Asyarakat Heninglat	DIY	Penentase Kinerja Pengetahuan Muta Pendidikan	75,17%	Facilias FCR DIY, Dewan Pendidikan, GPTK, Organisasi Olahraga, KONI, KPI, BHS, LOTI, NWARDA, NPC	10 lembara	Terfasiliasya lembara pendidikan, pemuda dan olahraga di DIY	10 lembara	Rp. 7.006.050.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Melak Huruf Asyarakat Heninglat	DIY dan Luar DIY	Penentase Kinerja Pengetahuan Muta Pendidikan	75,17%	1. Sesiak Forum Ilmah Guru PPK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Dewan Jember Sesiak Sertifikasi Pendidik 3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru dan Pemang Bolejar 4. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan pengelaban website 2. Gladi kawat 3. Siran Pendidikan	3.692 Orang 10 tayang 1 kompok, 60 orang	Muta Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.692 Orang	Rp. 3.187.433.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Penyenggaraan Gebyar Pendidikan, Pemuda dan Tenaga Kependidikan Informal	Pendidikan	Melak Huruf Asyarakat Heninglat	DIY	Penentase Kinerja Pengetahuan Muta Pendidikan	75,17%	Pengangan BPK kepada masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga 1. Ngudak Tembang	4 jenis 10 episode	Penambahan wawasan tentang BPK kepada masyarakat	4 jenis	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Penyenggaraan Saran dan Publikat Pendidikan di Media Cetak dan Elektronik	Pendidikan	Melak Huruf Asyarakat Heninglat	DIY	Penentase Kinerja Pengetahuan Muta Pendidikan	75,17%	1. Ngudak Tembang	10 episode	muar peserta didik SD dan kearifan lokal dan mempedajar bahasa Jawa nusantara	3 kegiatan	Rp. 660.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Pembinaan dan penyelenggaraan Data Seni Pelajar	Pendidikan	Melak Huruf Asyarakat Heninglat	DIY dan Luar DIY	Penentase Kinerja Pengetahuan Muta Pendidikan	75,17%	DIY mampu menampilkan kesenan khas dalam GSR se Jawa Bali dan Lampung	10 tayang 1 kompok, 60 orang	Peubahan wawasan seni budaya bagi pelajar di DIY	1 kotingen, 60 orang	Rp. 521.675.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		<b>PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI</b>										<b>Rp. 15.902.604.000,00</b>	<b>Rp. 17.235.000.000,00</b>		
		Promosi Pendidikan DIY	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidik Heninglat	Lampung, Klaten, Tembung, Ulu, Sumatera Utara , Jakarta	Penentase Pengetahuan Asesibilitas Pendidikan Tinggi	59%	1. Promosi Perguruan Tinggi 2. Pengelaban Sistem Informasi Perguruan Tinggi 1. Beasiswa bagi mahasiswa baru 2. Beasiswa bagi mahasiswa reguler 1. sosialisasi and penyelenggaraan nakea, HIV dan AIDS 2. Peras dan Pemasar Budaya Nusantara oleh IOPK 3. Peverbitan Majalah Nusantara 1. Penyelangan dan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	5 bkalas 1 sistem 200 mahasiswa 400 mahasiswa 1.500 orang 1 event 6 edisi 3 program studi	Peningkatan Jumlah mahasiswa yang masuk perguruan tinggi DIY	2 jenis	Rp. 1.487.604.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Pembinaan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidik Heninglat	DIY	Penentase Pengetahuan Asesibilitas Pendidikan Tinggi	59%	1. Beasiswa bagi mahasiswa baru 2. Beasiswa bagi mahasiswa reguler	600 mahasiswa	Aksesibilitas pendidikan tinggi	600 mahasiswa	Rp. 4.100.000.000,00	Rp. 4.100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Pembinaan Komunitaswan	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidik Heninglat	DIY	Penentase Pengetahuan Asesibilitas Pendidikan Tinggi	59%	1. sosialisasi and penyelenggaraan nakea, HIV dan AIDS 2. Peras dan Pemasar Budaya Nusantara oleh IOPK 3. Peverbitan Majalah Nusantara	1500 orang	Pendidikan tinggi yang berkualitas	1500 orang	Rp. 1.300.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar
		Penyelenggaraan Akademik Komunitas Seni dan Budaya	Pendidikan	Aksesibilitas Pendidik	Sewon	Penentase Pengetahuan Asesibilitas Pendidikan Tinggi	59%	1. Penyelangan dan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3 program studi	Terseleenggaranya pendidikan Akademik Komunitas Seni dan Budaya	3 program studi	Rp. 9.780.000.000,00	Rp. 10.125.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Belajar

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Unsur/Bidang/Usuan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktikan Haju	Jumlah Pagi : Rp. 735.767.969.200,00	Keterangan			
					Hasil Program		Keukuran Kegiatan					Hasil Kegiatan		SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target		
(1)	Yogyakarta (ANSEN/BJDYD)	(3)	Heningkat	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	Bermuda Dan Olahraga		
1.01.1.01.01.00.24	<b>PROGRAM ASELERASI KEMERDEKAAN BERKUALITAS TERKEMUKA</b>										<b>Rp. 7.250.000.000,00</b>				
1.01.1.01.01.00.24.041	Aksesibilitas Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK untuk Peningkatan Kemampuan Belajar TIK	Pendidikan	Days, Saling Pendidikan Heningkat	DIY	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	60%	1. Lomba TIK 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Akademik Komunitas 3. Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	20 bidang lomba 4 jenis 520 m2	apresiasi bagi guru, siswa dan pelaku pendidikan lainnya dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran	3 jenis kegiatan	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Berjalan		
1.01.1.01.01.00.24.054	Pembinaan Kompetensi TIK bagi PTK	Pendidikan	Days, Saling Pendidikan Heningkat	DIY	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	60%	1. Bimtek pembinan kompetensi TIK bagi PTK 2. Pembinaan komunitas TIK	2 kegiatan 2 kegiatan 500 orang	Marihat TIK dalam kegiatan belajar mengajar dan komunitas TIK	2 kegiatan	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Berjalan		
1.01.1.01.01.00.24.055	Produk media pembelajaran berbasis TIK	Pendidikan	Days, Saling Pendidikan Heningkat	DIY	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	60%	1. Produk media pembelajaran berbasis video, grafis, audio, video, buku elektronik 2. Game edukasi 3. Game edukasi 4. media sosialisasi pembelajaran 5. Judul 50 judul video dan 50 judul audio bahan ajar 1 media	30 judul media 50 judul video dan 50 judul audio bahan ajar 1 media	Media pembelajaran berbasis TIK dan Bahan ajar	8 jenis	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Berjalan		
1.01.1.01.01.00.24.056	Bimtek Produk dan Pemanfaatan media pembelajaran	Pendidikan	Days, Saling Pendidikan Heningkat	DIY	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	60%	1. Bimtek bidang broadcasting TV dan radio 2. Bimtek produk media pembelajaran bagi guru 3. Bimtek pemanfaatan media pembelajaran bagi pengawat (SMA dan SMK)	60 siswa, 60 produk 180 guru dan 180 produk 80 orang	Suftarik Area wisata, dalam produk dan pemanfaatan media pembelajaran	340 orang	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Berjalan		
1.01.1.01.01.00.24.057	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	Pendidikan	Days, Saling Pendidikan Heningkat	DIY	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	60%	1. Saran TV lokal 2. Pameran pendidikan 3. Saran radio streaming 4. Saran TV on Demand	20 kali 4 kali 1 paket 1 paket	Masyarakat pendidikan memanfaatkan produk pembelajaran BPR DIY	4 jenis	Rp. 1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Berjalan		
1.01.1.01.01.00.24.058	Pengelolaan sarana dan prasarana IDC dan BTS	Pendidikan	Days, Saling Pendidikan Heningkat	DIY	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	60%	Pemeliharaan Pngelolaan IDC dan BTS	77 bts dan repeater 1 set IDC	Pelayanan TIK melalui sarana dan prasarana IDC dan BTS	77 bts dan repeater 1 set IDC	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Berjalan		
1.01.1.01.01.00.24.059	Perencanaan Media Pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus	Pendidikan	Days, Saling Pendidikan Heningkat	DIY	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	60%	Tersedianya media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus	5 jenis kurahan	Penyediaan kualitas inovasi dapat meningkatkan media pembelajaran guna pembelajaran khusus	anak berkebutuhan khusus dapat meningkatkan produk pembelajaran khusus	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Berjalan		
1.01.1.01.01.00.24.060	Layanan PPGD Online	Pendidikan	Days, Saling Pendidikan Heningkat	DIY	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	60%	1. layanan pertemuan peserta didik baru secara online 2. try out online	1) 123 SMA/SMK N 2) Pemetaan kompetensi siswa untuk mapel yang di UN/kan	Optimalisasi layanan mutu berbasis TIK untuk penyelenggaraan PPGD online	SMA/SMK se DIY	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Berjalan		
1.01.1.01.01.00.28	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS TERKEMUKA</b>										<b>Rp. 1.153.000.000,00</b>				
1.01.1.01.01.00.28.001	Perencanaan dan Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	Pendidikan	Days, Saling Pendidikan Heningkat	DIY	Presentase satuan pendidikan yang mengembangkan model unggulan mutu pendidikan	40%	Pendaftaran sekolah unggulan mutu pendidikan	100 sekolah	terbentuknya sekolah unggulan mutu	100 sekolah	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Berjalan		
1.01.1.01.01.00.28.008	Layanan Mobile "Learning Service"	Pendidikan	Days, Saling Pendidikan Heningkat	DIY	Presentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan model unggulan	40%	Layanan pembelajaran dengan Mobile Learning service	100 kelompok	kebutuhan belajar masyarakat terpenuhi	100 kelompok	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sidang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang/Usaha Penerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Kekurangan Kegiatan				Hasil Kegiatan		SKPD	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1.01.1.01.01.00.28.012	Pengembangan Sekolah Sajihara	Pendidikan	Daya Saing Pendidikan Heningjat	DIY	Mutu pendidikan	40%	Pendampingan sekolah	10 sekolah	10 sekolah	Rp. 260.000.000,00	Rp. 260.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.01.1.01.01.00.28.013	Pengembangan Model Unggulan Mutu PNEI	Pendidikan	Daya Saing Pendidikan Heningjat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan model unggulan mutu pendidikan	40%	Peningkatan tesyakan PKBM dan Program Pendidikan Kesetaraan	10 PKBM	10 PKBM	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.01.1.01.01.00.29	<b>PROGRAM SINERGI/RTAS PENGANGKUTAN PENGAWALAN</b>									<b>Rp. 18.235.510.000,00</b>	<b>Rp. 19.995.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.00.29.001	Rehabilitasi dan Pembangunan Pendidikan	Pendidikan	Daya Saing Pendidikan Heningjat	DIY	Persentase lulusan SMK terampil di dunia kerja	45%	Peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembangunan	1 meet	1 meet	Rp. 100.000.000,00	Rp. 93.615.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.01.1.01.01.00.29.004	Lomba Kompetensi Siswa SKM Tingkat Nasional	Pendidikan	Daya Saing Pendidikan Heningjat	DIY dan Luar DIY	Persentase lulusan SMK terampil di dunia kerja	45%	Sekeloa TK Progres, Pembinaan dan Programman ke TK Nasional	50 bidang lomba	50 bidang lomba	Rp. 4.719.930.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.01.1.01.01.00.29.005	Pembelajaran LTM dan OSN/TKX	Pendidikan	Daya Saing Pendidikan Heningjat	DIY	Persentase lulusan SMK terampil di dunia kerja	45%	1. Lomba LTM (lomba teknologi inovasi mahasiswa) 2) OSN	150 mahasiswa ( 6 bidang)	600 mahasiswa	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 1.125.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.01.1.01.01.00.29.007	Pembudayaan Akses Lulusan SMK terhadap Dunia Kerja	Pendidikan	Daya Saing Pendidikan Heningjat	DIY	Persentase lulusan SMK terampil di dunia kerja	45%	1. Sosialisasi job matching 2. pameran/bursa kerja	4 bidang (seksa, kirma, biologi, MK)	238 orang	Rp. 250.000.000,00	Rp. 270.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.01.1.01.01.00.29.008	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	Pendidikan	Daya Saing Pendidikan Heningjat	Tegalrejo	Persentase lulusan SMK terampil di dunia kerja	45%	Pelayanan Pendidikan yang testandar sana di 230 SMK	1942 orang	1942 orang	Rp. 12.123.365.000,00	Rp. 13.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.18	<b>KEPERHUKAAN DAN OLAH RAGA</b>													
1.18.1.01.01.01.00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga													
1.18.1.01.01.01.00.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPERHUKAAN</b>									<b>Rp. 3.815.750.000,00</b>	<b>Rp. 4.799.687.000,00</b>			
1.18.1.01.01.00.16.001	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Pendidikan	Daya Saing Pendidikan Heningjat	DIY	Jumlah Sintra Pembudayaan Pemuda	15sentra	1. Jambore Pemuda Daerah 2. Lomba Pemuda 3. Pameran Hasil Karya Pemuda DI kepemudaan 4. Sekeloa peserta calon jombore pemuda Indonesia 5. Penyusunan pemetaan data kepemudaan	200 peserta	5 kegiatan	Rp. 1.222.000.000,00	Rp. 1.527.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.18.1.01.01.00.16.017	Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Pendidikan	Daya Saing Pendidikan Heningjat	DIY	Jumlah Sintra Pembudayaan Pemuda	15sentra	1. Pemilihan Pemuda Pelopor 2. Sintra Pembudayaan Pemuda 3. Pemuda Sajjana Untuk Pembangunan 4. Perolehan Pemuda Antar Negara 5. Kapal Pemuda Nusantara	20 Pemuda Sajjana	5 kegiatan	Rp. 2.597.750.000,00	Rp. 3.242.187.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.18.1.01.01.00.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENGAWALAN DAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAPAIAN HIDUP PEMUDA</b>									<b>Rp. 1.318.000.000,00</b>	<b>Rp. 1.647.500.000,00</b>			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang/Usuan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Kerangka				
					Hasil Program		Kekurangan Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur (6)	Target (7)	Tolok Ukur (8)	Target (9)					Tolok Ukur (10)	Target (11)	SKPD
1.18.1.01.00.17.002	Rehabilitasi Ketrampilan Bagi Pemuda	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	DIY	Peningkatan Jumlah kelompok Wirausaha Muda	405kelompok	Pada tahun Ketrampilan Pemuda	60 peserta (20 kelompok)	Peningkatan kualitas ketrampilan pemuda	60 peserta (20 kelompok)	Rp. 1.147.500.000,00	Rp. 918.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	(14)	(15)
1.18.1.01.00.17.003	Pembinaan Inovasi Berbasis Pemuda	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	DIY	Peningkatan Jumlah kelompok Wirausaha Muda	405kelompok	1. Pembinaan Wirausaha Muda 2. Lomba Inovasi berbasis	100 Peserta 4 bidang wirausaha	Potensi kualitas wirausaha muda	100 orang, 4 bidang wirausaha	Rp. 500.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
1.18.1.01.01.00.20	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PEMASTYAKATAN OLAHRAGA</b>										<b>Rp. 230.000.000,00</b>	<b>Rp. 230.000.000,00</b>			
1.18.1.01.00.20.007	Pemastysakatan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	DIY	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Asu Pembinaan Olahraga	24000orang	Layanan dan pembinaan masyarakat olahraga	2000 orang	Amno masyarakat berolahraga	2000 orang	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
1.18.1.01.01.00.21	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PRASARANA OLAHRAGA</b>										<b>Rp. 121.743.289.000,00</b>	<b>Rp. 495.000.000,00</b>			
1.18.1.01.00.21.007	Pembinaan Rutin Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	Bergantungan Umbulharjo	Peningkatan Fasilitas Layanan Pemuda dan Olahraga	66,67%	Pembinaan Komplek Mandala Krida, GOR Amonggop dan Galanggang Pemuda Sorowajan	3 unit	Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga terpenuhi	3 unit	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
1.18.1.01.00.21.016	Pembangunan Stadion Mandala Krida	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	Umbulharjo	Peningkatan Fasilitas Layanan Pemuda dan Olahraga	66,67%	Pembangunan Stadion Mandala Krida	1 unit	Sarana Prasarana olahraga	1 unit	Rp. 105.501.039.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
1.18.1.01.00.21.017	Pembangunan Bumi Perumahan Babarsari	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	Depok	Peningkatan Fasilitas Layanan Pemuda dan Olahraga	66,67%	Pembangunan Bumi Perumahan Babarsari	1 unit	Sarana Prasarana Pemuda	1 unit	Rp. 10.777.750.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
1.18.1.01.00.21.018	Pembangunan Youth Centre	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	Mali	Peningkatan Fasilitas Layanan Pemuda dan Olahraga	66,67%	Pembangunan Youth Centre	1 unit	Sarana Prasarana Pemuda	1 unit	Rp. 5.014.500.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
1.18.1.01.00.21.019	Pembinaan Selojo/Berot Sarana dan Prasarana Pemuda	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	Kusahan Mali Umbulharjo	Peningkatan Fasilitas Layanan Pemuda dan Olahraga	66,67%	Pembinaan Komplek Gaba Wana Bhaktyska, Youth Centre dan Pondok Pemuda Ambarharau	3 unit	Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda terpenuhi	3 unit	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
1.18.1.01.00.22	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN</b>										<b>Rp. 3.173.000.000,00</b>	<b>Rp. 3.966.250.000,00</b>			
1.18.1.01.00.22.003	Pembentukan Pasabreka	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	Mali	Peningkatan organisasi pembinaan/perbendaharaan pemuda	100persen	Sekeloa Calon Anggota Pasabreka Nasional	satu peserta dan satu peserta juri	Calon Anggota Pasabreka Nasional, dan Perwakilan DIY	40 pasang pasabreka	Rp. 2.241.250.000,00	Rp. 1.793.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
1.18.1.01.00.22.019	Pembinaan keorganisasian generasi muda	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	DIY	Peningkatan organisasi pembinaan/perbendaharaan pemuda	100persen	1. Lomba Bersebis Trikot DIY 2. Pelatihan Pemuda Kaler Anti Narkoba dan pengetahuan HIV AIDS	60 Peserta Inel kabkota 550 peserta	Kompetensi kepemimpinan pemuda	1270 orang	Rp. 1.725.000.000,00	Rp. 1.380.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
1.18.1.01.01.00.23	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PERSASTIWAAN RAGA</b>										<b>Rp. 11.540.420.000,00</b>	<b>Rp. 12.982.262.000,00</b>			
1.18.1.01.00.23.001	Pembinaan dan Pembinaan Olahraga Berprestasi	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	DIY	Capaian Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga	30medali	Pembinaan Atlet Berprestasi Usia 10-14 tahun pada 10 Cabang Olahraga	650 atlet berprestasi dengan cabornya	Atlet Berprestasi Usia 10-18	650 atlet	Rp. 3.077.600.000,00	Rp. 2.816.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
1.18.1.01.00.23.015	Peningkatan kompetisi Olahraga Daerah	Pendidikan	Diya Singsing Pendidikan Heningrat	DIY	Capaian Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga	30medali	1. Penyelenggaraan POPDA 2. Penyelenggaraan Tri Lomba Juang 3. Penyelenggaraan Harpereta 4. Penyelenggaraan LPT	1000 orang 1000 orang 3 cabor	Kompetensi Prestasi Olahraga Tingkat Daerah	8 jenis lomba	Rp. 3.706.262.000,00	Rp. 3.368.420.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Keterangan							
					Hasil Program		Keukuran Kegiatan				Hasil Kegiatan		SKPD	Jenis Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target						
1.1.16.101.00.23.016	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Olahraga Nasional	(3)	Daya Saing Olahraga Nasional Meningkat	DIY dan Luar DIY	30medali	30medali	1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Jasmmani 2. Pembinaan dan pengembangan Kontingen Senam Kebagatan Jasmmani 3. Pembinaan dan Pengembangan Kontingen POPWILPOPWAS 4. Pembinaan dan Pengembangan Kontingen Olahraga Sokabasi / PORTAMAS 5. Pembinaan dan Pengembangan Kontingen PEPARENAS	4 Cabor 1 Cabor 20 cabor 6 Cabor 5 Cabor	5 jenis lomba	10	11	(12)	(13)	(14)	(15)	Rp. 5.356.000.000,00 Rp. 6.195.400.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Salang Bojoran



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja										Jumlah Page : Rp. 110.329.940.640,00		Keterangan		
	Nomor	Uraian/Isi dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kelembagaan		Target	Hasil Kegiatan	Pagu Indikator	Pembinaan Madya	Jenis Kegiatan	
						Took Ukur	Target	Took Ukur	Target					Took Ukur	Target
1	1.02.1.02.01.00.01	Wajib													
1.02	KESEHATAN														
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan														
1.02.1.02.01.00.01	PROGRAM PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN														
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	a. 210 buah/dokumen ; b. 460 buah	a. 210 buah/dokumen ; b. 460 buah	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	0,18%	Rp. 7.685.000,00	Rp. 9.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan
1.02.1.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	a. 500 buah perangko untuk surat menyurat ; b. 300 buah surat menyurat ; c. 175 buah materi 6000 untuk surat menyurat ; d. 10 Benda cek	a. 500 buah perangko untuk surat menyurat ; b. 300 buah surat menyurat ; c. 175 buah materi 6000 untuk surat menyurat ; d. 10 Benda cek	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	17,77%	Rp. 756.670.000,00	Rp. 756.670.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan
1.02.1.02.01.00.01.004	Penyediaan Jasa Bantuan Pemeliharaan Kesehatan P.N.S	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	a. 18 unit pajak roda 4 ; b. 45 unit pajak roda 2 ; c. 1 KTR	a. 18 unit pajak roda 4 ; b. 45 unit pajak roda 2 ; c. 1 KTR	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	0,69%	Rp. 29.800.000,00	Rp. 45.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan
1.02.1.02.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	a. 3 unit pajak kendaraan roda 4 ; b. 3 unit pajak kendaraan roda 2	a. 3 unit pajak kendaraan roda 4 ; b. 3 unit pajak kendaraan roda 2	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	0,53%	Rp. 22.965.000,00	Rp. 22.965.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan
1.02.1.02.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keagamaan	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	a. 10 orang ; b. 2 orang ; c. 2 orang	a. 10 orang ; b. 2 orang ; c. 2 orang	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	2,26%	Rp. 95.220.000,00	Rp. 95.220.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan
1.02.1.02.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kesehatan Kantor	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	a. 2.750 m <sup>2</sup> taman b. 4,169 m <sup>2</sup> kaca c. 25.000 m <sup>2</sup> halaman d. 1.848 m <sup>2</sup> PAM h. 12 bulan kebutuhan pencuci LAR L. 12 bulan jasa pengolahan limbah	a. 2.750 m <sup>2</sup> taman b. 4,169 m <sup>2</sup> kaca c. 25.000 m <sup>2</sup> halaman d. 1.848 m <sup>2</sup> PAM h. 12 bulan kebutuhan pencuci LAR L. 12 bulan jasa pengolahan limbah	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	14,22%	Rp. 613.692.000,00	Rp. 613.692.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan
1.02.1.02.01.00.01.009	Penyediaan Jasa Perubahan Perilaku Kerja	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	a. 1 tahun refibus sampai b. 5100 m <sup>2</sup> keramik c. 760 m <sup>2</sup> kaca d. 1.848 m <sup>2</sup> PAM e. 12 bulan kebutuhan pencuci LAR f. 12 bulan jasa pengolahan limbah	a. 1 tahun refibus sampai b. 5100 m <sup>2</sup> keramik c. 760 m <sup>2</sup> kaca d. 1.848 m <sup>2</sup> PAM e. 12 bulan kebutuhan pencuci LAR f. 12 bulan jasa pengolahan limbah	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	0,93%	Rp. 40.235.000,00	Rp. 40.235.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktisannya	Keterangan	
					Tokok Ukur	Target	Hasil Kegiatan				SKPD	1/2/3
							Tokok Ukur	Target				
1.021.102.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	100%	Dinas Kesehatan DIY Peubahan	111 unit peubahan kerja diperbaiki	111.627.900,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.021.102.01.00.01.011	Penyediaan Barang Coklat Dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	100%	Balai Laboratorium Kesehatan : a. Ruang cekahan b. Ruang Penggandaan/ fotokopi	62 jenis ATK	105.032.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.021.102.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	100%	Dinas Kesehatan DIY : a. Ruang penggandaan/fotokopi	29 jenis barang cekahan a. 29 jenis barang cekahan b. 6250 lembar penggandaan	40.831.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.021.102.01.00.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	100%	Balai Laboratorium Kesehatan : a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.669.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.021.102.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	100%	Dinas Kesehatan DIY : peralatan rumah tangga	22 jenis peralatan rumah tangga	11.230.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.021.102.01.00.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	100%	Balai Laboratorium Kesehatan : a. surut kawat bahan buku b. buku kepastakaan/PTK	2. eksemplar surut kawat bahan buku b. 5 buah buku kepastakaan/PTK	24.300.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.021.102.01.00.01.017	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	100%	Dinas Kesehatan DIY : a. surut kawat/majalah b. buku perundang-undangan	3. eksemplar surut kawat/majalah b. 2 set buku perundang-undangan	27.500.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.021.102.01.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	100%	Balai Laboratorium Kesehatan : a. Peralatan logisic cold room b. Peralatan minum b. Kamar Rapat	30 btl botol genis	156.300.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.021.102.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Konstruksi dan Perawatan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualitas Kinerja Pemintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	100%	Dinas Kesehatan : a. Makan dan minum sedang	2656 orang	241.500.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Praktisannya Maju	Keterangan			
					Target	Tokok Ukur	Target	Tokok Ukur	Target	Tokok Ukur			Masa Kegiatan			
													(6)	(7)	(8)	(9)
1.021.102.01.00.01.024	Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemernah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Tewujudnya pelayanan yang memuaskan dan kinerja aparatur yang mendukung dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY : a. 12 bulan pegawai tidak tetap b. 12 bulan jaminan kesehatan c. 12 bulan jasa keamanan kantor	12 bulan pelayanan laboratorium	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	27,41 %	Rp. 1.183.200.000,00	Rp. 1.136.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bejalan
1.021.102.01.00.01.029	Pengelolaan Anasp Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemernah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Tewujudnya pelayanan yang memuaskan dan kinerja aparatur yang mendukung dan fungsi SKPD	100%	Balai Laboratorium Kesehatan : a. Filing Cabinet 4 laci b. Almiri Ansp c. Bole Ansp d. Map Gunung	a. 1 buah b. 1 buah c. 100 bh d. 100 bh	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	Rp. 202.225.400,00	Rp. 202.225.400,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bejalan
1.021.102.01.00.01.033	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pendukung	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemernah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Tewujudnya pelayanan yang memuaskan dan kinerja aparatur yang mendukung dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY : Pengelolaan Ansp SKPD	1 tahun	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	2,24%	Rp. 97.053.120,00	Rp. 97.053.120,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bejalan
<b>1.02.1.02.01.00.02</b>	<b>PRO GRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>											<b>Rp. 2.793.159.850,00</b>	<b>Rp. 2.598.310.600,00</b>			
1.021.102.01.00.02.003	Perbaikan/umum Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemernah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Mengalutnya sarana prasarana aparatur yang mendukung dan fungsi SKPD	100%	Balai Laboratorium Kesehatan : Pembangunan gedung 2 lantai	1 paket gedung 2 lantai	Kelengkapan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	43,05%	Rp. 1.425.188.600,00	Rp. 1.425.188.600,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bejalan
1.021.102.01.00.02.007	Perbaikan/umum Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemernah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Mengalutnya sarana prasarana aparatur yang mendukung dan fungsi SKPD	100%	Balai Laboratorium Kesehatan : Perengkapan gedung kantor	19 jenis perlengkapan gedung kantor	Kelengkapan sarana prasarana aparatur ( perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	15,12%	Rp. 500.668.000,00	Rp. 272.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bejalan
1.021.102.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Perbaikan Rutin/Perbaikan Dns/Operasional Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemernah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Mengalutnya sarana prasarana aparatur yang mendukung dan fungsi SKPD	100%	Dns Kesehatan DIY : a. Perbaikan ruang TB b. Perbaikan atap c. Perbaikan pintu e. Perbaikan tempat duduk	a. 5 buah lembaran b. 5 buah set-akab/fu/fitur c. 8 buah printer dan dot matrix d. 7 buah AC e. 1 paket sound system	Kelengkapan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	9,91%	Rp. 328.100.000,00	Rp. 328.100.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bejalan
1.021.102.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Perbaikan Rutin/Perbaikan Dns/Operasional Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemernah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Mengalutnya sarana prasarana aparatur yang mendukung dan fungsi SKPD	100%	Dns Kesehatan DIY : Gedung kantor terpelihara	1 paket pemeliharaan gedung kantor	Kelengkapan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	11,94%	Rp. 395.322.000,00	Rp. 395.322.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bejalan
1.021.102.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Perbaikan Rutin/Perbaikan Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemernah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Mengalutnya sarana prasarana aparatur yang mendukung dan fungsi SKPD	100%	Balai Laboratorium Kesehatan : Perengkapan gedung kantor terpelihara	7 jenis perlengkapan gedung terpelihara	Kelengkapan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	3,43%	Rp. 113.800.000,00	Rp. 96.700.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bejalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktekan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Target	Jenis Kegiatan
					Tokol Ukur (6)	TARGET (7)	Tokol Ukur (8)	TARGET (9)				
1.02.1.02.01.00.05.009	Pembelian Rutin/Berkala Meubelur dan dan brokasi	(3)	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	100%	Balai Laboratorium Kesehatan : a. Pemeliharaan kursi kerja b. Pemeliharaan meja kerja c. Pemeliharaan meja kerja	(8)	(9)	Rp. 30.141.250,00	Rp. 81.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sidang Bojolan
1.02.1.02.01.00.05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	(3)	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	100%	Dinas Kesehatan DIY : a. Pemeliharaan kursi c. Pemeliharaan lilang cabinet d. Pemeliharaan lemari pendingin e. Pemeliharaan papan nama dinas	(8)	(9)	Rp. 1.288.114.350,00	Rp. 1.316.205.545,00	Dinas Kesehatan	Sidang Bojolan
1.02.1.02.01.00.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	(3)	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	100%	Dokter Kalibrasi peralatan laboratorium petugas Balai Laboratorium Kesehatan Dokter Trainee Laboratorium kesehatan Mesaki bag petugas Balai Laboratorium Kesehatan Resepisien petugas peltahan PGCD (Perbaikan Perana Gawet Danurak) Seminar bag petugas Balai Laboratorium Kesehatan Workshop petugas Balai Laboratorium Kesehatan Penyaji tempat Perkuah perundang-undangan terbaru	(8)	(9)	Rp. 23.245.000,00	Rp. 25.569.500,00	Dinas Kesehatan	Sidang Bojolan
1.02.1.02.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	(3)	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	100%	1. Dokumen Angka Kredit Jabung 2. Peninjauan Bebanban Terbang Jabung 3. Kecepatan penilaian AK 4. Dokumen Rejeki TK	(8)	(9)	Rp. 27.766.950,00	Rp. 30.543.645,00	Dinas Kesehatan	Sidang Bojolan
1.02.1.02.01.00.05.019	Penyusunan Digital Admin Services (D G S)	(3)	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	100%	1. Integrasi sistem informasi kesehatan pada RS dan padkesmas Juknis aplikasi PPID 30 eks modul aplikasi PPID 130 eks modul Juknis kobort bayi modul Kobort bayi	(8)	(9)	Rp. 322.350.000,00	Rp. 322.350.000,00	Dinas Kesehatan	Sidang Bojolan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Rincian Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktisannya Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Kediraan Kegiatan				Tokok Ukur	Target	1/2/3	15
					Tokok Ukur	Target	Tokok Ukur	Target						
1.021.102.01.00.05.032	Peningkatan Kualitas S D M	Kinerja aparatur dan birokrasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	penambahan menu website	1 paket							
1.021.102.01.00.05.033	Pengembangan ISO	Kinerja aparatur dan birokrasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	perbaikan menu website	1 paket							
1.021.102.01.00.05.059	Pengembangan Perilaku Kesehatan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	analisis data kesehatan	1 buku hasil analisis data kesehatan							
1.021.102.01.00.05.060	Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	1. Peninjauan kembali hasil penelitian kesehatan 2. Dokumentasi keberhasilan	1 dokumen kompilasi hasil penelitian kesehatan 1 dokumen laporan sukses							
1.021.102.01.00.05.078	Sekelompok Kesehatan Berprestasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	1. Peninjauan kembali hasil penelitian kesehatan 2. Dokumentasi keberhasilan	1 dokumen kompilasi hasil penelitian kesehatan 1 dokumen laporan sukses							
1.021.102.01.00.06.010	PROGAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KESEHATAN DI DAERAH DAN MELUKAN	Kinerja aparatur dan birokrasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Hemat	Program 01-06	100%	1. Peninjauan kembali hasil penelitian kesehatan 2. Dokumentasi keberhasilan	1 dokumen kompilasi hasil penelitian kesehatan 1 dokumen laporan sukses							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD - Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagi : Rp. 110.329.940.640,00	Keterangan			
	Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Kedaraan Kegiatan			Pagu Indikatif	Praktisn Maju	Anis Kegiatan	
						Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur					Target
1.021.102.01.00.06.013	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.021.102.01.00.06.017															
1.021.102.01.00.19															
1.021.102.01.00.19.002															
1.021.102.01.00.19.009															

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**

Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD - Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja						Jumlah Pagu : Rp. 110.329.940.640,00		Keterangan				
	Hasil Program	Kolaborasi Kegiatan	Hasil Kegiatan	Praktikannya	Pagu Indikatif	Praktikannya	SKPD	Jenis Kegiatan	1/2/3	1/2/3			
Nomor	Uraian/ Rincian Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.20	1.02.1.02.01.00.20.010	Kelembutan	Hasrat Hidayat Masyarakat Hemat	Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman, II desa (Desa Ngali Paksi, Desa Karangasem, Desa Tawuhan Paotan, Sampalulu, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Gedongtengen, Desa Gunungjojo, Kecamatan Girimulyo Panggang, Kelurahan Kratik, Tegay	8,91%	1. buku peta situasi gizi 2. Pakage gizi rumah 3. Paket gizi rumah menggunakan aplikasi health mapper 3. Terbetuknya model pemberdayaan masyarakat dalam percepatan perbaikan gizi 4. Dokumen buku penanggulangan anemia remaja perempuan/masyarakat 5. Dokumen jenis PMT Ibu hamil KEK dan balita kurus 6. Kelembutan usaha penanggulangan permasalahan gizi dengan mitra kerja , Akademisi, dan Jejaring ASI Eksklusif	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.02.1.02.01.00.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI IMS/ARAKAT									Rp. 321.715.500,00	Rp. 284.000.000,00		
1.02.1.02.01.00.20.010	1.02.1.02.01.00.20.010	Kelembutan	Hasrat Hidayat Masyarakat Hemat	Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman, II desa (Desa Ngali Paksi, Desa Karangasem, Desa Tawuhan Paotan, Sampalulu, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Gedongtengen, Desa Gunungjojo, Kecamatan Girimulyo Panggang, Kelurahan Kratik, Tegay	8,91%	1. buku peta situasi gizi 2. Pakage gizi rumah 3. Paket gizi rumah menggunakan aplikasi health mapper 3. Terbetuknya model pemberdayaan masyarakat dalam percepatan perbaikan gizi 4. Dokumen buku penanggulangan anemia remaja perempuan/masyarakat 5. Dokumen jenis PMT Ibu hamil KEK dan balita kurus 6. Kelembutan usaha penanggulangan permasalahan gizi dengan mitra kerja , Akademisi, dan Jejaring ASI Eksklusif	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.02.1.02.01.00.21	1.02.1.02.01.00.21.027	Kelembutan	Hasrat Hidayat Masyarakat Hemat	DIY	100%	1. Terselenggaranya kegiatan Kabupaten/Kota Sehat di Kecamatan 2. Rencana usaha percapaian pelaksanaan STOP BABS tingkat prov di DIY 3. Jumlah TPM di Inspeksi Sanitasi dan dilakukan uji peick 4. Kabupaten/kota terseksi Sanitasi dan uji peick RS dan Puskesmas 5. Data uji peick kualitas air minum di Kecamatan Pandakerta 6. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.02.1.02.01.00.21.027	1.02.1.02.01.00.21.027	Kelembutan	Hasrat Hidayat Masyarakat Hemat	DIY	100%	1. Terselenggaranya kegiatan Kabupaten/Kota Sehat di Kecamatan 2. Rencana usaha percapaian pelaksanaan STOP BABS tingkat prov di DIY 3. Jumlah TPM di Inspeksi Sanitasi dan dilakukan uji peick 4. Kabupaten/kota terseksi Sanitasi dan uji peick RS dan Puskesmas 5. Data uji peick kualitas air minum di Kecamatan Pandakerta 6. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
										Rp. 917.775.000,00	Rp. 1.009.592.500,00		
										Rp. 321.715.500,00	Rp. 284.000.000,00		
										Rp. 321.715.500,00	Rp. 284.000.000,00		
										Rp. 917.775.000,00	Rp. 1.009.592.500,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Praktisannya Maju	Keterangan				
					Kedudukan Kegiatan		Misi Kegiatan							
					Hasil Program	Kedudukan Kegiatan					Tokol Ukur	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<p><b>PROGRAM PELAYANAN DASAR DAN RUJUKAN</b></p> <p>Upaya Kesehatan Dasar</p>											<p><b>Rp. 2.475.654.250,00</b></p>			
1.02.1.02.01.00-48		Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Hemipark	Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman	72,8%	72,8%	25 Puskesmas Terintegrasi Mula Mangajenen					Rp. 374.425.000,00	Dinas Kesehatan	Selada Bojolan
1.02.1.02.01.00-48.017		Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Hemipark	Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman	72,8%	72,8%	25 Puskesmas Terintegrasi Mula Mangajenen					Rp. 374.425.000,00	Dinas Kesehatan	Selada Bojolan
1.02.1.02.01.00-48.018	Upaya Kesehatan Rujukan	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Hemipark	DIY, Rumah Sakit di DIY	72,8%	72,8%	1. Jumlah RS yang mendapatkan pendampingan/pengakuan 2. Dokumen evaluasi sistem rujukan 3. Dokumen evaluasi SPQDT, Dokumen rancangan SPQDT di KP 4. Dokumen Monev BPRS, Draft Pergub BPRS	20 RS mendapat pendampingan	40 event penting dilayani kebutuhan masalah kesehatan masyarakat di DIY	40 event penting dilayani kebutuhan masalah kesehatan masyarakat di DIY	40%	Rp. 1.273.322.500,00	Dinas Kesehatan	Selada Bojolan
1.02.1.02.01.00-48.019	Upaya Kesehatan Khusus	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Hemipark	DIY	72,8%	72,8%	1. Jumlah orang terkoordinasikan dalam pelayanan kesehatan khusus 10. Jumlah THKD yang mendapat pembinaan 11. Dokumen hasil analisis/ studi/ penelitian/ tim sukses pemenuhan/peningkatan layanan terkoordinasi kesehatan akibat bencana 12. Tim Birtulan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana 13. SOP penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana 2. Dokumen instrumen pemantauan / data kesehatan khusus 3. Dokumen pengembangan REM di Sleman 4. monev Pergub tentang pasang 5. Dokumen hasil evaluasi TKUM 6. Jumlah layanan diperiksa kebugarannya 7. Jumlah THKD diperiksa kebugarannya	12 orang terkoordinasikan dalam pelayanan kesehatan khusus 30 orang THKD mendapat pembinaan 1 Dokumen hasil analisis/ studi/ penelitian/ tim sukses pemenuhan/peningkatan layanan terkoordinasi kesehatan akibat bencana 1 tim 1 Dokumen instrumen pemantauan / data kesehatan khusus 1 Dokumen pengembangan REM di Sleman 1 dokumen monev Pergub tentang pasang 1 Dokumen hasil evaluasi TKUM 20 orang layanan diperiksa kebugarannya 30 orang THKD diperiksa kebugarannya	77,41 %	77,41 %	Rp. 472.167.000,00	Dinas Kesehatan	Selada Bojolan	



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagi : Rp. 110.329.940.640,00	Keterangan	
	Hasil Program	Kolaborasi Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Praktikan Maju	SKPD	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3			Jenis Kegiatan
1	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1.02.1.02.01.00.48.020	<p>Usaha/Ridwan Uraian Pemerintahan Daerah /Kegiatan</p> <p>(2) Penyelenggaraan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan</p>	<p>Prioritas Daerah</p> <p>(3) Kesehatan</p>	<p>Sasaran Daerah</p> <p>(4) Harapan Hidup Masyarakat Meningkat</p>	<p>Lokasi</p> <p>(5) DIY, Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman, Mengkat</p>	<p>Hasil Program</p> <p>(6) Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu</p>	<p>Target</p> <p>(7) 72,8%</p>	<p>Took Ukur</p> <p>(8) 1. Jumlah orang mengikuti rapat koordinasi hajj 2. Dokumen hasil sosialisasi pelaksanaan ibadah hajj plus 3. Registrasi Nakes 4. Mutu Klinik meningkat 5. Mutu Laboratorium 6. Mutu poliklinik meningkat 7. Mutu Fasilitas Diakses 8. Kesepakatan peningkatan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan 9. Keopkakan, koordinasi pelaksanaan perizinan tenaga dan sarana kesehatan 10. Kapasitas Tenaga Kebidanan 11. Kapasitas Tenaga Keperawatan 12. Peningkatan Mutu Dokter Peserta Program Internep Dokter Indonesia melalui Evaluasi Pelaksanaan PDI 13. Kapasitas Dokter Besamping Program Internep Dokter Indonesia meningkat 14. Izin / Rekomendasi Izin Kesehatan sesuai kewenangan Dinas DIY 15. Keopkakan, koordinasi Penetapan Sarana Kesehatan Hematsea Calon TKJ, penyalur tenaga kesehatan, Penyulur Alat Kesehatan, Industri Farmasi, PKRT, 16. Mutu RS meningkat 17. Jenis sarana kesehatan 18. Izin / Rekomendasi Izin Kesehatan sesuai kewenangan Dinas DIY 19. Keopkakan, koordinasi Penetapan Sarana Kesehatan Hematsea Calon TKJ, penyalur tenaga kesehatan, Penyulur Alat Kesehatan, Industri Farmasi, PKRT, 20. Mutu RS meningkat 21. Data pelayanan penyandang disabilitas (J Amkes) tahun 2017 terakreditasi 22. Dokumen kesepakatan pengembangan kebijakan dan regulasi 23. Dokumen kesepakatan peningkatan pelayanan peserta Jamkesa DIY melalui perubahan tarif/pembiayaan 24. Masarakat mendapat sosialisasi Jamkesa DIY Melalui Media</p>	<p>Target</p> <p>(9) 30 orang mengikuti rapat koordinasi hajj 1. Dokumen hasil sosialisasi pelaksanaan ibadah hajj plus 12. Jaki tercapai kesehatan terintegrasi sesuai UU 36/ 2014 tgg Tenaga Kesehatan 13 Klinik &amp; Petugas Diakses DIY meningkat mutunya 13 Lab Klinik &amp; Petugas Diakses DIY meningkat mutunya 45 Prodi Institut Diakses meningkat mutunya 1. Kesepakatan peningkatan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan 1. Keopkakan, koordinasi pelaksanaan perizinan tenaga dan sarana kesehatan 35 srg Tenaga Kebidanan DIY meningkat kapasitasnya 35 srg Tenaga Keperawatan DIY meningkat kapasitasnya 220 dokter Peserta Program Internep 28 Lokasi meningkat mutunya 36 srg Dokter Besamping Program Internep Dokter Indonesia meningkat 11. Jenis sarana kesehatan 18. Izin / Rekomendasi Izin Kesehatan sesuai kewenangan Dinas DIY 19. Keopkakan, koordinasi Penetapan Sarana Kesehatan Hematsea Calon TKJ, penyalur tenaga kesehatan, Penyulur Alat Kesehatan, Industri Farmasi, PKRT, 20. Mutu RS meningkat 21. Data pelayanan penyandang disabilitas (J Amkes) tahun 2017 terakreditasi 22. Dokumen kesepakatan pengembangan kebijakan dan regulasi 23. Dokumen kesepakatan peningkatan pelayanan peserta Jamkesa DIY melalui perubahan tarif/pembiayaan 24. Masarakat mendapat sosialisasi Jamkesa DIY Melalui Media</p>	<p>Target</p> <p>(10) 100%</p> <p>85%</p> <p>85%</p>	<p>Pagu Indikatif</p> <p>(12) Rp. 463.329.750,00</p>	<p>Praktikan Maju</p> <p>(13) Rp. 479.080.080,00</p>	<p>SKPD</p> <p>(14) Dinas Kesehatan</p>	<p>1/2/3</p> <p>(15) Sediaan Kesehatan</p>
1.02.1.02.01.00.49	<p>Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Keasahan Pada B L U D Bapd Jamkesos</p>	<p>Kesehatan</p>	<p>Harapan Hidup Masyarakat Meningkat</p>	<p>DIY</p>	<p>Persentase mutu pelayanan kesehatan yang bermutu BapdJamkesos</p>	<p>94,95 (%)</p>	<p>Terlaksananya pembayahan : (1) Transisi PBI BPJS; (2) Buffer BPJS; (3) Komplemen suplemen JKN meliputi kader pembangunan, PBI, PPH, Gerta, ANCS, Jamkes Rehabilitatif (Hemecare katstrofik</p>	<p>Kegiatan manajemen di Bapd Jamkesos lancar</p>	<p>Rp. 69.853.599.800,00</p>	<p>Rp. 75.947.133.050,00</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Sediaan Kesehatan</p>	
1.02.1.02.01.00.49.001	<p>Pelayanan Kesehatan pada BLUD</p>	<p>Kesehatan</p>	<p>Harapan Hidup Masyarakat Meningkat</p>	<p>DIY</p>	<p>Persentase mutu pelayanan kesehatan yang bermutu BapdJamkesos</p>	<p>91%</p>	<p>Meningkatnya persentase mutu pelayanan di Bapd Jamkesos</p>	<p>100%</p>	<p>Rp. 69.853.599.800,00</p>	<p>Rp. 75.947.133.050,00</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Sediaan Kesehatan</p>	



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Kebijakan Kegiatan			Pagu Indikatif	Praktisitas Maju	Keterangan		
					Tokol Ukur	Target	Tingkat	Tokol Ukur	Target	Tingkat			SKPD	1/2/3	1/2/3
1.021.02.01.00.59.001	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA BLOOD BAWA</b> Pelayanan Kesehatan pada BLOOD	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan	DIY	87%	(1) Tersedianya media pemasangan majalah, media elektronik 2) 1 foto pertemuan pemasangan tidak 3) 5 kali kunjungan pemasangan tidak terlanjut 4) tersedianya kegiatan pelayanan kesehatan dan DVI (4) tersedianya paket kampanye di klinik	30 orang petugas RR dan rekam medis terlatih	30 orang petugas RR dan rekam medis terlatih	100%	Kebutuhan obat dan BHP untuk pelayanan pasien terpenuhi	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Stading Bejalan	
1.021.02.01.00.59.011	<b>PENGADAN, PENGALIHAN, PERALIHAN, SARANA DAN PRASARANA RS/RW PARU-PARU/RS MATA</b> Pengalihan (Bali) Laboratorium Kesehatan	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan	Yogyakarta (Bali) Laboratorium Kesehatan)	90%	Penyakit berat Kimia dan alat baru Laboratorium	Jumlah Tenaga Kesehatan terlatih PONEK	15 orang tenaga kesehatan terlatih	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	Rp. 13.158.601.740,00				
1.021.02.01.00.59.016	<b>Pengalihan (Bali) Laboratorium Kesehatan</b> Pengalihan Rumah Sakit Yogyakarta	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan	Yogyakarta (Bali) Laboratorium Kesehatan)	90%	Alat-Alat Laboratorium Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan terlatih Sanitasi Klinik	25 orang tenaga kesehatan terlatih	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	Rp. 2.426.881.000,00			Dinas Kesehatan	Sedang
1.021.02.01.00.59.016	<b>Pengalihan (Bali) Laboratorium Kesehatan</b> Pengalihan Rumah Sakit Yogyakarta	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan	Yogyakarta (Bali) Laboratorium Kesehatan)	90%	Alat-Alat Laboratorium Kesehatan	Kendaraan dan kendaraan terlatih moda 2) dan moda 4	4 mobil 2 ambulans, 2 mobil bus dan 2 kendaraan roda dua terlatih	100%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	Rp. 5.614.481.000,00				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja											Jumlah Pagu : Rp. 110.329.940.640,00				
	Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keduaoran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Praktekan Maju	Keterangan		
						Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target			1/2/3	1/2/3	
1.02.1.02.01.00.59.019	Perimbangan Balai Laboratorium Kesehatan (Pajak Rokok)	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY (Balai Laboratorium Kesehatan)	(5)	90%	90%	a. Pemasangan Mutu Internal Mikrobiologi	6.225 Lab	Penyediaan pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan	3,13%	Rp. 230.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan	
1.02.1.02.01.00.59.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Kesehatan	Harapan Masyarakat Meningkat	Yogyakarta (Balai Laboratorium Kesehatan)		90%	90%	b. Herpakan Intensitas Listrik, c. Tambah Daya Listrik	b. paket	Hasil pemeliharaan alat	3,78%	Rp. 275.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan	
1.02.1.02.01.00.59.027	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan Percebaan	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Yogyakarta (Balai Laboratorium Kesehatan)		90%	90%	d. Pemeliharaan hewan percobaan	12 ekor	Hewan percobaan siap pakai	0,43%	Rp. 32.600.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan	
<b>1.02.1.02.01.00.61</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN PERSALINAN KESEHATAN, DAN MAKANAN</b>											<b>Rp. 2.027.857.400,00</b>				
1.02.1.02.01.00.61.001	Peningkatan Mutu Pelayanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Nutrisi	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY		71,9%	71,9%	1. Jumlah Puskemas dan RS yang Mengingat Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan RS	20 Puskesmas dan 10 RS	Parasetas fasilitas pelayanan kesehatan pemenuhan standar pelayanan farmasi	24,49%	Rp. 1.092.075.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan	
<b>1.02.1.02.01.00.62</b>	<b>PROGRAM PENGINGIHAN DAN PENYUKUN PENYAKIT</b>											<b>Rp. 3.345.865.000,00</b>				
1.02.1.02.01.00.62.001	Peningkatan Imunisasi	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY		100%	100%	2. Daftar Kebutuhan Obat Prov dan Kab/Kota	1 Dokumen	Parasetas ketesediaan obat esensial dan mutu yang produk dan standar pelayanan dan perbekas dan makanan	47,47%	Rp. 217.947.700,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan	
								3. Obat dan Perbekas Bufferstock DIY	1 Paket				Rp. 239.522.470,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan
								4. Pemasangan Saringan dan Pengimplementasian Cara Produksi dan Distribusi yang Baik	30% Saringan yang mengimplementasikan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik				Rp. 4.167.246.600,00			
								5. sekoah yang melaksanakan pengawasan panan mandiri,	1 tahun sekoah yang melaksanakan pengawasan panan mandiri,							
								1. Jumlah yang mematuhi SOP pemantauan vaksin dan pemberian imunisasi	60 yang mematuhi SOP pemantauan vaksin dan pemberian imunisasi	Duta UPTD yang melaksanakan SOP	100%	Rp. 217.947.700,00	Dinas Kesehatan	Sedang	Bojolan	
								10. Rekomendasi strategi peningkatan cakupan BIAS	1 Rekomendasi strategi peningkatan cakupan BIAS	10. Cakupan imunisasi Polio > 95%	100%					
								11. Strategi Pelaksanaan BIAS	1 rekomendasi Strategi Pelaksanaan BIAS	11. Cakupan imunisasi Polio > 95%	100%					
								12. Dokumen hasil BIAS dan permasalahan BIAS	1 Dokumen hasil BIAS dan permasalahan BIAS	2. Data kasus KIPDI di DIY	100%					
								13. Dokumen hasil advokasi kampanye imunisasi poli	1 Dokumen hasil advokasi kampanye imunisasi poli	3. Mengikuti yang cakupan imunisasi di daerah perobahan imunisasi	Desa UCI 100%					
								14. Dokumen hasil advokasi kampanye imunisasi poli	5 Dokumen hasil advokasi kampanye imunisasi poli	4. Laporan imunisasi mencapai target ULL > 90 % dan tepat waktu	100%					
								15. Laporan hasil sweeping imunisasi dasar	1 Laporan hasil sweeping imunisasi dasar	5. Cakupan imunisasi di desa/kabupaten imunisasi meningkat	100%					
								16. Laporan hasil imunisasi poli	2 Laporan hasil imunisasi poli	6. Laporan tim sukses tepat menggapai dan valid	100%					

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan	Nomor	Uraian /Rencana Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktisannya Maju	Keterangan		
						Hasil Program	Kolaborasi Kegiatan	Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan			SKPD	1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.021.1.02.01.00.62.003	SKO dan Perangsalungan KLB	Kesehatan Masyarakat Masyarakat	Kesehatan Masyarakat Masyarakat	DIY	DIY	100%	<p>17. Dokumen hasil evaluasi kampanye imunisasi campak</p> <p>18. Laporan hasil pelaksanaan imunisasi dasar</p> <p>3. Rapih hasil KLB Kasus KIPF</p> <p>4. Kasus KIPF teraudit b.</p> <p>5. Petugas kesehatan memahami KIPF</p> <p>3. Rekomendasi strategi penanganan daerah konting penindakan imunisasi</p> <p>4. Laporan hasil imunisasi tepat waktu dan valid</p> <p>5. Laporan hasil cakupan imunisasi valid</p> <p>6. Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam meningkatkan informasi tentang imunisasi</p> <p>7. Rekomendasi strategi peningkatan kepatuhan laporan dan validitas data imunisasi</p> <p>8. Jumlah orang terkosialisasi vaksin baru</p> <p>9. Dikebutkannya akurasi pelaporan data dan kualitas pengelolaan program</p>	<p>9) Dokumen hasil evaluasi kampanye imunisasi campak</p> <p>2) Laporan hasil pelaksanaan imunisasi dasar</p> <p>a. 25 kasus KIPF teraudit b. 1) Laporan</p> <p>5) Rekomendasi strategi penanganan daerah konting penindakan imunisasi</p> <p>4) Laporan hasil imunisasi tepat waktu dan valid</p> <p>3) Laporan hasil cakupan imunisasi valid</p> <p>1) Rekomendasi strategi pencapaian UCI desa</p> <p>3) Rapis hasil KLB kasus KIPF</p> <p>2) Rekomendasi strategi peningkatan kepatuhan laporan dan validitas data imunisasi</p> <p>200 orang terkosialisasi vaksin baru</p> <p>1) Laporan hasil seminar keakuratan laporan</p> <p>a. 1) laporan kinerja surveilans AFP b. 1) laporan kinerja surveilans campak c. 1) laporan kinerja penyakit PDDI lainnya</p>	<p>7) Mewakili terumudasi dengan vaksin baru</p> <p>8. Simpanan akurasi data &lt; 5 %</p> <p>9. Cakupan bias &gt; 98%</p>	<p>1) Laporan kinerja surveilans AFP b. 1) laporan kinerja surveilans campak c. 1) laporan kinerja penyakit PDDI lainnya</p> <p>4) RLT</p> <p>2) laporan Data penyakit despon</p> <p>4) laporan hasil pelaksanaan surveilans terpadu penyakit terpadu penyakit</p> <p>3) Rekomendasi hasil perangsalungan KLB</p> <p>1) Rekomendasi kewaspadaan terhadap kasus CRS di DIY</p> <p>2) Rekomendasi upaya KLB dapat terdeteksi sedini mungkin</p> <p>2) Rekomendasi Pelaksanaan Surveilans Hepatitis di DIY</p> <p>2) Rekomendasi Pelaksanaan Surveilans Influenza</p> <p>3) Rekomendasi upaya Peningkatan peran puskesmas, Swasta dalam penemuan kasus campak</p> <p>4) laporan data kasus Campak yang valid</p> <p>5) valid</p> <p>150 orang Terkosialisasi sistem pelaporan Data penyakit perumudasi KLB di DIY</p>	<p>Rp. 232.377.500,00</p> <p>Rp. 255.615.250,00</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Sidang Bejalan</p>		
1.021.1.02.01.00.62.005	Perencanaan penyakit Demam Berdarah Dengue	Kesehatan Masyarakat Masyarakat	Kesehatan Masyarakat Masyarakat	DIY, Desa, endemic di Wilayah DIY	DIY	100%	<p>1) Rekomendasi strategi pengendalian DBD</p>	<p>1) rekomendasi strategi pengendalian DBD</p>	<p>Case Fatality Rate DBD</p> <p>0,8%</p>	<p>Rp. 311.400.000,00</p>	<p>Rp. 163.818.600,00</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Sidang Bejalan</p>		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja										Keterangan				
	Indikator Kinerja	Hasil Program	Kolaborasi Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Praktikan Maju	SKPD	Jenis Kegiatan	1/2/3	1/2/3					
Nomor	Uraian/Fieldas Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Target (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)	Target (11)	(13)	(14)	(15)		
1.02.1.02.01.00.62.006	Pengobatan Penyakit Fluora	Kesehatan	Hidupan Hidup Masyarakat Hemangat	DIY	100%	1. target kesediaan kabin/ota dan tugas melaksanakan strategi pengendalian program malaria terbaru	1. target kesediaan kabin/ota dan tugas melaksanakan strategi pengendalian program malaria terbaru	1. target kesediaan kabin/ota dan tugas melaksanakan strategi pengendalian program malaria terbaru	1. target kesediaan kabin/ota dan tugas melaksanakan strategi pengendalian program malaria terbaru	1. target kesediaan kabin/ota dan tugas melaksanakan strategi pengendalian program malaria terbaru	Rp. 332.970.000,00	Dinas Kesehatan	Seding Bojolan		
1.02.1.02.01.00.62.007	Perencanaan dan Peningkatan Penyakit HIV/AIDS	Kesehatan	Hidupan Hidup Masyarakat Hemangat	DIY	100%	1. Jumlah kasus pemeriksaan HIV 2. Jenis Reagenia Program HIV : reagen HIV 1, reagen HIV 2, 8 CD4, kontrol CD4 3. Jenis BHP pemeriksaan HIV: tabung, jarum, plaster, alkohol swab 4. rekomendasi pemantauan strategi kegiatan program HIV 5. Jumlah konselor HIV terlatih 6. Jumlah petugas RR dan relem modis terlatih	1. Jumlah kasus pemeriksaan HIV 2. Jenis Reagenia Program HIV : reagen HIV 1, reagen HIV 2, 8 CD4, kontrol CD4 3. Jenis BHP pemeriksaan HIV: tabung, jarum, plaster, alkohol swab 4. rekomendasi pemantauan strategi kegiatan program HIV 5. Jumlah konselor HIV terlatih 6. Jumlah petugas RR dan relem modis terlatih	1. Jumlah kasus pemeriksaan HIV 2. Jenis Reagenia Program HIV : reagen HIV 1, reagen HIV 2, 8 CD4, kontrol CD4 3. Jenis BHP pemeriksaan HIV: tabung, jarum, plaster, alkohol swab 4. rekomendasi pemantauan strategi kegiatan program HIV 5. Jumlah konselor HIV terlatih 6. Jumlah petugas RR dan relem modis terlatih	1. Jumlah kasus pemeriksaan HIV 2. Jenis Reagenia Program HIV : reagen HIV 1, reagen HIV 2, 8 CD4, kontrol CD4 3. Jenis BHP pemeriksaan HIV: tabung, jarum, plaster, alkohol swab 4. rekomendasi pemantauan strategi kegiatan program HIV 5. Jumlah konselor HIV terlatih 6. Jumlah petugas RR dan relem modis terlatih	1. Jumlah kasus pemeriksaan HIV 2. Jenis Reagenia Program HIV : reagen HIV 1, reagen HIV 2, 8 CD4, kontrol CD4 3. Jenis BHP pemeriksaan HIV: tabung, jarum, plaster, alkohol swab 4. rekomendasi pemantauan strategi kegiatan program HIV 5. Jumlah konselor HIV terlatih 6. Jumlah petugas RR dan relem modis terlatih	1. Jumlah kasus pemeriksaan HIV 2. Jenis Reagenia Program HIV : reagen HIV 1, reagen HIV 2, 8 CD4, kontrol CD4 3. Jenis BHP pemeriksaan HIV: tabung, jarum, plaster, alkohol swab 4. rekomendasi pemantauan strategi kegiatan program HIV 5. Jumlah konselor HIV terlatih 6. Jumlah petugas RR dan relem modis terlatih	Rp. 1.151.200.000,00	Rp. 1.315.500.000,00	Dinas Kesehatan	Seding Bojolan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktisn Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Kediraan Kegiatan				Misi Kegiatan	Jenis Kegiatan
					Tokol Ukur (6)	Tarqet (7)	Tokol Ukur (8)	Tarqet (9)				
1.02.1.02.01.00.62.008	Pengendalian Penyakit TB	Kesehatan	Hidupan Hdp Masyarakat Hemngkat	DIY	<p>Perentase jumlah desa/ kelurahan yang memiliki posbidu (pos penunbu untuk akses dln penyakit teak menular)</p> <p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>1. Jumlah orang mendapatkan informasi program TB terbaru</p> <p>1 kali</p>	<p>25 orang mendapatkan informasi program TB terbaru</p>	Rp. 373.598.000,00	Rp. 133	Dinas Kesehatan	1/2/3 (14) (15)
1.02.1.02.01.00.62.009	Pengendalian Penyakit Zoonosis	Kesehatan	Hidupan Hdp Masyarakat Hemngkat	DIY	<p>Perentase jumlah desa/ kelurahan yang memiliki posbidu (pos penunbu untuk akses dln penyakit teak menular)</p> <p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>1. orang mendapat informasi hasil survey PES</p> <p>2. desa/ kelurahan survey PES</p> <p>3. Rekomendasi tabakana kas zoonosis</p> <p>4. Jumlah responden PES yang tersedia</p> <p>5. Jumlah RDT teropona yang tersedia</p> <p>6. Jumlah Vaksin Anti Rabies yang tersedia</p> <p>7. Jumlah Adjuvangan PES yang tersedia</p> <p>8. Rekomendasi delesi dln kanker leher rahn dan kanker payudara,</p>	<p>50 orang (Perangket Dies, Camet) mendapat informasi hasil survey PES</p> <p>4 desa/ Kelurahan, Kelurahan Ler Pusmabing, Suni dilaksanakan survey PES</p> <p>2 rekomendasi Rekomendasi tabakana kas zoonosis</p> <p>1 ket reagen PES</p> <p>45 ket RDT</p> <p>588 vial vaksin anti rabies yang tersedia</p> <p>863 buah adjuvangan PES (penyakit Mlu, utngan blus, bus back neode (jram), bus back tabak (tabung)</p>	Rp. 261.410.000,00	Rp. 466.691.000,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.00.62.010	Pengendalian Penyakit Kanker	Kesehatan	Hidupan Hdp Masyarakat Hemngkat	DIY	<p>Perentase jumlah desa/ kelurahan yang memiliki posbidu (pos penunbu untuk akses dln penyakit teak menular)</p> <p>100%</p>	<p>61,15%</p>	<p>1. Rekomendasi delesi dln kanker leher rahn dan kanker payudara,</p> <p>2. Rekomendasi layanan IMS dan IVA CBE</p> <p>3. Rekomendasi penabakana kanker palatif Indonesia</p> <p>1 kali</p> <p>50 petugas kesehatan FKTP (bidan dan dokter) mendapatkan pengetahuan surveilans PTM</p> <p>Rekomendasi penemuan dln kanker pada anak</p> <p>Rekomendasi Standarisasi Pengendalian Kanker Serviks</p> <p>2. Rekomendasi program kegiatan untuk penguatan pengendalian dan pencegahan PTM</p>	<p>1. Rekomendasi delesi dln kanker leher rahn dan kanker payudara,</p> <p>1. Rekomendasi layanan IMS dan IVA CBE</p> <p>1. Rekomendasi penabakana kanker palatif</p> <p>1 kali</p> <p>50 petugas kesehatan FKTP (bidan dan dokter) mendapatkan pengetahuan surveilans PTM</p> <p>1. Rekomendasi penemuan dln kanker pada anak</p> <p>1. Rekomendasi Standarisasi Pengendalian Kanker Serviks</p>	Rp. 196.314.800,00	Rp. 372.437.780,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.00.62.011	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PAD) dan Diabetes	Kesehatan	Hidupan Hdp Masyarakat Hemngkat	DIY	<p>Perentase jumlah desa/ kelurahan yang memiliki posbidu (pos penunbu untuk akses dln penyakit teak menular)</p> <p>100%</p>	<p>74%</p>	<p>2. Rekomendasi program kegiatan untuk penguatan pengendalian dan pencegahan PTM</p>	<p>2. Rekomendasi program kegiatan untuk penguatan pengendalian dan pencegahan PTM</p>	Rp. 115.280.000,00	Rp. 126.898.000,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Keterangan				
					Kedanaan Kegiatan					Jumlah Pagi : Rp. 110.329.940.640,00	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program	Hasil Kegiatan	Target					SKPD	1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						perbaikan tempo untuk akses di sini penyakit tidak menular)								
						Rekomendasi monitoring dan evaluasi pasca kejadian pada kasus yang menduga peningkatan kapasitas Puskesmas PJPD DM								
						Rekomendasi persiapan pelayanan pembetulan Puskesmas sentinel PJPD DM								
						Tinjau kesehatan mendapat peningkatan kapasitas untuk Puskesmas sentinel PJPD DM								
<b>1.02.1.02.01.00.63</b>	<b>PROGRAM PERSIAPAN KEMERDEKAAN KESEHATAN KELUARGA</b>										<b>Rp. 886.548.150,00</b>			
1.02.1.02.01.00.63.001	Pembinaan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	99,5%	Penentase cakupan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	Dokumen data kesehatan lansia	5 dokumen data kesehatan lansia	Perentase Puskesmas Survei Lansia (PSL) 83,47%	100%	Rp. 156.887.750,00	Dinas Kesehatan	Sedang	
							Dokumen tentang Puskesmas Sentinel Lansia (PSL) di DIY	3 dokumen tentang PSL						
							Rekomendasi tentang pelayanan lansia terpadu di DIY	1 rekomendasi tentang pelayanan lansia terpadu						
							Rekomendasi tentang program kesehatan lansia	15 rekomendasi tentang program kesehatan lansia						
1.02.1.02.01.00.63.002	Pembinaan Kesehatan Ibu	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY, Puskesmas, RS, PPS	99,5%	Penentase cakupan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	Buku saku untuk calon pengantin, lembar balik KIA, Lembar No.27 dan/atau 2014	5300 aks buku saku, 150 aks lembar balik, 150 aks buku Permenkes	Perentase persalinan di Rumah Sehat 100%	100%	Rp. 434.432.400,00	Dinas Kesehatan	Sedang	
							Rekomendasi tentang implementasi ANC terpadu	29 rekomendasi tentang implementasi ANC terpadu						
							Rekomendasi tentang manajemen KB	3 rekomendasi tentang manajemen KB						
							Rekomendasi tentang software kearah	5 rekomendasi tentang software kearah						
1.02.1.02.01.00.63.003	Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	99,5%	Penentase cakupan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	Artikel kesehatan untuk remaja	203 artikel kesehatan remaja	Perentase Puskesmas yang kesehatan remaja 62,91%	100%	Rp. 194.925.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	
							Dokumen perencanaan & evaluasi pelaksanaan buku rapor kesehatan	1 dokumen perencanaan & evaluasi pelaksanaan buku rapor kesehatan						
							Rekomendasi tentang implementasi SN PKR.H.DIY	7 rekomendasi tentang implementasi SN PKR						
							Rekomendasi tentang rencana	5 rekomendasi tentang rencana						
							Rekomendasi tentang pelaksanaan penjangkauan kesehatan	1 rekomendasi tentang pelaksanaan penjangkauan kesehatan						
1.02.1.02.01.00.63.004	Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY, 5 lokasi Keterpaduan Kesehatan (KPK), Puskesmas dan RSUD Ngab/ncb	99,5%	Penentase cakupan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	Rekomendasi tentang Keterpaduan SIDI/DK	11 rekomendasi tentang keterpaduan SIDI/DK	11 rekomendasi tentang keterpaduan SIDI/DK	11	Rp. 100.303.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang	
							Rekomendasi tentang manajemen afdes/BBLR	2 rekomendasi tentang manajemen afdes/BBLR						
							Rekomendasi tentang pelaksanaan MTBS	3 rekomendasi tentang pelaksanaan MTBS						



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan				SYPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.02	<b>KESEHATAN</b>														
1.02.1.02.02.00	Rumah Sakit Jiwa Gihasa														
1.02.1.02.02.00.54	<b>PROGRAM PENGINGKATAN PELAYANAN RESERVASI PADA RSUD GIBASA</b>														
1.02.1.02.02.00.54.001	Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Peningkat	Pakem	Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	100 Orang	Bed Occupancy Rate (BOR) Kurang dari 5 menit	64%	Mengikuti proses base penanganan gangguan Jira Borel di DIT	Rp. 20.471.741.000,00	Rp. 21.342.840.000,00				
							Emergency Response Time Rate Kurang dari 5 menit	84%	Penerbitan penanganan pasang di DTY	Rp. 20.471.741.000,00					
							Kecapaian Pelayanan resep Obat Jera kurang dari 30 menit	88%							
							Kepuasan Pelanggan	85%							
							Length Of Stay (LOS)	42							
							Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	105 pasien/hari							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Rumah Sakit Panti Respiro		Jumlah Pagu : Rp. 12.878.449.600,00																		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indefinitif	Praktikan Maju	Keterangan										
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			SKPD	Jenis Kegiatan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Tolok Ukur	Target	(7)	Tolok Ukur	(8)	Target	(9)	Tolok Ukur	(10)	Target	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib																			
L02	KESEHATAN																			
1.02.1.02.03.00	Rumah Sakit Panti Respiro																			
1.02.1.02.03.00.60	PROGRAM PENGINGATAN PELAYANAN RESPIRASI PADA EJUD ISIR RESPIRA																			
1.02.1.02.03.00.60.001	Pelayanan Kesehatan Pada BLD	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Bantu Pelaksanaan	Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	1000orang	2 paket 7 jenis, 70 orang, 1 dokumen	Dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan prasyarat pagu	Obat-obatan dan Reagen, Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan, Bahan Kesehatan, Surveilans Akreditasi Rumah Sakit	100%	Rp. 12.878.449.600,00	Rp. 14.156.000.000,00	Rumah Sakit Panti Respiro	Sedang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan / Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saarman Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Masa Kegiatan	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				SKPD	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.03	<b>PEKERJAAN UMUM</b>													
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM													
1.03.1.03.01.00.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASITRANSKRIPSI</b>													
1.03.1.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jenis	100%	pengiriman dokumen	20 dokumen	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	0.39 %	Rp. 22.200.000,00	Rp. 22.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumber Daya Air Dan Listrik	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	Surat masuk	650 surat	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	35.48 %	Rp. 2.006.600.000,00	Rp. 2.006.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	Pembayaran bagian rekening air	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran		Rp. 81.787.200,00	Rp. 81.787.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	Pembayaran bagian rekening listrik	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran		Rp. 255.260.250,00	Rp. 255.260.250,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	Bukti pembayaran	756 db	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	4.51 %	Rp. 735.000.000,00	Rp. 735.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	pembayaran kantor	14.310 ml	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	13,00 %	Rp. 315.000.000,00	Rp. 315.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.010	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	Perbaikan/pemeliharaan peralatan kantor	8 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	5,57 %	Rp. 197.500.000,00	Rp. 197.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.011	Penyediaan Barang Coklat Dan Penggandaan	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	Akt Tulis Kantor	1 Paket, 55 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	3,49 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	Barang coklat	18 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	3,09 %	Rp. 134.500.000,00	Rp. 134.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	Penggandaan(perjilid)	100.000 lembar	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	0,27 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perendang Urugan	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	2,38 %	Rp. 26.100.000,00	Rp. 26.100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang
1.03.1.03.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	100%	100%	alat rumah tangga	5 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	0,46 %	Rp. 147.900.000,00	Rp. 147.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Indikator Kinerja										Keterangan					
	Nomor	Unsur (Bidang Urusan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan)	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Kelembagaan			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju		Jumlah Pagu : Rp. 46.059.217.450,00	
						Tolok Ukur	Target	Tingkat	Tolok Ukur	Target	Tingkat		(13)	(14)		(15)
1.03.1.03.01.00.01.018	Repat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Kontribusi dan koordinasi ke luar daerah	100%	12 bulan	10,17 %	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 750.000.000,00	Rp. 715.000.000,00	ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	ESDM
1.03.1.03.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Keamanan sarana administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	9 gedung	10,17 %	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 675.000.000,00	Rp. 575.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.01.029	Pengelolaan Asap Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Asap dinamis yang dikelola	100%	10000 asap	1,77 %	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 200.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.01.033	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pendukung	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Jumlah tenaga pendukung	100%	1 Paket	1,33 %	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
<b>1.03.1.03.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>									<b>Rp. 12.229.870.000,00</b>	<b>Rp. 12.229.870.000,00</b>					
1.03.1.03.01.00.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Pengadaan Kendaraan	100%	4 Unit	8,18 %	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	100%	8 jenis	10,05 %	Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	Rp. 1.230.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.02.009	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Jenis perbaikan gedung kantor yang disediakan	100%	11 jenis	10,38 %	Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( perbaikan perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	Rp. 1.270.000.000,00	Rp. 1.270.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.02.010	Pengadaan Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Jenis meubeler yang disediakan	100%	6 jenis	10,06 %	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (meubeler) terpenuhi	Rp. 1.230.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.02.011	D E D Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Penyusunan DEP Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	1 Paket	3,27 %	Kebutuhan prasarana aparatur (DEP pembangunan gedung) terpenuhi	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin	100%	8 Gedung	4,95 %	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	Rp. 605.000.000,00	Rp. 605.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	126 unit	39,09 %	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	Rp. 4.780.370.000,00	Rp. 4.780.370.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Jumlah meubeler yang dipelihara	100%	4 Jenis	0,46 %	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (meubeler) terpenuhi	Rp. 52.000.000,00	Rp. 52.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.02.038	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Terpeliharanya tanaman di lingkungan DIPA/ESDM dan fungsi SKPD	100%	1 paket	0,51 %	Kebutuhan Pemeliharaan Tanaman lingkungan kantor terpenuhi	Rp. 62.500.000,00	Rp. 62.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
1.03.1.03.01.00.02.042	Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemernah Daerah	Jenis	Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	2 Unit	11,86%	Kebutuhan rehabilitasi prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	Rp. 1.450.000.000,00	Rp. 1.450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
							4 Kantor Pengingat									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Nomor	Uraian / Bidang Urusan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saataan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Metemangan		
						Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.021.1.03.01.00.02.0146		Pengelolaan Naskah Dinas	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	Mengoptimalkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengelolaan naskah dinas	1000 naskah dinas	1,23 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sidang Berjalan
1.021.1.03.01.00.06		<b>PROGRAM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEJANGAN</b>									Rp. 605.000.000,00	Rp. 605.000.000,00		
1.021.1.03.01.00.06.016		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	Tertujuhnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Laporan	2,48 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sidang Berjalan
1.021.1.03.01.00.06.017		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	Tertujuhnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	26,12 %	Rp. 158.000.000,00	Rp. 158.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sidang Berjalan
1.021.1.03.01.00.06.018		Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengambilan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	Tertujuhnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	ROPK, ROPK, RKA, RPA, Sistem Informasi	5 Dokumen	54,55 %	Rp. 330.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sidang Berjalan
1.021.1.03.01.00.06.019		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis	Tertujuhnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	16,86 %	Rp. 102.000.000,00	Rp. 102.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sidang Berjalan
1.021.1.03.01.00.25		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOMPOKAN AIR BAKU</b>									Rp. 7.000.000.000,00	Rp. 7.000.000.000,00		
1.021.1.03.01.00.25.011		Pembangunan Pengaliran Air Baku	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Kemampuan Antar Wilayah Menurun	Dekop	Pengaliran penyediaan debit air baku	2100/detik	1. Terlaksananya Pengamanan dan Pengendalian Sumber Daya Air	4 kali / 1 kota	6,83 %	Rp. 5.500.000.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sidang Berjalan
1.021.1.03.01.00.25.012		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Konsumsi Sungai	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Kemampuan Antar Wilayah Menurun	Dekop	Pengaliran penyediaan debit air baku	2100/detik	2. Terlaksananya Identifikasi Kondisi Sungai dan Perairan Embung/Tempa	1 dokumen		Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sidang Berjalan
1.021.1.03.01.00.32		<b>PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUDIAN</b>									Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00		
1.021.1.03.01.00.32.004		Pelayanan Dan Rengmbangan Kualitas Kontrol	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dekop	Peningkatan jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengaliran	100%	1. Diperbaikinya Jumlah parameter terakreditasi 2. Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Sungai Masyarakat Hulu Sungai	6 Parameter	100 %	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sidang Berjalan
1.021.1.03.01.00.36		<b>PROGRAM PENGELOMPOKAN PERSIMPANAN</b>									Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian / Bidang Urusan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Mencerminkan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	1/2/3	1/2/3
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)	Target (11)					
1.021.1.03.01.00.36.005	Berprestasi, Sana Dan Prosidura Perumahan	(3) Lingkungan Hidup dan Pemertabatan Ruang	(4) Kualitas Lingkungan hidup meningkat	(5) Piyungan	Perentase pemetaan sistem pengolahan sampah rumah lingkungan	70%	(8) 5 Laporan	Target	(9) 5 Laporan	Target	77,42 %	(12) Rp. 6.000.000.000,00	(13) Rp. 6.000.000.000,00	(14) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	(15) Sebelang Bejalan
1.031.03.01.00.45	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>											<b>Rp. 4.400.000.000,00</b>	<b>Rp. 4.400.000.000,00</b>		
1.021.1.03.01.00.45.009	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Tempusut (Gawang Pemda DIY dan Nembak/Coa)	(3) Lingkungan Hidup dan Pemertabatan Ruang	(4) Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Sewon	Iyaman jaringn air limbah terpusat di KPI	2000SR	1. Terpeliharanya peralatan IPL	68 Unit	1.000 JPT/100ml	45,45 %	Memperbaharui beyanan sistem air limbah terpusat kepada 21.000 SR	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sebelang Bejalan
1.021.1.03.01.00.45.010	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Tempusut	(3) Lingkungan Hidup dan Pemertabatan Ruang	(4) Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Sewon	Iyaman jaringn air limbah terpusat di KPI	2000SR	1. Tersurunya Peta dan Profil Instalasi Pengolahan Air limbah rehabilitasi/pemeliharaan	1.000 mg/ltr	1.000 JPT/100ml	43,18 %	Memperbaharui beyanan sistem air limbah terpusat kepada 21.000 SR	Rp. 1.900.000.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sebelang Bejalan
1.021.1.03.01.00.45.011	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Tempusut	(3) Lingkungan Hidup dan Pemertabatan Ruang	(4) Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Sewon	Iyaman jaringn air limbah terpusat di KPI	2000SR	2. Reabilitas/Pemeliharaan Sarpas jaringn air limbah	234 tm	50 mg/ltr						
							3. Peta dan Profil Instalasi Pengolahan Air limbah terpusat ( Ambang Batas BOD Max)	50 mg/ltr	50 JPT/100 ml						
							4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringn (Ambang Batas Coliform Max)	6-9 PH	6-9 PH	11,36 %	Memperbaharui beyanan sistem air limbah terpusat kepada 21.000 SR	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sebelang Bejalan
							2. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Hasi/Keluar (PLT ( Ambang Batas BOD Max)	50 mg/ltr							
							3. Pemeliharaan Instalasi:	1 Unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Latimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 3.824.630.000,00				
	Nomor	Uraian/Kidung Urutan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sumber Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Target	Misi Kegiatan	Target	Pagu Indikatorif	Prakiraan SKPD	Jenis Kegiatan
						Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target						
<b>1</b>	<b>1.05</b>	<b>Wajib</b>													
<b>1.05</b>	<b>1.05.01.00.01.00</b>	<b>PERATAAN RUANG</b>													
<b>1.05.01.00.01.00.01</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.001</b>	<b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b>													
<b>1.05.01.00.01.00.01.001</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.001</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Perencanaan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	- Surat Keluar - Surat Masuk - Pengiriman Dokumen	970 surat 860 dokumen	(9)	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	1,45%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.002</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.002</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	- Penyediaan layanan telekomunikasi - Penyediaan layanan listrik 120 Volt - Penyediaan layanan air 3000 m3 - Penyediaan layanan internet 2000 Mbps jasa langganan - Telepon, Listrik, Internet dan PAM	12 Bulan 13 Bulan 12 Bulan	(9)	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	17,98%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.006</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.006</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bulet Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 yang tepat waktu	8 Unit	(9)	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	2,90%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.007</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.007</b>	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bulet Pembayaran Pengelola Keuangan dan Penggubahan	12 bulan	(9)	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	15,24%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.008</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.008</b>	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	166dm2	(9)	Kemudahan Pelayanan Administrasi perkantoran	8,22%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.010</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.010</b>	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	50 jenis	(9)	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	7,25%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.011</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.011</b>	Pengadaan Barang Cakupan Dan Penggantian	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Barang Cakupan dan Penggantian	20 jenis	(9)	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	3,38%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.012</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.012</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	10 jenis	(9)	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	2,42%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.014</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.014</b>	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perakitan Rumah Tangga	5 jenis	(9)	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	0,87%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.015</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.015</b>	Penyediaan Bahan Baku Dan Perakitan Perabot Ruang	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat kabar	3 jenis	(9)	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	0,44%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.017</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.017</b>	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Makanan dan minuman sedang	1300.05	(9)	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	1,74%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.018</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.018</b>	Rapat/Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	- Konsultasi dan koordinasi dalam daerah - Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 Bulan 12 Bulan	(9)	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	32,65%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.022</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.022</b>	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 Bulan	(9)	Kemudahan dan keamanan Kantor	9,58%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.01.029</b>	<b>1.05.01.00.01.00.01.029</b>	Pengalangan Asip Dinas SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terdapatnya naskah dinas	1 Dokumen	(9)	Kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor (asip dan/atau peralatan lainnya)	1,76%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.02</b>	<b>1.05.01.00.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>													
<b>1.05.01.00.01.00.02.005</b>	<b>1.05.01.00.01.00.02.005</b>	Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan dinas/operasional - Kendaraan Roda 4 - Jendolan Roda 2	4 Unit 4 Unit	(9)	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas)	47,21%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.02.007</b>	<b>1.05.01.00.01.00.02.007</b>	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengelolaan Gedung Kantor	4 Jenis	(9)	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perbaikan gedung kantor) terpenuhi	3,78%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.02.009</b>	<b>1.05.01.00.01.00.02.009</b>	Pengalangan Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengalangan perbaikan gedung kantor	2 Jenis	(9)	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perbaikan gedung kantor) terpenuhi	7,55%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.02.010</b>	<b>1.05.01.00.01.00.02.010</b>	Pengalangan Mebeleur	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meja Kursi Rajat	2 Jenis	(9)	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (meubel) terpenuhi	11,33%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.02.022</b>	<b>1.05.01.00.01.00.02.022</b>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor - Penggantian peralatan gedung kantor (perbaikan Jaring Listrik)	3 jenis	(9)	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	9,28%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng
<b>1.05.01.00.01.00.02.024</b>	<b>1.05.01.00.01.00.02.024</b>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6 Unit	(9)	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	3,78%	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Soalng

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 3.824.630.000,00				
	Nomor	Uraian (Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan)	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Kecamatan		
						Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)				Took Ukur (10)	Target (11)	SKPD
1.05.1.05.01.00.02.029	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Pemeliharaan Ruti/Berkala Mebelur	Kinerja aparatur dan brokral	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	melebur terpelihaa misal meja, kursi, Lemari	3 Jenis	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebelur) terpenuhi	1,93%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.02.038		Pemeliharaan Ruti/Berkala Tanaman	Kinerja aparatur dan brokral	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Tenaga pegawai pemeliharaan taman	1 Tahun	Terpeliharanya taman/banaman	0,39%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.02.042		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokral	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	- Unit gedung kantor yang direhabilitasi - Dokumen perencanaan gedung kantor	2 Unit, 1 Dokumen	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	18,88%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
<b>1.05.1.05.01.00.06</b>		<b>PROGRAM PENGINGKATAN DAN PELAPORAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEUANGAN</b>										<b>Rp. 170.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>		
1.05.1.05.01.00.06.016		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokral	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya poeta usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Nilai JAKIP SKPD	8	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	8,82%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.06.017		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokral	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya poeta usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan SKPD	4 Laporan	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	8,82%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.06.018		Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokral	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya poeta usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	- Rerjta, ROPK, RKA, RPA - Sistem Informasi Dinas PTR	1 Tahun 1 Aplikasi	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	27,53%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.06.019		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokral	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya poeta usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	1 Dokumen laporan monitoring dan evaluasi	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	8,82%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja										Keterangan				
	Nomor	Uraian/Isi Uraian dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Swasana Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan		
						Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				
	1	Wajib			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>1.06</b>		<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>													
<b>1.06.1.06.01.00</b>		<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>													
<b>1.06.1.06.01.00.01</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>											<b>Rp. 2.079.814.700,00</b>		
1.06.1.06.01.00.01.001	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1. Surat Keluar 2, Surat Masuk 3, Pengiriman surat/dokumen 4, Benda Pos	2.530 surat/4.536 surat/292 surat/dokumen/2.585	0,69%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 14.400.000,00			Rp. 16.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.002	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1. Pembayaran tagihan rekening Tolong 9 sambungan, 2. Pembayaran Tagihan rekening listrik 11.8400 Kwh, 3. Pembayaran langganan barumih	12 bulan 12 bulan 12 bulan	24,06%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 500.400.000,00			Rp. 600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.006	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan Dns/Operasional rod 2, dan rod 4 yang tepat	10 lita kendaraan Dns rod 2 dan 14 Dns/Operasional rod 2 dan rod 4	0,82%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 17.020.000,00			Rp. 18.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.007	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Bukti pembayaran honorarium pejabat/karyawan honorarium pejabat kepegawaian	12 bulan 12 bulan	3,41%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 70.850.000,00			Rp. 80.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.008	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Pembersihan Kantor BAPPEDA DTY dan LPT BSD	72.868 meter persegi	7,94%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 165.117.700,00			Rp. 190.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.010	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Alat Tulis Kantor	101 jenis	3,14%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 65.370.000,00			Rp. 68.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.011	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1. Benda Cetak 3, Pengandaian surat-surat/dokumen lainnya	15 jenis 130.794 lembar	2,16%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 45.000.000,00			Rp. 50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.012	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	16 jenis	1,09%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 22.635.000,00			Rp. 24.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.014	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Peralihan rumah tangga dan bahan pembersihan	19 jenis	0,64%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 13.300.000,00			Rp. 15.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.015	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Bahan bahan dan Perunggu-undangan : - Surat kabar - Buku peraturan per undangan	6 jenis 1 paket	1,28%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 26.622.000,00			Rp. 29.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.017	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Makanan dan minuman rapat	8.600 orang	4,76%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 99.100.000,00			Rp. 104.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.018	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Konultasi dan koordinasi luar daerah, konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan	46,06%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 958.000.000,00			Rp. 980.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
1.06.1.06.01.00.01.029	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Kinerja aparatur dan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Perbaikan Ansp	35 m 600 Doks, 4.800 brokasi	3,94%	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 82.000.000,00			Rp. 85.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang Berjalan
<b>1.06.1.06.01.00.02</b>		<b>PROGRAM PEMBERANGKATAN SARANA DAN</b>										<b>Rp. 2.306.608.700,00</b>			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja										Mecanizing				
	Nomor	Uraian Bidang, Uraian Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Swatan Daerah	Lokasi	Hasil Program			Kebijakan Kegiatan			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	
						Target	Took Uluur	Target	Target	Took Uluur	Target			Target	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
1.06.1.06.01.00.02.005	<b>PRASARANA APARATUR</b> Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Memelihara sarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2	3 unit 3 unit	Kebutuhan sarana prasarana dinas/operasional terpenuhi	35,38%	Rp. 815.406.750,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Memelihara sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perengkapan Gedung Kantor : AC, Split 8 unit, horisontal/vertikal panel 1 set, almam box 4 unit, filing cabinet 4 buah, vending dan 2 buah	5 jenis	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perengkapan gedung kantor) terpenuhi	6,09%	Rp. 140.384.700,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.02.009	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Memelihara sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perbaikan Gedung Kantor : Komputer : 18 unit, Printer : 5 unit, laptop 3 unit, wever 3 unit, ups 11 unit	5 jenis	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perengkapan gedung kantor) terpenuhi	13,63%	Rp. 314.526.250,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.02.010	Pengadaan Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Memelihara sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	meubeler 13 korsi jenis 1,3 meja jenis 1, meja kursi tunggal, 1 meja multimedial 1 set kursi studio, 1 meja tamu, 2 meja 1 unit	1 paket	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (meubeler terpenuhi)	8,67%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Memelihara sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Gedung Kantor Tepelharah	2 unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana (gedung kantor) terpenuhi	6,80%	Rp. 156.942.000,00	Rp. 170.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Memelihara sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan Dinas/Operasional Tepelharah : Roda 4 (13 unit) Roda 2 (7 unit)	2 jenis	Kebutuhan pemeliharaan prasarana dinas/operasional terpenuhi	17,75%	Rp. 409.359.000,00	Rp. 415.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Memelihara sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perengkapan Gedung Kantor Yang Tersejarah : AC Split (8 unit), AC Floor Standing (4 unit), Almar besi (15 lb), Filing Cabinet 15 unit, Sound System (5 unit), Generator (1 unit),2 ventilator, Sound System (5)	8 jenis	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Perengkapan gedung kantor) terpenuhi	2,62%	Rp. 60.540.000,00	Rp. 65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Memelihara sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perbaikan Gedung Kantor Yang Tersejarah : Jaringan Komputer & Internet (2 paket), Komputer PC (6 unit),Komputer Note Book (20 unit), LCD proyektor (8 unit), Raklembe (2 unit), Handy Talky (7 unit)	10 jenis	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Perengkapan gedung kantor) terpenuhi	2,59%	Rp. 59.650.000,00	Rp. 63.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.02.042	Rehabilitasi Gedung/Benteng Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Memelihara sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersekananya Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor	1 Unit	Dukungan terhadap terwujudnya Perengkapan Sarana Dan Prasarana Aparatur	6,50%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.05	<b>PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS</b> Pengembangan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Terdapatnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Fasilitasi Bagi Pejabat Fungsional : Rapat Kerja Workshop Pejabat Fungsional Perencana - Perencana - Besat Kerja Asesori Pejabat Fungsional Perencana se DIY - Penelibra	2 kali 2 kali 1 kali 1 kali	Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertambah/meningkat	100%	Rp. 174.280.000,00	Rp. 185.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.06	<b>PROGRAM PENGUATAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN NEUNGAN</b> Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Terdapatnya penata usaha keuang dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Nilai Laku SKPD	A	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja skpd	4%	Rp. 19.600.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Terdapatnya penata usaha keuang dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keseluruhan anggaran kas dan realisasi anggaran	revisi kegiatan 25%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja skpd	10%	Rp. 45.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang
1.06.1.06.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemenuhan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% Terdapatnya penata usaha keuang dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dokumen anggaran rencana kerja, ROKP, RKA, DPA, Pengesahan website bagdata	8 dokumen 1 tahun 1 tahun*	Dukungan terhadap pengelolan pengembangan sistem pelaporan	80%	Rp. 356.182.000,00	Rp. 380.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang	Sedang

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Bidang, Uraian Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Swara Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Mecanung				
					Hasil Program	Kebijakan Kegiatan		Target		Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan			
						Target	Took Uluur					Target	Hasil Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.06.019	Meningkatkan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Badan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan program yang mendukung kinerja aparatur dan birokrasi SKPD	100%	Melaksanakan antara target capaian kinerja dengan Program/Kegiatan RPBD tahun 2016	6%	Rp. 25.524.000,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 25.524.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang
<b>1.06.1.06.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>													
1.06.1.06.01.00.21.008	Penyusunan Rencana RKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	DIY	Perencanaan dan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dan Siasat Pembangunan 5 (Lima) Tahunan	98%	1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018; 2. Murebang Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dan Siasat Pembangunan 5 (Lima) Tahunan 2017	100%	Dukung terhadap tingkat kesesuaian Saran Pembangunan Tahunan dan Siasat Pembangunan 5 (Lima) Tahunan	50%	Rp. 1.674.741.250,00	Rp. 1.800.000.000,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.21.030	Penyusunan KUA DAN PPA5	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	DIY	Perencanaan dan koordinasi penyusunan KUA dan PPA5	98%	1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Peraturan Anggaran (PPA5) Tahun 2018; 2. Anggaran Pendapatan dan Siasat (APBA) dan Prioritas PPA5/Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017	100%	Dukung terhadap tingkat kesesuaian Saran Pembangunan Tahunan dan Siasat Pembangunan 5 (Lima) Tahunan	15%	Rp. 468.948.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.21.033	Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	DIY	Perencanaan dan koordinasi penyusunan program pembangunan	98%	1. Berta Acara Kesepakatan Trilateral Desk: Regional; 2. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan 2017; 3. Peninjauan Penyusunan Rencana SKPD	23%	Dukung terhadap tingkat kesesuaian Saran Pembangunan Tahunan dan Siasat Pembangunan 5 (Lima) Tahunan	23%	Rp. 720.485.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.21.072	Penyusunan RPJPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	DIY	Perencanaan dan koordinasi penyusunan RPJPD	98%	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022; 2. Murebang RPJPD	100%	Dukung terhadap tingkat kesesuaian Saran Pembangunan Tahunan dan Siasat Pembangunan 5 (Lima) Tahunan	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang
<b>1.06.1.06.01.00.22</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN</b>													
1.06.1.06.01.00.22.059	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	DIY	Perencanaan dan koordinasi penyusunan program pembangunan	95%	Perencanaan Pertanian dan Kehutanan	1 dokumen	Dukung terhadap pengurangan kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pertanian	38,38%	Rp. 481.700.000,00	Rp. 510.000.000,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.22.060	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	DIY	Perencanaan dan koordinasi penyusunan program pembangunan	95%	Perencanaan Dunia Usaha	1 dokumen	Dukung terhadap pengurangan kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perindustrian	29,48%	Rp. 370.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.22.061	Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	DIY	Perencanaan dan koordinasi penyusunan program pembangunan	95%	Sinkronisasi program unggulan/strategis	1 laporan	Dukung terhadap pengurangan kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perindustrian	18,39%	Rp. 243.415.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.22.062	Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	DIY	Perencanaan dan koordinasi penyusunan program pembangunan	95%	Sinkronisasi program unggulan/strategis	1 laporan	Dukung terhadap pengurangan kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perindustrian	12,75%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang
<b>1.06.1.06.01.00.23</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA</b>													
1.06.1.06.01.00.23.041	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDH	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	DIY	Perencanaan dan koordinasi penyusunan program pembangunan	95%	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDH (1 dokumen)	15 Skarun	Dukung Persekitar kesesuaian Target Sasaran Pembangunan Tahunan dan Siasat Pembangunan 5 (Lima) Tahunan	30,54%	Rp. 393.058.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.23.042	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesenya	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	DIY	Perencanaan dan koordinasi penyusunan program pembangunan	95%	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesenya (1 dokumen)	11 Skarun	Dukung Persekitar kesesuaian Target Sasaran Pembangunan Tahunan dan Siasat Pembangunan 5 (Lima) Tahunan	22,39%	Rp. 332.875.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Pemerintahan Daerah	Sidang

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Swara Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Mecaneng				
					Hasil Program		Kebijakan Kegiatan				Target	Hasil Kegiatan	Target	1/2/3	1/2/3
					Target	Tokoh Ulu	Target	Tokoh Ulu							
1.06.1.06.01.00.23.043	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Sub Bidang Kerja (1 laporan)	5 program strategis/unggulan	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sosial-Budaya dan Isu Strategis Pembangunan 95%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
1.06.1.06.01.00.23.044	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kerja	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Sub Bidang Kerja (1 laporan)	7 program strategis/unggulan	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sosial-Budaya dan Isu Strategis Pembangunan 95%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
1.06.1.06.01.00.23.048	Pencapaian Pembangunan Sub Bidang Budaya	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Pencapaian Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kebudayaan (1 dokumen)	2 Sasaran	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sosial-Budaya dan Isu Strategis Pembangunan 95%	Rp. 191.682.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
1.06.1.06.01.00.23.049	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Budaya	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Sub Bidang Kerja (1 laporan)	1 program strategis/unggulan	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sosial-Budaya dan Isu Strategis Pembangunan 95%	Rp. 114.492.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
<b>1.06.1.06.01.00.26</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA</b>								<b>Rp. 1.405.000.000,00</b>	<b>Rp. 1.405.000.000,00</b>					
1.06.1.06.01.00.26.001	Pencapaian Pembangunan Sub Bidang Perumahan dan ESDM	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Pencapaian pembangunan Sub Bidang Perumahan dan ESDM (1 dokumen)	10 target sasaran	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpas dan Isu Strategis Pembangunan 95%	Rp. 560.000.000,00	Rp. 575.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
1.06.1.06.01.00.26.002	Pencapaian Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Pencapaian pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup (1 dokumen)	8 target sasaran	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpas dan Isu Strategis Pembangunan 95 %	Rp. 427.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
1.06.1.06.01.00.26.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pembangunan, Tata Ruang, Perumahan, dan ESDM	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis (1 laporan)	6 program unggulan / isu strategis	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpas dan Isu Strategis Pembangunan 95%	Rp. 470.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
1.06.1.06.01.00.26.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis Sektor Sumbada Air (1 Laporan)	4 program unggulan / isu strategis	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpas dan Isu Strategis Pembangunan 95 %	Rp. 115.500.000,00	Rp. 130.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
1.06.1.06.01.00.26.008	Peningkatan Pengelolaan Sub Bidang Perumahan dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Peningkatan/Perbaikan Kelembagaan dan Partisipasi dan Tergisi Partisipatif di 5 daerah target	Teraksunanya koordinasi pelaksanaan WISHP-2 di 3 PPU dan 3 DPMU	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpas dan Isu Strategis Pembangunan 95 %	Rp. 230.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
1.06.1.06.01.00.26.009	Peningkatan Pengelolaan Sub Bidang Perumahan dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Peningkatan/Perbaikan Kelembagaan dan Partisipasi dan Tergisi Partisipatif di 5 daerah target	Teraksunanya koordinasi pelaksanaan WISHP-2 di 3 PPU dan 5 DPMU	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpas dan Isu Strategis Pembangunan 95 %	Rp. 136.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
<b>1.06.1.06.01.00.27</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN</b>								<b>Rp. 1.351.408.000,00</b>	<b>Rp. 550.000.000,00</b>					
1.06.1.06.01.00.27.011	Pencapaian Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Pencapaian Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum	5 sektor	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Isu Strategis Pembangunan 95%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
1.06.1.06.01.00.27.012	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pemerintahan Umum	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis	5 sektor	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Isu Strategis Pembangunan 95%	Rp. 335.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			
1.06.1.06.01.00.27.013	Pencapaian Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	95%	Pencapaian Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik	3 sektor	Dukungan terhadap peningkatan Persentase kelesahan Target Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Isu Strategis Pembangunan 95%	Rp. 335.917.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Swara Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Mecanangan			
					Kebijakan Kegiatan						Target (11)	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program	Hasil Kegiatan	Target (9)	Tokol Uluur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Tokol Uluur (6)	Target (7)	Tokol Uluur (8)	Target (9)	Tokol Uluur (10)	Target (11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.27.014	Koordinasi dan Sinergisasi Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan	DIY	95%	Koordinasi dan Sinergisasi Program Unggulan/Isi Strategis	3 sektor	Dukungan terhadap pencapaian 3,32% keajaiban antara Svaran Rencana Jangka Menengah dengan Badan Svaran Tahunan di Bidang Pemerintahan	Rp. 180.991.000,00	13,36%	Sidang	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang
<b>1.06.1.06.01.00.28</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>								<b>Rp. 2.511.231.000,00</b>			<b>Rp. 2.665.000.000,00</b>		
1.06.1.06.01.00.28.002	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP)	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan	DIY	100%	Dokumen Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKP) (1 dokumen)	Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2016	Dukungan terhadap pelaksanaan program non keistimewaan	Rp. 442.441.000,00	20%	Sidang	Rp. 470.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.28.013	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan	DIY	100%	1. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (RK) dan Rencana Kerja (RK) per Kecamatan (RKPK) (1 dokumen) 2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1.6 dokumen 2.1 dokumen	Dukungan terhadap persentase pelaksanaan program non keistimewaan sebesar 77%	Rp. 669.100.000,00	25%	Sidang	Rp. 700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.28.015	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan	DIY	100%	Buku Laporan Kinerja (LK) Pemda DIY (1 dokumen)	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dari Rp.20 menjadi 52,00	Dukungan terhadap persentase pelaksanaan program non keistimewaan	Rp. 287.890.000,00	20%	Sidang	Rp. 310.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.28.016	Pengendalian Pembangunan Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan	DIY	100%	1. Laporan Tahunan Pengendalian 2. Laporan Pengendalian SKPD Pemda DIY TW I-III 2017 3. Laporan Pengendalian SKPD Pemda DIY TW IV 2017 4. Laporan Monitoring Penetapan Kinerja TW IV 2016 6. Laporan M	1.1 laporan 2. 3 dokumen 3. 1 dokumen 4. 2 dokumen 5. 1 dokumen 6. 2 dokumen 7. 2 dokumen 8. 1 dokumen 9. 1 paket	Dukungan terhadap persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan sebesar 77%	Rp. 950.700.000,00	25%	Sidang	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang
1.06.1.06.01.00.28.018	Monitoring dan Evaluasi APBN	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan	DIY	100%	Buku Laporan Monev APBN TW I-III 2017	Tersedianya Laporan Monev APBN TW I-III 2017	Dukungan terhadap persentase pencapaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan	Rp. 161.100.000,00	20%	Sidang	Rp. 185.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang
<b>1.23</b>	<b>STATISTIK</b>													
<b>1.23.1.06.01.00</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>													
<b>1.23.1.06.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH</b>											<b>Rp. 4.809.668.000,00</b>	<b>Rp. 2.500.000.000,00</b>	
1.23.1.06.01.00.16.001	Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Statistik Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan	DIY	100%	Buku Analisis PDRB DIY, Buku Analisis LDR DIY, Laporan Svaran per Kecamatan, Buku Analisis Indeks Gini Perumahan	7 jenis	Dukungan persentase kelengkapan data pengumpulan yang tersedia (RPMG)	Rp. 2.500.000.000,00	100%	Sidang	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang
1.23.1.06.01.00.16.003	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan	DIY	100%	1) Buku Informasi Statistik Pembangunan DIY Tahun 2016, 2) Buku Profil Daerah, 3) Leaflet, 4) Laporan SIPD DIY Tahun 2016, 5) Keterangan Data, 6) Keterangan dan penyajian Data pada Sistem Aplikasi SIPD, 7) Sistem	1 korreg	Dukungan persentase kelengkapan data pengumpulan yang tersedia (RPMG)	Rp. 2.309.668.000,00	100%	Sidang	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sidang

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan	Indikator Kinerja										Jumlah Page : Rp. 101.248.170.339,00				
	Nomor	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan / Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kegiatan Kegiatan		Pagu Indikatif	Prestasi Maju	Keterangan			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	1.07	1.07.01.00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wajib													
		PERHUBUNGAN													
		Dinas Perhubungan													
		PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN													
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KepiJh aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	Tenajudhya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas: 1) Surat Keluar 2) Surat Masuk 3) Pengiriman Dokumen		Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantoran	100%	Rp. 11.320.000,00	Rp. 12.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
		1.07.1.07.01.00.01.001													
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	KepiJh aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	Tenajudhya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas: 1) Pembayaran tagihan rekening listrik 14 sambungan 2. 10000 Kw.3. Pembayaran tagihan rekening air 435 m3	1) 2 bulan 2) 12 bulan 3) 12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantoran	100%	Rp. 961.680.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
		1.07.1.07.01.00.01.006													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Dan/atau Pemeliharaan	KepiJh aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	Tenajudhya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas: Bulet pembayaran Pajak/STNK kendaraan operasional roda 2 dan 4 yang tidak valid	1) Kendaraan Roda 2 : 1 unit 2) kendaraan Roda 4 : 1 unit 3) Kendaraan Roda 6 : 1 unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantoran	100%	Rp. 22.309.500,00	Rp. 30.335.250,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
		1.07.1.07.01.00.01.007													
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	KepiJh aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	Tenajudhya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Trans Jogja: Bakti pembayaran Pajak/STNK kendaraan operasional roda 2 dan 4 yang tidak valid	23 orang/12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantoran	100%	Rp. 136.140.000,00	Rp. 147.629.440,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
		1.07.1.07.01.00.01.008													
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	KepiJh aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	Tenajudhya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Trans Jogja Bakti Pembayaran Pengaba Keagamaan	14 orang/12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantoran	100%	Rp. 415.154.000,00	Rp. 463.419.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
		1.07.1.07.01.00.01.010													
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	KepiJh aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	Tenajudhya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas: Alat Tulis Kantor	35 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantoran	100%	Rp. 103.413.900,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
		1.07.1.07.01.00.01.011													
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	KepiJh aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	Tenajudhya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Trans Jogja: Alat Tulis Kantor	53 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantoran	100%	Rp. 67.393.175,00	Rp. 61.360.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
		1.07.1.07.01.00.01.012													
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KepiJh aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	Tenajudhya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas: 1) Barang Cetakan 2. Pengandaan dan Pajilidan	1.23 jenis 2. 8 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantoran	100%	Rp. 14.609.000,00	Rp. 16.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
		1.07.1.07.01.00.01.014													
		Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	KepiJh aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	Tenajudhya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Trans Jogja: 1) Barang Cetakan 2. Pengandaan dan Pajilidan	6 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantoran	100%	Rp. 17.659.800,00	Rp. 19.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagi : Rp. 101.268.170.330,00	Keterangan			
	Nomor	Uraian (Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan)	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Kuluran Kegiatan			Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Jenis Kegiatan	
						Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur					Target
1.071.107.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perantara Untuk Pengisian Bus	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meingskat	Program 01-06	100%	Obat nyamuk spray	6 jenis	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 13.500.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Heingskat	Program 01-06	100%	Dinas: Makanan dan Minum Sotang	5.500 orang	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 98.880.000,00	Rp. 102.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meingskat	Program 01-06	100%	Trans Jogi: Makan dan Minum Sotang	2.270 orang	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 772.460.470,00	Rp. 960.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Heingskat	Program 01-06	100%	Dinas: 1) Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 332.501.300,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.01.029	Pengelolaan Asap Dinas SKPD	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meingskat	Program 01-06	100%	Trans Jogi: 1) Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah 2) Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 50.685.500,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.01.033	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pendukung	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Heingskat	Program 01-06	100%	Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja	12 kwartir	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 1.790.503.550,00	Rp. 1.900.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.02	<b>PROGRAM Peningkatan Aparatur</b>									<b>Rp. 4.012.100.500,00</b>	<b>Rp. 5.402.774.400,00</b>				
1.071.107.01.00.02.005	Penyediaan Kelemban Dinas/Operasional	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meingskat	Program 01-06	100%	Penyediaan Asap Dinas	12 bulan	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 496.625.800,00	Rp. 520.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Heingskat	Program 01-06	100%	Trans Jogi: 1) Lempu Deteksi Uling Pabu 2. PC Komputer	8 unit	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 67.914.400,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.02.009	Penyediaan Perbaikan Gedung Kantor	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meingskat	Program 01-06	100%	Penyediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1.30 unit 2. 32 unit 3. Kursi Tamu	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 108.569.900,00	Rp. 781.774.400,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.02.010	Pengadaan Meubeler	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Heingskat	Program 01-06	100%	Meingskaty sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1. Meja Kerja 2. Kursi Kerja 3. Kursi 2 unit	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 146.850.700,00	Rp. 155.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.02.022	Penelitian Rutin/Berkala Gedung Kantor	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meingskat	Program 01-06	100%	Meingskaty sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kebudayaan Pemeliharaan Prasarana Kantor Terpenuhi	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 252.573.900,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.02.024	Penelitian Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Heingskat	Program 01-06	100%	Meingskaty sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kebudayaan Pemeliharaan Prasarana Kantor Terpenuhi	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 681.928.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.02.026	Penelitian Rutin/Berkala Penyelidikan Gedung Kantor	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meingskat	Program 01-06	100%	Meingskaty sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kebudayaan Pemeliharaan Prasarana Kantor Terpenuhi	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 29.625.000,00	Rp. 31.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		
1.071.107.01.00.02.028	Penelitian Rutin/Berkala Perubahan Gedung Kantor	KepiJa, apatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Heingskat	Program 01-06	100%	Meingskaty sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kebudayaan Pemeliharaan Prasarana Kantor Terpenuhi	100%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perawatan	Rp. 63.300.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan	Nomor	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Keterangan		
						Hasil Program		Hasil Kegiatan						
						Target	Telok Ukur	Target	Telok Ukur					
1.07.1.07.01.00.02.032	(1)	Penyusunan Jaringan Sistem Informasi	(3)	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.02.042	(2)	Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung Kantor	(4)	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Trans Jodje 1) Komputer 2) Perangkat Sistem Informasi 3) AC	1) 16 unit 2) 4 unit 3) 4 unit	Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Jaringan Sistem Informasi) Terpenuhi	100%	Rp. 128.633.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.06	(3)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	(5)	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor Dinas perhubungan DIY	Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Gedung Kantor Dinas) Terpenuhi	100%	Rp. 2.043.080.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.06.016	(4)	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	(6)	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Nilai LAKIP Dishukominfo DIY	A=7-5 s/d 85	Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100%	Rp. 8.149.800,00	Rp. 8.500.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.06.017	(5)	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	(7)	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Kerjasama Anggaran 'Wes Dengan Realisasi Anggaran SKPD	10%	Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100%	Rp. 39.295.100,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.06.018	(6)	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Penyusunan Data dan Informasi	(8)	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	ROPK, Rejji, RKA, DPA	12 bulan	Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100%	Rp. 122.288.100,00	Rp. 130.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.06.019	(9)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	(10)	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Kesuksesan Antara Target Capaian Kinerja Dengan Program	100%	Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100%	Rp. 22.000.000,00	Rp. 24.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.17	(10)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGGARAN UMUM	(11)	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	75Spenuh/pang/10 hari	Penumpang yang terlayani angkutan umum non buy the service	1) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen 3) 1 Dokumen	1) Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Umum 2) Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Umum 3) Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Trans-Jodje 4) Audit Kinerja Operasional Trans-Jodje	100%	Rp. 4.397.188.925,00	Rp. 4.385.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.17.011	(11)	Pengumpulan Dan Analisis Masalah Pelayanan Angkutan Non Buy The Service	(12)	Layanan publik transportasi dan akomodasi di pedesaan	Dinas Perhubungan	75Spenuh/pang/10 hari	Penumpang yang terlayani angkutan umum non buy the service	1) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen 3) 1 Dokumen	1) Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Umum 2) Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Umum 3) Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Trans-Jodje 4) Audit Kinerja Operasional Trans-Jodje	100%	Rp. 524.155.500,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.17.012	(12)	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Angkutan	(13)	Layanan publik transportasi dan akomodasi di pedesaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	75Spenuh/pang/10 hari	Penumpang yang terlayani angkutan umum non buy the service	3 dokumen	Kajian Bina Trans, Pemertan Lulus Standar KA, DIY dan kebutuhan lahan	100%	Rp. 1.300.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.17.015	(13)	Kegiatan Pemeliharaan Dan Pembaruan Penghargaan Sopi/Juru Mudi/Awek, dan Pemeliharaan Angkutan Umum Terpadan	(14)	Layanan publik transportasi dan akomodasi di pedesaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	75Spenuh/pang/10 hari	Penumpang yang terlayani angkutan umum non buy the service	1) 15 orang peserta 2) 30 orang x 3 angkutan	1) Pemilihan Awek Angkutan Umum Terpadan 2) Pembinaan Awek Kendaraan Angkutan Umum	100%	Rp. 154.527.625,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.17.027	(14)	Perjlanan di Bidang Perhubungan	(15)	Layanan publik transportasi dan akomodasi di pedesaan	Dinas Perhubungan	75Spenuh/pang/10 hari	Penumpang yang terlayani angkutan umum non buy the service	1) 3000 kendaraan 2) 1 paket media cetak, 3) 1 paket media elektronik 4) 1 paket media elektronik 5) 1 paket media elektronik 6) 1 paket media elektronik 7) 1 paket media elektronik 8) 1 paket media elektronik 9) 1 paket media elektronik 10) 1 paket media elektronik 11) 1 paket media elektronik 12) 1 paket media elektronik 13) 1 paket media elektronik 14) 1 paket media elektronik 15) 1 paket media elektronik	Operator angkutan umum tertib jika sebagai angkutan terhadap rate-rata sebagai angkutan umum non buy the Service sebanyak 718 orang per hari	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.17.028	(15)	Penggiatan Pengobatan Terminal Angkutan Darat	(16)	Layanan publik transportasi dan akomodasi di pedesaan	Mali Wates	75Spenuh/pang/10 hari	Penumpang yang terlayani angkutan umum non buy the service	2 terminal	Perteliharaan pelayanan terminal angkutan umum non buy the Service	100%	Rp. 804.997.550,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.17.029	(16)	Pemertan Transfer Point dan Park and Ride	(17)	Layanan publik transportasi dan akomodasi di pedesaan	Daerah Perhubungan	75Spenuh/pang/10 hari	Penumpang yang terlayani angkutan umum non buy the service	1 dokumen	Kajian Park and Ride	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan



Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ridang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Praktikan Maju	Jumlah Pagu : Rp. 101.268.170.539,00				
					Hasil Program	Kulianan Kegiatan				Mekaranan	Jenis Kegiatan			
						Target	Teok Ukur					Target	Teok Ukur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.071.07.01.00.17.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Transfer Point dan Park and Ride	Pembangunan infrastruktur	Layanan publik transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Gamping	788 penumpang/ jam	100persen	1 titik	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.153.595.200,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang	
1.071.07.01.00.20.004	PROGRAN PENGINACTAN KELATIAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BEMOTOR	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menngkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan	100persen	100persen	1) Sertifikasi Rancangan Bangun Kendaraan BEMOTOR 2) Sertifikasi Pengoperasian Kendaraan BEMOTOR 3) Dinas	100%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 30.213.100,00	Rp. 35.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang	
1.071.07.01.00.20.005	Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan BEMOTOR (P4B)	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menngkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Kabupaten/Kota di DIY	100persen	100persen	5 UPT PKB	5 UPT PKB	Rp. 24.000.000,00	Rp. 33.300.100,00	Rp. 24.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang	
1.071.07.01.00.21.001	PROGRAN PENGINACTAN MASAPARAN DAN REKREASIA LALU LINTAS	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menngkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Jaringan jalan perkotaan DIY	42%	42%	1 Laporan Visiis Jalan dan Perencanaan 50 ruas jalan dan 35 simpang	100%	Rp. 508.400.000,00	Rp. 1.318.263.400,00	Rp. 508.400.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang	
1.071.07.01.00.21.004	Peneleapan dan Pengaturan Manajemen Lalulintas	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menngkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Kawasan perkotaan DIY	42%	42%	1) Perencanaan Manajemen Lulu Lintas kawasan Kangngan	100%	Rp. 809.863.400,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 809.863.400,00	Dinas Perhubungan	Sedang	
1.071.07.01.00.22	PROGRAN PENGATURAN SISTEM SHIPANG	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menngkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	60%	60%	1. APRII ATCS Tenaga Serya 2. WIS 3. Kontroler ATCS	100%	Rp. 5.081.619.000,00	Rp. 5.081.619.000,00	Rp. 5.081.619.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang	
1.071.07.01.00.22.002	Pengaturan dan Pemanangan APRII ATCS Tenaga Serya	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menngkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	60%	60%	1. APRII ATCS Tenaga Serya 2. WIS 3. Kontroler ATCS	100%	Rp. 4.681.619.000,00	Rp. 4.681.619.000,00	Rp. 4.681.619.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang	
1.071.07.01.00.22.003	Penyediaan Teknologi Transportasi	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menngkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	60%	60%	Operasional dan pemeliharaan sistem ATCS	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang	
1.071.07.01.00.23	PROGRAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU LINTAS	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menngkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Daerah Rawan Kecelakaan	18%	18%	Audit Keselamatan Jalan	100%	Rp. 407.730.900,00	Rp. 1.457.775.500,00	Rp. 407.730.900,00	Dinas Perhubungan	Sedang	
1.071.07.01.00.23.001	Audit Keselamatan Jalan	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menngkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Daerah Rawan Kecelakaan	18%	18%	Audit Keselamatan Jalan	100%	Rp. 62.921.500,00	Rp. 62.921.500,00	Rp. 62.921.500,00	Dinas Perhubungan	Sedang	
1.071.07.01.00.23.002	Penilaian Pelajar Protor Angkutan Jalan Tingkat DIY	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menngkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	18%	18%	1) 100 peserta 2) 15 orang 3) 3 orang 4) 1 orang	100%	Rp. 70.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan	Nomor	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Praktisn Maju	Jumlah Pagu : Rp. 101.268.170.330,00	Keterangan					
						Hasil Kegiatan		Target									
						Tokol Ukur	Tokol Ukur										
1.07.1.07.01.00.23.006	(2)	Pengembangan Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Desah Istimewa Yogyakarta	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.23.009	(2)	Pengaturan dan pengamanan angkutan pada hari-hari besar nasional	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Desah Istimewa Yogyakarta	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.24	(2)	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMERINTAHAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Kab. Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.24.002	(2)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Kab. Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.24.003	(2)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perangkutan Jalan	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Jalan Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.24.005	(2)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan Hal	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Berbah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.25	(2)	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMERINTAHAN SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE</b>	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Desah Istimewa Yogyakarta	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.25.001	(2)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Angkutan Umum Buy The Service	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Desah Istimewa Yogyakarta	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.25.002	(2)	Penyenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Kawasan Perkotaan DIY	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.25.003	(2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Trans Jogja	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Wiyah perkotaan DIY	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.26	(2)	<b>PROGRAM PENGADAMAN DAN PEMERINTAHAN SARANA DAN PRASARANA JALAN</b>	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Jalan Provinsi di wilayah DIY	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.26.001	(2)	Penyediaan Pagor Pengaman Jalan	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Jalan Provinsi di wilayah DIY	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.26.002	(2)	Penyediaan Lampu Penomangan Jalan	(3)	Layanan publik meningkat, tertama pada penanganan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	(4)	Jalan Provinsi di wilayah DIY	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 101.268.170.330,00		Keterangan		
	Nomor	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kuluran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Praktikan Maju			
						Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target			Tokol Ukur		Target	1/2/3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.07.1.07.01.00.26.003	Penyediaan Aki Pengendali Bayar di Lahu Lintas (APLL)	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menengket, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Jalan Provinsi di wilayah DIY	Perentase peningkatan fasilitas perolehan jalan	87%	Akt Pengendali Isyarat Lahu-Lintas (APLL)	2 paket	Ketersediaan APLL sebanyak 2 unit sebagai dukungan terhadap pengembangan fasilitas Perolehan Jalan sebesar 87%	100%	Rp. 820.785.500,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sidang Bejalan
	1.07.1.07.01.00.26.004	Penyediaan Merka Jalan	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menengket, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Gedung sari	Perentase peningkatan fasilitas perolehan jalan	87%	Merka Jalan	10.000 m <sup>2</sup>	Ketersediaan Merka Jalan Jalan sepanjang 10.000 meter sebagai dukungan terhadap Fasilitas Perolehan Jalan sebesar 87%	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sidang Bejalan
	1.07.1.07.01.00.26.005	Penyediaan Rambu-Rambu Lahu Lintas	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menengket, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Gedung sari	Perentase peningkatan fasilitas perolehan jalan	87%	1. Rambu Rambu Lahu Lintas 2. Rambu Rambu Lahu Lintas 3. Rambu Rambu Lahu Lintas 4. Delineator 5. Paku Jalan 6. Riji 7. Akiakan Crossing 8. Cermin Tlangan	1. 170 unit 2. 70 unit 3. 150 unit 4. 300 Paku 5. 800 buah 6. 16 unit 7. 2 unit 8. 20 unit	Ketersediaan Rambu Lahu Lintas sebanyak 170 unit sebagai dukungan terhadap Peningkatan Fasilitas Perolehan Jalan sebesar 87%	100%	Rp. 1.274.574.500,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sidang Bejalan
	<b>1.07.1.07.01.00.27</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN ANGGUTAN UDARA</b>										<b>Rp. 153.514.100,00</b>	<b>Rp. 162.000.000,00</b>		
	1.07.1.07.01.00.27.001	Koordinasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menengket, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan	Terselenggaranya koordinasi untuk mendukung layanan angkutan udara	3bandara	Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo	1 dokumen laporan	Terselenggaranya Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo sebagai dukungan terhadap Peningkatan Fasilitas Perolehan Jalan sebesar 87%	100%	Rp. 118.614.500,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sidang Bejalan
	1.07.1.07.01.00.27.002	Pemantauan Ketinggian KKOP	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menengket, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Wilayah KKOP Bandara Adisulipto	Terselenggaranya koordinasi untuk mendukung layanan angkutan udara	3bandara	1. Pemakan dan Pemakan Sarana dan Prasarana Bandara Adisulipto 2. Data Ketinggian Kawasan KKOP Terpenting di Wilayah KKOP	1) 1 unit sarpa di Bandara Adisulipto 2) 1 unit sarpa di Kawasan KKOP	Pemantauan ketinggian KKOP sebagai dukungan terhadap koordinasi untuk mendukung layanan angkutan udara pada 3 bandara	100%	Rp. 6.634.200,00	Rp. 7.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sidang Bejalan
	1.07.1.07.01.00.27.003	Pemantauan Penyelenggaraan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur Pesawat Udara	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menengket, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Bandara Adisulipto	Terselenggaranya koordinasi untuk mendukung layanan angkutan udara	3bandara	1. Pemantauan Angkutan Orang, Transportasi, dan Fasilitas Bandara Adisulipto 2. Mutasi Pesawat Udara (EPU)	1) 3 Jenis Data 2) 1 unit sarpa di Mutasi Pesawat Udara (EPU)	Pemantauan Penyelenggaraan Wilayah dan Peningkatan Pesawat Udara sebagai dukungan terhadap terselenggaranya koordinasi untuk mendukung layanan angkutan udara pada 3 bandara	100%	Rp. 5.750.000,00	Rp. 6.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sidang Bejalan
	1.07.1.07.01.00.27.004	Pembinaan dan Pemantauan Keselamatan Penerbangan	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menengket, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Bandara Adisulipto	Terselenggaranya koordinasi untuk mendukung layanan angkutan udara	3bandara	Pembinaan dan Pemantauan Penerbangan dan Pemantauan terhadap 30 Personil	30 personil	Sosialisasi tentang keselamatan penerbangan sebagai dukungan terhadap terselenggaranya koordinasi untuk mendukung layanan angkutan udara pada 3 bandara	100%	Rp. 10.490.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sidang Bejalan
	1.07.1.07.01.00.27.005	Komite Fasilitas Bandar Udara	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Layanan publik menengket, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan	Terselenggaranya koordinasi untuk mendukung layanan angkutan udara	3bandara	Koordinasi kegiatan dibidang perimbangan spa internasional	1 kegiatan	Terbentuknya Komite Fasilitas Bandar Udara sebagai dukungan terhadap terselenggaranya koordinasi untuk mendukung layanan angkutan udara pada 3 bandara	100%	Rp. 12.025.000,00	Rp. 14.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sidang Bejalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 31.000.000.000,00				
	Nomor	Uraian/Kidang Urusan Pemerintahan/Layanan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kelembagaan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Profilisasi	Jenis Kegiatan	
						Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target				
1	1.06.1.08.01.00.01	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.08.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Surat Masuk	1000 surat	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 19.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pembayaran tagihan rekening website	2000 surat	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 220.000.000,00	Rp. 240.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kelembagaan Unit/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda empat	9 unit	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.000.000,00	Rp. 19.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Penghasilan keuangan	12 bulan	Terwujudnya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 80.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Keberhasilan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Penghasilan kepegawaian	12 bulan	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan alat tulis kantor Kantor BUD DIT	21 jenis	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.011	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan barang cetakan	10 jenis	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan/ fotocopy lembar	117000 lembar	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.014	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Perabotan rumah tangga dan bahan pembersih	21 jenis	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perandang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Bahan becaan	6 jenis	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	2. Baku Perawatan pemudang-undangan	20 buku	Terwujudnya administrasi kependudukan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 55.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Konsumsi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.06.1.08.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/kegiatan/empuk/keja	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jasa keamanan kantor	12 bulan	Terwujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja										Keterangan					
	Nomor	Uraian / Bidang / Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Mula	Jumlah Pagu - Rp. 31.000.000.000,00		
						Tokoh Ukur	TARGET	Tokoh Ukur	TARGET	Tokoh Ukur	TARGET			1/2/3	1/4	1/5
1.061.1.08.01.00.01.029	Pengelolaan Asap Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 60.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	13	14	15
1.061.1.08.01.00.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 1.921.000.000,00	Rp. 2.273.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.02.005	Pengabdian Kemandirian Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 300.000.000,00	Rp. 750.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.02.009	Pengabdian Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 400.000.000,00	Rp. 420.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.02.010	Pengabdian Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 75.000.000,00	Rp. 85.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.02.022	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 160.000.000,00	Rp. 180.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.02.024	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 310.000.000,00	Rp. 330.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.02.026	Peneliharaan Rutin/Berkala Penyelenggaraan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 260.000.000,00	Rp. 290.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 216.000.000,00	Rp. 216.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN SUPPLER/APARATUR</b>	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 190.000.000,00	Rp. 210.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 110.000.000,00	Rp. 120.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.05.033	Pengembangan I S O	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 80.000.000,00	Rp. 90.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERMUKAAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN NEUNGAN</b>	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 255.000.000,00	Rp. 300.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 25.000.000,00	Rp. 35.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 45.000.000,00	Rp. 55.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, Penganggaran, Dana dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 60.000.000,00	Rp. 70.000.000,00			
1.061.1.08.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Daerah Menengah	Badan Lingkungan Hidup	Tokoh Ukur (6)	TARGET (7)	Tokoh Ukur (8)	TARGET (9)	Tokoh Ukur (10)	TARGET (11)	Rp. 125.000.000,00	Rp. 140.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Kelistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian / Bidang / Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sastraan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktisitas Nilai	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Target	Hasil Kegiatan	SKPD	Jenis Kegiatan
					Took Ukur	Target	Took Ukur	Target						
1.061.1.08.01.00.15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.061.1.08.01.00.15.011	Penggiatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Pemasalahan	Lintasan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Jumlah Penambahan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri	60kelompok	3. 10 boksai DTY	3. 10 boksai	Jumlah Penambahan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri sebesar 10 kelompok	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
							1. Workshop Pengembangan JPSH 2. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri 4. Peingatan Hari Peduli Sampah	1. 6 kali @ 50 orang 2. 30 kali @ 30 orang						
1.061.1.08.01.00.16	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENYEMBAIAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN</b>	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.061.1.08.01.00.16.007	Pengabdian Dampak Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Sumber Percomar air	450unit	1. Terikasanaya penabian dokumen AMDAL, UKL-UPL dan DPL 2. Terikasanaya upgrading komisi penabian AMDAL DTY dan Kabupaten Kota 1. Terikasanaya pengabdian masyarakat AMDAL (RKL-RRA), UKL-UPL dan DPL 2. Terikasanaya bimbingan penyusunan laporan dokumen lingkungan 3. Terikasanaya sosialisasi AMDAL, UKL-UPL dan DPL 4. Terikasanaya pelatihan pengenalan AMDAL untuk Aparat Desa dan Kecamatan 5. Terikasanaya pembinaan dan pengawasan Komisi Penabian Dokumen di Kabupaten Kota 6. Terikasanaya pengembangan informasi Dokumen AMDAL	5 dokumen	dukungn terhadap peningkatan kualitas air sebesar 3,74%	5,07%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.061.1.08.01.00.16.023	Pembinaan Teoris Pelaksanaan A M D A L, UKL-UPL, dan D P L	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Sumber Percomar air	450unit	90 perubahan AMDAL (RKL-RRA), UKL-UPL dan DPL 5 kali 30 orang 10 kali @ 50 orang 5 kali @ 35 orang 5 kali @ 15 orang 1 aplikasi	90 perubahan kualitas air sebesar 3,74%	dukungn terhadap peningkatan kualitas air sebesar 3,74%	6,76	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.061.1.08.01.00.16.026	Penggiatan Hukum Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kab/Kota se DIY	Sumber Percomar air	450unit	1. Terikasanaya Pengabdian Hukum Lingkungan Hidup melalui Pengabdian dan/atau di luar pengabdian 2. Terikasanaya Bimtek Penggiatan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Aparat Pemerintahan 3. Terikasanaya sosialisasi perundang-undangan lingkungan hidup dan pengabdian hidup	8 kesus 2 hari @ 35 orang 5 kali @ 50 orang	dukungn terhadap peningkatan kualitas air sebesar 3,74%	5,75%	Rp. 170.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.061.1.08.01.00.16.056	Penyusunan SPN Bidang LH	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Sumber Percomar air	450unit	Laporan SPN Bidang LH	1 dokumen	Dukungn terhadap peningkatan kualitas air sebesar 11,21% tahun 2016 sebesar 14,95%	1,69%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.061.1.08.01.00.16.062	Penggiatan Kepedulian Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Sumber Percomar air	450unit	1. Penggiatan Hari Penting Lingkungan Hidup 2. Peminan dan Expo Produk Remah Lingkungan 3. Memanaye Penyediaan Lingkungan Hidup 4. Saka kalastaru	1 kali 2 boksai 2 kali 1 paket	Dukungn terhadap peningkatan kualitas air sebesar 3,74% (dari tahun 2015 sebesar 11,2% tahun 2016 sebesar 10,25%)	15,22%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 850.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan
1.061.1.08.01.00.16.063	Pengembangan Kapasitas SDW dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Sumber Percomar air	450unit	1. Evaluasi/ Penilaian Kelembagaan 2. Pelatihan PUJ guru 3. Pembinaan Kelembagaan Pengelolaan LH Kawasan Sungai 4. Pembinaan Saka kapastaru (2 kali)	6 kegiatan 2 kali @ 30 orang 10 kali @ 30 orang	Dukungn terhadap peningkatan kualitas air sebesar 3,74%	21,30%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saarant Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Praktisitas	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan		
					Took Ukur	Target	Took Ukur	Target				Took Ukur	Target	
1.06.1.08.01.00.16.065	Pengembangan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	(3)	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.08.01.00.16.066	Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara	(3)	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1.06.1.08.01.00.16.067	Pengawasan Tingkat Kebersihan Perumahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	(3)	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1.06.1.08.01.00.16.068	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	(3)	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
<b>1.06.1.08.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PEBLINDUHAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>													
1.06.1.08.01.00.17.026	Konservasi Sumber Daya Air dan Konektivitas Masyarakat	(3)	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1.06.1.08.01.00.17.027	Pengendalian Reserakan Lingkungan dan Pemantauan Ruang	(3)	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
<b>1.06.1.08.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP</b>													

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Mula	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan		
					Took Ukur	Targat	Took Ukur	Targat					Took Ukur	Targat
1.06.1.08.01.00.19.001	Pendidikan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Ruang	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.08.01.00.19.002	Persebaran Data Dan Informasi Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Jenis data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	11 jenis	1. Pembuatan Sistem Informasi Berbasis GIS 2. Penyebaran buletin kaputaru 3. Laporan SUHD 2015 4. Pengembangan Website 5. Workshop Data dan Informasi LH 6. Eratkan Sistem Informasi LH	1 buah 2 edisi 1 laporan 2 unit 2 kali @ 40 orang 2 kali @ 25 orang	Jenis data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	10 jenis	Rp. 400.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soalng Berjalan
1.06.1.08.01.00.20.000	Persebaran Data Dan Informasi Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Jenis data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	11 jenis	1. Pembuatan Sistem Informasi Data Lingkungan Hidup 2. Penyusunan Buletin Kaputaru 3. Penyediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Online 4. Workshop Validasi Data Lingkungan Hidup 5. Penyebaran Laporan SUHD Tahun 2015 6. Pengembangan Sistem Informasi LH	1 buah dan 1 buah 2 edisi dan 2 edisi 8 jenis dari 8 jenis 2 kali dari 2 kali 1 laporan dari 1 laporan 2 unit dari 2 unit	Persebaran Data Dan Informasi Lingkungan	10 jenis	Rp. 500.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soalng Berjalan
1.06.1.08.01.00.20.007	Pengujian Emisi	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan kualitas udara	11%	1. Uji Pelek Emisi Kendaraan Bermotor 2. Exposure Hasil Uji Pelek Emisi Kendaraan Bermotor 3. Uji pelek emisi akibat aktivitas produktif 4. Sosialisasi Pengaub Uji Emisi	2000 kendaraan 5 kali @ 30 orang 46 sampel 5 kali @ 30 orang	Penurunan beban pencemaran parameter kuantitas udara	9,011 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soalng Berjalan
1.06.1.08.01.00.20.008	Pengendalian Pencemaran Udara	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan kualitas udara	11%	1. Paket Kerja Program Langit Benu 2. Eratkan dan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Udara 3. Data dan Informasi Kualitas Udara di DIY (Metode Atlas & Paper)	2 kali @ 30 orang 300 sampel	Penurunan beban pencemaran parameter kuantitas udara	9,011 persen	Rp. 450.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soalng Berjalan
1.06.1.08.01.00.24	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUMAH TERBUKA HIJAU (RTH)</b>										<b>Rp. 1.800.000.000,00</b>	<b>Rp. 2.500.000.000,00</b>		
1.06.1.08.01.00.24.005	Pemilihan R T H	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	kawasan Perkebunan Aren/Koa se-DIY	Persentase Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkebunan	58,33%	1. Pengembangan RTH Perkebunan (daun) 2. Pengadaan bibit tanaman Kamayung Hijau 3. Penanaman RTH 4. Pagar pengaman pohon penedang jalam	300 bibit 800 batang 4 bibit kawasan kawasan perkebunan	Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkebunan	46,67 persen	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Soalng Berjalan



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Praktisitas Moju	Keterangan				
					Hasil Program		Hasil Kegiatan							
					Target	Took Ukur	Target				Took Ukur			
1	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK</b>													
1.1.1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat													
1.1.1.11.01.00.01	<b>PROGRAM PELAYANAN</b>													
1.1.1.11.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	1. Surat Masuk	8500 lembar	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	100%	Rp. 3.600.000,00	Rp. 3.960.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	1. Penyediaan Retensi Listrik	12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	20,70	Rp. 353.000.000,00	Rp. 378.300.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	1. Biaya pembelian palpat/STNK kendaraan roda 4 2. Biaya pemeliharaan palpat/STNK kendaraan roda 2	8 unit 10 unit	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	0,62	Rp. 7.631.800,00	Rp. 8.349.800,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	1. Jasa pengopala keuangan 2. Jasa pemegang barang 3. Jasa pengopala kespemahaman	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	4,21	Rp. 51.425.000,00	Rp. 56.597.500,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Keberhasilan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung kantor	2 (1867m2) unit gedung	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	14,85	Rp. 181.500.000,00	Rp. 199.650.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan peralalatan kantor	7 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	2,05	Rp. 25.000.000,00	Rp. 27.500.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	53 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	2,70	Rp. 33.000.000,00	Rp. 36.300.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.011	Penyediaan Barang Coklatan Dan Pengabdian	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	1. barang Coklatan 2. Pengabdian	10 jenis 62.428 lembar	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	2,05	Rp. 25.000.000,00	Rp. 27.500.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.012	Penyediaan Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	Komposisi instalasi listrik/penerangan gedung kantor	17 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	1,43	Rp. 17.500.000,00	Rp. 19.250.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perendang Urugan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	1. Surat Kabar 2. Majalah	2 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	0,59	Rp. 7.260.000,00	Rp. 7.986.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	Makan dan minum sidang	3.300 orang	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	2,97	Rp. 36.300.000,00	Rp. 39.930.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang
1.1.1.11.01.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang meningkatkan layanan dan fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	26,64	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Sedang

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saatan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan			Pagu Indikatif	Prakiraan Meja	Keterangan		
					Hasil Program		Hasil Kegiatan			Jenis Kegiatan	1/2/3	
					Took Ukor (6)	Target (7)	Took Ukor (8)					Target (9)
1.1.1.11.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	2. Konsultasi dan koordinasi ke daerah	1 tahun	18,90	Rp. 231.000.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>								<b>Rp. 22.111.645.000,00</b>	<b>Rp. 637.699.500,00</b>		
1.1.1.11.01.00.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 unit gedung kantor	96,25	Rp. 0,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 unit kendaraan roda 4	0,96	Rp. 200.000.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.02.009	Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5 jenis peralatan gedung kantor	1,03	Rp. 235.064.500,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 unit gedung kantor	0,72	Rp. 1.65.000.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 unit gedung RDU	0,90	Rp. 186.150.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2. Kendaran dinas/operasional roda 2	0,12	Rp. 24.800.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelur	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	6 jenis sarana furni meubelur perlengkapan	0,02	Rp. 5.500.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDB APARATUR</b>								<b>Rp. 86.000.000,00</b>	<b>Rp. 86.000.000,00</b>		
1.1.1.11.01.00.05.032	Pengembangan Kualitas SDB H	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	12 bulan kegiatan fisik pada setiap semester/aparatur	100	Rp. 86.000.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.06.016	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>								<b>Rp. 212.025.250,00</b>	<b>Rp. 196.793.905,00</b>		
1.1.1.11.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Terwujudnya rencana usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	7x (8) Nisi Laporan SKPD	5,61	Rp. 10.037.750,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Terwujudnya rencana usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5 % Keseluruhan Anggaran Keseluruhan Realisasi Anggaran SKPD	15,75	Rp. 28.166.600,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	
1.1.1.11.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Terwujudnya rencana usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 tahun Review Rencana RBT, RCT, PK, RCP, DPA, DPA, dan pengembangan website BPHD DIY	70,91	Rp. 160.000.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Soleng Bojolan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sesuai Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Meju	Keterangan	
					Hasil Program		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	1/2/3
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)				
1.1.1.1.1.01.00.06.019	Monev dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kesejahteraan dan brokasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Hemisgar	Badan Pembinaan dan Masyarakat	SKPD	Terwujudnya peran usaha kecil menengah dalam mendukung program/kegiatan SKPD	100%	Kesesuaian antara target dengan target realisasi program/kegiatan	Rp. 13.824.900,00	Rp. 15.207.250,00	Badan Pembinaan dan Masyarakat.	Selang Beljatan
1.1.1.1.1.01.00.24	<b>PROGRAM KESETARAAN PEMBINAAN DAN PEREMPUAN</b>	Kesejahteraan	Harapan Hidup Masyarakat Hemisgar	DIY	penyesebaban PPKG (Pencapaian dan Pengukuran Responsif Gender) kegiatan pembentukan dan pembinaan Desa Prima	100%	10.86%	Peningkatan Kapasitas SDM dalam mengimplementasi PUG	Rp. 4.464.945.800,00			
1.1.1.1.1.01.00.24.001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	Kesejahteraan	Harapan Hidup Masyarakat Hemisgar	DIY	penyesebaban PPKG (Pencapaian dan Pengukuran Responsif Gender) kegiatan pembentukan dan pembinaan Desa Prima	100%	10.86%	Peningkatan Kapasitas SDM dalam mengimplementasi PUG	Rp. 605.804.000,00	Rp. 2.518.224.500,00	Badan Pembinaan dan Masyarakat.	Selang Beljatan
1.1.1.1.1.01.00.24.002	Pembudayaan Perilaku Perempuan & Bilang Ekonomi	Kesejahteraan	Harapan Hidup Masyarakat Hemisgar	DIY	penyesebaban PPKG (Pencapaian dan Pengukuran Responsif Gender) kegiatan pembentukan dan pembinaan Desa Prima	100%	10.86%	Peningkatan Kapasitas SDM dalam mengimplementasi PUG	Rp. 2.289.295.000,00			
1.1.1.1.1.01.00.24.003	Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak	Kesejahteraan	Harapan Hidup Masyarakat Hemisgar	DIY	penyesebaban PPKG (Pencapaian dan Pengukuran Responsif Gender) kegiatan pembentukan dan pembinaan Desa Prima	100%	10.86%	Peningkatan Kapasitas SDM dalam mengimplementasi PUG	Rp. 689.915.000,00	Rp. 7.58.906.500,00	Badan Pembinaan dan Masyarakat.	Selang Beljatan
1.1.1.1.1.01.00.24.004	Pengabdian Peris Perempuan dalam Pengembangan Kepuasan Perempuan dan Anak	Kesejahteraan	Harapan Hidup Masyarakat Hemisgar	DIY	penyesebaban PPKG (Pencapaian dan Pengukuran Responsif Gender) kegiatan pembentukan dan pembinaan Desa Prima	100%	10.86%	Peningkatan Kapasitas SDM dalam mengimplementasi PUG	Rp. 382.010.000,00			
1.1.1.1.1.01.00.25	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN ANAK</b>	Kesejahteraan	Harapan Hidup Masyarakat Hemisgar	DIY	penyesebaban PPKG (Pencapaian dan Pengukuran Responsif Gender) kegiatan pembentukan dan pembinaan Desa Prima	100%	10.86%	Peningkatan Kapasitas SDM dalam mengimplementasi PUG	Rp. 3.855.212.500,00	Rp. 4.240.733.750,00		
1.1.1.1.1.01.00.25.001	Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Kesejahteraan	Harapan Hidup Masyarakat Hemisgar	DIY	penyesebaban PPKG (Pencapaian dan Pengukuran Responsif Gender) kegiatan pembentukan dan pembinaan Desa Prima	100%	10.86%	Peningkatan Kapasitas SDM dalam mengimplementasi PUG	Rp. 1.713.628.500,00	Rp. 1.885.211.350,00	Badan Pembinaan dan Masyarakat.	Selang Beljatan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ridang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sesuai Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Meju	Keterangan	
					Hasil Program		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD
					Took Ukur	Target	Took Ukur	Target				
1.1.1.1.1.01.00.25.002	Aktivasi Pemenuhan Hak-hak Anak	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Hak-Hak Anak	100%	7 jenis (Sosial, Inisiasi, Praliban, Penguatan Gugus Tugas KJA, Temu FAD, Advokasi, HAN)	Rp. 1.819.684.000,00	Rp. 2.001.652.400,00	(14)	Badan Pemudayaan dan Masyarakat.	Selang Belanja
1.1.1.1.1.01.00.25.003	Pengembangan Data Gender dan Perencanaan Pemenuhan dan Anak	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Pembinaan dan pelatihan kader kesehatan yang mendapatkan beasiswa dan anak yang ditindaklanjuti	100%	4 jenis (Update, Pelatihan, Peningkatan Pemahaman, dan Evaluasi serta Pengambilan Kebijakan (0.04)	Rp. 321.700.000,00	Rp. 333.970.000,00		Badan Pemudayaan dan Masyarakat.	Selang Belanja
1.1.2	<b>KELUARGA BERGEMAH</b>											
1.1.2.1.11.01.00	<b>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Reproduksi Remaja</b>											
1.1.2.1.11.01.00.16	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Pembinaan dan pelatihan kader kesehatan yang mendapatkan beasiswa dan anak yang ditindaklanjuti	100%	7 jenis (Sosial, Inisiasi, Praliban, Penguatan Gugus Tugas KJA, Temu FAD, Advokasi, HAN)	Rp. 1.988.786.250,00	Rp. 2.193.926.375,00			
1.1.2.1.1.01.00.16.006	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Pembinaan dan pelatihan kader kesehatan yang mendapatkan beasiswa dan anak yang ditindaklanjuti	100%	7 jenis (Sosial, Inisiasi, Praliban, Penguatan Gugus Tugas KJA, Temu FAD, Advokasi, HAN)	Rp. 1.332.415.000,00	Rp. 1.383.918.000,00		Badan Pemudayaan dan Masyarakat.	Selang Belanja
1.1.2.1.1.01.00.16.007	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Pembinaan dan pelatihan kader kesehatan yang mendapatkan beasiswa dan anak yang ditindaklanjuti	100%	7 jenis (Sosial, Inisiasi, Praliban, Penguatan Gugus Tugas KJA, Temu FAD, Advokasi, HAN)	Rp. 736.371.250,00	Rp. 810.008.375,00		Badan Pemudayaan dan Masyarakat.	Selang Belanja
1.1.2.1.11.01.00.26	<b>PROGRAM KELUARGA BERGEMAH DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>											
1.1.2.1.1.01.00.26.006	Pembinaan Keluarga dalam Penanggulangan HIV dan AIDS	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Pembinaan dan pelatihan kader kesehatan yang mendapatkan beasiswa dan anak yang ditindaklanjuti	80,224%	3 jenis (Pelatihan, Inisiasi, fasilitasi)	Rp. 244.863.750,00	Rp. 269.350.125,00		Badan Pemudayaan dan Masyarakat.	Selang Belanja
1.1.2.1.1.01.00.26.007	Pembinaan KB dan Pelayanan KB	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Gedung sari Inogri Jatis Karangmulyo Kojale Ngawen Ngapar Ngapar Playen Pongjeng Sapo sari Somboro Wonoasri	Pembinaan dan pelatihan kader kesehatan yang mendapatkan beasiswa dan anak yang ditindaklanjuti	80,224%	5 jenis (Sosial, Inisiasi, Praliban, Penguatan Gugus Tugas KJA, Temu FAD, Advokasi, HAN)	Rp. 855.725.000,00	Rp. 941.297.500,00		Badan Pemudayaan dan Masyarakat.	Selang Belanja
1.1.2.1.11.01.00.28	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BTNA KELUARGA</b>											
1.1.2.1.1.01.00.28.001	Pembinaan Kesehatan dan Kebutuhan Keluarga	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Pembinaan dan pelatihan kader kesehatan yang mendapatkan beasiswa dan anak yang ditindaklanjuti	34,27%	3 jenis (Sosial, Inisiasi, Praliban, Penguatan Gugus Tugas KJA, Temu FAD, Advokasi, HAN)	Rp. 1.143.689.700,00	Rp. 1.258.058.670,00		Badan Pemudayaan dan Masyarakat.	Selang Belanja
1.1.2.1.1.01.00.28.002	Pembinaan Kesehatan Keluarga	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Pembinaan dan pelatihan kader kesehatan yang mendapatkan beasiswa dan anak yang ditindaklanjuti	24,27%	4 jenis (Promosi, Fasilitasi Hari Keluarga, Fasilitasi UPPKS, Fasilitasi Sub PPKSD)	Rp. 2.130.060.550,00	Rp. 2.343.066.600,00		Badan Pemudayaan dan Masyarakat.	Selang Belanja

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nomor	Uraian/Ridang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Swaann Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Hasil Kegiatan			Jenis Kegiatan	SKPD			
					Took Ukur	Target	Took Ukur					Target	1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)					(9)		
(1)		(3)	(4)	(5)				(13)	(14)	(15)				
<b>1.22</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>													
1.22.1.11.01.00	Badan Pembudayaan Perempuan dan Masyarakat.							Rp. 3.195.088.050,00						
1.22.1.11.01.00.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMAN</b>							Rp. 2.904.625.500,00						
1.22.1.11.01.00.15.001	Pembudayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendidapan Masyarakat Mengingat	Diy	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPBM)	31,57%	Penggiatan dan Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat aktif	Rp. 2.194.625.500,00	Badan Pembudayaan Masyarakat.	Sedang Belanja				
1.22.1.11.01.00.15.019	Peningkatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK	Pertumbuhan Ekonomi	Pendidapan Masyarakat Mengingat	Diy	Mengurangi kelembagaan TP PKK	31,57%	Mengurangi kelembagaan TP PKK	Rp. 750.000.000,00	Badan Pempudayaan Masyarakat.	Sedang Belanja				
1.22.1.11.01.00.16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAN</b>							Rp. 400.000.000,00						
1.22.1.11.01.00.16.019	Pembantuan, Pembinaan, dan Pengorganisasian BUMDES	Pertumbuhan Ekonomi	Pendidapan Masyarakat Mengingat	Diy	Mengurangi kelembagaan Bumdes	48,36%	Pembantuan dan pembinaan BUMDES	Rp. 400.000.000,00	Badan Pempudayaan Masyarakat.	Sedang Belanja				
1.22.1.11.01.00.17	<b>PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>							Rp. 1.474.139.100,00						
1.22.1.11.01.00.17.001	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pembangunan Desa	Pertumbuhan Ekonomi	Pendidapan Masyarakat Mengingat	Diy	Mengurangi kelembagaan Masyarakat	37%	Mengurangi kelembagaan Masyarakat	Rp. 1.621.553.000,00	Badan Pempudayaan Masyarakat.	Sedang Belanja				
1.22.1.11.01.00.22	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN PENERLITAN DESA</b>							Rp. 1.100.000.000,00						
1.22.1.11.01.00.22.005	Peningkatan Kapasitas Desa	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Mengingat	Diy	Peningkatan kemampuan masyarakat	100%	Peningkatan kemampuan masyarakat	Rp. 1.210.000.000,00	Badan Pempudayaan Masyarakat.	Sedang Belanja				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu - Rp. 72.804.222.271,00			
	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Praktisna Maju	Kecermahan	SKPD	Jenis Kegiatan		
Nomor	(2)	(3)	(4)	(5)	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.13	SOSIAL													
1.13.13.01.00	Dinas Sosial													
1.13.13.01.00.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTORAN</b>													
1.13.13.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Materai 3000 Dinas dan UPTD	1 tahun	Kelancaran pelayanan administrasi perantara masyarakat dan pengantar/paket	0,04%	Rp. 7.986.000,00	Rp. 8.234.600,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Materai 6000 Dinas dan UPTD Regimiar/Paket Dinas dan UPTD	1 tahun	Kelancaran pelayanan administrasi perantara masyarakat dan pengantar/paket	7,14 %	Rp. 1.281.790.000,00	Rp. 1.409.969.000,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kir roda 2 Kir roda 4	1 tahun	Kelancaran dinas terleb perjalanan dan sup pasok	0,23%	Rp. 40.176.000,00	Rp. 44.193.600,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembayaran Pajak STNK roda 2 Pembayaran pajak STNK roda 3 Pembayaran pajak STNK roda 4	1 tahun	Kecepatan layanan administrasi perantara	1,20%	Rp. 216.845.414,00	Rp. 237.759.950,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jasa kebersihan dinas dan UPTD	1 tahun	Kebersihan kantor terjaga	18,23%	Rp. 3.270.822.875,00	Rp. 3.597.465.160,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor Dinas dan UPTD	1 tahun	Administrasi pemerintahan berjalan lancar	1,03%	Rp. 1.85.611.100,00	Rp. 204.172.210,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.011	Pengadaan Barang Cetak Dan Pengadaan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Borang Cetak Dinas dan UPTD	1 tahun	Kebutuhan barang cetakan dan administrasi perantara berjalan lancar	0,72%	Rp. 1.28.400.069,00	Rp. 141.240.076,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor dinas dan UPTD	1 tahun	Kebutuhan alat listrik pemenuhan administrasi perantara	1,04%	Rp. 1.85.779.350,00	Rp. 204.357.285,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat kabar lokal dan Majalah Dinas dan UPTD	1 tahun	Kebutuhan bahan kantor terpenuhi	0,39%	Rp. 70.377.000,00	Rp. 44.414.700,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyediaan logistik kantor dan logistik klem UPTD	1 tahun	Kebutuhan logistik kantor terpenuhi	54,08%	Rp. 9.702.662.748,00	Rp. 10.672.929.020,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Makanan dan Minuman rapat/ adagri/ tamu	1 tahun	Kebutuhan rapat/ adagri/ tamu terpenuhi sehingga kegiatan dapat berjalan lancar	0,90%	Rp. 1.62.384.000,00	Rp. 178.512.400,00	Dinas Sosial	Sedang
1.13.13.01.00.01.018	Rapat Rajuk Koordinasi Dan Konultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemenuhan Daerah Meningkat	Program 01-06	Tewujudnya administrasi perantara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konstasi dan koordinasi luar daerah untuk Dinas dan UPTD	1 tahun	Terjalinnya koordinasi, ketepatan, kepatuhan dan ketepatan program, kegiatan dan urusan ke luar daerah	1,47%	Rp. 254.115.000,00	Rp. 279.526.500,00	Dinas Sosial	Sedang

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 72.804.222.221,00		Keterangan			
	Nomor	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	SKPD	Jenis Kegiatan	
						Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)	Target (11)					
1.1.13.1.13.01.00.01.022	(1)	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	(3)	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan	(5)	Program 01-06	(6)	100%	(8)	12 bulan	(9)	13,09%	(13)	(14)	(15)	Soding Bوجلان
1.1.13.1.13.01.00.01.029		Pengalokasian Aspi Dinamis SKPD		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		100%		1 tahun		0,49%				Soding Bوجلان
1.1.13.1.13.01.00.02		<b>PROGRAM PEMBERANGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>Rp. 10.815.646.374,00</b>				
1.1.13.1.13.01.00.02.003		Pembangunan Gedung Kantor		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		100%		1896 m2		12,42%				Soding Bوجلان
1.1.13.1.13.01.00.02.005		Pengadaan Kebutuhan Dinas/Operasional		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		100%		1 unit		5,87%				Soding Bوجلان
1.1.13.1.13.01.00.02.007		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		100%		4 unit		7,89%				Soding Bوجلان
1.1.13.1.13.01.00.02.009		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		100%		4 paket		4,96%				Soding Bوجلان

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 72.864.222.271,00		Keterangan					
	Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program	Target	Took Ukur	Keluaran Kegiatan	Took Ukur	Target	Hasil Kegiatan	Took Ukur	Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	SKPD	Jenis Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1.13.1.13.01.00.02.010	Pengadaan Meubelur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Program 01-06	Mendefinisikan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengadaan 100% kursi sctc tamu wienna (12 set) dan kantor (5 set) pada BRSPA	3 paket	Kebutuhan meubelur kantor terpenuhi	7,33%	Rp. 793.862.500,00	Rp. 872.366.750,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan				
1.13.1.13.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Program 01-06	Mendefinisikan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Obt tembok pagar (538 m2), Perbaikan pintu (4 buah), dan sedot septik tank (10 kali) pada BRSPW	3 paket	Pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhi	9,71%	Rp. 1.061.590.148,00	Rp. 1.154.759.949,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan				
1.13.1.13.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Program 01-06	Mendefinisikan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Servis kendaraan, penggantian saku cadang, dan BBM roda das (4 unit), Servis kendaraan, penggantian saku cadang, dan BBM roda empak (2 unit) pada BRSPW	2 paket	Kebutuhan pemeliharaan dinas/operasional terpenuhi	8,65%	Rp. 935.985.700,00	Rp. 1.028.529.270,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan				



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**

Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial	Indikator Kinerja												Jumlah Pagu : Rp. 72.804.232.271,00	Keterangan				
	Nomor	Uraian /Bila/Urutan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			Prakiraan Mula	SKPD	1/2/3	1/2/3	1/2/3
						Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target						
1.13.1.3.01.00.02.026	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1.13.1.3.01.00.02.026		Pemeliharaan Rutin/Berkala Penyelenggaraan Gedung Kantor	Kecelakaan aparaturnya dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100% BBM dan pemeliharaan mesin potong rumput ( 1 th, 250 liter), pemeliharaan pompa air ( 6 unit), pemeliharaan mesin pemotong rumput (15 unit), pembelian slot printu besar dan lect (36 buah), peme	7 paket	BBM dan pemeliharaan mesin potong rumput ( 7 paket	Kebutuhan pemeliharaan penfengglapan gedung kantor terponnah)	1,21%	Rp. 143.693.000,00	Rp. 143.693.000,00	Dinas Sosial	Sidang	Berjalan	
1.13.1.3.01.00.02.028		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Gedung Kantor	Kecelakaan aparaturnya dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100% Perbaikan peralatan medis dan volam pemeliharaan genzete, diesel pump, dan mesin lift (1th) dan pembelian BBM dan oli genzet ( 1 th) pada BRTPD	11 paket	Kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor terponnah)	1,99%	Rp. 215.695.000,00	Rp. 237.264.500,00	Dinas Sosial	Sidang	Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**

Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu - Rp. 72.804.222.221,00				
	Nomor	Uraian/Rincian Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Meja	Keterangan	
						Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target			SKPD	1/2/3
1.13.1.13.01.00.02.029	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.13.1.13.01.00.02.042		Rehabilitasi Seding/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan almari (24 buah) pada BPSWS	1 paket	Kebutuhan pemeliharaan mobiler terpenuhi	0,36%	Rp. 39.100.000,00	Rp. 43.010.000,00	Dinas Sosial	Seding Bnglajn
1.13.1.13.01.00.05.007		Rehabilitasi Seding/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab. dapur dan ruang makan (1 paket) pada BPSWS	1 paket	Kebutuhan gedung kantor terpenuhi	39,69%	Rp. 4.270.519.754,00	Rp. 4.697.571.759,00	Dinas Sosial	Seding Bnglajn
1.13.1.13.01.00.05.061		Rehabilitasi Seding/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab. kolam renang tepi bahap I/reinstal pemipaan sekulus (1 paket), Rehab kolam renang tepi bahap II/reinstal pemipaan sekulus (1 paket)	2 paket			Rp. 54.243.900,00	Rp. 59.700.000,00		
1.13.1.13.01.00.05.010		Rehabilitasi Seding/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab. gedung asrama (2 unit) pada BPSWS	1 paket			Rp. 16.687.000,00	Rp. 17.700.000,00	Dinas Sosial	Seding Bnglajn
1.13.1.13.01.00.06.016		Rehabilitasi Seding/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab. mesin jahit (1 paket), Rebab gedung pendidikan 1 dan 2 (2 paket) pada BPSWA	3 paket			Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Sosial	Seding Bnglajn
1.13.1.13.01.00.06.017		Rehabilitasi Seding/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab. mesin jahit (1 paket), pompa air (3 unit), komputer (8 unit), notebook (2 unit), sound sistem dan wireless (1 unit), printer (1 unit), mesin jahit (1 unit), mesin jahit (5 unit), mesin jahit (1 unit), kulkas (1 unit), televisi (2 unit), mesin	12 paket			Rp. 8.176.900,00	Rp. 9.000.000,00	Dinas Sosial	Seding Bnglajn
1.13.1.13.01.00.06.018		Rehabilitasi Seding/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab. mesin jahit (1 paket), pompa air (3 unit), komputer (8 unit), notebook (2 unit), sound sistem dan wireless (1 unit), printer (1 unit), mesin jahit (1 unit), mesin jahit (5 unit), mesin jahit (1 unit), kulkas (1 unit), televisi (2 unit), mesin	12 paket			Rp. 125.127.450,00	Rp. 144.300.000,00		
1.13.1.13.01.00.06.018		Rehabilitasi Seding/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab. mesin jahit (1 paket), pompa air (3 unit), komputer (8 unit), notebook (2 unit), sound sistem dan wireless (1 unit), printer (1 unit), mesin jahit (1 unit), mesin jahit (5 unit), mesin jahit (1 unit), kulkas (1 unit), televisi (2 unit), mesin	12 paket			Rp. 6.256.750,00	Rp. 7.400.000,00	Dinas Sosial	Seding Bnglajn
1.13.1.13.01.00.06.018		Rehabilitasi Seding/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab. mesin jahit (1 paket), pompa air (3 unit), komputer (8 unit), notebook (2 unit), sound sistem dan wireless (1 unit), printer (1 unit), mesin jahit (1 unit), mesin jahit (5 unit), mesin jahit (1 unit), kulkas (1 unit), televisi (2 unit), mesin	12 paket			Rp. 15.382.600,00	Rp. 16.800.000,00	Dinas Sosial	Seding Bnglajn
1.13.1.13.01.00.06.018		Rehabilitasi Seding/Bent Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab. mesin jahit (1 paket), pompa air (3 unit), komputer (8 unit), notebook (2 unit), sound sistem dan wireless (1 unit), printer (1 unit), mesin jahit (1 unit), mesin jahit (5 unit), mesin jahit (1 unit), kulkas (1 unit), televisi (2 unit), mesin	12 paket			Rp. 88.888.100,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Sosial	Seding Bnglajn

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial	Jumlah Pagu : Rp. 72.804.232.271,00														
	Nomor	Uraian/Rincian Uraian Peminfaatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			Prakiraan Mula	Keterangan		
						Hasil Program	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target		Teok Ukur	Target	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.13.1.13.01.00.06.019		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kewaja, aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terselenggaranya kegiatan usaha keuangan dan pengabdian masyarakat yang mendukung program tugas dan fungsi SKPD	100%	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 dokumen	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	11,35%	Rp. 14.300.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Sosial	Selang Berjalan
1.13.1.13.01.00.19	<b>PROGRAM PEMBIYAAH PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO</b>											<b>Rp. 11.341.589.700,00</b>	<b>Rp. 12.500.000.000,00</b>		
1.13.1.13.01.00.19.004		Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penderita Panti Asuhan/Jompo	Kesehatan	Hayasan Hedo Masyarakat Meningkatkan	Gedung Kabasan Ngemplak Purudong Sleman Yogyakarta Bantul Maros Pakem Bawang Sidarejo Sihanedono Kocak Kepak	Perentase Kelulusan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan	4,95%	Terselenggaranya rehablitas bagi Anak berlatar dan ABH di Balai PPSK di Balai RPSA	100 orang	Klien dalam panti mendapatkan rehablitas dan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	Rp. 11.341.589.700,00	Rp. 12.500.000.000,00	Dinas Sosial	Selang Berjalan
1.13.1.13.01.00.20	<b>PROGRAM PEMBIYAAH EKSPANSI PERAWANG PERAKIT SOSIAL (EKS MARIAPIDANA, PSK, MARIKABA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)</b>											<b>Rp. 5.239.080.400,00</b>	<b>Rp. 5.700.000.000,00</b>		
1.13.1.13.01.00.20.019		Rehabilitasi Sosial bagi Eks Perawang Penyakit Sosial	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan	DIY	Perentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	15,42%	Pelayanan dan rehablitas korban penyalyahgunaan narkoba luar panti	45 orang	Eks perawang penyakit sosial mendapat pembinaan dan rehabilitasi untuk kembali berkembang dan kebutuhannya	100%	Rp. 5.239.080.400,00	Rp. 5.700.000.000,00	Dinas Sosial	Selang Berjalan
												<b>Rp. 847.022.000,00</b>	<b>Rp. 932.000.000,00</b>		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 72.804.222.271,00			
	Nomor	Uraian/Rincian Uraian Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prakiraan Maju	Keterangan	
						Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target		SKPD	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.13.1.13.01.00.22.014	KEPAILAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESISTAWANAN SOSIAL (K3S)	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan budaya masyarakat	Bantul Diponegoro Gamping Karangmoyo Moyudan Nglagik Ngrampal Pegajah Payen Purwokerto Umbulharjo Wates Wonorejo Wonoarjo Catur Ambakrtawang Pabelan Bijiharjo Sugeng Sukumpurni Karangharjo Lanang Tahunan Tahunan Giri Peri Wonorejo	70% Pembelajaran Teater	2 lokasi	Peningkatan keragaman dan keindahan THPN, Monumen dan Teater	40,68 %	Rp. 375.000.000,00	Dinas Sosial	Soding Bejolan			
1.13.1.13.01.00.22.015	Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan Kepertinahan dan Keselamatan Sosial	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pelaksanaan nilai-nilai keahlawanan, kepertinahan, dan keselamatan budaya masyarakat	Bangungutan Diponegoro Gamping Gondokusuman Kecaton Keromak Keromak Lumbuharjo Mamban Seduranggi Sidoarjo Slokerato Sugeng Tahunan Tahunan Tahunan	70% Pembelajaran Teater	8 org	Terlaksananya nilai-nilai kepahlawanan, kepertinahan, dan keselamatan pada generasi muda dan masyarakat	59,32 %	Rp. 502.482.000,00	Dinas Sosial	Soding Bejolan			
1.13.1.13.01.00.24	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, DAN PENYANDANG MASALAH LAINNYA	Pembangunan Wilayah dan Perumahan Infrastruktur	Kesempatan, Penguatan Masyarakat, Menunjang	Bangungutan Diponegoro Gamping Gondokusuman Kecaton Keromak Keromak Lumbuharjo Mamban Seduranggi Sidoarjo Slokerato Sugeng Tahunan Tahunan Tahunan	9,78% RISN PHH meningkatkan kemampuan dan penguatannya	100 org	Realisasikan Program PHH berjalan lancar	8,09 %	Rp. 5.583.091.020,00	Rp. 5.676.000.000,00	Dinas Sosial	Soding Bejolan		
1.13.1.13.01.00.24.008	Facilitas Modal Usaha Bagi RTSM PKH	Pembangunan Wilayah dan Perumahan Infrastruktur	Kesempatan, Penguatan Masyarakat, Menunjang	Bangungutan Diponegoro Gamping Gondokusuman Kecaton Keromak Keromak Lumbuharjo Mamban Seduranggi Sidoarjo Slokerato Sugeng Tahunan Tahunan Tahunan	9,78% RISN PHH meningkatkan kemampuan dan penguatannya	100 Org	Realisasikan Program PHH berjalan lancar	8,09 %	Rp. 151.897.600,00	Rp. 495.000.000,00	Dinas Sosial	Soding Bejolan		
1.13.1.13.01.00.24.009	Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi Keluarga Fakir-Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (POSE)	Pembangunan Wilayah dan Perumahan Infrastruktur	Kesempatan, Penguatan Masyarakat, Menunjang	Bangungutan Diponegoro Gamping Gondokusuman Kecaton Keromak Keromak Lumbuharjo Mamban Seduranggi Sidoarjo Slokerato Sugeng Tahunan Tahunan Tahunan	9,78% RISN PHH meningkatkan kemampuan dan penguatannya	10 kpy/100 KK	Meingkatkan pendapatan kepala keluarga dan Ibu Rumah Tangga melalui PKSC melalui Pengabdian LPE	150 kpy/700 KK org	Rp. 5.131.283.420,00	Rp. 5.182.000.000,00	Dinas Sosial	Soding Bejolan		



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Kelistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Rencana Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Materangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan		
					Took Ukur	Target	Took Ukur	Target					Took Ukur	Target
					(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	SKPD	1/2/3
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	
1.13.1.13.01.00.25	<b>PROGRAM PENYALIHAN TITIK PERNYALIHAN DISABILITAS DAN TRAUWA</b>								Rp. 649.839.400,00	Rp. 700.000.000,00				
1.13.1.13.01.00.25.006	Pendidikan, Rehabilitasi Sosial dan Pembudayaan Penyandang Disabilitas	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningsat	Banyuwangi Bekasi Dinoyo Gedung Sari Girimulyo Kadit Lingsar Jelis Klaten Kalibawang Kasihan Kedondong Kendak Lendah Mergangsan Ngargan Ngantapan Panggang Parit Puntarenan Piyuran Ponjong Purwadarmas Sedayu Sembok Srandakan Srandakan Temon Wates Widaman Kali Tiro Sendang Tiro Tromong Waduk Suci Balekucur Nogotiro Watu Gajah Widaman Baciro Terban Sukoharjo Sukoharjo Bumiljo Candèn Candèn Sumber Agung Tremulyo Purwo Hartono Kusumadewi Tamandiro Titosmido Ita Gemulyo	persentase peningkatan Jaminan, Perindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan Trauma	4,54%	Asistensi keluarga penyandang disabilitas	150 org	8,09 % Penyandang disabilitas mampu hidup normalif serta meningkat taraf kegiatherapannya	Rp. 649.839.400,00 Rp. 700.000.000,00			Disah Sosial	Sendang Bojolan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Rincian Uraian Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Mula	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	1/2/3
					Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.13.1.13.01.00.26	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL</b>	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Mengingat	Bantul Gamping Kalisawung Klaten Karangmojo Ketek Kudus Kulonprogo Pakem Paten Purabaya Purwokerto Purwokerto Sembung Semarang Semarang Sewon Tegalrejo Tegalrejo Umbulharjo Wates Widoyarto Rugin Hujjo Tringgingo Banguntani Banguntani Kolor Ngjak Ngjak Jatiroto Jatiroto Sinduharjo Purwo Bhangun Sedayu Sedayu Bangor Nglicra Nglicra Tuksono Karangniru Gwangan Tringgingo	16,9%	Rekomendasi Adopsi	30 anak	Anak bermasalah sosial mendapatkan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	Rp. 6.497.868.200,00	Rp. 7.000.000.000,00	Deas Sosial	Soding Bejolan	
1.13.1.13.01.00.27	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERHAJAT LUNYUT USA TERLANTAR</b>	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Mengingat	Bantul Banguntani Banguntani Cedung Cedung Cedung Jatiroto Jatiroto Kobop Kobop Kotagede Kotagede Mantijeron Mantijeron Mlati Ngayudan Ngayudan	9,77%	Pembelian hasil bantuan penguatan kelembagaan	3 lembaga	Melaksanakan kegiatan sosial untuk	100%	Rp. 3.978.293.900,00	Rp. 4.900.000.000,00	Deas Sosial	Soding Bejolan	

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Kelestarian  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 72.864.232.271,00

Nomor	Uraian/Ilmu/Unsur Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif		Prakiraan Mula	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	SKPD		
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
1.13.1.13.01.00.28	<b>PROGRAM PANGAMUAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Kesejahteraan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	(5) Ngarwan Pajangan Pakem Pang. Bantul Pang. Sleman Sapogo sari Seriboko Teras Teras Limbuhharap Wonosari Woyotri Pobocoro Pobocoro Serut Sedomoyo Tengah Candi Harjowalis Pangasinan Gedongwono Sindangdi Semburan Miyomatani Kampung Candi Bantaran Caturharjo Beji Harjo Plehan Salatirejo Tubanone Tubanone Kabonorio Palihan Tropus Saman Warang	(6) Prosentase penerima pendudukan sosial bagi korban bencana	(7) 75,37%	(8) Terlaksananya pembinaan bantuan JSLU	(9) 1 tahun	(10) 94,08%	(11) Rp. 1.764.500.100,00			
1.13.1.13.01.00.28.004	Perbaikan Kesiapsiagaan dan Pendudukan Sosial Korban Bencana	Kesejahteraan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	(5) Diyong Pangasinan Pangasinan Sapogo sari Seriboko Teras Teras Limbuhharap Wonosari Woyotri Pobocoro Pobocoro Serut Sedomoyo Tengah Candi Harjowalis Pangasinan Gedongwono Sindangdi Semburan Miyomatani Kampung Candi Bantaran Caturharjo Beji Harjo Plehan Salatirejo Tubanone Tubanone Kabonorio Palihan Tropus Saman Warang	(6) Prosentase penerima pendudukan sosial bagi korban bencana	(7) 75,37%	(8) Terlaksananya pembinaan bantuan JSLU	(9) 1 tahun	(10) 94,08%	(11) Rp. 1.659.300.100,00			Soding Berjalan
1.13.1.13.01.00.28.005	Pemulan dan Pemukiman Orang Terantar	Kesejahteraan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	(5) DIY dan Luar DIY (Semarang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya)	(6) Prosentase penerima pendudukan sosial bagi korban bencana	(7) 75,37%	(8) DIY dan Luar DIY (Semarang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya)	(9) 1 tahun	(10) 5,92%	(11) Rp. 105.000,000,00			Soding Berjalan
1.13.1.13.01.00.29	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMANGULANGAN SARAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP MIGRAN BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS DAN KORBAN TRAFFICKING</b>	Pembangunan Wilayah dan Pemukiman	Kawijakan Pendidikan Masyarakat Menurut Masyarakat Menurut	(5) Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulupri	(6) Perentase keberfungsian sosial bagi korban tidak bermasalah sosial melalui pendudukan dan pemberdayaan sosial	(7) 91,7%	(8) Terlaksananya pembinaan bantuan JSLU	(9) 2 PMKS	(10) 20 orang	(11) Rp. 186.023.000,00			Soding Berjalan
1.13.1.13.01.00.29.003	Perindungan Sosial dan Pemberdayaan bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial melalui Pendudukan dan Pemukiman Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta Korban Trafficking	Pembangunan Wilayah dan Pemukiman	Kawijakan Pendidikan Masyarakat Menurut Masyarakat Menurut	(5) Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulupri	(6) Perentase keberfungsian sosial bagi korban tidak bermasalah sosial melalui pendudukan dan pemberdayaan sosial	(7) 91,7%	(8) Terlaksananya pembinaan bantuan JSLU	(9) 2 PMKS	(10) 20 orang	(11) Rp. 186.023.000,00			Soding Berjalan



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan			SKPD	Jenis Kegiatan				
					Took Ukur	Target	Took Ukur					Target	1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.13.1.13.01.00.30	<b>PROGRAM PEMERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEDIKTERAN SOSIAL (PSKS)</b>	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang meningkatkan kesejahteraan sosial	Bambangliroro Banguntapan Banyuwangi Dinggo Gedongrejo Gondomanan Imogiri Kalasan Kerangmaja Kasihan Mandiropuro Merangpan Minggir Noyudin Nawangan Ngablak Ngampilan Ngawen Nglipar Pajajene Pantjilaban Patiuk Piyungan Purwanegara Purwokerto Sambaluh Sampit Semini Sembelolo Seyegan Sriwedari Tanjungjati Tegalrejo Temon Tirtomulyo Tropos Turi Wadhuharjo Wates Widuharjo Wirobrajan Wonorejo Yogyakarta Banyuwangi Wirobrajan Kali Tirta Kaliwiro Keduharjo Keduharjo Catur Tunggal Condong Catur Tunggal Klaten Nangunan Temuwah Sociomuduran Sugihan Ngupasan Walisari Bumih Martani Tiro Martani Kerangmaja Kasihan Noyudin Tamantri Harjoto Harjoto Mandiropuro Wirobrajan Sondari Sumberejo Jati Sarono Tanjungharjo	70,95% Bimbingan teknis dasar PSK	60 K/120 orang	60 K/120 orang	100%	Rp. 4.496.768.400,00	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 4.496.768.400,00	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Deas Sosial	Sidang Belajar



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial	Jumlah Pagu : Rp. 72.864.222.271,00												
	Nomor	Uraian/Rincian Uraian Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
						Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			SKPD	Jenis Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)	Target (11)	(14)	(15)	
							Penyuluhan sosial melalui media kesenian tradisional	60 Desa					
							Penyuluhan sosial melalui media cetak	1 kegiatan					
							Penyuluhan sosial tingkat desa	30 desa					
							Sosialisasi Program Penanganan PHMS	70 Desa					
							Sosialisasi Program Perindangan dan Jaminan Sosial	720 orang					
							Workshop penyuluhan sosial melalui media seni budaya	1 kegiatan					

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Isi/Idung Urusan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Keterangan							
					Keuaran Kegiatan		Misi Kegiatan	Pagu Indikatif	Prakirana Maju	Jumlah Pagu - Rp. 41.315.967.800,00					
					Target	Took Ukur				Target	1/2/3	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.001	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.001.001	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.001.001.001	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.002	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.002.001	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.002.001.001	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.006	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.007	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.008	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.010	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.011	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.012	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.014	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.015	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.016	Wajib														
1.14.1.14.01.00.01.017	Wajib														

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Indikator Kinerja										Keterangan				
	Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Kebaran Kegiatan			Target	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan
						Took Uthir	Target	Took Uthir	Target	Took Uthir	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.14.1.14.01.00.01.018		Kerjasama Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	8,81%	8,81%	Rp. 259.594.000,00	Rp. 285.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.01.022		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Tersedianya petugas keamanan dan PTT	12 bulan	31,40%	31,40%	Rp. 925.085.000,00	Rp. 1.017.993.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.01.029		Pengelolaan Asip Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Tempelharanya Pubaka 620 M2	620 M2	3,58%	3,58%	Rp. 105.462.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
<b>1.14.1.14.01.00.02</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>									<b>Rp. 5.136.304.000,00</b>	<b>Rp. 5.374.559.000,00</b>			
1.14.1.14.01.00.02.005		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Roda 4	4 Unit	18,17%	18,17%	Rp. 929.585.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.02.007		Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	20 Jenis	7,68 %	7,68 %	Rp. 552.539.000,00	Rp. 607.792.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.02.009		Perbaikan Perakitan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Tersedianya perbaikan gedung kantor	14 Jenis	4,85%	4,85%	Rp. 995.540.000,00	Rp. 1.055.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.02.010		Pengadaan Mebeleur	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Tersedianya mebeleur	21 Jenis	20,03%	20,03%	Rp. 1.024.721.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.02.011		D E D Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Detail engineering design pembangunan gedung kantor	1 paket	0,95 %	0,95 %	Rp. 48.500.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.02.022		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor	18 Jenis	10,81%	10,81%	Rp. 552.539.000,00	Rp. 608.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.02.024		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Tersedianya kendaraan dinas Roda 2 Roda 4 Roda 6	47 Unit/ 16 Unit/ 2 Unit	10,11%	10,11%	Rp. 517.215.000,00	Rp. 568.936.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.02.026		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Tempelharanya perlengkapan gedung kantor	16 Jenis	2,56%	2,56%	Rp. 150.790.000,00	Rp. 143.858.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.02.028		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perakitan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Tempelharanya perakitan gedung kantor	25 Jenis	2,51%	2,51%	Rp. 128.650.000,00	Rp. 141.515.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.02.029		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Tempelharanya mebeleur	3 paket	1,32%	1,32%	Rp. 67.390.000,00	Rp. 74.129.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	
1.14.1.14.01.00.02.036		Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akumulabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Tempelharanya bahan pustaka	1000 Baku	0,19%	0,19%	Rp. 9.845.000,00	Rp. 10.829.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sidang Boplang	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Indikator Kinerja										Keterangan						
	Indikator Kinerja	Kebijakan Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kebijakan Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jumlah Pagu : Rp. 41.315.967.900,00	SKPD	1/2/3	1/2/3	(14)	(15)
Nomor	Urutan/ Bidang Urutan Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program	TARGET	Tolok Ukur	TARGET	Tolok Ukur	TARGET	Tolok Ukur	TARGET	1/2/3	1/2/3	(14)	(15)	
1.14.1.14.01.00.02.042	Rehabilitasi Gedung/Besut Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan terorisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemipglat	Program 01-06	100%	Rehabilitasi gedung besut gedung kantor Rehabilitasi DEE	2 Unit 1 Paket	3,81%	Terpenyehnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur maklur rehabilitasi gedung/ besut gedung kantor	Rp. 195.000.000,00	Rp. 214.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.					
1.14.1.14.01.00.05	<b>PROGRAM Peningkatan Aparatur</b>																
1.14.1.14.01.00.05.007	Rehabilitasi Peningkatan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Kinerja aparatur dan terorisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemipglat	Program 01-06	100%	Penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu	43 orang	9,45%	Memngkatnya sumber daya aparatur maklur pembagian kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu	Rp. 22.160.000,00	Rp. 22.160.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.					
1.14.1.14.01.00.05.022	Pengembangan Kualitas S D M	Kinerja aparatur dan terorisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemipglat	Program 01-06	100%	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM	40 Orang	13,64%	Peningkatan pemahaman aparatur mengenai tugas pokoknya	Rp. 31.391.000,00	Rp. 31.391.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.					
1.14.1.14.01.00.05.033	Pengembangan I S O	Kinerja aparatur dan terorisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemipglat	Program 01-06	100%	Surveilence mutu lembaga	ISO 9001:2008 ISO 17025: 2005	76,92%	Surveilence mutu sesuai standar ISO	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.					
1.14.1.14.01.00.06	<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																
1.14.1.14.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan terorisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemipglat	Program 01-06	100%	Nilai LAKIP SKPD	Nilai LAKIP dan 74,63 menjadi 74,70	3,17%	Memngkatnya prosentase skor laporan sistem pelaporan capaian kinerja	Rp. 19.800.000,00	Rp. 21.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.					
1.14.1.14.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan terorisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemipglat	Program 01-06	100%	Kesempurnaan anggaran kas dengan realisasi anggaran	0 %	4,02%	Kelancaran pelaksanaan pelaksanaan laporan kinerja SKPD	Rp. 27.000.000,00	Rp. 27.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.					
1.14.1.14.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kerja dan Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan terorisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemipglat	Program 01-06	100%	Dokumen program kegiatan dan data informasi ketenagakerjaan	2 Dokumen program kegiatan dan data informasi ketenagakerjaan	38,81%	Memngkatnya prosentase skor laporan sistem pelaporan capaian kinerja serta terdapatnya data informasi ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan	Rp. 242.372.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.					
1.14.1.14.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan terorisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemipglat	Program 01-06	100%	Terevaluasinya program kegiatan SKPD tahun 2017	13 Laporan	54,01%	Memngkatnya prosentase skor laporan program kegiatan SKPD	Rp. 337.330.000,00	Rp. 371.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.					
1.14.1.14.01.00.15	<b>PROGRAM Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja</b>																
1.14.1.14.01.00.15.025	Pelatihan Keterampilan Keleling Moli Training Unit (MTU)	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Hemipglat	Berdasarkan proposal yang masuk	27persen	Lulusan pelatihan yang terampil dan inovatif.	600 orang lulus berpredikat baik	5,81%	Memngkatnya prosentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Rp. 5.695.370.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.					
1.14.1.14.01.00.15.026	Pelatihan Keterampilan Swadana	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Hemipglat	Peserta hasil seleksi	27persen	Lulusan pelatihan yang terampil dan kompeten	280 orang lulus berpredikat baik	2,03%	memngkatnya prosentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Rp. 440.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.					

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 41.315.967.800,00

Nomor	Uraian / Bidang Urusan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Smanan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Kecermatan			
					Hasil Program		Kebaruan Kegiatan				Hasil Kegiatan		SKPD	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.14.1.14.01.00.15.031	Pembudayaan Lembaga Pelatihan Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Prosentase Besar an masyarakat mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	27persen	Prosentase peningkatan pemahaman metodologi redaksi dan penyusunan program	80% 20 orang lulus berpredikat baik	Meningkatnya prosentase masyarakat mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	3,64%	Rp. 94.820.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sesuai Berjalan
1.14.1.14.01.00.15.069	Palatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Peserta hasil seleksi	Prosentase Besar an masyarakat mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	27persen	Lulusan pelatihan yang terampil dan inovatif.	350 orang lulus berpredikat baik (18 ANGGARAN)	meningkatnya prosentase masyarakat mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	4,05%	Rp. 1.616.830.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sesuai Berjalan
1.14.1.14.01.00.15.070	Sertifikasi Uji Kompetensi	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Peserta hasil seleksi	Prosentase Besar an masyarakat mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	27persen	Sertifikasi Uji kompetensi	900 ORANG perwista 390 orang perempuan dan 510 orang laki laki diomod 130 orang ment komputer 60 orang Spa 60 orang komputer 60 orang kult. 60 orang	meningkatnya prosentase masyarakat mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	2,35%	Rp. 1.269.616.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sesuai Berjalan
1.14.1.14.01.00.15.071	Pemagangan Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Peserta hasil seleksi	Prosentase Besar an masyarakat mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	27persen	Pemagangan tenaga kerja	710 orang	meningkatnya prosentase masyarakat mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	5,07%	Rp. 2.746.064.000,00	Rp. 2.800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sesuai Berjalan
1.14.1.14.01.00.15.072	Palatihan Pembentukan wirausaha Baru	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Prosentase Besar an masyarakat mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	27persen	Lulusan pelatihan yang terampil dan kompeten	500 orang/25 akt	Meningkatnya prosentase masyarakat mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	4,05%	Rp. 1.081.362.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sesuai Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Maksud Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Kebijakan Kegiatan					Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	1/2/3	1/2/3
					Hasil Program	Target	Tolok Ukur										
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>	<b>(14)</b>	<b>(15)</b>			
1.14.1.14.01.00.16.022	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Pembangunan Pengantarans Melalui Road Karya Infrastruktur	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase Besar Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penerima Kerja	21,18%	terpaparnya orang yang bekerja	~ 2.10 (sekitar 1340 orang	meningkatkan prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	7,14 %	Rp. 5.255.945.000,00	Rp. 5.800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			
1.14.1.14.01.00.16.024	Pembinaan dan Pengembangan WUB melalui Pendampingan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase Besar Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penerima Kerja	21,18%	terpaparnya orang yang bekerja	400 Orang	meningkatkan prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	0,07 %	Rp. 1.695.295.000,00	Rp. 1.850.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			
1.14.1.14.01.00.16.025	Pembinaan dan Pengembangan WUB melalui Pendampingan (TOMT)	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase Besar Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penerima Kerja	21,18%	Terpaparnya wirausaha baru	1454 15 sasaran (saking komposisi 75 orang	meningkatkan prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	0,45 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 890.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			
1.14.1.14.01.00.16.030	Pemanfaatan Lembaga Penempatan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase Besar Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penerima Kerja	21,18%	Pembinaan lembaga penempatan	300	Meningkatnya prosentase besaran kesempatan kerja	2,65%	Rp. 106.160.000,00	Rp. 107.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			
1.14.1.14.01.00.16.059	Peningkatan Indeks Kompetitivitas dan Daya Saing Kawasan Industri	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase Besar Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penerima Kerja	21,18%	Tercapainya kondisi ketenagakerjaan dan ketenagapenggunaan	13 Juli - Kurjangan website	meningkatkan prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	1,15 %	Rp. 536.120.000,00	Rp. 570.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			
1.14.1.14.01.00.16.066	Koordinasi Pemencanaan Penganggaran Penganggaran dan Kerjasama Antar Riera	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase Besar Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penerima Kerja	21,18%	pedoman perencanaan tenaga kerja daerah lintas sektoral 2017-2022	1 dokumen lintas sektoral kewyahanaan	Meningkatnya prosentase besaran kesempatan kerja	2,02%	Rp. 310.380.000,00	Rp. 325.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			
1.14.1.14.01.00.16.069	Pemanfaatan Perusahaan TKA dan Penyusutan Credit (Neca)	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase Besar Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penerima Kerja	21,18%	Uraian mengenai penggunaan jasa dan TKA dan penyusutan kredit (Neca) penempatan TKA dan Penerima (125 penempatan)	125 Perusahaan	meningkatkan prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	0,12 %	Rp. 69.987.500,00	Rp. 96.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			
1.14.1.14.01.00.16.070	Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	5 kab/kota DIY	Persentase Besar Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penerima Kerja	21,18%	1.Buku laporan IPR 12 ekspor 2.Beritanya 7000 orang pencari dengan 80 perusahaan dan 3000 lowongan	12 edisi	Meningkatnya prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	5,36%	Rp. 496.035.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			
1.14.1.14.01.00.16.078	Koordinasi dan Pemepatan Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase Besar Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penerima Kerja	21,18%	Pemahaman tentang standar kelayakan operasi alat-alat K3	250 orang	Meningkatnya prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	1,5%	Rp. 921.622.000,00	Rp. 925.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			
<b>1.14.1.14.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KETENAGAKERJAAN</b>										<b>Rp. 2.064.789.300,00</b>	<b>Rp. 2.152.000.000,00</b>					
1.14.1.14.01.00.19.001	Pengujian Urut-urutan Kerja	Kesehatan	Herapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	persentase besaran jumlah pelaksanaan yang melaksanakan peraturan perundang di bidang norma kerja dan K3	30,91%	Laporan hasil pengujian Urut-urutan kerja pada perusahaan besar, menengah dan UMKM	150 Perusahaan	Penyediaan Besar, Menengah dan UMKM menjadi penacaban yang layak sehat	11,27%	Rp. 270.210.000,00	Rp. 297.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			
1.14.1.14.01.00.19.004	Pemeriksaan Alat-Alat Pelindungan dan Kesehatan Kerja (K3)	Kesehatan	Herapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	persentase besaran jumlah pelaksanaan yang melaksanakan peraturan perundang di bidang norma kerja dan K3	30,91%	-Pemahaman tentang standar kelayakan operasi alat-alat K3 -Pelayanan terhadap pelaksanaan norma kerja -Pemanan tentang sistem jaminan sosial -Pemahaman terhadap pelaksanaan norma TKS di perusahaan -Pemeriksaan terhadap pelaksanaan norma kerja penempatan di perusahaan -Pemeriksaan terhadap pelaksanaan yang terdaftar BPJS	400 orang	Meningkatnya prosentase besaran kesempatan kerja penacaban peraturan perundang-undangan dibidang norma kerja dan K3	5,35 %	Rp. 370.800.000,00	Rp. 405.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soding Boplang			



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Majalah Kegiatan	Jenis Kegiatan
					Took Uthor (6)	Target (7)	Took Uthor (8)	Target (9)				
1.1.14.1.4.01.00.19.009	Perencanaan dan Pelaksanaan Penyalangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalangan NMPZA di Tempat Kerja	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	30,91% perentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	50% sektor perkebunan, 50% sektor pariwisata	Meningkatnya prosentase besaran perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang norma kerja dan K3	1,34%	Rp. 111.000.000,00	(13)	(14)	Sidang Kepra dan Transmigrasi
1.1.14.1.4.01.00.19.012	Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	30,91% perentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	610 orang 100 UMNK	Kesehatan tenaga kerja pada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada UMNK dan UMNK Meningkatkan	9,59%	Rp. 114.000.000,00			Sidang Kepra dan Transmigrasi
1.14.1.14.01.00.19.013	Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	30,91% perentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	240 orang	Meningkatnya prosentase besaran perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang norma kerja dan K3	13,38%	Rp. 636.979.300,00	Rp. 640.000.000,00		Sidang Kepra dan Transmigrasi
1.14.1.14.01.00.19.015	Perlindungan Tenaga Kerja	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	30,91% perentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	5 penyuluh PRT	Meningkatnya prosentase besaran perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang norma kerja dan K3	2,68%	Rp. 97.805.000,00	Rp. 90.000.000,00		Sidang Kepra dan Transmigrasi
1.14.1.14.01.00.19.017	Pelatihan Hipotesis dan Keselamatan Kerja	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	30,91% perentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	30 peserta lulus	Meningkatnya prosentase besaran perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang norma kerja dan K3	2,68%	Rp. 494.940.000,00	Rp. 495.000.000,00		Sidang Kepra dan Transmigrasi
<b>1.14.1.14.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>					<b>Rp. 1.092.411.000,00</b>			<b>Rp. 1.152.301.000,00</b>			
1.14.1.14.01.00.20.014	Pembinaan Hubungan Industrial	Pertumbuhan Ekonomi	Perdapatnya Masyarakat Meningkat	DIY	8,95% perentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	240 orang 6 Kesepakatan 92 Perusahaan 500 Pekerja/ Buruh 60 %	Meningkatnya prosentase besaran perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang norma kerja dan K3	39,00%	Rp. 483.911.000,00	Rp. 532.301.000,00		Sidang Kepra dan Transmigrasi
1.14.1.14.01.00.20.015	Koordinasi dengan Pengusaha dan Sosialasi bagi tenaga kerja perusahaan	Pertumbuhan Ekonomi	Perdapatnya Masyarakat Meningkat	DIY	8,95% perentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	75 orang	Meningkatnya prosentase besaran penyelesaian hubungan industrial	27,00%	Rp. 470.000.000,00	Rp. 480.000.000,00		Sidang Kepra dan Transmigrasi
1.14.1.14.01.00.20.016	Identifikasi dan Pemetaan Upah Minimum dan Tugasan Hari Raya (THR)	Pertumbuhan Ekonomi	Perdapatnya Masyarakat Meningkat	DIY	8,95% perentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	60 besaran hasil penatausahaan 80 %	Meningkatnya prosentase besaran penyelesaian basis persepsi hubungan industrial	7,00%	Rp. 138.500.000,00	Rp. 140.000.000,00		Sidang Kepra dan Transmigrasi
<b>2</b>	<b>Pilihan</b>											
<b>2.08</b>	<b>KETRANSMIGRASAN</b>											
<b>2.08.1.14.01.00</b>	<b>Diars Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>											
<b>2.08.1.14.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI</b>								<b>Rp. 6.821.289.000,00</b>	<b>Rp. 3.109.901.000,00</b>		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Paju : Rp. 41.315.967.800,00

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Kebijakan Kegiatan			Halil Kegiatan	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target	SKPD	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.1.14.01.00.15.017	Penyelenggaraan Transmigrasi	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Kesejahteraan Peningkatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	8%	Kerjasama Antar Daerah Bidang Ketransmigrasian A/E Bidang Ketransmigrasian Penyelenggaraan Transmigrasi	7 Daerah 7 Daerah 100 KK	Prosentase peningkatan layanan penyelenggaraan transmigrasi	7%	Rp. 6.721.379.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soleng Bojolan
2.08.1.14.01.00.15.018	Pemberdayaan Transmigrasi	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Kesejahteraan Peningkatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	8%	Pengembangan usaha baru ekonomi lokal ring 1	2 kelompok	Prosentase peningkatan layanan penyelenggaraan transmigrasi	1%	Rp. 99.910.000,00	Rp. 109.901.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Soleng Bojolan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif			Jumlah Pagu : Rp. 21.000.000.000,00			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH													
1.15.1.15.01.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah													
1.15.1.15.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS PERKANTORAN													
1.15.1.15.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan Urutansi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengiriman dokumen	20	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,66 %	Rp. 5.480.000,00	Rp. 6.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Colocation server	1 tahun	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	7,84 %	Rp. 94.600.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.003	Penyediaan Jasa Perbaikan Dan Perengajaan Kantor	Kinerja aparatur dan Urutansi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Internet line	1 tahun	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1,21%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Kebutuhan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Buku pembastaran SAKH/STMK kendarah aneak/operasional road 2 dan 4	17 unit	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0,85 %	Rp. 7.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan Urutansi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyedia Jasa Administrasi kewaluan	2 Orang	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	4,29 %	Rp. 35.399.000,00	Rp. 38.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Keberatan Kantor	Kinerja aparatur dan Urutansi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyedia jasa administrasi keuangan	9 orang	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	14,85%	Rp. 122.400.000,00	Rp. 128.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat Tulis kantor	13 jenis	Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran	4,25%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 37.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan Urutansi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Barang Cetakan	7 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	4,85%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 42.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Pemangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyediaan	28.500 br	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,43 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 21.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.014	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perbaikan Rumah Tangga	7 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,21%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Peraturai Perangai Urangan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Buku Perpusakaan	1 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,21%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Nelan dan Minum Sidang	6000 org	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	10%	Rp. 80.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.018	Rapat/Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan Dalam Daerah	1 tahun	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	24,26%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan
1.15.1.15.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Gampak Kerja	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 tahun	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	30,33%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 262.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sidang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Inisiatif/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Masa Pelaksanaan	Keterangan					
					Hasil Program		Kelayakan Kegiatan			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan		
					Took Ukur	Target	Took Ukur						Target	
1.15.1.15.01.00.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.1.15.01.00.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.1.15.01.00.02.005	Penyediaan Kebutuhan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.1.15.01.00.02.007	Pengadaan Perencanaan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.1.15.01.00.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.1.15.01.00.02.010	Pengadaan Meubelur	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.1.15.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.1.15.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebutuhan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.1.15.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perencanaan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.1.15.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Koperasi dan UMKH	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Isu/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keuangan			
					Hasil Program		Kegiatan Kegiatan				Target	Jenis Keluaran	1/2/3	1/2/3
					Target	Took Ukur	Target	Took Ukur						
1.15.1.15.01.00.02.033	Penelitian Riset/Beasiswa Asip Aktif Dan Asip In-Aktif/Statis	Kinerja aparatur dan brokasi	Pemenuhan Daerah Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM	(5)	Kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(7)	(8)	(9)	(11)	(13)	(14)	(15)	
1.15.1.15.01.00.05	<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b> Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulabilitas Daerah Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM	(5)	Tewujudnya peningkatan kinerja aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sumber daya aparatur yg mengikuti diklat / menyangkut	4 orang	100%	Rp. 21.000.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM	Scalng Berjalan	
1.15.1.15.01.00.06	<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b> Pengembangan Data Dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulabilitas Daerah Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM	(5)	Tewujudnya penata usaha kearifan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Website dinas koperasi dan UMKM	1 kali	29,92%	Rp. 75.648.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM	Scalng Berjalan	
1.15.1.15.01.00.06.012	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulabilitas Daerah Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM	(5)	Tewujudnya penata usaha kearifan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	ROPK, Renja, Rencana, RMA-DPA	1 tahun	40,68%	Rp. 102.850.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM	Scalng Berjalan	
1.15.1.15.01.00.06.015	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulabilitas Daerah Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM	(5)	Tewujudnya penata usaha kearifan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Nilai LAKIP SKPD	A	3,98%	Rp. 11.000.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM	Scalng Berjalan	
1.15.1.15.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulabilitas Daerah Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM	(5)	Tewujudnya penata usaha kearifan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kesepakatan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	3%	7,68%	Rp. 19.348.300,00	Dinas Koperasi dan UMKM	Scalng Berjalan	
1.15.1.15.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulabilitas Daerah Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM	(5)	Tewujudnya penata usaha kearifan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100%	17,80 %	Rp. 45.000.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM	Scalng Berjalan	
1.15.1.15.01.00.15	<b>PROGRAM Peningkatan Inklusi Keuangan Yang Berkeadilan</b> Pembinaan Koperasi Kemitraan UMKM	Perumbuhan Ekonomi	Kelembutan Masyarakat Menengah	DIY	(5)	Jumlah UKM (unit usaha)	246.191 unit	Bazar Produk Mitra PLUT	1 tahun	20%	Rp. 1.137.310.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM	Scalng Berjalan	
1.15.1.15.01.00.15.043	Pembinaan Koperasi Kemitraan UMKM	Perumbuhan Ekonomi	Kelembutan Masyarakat Menengah	DIY	(5)	Jumlah UKM (unit usaha)	246.191 unit	Koordinasi Kemitraan bagi UMKM	2 sdt @ 40 UKM		Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM	Scalng Berjalan	
1.15.1.15.01.00.15.045	Peningkatan Pengembangan UMKM	Perumbuhan Ekonomi	Kelembutan Masyarakat Menengah	DIY	(5)	Jumlah UKM (unit usaha)	246.191 unit	Diklat : Kewirausahaan bidang Manajemen berbasis Teknologi Informasi Diklat : Packaging bagi UKM, makanan dan Minuman	7 sdt @ 30 UKM 3 sdt @ 30 UKM	20%	Rp. 1.392.070.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM	Scalng Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Isi/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Kecamatan				
					Hasil Program		Kegiatan Kegiatan				Jenis Kegiatan	SMPD			
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)					1/2/3	1/2/3	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.15.046	Perumbuhan dan Pengembangan Kemitraan Baru	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah UMK (unit usaha)	248.191 unit		Dalat : Administrasi Pembukuan sederhana bagi UMK 2 akt @ 30 UMK Dalat : Manajemen Ekspor bagi UMK 2 akt @ 30 UMK Pesahan Manajamen Usaha bagi UMK Produk Makanan dan Minuman 30 UMK Pesahan Manajamen Usaha bagi UMK Produk Baku 30 UMK Pesahan Manajamen Usaha bagi UMK Produk Perikanan 30 UMK Pesahan Manajamen Usaha bagi UMK Produk Hanyutan 30 UMK	20 akt @ 25 org x 1 h 100 tenant inkubator 1 akt @ 25 org x 4 hr 4 akt @ 25 org x 4 hr 20 UMK x 12 kali 1 tahun 10 akt @ 25 org	Dukung terwujud tercapainya target RPKMD yaitu peningkatan jumlah UMK aktif 4 % dari total 2.449 Koperasi pada tahun 2016 menjadi 2.543 Koperasi pada tahun 2017 (98 Koperasi)	100%	Rp. 1.184.083.500,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Scaling Berjalan
1.15.1.15.01.00.18	<b>PROGRAM PINGGIRAN DAN KEMERDEKAAN KOPERASI</b>	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah Koperasi yang berkualitas	253 Koperasi		Dalat Pengembangan Perikoperasian 900 Koperasi Dikutat Pengembangan Kapasitas Koperasi 2 akt x 50 Koperasi Dikutat Peningkatan Daya saing Koperasi di Bidang Usaha 2 akt x 50 Koperasi Gerakan Memasyarakatkan Koperasi melalui Media TV lokal 1 tahun Partisipasi pameran Hari Koperasi Expo 2017 1 kali Penjualan Koperasi Pasif 1 kali Peningkatan Koperasi 1 kali Pembinaan Kesehatan KSP dan USP Koperasi 1 kali	900 Koperasi 2 akt x 50 Koperasi 20,7%	Dukung terwujud tercapainya target RPKMD yaitu peningkatan jumlah Koperasi aktif 4 % dari total 2.449 Koperasi pada tahun 2016 menjadi 2.543 Koperasi pada tahun 2017 (98 Koperasi)	20%	Rp. 1.874.120.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Scaling Berjalan
1.15.1.15.01.00.18.038	Penggiatan Koperasi Perikoperasian	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah Koperasi yang berkualitas	253 Koperasi		Dikutat Pengembangan Perikoperasian 900 Koperasi Dikutat Pengembangan Kapasitas Koperasi 2 akt x 50 Koperasi Dikutat Peningkatan Daya saing Koperasi di Bidang Usaha 2 akt x 50 Koperasi Gerakan Memasyarakatkan Koperasi melalui Media TV lokal 1 tahun Partisipasi pameran Hari Koperasi Expo 2017 1 kali Penjualan Koperasi Pasif 1 kali Peningkatan Koperasi 1 kali Pembinaan Kesehatan KSP dan USP Koperasi 1 kali	900 Koperasi 2 akt x 50 Koperasi 20,7%	Dukung terwujud tercapainya target RPKMD yaitu peningkatan jumlah Koperasi aktif 4 % dari total 2.449 Koperasi pada tahun 2016 menjadi 2.543 Koperasi pada tahun 2017 (98 Koperasi)	20,7%	Rp. 733.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Scaling Berjalan
1.15.1.15.01.00.19	<b>PROGRAM PINGGIRAN PERMODALAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL</b>	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah Koperasi Perenerima Dana Bergulir	45 Koperasi		Bretek Manajemen Pengelolaan penerima dana bergulir 3 Akt @ 30 Orang FCD Evaluasi Kredit Usaha Rakyat 3 H x 30 Org Pendampingan dan Monor Koperasi penerima Dana Bergulir 200 koperasi	3 Akt @ 30 Orang 20%	Dukung terwujud tercapainya target RPKMD yaitu peningkatan jumlah UMK aktif 4 % dari total 2.449 Koperasi pada tahun 2016 menjadi 2.543 Koperasi pada tahun 2017 (9.946 UJ)	20%	Rp. 6.580.000.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Menengah	Scaling Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 21.000.000.000,00

Nomor	Maksud/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			SKPD	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	(12)	(13)	(14)	(15)
						(7)	(8)	(9)	(11)			
							Bentuk Laporan Keuangan UMK/UM, org	3 Akt x 30 org				
							Bentuk Pengembangan bagi UMK, org	3 Akt x 30 org				
							Bentuk Penajaban bagi UMK/UM, org	3 Akt x 30 org				
							Bentuk Penajaban Proposal /Study kelayakan kredit perbankan	2 Akt @ 3 hari				
							Dana bergulir , 50 Koperasi x Rp. 100.000.000	50 Koperasi				
							Diklat Akuntansi Pemerima Dana Bergulir,	3 angklaban@ 30 orang x 5 hr				
							Realisasi Hasil/Beraca Pemodalan Wirausaha (KUR) dan UKM mendukung Sinfra Usaha (@ Rp. 25 juta )	20 WP				
							Moner Fasilitas Pemodalan WP Terant	1 kali				
							Pelatihan Kewirausahaan bagi WP Terant penerima hibah	3 Akt x 30 org x 5 hr				
							Pelatihan Manajemen Pengembangan Usaha UMK/OT penerima program KUR	3 Akt x 30 org x 5 hr				
							Pendampingan oleh KKMB	5 orang x 10 bin				
							Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat ( KUR )	2 hr x 50 org				
							Sosialisasi Penyakutan dana bergulir kepada Koperasi di DIY	100 orang				
							Workshop Monevsi Kewirausahaan bagi WP penerima hibah	2 hr x 30 org				
							Workshop Pembayaan Program PKB - SBMKN	4 sdt.				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Meju	Keterangan				
					Hasil Program	Keuangan Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan			
						Tokol Ukur	Target					Tokol Ukur	Target	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.16	<b>PENANAMAN MODAL</b>													
1.16.1.16.01.00	<b>Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.</b>													
1.16.1.16.01.00.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>													
1.16.1.16.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Banguntapan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Surat keluar 2. Surat masuk 3. Paket pengiriman dokumen	3900 surat 2400 surat 95 paket	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0,52	Rp. 4.000.000,00	Rp. 942.794.620,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pembayaran tagihan internet 2. Pembayaran tagihan telepon 3. Pembayaran tagihan listrik 4. Pembayaran tagihan TV Kabel 1 sambungan	20 Mbps 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	17,08%	Rp. 137.538.500,00	Rp. 135.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Kelembagaan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Kebersihan gedung kantor 2. Perbaikan instalasi listrik dan rod 4 (5 unit)	11 orang	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0,64%	Rp. 6.368.000,00	Rp. 7.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Kebersihan gedung kantor 2. Perbaikan instalasi listrik dan rod 4 (5 unit)	11 orang	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	3,63%	Rp. 30.393.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Kebersihan gedung kantor 2. Perbaikan instalasi listrik dan rod 4 (5 unit)	12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	8,54%	Rp. 78.665.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Banguntapan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	40 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	4,59%	Rp. 37.661.250,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Barang cetakan 2. Pengandaian dokumen 3. perijinan dokumen	5 jenis 14000 lembar 100 buah	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	3,78%	Rp. 31.885.060,00	Rp. 32.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	komponen instalasi listrik bangunan kantor	20 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	2,65%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 26.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.014	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perawatan rumah tangga	25 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0,93%	Rp. 8.789.660,00	Rp. 8.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perundang-undangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat Kabar	3 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0,59%	Rp. 5.534.100,00	Rp. 5.500.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. makan dan minum capel 2. Makan dan minum kecil tamu	2.800 orang 150 orang	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	4,74%	Rp. 44.660.000,00	Rp. 45.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan
1.16.1.16.01.00.01.018	Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Perjamuan makan dan minum tamu 2. Makan dan minum kecil tamu 3. Jamuan makan dan minum tamu	50 orang 1 tahun	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	40,49%	Rp. 381.700.000,00	Rp. 390.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sesuai Berjalan



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Utama Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saarasan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Target (11)	Jenis SKPD	1/2/3	(14)	(15)
					Tolok Ukur (6)	Target (7)	Tolok Ukur (8)	Target (9)							
1.16.1.16.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (gedung kerja)	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	2. Pelebaran dinas luar daerah	1 tahun				Modul				
1.16.1.16.01.00.01.029	Pengembangan Aspek Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Terwujudnya administrasi kearsyafan yang kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 tahun	Jasa keamanan kantor/tempat kerja	Rp. 143.128.000,00	Rp. 145.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	15,18%			
1.16.1.16.01.00.01.029	Pengembangan Aspek Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Terwujudnya administrasi kearsyafan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	15 macam/jenis	perlebaran/abat penangan ansp jumlah ansp pejabat yang ditangani	Rp. 7.662.050,00	Rp. 7.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	0,81%			
<b>1.16.1.16.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PERINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>								<b>Rp. 2.333.834.180,00</b>	<b>Rp. 609.000.000,00</b>					
1.16.1.16.01.00.02.005	Pengalihan Kandang Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Meningkatnya sarana prasarana kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	4 unit	kendaraan dinas roda 4 (Empat)	Rp. 645.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	23,64%			
1.16.1.16.01.00.02.007	Pengalihan Pergelangan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	4 jenis	Pergelangan Gedung kantor	Rp. 138.800.000,00	Rp. 140.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	10,01%			
1.16.1.16.01.00.02.009	Pengalihan Peralihan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3 jenis	Peralatan gedung kantor	Rp. 42.500.000,00	Rp. 45.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	3,07%			
1.16.1.16.01.00.02.010	Pengalihan Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2 jenis	Meubeler	Rp. 125.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	9,02%			
1.16.1.16.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3 jenis	perleengkapan gedung kantor	Rp. 190.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	13,70%			
1.16.1.16.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kandang Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2 jenis	kegiatan diinasoperasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	Rp. 108.696.500,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	7,72%			
1.16.1.16.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pergelangan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3 jenis	perleengkapan gedung kantor terpelihara	Rp. 55.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	3,68%			
1.16.1.16.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	4 jenis	peralatan gedung kantor terpelihara	Rp. 13.200.000,00	Rp. 14.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	0,88%			
1.16.1.16.01.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	4 jenis	meubeler terpelihara	Rp. 12.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	0,80%			
1.16.1.16.01.00.02.042	Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 unit	rehabilitasi gedung kantor	Rp. 1.003.617.680,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	51,17%			
<b>1.16.1.16.01.00.06</b>	<b>PROGRAM PERINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMERDEKAAN KEUANGAN</b>								<b>Rp. 86.190.000,00</b>	<b>Rp. 95.751.250,00</b>					
1.16.1.16.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Terwujudnya upaya usaha keagungan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	A= 756,885	Nilai LAKIP SKPD	Rp. 3.630.000,00	Rp. 4.840.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	4,29%			
1.16.1.16.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Terwujudnya upaya usaha keagungan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	keesajaingan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	Rp. 12.860.000,00	Rp. 12.200.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	25,37%			
1.16.1.16.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Menggigit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	100% Terwujudnya upaya usaha keagungan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 dokumen	1. Rencana BAPM DTY Tahun 2018-2022	Rp. 56.700.000,00	Rp. 69.711.250,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	58,66%			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Praktekan Maju	Ketenangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			SMPD	1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target
1.16.1.16.01.00.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur Wilayah dan brokasi	AKUNTA BILAS KEMERJAAN BERSAMA SAMA MELAKUKAKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAERAH MELINGKAR	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	SKPD	2. DPA BKM DIY 2017 3. ROK BKM DIY 2017 4. RAK BKM DIY 2018 5. Revisi BKM DIY 2018	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen					
1.16.1.16.01.00.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>											
1.16.1.16.01.00.15.022	Promosi Potensi Investasi	Pembangunan Wilayah dan pengembangan infrastruktur	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal		1. promosi investasi	4 event	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan Nilai Investasi (RPMD) tahun 2017	Rp. 2.682.799.900,00	Rp. 2.700.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	
1.16.1.16.01.00.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI</b>											
1.16.1.16.01.00.16.034	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pembangunan Wilayah dan pengembangan infrastruktur	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal		1. Pembinaan, pengawasan dan Penangan Pemfasilitas Penanaman Modal 2. Penanaman dan pengawasan Kegiatan Penanaman Modal 3. Review Masterplan Kawasan Industri Pyurungan	50 perusahaan, 2 kali 25 perusahaan, 3 kali 1 (satu) Dokumen	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan Nilai Investasi (RPMD) tahun 2015	Rp. 880.875.700,00	Rp. 940.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	
1.16.1.16.01.00.16.035	Penyediaan Data Potensi Investasi	Pembangunan Wilayah dan pengembangan infrastruktur	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal		1. DGD Jalan Masuk KI Pyurungan- level galangan 2. Review Masterplan Kawasan Industri Pyurungan 3. Pengembangan dan Pengolahan Database pada Website "Jogja Invest"	1 (satu) dokumen kajian 1 (satu) kerben	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan Nilai Investasi (RPMD) tahun 2017	Rp. 185.000.000,00	Rp. 190.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	
1.20	<b>OTONOMI DAERAH; PERHANTARAN WILAYAH; PERKEMBANGAN DAERAH; PANGKALAN KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>											
1.20.1.16.01.00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal											
1.20.1.16.01.00.88	<b>PROGRAM KERJASAMA ANTAR PERHANTAI DAERAH</b>											
1.20.1.16.01.00.88.010	Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Pembangunan Wilayah dan pengembangan infrastruktur	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal		1. riset kerja teknis kabupaten/kota 2. sosialisasi kerjasama daerah 3. rapat kerja teknis kerjasama dalam negeri 4. monitoring dan evaluasi kerjasama dalam negeri 5. hospitality mitra dan calon mitra kerjasama luar negeri 6. monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri 7. forum interdag dan muu kerjasama luar negeri 8. penanganun kerjasama luar negeri	1 kali 5 kali/ota dan skop 4 kali 1 kali 7 mtra 2 kali 1 muu 6 negara	Dukungan terhadap pencapaian target persentase kerjasama yang ditandatangani ke dalam perjanjian kerjasama sebesar 75%	Rp. 1.510.354.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Jumlah Pagu : Rp. 35.856.400.000,00	Keterangan					
						Hasil Program		Hasil Kegiatan			Pagu Indikator	Praktekan Maju	Jenis Kegiatan		
						Target	Tolok Ukur	Target						Tolok Ukur	Target
1	1.20	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.16.02.00	1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.001	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Paket Pengiriman Surat Keluar	1200	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	1,88 %	Rp. 25.200.000,00	Rp. 25.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.002	1.20.1.16.02.00.01.002	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembayaran bagian rekening internet 100 Mbps	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	18,83	Rp. 150.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.006	1.20.1.16.02.00.01.006	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembayaran bagian rekening listrik	12 bulan					Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.007	1.20.1.16.02.00.01.007	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Buku pembayaran Pajak/STNK kendaraan bermotor roda 4 yang rusak waktu	120 DB	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	2,93 %	Rp. 21.400.000,00	Rp. 26.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.008	1.20.1.16.02.00.01.008	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebutuhan Gedung Kantor	4,67m <sup>2</sup>	Kemudahan Pelayanan Administrasi pemerintahan	5,65 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.010	1.20.1.16.02.00.01.010	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	59 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	6,50 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.011	1.20.1.16.02.00.01.011	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Barang ceblakan	15 Jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	18,83 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.012	1.20.1.16.02.00.01.012	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Barang pengendalian	75000 lembar	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	2,51 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 27.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.014	1.20.1.16.02.00.01.014	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perbaikan tempat bangku, alat dan bahan kebersihan	12 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	1,88 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.015	1.20.1.16.02.00.01.015	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	buku kepastaban	20 buku	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	1,19 %	Rp. 9.500.000,00	Rp. 11.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.017	1.20.1.16.02.00.01.017	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	suati kabar	4 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan				Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.018	1.20.1.16.02.00.01.018	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	hidangan tamu	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	5,9 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.021	1.20.1.16.02.00.01.021	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Makan minum rapat	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	26,89	Rp. 225.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.022	1.20.1.16.02.00.01.022	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	konsumsi & koordinasi luar daerah	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan				Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.022	1.20.1.16.02.00.01.022	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Buku pembayaran honorarium pengabdian keagamaan	2 orang/bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	0,56 %	Rp. 4.800.000,00	Rp. 0,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan
1.20.1.16.02.00.01	1.20.1.16.02.00.01.022	1.20.1.16.02.00.01.022	Kerja aparatur dan brokuras	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	7,90 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Soding Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu - Rp. 35.856.400.000,00					
	Nomor	Uraian/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Keukuran Kegiatan			Hasil Kegiatan	Pagu Indikatorif	Prokiraan Maju	Ketepatan	
						Tolok Ukur (6)	TARGET (7)	Tolok Ukur (8)	TARGET (9)	Tolok Ukur (10)					TARGET (11)	SKPD
1.20.11.16.02.00.01.029	Pengembangan Asap Dinamis SKPD	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Perfeksipapan/dari pengurangan asap	20 jenis	0,25%	Kelancaran Pelayanan Administrasi perijinan	(13)	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANAM DAN PASARANAPARATUR</b>															
1.20.11.16.02.00.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Gedung Kantor PPTSP	4000m2	89,06%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) terenuhi	(12)	Rp. 28.100.000.000,00	Rp. 0,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	2 unit	1,48%	Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	(12)	Rp. 470.000.000,00	Rp. 515.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Perfeksipapan gedung kantor	4 jenis	6,47%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perengkapan gedung kantor) terpenuhi	(12)	Rp. 150.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.02.009	Pengalihan Peralihan Gedung Kantor	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Peralihan gedung kantor	10 jenis	1,10%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralihan gedung kantor) terpenuhi	(12)	Rp. 350.000.000,00	Rp. 420.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.02.010	Pengalihan Meubeler	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Meubeler	7 jenis	7,46%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (meubeler) terpenuhi	(12)	Rp. 2.355.000.000,00	Rp. 0,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Gedung kantor terpelihara	3 Jenis	0,05%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	(12)	Rp. 20.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Kendaraan dinas/generasional terpelihara (kendaraan roda 2)	4 Unit	0,25%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	(12)	Rp. 85.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Kendaraan dinas/generasional terpelihara (kendaraan roda 4)	3 Unit	0,022%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perengkapan gedung kantor) terpenuhi	(12)	Rp. 7.000.000,00	Rp. 9.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralihan Gedung Kantor	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	peralihan gedung kantor terpelihara	4 Jenis	0,025%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralihan gedung kantor) terpenuhi	(12)	Rp. 5.800.000,00	Rp. 10.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	meubeler/pemeliharaan meubeler, kursi	6 Jenis	0,015%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (meubeler) terpenuhi	(12)	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>															
1.20.11.16.02.00.05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	sumber daya aparatur yg mengkur diklat meningkatkan kemampuannya	12 orang	100%	Kapasitas Sumber daya aparatur bertambah/meningkat	(12)	Rp. 130.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN REKUNING</b>															
1.20.11.16.02.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Nilai A	Nilai A	4,16%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	(12)	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	keseluruhan anggaran bas dengan realisasi anggaran SKPD	5%	20,83%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	(12)	Rp. 31.000.000,00	Rp. 31.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	DPA	1 tahun	62,5%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	(12)	Rp. 75.000.000,00	Rp. 76.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	Kesesuaian antara target dengan realisasi program kegiatan	95%	12,5%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	(12)	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	
1.20.11.16.02.00.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN</b>															
1.20.11.16.02.00.04.001	koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kegiatan aparatur dan brokars	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5)	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	100%	dukumen, Inleksi, Kejuwaan Masyarakat	2 dukumen	45,45%	kepuasan pelayanan perizinan	(12)	Rp. 2.200.000.000,00	Rp. 2.600.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Probleman Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keukuran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Jenis Kegiatan	1/2/3	(15)	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.20.1.16.02.00.84.002	Penyusunan Standar dan Prosedur Perizinan	Kecaja aparatur dan brokrasi	Mutakhiritas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Satu Pintu	Persentase waktu penyelesaian dokumen perijinan terhadap SOP	100%	dokumen management plan PTSP	1 dokumen			Rp. 850.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Salah	
1.20.1.16.02.00.84.003	Publikasi Perizinan	Kecaja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Persentase waktu penyelesaian dokumen perijinan terhadap SOP	100%	Aplikasi izin online	15 aplikasi	Madirikan pelayanan perizinan	38,63 %			Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Salah	
<b>1.20.1.16.02.00.85</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN</b>										<b>Rp. 1.000.000.000,00</b>	<b>Rp. 2.000.000.000,00</b>			
1.20.1.16.02.00.85.001	Pelayanan Klinik dan Adhoc/asi Perizinan	Kecaja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Persentase jumlah aduan yang dapat diselesaikan	100%	aplikasi data potensi dan posisi izin online	1 aplikasi	terselenggarakannya masalah pengaduan	50 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Salah	
1.20.1.16.02.00.85.002	Penyusunan Standar dan Prosedur Pengaduan	Kecaja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Neningkat	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Persentase jumlah aduan yang dapat diselesaikan	100%	pelayanan konsultasi pengaduan	35 aduan					Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Salah	
							pelayanan konsultasi pengaduan perizinan	30 perusahaan							
							Aplikasi sistem pengaduan online, penanganan pengaduan, fasilitas masalah perizinan	1 aplikasi	kelancaran penanganan dan penyelesaian pengaduan	50 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Salah	
							Rapergub maklamlame pengaduan	1 rapergub							
							SK Gubernur	1 SK Gubernur							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan	Indikator Kinerja										Keterangan				
	Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prestasi Kinerja	Jenis Kegiatan	
						Took Uluur	Target	Took Uluur	Target	Took Uluur	Target				
1	1.17.11.701.00.01	Wajib			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17	1.17.11.701.00.01	KEBUDAYAAN													
1.17.11.701.00.01	1.17.11.701.00.01	Dinas Kebudayaan													
1.17.11.701.00.01.001	1.17.11.701.00.01.001	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTORAN													
1.17.11.701.00.01.001	1.17.11.701.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Metral	100	Kelancaran Administrasi Pemerintahan	100 %	Rp. 5.230.000,00	Rp. 6.083.550,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.002	1.17.11.701.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat Kabar	100	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Rp. 12.986.350.000,00	Rp. 1.493.110.250,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.006	1.17.11.701.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan tahunan relenging tepalon 3 sambungan 2. Pemeliharaan tahunan relenging tepalon 105.000 VA 3. Pemeliharaan Relenging Air 4. Pemeliharaan Hoisting 3 domain	12 bulan	Kelancaran administrasi pemerintahan	100%	Rp. 25.520.000,00	Rp. 29.359.550,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.008	1.17.11.701.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Buku pembayaran pajak /STNK kendaraan roda 2, 4 dan 6 yang tepat waktu.	18 unit	Kelancaran administrasi pemerintahan	100%	Rp. 1.700.000,00	Rp. 1.700.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.010	1.17.11.701.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	49 jenis	Kelancaran pelayanan Administrasi pemerintahan	100%	Rp. 105.160.163,00	Rp. 120.934,87	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.011	1.17.11.701.00.01.011	Penyediaan Barang Cetak Dan Pengandaan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Binang Cetakan 2. Pengandaan	16 macam	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	100%	Rp. 69.464.600,00	Rp. 79.284,250,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.012	1.17.11.701.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	2. Pengandaan 37 Jenis komponen instalasi penerangan bangunan kantor	37 Jenis	Kelancaran pelayanan Administrasi pemerintahan	100%	Rp. 136.683.125,00	Rp. 150.283.554,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.015	1.17.11.701.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perangko-Usahan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Buku keputakaan Majalah	4 Jenis	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	100 %	Rp. 16.123.000,00	Rp. 18.541.450,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.016	1.17.11.701.00.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Jenis 2. Jenis	16 Jenis	Kelancaran administrasi perkantor	100%	Rp. 27.769.235,00	Rp. 27.334.620,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.017	1.17.11.701.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bendera Bendera Merah Putih Koridor bang perumdam Kabupaten Umbul-umbul	25 buah 25 buah 40 m 52 buah	Kelancaran Pelayanan Administrasi pemerintahan	100%	Rp. 143.520.000,00	Rp. 165.048,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.018	1.17.11.701.00.01.018	Rapat Rajat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Makan dan minuman sidang	1460	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 tahun	Rp. 283.800.000,00	Rp. 300.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.01.022	1.17.11.701.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung Kantor/Kepa	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Kebudayaan	Temujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jasa keamanan kantor / tempat kerja	14 Orang dalam 1 tahun	Kelancaran dan kenyamanan kantor	100%	Rp. 711.690.150,00	Rp. 81.844.362,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.02	1.17.11.701.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Mengapainya sarana prasarana, aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		4 unit	Kelancaran sarana prasarana aparatur ( penlitan gedung kantor terpusuh )	100%	Rp. 1.042.84.977,00	Rp. 1.070.000.001,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.02.005	1.17.11.701.00.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Mengapainya sarana prasarana, aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengadaan Sepeda Motor	4 unit	Kelancaran sarana prasarana aparatur ( penlitan gedung kantor terpusuh )	100%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.11.701.00.02.009	1.17.11.701.00.02.009	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Mengapainya sarana prasarana, aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	100%	Kelancaran sarana prasarana aparatur ( penlitan gedung kantor terpusuh )	100%	Rp. 277.872.977,00	Rp. 300.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sumber Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indiatif	Meterangan					
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Praktiran Maju		SKPD	Jenis Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Tolok Ukur	Target	(9)	Target	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	100%	Kondisi Dinas operasional terpelihara (kendaraan nos 2, nos 4 terpenuhi)	9 jenis	9 jenis	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi.	100%	Rp. 355.802.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelelangan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	100%	Mengoptimalkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Pemeliharaan gedung kantor	9 jenis	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (pelelangan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 226.800.000,00	Rp. 235.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	100%	Mengoptimalkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Perawatan gedung kantor terpelihara dengan baik	10 jenis	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perawatan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 76.060.000,00	Rp. 85.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	100%	Mengoptimalkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Pemeliharaan Meubeler	1. 85 bh 2. 315 bh 3. 48 bh 4. 32 bh 5. Almeri 5. Brangkas	100%	Kebutuhan pemeliharaan meubeler terpenuhi	100%	Rp. 44.280.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
<b>1.17.1.17.01.00.06</b>	<b>PROGRAM PENGINGKATAN PENGEHANGAN SISTEM PELAPORAN CAJAPAN KEMERDA DAN KEUANGAN</b>											<b>Rp. 488.834.750,00</b>	<b>Rp. 585.000.000,00</b>		
1.17.1.17.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	100%	Tewujudnya perantara usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah Dana	9.648.400	4 dokumen	Evaluasi Renstra, LKIP, Konsep LMP, Konsep LPD SKPD	4	Rp. 5.648.400,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Umbulharjo	100%	Tewujudnya perantara usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah Perbaikan : Jumlah SDM	4 Komputer 4 orang	100 %	Laporan Keuangan SKPD	100 %	Rp. 92.894.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	100%	Tewujudnya perantara usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah Dana	352.966.150	100%	Terdapatnya Dokumen RMA - DPA, Renstra, Statistik Budaya	100%	Rp. 352.966.150,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengikat	Program 01-06	100%	Tewujudnya perantara usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah Perbaikan : Jumlah SDM	4 set 4 orang	100%	Kelancaran pelaksanaan Program Kinerja SKPD	100%	Rp. 43.396.200,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 7.233.790.000,00				
	Nomor	Usus/Bidang Usuan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saarun Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kekayaan Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatorif	Prakiraan Moju	Keterangan	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1		Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19	KESETUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI														
1.19.1.19.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
1.19.1.19.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS PERKANTORAN														
1.19.1.19.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	1. Surat Keluar	500 surat	Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	0,42%			Rp. 6.000.000,00	Rp. 7.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komersial Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	2. Surat Masuk 3. Pengiriman dokumen 4. Meterai	500 surat 50 surat 600 meterai								
1.19.1.19.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas/Operasional	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	1. Pembayaran tagihan rekening telepon 3 sambungan 2. Pembayaran tagihan rekening listrik 41.500 VA 3. Pembayaran tagihan Web Hosting 4. Pembayaran layanan Internet via tagihan Modem	3 x 12 bulan 1 x 12 bulan 1 x 12 bulan 1 x 12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	19,6 %			Rp. 175.000.000,00	Rp. 200.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	1. Jasa KIR Kendaraan Roda 4 (mobil) 2. STNK kendaraan roda 2 (motor) dan roda 4	1 unit 10 unit dan 9 unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,46%			Rp. 10.000.000,00	Rp. 12.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Keberahan Kantor	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	Buku pembayaran Honorarium Pengabdian Keuangan, Barang dan Kesepawaan	13 orang 10 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,25%			Rp. 30.000.000,00	Rp. 32.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.01.00.01.009	Penyediaan Jasa Pembuatan Perakitan Kerja	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	Kebersihan Gedung Kantor, 1 (satu) lokasi	3 unit, 10 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	11,23%			Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	Peralatan Kerja Kantor dalam kondisi baik	35 jenis 12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	9,82%			Rp. 90.000.000,00	Rp. 100.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.01.00.01.011	Penyediaan Barang Cakupan Penggandaan	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	Tersedianya Alat-alat Kantor	40 jenis 12 bulan	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	4,63%			Rp. 55.000.000,00	Rp. 65.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	Komponen Instalasi Listrik	60.000 lembar	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,87%			Rp. 30.000.000,00	Rp. 35.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perangai Urangan	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	Surat Kabar, Majalah	4 jenis 12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,70%			Rp. 20.000.000,00	Rp. 23.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	1. Makanan dan minuman lembur	250 orang lembar 11 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	100%			Rp. 35.000.000,00	Rp. 38.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.1.19.01.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	2. Makanan dan minuman rapat 1. Perjalanan Dalam Daerah	2.000 orang 3 Bidang 15 sekretariat	Mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Batsabangpol DTY	31,85%			Rp. 300.000.000,00	Rp. 425.000.000,00		Sesuai Kesatuan Bangsa dan Politik



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Suaras Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indiatif	Prokiraan Maju	Keragaman			
					Hasil Program	Took Uluur	Kuluan Kegiatan	Took Uluur			Target	SKPD	1/2/3	
														Target
1.19.1.19.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (7)	100%	1 tahun	Keamanan dan keamanan kantor	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>1.19.1.19.01.00.02</b>	<b>PROGRAM Peningkatan SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>													
1.19.1.19.01.00.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	2 unit	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.19.1.19.01.00.02.007	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	3 unit	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.19.1.19.01.00.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	8 unit	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.19.1.19.01.00.02.010	Pengadaan Meubelur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	20 unit	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.19.1.19.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	1 paket	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.19.1.19.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala (Kendaraan Dinas/Operasional)	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	9 kendaraan	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.19.1.19.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	1 paket	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.19.1.19.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralihan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	8 jenis	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.19.1.19.01.00.02.032	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	1 paket	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.19.1.19.01.00.02.042	Rehabilitasi Gedung/Bangun Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	2 unit	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>1.19.1.19.01.00.05</b>	<b>PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>													
1.19.1.19.01.00.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Hemingglot	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5)	Target (6)	100%	60 orang	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Suaras Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu Indiatif	Prokiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program	Target	Took Uthor	Kuluan Kegiatan	Haal Kegiatan		Took Uthor			Target	Jenis Kegiatan	SKPD	1/2/3
									Target	(9)							
1.19.1.19.01.00.05.011	Pembinaan Korpis Hukuk Peranda D I Y	(3)	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meninggat	(5)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(6)	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(7)	100%	(8)	Meningkatkan kemampuan Anggota Korpis	38 orang	(9)	15,15%	(14)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Scalng Berjalan
1.19.1.19.01.00.05.012	Publkasi Medle Cetak Dan Elektronik	Kinerja aparatur dan brokral	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meninggat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Spanduk 2. Buku Saku 3. Banner 4. Leaflet 5. Kalendar	10 buah 2.000 buah 5 buah 2.000 buah	100%	Tersebarnya informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Scalng Berjalan		
1.19.1.19.01.00.05.024	Pengembangan Teknologi Informasi	Kinerja aparatur dan brokral	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meninggat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pengembangan Website/pembuatan aplikasi 2. Pengolahan Website Badan Kesabnggol 3. 1 Data Bidang Kesabnggol 4. 1 dokumen 5. 1 paket	1 tahun 1 tahun 1 tahun	100%	Meningkatnya Sistem Informasi	100%	Rp. 120.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Scalng Berjalan		
1.19.1.19.01.00.05.069	Uphala Data Bidang Kesabnggol	Kinerja aparatur dan brokral	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meninggat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. 2. Sistem Aplikasi Online Bidang Kesabnggol Kabi/Kota dan Stakeholder/Mira Mitra	1 tahun	100%	Bahan kaji/ajian untuk mendukung capaian program	100%	Rp. 105.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Scalng Berjalan		
1.19.1.19.01.00.06	<b>PRO GRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEBUD DAN KEUANGAN</b>												<b>Rp. 233.000.000,00</b>	<b>Rp. 257.500.000,00</b>			
1.19.1.19.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokral	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meninggat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya penata usaha program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	LAMP, Konsep L07, Konsep LPD dan e-SALP	4 dokumen	100%	Bahan kaji/ajian perencanaan dan pendukung capaian program	100%	Rp. 11.000.000,00	Rp. 12.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Scalng Berjalan		
1.19.1.19.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokral	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meninggat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencatatan kinerja yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Bidang/ Fungsional 2. Laporan pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Bidang/ Fungsional 3. Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Administratif 4. Laporan Realisasi Semestian dan Prognosis 5. Laporan Keuangan Tahunan	12 bulan 12 bulan 1 laporan 1 laporan	100%	Terpenuhnya Realisasi Anggaran untuk mendukung capaian program	100%	Rp. 27.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Scalng Berjalan		
1.19.1.19.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program dan Informasi Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokral	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meninggat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya penata usaha program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Rencana Kerja (REKJA) Tahun 2018 2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018 (ARPD dan DMS) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 (ARPD dan DMS) 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Tahun 2016 5. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) Tahun 2016 6. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 7. Perjanjian Kinerja	20 buku 31 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku	100%	Ketersediaan dan pendukung untuk mendukung capaian program	100%	Rp. 140.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Scalng Berjalan		
1.19.1.19.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokral	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meninggat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencatatan kinerja yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Laporan Monev Bulanan (ARPD dan DMS) 2. Laporan Monev Triwulan (ARPD dan DMS) 3. Laporan Monev Semestian (ARPD dan DMS)	12 laporan 4 laporan 2 laporan	100%	Mendukung capaian program	100%	Rp. 55.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Scalng Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Suaras Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target	Masa Pelaksanaan	Jumlah Pagu : Rp. 2.233.700.000,00	Keterangan			
					Hasil Program		Hasil Kegiatan				Prokiraan Maju	SKPD	1/2/3	
					Target	Took Uthor	Target							Took Uthor
1.19.1.19.01.00.18	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGHANGKARAN WAWASAN KEBANGSAAN</b> Koordinasi Forum Kemitzan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6%	Penurunan aktifitas radikalisme dan separatisme	100 %	Deteksi dini dan cegah dini berkembangnya aktivitas radikalisme dan separatisme	Rp. 1.620.000.000,00	(13)	(14)	(15)		
1.19.1.19.01.00.18.024	Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	6%	Penurunan aktifitas radikalisme dan separatisme	100%	Penggiatan Pemahaman dan Penguatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Bagi Warga Masyarakat	Rp. 850.000.000,00					
1.19.1.19.01.00.21	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b> Pembudayaan Pesta Politik	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	2%	Indeks Aspek Politik Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber data: Laporan Tahunan dan Potensi Konflik di DIY)	(1) 1. paket (9 Parpol) (2) BINTEK Pengorganisasian Keunggulan Parpol (3) 1. paket (9 laporan	100%	1. Tesulaynya Baranang Parpol 2. meningkatnya akurabilitas pengabdian bantuan keuangan kepada Parpol	Rp. 1.700.000.000,00				
1.19.1.19.01.00.21.025	Pendidikan Politik Bagi Perempuahan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2%	Indeks Aspek Politik Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber data: Laporan Tahunan dan Potensi Konflik di DIY)	100%	Meningkatnya akurabilitas pengabdian bantuan keuangan kepada Parpol	Rp. 250.000.000,00					
1.19.1.19.01.00.23	<b>PROGRAM KEWASPADAN PERUMAHAN MASYARAKAT</b> Penyenggaraan Pelayanan dan Pendidikan Ormas	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,15%	Indeks Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber data: Laporan Tahunan dan Potensi Konflik di DIY)	100%	Terdapat administrasi/edukasi dini terhadap organisasi di wilayah Kecamatan	Rp. 250.000.000,00					
1.19.1.19.01.00.23.018	Pengawasan dan Koordinasi Kemandirian Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Masyarakat	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	0,15%	Indeks Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber data: Laporan Tahunan dan Potensi Konflik di DIY)	12 bulan	Meminimalisir penyalahgunaan dokumen jin tinggal di wilayah perbatasan	Rp. 350.000.000,00					
1.19.1.19.01.00.23.020	Penyelenggaraan Kethanahan Seni, Budaya, Agama, dan Komunitas	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,15%	Indeks Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber data: Laporan Tahunan dan Potensi Konflik di DIY)	100%	Meningkatnya kesatuan dan persatuan serta rasa cinta tanah air melalui seni budaya Sibang Peradatu	Rp. 175.235.200,00					
1.19.1.19.01.00.23.021	Pendataan, Identifikasi, Verifikasi dan Inventarisasi Orsopod dan Ormas di DIY	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,15%	Indeks Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber data: Laporan Tahunan dan Potensi Konflik di DIY)	100%	Terdapatnya Data Ormas dan LSM yang terverifikasi	Rp. 55.000.000,00					
1.19.1.19.01.00.23.023	Koordinasi Penyelenggaraan PGN	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,15%	Indeks Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber data: Laporan Tahunan dan Potensi Konflik di DIY)	100%	Meminimalisir bertambahnya narasoba & sat aktif	Rp. 350.000.000,00					
1.19.1.19.01.00.23.024	Penyelenggaraan Opa Kondusif Daerah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,15%	Indeks Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber data: Laporan Tahunan dan Potensi Konflik di DIY)	(1) 3 laporan (2) 3 Laporan	(1) Meminimalisir dan mengantisipasi Potensi Konflik Sosial di DIY	Rp. 800.000.000,00					

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ridang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Siaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indiatif		Prakiraan Maju		Keterangan			
					Hasil Program		Hasil Kegiatan		Pagu	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan			
					Teuk Ukur	Target	Teuk Ukur	Target			1/2/3	1/2/3		
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.01.00.23.025	Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial		Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah Meninggkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Aspek Identitas Dalam Kerangka Disiplin dan Peta Perubahan Sosial dan Petensi Konflik di DDT	0.15%	Terselenggaranya kegiatan pengembangan & pembinaan ketahanan ekonomi dan sosial ( 1 laporan )	100 %	Optimalisasi peran masyarakat guna mendukung pembangunan	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Belanja Pegawai, Belanja Bahan dan Politik	Soaling Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nomor	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif			Keterangan			
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Target	Target	Target	Target	Target	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.02.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	pengiriman dokumen yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi STPD	12 bulan	0.53	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 5.500.000,00	Rp. 6.600.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Pembayaran tagihan internet	12 bulan	7.91 %	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 375.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan (Kendaraan dan/atau Pesawat)	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan	3.69 %	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 35.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Buku pembayaran honor pengabdian keuangannya, barang dan kesegawaan waktu	13 orang, 12 bulan	3.16 %	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 36.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.008	Penyediaan Jasa Keberhasilan Kantor	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Jasa kebersihan kantor	34200 m2	9.49 %	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 120.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Alat tulis kantor	52 jenis	4.25%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 46.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	1. Barang cetakan 2. Penggandaan	1. 15 jenis 2. 182.200 jenis	4.22%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 42.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis	0.79 %	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 10.000.000,00	Rp. 12.500.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.013	Penyediaan Perabotan Dan Perlengkapan Kantor	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Peralatan rumah tangga	5 jenis	0.53%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Peralatan/Unit/Bagian	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	1. sarat kabar/majalah 2. nederens bedinan 3. buku kepebaksaan	1. 12 bulan 2. 4 paket 3. 5 jenis	0.98%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 12.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Makan dan minum sedang	5830 orang	6.86%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 70.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	1. Perjalanan dinas dalam daerah 1. Perjalanan dinas luar daerah	1 tahun 1 tahun	31.65%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 320.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Jasa keamanan kantor	13 orang, 13 bulan	25.84%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 282.000.000,00	Rp. 285.000.000,00	Satuan Polisi Pemong Praja	Sedang Berjalan	
1.19.1.19.02.00.02	<b>PROGRAM Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>									<b>Rp. 2.335.000.000,00</b>	<b>Rp. 1.462.500.000,00</b>			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 9.340.200.000,00				
	Nomor	Uraian/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saasran Daerah	Lokasi	Haal Program			Keluaran Kegiatan			Pagu Indikatorif	Pondasi Maju	Jenis Kegiatan	
						Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur				Target
1.19.1.19.02.00.02.005	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.02.00.02.007															
1.19.1.19.02.00.02.009															
1.19.1.19.02.00.02.010															
1.19.1.19.02.00.02.024															
1.19.1.19.02.00.02.026															
1.19.1.19.02.00.02.028															
1.19.1.19.02.00.02.042															
1.19.1.19.02.00.03		<b>PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur</b>											<b>Rp. 300.000.000,00</b>		
1.19.1.19.02.00.03.002		Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Peningkatannya	Kerja aparatur dan brokasi	Akutabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Tengulahnya perangkat disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 jenis	Kelancaran Peningkatan disiplin aparatur	100%		Rp. 300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Soding Berjalan
1.19.1.19.02.00.05		<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>											<b>Rp. 1.205.000.000,00</b>		
1.19.1.19.02.00.05.022		Pengembangan Kualitas S D M	Kerja aparatur dan brokasi	Akutabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Satuan Balai Pamong Praja	Tengulahnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Forum komunikasi PDI PP 2. Bincak SOP/Prosedur PDI PP 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4 kali 3 jenis 3 jenis	Kapasitas Sumberdaya aparatur bertambah/meningkat	40%		Rp. 440.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Soding Berjalan
1.19.1.19.02.00.05.073		Pembinaan Etik bagi PDI	Kerja aparatur dan brokasi	Akutabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Satuan Balai Pamong Praja	Tengulahnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Upacara Peringatan HUT PDI PP 2. Pembinaan etos kerja bagi anggota PDI PP dan bagi PDI PP 3. Pembinaan Etik dan Integritas	1 kali 4 angketan 12 bulan	Kapasitas Sumberdaya aparatur bertambah/meningkat	60%		Rp. 765.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Soding Berjalan
1.19.1.19.02.00.06		<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											<b>Rp. 520.000.000,00</b>		
1.19.1.19.02.00.06.012		Pengembangan Data dan Informasi	Kerja aparatur dan brokasi	Akutabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Tengulahnya penata usaha keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Data dan Informasi SAIIP PP DIT yang tersedia	1 sistem	Kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja SKPD	20%		Rp. 400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Soding Berjalan
1.19.1.19.02.00.06.016		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kerja aparatur dan brokasi	Akutabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Tengulahnya penata usaha keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Nilai LKIP SKPD	B	Kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4%		Rp. 10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Soding Berjalan
1.19.1.19.02.00.06.017		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kerja aparatur dan brokasi	Akutabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Tengulahnya penata usaha keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keseragaman anggaran kis dengan realisasi anggaran SKPD	20%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10%		Rp. 10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Soding Berjalan
1.19.1.19.02.00.06.018		Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kerja aparatur dan brokasi	Akutabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Tengulahnya penata usaha keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dokumen perencanaan program kerja SKPD	12 bulan	Kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja SKPD	50%		Rp. 60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Soding Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Pola/Maju	Jenis Kegiatan		
					Haal Program	Keluaran Kegiatan	Haal Kegiatan	Target	Tingkat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Tingkat Uraian (6)	Target (7)	Took Uraian (8)	Target (9)	Took Uraian (10)	Target (11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.02.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Penyediaan wilayah rawan gangguan tbum tramas yang terintegrasi	100%	Keserasan antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	80%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Suatu Polisi Pemomong Praja	
<b>1.19.1.19.02.00.16</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETERIBAN UMUM DAN KEBERAMAN MASYARAKAT SERTA PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>										<b>Rp. 550.000.000,00</b>	<b>Rp. 600.000.000,00</b>		
1.19.1.19.02.00.16.056	Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	Pembekalan wilayah rawan gangguan tbum tramas yang terintegrasi	35%	1. Meningkatnya penanganan paket 2. Meningkatnya sergokan petugas 3. Tersedianya data dan informasi 4. Pengawasan kadar minuman beralkohol yang beredar di tempat yang berangsur-angsur 3 bulan sekali 5. Draft Peta tentang Prostitusi 1 draft	100 kali	Mendukung peningkatan gangguan keamanan masyarakat yang terintegrasi	30%	Rp. 550.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Suatu Polisi Pemomong Praja	
<b>1.19.1.19.02.00.25</b>	<b>PROGRAM PENGEMASAN PERDA DAN PERKADA</b>										<b>Rp. 1.720.000.000,00</b>	<b>Rp. 1.825.000.000,00</b>		
1.19.1.19.02.00.25.001	Optimalisasi Kinerja PNS	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	Peningkatan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terintegrasi	25%	1. Penyelenggaraan Sekretariat PNS 2. Forum koordinasi PNS 3. Bincak PNS 4. Numusan kebijakan terkait kinerja PNS	12 bulan	Mendukung peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang terintegrasi	20%	Rp. 170.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Suatu Polisi Pemomong Praja	
1.19.1.19.02.00.25.004	Operasi Yess! dan Non Yess! Bagi Masyarakat Pengantar Perda/Perkada	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	Peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang terintegrasi	25%	1. Mengidentifikasi Penanganan Perda dan Perkada di tingkat jabatan 2. Menetapkan jadwal dan kalender Perda melalui Operasi Yess! 3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Perda melalui 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Perda melalui 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Perda melalui	48 kali	Meningkatnya penanganan Perda dan Perkada yang terintegrasi	50%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 425.000.000,00	Suatu Polisi Pemomong Praja	
1.19.1.19.02.00.25.005	Pengembangan Budaya Seder, Perubahan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	Peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang terintegrasi	25%	1. Mengidentifikasi Kelelahan Informasi dalam Bentuk Publikasi 2. Mengidentifikasi Kelelahan Informasi dalam Bentuk Publikasi 3. Mengidentifikasi Kelelahan Informasi dalam Bentuk Publikasi 4. Mengidentifikasi Kelelahan Informasi dalam Bentuk Publikasi 5. Mengidentifikasi Kelelahan Informasi dalam Bentuk Publikasi	3 jenis	Mendukung Peningkatan Kelelahan terhadap Perda dan Perkada	30%	Rp. 575.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Suatu Polisi Pemomong Praja	
1.19.1.19.02.00.25.006	Pembentukan dan Pengembangan Kader pengkaji Perda dan Perkada	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	Peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang terintegrasi	25%	1. Terbentuknya Kader Pengkaji Perda dan Perkada 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui kajian strategi baik, berupa Pengaj, dan print poster Pengkaji di DIY	16 desa	Mendukung Peningkatan Kelelahan terhadap Perda dan Perkada	30%	Rp. 575.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Suatu Polisi Pemomong Praja	
<b>1.19.1.19.02.00.27</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETERIBAN UMUM DAN KEBERAMAN MASYARAKAT SERTA PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>										<b>Rp. 1.320.000.000,00</b>	<b>Rp. 1.640.000.000,00</b>		
1.19.1.19.02.00.27.002	Penanganan Gejala Sosial Masyarakat	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	Pembekalan wilayah rawan gangguan tbum tramas yang terintegrasi	35%	1. Laporan deteksi dini gejala sosial masyarakat 2. Forum komunikasi antar petugas dan mitra terkait dalam penanganan gejala sosial masyarakat 3. Pengendalian gejala sosial masyarakat	5 laporan	Mendukung peningkatan gangguan keamanan masyarakat yang terintegrasi	13%	Rp. 220.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Suatu Polisi Pemomong Praja	
1.19.1.19.02.00.27.003	Penyenggaraan dan pemeliharaan keteribatan umum dan keberaman masyarakat	Kerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	Pembekalan wilayah rawan gangguan tbum tramas yang terintegrasi	35%	1. Forum koordinasi petugas dan mitra dalam pengendalian tbum tramas 2. Operasi tbum tramas 3. Petrol pengendalian tbum tramas	4 kali	Mendukung peningkatan gangguan keamanan masyarakat yang terintegrasi	40%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Suatu Polisi Pemomong Praja	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja		Intelektor Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 9.340.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Pola/ran Maju	Jenis Kegiatan	
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)	Target (11)				
1.19.1.19.02.00.27.005	Pengamanan Aset Pemda DIY	Kinerja aparatur dan birokrasi	Aluntablitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	Persentase wilayah rawan gangguan bumi tramsas yang tertangani	35%	4. Prosep bumi tramsas	1. Pemantauan aset Pemda DIY	12 bulan	Mendukung peningkatan gangguan keamanan ketertarikan masyarakat yang tertangani	20%	Rp. 400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sodang Berjalan
1.19.1.19.02.00.27.006	Perencanaan dan Penyelenggaraan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Aluntablitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	Persentase wilayah rawan gangguan bumi tramsas yang tertangani	35%	Perencanaan dan Penyelenggaraan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah	2. Penyelenggaraan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan	Mendukung peningkatan gangguan ketertarikan umum dan keselamatan masyarakat yang tertangani	5%	Rp. 120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sodang Berjalan
1.19.1.19.02.00.27.007	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah DIY dan kegiatan masyarakat	Kinerja aparatur dan birokrasi	Aluntablitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	DIY	Persentase wilayah rawan gangguan bumi tramsas yang tertangani	35%	Terciptanya pengamanan kegiatan Pemda pada hari besar dan sosial kemasyarakatan	15 event	Mendukung peningkatan gangguan ketertarikan umum dan keselamatan masyarakat yang tertangani	5%	Rp. 120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sodang Berjalan	



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Daerah		Jumlah Pagu : Rp. 121.590.000,00										
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Meju	Keenerangan	
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Prakiraan Meju			Jenis Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	(14)	(15)
1	Wajib											
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UNIK, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PEMBANGKIT DAERAH, KEPAGAWAIAN, DAN PERSANDUAN											
1.20.1.20.03.00	Sekretariat Daerah											
1.20.1.20.03.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											
1.20.1.20.03.00.02.007	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Avantabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danurajin	Memperkuat sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perolehan gedung kantor	1 jenis (perengkapan gedung kantor)	Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi	100%	Rp. 0,00	Sekeloaat Daerah
1.20.1.20.03.00.02.009	Pengadaan Peralaban Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Avantabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danurajin	Memperkuat sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralaban gedung kantor	8 jenis	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralaban gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 116.590.000,00	Sekeloaat Daerah

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan	Jumlah Pagu - Rp. 643.276.000,00													
	Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatorif	Pembekalan Mula	Keterangan			
						Hasil Program	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan			SKPD	Jenis Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20	Wajib													
1.20.1.20.03.10	OTONOMI DAERAH, PEMERTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEMANGAN DAERAH, KEMERDEKAAN BERKUALITAS, KEMERDEKAAN BERKEadilan, KEPENGARUHAN, DAN PERSANDUAN	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Surat-keluar	100 surat	100%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 1.450.000,00	Rp. 1.450.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Surat Masuk	150 surat	100%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.961.000,00	Rp. 5.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Bulet Pembayaran Huru-huru: Kebutuhan anggaran operasional barang, antara lain: perlengkapan	9 orang	100%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 23.639.000,00	Rp. 24.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	19 jenis	100%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 6.459.000,00	Rp. 7.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Tersedianya barang cetakan	6 jenis	100%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 4.717.000,00	Rp. 5.500.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Tersedianya pengandaan	5.000 lembar	100%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.596.000,00	Rp. 0,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	10 jenis	100%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 7.312.000,00	Rp. 7.500.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Danarajan	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Bahan referensi	2 jenis	100%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 24.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Surat-keluar	3 SH	100%	Kelancaran tugas-tugas koordinasi di Asisten Keistimewaan	100%	Rp. 76.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DY dan Luar DY	Tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Terkelompokan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan	100%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 4.125.000,00	Rp. 5.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.02	<b>PROGRAM Peningkatan Sarana Dan Pemasaran Aparatur</b>	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	R4 = 1 unit	100%	100%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	Rp. 252.595.000,00	Rp. 280.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Perengkapan gedung kantor	2 jenis	100%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 11.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.02.007	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Danarajan	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Peralatan gedung kantor	10 jenis	100%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 131.090.000,00	Rp. 135.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat	R 2 = 2 unit R 4 = 1 unit	100%	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas operasional) terpenuhi	100%	Rp. 69.880.000,00	Rp. 75.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Peralatan gedung kantor	3 jenis	100%	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 4.250.000,00	Rp. 5.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Peralatan gedung kantor terpelihara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3 jenis	100%	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 4.125.000,00	Rp. 5.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Nilai LAKP SKPD	65 sd 75	100%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 2.995.000,00	Rp. 3.500.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.06	<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya pemantauan usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kelembagaan anggarannya bas dengan format laporan SKPD	10%	100%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan	100%	Rp. 3.708.000,00	Rp. 4.800.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya pemantauan usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kelembagaan anggarannya bas dengan format laporan SKPD	10%	100%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan	100%	Rp. 3.708.000,00	Rp. 4.800.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan
1.20.1.20.03.10.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akunabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tercapainya pemantauan usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Kelembagaan anggarannya bas dengan format laporan SKPD	10%	100%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan	100%	Rp. 3.708.000,00	Rp. 4.800.000,00	Asisten Keistimewaan	Sidang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Took Ukur	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.2.0.03.10.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi	Memngikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Memngikat	Sekretariat Daerah	mendukung yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Tewujudnya penata usaha leuagan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Laporan RKT, RKA, DPA, ROKK	12 bulan	100%	SKPD Keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan SKPD	Rp. 7.046.000,00	Rp. 8.500.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Beljaan
1.201.2.0.03.10.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Memngikat	Sekretariat Daerah	Tewujudnya penata usaha leuagan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	90%	Keberhasilan pelaksanaan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi SKPD	100%	Rp. 7.663.000,00	Rp. 8.500.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Beljaan

Jumlah Pagu : Rp. 643.276.000,00

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan / Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sastraan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Materi Kegiatan	Pagu Indikatif	Pekiranan Maju	Jumlah Pagu : Rp. 6.667.354.500,00				
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Kecurangan				
					Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur					SIPD	1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL														
1.10.1.20.03.01	Biro Tata Pemerintahan														
1.10.1.20.03.01.16	PROGRAM PAKTIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
1.10.1.20.03.01.16.001	Pembangunan Dan Penguasaan S.I.A K Secara Terpadu	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Hemat	DIY	Perentase Pemertaban data/KTP-el ganda	50%	Pengadaan hardware jaringan komunikasi database dan dokumentasi ansip.	100 %	Tertentunya database kependudukan	Rp. 1.514.700.000,00	Rp. 1.774.820.000,00				
1.10.1.20.03.01.16.009	Pembangunan Kapasitas Pengelola Database Kependudukan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Hemat	DIY	Perentase Pemertaban data/KTP-el ganda	50%	Biaya tenaga bagi petugas pemelihara database kependudukan di kab/kota dan provinsi	100 %	Mendapatkan kualitas pengelolaan database kependudukan di kab/kota se-DIY dan provinsi	Rp. 283.650.000,00	Rp. 340.380.000,00	Biro Tata Pemerintahan			
1.10.1.20.03.01.16.035	Penyelesaian Transmigrasi Pencatatan Sipil	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Daerah Hemat	DIY	Perentase Pemertaban data/KTP-el ganda	50%	Teridentifikasi permasalahan pencatatan sipi ( dalamrevisi...)	100 %	Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipi	Rp. 58.000.000,00	Rp. 69.600.000,00	Biro Tata Pemerintahan			
1.10.1.20.03.01.16.038	Koordinasi Penyusunan Profil Pengembangan Penduduk	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Daerah Hemat	DIY	Perentase Pemertaban data/KTP-el ganda	50%	Perubahan buku profil kependudukan berstandar nasional sesuai permendagri No. 65 tahun 2010	100 %	Terperluhnya kebutuhan informasi kependudukan yang komprehensif untuk kependudukan di DIY bagi instansi	Rp. 70.000.000,00	Rp. 84.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan			
1.10.1.20.03.01.16.045	Kajian Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Daerah Hemat	DIY	Perentase Pemertaban data/KTP-el ganda	50%	Terselesaikannya data agregat kependudukan DIY secara online	100 %	Terselesaikannya pelaksanaan KIA di DIY	Rp. 235.000.000,00	Rp. 230.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan			
1.10.1.20.03.01.16.046	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kepemilikan Aka Pencatatan Sipil	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Daerah Hemat	DIY	Perentase Pemertaban data/KTP-el ganda	50%	Terwujudnya grand design terkait dengan jenis dan ledakan demografi kependudukan	100 %	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pengembangan KIA di DIY	Rp. 227.350.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan			
1.10.1.20.03.01.16.047	Pembangunan Sistem Informasi Kependudukan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Daerah Hemat	DIY	Perentase Pemertaban data/KTP-el ganda	50%	Terrealisasi libat Muahkota nikah bagi penduduk miskin	100 %	Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipi dalam rangka tertib administrasi kependudukan	Rp. 408.840.000,00	Rp. 408.840.000,00	Biro Tata Pemerintahan			
1.10.1.20.03.01.16.048	Koordinasi dan Sinkronisasi Dukungan Tertib Administrasi Kependudukan DIY	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Daerah Hemat	DIY	Perentase Pemertaban data/KTP-el ganda	50%	Terselesaikannya 7% dokumen kependudukan penduduk di kabupaten dan 15% SOPN bagi TA yang ditempatkan di luar negeri	100 %	Terselesaikannya dokumen kependudukan (7) bagi penduduk tetap adminok, TNI	Rp. 275.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan			
1.20	OTONOT DAERAH, PERHATIHAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPENGAWALAN, DAN PERSANDIAN														
1.20.1.20.03.01	Biro Tata Pemerintahan														
1.20.1.20.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH														
1.20.1.20.03.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Hemat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang berkualitas luas dan tepat	100%	Jasa Pengiriman	26 paket	Kelancaran pelayanan administrasi perantara	Rp. 6.000.000,00	Rp. 478.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Jenis Kegiatan	
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)			Took Ukur (10)	Target (11)	SKPD	1/2/3
1.201.2.03.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terdapatnya administrasi kearsifan yang kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Matera 3000	500 lembar	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
1.201.2.03.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terdapatnya administrasi perantaraan yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Matera 6000	300 lembar	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
1.201.2.03.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terdapatnya administrasi perantaraan yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Perangko	300 lembar	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
1.201.2.03.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terdapatnya administrasi perantaraan yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Barang Cetak	7 Jenis	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
1.201.2.03.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terdapatnya administrasi perantaraan yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengendalian	108.827 lembar	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
1.201.2.03.01.01.013	Penyediaan Perabotan Dan Peningkatan Kantor	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terdapatnya administrasi perantaraan yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Perbaikan	150 buah	Rp. 11.500.000,00	Rp. 11.500.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
1.201.2.03.01.01.014	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terdapatnya administrasi perantaraan yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Perbaikan	11 tabung	Rp. 2.332.000,00	Rp. 2.332.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
1.201.2.03.01.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perundang-undangan	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terdapatnya administrasi perantaraan yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Buku Perpustakaan	7 Jenis	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
1.201.2.03.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terdapatnya administrasi perantaraan yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat Kabar (Kedaulatan Rakyat)	12 bulan	Rp. 18.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
1.201.2.03.01.01.018	Rapat/Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terdapatnya administrasi perantaraan yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Makanan dan minuman rapat	1 tahun	Rp. 45.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
<b>1.201.2.03.01.02</b>	<b>PROGRAM PENTINGATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>								<b>Rp. 961.179.500,00</b>	<b>Rp. 660.000.000,00</b>				
1.201.2.03.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Memgantinya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan operasional	1 buah	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		
1.201.2.03.01.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kelembagaan dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Memgantinya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	100%	AC	4 unit	Rp. 189.500.000,00	Rp. 190.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ridang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Jumlah Pagu : Rp. 6.697.354.500,00		Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Target	Prakiraan Maju		Anies Kegiatan	
					Took Ukur	Target	Took Ukur	Target						1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.2.0.03.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan aparatur birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor	1 paket	Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi	22,47 %	Rp. 216.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.2.0.03.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan aparatur birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terselenggaranya kendaraan dinas/operasional roda 2(dua)	8 unit	Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	17,69 %	Rp. 170.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.2.0.03.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan aparatur birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terselenggaranya kendaraan dinas/operasional roda 4 unit	4 unit	Terselenggaranya kendaraan dinas/operasional roda 4 unit		Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.2.0.03.01.02.032	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	Kinerja aparatur dan aparatur birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terselenggaranya web site Biro Tata Pemerintahan	1 paket	Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (perumahan website) terpenuhi	3,5 %	Rp. 33.627.500,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.2.0.03.01.02.042	Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan aparatur birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Ruang rapat Biro Tata Pemerintahan	1 unit	Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (ruang rapat) terpenuhi	6,98 %	Rp. 67.052.000,00	Rp. 0,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.2.0.03.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUBERDAYA APARATUR</b>										<b>Rp. 50.000.000,00</b>	<b>Rp. 50.000.000,00</b>		
1.201.2.0.03.01.05.010	Pengelolaan Webpage Resmi Bagi Aparatur	Kinerja aparatur dan aparatur birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terdapatnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Termasuknya aparatur Biro Tata Pemerintahan	1 paket	Tercapainya peningkatan sumber daya/aparatur	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.2.0.03.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERFORMANSI SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>Rp. 46.531.000,00</b>	<b>Rp. 46.531.000,00</b>		
1.201.2.0.03.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan aparatur birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terdapatnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Nilai laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2016	B	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	8,7 %	Rp. 4.025.000,00	Rp. 4.025.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.2.0.03.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan aparatur birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terdapatnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Laporan pertanggungjawaban bendahara pelaksanaan pembantu SP Belanja Fungsional	12 laporan	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	15,5 %	Rp. 7.250.000,00	Rp. 7.250.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.2.0.03.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan aparatur birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terdapatnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017	1 dokumen	Kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Biro	63,7 %	Rp. 29.676.000,00	Rp. 29.676.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Jumlah Pagu : Rp. 6.697.354.500,00		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Prakiraan Maju	Keterangan	
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)			Took Ukur (10)	Target (11)
1.201.2.0.03.01.28.019	Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	(13)	(14)	(15)	
1.201.2.0.03.01.28.005	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penganggaran Anggaran APBD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	DIY	80% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	Rp. 5.560.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan	
1.201.2.0.03.01.28.002	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penganggaran Anggaran APBD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	DIY	80% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	Rp. 5.560.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan	
1.201.2.0.03.01.28.003	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penganggaran Anggaran APBD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	DIY	80% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	Rp. 5.560.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan	
1.201.2.0.03.01.28.015	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penganggaran Anggaran APBD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	DIY	80% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	Rp. 5.560.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan	
1.201.2.0.03.01.28.016	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penganggaran Anggaran APBD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	DIY	80% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	Rp. 5.560.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan	
1.201.2.0.03.01.28.019	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penganggaran Anggaran APBD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	DIY	80% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	Rp. 5.560.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan	
1.201.2.0.03.01.28.020	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penganggaran Anggaran APBD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	DIY	80% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	Rp. 5.560.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan	
1.201.2.0.03.01.28.022	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penganggaran Anggaran APBD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	DIY	80% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	Rp. 5.560.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan	
1.201.2.0.03.01.28.023	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penganggaran Anggaran APBD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	DIY	80% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	Rp. 5.560.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan	
1.201.2.0.03.01.28.024	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penganggaran Anggaran APBD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Meningkatkan	DIY	80% Terselenggaranya semua kegiatan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung tercapainya target SKPD	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	1 dokumen	Rp. 5.560.000,00	Rp. 5.560.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ridang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Biaya	Keterangan				
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			Jenis Kegiatan	SKPD			
												Target	Took Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.1.20.03.01.28.025	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	80% Perentase Jumlah kebijakan yang merespon dinikmati penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.	100% Tersusunnya rekomendasi terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa	Bahan perumusan kebijakan pemenggalan pemerintahan desa, menggalanya kinerja BPD dan menggalanya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Rp. 180.000.000,00	Rp. 207.000.000,00	3 %	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 207.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.1.20.03.01.28.026	Penataan Wilayah Perbatasan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	80% Perentase Jumlah kebijakan yang merespon dinikmati penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.	100% Menciptanya terlembaga administrasi antara DIY - Jateng	Meningkatnya pemahaman aparatur Pembdes tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 325.182.000,00	Rp. 325.182.000,00	5 %	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 325.182.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.1.20.03.01.28.027	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Pemerintahan Umum	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	80% Perentase Jumlah kebijakan yang merespon dinikmati penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.	100% Rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan umum (2 rekomendasi)	Tersusunnya rekomendasi atau kebijakan pemecahan masalah pemerintahan umum	Rp. 100.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	2 %	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 120.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.1.20.03.01.28.028	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Unsur Pemerintahan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	80% Perentase Jumlah kebijakan yang merespon dinikmati penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.	100% Tersusunnya rekomendasi atau kebijakan pemecahan urusan pemerintahan di DIY	Kelengkapan dan ketepatan penerapan unsur pemerintahan	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	4 %	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.1.20.03.01.28.029	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	80% Perentase Jumlah kebijakan yang merespon dinikmati penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.	100% Tertinggalnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Temontomnya Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 2.550.000.000,00	Rp. 2.932.500.000,00	40 %	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 2.932.500.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan
1.201.1.20.03.01.28.030	Penetapan NSPK	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	80% Perentase Jumlah kebijakan yang merespon dinikmati penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.	100% Terfasilitasinya/identifikasi/kelaksamanya peraturan perundang-undangan pelaksanaan urusan pemerintahan	Terfasilitasinya Penerapan NSPK Unsur pemerintahan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	1,3 %	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 100.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sidang Berjalan



Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum	Jumlah Pagu : Rp. 6.177.000.000,00														
	Nomor	Unsur/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Isi Kegiatan	Pagu Indikatif	Prokranja Maju	Jenis Kegiatan	Kecamatan		
Hasil Program						Target	Took Ukur	Target						Took Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	1.20	Wajib													
	1.20.1.20.03.02.01	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN													
	1.20.1.20.03.02.01.001	PROGAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN													
	1.20.1.20.03.02.01.001	Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Pengiriman Dokumen Paket	15 buah	Mendukung Kelancaran Tugas Kantor	100%	Rp. 2.490.000,00	Rp. 2.490.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Surat Masuk	2.000 surat							
	1.20.1.20.03.02.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan 4 yang tepat waktu	8 unit kendaraan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantara	1,20%	Rp. 3.800.000,00	Rp. 4.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.01.009	Penyediaan Jasa Pembalikan Perakitan Kerja	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Temujustifikasi administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	12 orang/bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantara	6,28%	Rp. 26.220.000,00	Rp. 28.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Temujustifikasi administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	40 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantara	6,07%	Rp. 26.425.000,00	Rp. 27.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Temujustifikasi administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	22.000 lembar	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantara	6,70%	Rp. 39.856.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Temujustifikasi administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	12 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantara	9,58%	Rp. 44.355.000,00	Rp. 45.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Temujustifikasi administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantara	3,83%	Rp. 16.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Temujustifikasi administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 jenis							
	1.20.1.20.03.02.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Temujustifikasi administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	4 orang	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perantara	4,79%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.880.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.02	PROGRAM PERSANGAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
	1.20.1.20.03.02.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Mengelapnya sarana prasarana apatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 unit	Kebutuhan Sarana dan Prasana Aparatur	35,86	Rp. 205.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.02.007	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Mengelapnya sarana prasarana apatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	6 unit	Kebutuhan Sarana dan Prasana Aparatur	14,64	Rp. 74.056.000,00	Rp. 75.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.02.009	Pengadaan Peralihan Gedung Kantor	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Mengelapnya sarana prasarana apatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 unit	Kebutuhan Sarana dan Prasana Aparatur	16,75	Rp. 86.880.000,00	Rp. 80.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	
	1.20.1.20.03.02.02.010	Pengadaan Meubeler	Kejurja aparatur dan brokrasi	Kejurja aparatur dan brokrasi	Program 01-06	100%	Mengelapnya sarana prasarana apatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	8 unit	Kebutuhan sarana dan prasana apatur	16,75	Rp. 500,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 6.127.000.000,00									
	Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Pagu Indikatif	Prakteeran Maju	Keterangan						
						Tolok Ukur (6)	Target (7)	Target (9)	Tolok Ukur (8)	Target (10)	Target (11)			SKPD	1/2/3	1/2/3				
1.201.1.20.03.02.02.022	(2)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	(3)	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan	(5)	Program 01-06	(6)	Memodifikasi sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	(7)	100%	(9)	3 buah	(10)	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	(11)	0,72%	(13)	Rp. 4.300.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.201.1.20.03.02.02.024		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		Memodifikasi sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%		8 unit		Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional terpenuhi		20,45		Rp. 110.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.201.1.20.03.02.02.033		Pemeliharaan Rutin/Berkala Asip AKH Dan Asip In-Aktif/Status		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		Memodifikasi sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%		1 tahun		Kebutuhan pemeliharaan asip terpenuhi		4,48%		Rp. 20.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.201.1.20.03.02.02.036		Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		Memodifikasi sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%		720 m <sup>3</sup>		Kebutuhan pemeliharaan ruang publik dan utilitas terpuisi		7,10%		Rp. 43.200.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
<b>1.201.1.20.03.02.06</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>															<b>Rp. 41.374.000,00</b>			
1.201.1.20.03.02.06.016		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		Tenulidjyo peraba usaha keuang dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%		B		Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		4,94%		Rp. 2.330.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.201.1.20.03.02.06.017		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		Tenulidjyo peraba usaha keuang dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%		3%		Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		9,88%		Rp. 5.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.201.1.20.03.02.06.018		Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		Tenulidjyo peraba usaha keuang dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%		1 tahun		Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD		79,01%		Rp. 32.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.201.1.20.03.02.06.019		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		Program 01-06		Tenulidjyo peraba usaha keuang dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%		100%		Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		6,17%		Rp. 2.500.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
<b>1.201.1.20.03.02.26</b>		<b>PROGRAM POKOKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>															<b>Rp. 1.991.936.000,00</b>	<b>Rp. 2.130.000.000,00</b>		
1.201.1.20.03.02.26.010		Penyediaan Dan Pengembangan Bahan Dokumentasi Dan Informasi Hukum		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		DDY		Penyediaan catatan produk hukum yang terakreditasi		100%		1 kali		Tertifikasinya Produk Hukum		100%		Rp. 627.046.100,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.201.1.20.03.02.26.028		Legalisasi Rancangan Produk Hukum Daerah		Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkatkan		DDY		Pemosis nancangan produk hukum yang terakreditasi		100%		5 kali		Terinformasinya Produk Hukum		100%		Rp. 700.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum	Jumlah Pagu : Rp. 6.127.000.000,00															
	Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakteeran Maju	Keterangan				
						Tokol Ukur (6)	Target (7)	Tokol Ukur (8)	Target (9)			Tokol Ukur (10)	Target (11)	SKPD	Jenis Kegiatan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.201.1.2010.02.26-029	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	Kinerja aparatur dan pejabat daerah	Akuntabilitas Kerja Pemintah Daerah Negeri	Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Keturunan dan Perkhidmatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Publik Kantor Pemukiman Kantor Perwakilan Daerah Daerah Lingsung Ie Masyarakat PPRO Program 01-06 Program 01-07 RS Fauz Rospita Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Pampara Praja	Badan Kepegawaian Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Keselamatan Bangsa Badan Kelautan dan Perikanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pengkajian dan Penyelidikan Pemerintahan dan Masyarakat Badan Pengkaji Undang-undang Badan Penyelidikan dan Lathihan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perustakan dan Pengembangan Badan Pertanahan dan Tata Ruang Aspe Daerah Badan Koordinasi dan Keselamatan Rakyat dan Penyelidikan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perumahan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Perencanaan dan Protokol Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan dan Keturunan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan dan Informatika	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan hukum	100%	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan hukum	3 dokumen	Adanya acuan dalam penyusunan produk hukum daerah	100%	Rp. 233.112.000,00	Rp. 233.112.000,00	Rp. 230.000.000,00	Biro Hukum	Sidang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakteeran Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tokol Ukur (6)	Target (7)	Tokol Ukur (8)	Target (9)			Tokol Ukur (10)	Target (11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perwisata Dinas Kesehatan Umum Dinas Kesehatan Gigi Sumbdaya Minerat Dinas Pendapatn, Pengaman Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemu dan Olah Raga Dinas Perumahan dan Pondaguan Dinas Kerahan Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Inspektorat Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Pelayanan Languang ke Masyarakat Program 01.06 RS JIwa G-hasa RS Pneu Respira RS JIwa G-hasa RS Pneu Among Polig Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kantor Perantara Pemmpara Pala								Rp. 2.402.732.400,00	Rp. 2.400.000.000,00		
<b>1.20.1.20.03.02.34</b>	<b>PROGRAM FASILITASE BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM</b>														
1.20.1.20.03.02.34.007	Penyelesaian Permasalahan Hukum	Klasifikasi apatuar dan brokrasi	Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Badan Kerjasama dan Penanaman Modal dan Polik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Penghap Badan Pembudayaan Pempapan dan Resyarak Badan Pengawalngan Bencana Daerah Badan Perencanaan Badan Pendidikan dan Pembangunan Daerah Badan Perusahkaan dan Kerjasama Badan Perantaban dan Tata Ruang Biro Administrasi Kemasyarakatan dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Humas Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kowayanan Dinas Kowayanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumbdaya Minerat Dinas Pendapatn, Pengelolaan Keuangan											
					Revisikan Berhukum dan Layanan Hukum	100%	Peningkatan Permasalahan Hukum Ungasi	2 kasus	Adanya Keaktifan Hukum dan dasar pelaksanaan tindakan hukum terhadap perkara yg ditangani.	100%		Rp. 500.991.000,00	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Salahsaj Berjalan





**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Target			Hasil Kegiatan		1/2/3	1/2/3	
					Tokol Ukur	Target				Tokol Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.1.20.03.02.50.015	Pengawasan Regresif Produk Hukum	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Negeri/daerah	Masyarakat PPROD Program 01-06 Kewilayahan RS Jawa Tengah Siklus Polisi Pamong Pejaja Kantor Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Prampara Pejaja	Penertase Tindak lanjut atas konsultasi, evaluasi dan verifikasi Produk Hukum Kota/Kota	100%	Produk Hukum Kabupaten / Kota telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	100%	Produk Hukum Kabupaten / Kota tidak dibatalkan oleh Gubernur dan/atau Pemerintah Provinsi di Daerah	Rp. 377.768.950,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Hukum	Sedang	Belanja

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum	Jumlah Pagu : Rp. 6.127.000.000,00														
	Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kelaianan Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Praktekan Maju	Keterangan	
						Tokok Ukur	Target	Tokok Ukur	Target	Tokok Ukur	Target			SKPD	Jenis Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Masa Pelaksanaan	Jumlah Pagu - Rp. 13.443.386.100,00	Keterangan				
					Hasil Program		Target			Maju	Jenis Kegiatan			
					Target	Uraian						SKPD	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	OTONOMI DAERAH, PERTANTAMAN UMUM, KEMERDEKAAN BERKUALITAS DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPAGAWIAN, DAN PERSANDIANGAN													
1.20.1.20.03.03.01	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan													
1.20.1.20.03.03.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>													
1.20.1.20.03.03.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Surat Masuk	21.50 surat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 4.326.000,00	Rp. 4.440.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Di/na/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Surat Keluar	55.50 surat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 3.617.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Roda 4 yang tepat waktu	4 unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 29.862.100,00	Rp. 32.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Bukti Pembelian Horonomim Pegawai Keuangan dan Barang	11 orang, 12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 19.000.000,00	Rp. 19.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	2. Bukti Pembelian Hecorakum	2 orang, 12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 11.105.000,00	Rp. 13.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Barang Cetakan	8 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 4.448.000,00	Rp. 4.700.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.01.015	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Surat Kabar Harian	2 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 5.070.000,00	Rp. 5.700.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	2. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 tahun	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 42.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.01.018	Bapak/Bapak Koordinator Dan Koordinator Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terdapatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Koneksi dan Koordinasi Dalam Daerah	1 tahun	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 188.200.000,00	Rp. 190.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>													
1.20.1.20.03.03.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Memadainya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	1 jenis	Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi	100%	Rp. 3.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.02.010	Pengadaan Meubelur	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Memadainya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengadaan Meubelur	2 jenis	Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi	100%	Rp. 19.800.000,00	Rp. 0,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal
1.20.1.20.03.03.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Memadainya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara	4 unit	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur terpenuhi	100%	Rp. 81.034.000,00	Rp. 83.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sesuai Jadwal

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nomor	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target	Hasil Kegiatan		Proknaian Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Tokoh Ukur	Target		1/2/3	15		
					Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur							Target	
1.201.1.20.03.03.02.026	Penelitian Rutin/Berkala Penyelidikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kearsyafatan	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.1.20.03.03.02.028	Penelitian Rutin/Berkala Peraklan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kearsyafatan	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.1.20.03.03.02.029	Penelitian Rutin/Berkala Medisler	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kearsyafatan	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>1.201.1.20.03.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGINGATAN PENGEMANGAN SISTEM PERALIHAN KEKAWALAN DAN KEUANGAN</b>												<b>Rp. 60.181.500,00</b>		
1.201.1.20.03.03.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kearsyafatan	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.1.20.03.03.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kearsyafatan	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.1.20.03.03.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kearsyafatan	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.1.20.03.03.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kearsyafatan	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>1.201.1.20.03.03.37</b>	<b>PROGRAM PENGEMANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA</b>												<b>Rp. 11.756.926.000,00</b>		
1.201.1.20.03.03.37.016	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY, Koltara, dan Kabupaten/Tanah Liris	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.1.20.03.03.37.034	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY, Koltara, dan Kabupaten/Tanah Liris	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>1.201.1.20.03.03.52</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN REJAKAN PENGEMANGAN</b>												<b>Rp. 1.213.846.500,00</b>		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Fielding Uraian Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Proklnan Maju	Keterangan	
					Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur			SKPD	Jenis Kegiatan
1.201.2.03.03.52.010	Penyediaan Bahan Pemenuhan Kebutuhan Bidang Kesjahteraan Rakyat	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	66,67%	1. Analisa Kebijakan	Analisa dan Rekomendasi Kebijakan Integrasi Jambesata ke Jambesana	100%	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	Rp. 328.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	Sidang Berjalan	
1.201.2.03.03.52.011	Konfirmasi dan Efektivitas Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesjahteraan Rakyat	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	66,67%	1. Analisa Kebijakan	Analisa dan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Kependudukan	100%	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	Rp. 162.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	Sidang Berjalan	
1.201.2.03.03.52.012	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesjahteraan Rakyat	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	66,67%	1. Analisa Kebijakan	Analisa dan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesehatan	100%	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	Rp. 132.200.000,00	Rp. 135.000.000,00	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	Sidang Berjalan	
1.201.2.03.03.52.013	Penyediaan Bahan Pemenuhan Kebutuhan Bidang Kelangka Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	66,67%	1. Analisa Kebijakan	Analisa dan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor RB, KS, PM, Raskin, PM dan PA	100%	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	Rp. 85.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	Sidang Berjalan	
1.201.2.03.03.52.014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan Bidang Kelangka Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	66,67%	1. Analisa Kebijakan	Analisa dan Rekomendasi Kebijakan Realisasi Fungsi Kelangka	100%	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	Rp. 386.646.500,00	Rp. 390.000.000,00	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	Sidang Berjalan	
1.201.2.03.03.52.015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Bidang Kelangka Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	66,67%	1. Analisa Kebijakan	Analisa dan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor RB, KS, PM, Raskin, PM dan PA	100%	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	Rp. 120.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Biro Administrasi Kesjahteraan Rakyat dan Kesyaharabatan	Sidang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prekisiplan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Target			Target	1/2/3	1/2/3		
					Tolok Ukur	Target							Hasil Kegiatan	SKPD
1	Wajib													
1.20	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERTANAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN, KEMERDEKAAN, KEMAJUHAN, DAN PERSANDIAN</b>													
1.20.1.20.03.04	Bina Kefinansial Perencanaan dan Sumbdaya Alam													
1.20.1.20.03.04.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTORAN</b>													
1.20.1.20.03.04.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengiriman Dokumen	200 dokumen	1 %	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 5.500.000,00	Rp. 5.500.000,00	Biro Administrasi Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kebutuhan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kebutuhan Dinas/Operasional Roda Dua Yang Tepat Waktu	3000 surat	1,01 %	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.700.000,00	Rp. 4.700.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti Pembayaran honorarium dan insentif Administrasi Keuangan Biro	11 ngibulan	6,44%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 27.300.000,00	Rp. 3.000.000,00	Biro Administrasi Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	20 jenis	4,72%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.01.011	Penyediaan Bauran Coklat Dan Pengendalian	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Barang Coklat	3 unit	3,77%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 16.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengendalian	8500		Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 5.500.000,00	Rp. 5.500.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.01.013	Penyediaan Perabotan Dan Peralatan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan Kantor	14 jenis	1,53%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 6.500.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perundang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Buku Perundang-Undangan	5 eks	3,81%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 9.300.000,00	Rp. 10.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Makan dan Minum Sdnng	2500 es	12,3%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 30.000.000,00	Rp. 31.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pelayanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	20000000	70,79%	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.02	<b>PROGRAM PENYIANGAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>													
1.20.1.20.03.04.02.007	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Memperolehnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	AC L5 PK	4 unit	15,87%	Kelancaran sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi	Rp. 44.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan
1.20.1.20.03.04.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Memperolehnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kamera Digital	1 unit	19,84%	Kelancaran sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumbdaya Alam	Scadng Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Materangan					
					Hasil Program		Keunggulan Kegiatan			Pagu Indiatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan SKPD		
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)					Target (10)	Target (11)
1.201.2.03.03.04.02.010	Pengadaan Meubel	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	Program 01-06	Mengoptimalkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kursi Staf	10 unit	17,86%	Rp. 45.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam	1/2/3 (15)	Sedang Berjalan
1.201.2.03.03.04.02.024	Penyediaan Bahan/Bekas Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	Program 01-06	Mengoptimalkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Mobil Staf	10 unit	37,69%	Rp. 95.000.000,00	Rp. 104.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan
1.201.2.03.03.04.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	Program 01-06	Mengoptimalkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung Kantor	10 jenis	8,73%	Rp. 24.000.000,00	Rp. 24.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan
<b>1.201.2.03.03.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>									<b>Rp. 75.000.000,00</b>	<b>Rp. 82.000.000,00</b>			
1.201.2.03.03.04.05.063	Bentuk Organisasi dan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	Program 01-06	Ternyulainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jml personel yang meningkat kemampuannya	55 orang	100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 82.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan
<b>1.201.2.03.03.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGHARGAAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>									<b>Rp. 39.460.000,00</b>	<b>Rp. 42.300.000,00</b>			
1.201.2.03.03.04.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	Program 01-06	Ternyulainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Nilai Laporan SKPD	A	8,11%	Rp. 3.200.000,00	Rp. 3.500.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan
1.201.2.03.03.04.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	Program 01-06	Ternyulainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keseluruhan anggaran kes dengan realisasi anggaran SKPD	0%	13,94%	Rp. 5.500.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan
1.201.2.03.03.04.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	Program 01-06	Ternyulainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	RDPK, Renja, RAKA, DPA	1 tahun	70,97%	Rp. 28.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan
1.201.2.03.03.04.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	Program 01-06	Ternyulainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keselesaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100%	6,97%	Rp. 2.750.000,00	Rp. 3.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan
<b>1.201.2.03.03.04.52</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>									<b>Rp. 4.583.000.000,00</b>	<b>Rp. 5.013.100.000,00</b>			
1.201.2.03.03.04.52.001	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	DIY	Penentasan Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	Dokumen Kebijakan Harmsiasi Peraturan dalam Perencanaan Perjilinan, Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah (Tahap teres)	1 laporan	100%	Rp. 1.375.000.000,00	Rp. 1.375.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan
1.201.2.03.03.04.52.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	DIY	Penentasan Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	Dokumen Kebijakan Perwata menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian	1 laporan	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan
1.201.2.03.03.04.52.003	Penataan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	DIY	Penentasan Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	Dokumen Kebijakan Perwata menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian	1 laporan	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan
1.201.2.03.03.04.52.004	Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Produktivitas	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heineggat	DIY	Penentasan Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	Dokumen Kebijakan Perwata menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian	1 dokumen	100%	Rp. 550.000.000,00	Rp. 605.000.000,00	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam		Sedang Berjalan



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 5.378.250.000,00

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indefinitif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keuangan Kegiatan				Hasil Kegiatan		SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Pencik Panggang Pituk Piyungan Pleket Pleket Ponjong Purwokerto Purwokerto Rongkop Sanden Sleman Sleman Sleman Tanjungsari Tegalrejo Tegalrejo Tropis Ulin Wirobrajan Wonosari											
1.20.1.2.03.04.52.027	Koordinasi Perencanaan DY	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Heungkat	DIY	Pembentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	Promosi perbantuan	1 kali	Bahan Rekomendasi Perbantuan DIY	100%	Rp.-405.000.000,00	Rp.-410.000.000,00	Rp.-410.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Soedong Branjangan
							Database Perbantuan	1 database							
							Dokumentasi kegiatan nilai tambah produk baru	1 dokumen							
							Dokumen strategi pemasaran perbantuan	1 dokumen							
							Forum komunikasi pemula tanaman	1 kali							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Masa Pelaksanaan	Jumlah Pagu - Rp. 10.441.062.200,00	Keterangan				
					Kelembagaan		Target				Pagu Indikator	Praktikan Maju	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program	Kelembagaan								Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	<b>OTONOMI DAERAH, PERTANTANGAN UMM, KEMERDEKAAN BERKUALITAS DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPESAWATAN, DAN PERSANDIAAN</b>													
1.20.1.20.03.05	<b>Biro Administrasi Pembangunan</b>													
1.20.1.20.03.05.01	<b>ADMINISTRASI PENKANTORAN</b>													
1.20.1.20.03.05.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Surat keluar Surat masuk Pengiriman dokumen	2522 surat, 15225 surat 32 dokumen	2,70 %	Kelancaran Pelayanan Administrasi	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Mesin dan Dns/Operasional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Perawatan/izin operasional kendaraan unit kendaraan roda 2 dan 5	2 unit kendaraan roda 2 dan 5	1,35%	Kelancaran administrasi perkantoran	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Buku pembayaran pembela keuangan dan kepegawaian	13 orang, 12 bulan	6,2%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 26.000.000,00	Rp. 27.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Alat tulis kantor	60 jenis	11,1%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 160.000.000,00	Rp. 170.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.01.011	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Barang cetak Fotokopi	15 jenis 8000 lembar	8,4 %	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 35.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	10 jenis	1,3 %	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 10.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.01.014	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Perbaikan rumah tangga keperluan kantor	18 jenis	1,3 %	Kelancaran administrasi perkantoran	Rp. 6.000.000,00	Rp. 7.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perendang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	1. surat kabar 2. majalah 3. buku-buku keputusasaan	3 jenis 1 jenis 1 jenis	1,2%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 7.500.000,00	Rp. 8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Terperuhnya makan dan minuman	6818 OS	14,4%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	41,5%	Kelancaran administrasi perkantoran	Rp. 215.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.01.029	Pengelolaan Asap Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Kelancaran asap tidak	12 bulan	9,9%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>													
1.20.1.20.03.05.02.005	Pengadaan Kondam Dns/Operasional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Kondam roda empat kendaraan roda dua	1 unit, 2 unit	100%	Terperuhnya kendaraan dinas/operasional	Rp. 0,00	Rp. 470.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.03.05.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Program 01-06	100%	Perengkapan gedung kantor	5 jenis	7,3%	Kelancaran sarana prasarana aparatur	Rp. 40.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan	



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif			Keterangan			
					Hasil Program		Kegiatan Kegiatan		Materi Kegiatan			Prakiraan Moju		
					Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur			(13)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.2.03.05.02.009	Pengalihan Peralihan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Program 01-06	Kelancaran tugas dan fungsi aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralihan gedung kantor	7 jenis	Kebutuhan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	7 jenis	Rp. 75.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.201.2.03.05.02.024	Bemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	6 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda dua	Kebutuhan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2)	21,1%	Rp. 120.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.201.2.03.05.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralihan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perengkapan gedung kantor terpelihara	4 jenis	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur yang mendukung terpelihara	3,6%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.201.2.03.05.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralihan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralihan gedung kantor terpelihara	9 jenis	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur yang mendukung terpelihara	3,7%	Rp. 33.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.201.2.03.05.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meubelair terpelihara	5 jenis	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	1,8 %	Rp. 8.000.000,00	Rp. 9.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
<b>1.201.2.03.05.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERANTARAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAK KINERJA DAN REUMANGAN</b>										<b>Rp. 61.000.000,00</b>	<b>Rp. 70.500.000,00</b>		
1.201.2.03.05.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Program 01-06	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian indikator yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Nilai LAKIP SKPD	A=75 s.d B5	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	14,9 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.201.2.03.05.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Program 01-06	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian indikator yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keseluruhan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	kurang 5 %	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	18,5 %	Rp. 12.000.000,00	Rp. 13.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.201.2.03.05.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Dold dan Informasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Program 01-06	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian indikator yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	ROPK, Renja, RKA, DPA	1 bahan	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	32,2 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.201.2.03.05.06.019	Mombing dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Program 01-06	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian indikator yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keseluruhan antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	31 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
<b>1.201.2.03.05.52</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>					<b>Rp. 5.350.662.300,00</b>	<b>Rp. 4.996.189.800,00</b>							
1.201.2.03.05.52.019	Penyusunan Rencana Pembangunan Kebijakan Bidang Pembangunan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Diy	Persepsi Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	1. Dokumen Bahan Kebijakan Lingkungan hidup 2. Dokumen bahan kebijakan yang Ditindaklanjuti Air Hutan 3. Dokumen Bahan Kebijakan Perhutanan	1 dokumen 1 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan	7,55%	Rp. 302.629.000,00	Rp. 333.111.900,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.201.2.03.05.52.020	Kordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Diy	Persepsi Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PU-ESDM, Lingkungan hidup, Perhutanan, Kominfo dan Kehumasan	1 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	7,55%	Rp. 177.930.000,00	Rp. 195.273.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.201.2.03.05.52.021	Penelitian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Diy	Persepsi Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	Hasil penelitian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang Ditindaklanjuti PU-ESDM, Lingkungan hidup, Perhutanan, Kominfo dan Kehumasan	1 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	5,16%	Rp. 83.959.000,00	Rp. 92.354.900,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.201.2.03.05.52.022	Penyusunan Bahan Perencanaan Kebijakan Dekonsentrasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kelembagaan dan Kemitraan Masyarakat	Diy	Persepsi Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	Dokumen bahan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan (1 dokumen)	3 bulan (48,83 %)	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	2,38%	Rp. 375.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan		Indikator Kinerja											Zumlah Pagu - Rp. 10.441.062.200,00				
		Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Prioritas Daerah		Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kegiatan Kegiatan			Pagu Indikatif		Prakiraan Moju	
Nomor	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Keterangan	
																SKPD	1/2/3
1.201.1.20.03.05.52.023		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi	Kerja aparatur dan brokrasi	Keajaiban dan brokrasi	DIY	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	12 bulan (48,83 %)	dukungan terhadap pencapaian bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	3,8%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang	Sedang		
1.201.1.20.03.05.52.024		Pemanfaatan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi	Kerja aparatur dan brokrasi	Keajaiban dan brokrasi	Sektor Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pemanfaatan (1 dokumen)	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	Tersedianya informasi pelaksanaan kebijakan dan tugas pemanfaatan yang menjadi kebijakan untuk mencapai target >68,83%	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	6,44%	Rp. 108.675.000,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang	Sedang		
1.201.1.20.03.05.52.040		Peraturan dan Kebijakan Regional	Kerja aparatur dan brokrasi	Keajaiban dan brokrasi	DIY	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	1 rumusan	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	7,55%	Rp. 874.592.700,00	Rp. 0,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang	Sedang		
1.201.1.20.03.05.52.042		Peraturan dan Kebijakan Regional	Kerja aparatur dan brokrasi	Keajaiban dan brokrasi	DIY	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	1 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	10,00%	Rp. 375.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang	Sedang		
1.201.1.20.03.05.52.043		Peraturan dan Kebijakan Regional	Kerja aparatur dan brokrasi	Keajaiban dan brokrasi	DIY	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	1 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	10,00%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 660.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang	Sedang		
1.201.1.20.03.05.52.044		Peraturan dan Kebijakan Regional	Kerja aparatur dan brokrasi	Keajaiban dan brokrasi	DIY	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	1 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	10,00%	Rp. 1.902.696.600,00	Rp. 2.090.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang	Sedang		
1.201.1.20.03.05.52.045		Riset Strategis Tematik	Kerja aparatur dan brokrasi	Keajaiban dan brokrasi	DIY	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	66,67%	1 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	10,00%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang	Sedang		
<b>1.20.1.20.03.05.53</b>		<b>PROGRAM PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>												<b>Rp. 4.034.667.900,00</b>			
1.201.1.20.03.05.53.001		Penyediaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kerja aparatur dan brokrasi	Keajaiban dan brokrasi	Keajaiban dan brokrasi	Persentase Kualifikasi penyediaan pengadaan barang/jasa barang dan jasa.	100%	1 laporan	Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan profesional	10,00%	Rp. 3.667.879.900,00	Rp. 4.034.667.900,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang	Sedang		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**

Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 10.441.062.200,00

Nomor (1)	Uraian /Rencana Maksud Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Prioritas Daerah (3)	Sasaran Daerah (4)	Lokasi (5)	Indikator Kinerja		Pagu Indikatorif		Prakiraan Moju (13)	Keterangan			
					Hasil Program		Keilauan Kegiatan			SKPD	Jenis Kegiatan		
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)				1/2/3 (14)	1/2/3 (15)
				Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perikanan dan Energi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perencanaan dan Ase Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan dan Perhubungan Dinas Pertanian Dinas Sosial, Kerja dan Transmigrasi Inspektoriat Kantor Perwakilan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Kabupaten Lingsi Kantor Perwakilan Masyarakat PKPD PKPD RS Jawa Tengah RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Paripara PDP									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prokiraan Mula	Jumlah Pagu : Rp. 1.317.520.000,00	Keterangan			
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan					Hasil Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target	Tolok Ukur
1	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEMANGAN DAERAH, PRANGKAT DAERAH, KEPESAWAJAN, DAN PERSANDIARAN	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Paket pengirinan	1 tahun	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,35%	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.01	Biro Organisasi													
1.20.1.20.03.06.01.001	PERKANTORAN													
1.20.1.20.03.06.01.001	Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Paket pengirinan	2.700 surat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,35%	Rp. 481.530.000,00	Rp. 497.200.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perapajangan STAK roda dua	2 unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,06 %	Rp. 5.300.000,00	Rp. 5.300.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perapajangan STAK roda empat	4 unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,54 %	Rp. 28.200.000,00	Rp. 29.900.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	56 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	4,26 %	Rp. 19.600.000,00	Rp. 20.800.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.01.011	Penyediaan Bauran Coklat Dan Penggandaan	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bauran otakan	13 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	4,6 %	Rp. 17.900.000,00	Rp. 19.200.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penggandaan	50.000 lembar	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1,37 %	Rp. 5.900.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.01.014	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1,65 %	Rp. 7.100.000,00	Rp. 7.500.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perundang-Undangan	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perabotan kebersihan dan bahan pembuat	19 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	2,19 %	Rp. 6.280.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Buku Perpuakaan	1 paket	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	12,74 %	Rp. 54.900.000,00	Rp. 55.900.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.01.018	Rapat/Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Makanan dan minuman untuk rapat/koordinasi	1 tahun	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	4,5 %	Rp. 335.000.000,00	Rp. 345.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.02	PROGRAM PENCEGAHAN SARANAM DAN PRASARANA APARATUR													
1.20.1.20.03.06.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Memngkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan operasional roda empat	1 unit	Kebutuhan sarana prasarana (kendaraan) terpenuhi.	74,24%	Rp. 205.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.02.007	Pengadaan Pengalangan Gedung Kantor	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Memngkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	AC Split 1,5 PK	5 unit	Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralihan gedung kantor) terpenuhi.	31 %	Rp. 82.100.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.02.009	Pengadaan Peralihan Gedung Kantor	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Memngkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Almari kaca sliding pressi	2 unit	Kebutuhan sarana dan prasarana (peralihan gedung kantor) terpenuhi.	45%	Rp. 183.900.000,00	Rp. 65.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.02.010	Pengadaan Meubeler	Ketaja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06	Memngkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung lelabaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Filling cabinet 4 laci	5 unit	Kebutuhan sarana dan prasarana (peralihan gedung kantor) terpenuhi.	20%	Rp. 40.590.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi		Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 1.317.520.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kebaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Meju	Keterangan	
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)	Target (11)			SKPD	1/2/3
1.20.1.20.03.06.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Mengingat	Program 01-06	(5)	100%	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua	2 unit	35 %	Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi	Rp. 99.800.000,00	Rp. 99.800.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perabotan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Mengingat	Program 01-06	(5)	100%	Pemeliharaan peralalatan gedung kantor	13 jenis	17 %	Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi	Rp. 33.500.000,00	Rp. 33.500.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
<b>1.20.1.20.03.06.05</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>Rp. 68.400.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>		
1.20.1.20.03.06.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Mengingat	Program 01-06	(5)	100%	Nilai SOP PNS Biro Organisasi Tahun 2016	50 orang	100 %	Kapasitas sumberdaya aparatur meningkat	Rp. 68.400.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
<b>1.20.1.20.03.06.06</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja DAN Keuangan</b>										<b>Rp. 120.700.000,00</b>	<b>Rp. 103.400.000,00</b>		
1.20.1.20.03.06.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Mengingat	Program 01-06	(5)	100%	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016	80	20 %	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 4.800.000,00	Rp. 5.200.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Mengingat	Program 01-06	(5)	100%	Keengkapan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	15%	33%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 15.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Mengingat	Program 01-06	(5)	100%	DPA tahun 2017	1 dokumen	70%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 96.000.000,00	Rp. 76.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.06.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Mengingat	Program 01-06	(5)	100%	DPRA APBD dan DPPA Davalis Tahun 2017	2 dokumen						
							Pemeliharaan website Biro Organisasi	1 tahun						
							REJA tahun 2018	1 dokumen						
							RKA tahun 2018	1 dokumen						
							ROPK Tahun 2017	1 dokumen						
							Kesulitan antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	90%	10%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 4.900.000,00	Rp. 5.200.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Keterangan							
					Hasil Program		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan				
					Tidak Ukur	Target	Tidak Ukur	Target				SKPD	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.20	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEJANGKARAN DAERAH, KEMERDEKAAN, JERAKAH, REFORMASI, DAN PESANDIQA</b>														
1.20.1.20.03.07	Biro Umum dan Protokol														
1.20.1.20.03.07.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>														
1.20.1.20.03.07.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat keluar	500 surat	0,09%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Soleng Berjalan	
1.20.1.20.03.07.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat masuk Pembayaran pajak (jin frekuensi) Pembayaran tagihan rekening air 17 langganan Pembayaran tagihan rekening listrik (1.350.357 kw) Pembayaran tagihan rekening telepon 82 sambangan Tambah daya listrik	25.000 surat 1 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan 43 KVA	46,23%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 2.600.000.000,00	Rp. 2.600.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Soleng Berjalan	
1.20.1.20.03.07.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Kondaan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bakti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 Bakti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3 Bakti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 Bakti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 5	32 unit 1 unit 42 unit 2 unit	0,81%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 54.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Soleng Berjalan	
1.20.1.20.03.07.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengelola barang Pengelola keuangan	3 orang/bulan 22 orang/bulan	1,58%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 105.000.000,00	Rp. 105.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Soleng Berjalan	
1.20.1.20.03.07.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur air bat dan air bawar Kebersihan kantor	2 buah 16 unit	19,54%	Kelancaran administrasi perkantoran	Rp. 1.300.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Soleng Berjalan	
1.20.1.20.03.07.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Taman Kompleks Kesehatan Alat Tulis Kantor	52.208 m2 167 jenis	4,88%	Kelancaran pelayanan administrator perkantoran	Rp. 325.000.000,00	Rp. 325.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Soleng Berjalan	
1.20.1.20.03.07.01.011	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Cetak kalender Cetakan umum	4 jenis 40 jenis	4,96%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 330.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Soleng Berjalan	
1.20.1.20.03.07.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29 jenis	1,88	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Soleng Berjalan	
1.20.1.20.03.07.01.013	Penyediaan Peralatan Dan Peralengkapan Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Koranagan bunga Pagam perpagahan Trophy	1 jenis 1 jenis 2 jenis	15,03%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Soleng Berjalan	
1.20.1.20.03.07.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perundang-undangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat kabar harian	8 SKN	0,97%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 64.860.000,00	Rp. 68.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Soleng Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu Rp. 23.721.960.000,00	Keterangan			
	Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	HaSil Program		Keluaran Kegiatan		HaSil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	
						Tolok Ukur	TARGET (6)	TARGET (7)	Tolok Ukur	TARGET (8)					Tolok Ukur
1.201.1.20.03.07.01.017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.1.20.03.07.01.018															
1.201.1.20.03.07.01.021															
<b>1.201.1.20.03.07.02</b>													<b>Rp. 7.833.100.000,00</b>	<b>Rp. 3.300.000.001,00</b>	
1.201.1.20.03.07.02.004													Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 1.100	
1.201.1.20.03.07.02.007													Rp. 380.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	
1.201.1.20.03.07.02.009													Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	
1.201.1.20.03.07.02.010													Rp. 600.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	
1.201.1.20.03.07.02.022													Rp. 450.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	
1.201.1.20.03.07.02.023													Rp. 247.100.000,00	Rp. 250.000.000,00	
1.201.1.20.03.07.02.024													Rp. 1.358.500.000,00	Rp. 1.350.000.000,00	
1.201.1.20.03.07.02.026													Rp. 375.000.000,00	Rp. 375.000.000,00	
1.201.1.20.03.07.02.028													Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	
1.201.1.20.03.07.02.029													Rp. 47.500.000,00	Rp. 50.000.000,00	
1.201.1.20.03.07.02.042													Rp. 2.100.000.000,00	Rp. 0,00	
<b>1.201.1.20.03.07.05</b>													<b>Rp. 310.000.000,00</b>	<b>Rp. 350.000.000,00</b>	
1.201.1.20.03.07.05.076													Rp. 310.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	
<b>1.201.1.20.03.07.06</b>													<b>Rp. 85.500.000,00</b>	<b>Rp. 95.000.000,00</b>	
1.201.1.20.03.07.06.016													Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	
1.201.1.20.03.07.06.017													Rp. 16.500.000,00	Rp. 17.500.000,00	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keukuran Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan		
					Took Ukur	TARGET	Took Ukur	TARGET					Took Ukur	TARGET
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>	<b>(14)</b>	<b>(15)</b>
1.20.1.20.03.07.66.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terdapatnya penata usaha keuangan dan penciptaan kinerja program yang mendukung fungsi SKPD yang mendukung kelancaran tugas dan pencapaian kinerja program yang mendukung fungsi SKPD	100%	Laporan RKT, Rejpi, BKA, ROPK, Sistem Informasi	1 tahun	Kelancaran pelaksanaan penyesuaian rencana program kegiatan SKPD	53,79%	Rp. 44.500.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.07.66.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Terdapatnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung fungsi SKPD	100%	Keseuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	90%	Kelancaran pelaksanaan penyesuaian laporan monitoring dan evaluasi SKPD	20,96%	Rp. 17.500.000,00	Rp. 20.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
<b>1.20.1.20.03.07.64</b>	<b>PROGRAM PEMBERANGKATAN LAYANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN</b>										<b>Rp. 1.050.000.000,00</b>	<b>Rp. 1.150.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.07.64.001	Perimbangan Sistem dan Pengabdian Masyarakat Dinas	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Kapasitas informasi sudi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	95%	Jumlah layanan espektabilitas sistem dan pengabdian masyarakat	4 jenis	Terdapatnya layanan sistem dan pengabdian masyarakat	57,14%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.03.07.64.002	Penyelenggaraan Layanan Pemasangan dan Telekomunikasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Kepuasan informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	95%	Jumlah layanan espektabilitas	7 jenis	Terdapatnya layanan espektabilitas dan telekomunikasi	42,86	Rp. 450.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
<b>1.20.1.20.03.07.66</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KERUMAH TANGGAAN</b>										<b>Rp. 5.000.000.000,00</b>	<b>Rp. 2.500.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.07.66.001	Penyelenggaraan Layanan Kerumah Tanggaan Pimpinan dan Tamu	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Persentase Kualitas Pelayanan Kerumah Tanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan	0,85%	Jumlah pelayanan kerumah tanggaan	12 jenis	Terdapatnya pelayanan kerumah tanggaan kepada pimpinan	100%	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
<b>1.20.1.20.03.07.69</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN</b>										<b>Rp. 2.800.000.000,00</b>	<b>Rp. 2.900.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.07.69.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum dan Protokol	Persentase Kualitas Keptokolan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan	0,85%	Jumlah Pelayanan Keprotokolan	9 jenis	Terdapatnya kualitas pelayanan keprotokolan	100%	Rp. 2.800.000.000,00	Rp. 2.900.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD	Nomor	Unsur/ Bidang Unsur Pembiayaan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indiatif	Prakiraan Meju	Keterangan			
						Keluaran Kegiatan					Jenis Kegiatan	1/2/3		
						Hasil Program	Hasil Kegiatan	Target					SKPD	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	1.20	Wajib												
	1.20.1.20.04.00.01.001	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UNDA, ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN												
	1.20.1.20.04.00.01.001	PRORGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
	1.20.1.20.04.00.01.001	Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah surat keluar	2000 surat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	0.17 %	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sisling Berjalan
	1.20.1.20.04.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah surat masuk	800 surat						
	1.20.1.20.04.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengiriman dokumen	12 paket						
	1.20.1.20.04.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembayaran Tagihan Rekening A/R 200 m3	12 bulan						
	1.20.1.20.04.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembayaran Tagihan Rekening Telephone 6 Saban Sambungan	12 bulan						
	1.20.1.20.04.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembayaran Tagihan SMS Gateway 1 nomor telephone	12 bulan						
	1.20.1.20.04.00.01.011	Penyediaan Barang Cokakan Dan Pengabdian	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bakti Pembayaran honorarium perantara usaha administrasi keuangan	50 unit						
	1.20.1.20.04.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bakti pembayaran honorarium perantara usaha	108 OB						
	1.20.1.20.04.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Peralatan Urugangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bakti pembayaran honorarium pengelola barang/ aset	36 OB						
	1.20.1.20.04.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	162036 m2						
	1.20.1.20.04.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	30 jenis						
	1.20.1.20.04.00.01.021	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Kinerja aparatur dan brokasi	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	11 unit/jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretaris DPRD	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu - Rp. 68.075.081.000,00		Keterangan		
	Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Penerimaan Dana dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Kelebihan Kegiatan			Pagu Indikatif	Prakiraan Meju	Jenis Kegiatan	
						Target (6)	Tolok Ukur (8)	Target (9)	Target (7)	Tolok Ukur (10)	Target (11)			1/1/13	1/2/13
1.20.1.2.0.04.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Baki Pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja	12. kubasi	18,94 %	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 800.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
1.20.1.2.0.04.00.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Pembayaran retribusi sampah	12 bulan	0,03 %	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
1.20.1.2.0.04.00.01.029	Pengalokasian Aspi Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Aspi Dinamis yang dibekas	5000 berkas	2,53 %	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 175.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
1.20.1.2.0.04.00.01.031	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Program 01-06	100%	Hasil General Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarga	201 Jwa	19,53 %	Kelancaran administrasi Perkantoran	Rp. 850.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
<b>1.20.1.2.0.04.00.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERIHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>Rp. 3.715.000.000,00</b>	<b>Rp. 3.800.000.000,00</b>			
1.20.1.2.0.04.00.02.007	Pengalokasian Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Perbaikan gedung kantor	3 jenis	6,7 %	Kelambatan sarana prasana aparatur (perbaikan gedung kantor)	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
1.20.1.2.0.04.00.02.009	Pengalokasian Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Perbaikan gedung kantor	5 jenis	17,91 %	Kelambatan Sarana dan Prasana Aparatur (Perbaikan Gedung Kantor)	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
1.20.1.2.0.04.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Gedung kantor terpelihara	4 unit	28,26 %	Kelambatan pemeliharaan prasana aparatur (gedung kantor) terpelihara	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
1.20.1.2.0.04.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Kendaraan dinas operasional terpelihara (kendaraan node 6, kendaraan node 4 dan kendaraan node 2)	3 jenis	28,26 %	Kelambatan pemeliharaan prasana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpelihara	Rp. 1.315.000.000,00	Rp. 1.400.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
1.20.1.2.0.04.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Perbaikan gedung kantor	2 jenis	5,09 %	Kelambatan Pemeliharaan Prasana Aparatur (Perbaikan Gedung Kantor) Terpelihara	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
1.20.1.2.0.04.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Perbaikan gedung kantor	16 jenis	5,78 %	Kelambatan Pemeliharaan Prasana Aparatur (Perbaikan Gedung Kantor) Terpelihara	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
<b>1.20.1.2.0.04.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>										<b>Rp. 425.000.000,00</b>	<b>Rp. 425.000.000,00</b>			
1.20.1.2.0.04.00.03.002	Pengalokasian Pakelan Dinas Bersama Peringatannya	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	PDH Lengan Panjang DPRD	55 stel	30 stel	PSL Setelan	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
1.20.1.2.0.04.00.03.003	Pengalokasian Pakelan Kerja Lapangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Jaket untuk Caraka	4 buah	3,84 %	Kelancaran Pemeliharaan Disiplin Aparatur	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
<b>1.20.1.2.0.04.00.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>										<b>Rp. 440.000.000,00</b>	<b>Rp. 440.000.000,00</b>			
1.20.1.2.0.04.00.05.009	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesketrabatan	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Pegiriman Pelatihan Kesketrabatan	22 OK	72,5 %	Kapasitas sumber daya aparatur bertambah / meningkat	Rp. 290.000.000,00	Rp. 290.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
1.20.1.2.0.04.00.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparatur	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	(4)	Sekretariat DPRD	100%	Pegiriman peserta pelatihan pengembangan SDM	55 org	22,5 %	Kapasitas sumber daya aparatur bertambah/meningkat	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sociang Berjalan	
<b>1.20.1.2.0.04.00.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN REKUNGAN</b>										<b>Rp. 225.000.000,00</b>	<b>Rp. 225.000.000,00</b>			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretaris Daerah	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu - Rp. 68.075.081.000,00			
	Nomor	Uraian/Field Usung Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Prakiraan Meju	Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.2.04.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Terselenggaranya pemda usaha kinerja program yang meniadakan unsur lupas dan target SKPD	100%	Nilai LAKIP SKPD	A (2)	5,75 %	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
1.201.2.04.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Terselenggaranya pemda usaha kinerja program yang meniadakan unsur lupas dan target SKPD	100%	Kesejahteraan anggaran kas dan realisasi anggaran SKPD	20 %	28,64%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 70.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
1.201.2.04.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Terselenggaranya pemda usaha kinerja program yang meniadakan unsur lupas dan target SKPD	100%	Bahan Forum Musrembang	1.0x/tahun	59,67 %	Kelancaran pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran SKPD	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
1.201.2.04.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Terselenggaranya pemda usaha kinerja program yang meniadakan unsur lupas dan target SKPD	100%	DPA SKPD Pis RMA dan RMA SKPD Renji SKPD Review Rencana Instransi RKT dan PK (SKPD) RDPK	2.0x/tahun 6.0x/tahun 1.6x/tahun 1.6x/tahun 2.0x/tahun 1.6x/tahun	100 %	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
<b>1.201.2.04.00.07</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DPRD DENGAN MASS MEDIA</b>										<b>Rp. 3.500.000.000,00</b>	<b>Rp. 4.000.000.000,00</b>		
1.201.2.04.00.07.001	Penyebutan Kinerja dan Produk Kerja DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penyempurnaan informasi aktualitas DPRD melalui web, media cetak	95%	publitas aktualitas dan kinerja DPRD	10 jenis sarana media	51,15 %	Penyempurnaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada public	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
1.201.2.04.00.07.002	Pengembangan Komitmen Ke-humasan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penyempurnaan informasi aktualitas DPRD melalui web, media cetak	90%	Membentuk jejaring kerja dan komunikasi	7 daerah	48,85%	Terpenyempurnanya jaringan komitmen dengan media massa	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
<b>1.201.2.04.00.09</b>	<b>PROGRAM RELAYANAN TAMU DAN PIMPINAN DPRD</b>										<b>Rp. 9.000.000.000,00</b>	<b>Rp. 10.000.000.000,00</b>		
1.201.2.04.00.09.013	Penyempurnaan Kepraktisan DPRD dan Sekretariat DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penyempurnaan Kualitas Kepraktisan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memasuki	98%	Layanan Rajut Paripurna Istimewa DPRD	7 kali	7 daerah	Membentuk jejaring kerja dan komunikasi	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
1.201.2.04.00.09.014	Kordinasi dan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Jawa dan Luar Jawa	Penyempurnaan Kualitas Kepraktisan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memasuki	98%	Resalah Rajut Istimewa DPRD	12 bulan	11,53%	Terpenyempurnanya Bahan/Referensi Pengambilan Keputusan Pimpinan DPRD	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
<b>1.201.2.04.00.74</b>	<b>PROGRAM PENYEMPURNAN UTHERIA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>										<b>Rp. 46.591.581.000,00</b>	<b>Rp. 48.850.000.000,00</b>		
1.201.2.04.00.74.007	Pengembangan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan cabandingan agenda	100%	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti daklat meningkatkan kemampuannya	4 kali 55 org	4,82 %	Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD bertambah/meningkat	Rp. 2.800.000.000,00	Rp. 2.800.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
1.201.2.04.00.74.037	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan cabandingan agenda	100%	Keputusan DPRD tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD dan RANCU Pemda DIY	1 keputusan	0,42 %	Rekomendasi/Referensi penyusunan RANCU DIY Tahun 2018	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
1.201.2.04.00.74.039	Penyelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan cabandingan agenda	100%	Laporan hasil Konsultasi/Kunjungan kerja	5 Laporan	2,82%	Terpenyempurnanya Dukungan Bahan / Referensi pengambilan keputusan Badan Musyawarah	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 1.750.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran
1.201.2.04.00.74.040	Penyelenggaraan Tugas Komite-komite DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan cabandingan agenda	100%	Review Jadwal Kegiatan DPRD	12 bulan	18,30 %	Laporan dan rekomendasi Komisi DPRD	Rp. 9.911.581.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sesuai Anggaran

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretaris DPRD	Indikator Kinerja										Keterangan				
	Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program	Target	Tolok Ukur	Keluaran Kegiatan	Target	Tolok Ukur	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jumlah Pagu : Rp. 68.075.081.000,00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			dan brokasi	Pemerintah Daerah Mengingat											
1.201.2.04.00.74.041	Penyenggaraan Tugas Badan Pembantuan Perda dan atau Perdas	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Kajian/terminasi terhadap Raport	8 Raport	Kajian dan risalah Perda dan abu perdas	2,20 %	Rp. 1.204.675.000,00	Rp. 1.204.675.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.042	Penyenggaraan Tugas Badan Pembantuan	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Laporan hasil konsultasi/kunjungan kerja Propemdes/LS DIY Tahun 2016	5 Laporan	Terdanya Bahan/Referensi Bahan Kebutuhan DPRD DIY	0,77 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.043	Penyenggaraan Pembahasan Pansar/Inisiatif/Kegiatan Dewan	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Laporan hasil forum/asil/Kunjungan kerja	5 Laporan	Kepuasan/Nota persetujuan bersama untuk membuat peraturan Daerah/kebijakan daerah lainnya	34,79 %	Rp. 13.000.000.000,00	Rp. 13.000.000.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.045	Penyenggaraan Tugas Badan Anggaran	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS 2017	2 dokumen	Terpenuhi/ya Bahan / referensi pengambilan keputusan Badan Anggaran	3,45 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.049	Penyenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS P 2016	2 dokumen	Terpenuhi/ya penyusunan aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD DIY	9,15 %	Rp. 5.600.000.000,00	Rp. 5.600.000.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.050	Penyenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Persetujuan bersama Raport APBD 2017	1 dokumen	Terpenuhi/ya dukungan bahan referensi pengambilan keputusan Fraksi	2,12 %	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.053	Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Surat Rekomendasi Fraksi	17 rekomendasi	Terpenuhi/ya pembahasan Raport insiatif DPRD DIY	6,58 %	Rp. 3.795.325.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.054	Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Dokumen bahan Kajian Kebijakan DPRD	4 dokumen	Terpenuhi/ya Bahan/Referensi pengambilan keputusan Adit	1,95%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.055	Penyenggaraan Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum DPRD dan Sekretariat DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD	1 dokumen	Penyabutan dan kemudahan akses informasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD	0,686 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.056	Pengembangan Dokumentasi Kegiatan Pidsangan DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Penyabutan informasi produk hukum	1 paket	Terpenuhi/ya dukungan arsip dan dokumentasi kegiatan DPRD DIY	0,71 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.057	Penyenggaraan Kaulas Parlemen Peremban	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Laporan hasil kerja DPRD	1 laporan	meningkatkan ketewaktan parlemen perempuan DIY	2%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Sekretariat DPRD		
1.201.2.04.00.74.058	Penyenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	Kinerja aparatur dan brokasi	Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Sekretariat DPRD	Penentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda	100%	Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD	6 keputusan	Peningkatan akuntabilitas pemerintah Daerah	4 %	Rp. 1.720.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Sekretariat DPRD		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prorokan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Kebaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		SKPD	1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1	Wajib	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.20	<b>OTONOMI DAERAH, PERHATIAN UMUM, KEMERDEKAAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>														
1.20.1.20.05.00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset														
1.20.1.20.05.00.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>														
1.20.1.20.05.00.01.001	Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengiriman dokumen	100 dokumen	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 28.798.000,00	Rp. 30.450.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	
1.20.1.20.05.00.01.002	Penyediaan Jasa Komersial Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembayaran bagian rekening telepon, listik, ar dan internet	12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	5,88%	Rp. 2.251.395.000,00	Rp. 2.307.079.875,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	
1.20.1.20.05.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	16 unit	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0,18%	Rp. 27.794.000,00	Rp. 28.458.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	
1.20.1.20.05.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	19 unit	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		Rp. 261.135.000,00	Rp. 261.135.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	
1.20.1.20.05.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium	23 orang/12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	3,46%	Rp. 1.109.888.000,00	Rp. 1.109.888.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	
1.20.1.20.05.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan gedung kantor	9 gedung, 2 gedung	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	2,67%	Rp. 280.865.000,00	Rp. 287.886.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	
1.20.1.20.05.00.01.011	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Barang cetakan	15 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	3,80%	Rp. 354.669.000,00	Rp. 358.215.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	
1.20.1.20.05.00.01.012	Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perbaikan kabel dan pembangunan penerangan kantor	13 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0,24%	Rp. 117.688.000,00	Rp. 120.630.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	
1.20.1.20.05.00.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Isi tabung AMR: 3,5 KG DAN 2,5 KG	3 jenis, 15 buah	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0,08%	Rp. 81.888.000,00	Rp. 83.935.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	
1.20.1.20.05.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perabot Perendang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Buku kepastakaan	5 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0,43%	Rp. 80.565.000,00	Rp. 80.565.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	
1.20.1.20.05.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Kinerja Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tewujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Makan minum rapat	12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1,46%	Rp. 145.776.000,00	Rp. 149.420.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Soding Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Unsur/Bidang/Usaha Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Keterangan						
					Haal Program		Haal Kegiatan		Pagi Indikator	Profilan Maju	Jumlah Pagi : Rp. 192.324.621.000,00			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.2.20.05.00.01.018	Reparasi/Perbaikan/ Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor dan Benda Tidak Berwujud	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Kebijakan se DIY dan Luar DIY	Keseluruhan dan luar daerah	100%	12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5,88%	Rp. 1.219.949.000,00	Rp. 1.219.949.000,00			
1.201.2.20.05.00.01.021	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Keunggulan dan Aset	Budi pembayaran honorarium pegawai kepegawaian	100%	8 org/12 bl	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0,6%	Rp. 12.497.000,00	Rp. 12.384.000,00			
1.201.2.20.05.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Keunggulan dan Aset	Budi pembayaran jasa keamanan kantor	100%	20 org/12 bl	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1,46%	Rp. 1.061.549.000,00	Rp. 1.067.387.000,00			
1.201.2.20.05.00.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Keunggulan dan Aset	Budi pembayaran retribusi sampah	100%	12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1,25%	Rp. 12.590.000,00	Rp. 12.504.000,00			
<b>1.201.2.20.05.00.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERANTARAN SARANA DAN PRASARANA</b>									<b>Rp. 163.493.346.000,00</b>	<b>Rp. 69.932.263.000,00</b>			
1.201.2.20.05.00.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Bantul Sleman	Gedung kantor	100%	2 unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	1,25%	Rp. 54.585.970.000,00	Rp. 54.585.970.000,00			
1.201.2.20.05.00.02.007	Perbaikan Perlembagaan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Keunggulan dan Aset	Perbaikan perlembagaan gedung kantor	100%	6 jenis	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana (gedung kantor) terpenuhi	0,38%	Rp. 2.643.940.000,00	Rp. 2.643.940.000,00			
1.201.2.20.05.00.02.009	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Keunggulan dan Aset	Penyediaan perbaikan gedung kantor	100%	5 jenis	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perbaikan gedung kantor) terpenuhi	0,61%	Rp. 1.794.625.000,00	Rp. 1.794.625.000,00			
1.201.2.20.05.00.02.010	Pengadaan Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Keunggulan dan Aset	Meubeler	100%	3 jenis	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (meubeler) terpenuhi	0,08%	Rp. 3.210.621.000,00	Rp. 3.210.621.000,00			
1.201.2.20.05.00.02.011	D E D Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Tagihanjo	DED	100%	1 dokumen	Kebutuhan pengadaan sarana prasarana aparatur (DED Gedung kantor) terpenuhi	1,25%	Rp. 1.027.460.000,00	Rp. 0,00			
1.201.2.20.05.00.02.013	Pengadaan Tanah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Bantul Sleman	Tanah	100%	850m2	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (pengadaan tanah) terpenuhi	0,15%	Rp. 95.000.000.000,00	Rp. 0,00			
1.201.2.20.05.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Keunggulan dan Aset	Gedung kantor terpelihara	100%	9 unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (pemeliharaan gedung kantor) terpenuhi	0,51%	Rp. 971.110.000,00	Rp. 995.387.000,00			
1.201.2.20.05.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Bantul Sleman Wates Nossari	Kendaraan dinas operasional roda 2 terpelihara	100%	2 unit	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana (kendaraan dinas operasional) terpenuhi	0,47%	Rp. 718.860.000,00	Rp. 718.860.000,00			
1.201.2.20.05.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlembagaan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Keunggulan dan Aset	AC Central	100%	40 unit	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (pemeliharaan gedung kantor) terpenuhi	0,34%	Rp. 1.355.900.000,00	Rp. 1.355.900.000,00			
1.201.2.20.05.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Bantul Danurejan	Perbaikan terpelihara	100%	2 jenis	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (perbaikan gedung kantor) terpenuhi	0,08%	Rp. 259.525.000,00	Rp. 259.525.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Profilan Maju	Keterangan			
					Haal Program		Kulianan Kegiatan				Haal Kegiatan		1/2/3	1/2/3
					Tobok Ukur	Target	Tobok Ukur	Target			Tobok Ukur	Target		
1.20.1.20.05.00.02.030	Pemeliharaan Asap Kendaraan Bermotor	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Asap kendaraan bermotor terpelihara	1500 Berkas	1.25%	Rp. 1.651.544.000,00	Rp. 1.651.544.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		
1.20.1.20.05.00.02.031	Pemeliharaan Asap Keuangan	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Pemeliharaan asap in aktif	5000 Berkas	0.47%	Rp. 284.391.000,00	Rp. 284.391.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		
1.20.1.20.05.00.02.032	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Penyusunan asap keuangan	2500 Berkas	0.14%	Rp. 79.600.000,00	Rp. 82.200.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		
<b>1.20.1.20.05.00.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>								<b>Rp. 707.083.000,00</b>	<b>Rp. 728.675.000,00</b>				
1.20.1.20.05.00.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Instrumen SKP PNS DPPKA Tahun 2017	257 orang	11.56%	Rp. 90.000.000,00	Rp. 92.250.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		
1.20.1.20.05.00.05.042	Pembinaan dan pelaksanaan bimbingan bagi pengelola keuangan	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Nilai SKP PNS DPPKA Tahun 2016	158 orang							
1.20.1.20.05.00.05.075	Peningkatan kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Peningkatan kinerja pegawai	85%	3.18%	Rp. 40.083.000,00	Rp. 45.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		
1.20.1.20.05.00.06.012	Pengembangan Data Dan Informasi	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Memperbaharui mutu ISO 9001:2008	5 sertifikat	82.65%	Rp. 577.000.000,00	Rp. 591.425.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		
<b>1.20.1.20.05.00.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN CAJAPAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>								<b>Rp. 397.500.000,00</b>	<b>Rp. 407.437.000,00</b>				
1.20.1.20.05.00.06.015	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Perencanaan minimal dan aplikasi	2 file, 1 aplikasi	46.27%	Rp. 214.000.000,00	Rp. 219.350.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		
1.20.1.20.05.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Seriknansi program kegiatan PA dan RPA	1 DPA TA.2018.1 DPPA TA.2017	30.96%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 128.125.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		
1.20.1.20.05.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Nilai Laporan kinerja Instansi Pemerintah DPPKA DIY	A	2.13%	Rp. 4.500.000,00	Rp. 8.712.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		
1.20.1.20.05.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Kesejangan aliran kas dengan realisasi anggaran SKPD	5%	6.61%	Rp. 23.000.000,00	Rp. 23.575.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		
1.20.1.20.05.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	Kinerja aparatur aparatur dan brokrasi	Kelembagaan dan Pengembangan	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	100%	Kesejangan antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	95%	7.81%	Rp. 27.000.000,00	Rp. 27.675.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kelembagaan dan Ases	Soding Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Profilan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Hasil Kegiatan				1/2/3	(14)	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1.201.2.0.05.00.17	<b>PROGRAM PENGHATAN DAN PENGEMANGAN KEUANGAN DAERAH</b>	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.201.2.0.05.00.17.081	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danuengan	Penertasan ketepatan dan keakuratan dalam penggoloban keuangan daerah	100%	1. Raperdas APBD TA.2018 (1 buku kuning, 1 buku putih) 2. Rapergab APBD TA. 2018 (1 buku kuning, 1 buku putih) 3. Peds APBD TA. 2018 4. Pergub APBD TA. 2018	500 buku 500 buku 400 buku 400 buku	1. Peds APBD TA.2018 2. Pergub APBD TA. 2018 3. Rapergab tentang Penjabaran APBD TA.2018 4. Pergub tentang Penjabaran APBD TA.2018	21.69%	Rp. 1.233.050.000,00	Rp. 1.233.050.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1.201.2.0.05.00.17.082	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danuengan	Penertasan ketepatan dan keakuratan dalam penggoloban keuangan daerah	100%	1. Raperdas APBD Perubahan TA.2017 (1 buku kuning, 1 buku putih) 2. Rapergab Perubahan APBD TA.2017 (1 buku kuning, 1 buku putih) 3. Peds APBD Perubahan TA.2017 4. Pergub Perubahan APBD TA.2017 5. Pergub Perubahan APBD Dana Keistimewaan TA.2017	1.000 buku 250 buku 500 buku 500 buku	1. Peds APBD TA.2017 2. Pergub APBD TA.2017 3. Pergub Perubahan APBD Dana Keistimewaan TA.2017	30.72%	Rp. 1.573.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1.201.2.0.05.00.17.083	Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca dan Belanja Daerah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danuengan	Penertasan ketepatan dan keakuratan dalam penggoloban keuangan daerah	100%	1. Laporan Pertanggungjawaban APBD TA.2016 2. Rapergab Pertanggungjawaban APBD TA.2016 3. Peds Pertanggungjawaban APBD TA.2016 4. Pergub Pertanggungjawaban APBD TA.2016 5. Laporan keuangan un audited Tahun 2016 6. Laporan keuangan audited Tahun 2016 7. Laporan semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya TA.2016	200 buku 300 buku 300 buku 450 buku 40 buku 100 buku 100 buku	1. Laporan Pertanggungjawaban APBD TA.2016 dan KPA tepat waktu ( 91 PA/KPA) 2. Rapergab Pertanggungjawaban APBD TA.2016 dan KPA 3. Peds Pertanggungjawaban APBD TA.2016 dan KPA 4. Pergub Pertanggungjawaban APBD TA.2016 dan KPA 5. Laporan keuangan PA dan KPA 6. Laporan semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya PA dan KPA	100%	Rp. 1.145.000.000,00	Rp. 1.145.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1.201.2.0.05.00.17.084	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danuengan	Penertasan ketepatan dan keakuratan dalam penggoloban keuangan daerah	100%	1. Akurasi data gaji PNS 2. Keaccoran data TWP dengan pihak ketiga (BPJS Kesehatan, PT.Taspen (Penasren)) 3. Laporan rekonalisasi 4. Pemutakhiran data gaji PNS dari GDD dan SIRKO	100%	1. Akurasi data gaji PNS 2. Keaccoran data TWP dengan pihak ketiga (BPJS Kesehatan, PT.Taspen (Penasren)) 3. Laporan rekonalisasi 4. Pemutakhiran data gaji PNS dari GDD dan SIRKO	4.68%	Rp. 223.884.000,00	Rp. 223.884.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1.201.2.0.05.00.17.085	Penyusunan Gaji Pegawai Daerah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danuengan	Penertasan ketepatan dan keakuratan dalam penggoloban keuangan daerah	100%	1. Akurasi data gaji PNS 2. Keaccoran data TWP dengan pihak ketiga (BPJS Kesehatan, PT.Taspen (Penasren)) 3. Laporan rekonalisasi 4. Pemutakhiran data gaji PNS dari GDD dan SIRKO	95%	1. Akurasi data gaji PNS 2. Keaccoran data TWP dengan pihak ketiga (BPJS Kesehatan, PT.Taspen (Penasren)) 3. Laporan rekonalisasi 4. Pemutakhiran data gaji PNS dari GDD dan SIRKO	4.68%	Rp. 363.209.000,00	Rp. 363.209.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1.201.2.0.05.00.17.086	Penyusunan Administrasi dan Penggoloban Keuangan Daerah	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danuengan	Penertasan ketepatan dan keakuratan dalam penggoloban keuangan daerah	100%	1. Akurasi data gaji PNS 2. Keaccoran data TWP dengan pihak ketiga (BPJS Kesehatan, PT.Taspen (Penasren)) 3. Laporan rekonalisasi 4. Pemutakhiran data gaji PNS dari GDD dan SIRKO	95%	1. Akurasi data gaji PNS 2. Keaccoran data TWP dengan pihak ketiga (BPJS Kesehatan, PT.Taspen (Penasren)) 3. Laporan rekonalisasi 4. Pemutakhiran data gaji PNS dari GDD dan SIRKO	4.68%	Rp. 618.700.000,00	Rp. 618.700.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Kelestimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagi Indikatorif	Profilan Maju	Keterangan		
					Haal Program		Kulakuan Kegiatan					Haal Kegiatan	
					Tobok Ukur (6)	TARGET (7)	Tobok Ukur (8)	TARGET (9)				Tobok Ukur (10)	TARGET (11)
1.20.1.2.0.05.00.17.087	Penyusunan Dokumen Beyeidaban Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Pengendalian Keuangan Daerah Hemat	Danurejan	Penertases ketepatan dan keakuratan dalam pengeloban keuangan daerah	100%	1. DPA SKPD TA.2017 yang telah disyahkan 2. DPPA SKPD TA.2017 yang telah disyahkan 3. DPA Dana Kelestimewaan SKPD TA.2017 yang telah disyahkan 4. SKPD SKPD TA.2017	73 dokumen, 438 buku	1. Acuan pelaksanaan kegiatan SKPD TA.2017 2. Acuan rencana penerimaan dan pengelakuan kas TA.2017 3. SPD SKPD TA.2017	Rp. 963.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengeladaan dan Keuangan dan Aset		
1.20.1.2.0.05.00.17.088	Penyempurnaan Sistem dan Sarana Kerja Program Keuangan Daerah	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Pengendalian Keuangan Daerah Hemat	Danurejan	Penertases ketepatan dan keakuratan dalam pengeloban keuangan daerah	100%	1. Sistem aplikasi SKPD 2. Laporan keuangan SKPD berbasis akrual 3. Peluaran operasional SKPD berbasis akrual	1 sistem aplikasi 1 laporan 343 orang, 3 akt	Implementasi SKPD dapat berjalan dengan baik	Rp. 1.238.925.000,00	Dinas Pendapatan, Pengeladaan dan Keuangan dan Aset		
1.20.1.2.0.05.00.17.089	Pelatihan dan Sosialisasi Program Aplikasi Gaji	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Pengendalian Keuangan Daerah Hemat	Danurejan	Penertases ketepatan dan keakuratan dalam pengeloban keuangan daerah	100%	Penyaji gaji terampil 286 orang	100%	Rp. 83.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengeladaan dan Keuangan dan Aset			
<b>1.20.1.2.0.05.00.18</b>	<b>PROGRAM PERNITAMAN DAN PERHIMPATAN KEMAJUAN KEUANGAN KAB./KOTA</b>								<b>Rp. 591.284.000,00</b>				
1.20.1.2.0.05.00.18.007	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Pengendalian Keuangan Daerah Hemat	Danurejan	Penertases jumlah SK gubernur hasil evaluasi atas anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab./kota dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan atau hasil evaluasi Gubernur	100%	1. Evaluasi Rencana terentang Perencanaan APBD kab/kota TA.2017 2. Evaluasi Rencana terentang APBD Kab/Kota TA.2018 4. Hasil perencanaan terentang tidak lanjut hasil evaluasi APBD	15 Raportada	Selaku penyempurnaan Raportada APBD Kab/Kota	Rp. 591.284.000,00	Dinas Pendapatan, Pengeladaan dan Keuangan dan Aset		
<b>1.20.1.2.0.05.00.40</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERHIMPATAN BUMD SERTA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO</b>								<b>Rp. 997.880.000,00</b>				
1.20.1.2.0.05.00.40.006	Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan BUKP	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Pengendalian Keuangan Daerah Hemat	Diy	Penertases Perencanaan hasil pengeloban keayanan daerah yang dipisahkan	100%	1. Ruperabung terentang PRK BLUD 2. Pemalakan kinerja BLUD 3. Keaktifan Gubernur terentang Laporan keuangan BUKP TA.2016, laba dan pengesahan RAKT BUKP 2016 4. Fasilitas BUMD, BLUD dan BUKP	1 Raperabung 5 BLUD 3 Kepuasan Gubernur	Musajlemen BUMD dan BUKP optimal	Rp. 997.880.000,00	Dinas Pendapatan, Pengeladaan dan Keuangan dan Aset		
<b>1.20.1.2.0.05.00.48</b>	<b>PROGRAM PENTINGATAN PENDAPATAN DAERAH</b>								<b>Rp. 8.693.024.000,00</b>				
1.20.1.2.0.05.00.48.002	Pelayanan Kesamatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Pengendalian Keuangan Daerah Hemat	Kota Yogyakarta	Penertases kemaikan pendapatan pajak dan retribusi	1.87%	Target BRNB semula (2016) Rp102.181.792.000,00 target PKB semula (2016) Rp. 114.594.653.000,00 Wajib pajak	Tahun 2017 menjadi Rp1.500.000.000,00 Tahun 2017 menjadi Rp.117.000.000.000,00 290.000 WP	Penertases kontribusi PAD di Kota Yogyakarta	Rp. 990.800.000,00 Rp. 995.800.000,00	Dinas Pendapatan, Pengeladaan dan Keuangan dan Aset		
1.20.1.2.0.05.00.48.003	Pelayanan Kesamatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Pengendalian Keuangan Daerah Hemat	Kabupaten Bantul	Penertases kemaikan pendapatan pajak dan retribusi	1.87%	Target BRNB semula (2016) Rp81.000.000,00 target PKB semula (2016) Rp128.860.000.000,00 Wajib pajak	Tahun 2017 menjadi Rp81.000.000,00 Tahun 2017 menjadi Rp128.860.000.000,00 290.000 WP	Penertases kontribusi PAD di Kabupaten Bantul	Rp. 562.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengeladaan dan Keuangan dan Aset		
1.20.1.2.0.05.00.48.004	Pelayanan Kesamatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Pengendalian Keuangan Daerah Hemat	Kabupaten Gunungkidul	Penertases kemaikan pendapatan pajak dan retribusi	1.87%	Target BRNB semula (2016) Rp27.500.000,00 target PKB semula (2016) Rp42.385.429.800,00 Wajib pajak	Tahun 2017 menjadi Rp27.500.000,00 Tahun 2017 menjadi Rp42.385.429.800,00 222.337 WP	Penertases kontribusi PAD di Kabupaten Gunungkidul	Rp. 515.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengeladaan dan Keuangan dan Aset		
1.20.1.2.0.05.00.48.005	Pelayanan Kesamatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo	Kinerja aparatur dan brokresi	Akurabilitas Pengendalian Keuangan Daerah Hemat	Kabupaten Kulon Progo	Penertases kemaikan pendapatan pajak dan retribusi	1.87%	Target BRNB semula (2016) Rp28.424.157.000,00 target PKB semula (2016) Rp28.424.157.000,00 Wajib pajak	Tahun 2017 menjadi Rp28.424.157.000,00 Tahun 2017 menjadi Rp28.424.157.000,00 222.337 WP	Penertases kontribusi PAD di Kabupaten Kulonprogo	Rp. 535.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengeladaan dan Keuangan dan Aset		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Unsur/Bidang/Usaha Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sesuai Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Materi Kegiatan	Pagi Indikator	Profilan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/3	
					Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur						Target
1.201.2.0.05.00.48.006	Pelayanan Kesambatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sleman	Kinerja aparatur dan brokasi	Daerah Mengingat	Kabupaten Sleman	Perentase kenaikan pendapatan pajak dan retribusi	1,87%	Target BBNB semula (2016) Rp. 162.060.101.000,00 Target BBNB semula (2017) Rp. 160.000.000.000,00 Target Lain-lain PAD yang sah semula (2016) Rp. 49.580.000,00 Target PKB semula (2016) Rp. 260.139.178.000,00	Tahun 2017 menjadi Rp. 162.467.692.000,00 Tahun 2017 menjadi Rp. 160.000.000.000,00 Tahun 2017 menjadi Rp. 49.580.000,00 Tahun 2017 menjadi Rp. 271.000.000.000,00	100%	Rp. 1.400.000.000,00	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset	Sidang Berjalan	
1.201.2.0.05.00.48.008	Pendataan Potensi dan Pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulasi Pengalihan Keuangan Daerah Mengingat	Kota Yogyakarta	Perentase kenaikan pendapatan pajak dan retribusi	1,87%	Data status wajib pajak dan potensi pajak KBBM dan pengalihan yang mempunyai KBBM dengan status masih dimiliki	10.000 WP 2000 wajib pajak	Rp. 377.000.000,00	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset	Sidang Berjalan		
1.201.2.0.05.00.48.009	Pendataan Potensi dan Pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulasi Pengalihan Keuangan Daerah Mengingat	Kabupaten Bantul	Perentase kenaikan pendapatan pajak dan retribusi	1,87%	Data status wajib pajak dan potensi pajak KBBM dan pengalihan yang mempunyai KBBM dengan status masih dimiliki	16000 WP 2500 WP	Rp. 562.000.000,00	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset	Sidang Berjalan		
1.201.2.0.05.00.48.010	Pendataan Potensi dan Pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulasi Pengalihan Keuangan Daerah Mengingat	Kabupaten Gunung Kidul	Perentase kenaikan pendapatan pajak dan retribusi	1,87%	Data status wajib pajak dan potensi pajak KBBM dan pengalihan yang mempunyai KBBM dengan status masih dimiliki	8000 WP 2000 WP	Rp. 175.000.000,00	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset	Sidang Berjalan		
1.201.2.0.05.00.48.011	Pendataan Potensi dan Pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulasi Pengalihan Keuangan Daerah Mengingat	Kabupaten Kulon Progo	Perentase kenaikan pendapatan pajak dan retribusi	1,87%	Data status wajib pajak dan potensi pajak KBBM dan pengalihan yang mempunyai KBBM dengan status masih dimiliki	8000 WP 2000 WP	Rp. 320.000.000,00	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset	Sidang Berjalan		
1.201.2.0.05.00.48.012	Pendataan Potensi dan Pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sleman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulasi Pengalihan Keuangan Daerah Mengingat	Kabupaten Sleman	Perentase kenaikan pendapatan pajak dan retribusi	1,87%	Data status wajib pajak dan potensi pajak KBBM dan pengalihan yang mempunyai KBBM dengan status masih dimiliki	2.5000 WP 2000 WP	Rp. 650.000.000,00	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset	Sidang Berjalan		
1.201.2.0.05.00.48.013	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengalihan Pendapatan Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulasi Pengalihan Keuangan Daerah Mengingat	Badan kerjasama Kabupaten Moji Badan Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Peningkatan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Perikanan dan Perikanan Dinas Perumahan dan Energi Sumberejo Mineral dan Energi Dinas Perumahan, Pengalihan, dan Energi Keuangan dan Aset Dinas Perumahan, Pengalihan, dan Energi Roga Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan dan Perhubungan Dinas Perhubungan dan Perhubungan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perentase kenaikan pendapatan pajak dan retribusi	1,87%	Data perimbangan semula Rp.117.510.746.000,00 menjadi Rp.149.679.737.730.000,00 menjadi Rp.13.373.357.000,00 menjadi Rp.1.551.810.360.527,00	21,70%	Rp. 2.533.224.000,00	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset	Sidang Berjalan		
1.201.2.0.05.00.48.014	Pengalihan Potensi dan Inovasi Sumber Pendapatan Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulasi Pengalihan Keuangan Daerah Mengingat	Mak/Kota se DIY	Perentase kenaikan pendapatan pajak dan retribusi	1,87%	Perentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	49,18%	Rp. 336.000.000,00	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset	Sidang Berjalan		
<b>1.201.2.0.05.00.55</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>								<b>Rp. 2.984.984.000,00</b>	<b>Rp. 3.011.000,00,00</b>			
1.201.2.0.05.00.55.001	Peningkatan status hak atas tanah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akumulasi Pengalihan Keuangan Daerah Mengingat	Banyuwangi Kudus Ngablak Pondong	Perentase aset daerah yang dapat dipertahankan	54,46%	Legal status tanah yang dimantapkan oleh Pemda DIY	7 bidang	Rp. 180.000.000,00	Rp. 184.000.000,00	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset	Sidang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Profilan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Kulianan Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	1/2/3			
					Tolok Ukur (6)	Target (7)	Tolok Ukur (8)	Target (9)	Tolok Ukur (10)	Target (11)							
1.201.2.01.05.00.55.002	Pemeliharaan barang milik daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Hemat	Bangunan Danurejan Dipok	Pemertase aset daerah yang dapat dipertimalkan	54,46%	Kajian HBU Aset Keluarang	1 dokumen	1 dokumen	Kontibus Pendidikan dari barang milik daerah memngkat	10%	Rp. 410.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Keuangan dan Aset	1/2/3	(15)	Sidang Borjolan
1.201.2.01.05.00.55.003	Pengawasan dan pemeliharaan barang milik daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Hemat	Bangunan Danurejan Condokusuman	Pemertase aset daerah yang dapat dipertimalkan	54,46%	Asuransi BMD	4 polis	Barang milik daerah terpelihara dan terjamin keamanannya		2%	Rp. 1.650.000.000,00	Rp. 1.640.984.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Keuangan dan Aset			Sidang Borjolan
1.201.2.01.05.00.55.004	Pengawasan dan pemeliharaan barang milik daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Hemat	Danurejan	Pemertase aset daerah yang dapat dipertimalkan	54,46%	Baldi sektor PBB	16.275	Efisien anggaran pemeliharaan		100%	Rp. 180.000.000,00	Rp. 170.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Keuangan dan Aset			Sidang Borjolan
1.201.2.01.05.00.55.005	Pemeliharaan barang milik daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Hemat	Danurejan	Pemertase aset daerah yang dapat dipertimalkan	54,46%	1. Laporan BMD TA.2017 2. Laporan BMD TA.2017 3. Laporan BMD TA.2017 4. Laporan BMD TA.2017 5. Laporan BMD TA.2017 6. Laporan BMD TA.2017 7. Laporan BMD TA.2017 8. Laporan BMD TA.2017 9. Laporan BMD TA.2017 10. Laporan BMD TA.2017 11. Laporan BMD TA.2017 12. Laporan BMD TA.2017 13. Laporan BMD TA.2017 14. Laporan BMD TA.2017 15. Laporan BMD TA.2017 16. Laporan BMD TA.2017 17. Laporan BMD TA.2017 18. Laporan BMD TA.2017 19. Laporan BMD TA.2017 20. Laporan BMD TA.2017 21. Laporan BMD TA.2017 22. Laporan BMD TA.2017 23. Laporan BMD TA.2017 24. Laporan BMD TA.2017 25. Laporan BMD TA.2017 26. Laporan BMD TA.2017 27. Laporan BMD TA.2017 28. Laporan BMD TA.2017 29. Laporan BMD TA.2017 30. Laporan BMD TA.2017 31. Laporan BMD TA.2017 32. Laporan BMD TA.2017 33. Laporan BMD TA.2017 34. Laporan BMD TA.2017 35. Laporan BMD TA.2017 36. Laporan BMD TA.2017 37. Laporan BMD TA.2017 38. Laporan BMD TA.2017 39. Laporan BMD TA.2017 40. Laporan BMD TA.2017 41. Laporan BMD TA.2017 42. Laporan BMD TA.2017 43. Laporan BMD TA.2017 44. Laporan BMD TA.2017 45. Laporan BMD TA.2017 46. Laporan BMD TA.2017 47. Laporan BMD TA.2017 48. Laporan BMD TA.2017 49. Laporan BMD TA.2017 50. Laporan BMD TA.2017 51. Laporan BMD TA.2017 52. Laporan BMD TA.2017 53. Laporan BMD TA.2017 54. Laporan BMD TA.2017 55. Laporan BMD TA.2017 56. Laporan BMD TA.2017 57. Laporan BMD TA.2017 58. Laporan BMD TA.2017 59. Laporan BMD TA.2017 60. Laporan BMD TA.2017 61. Laporan BMD TA.2017 62. Laporan BMD TA.2017 63. Laporan BMD TA.2017 64. Laporan BMD TA.2017 65. Laporan BMD TA.2017 66. Laporan BMD TA.2017 67. Laporan BMD TA.2017 68. Laporan BMD TA.2017 69. Laporan BMD TA.2017 70. Laporan BMD TA.2017 71. Laporan BMD TA.2017 72. Laporan BMD TA.2017 73. Laporan BMD TA.2017 74. Laporan BMD TA.2017 75. Laporan BMD TA.2017 76. Laporan BMD TA.2017 77. Laporan BMD TA.2017 78. Laporan BMD TA.2017 79. Laporan BMD TA.2017 80. Laporan BMD TA.2017 81. Laporan BMD TA.2017 82. Laporan BMD TA.2017 83. Laporan BMD TA.2017 84. Laporan BMD TA.2017 85. Laporan BMD TA.2017 86. Laporan BMD TA.2017 87. Laporan BMD TA.2017 88. Laporan BMD TA.2017 89. Laporan BMD TA.2017 90. Laporan BMD TA.2017 91. Laporan BMD TA.2017 92. Laporan BMD TA.2017 93. Laporan BMD TA.2017 94. Laporan BMD TA.2017 95. Laporan BMD TA.2017 96. Laporan BMD TA.2017 97. Laporan BMD TA.2017 98. Laporan BMD TA.2017 99. Laporan BMD TA.2017 100. Laporan BMD TA.2017	100%	Terb. administratif pengelolaan BMD di Pemda DIY	Rp. 387.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Keuangan dan Aset			Sidang Borjolan		
1.201.2.01.05.00.55.006	Pengawasan pengelolaan barang milik daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Hemat	Danurejan	Pemertase aset daerah yang dapat dipertimalkan	54,46%	1. Laporan realisasi pengabdian barang dan jasa SKPD TA.2017 2. Tuntutan ganti rugi 3. Sosialisasi peraturan tentang BMD	1 dokumen 25 orang 350 orang	Dapat hasil pengabdian barang dan jasa SKPD		6,64%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pengabdian Keuangan dan Aset			Sidang Borjolan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 16.185.122.325,00					
	Nomor	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saaran Daerah	Lokas	Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Masi Kegiatan	Pagu Indikatif	Praktekan Mula		Keterangan		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	1/2/3	1/2/3	SKPD
1		Wajib														
1.20		<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UNDA, ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN, KEBERAGAMAN, DAN PERSANDIAN</b>														
1.20.1.20.06.00		<b>Badan Pendidikan dan Pelatihan</b>														
1.20.1.20.06.00.01		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>														
1.20.1.20.06.00.01.001		Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Maksimal	1625 buah	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 11.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Paket pengiriman	1 tahun	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 650.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.006		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Jasa Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Kir Kendaraan roda 4	1 unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 8.100.000,00	Rp. 8.500.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.007		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Perawatan Pajastina kendaraan dinas/pembuatan nota 2 dan 4 topas tepat waktu	12 unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 48.715.900,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.008		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Perawatan Kaca	26.008 m2	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 329.314.700,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.010		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Perawatan Kamar Mandi	5.352 m2	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 27.500.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.011		Penyediaan Barang Cukakan Dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Perawatan Lantai	108.864 m2	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 2.500.000,00	Rp. 26.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.012		Penyediaan Konsumsi, Instalasi Listrik,Perencanaan, Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Alat tulis kantor	45 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.013		Penyediaan Peralatan Dan Perengkapan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Barang Cukakan	14 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 16.450.000,00	Rp. 18.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.014		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Penggandaan	70000 lembar	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.015		Penyediaan Bahan Baku Dan Perakuran Perundang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Konsumsi, Instalasi listrik,perencanaan bangunan kantor	23 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 8.100.000,00	Rp. 8.100.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.017		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Peralatan dan perlengkapan kantor	13 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.018		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Bidang Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10 buah	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 225.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			
1.20.1.20.06.00.01.022		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Program Kefj Pemertaha 01-06 Daerah Menyangkut	Program 01-06	100%	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 395.000.000,00	Rp. 395.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuran/Bidang Usahan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sisvan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Meterangan				
					Haal Program		Keluaran Kegiatan			Haal Kegiatan	Pagu Indikator	Prokran Maju	Jenis Kegiatan
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)					
1.201.2.0.06.00.01.029	Pengelolaan Asap Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Sarana pengelolaan asap dinamis SKPD	10 jenis	0,46%	Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 8.246.000,00	Rp. 0,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
<b>1.201.2.0.06.00.02</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>										<b>Rp. 2.880.154.800,00</b>	<b>Rp. 1.805.839.000,00</b>	
1.201.2.0.06.00.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembangunan Lengkap Kawasan Badan Diikat	1 paket	27,66%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (lengkap kawasan badan diikat) terpenuhi	Rp. 1.066.000.000,00	Rp. 0,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
1.201.2.0.06.00.02.006	Pengadaan Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Almari	7 buah	25,43%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (penengkapan gedung asrama daki) terpenuhi	Rp. 720.000.000,00	Rp. 230.000.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
							Ember	64 buah					
							Guyung	132 buah					
							Keranjang Sampah Kecil	104 buah					
							Keat	208 buah					
							Spring Bed	64 buah					
							Tong Sampah	12 buah					
							Tv dan Bracket	104 buah					
1.201.2.0.06.00.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	AC 2 PK	15 unit	10,80%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (penengkapan gedung kantor) terpenuhi	Rp. 305.822.000,00	Rp. 250.000.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
							Filing Cabinet	6 buah					
							Platu Gausai	5 buah					
1.201.2.0.06.00.02.009	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Komputer	10 unit	4,82%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perbaikan gedung kantor) terpenuhi	Rp. 138.963.800,00	Rp. 215.000.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
							Printer	3 unit					
1.201.2.0.06.00.02.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Laundry sprei, gendin, lapak meja	43000 kg	10,23%	Kib. Ruang pemeliharaan prasarana aparatur (rumah dinas) terpenuhi	Rp. 394.762.000,00	Rp. 314.762.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
							Pemeliharaan sumur dalam	1 buah					
							Renovasi taman lingkungan asrama	28340 m2					
							Perbaikan atap dan lantai	66 m2					
							Perbaikan pintu, kamar mandi, saluran pipa ledeng	20 buah					
1.201.2.0.06.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perawatan kabun lingkungan	15058 m2	3,44%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	Rp. 98.993.000,00	Rp. 108.993.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
							Perbaikan atap	30 m2					
							Perbaikan lantai	100 m2					
							Perbaikan pintu, kamar mandi/wc, saluran pipa air ledeng	36 buah					
1.201.2.0.06.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4/roda 2)	12 unit	4,18%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	Rp. 120.284.000,00	Rp. 130.284.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
1.201.2.0.06.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pelengkapan gedung kantor perlengkapan	5 jenis	1,77%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perengkapan gedung kantor) terpenuhi	Rp. 49.400.000,00	Rp. 49.400.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
1.201.2.0.06.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perabotan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perabotan gedung kantor perlengkapan	10 jenis	1,46%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perabotan gedung kantor) terpenuhi	Rp. 42.000.000,00	Rp. 53.000.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
1.201.2.0.06.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelur	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meubelur terpelihara	3 jenis	0,12%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (meubelur) terpenuhi	Rp. 3.400.000,00	Rp. 5.400.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
1.201.2.0.06.00.02.042	Rehabilitasi Gedung/Benteng Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehabilitasi smoking area gedung kantor	1 unit	1,75%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	Rp. 50.500.000,00	Rp. 450.000.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
<b>1.201.2.0.06.00.05</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>Rp. 328.097.000,00</b>	<b>Rp. 263.000.000,00</b>	
1.201.2.0.06.00.05.007	Pembinaan/Pengembangan Kualitas Profesi Pegawai/Staff	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Laporan Penilaian Angka Kredit	1 laporan	49,91%	Kapasitas Sumber daya aparatur bertambah/meningkat	Rp. 163.752.000,00	Rp. 165.000.000,00	Sedang Belanja dan Pelembaan
							Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	13 orang					

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuan/ Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sisvan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Meterangan				
					Haal Program		Kuluran Kegiatan			Haal Kegiatan	Pagu Indikatorif	Prakraan Maja	
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)					Took Ukur (10)
1.20.1.2.0.06.00.05.010	Penggiatan Mobsas Kerj Bagi Aparat	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Outward Bound Pegawai Bndiktat	80 orang	Kapasitas Sumber daya aparatur bertambah/meningkat	Rp. 48.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (14)	Sedang Berjalan
1.20.1.2.0.06.00.05.035	Pengembangan Data Dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Pengembangan Data dan Pengkibkaban Sistem Informasi Kesihatan	1 website, 1 SIM Diklat, 1 E-learning	Kapasitas Sumber daya aparatur bertambah/meningkat	Rp. 116.335.000,00	Rp. 98.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (15)	Sedang Berjalan
<b>1.20.1.2.0.06.00.06</b>	<b>PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>								<b>Rp. 146.206.725,00</b>	<b>Rp. 106.000.000,00</b>			
1.20.1.2.0.06.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	LAKIP	1 dokumen	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 7.010.000,00	Rp. 8.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (16)	Sedang Berjalan
1.20.1.2.0.06.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Laporan progres dan akhir tahun	1 laporan	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 18.206.725,00	Rp. 0,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (17)	Sedang Berjalan
1.20.1.2.0.06.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	RAP/DA, Renja, BOKP	1 dokumen	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 95.000.000,00	Rp. 98.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (18)	Sedang Berjalan
1.20.1.2.0.06.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	Keseuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	98%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	Rp. 26.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (19)	Sedang Berjalan
<b>1.20.1.2.0.06.00.32</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN</b>								<b>Rp. 9.936.626.000,00</b>	<b>Rp. 10.370.000.000,00</b>			
1.20.1.2.0.06.00.32.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teles	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	70%	Diklat Akutansi Berbasis Atnual	150 orang	Persentase PNS yang mengikuti diklat	Rp. 1.733.347.000,00	Rp. 1.880.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (20)	Sedang Berjalan
						Diklat Pelayanan Prima	60 orang						
						Diklat Pengabdian Barang/Jasa	60 orang						
						Diklat Pengabdian Ases	30 orang						
						Diklat Pengembangan Aparatur Berbasis Budaya	60 orang						
						Diklat Perencanaan dan Penganggaran	60 orang						
						Ulan Pengabdian Barang/Jasa	60 orang						
1.20.1.2.0.06.00.32.009	Diklat Fungsional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	70%	Diklat Komputer Tingkat Dasar	120 orang	Persentase PNS yang mengikuti diklat	Rp. 457.201.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (21)	Sedang Berjalan
1.20.1.2.0.06.00.32.048	Diklat Kepemimpinan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	70%	Diklat Komputer Tingkat Lanjut	60 orang	Persentase PNS yang mengikuti diklat	Rp. 7.314.980.000,00	Rp. 7.500.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (22)	Sedang Berjalan
1.20.1.2.0.06.00.32.049	Pengkibkaban Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	70%	Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi mendeudaki jabatan Esekun III	200 orang	Persentase PNS yang mengikuti diklat	Rp. 230.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (23)	Sedang Berjalan
1.20.1.2.0.06.00.32.050	Perencanaan dan Penyipaan Pendidikan dan Pelatihan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	70%	Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi mendeudaki jabatan Esekun IV	320 orang	Persentase PNS yang mengikuti diklat	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (24)	Sedang Berjalan
<b>1.20.1.2.0.06.00.41</b>	<b>PROGRAM PENGINGKATAN WERJASWA REDUKSI ANTRIAN DAERAH</b>								<b>Rp. 385.531.000,00</b>	<b>Rp. 449.000.000,00</b>			
1.20.1.2.0.06.00.41.001	Koordinasi dan Fasilitas Kemirvan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	5000 orang	Koordinasi penyelenggaraan diklat kemirvan	1 rekomendasi	Dukungan terhadap tindak lanjut pebibkaban diklat atas kesesepakan pengirvan peserta diklat dari luar DIY	Rp. 64.471.000,00	Rp. 134.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (25)	Sedang Berjalan
1.20.1.2.0.06.00.41.002	Promosi dan Rekrutemen Kemirvan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	5000 orang	Sosialisasi Pro Diklat dan FGD Kabjaban DIKlat Siku Pitu	102 orang	Dukungan terhadap tindak lanjut pebibkaban diklat atas kesesepakan pengirvan peserta diklat dari luar DIY	Rp. 261.210.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (26)	Sedang Berjalan
1.20.1.2.0.06.00.41.005	Koordinasi Kesihatan	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	5000 orang	Tersesunya laporan pebibkaban program kesihatan per tahun	1 laporan	Dukungan terhadap tindak lanjut pebibkaban peserta diklat dari luar daerah	Rp. 59.600.000,00	Rp. 65.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1/2/3 (27)	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Kelestimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sisatan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Meteregan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur			Target	Tolok Ukur			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.20.06.00.56.010	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEDUKLATAN Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mennggiat	Badan Pendidikan dan Latihan	Penentasan hasil penelitian dan pengembangan keaktifan yang dipublikasikan di yaylatau ditindaklanjuti	100%	Kurikulum dan silabus Diklat	3 terakumulasi diklat TF	Dukungan terhadap pencapaian penelitian dan pengembangan	6,61%	Rp. 48.500.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.201.20.06.00.56.024	Pengembangan Pusaka dan Penerbitan Buletin Diklat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mennggiat	Badan Pendidikan dan Latihan	Penentasan hasil penelitian dan pengembangan keaktifan yang dipublikasikan di yaylatau ditindaklanjuti	100%	Penerbitan buletin diklat	4 edisi	Dukungan terhadap Pencapaian Penelitian dan Pengembangan	38,86%	Rp. 285.385.200,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.201.20.06.00.56.025	Manajemen Mutu Penyelenggaraan Diklat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mennggiat	Badan Pendidikan dan Latihan	Penentasan hasil penelitian dan pengembangan keaktifan yang dipublikasikan di yaylatau ditindaklanjuti	100%	Perpadan buku perputakaan Terpeliharanya bahan Pusaka	600 buku 12481 buku	Dukungan terhadap pencapaian penelitian dan pengembangan	38,77%	Rp. 284.600.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.201.20.06.00.56.026	Peaksanaan Penelitian Keaktifan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mennggiat	Badan Pendidikan dan Latihan	Penentasan hasil penelitian dan pengembangan keaktifan yang dipublikasikan di yaylatau ditindaklanjuti	100%	Laporan hasil evaluasi pasca diklat Rencana Reakerediasi Diklat Sertifikat SHM ISO 9001:2015 Kajian Metode Pembelajaran Diklat TF	12 laporan 1 dokumen 1 sertifikat 1 kajian	Dukungan terhadap pencapaian penelitian dan pengembangan	15,78%	Rp. 115.700.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Latimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 7.056.993.000,00							
	Nomor	Uraian/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Isi/Isi Kegiatan	Pagu Indikatif	Praktiruan Maju	Keterangan					
						Tolek Ukur	Target	Tolek Ukur	Target				Tolek Ukur	Target	SKPD	1/2/3	1/2/3	(14)
1	Wajib																	
1.20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UNDAH, ADMINISTRASI KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN																
1.20.1.20.07.00		<b>INSPEKTORAT</b>																
1.20.1.20.07.00.01		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>																
1.20.1.20.07.00.01.001		Penyediaan Jasa Sarat dan Menyurat																
1.20.1.20.07.00.01.002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
1.20.1.20.07.00.01.006		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional																
1.20.1.20.07.00.01.007		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan																
1.20.1.20.07.00.01.008		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor																
1.20.1.20.07.00.01.010		Penyediaan Alat Tulis Kantor																
1.20.1.20.07.00.01.011		Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian																
1.20.1.20.07.00.01.012		Penyediaan Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
1.20.1.20.07.00.01.014		Penyediaan Perawatan Rumah Tangga																
1.20.1.20.07.00.01.015		Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perangai-Undangai																
1.20.1.20.07.00.01.017		Penyediaan Makanan Dan Minuman																
1.20.1.20.07.00.01.018		Rapat/Balai Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah																
1.20.1.20.07.00.01.022		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja																
1.20.1.20.07.00.02		<b>PROGRAM PEMBERANTARAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>																
1.20.1.20.07.00.02.009		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor																
1.20.1.20.07.00.02.022		Pemeliharaan Rutin/Berkas Gedung Kantor																
1.20.1.20.07.00.02.024		Pemeliharaan Rutin/Berkas Kendaraan Dinas/Operasional																
1.20.1.20.07.00.02.026		Pemeliharaan Rutin/Berkas Perleengkapan Gedung Kantor																
1.20.1.20.07.00.02.028		Pemeliharaan Rutin/Berkas Peralatan Gedung Kantor																
1.20.1.20.07.00.02.033		Pemeliharaan Rutin/Berkas Asip AKH Dan Asip In-Atif/Statik																
1.20.1.20.07.00.05		<b>PROGRAM PERINGKATAN KAPASITAS SUPRENDATA APARATUR</b>																



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 2.056.903.000,00				
	Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Meja	Keterangan	
						Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)	Target (11)			SKPD	1/2/3
1.201.1.20.07.00.05.001	(2)	Pendidikan dan Pelatihan Formal	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	
1.201.1.20.07.00.05.084		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur yang meningkat kemampuannya	10 orang	Peningkatan kapasitas aparat pemeriksa	44,24 %	Rp. 114.900.000,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.05.085		Penilaian Angka Kredit JPA dan Penilaian Karya Tulis JPA	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui pelatihan	55 orang 5 angkatan	Peningkatan kapasitas aparat pemeriksa	19,96 %	Rp. 51.840.750,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.06.016		Penyusunan Laporan Energi SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Daftar penilaian angka kredit dan karya tulis JPA	50 orang	Kesahan pengikut pemeriksa barang	17,13 %	Rp. 44.507.500,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.06.017	<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											<b>Rp. 45.114.000,00</b>			
1.201.1.20.07.00.06.018		Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Nilai LAKIP SKPD	A	Akuntabilitas kinerja SKPD meningkat	5,37 %	Rp. 2.424.500,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.06.019		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keselangan anggaran kas dengan realisasi anggaran	2 %	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan	4,20 %	Rp. 2.544.500,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.20.001	<b>PROGRAM Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Organisasi</b>											<b>Rp. 4.579.748.550,00</b>			
1.201.1.20.07.00.20.003		Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K.D H	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dokumen perencanaan	5 dokumen	Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan	56,66 %	Rp. 75.000.000,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.20.007		Konfirmasi Pengawasan yang telah Kompletif	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keselasan usaha target capaian kinerja dengan program dan kegiatan	100 %	Terselesaikan laporan Surat Pengungguljawaban program dan kegiatan	10,06 %	Rp. 6.052.500,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.20.009		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemintah Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	5%	Laporan Hasil Pemeriksaan	242 LHP	Selengkapnya ukur kinerja dan kepatuhan	71,55 %	Rp. 4.300.000.000,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.20.014		Penelitian Khusus Di Lingkungan Pemintah Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	5%	Laporan money aksi daerah pencegahan, pemberantasan korupsi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya	1 laporan, 1 laporan, 1 laporan	Terpentarnya implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	7,37 %	Rp. 337.599.050,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.20.044		Penelitian Khusus Di Lingkungan Pemintah Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	5%	Kepuasan Gubernur DIY yang ditetapkan PKPT Tahun 2017	1 SK	Pedoman Pengawasan Tahun 2017	4,31 %	Rp. 198.332.000,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.54	<b>PROGRAM PERCEPATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMBERIKSAN</b>											<b>Rp. 287.038.050,00</b>			
1.201.1.20.07.00.54.003		Gelar Pengawasan Daerah dan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APJP dan BPK	90%	Perencanaan Larvasida dan Pemuktahiran Data THP	4 kali	Kontrol temuan hasil pengawasan	51,02 %	Rp. 146.448.750,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	
1.201.1.20.07.00.54.004		Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APJP dan BPK	90%	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan 90 % Laporan petunjuk - papir pribadi PIS	90 %	Peningkatan kualitas pengawasan	48,98 %	Rp. 140.589.300,00	Inspektorat	Sesuai Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 13.736.487.000,00						
	Nomor	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keleuan Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Moju	Keterangan			
						Tolok Ukur	TARGET	Tolok Ukur	TARGET	Tolok Ukur	TARGET			1/2/3	1/2/3		
<b>1</b>		<b>Wajib</b>															
<b>1.20</b>		<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UNDA, ADMINISTRASI KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>															
1.20.1.20.08.00		<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>															
1.20.1.20.08.00.01		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>															
1.20.1.20.08.00.01.001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.20.1.20.08.00.01.001		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.003		Penyediaan Jasa Restoran Dan Perencanaan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.006		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Di non Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.007		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.008		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.010		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.011		Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.012		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.014		Penyediaan Perabotan Rumah Tinggal	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.015		Penyediaan Bahan Baku dan Perabotan Perundang-undangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.017		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												
1.20.1.20.08.00.01.018		Rapat/Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah												

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah	Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Momen	Jenis Kegiatan					
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Halal Kegiatan	Pagu Indikatif	Prokainan Maju	1/2/3	1/2/3
						Took Ukur	Target	Took Ukur	Target							
1.201.1.20.008.00.01.022		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.1.20.008.00.01.029		Pengalokasian Aspi Dirimis SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>1.201.1.20.008.00.02</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>												<b>Rp. 1.820.526.000,00</b>		
1.201.1.20.008.00.02.005		Pengalokasian Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Rp. 744.834.000,00	Rp. 0,00	Sebagi Bagian
1.201.1.20.008.00.02.007		Pengalokasian Perlengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Rp. 175.070.000,00	Rp. 175.000.000,00	Sebagi Bagian
1.201.1.20.008.00.02.009		Pengalokasian Perabahan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Rp. 130.350.000,00	Rp. 130.000.000,00	Sebagi Bagian
1.201.1.20.008.00.02.010		Pengalokasian Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Sebagi Bagian
1.201.1.20.008.00.02.022		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Rp. 160.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Sebagi Bagian
1.201.1.20.008.00.02.024		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Rp. 179.815.000,00	Rp. 180.000.000,00	Sebagi Bagian
1.201.1.20.008.00.02.026		Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelelangan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Rp. 8.006.000,00	Rp. 8.500.000,00	Sebagi Bagian
1.201.1.20.008.00.02.028		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perabahan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Rp. 5.617.000,00	Rp. 5.700.000,00	Sebagi Bagian
1.201.1.20.008.00.02.029		Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.500.000,00	Sebagi Bagian
1.201.1.20.008.00.02.045		Fungsional Aspi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengingat	Badan Kepegawaian Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Rp. 184.234.000,00	Rp. 185.000.000,00	Sebagi Bagian
<b>1.201.1.20.008.00.06</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINEKRA DAN KEUANGAN</b>												<b>Rp. 185.633.000,00</b>	<b>Rp. 190.000.000,00</b>	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah	Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Methode Pengukuran	Jumlah Pagu - Rp. 13.726.487.000,00	Keterangan																
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Pagu Indikatif	Prokrama Maju		Jenis Kegiatan													
						Took Ukur	Target	Took Ukur				Target	1/2/3		1/2/3												
1.201.2.01.06.00.06.016	(1)	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	(3)	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	(5)	Badan Kepegawaian Daerah	(6)	100%	100%	(7)	100%	(8)	100%	(9)	100%	(10)	100%	(11)	100%	(12)	Rp. 10.180.000,00	(13)	Rp. 12.000.000,00	(14)	Badan Kepegawaian Daerah	(15)	Sebagian Belanja
1.201.2.01.06.00.06.017		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan		Badan Kepegawaian Daerah		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Rp. 30.718.000,00		Rp. 32.000.000,00		Badan Kepegawaian Daerah		Sebagian Belanja
1.201.2.01.06.00.06.018		Penyusunan Rencana Kerja SKPD dan Pengembangaan Data dan Informasi		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan		Badan Kepegawaian Daerah		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Rp. 116.903.000,00		Rp. 120.000.000,00		Badan Kepegawaian Daerah		Sebagian Belanja
1.201.2.01.06.00.06.019		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan		Badan Kepegawaian Daerah		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Rp. 25.832.000,00		Rp. 26.000.000,00		Badan Kepegawaian Daerah		Sebagian Belanja
1.201.2.01.06.00.33.055	1.201.2.01.06.00.33.055	<b>PROGRAM PEMERINTAH DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b> Pengembangan Aparatur		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan		Badan Kepegawaian Daerah		86,92%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Rp. 8.585.894.500,00		Rp. 9.115.000.000,00		Badan Kepegawaian Daerah		Sebagian Belanja
1.201.2.01.06.00.33.056	1.201.2.01.06.00.33.056	Pengukuran Kompetensi Pegawai		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan		Badan Kepegawaian Daerah		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Rp. 205.510.000,00		Rp. 225.000.000,00		Badan Kepegawaian Daerah		Sebagian Belanja
1.201.2.01.06.00.33.057	1.201.2.01.06.00.33.057	Pengembangan Kemampuan Pengukuran Kompetensi		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan		Badan Kepegawaian Daerah		86,92%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Rp. 229.850.300,00		Rp. 230.000.000,00		Badan Kepegawaian Daerah		Sebagian Belanja
1.201.2.01.06.00.33.058	1.201.2.01.06.00.33.058	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan		Badan Kepegawaian Daerah		86,92%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Rp. 2.381.115.200,00		Rp. 2.400.000.000,00		Badan Kepegawaian Daerah		Sebagian Belanja
1.201.2.01.06.00.33.059	1.201.2.01.06.00.33.059	Pengelolaan Kepegawaian		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan		Badan Kepegawaian Daerah		86,92%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Rp. 330.479.000,00		Rp. 335.000.000,00		Badan Kepegawaian Daerah		Sebagian Belanja
1.201.2.01.06.00.33.060	1.201.2.01.06.00.33.060	Pengelolaan Disiplin Aparatur		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan		Badan Kepegawaian Daerah		86,92%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Rp. 539.537.700,00		Rp. 600.000.000,00		Badan Kepegawaian Daerah		Sebagian Belanja

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah			Indikator Kinerja							Jumlah Pagu : Rp. 13.726.487.000,00		Jenis Kegiatan		
Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatorif	Prokiraan Maju	Metanggan	
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)	Target (11)			SKPD	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		bidang	Daerah Mengikat	Daerah										Daerah
1.201.20.06.00.33.062	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	Kinerja aparatur dan brodesi	Daerah Mengikat	Badan Kepegawaian Daerah								Rp. 555.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
												Rp. 550.223.600,00		
						86,92%								
							Laporan bulanan data kepegawaian (12 laporan)							
							Laporan monitoring dan evaluasi ASN Provinsi/Kabupaten/Kota (4 laporan)							
							Laporan nominatif semi-tahunan (12 laporan)							
							Laporan statistik pegawai (1 laporan)							
							Revisi pengelolaa simpng SMA/SMK palmpahan (25 pelupaa)							
							Revisi pengelolaa simpng SOPD DTY (250 pelupaa)							
							Pembuatandatabase biometric PNS palmpahan (6.680 PNS)							
							Pemol haraan aplikasi dan database kepegawaian (1 unit)							
							Pengembangan aplikasi dan database sistem informasi anjungan layanan kepegawaian (1 unit)							
							Perbaikan aplikasi dan database sistem prestasi elektronik (1 unit)							
							Perbaikan server utama, server backup/panarik dan server backup (2 unit)							
							Pengadaan hard disk server (1 unit)							
							Pengadaan komputer (3 unit)							
							Pengembangan sistem integrasi data Provinsi/Kabupaten/Kota (1 unit)							
1.201.20.06.00.33.063	Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	Kinerja aparatur dan brodesi	Daerah Mengikat	Badan Kepegawaian Daerah								Rp. 489.413.100,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
						86,92%								
							Pengembangan tapeman (25 PNS)							
							Pengembangan aplikasi penilaian kinerja (1 aplikasi)							
							Pengusulan pengurangan sayalancana karya sayha (400 PNS)							
							Penilaian kinerja organisasi dan aparatur serta pemberian tambahan penghasilan pegawai per trwahulan (4 kali)							
							Pengadaan pembahasan penilaian kinerja aparatur (360 orang)							
							Penyehatan pengurangan sayalancana karya sayha (400 PNS)							
							Terjalinnya biaya perindugan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bag pegawai (30 orang)							
							Up kesehatan bag PNS yng sakit dan BK/JKM (10 orang)							
1.201.20.06.00.33.064	Pengelolaan Jabatan dan Perindahan Aparatur	Kinerja aparatur dan brodesi	Daerah Mengikat	Badan Kepegawaian Daerah								Rp. 220.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
						86,92%								
							Perbaikan jabatan (1.200 PNS)							
1.201.20.06.00.33.071	Pengelolaan Jabatan	Kinerja aparatur dan brodesi	Daerah Mengikat	Badan Kepegawaian Daerah								Rp. 1.750.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
						86,92%								
							Pengembangan JF (4 FGD dan 4 konsyering)							
							Rekrutimen terbuka PJT (2 jabatan)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Metanginan			
					Hasil Program		Keiluanan Kegiatan				Target	Hasil Kegiatan	1/2/3	1/2/3
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)						
1.20.1.20.08.00.33.077	Pembangunan Pegawai yang Berprestasi	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	86,92%	Pembekalan PMS yang memadai (BSP 1 tahun (1.000 orang))	100%	Mendukung kelancaran target kinerja program	Rp. 250.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		
1.20.1.20.08.00.33.079	Pembangunan Database Informatika Kepegawaian	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	86,92%	Aktivitas arsip kepegawaian/arsip elektronik (20.000 SK)	100%	Mendukung kelancaran target kinerja program	Rp. 348.322.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		
<b>1.20.1.20.08.00.59</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penda</b>								<b>Rp. 1.193.364.360,00</b>	<b>Rp. 4.473.000.000,00</b>				
1.20.1.20.08.00.59.001	Pengembangan I S O	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	71%	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendampingan sistem manajemen mutu (1 laporan)	100%	Kapasitas sumber daya aparatur meningkat	Rp. 125.000.000,00	Rp. 128.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		
1.20.1.20.08.00.59.002	Pengembangan Profesiisme Aparatur	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	71%	Penyediaan alat tulis fungsional (250 PNS)	100%	Kapasitas sumber daya aparatur meningkat	Rp. 724.952.260,00	Rp. 4.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		
1.20.1.20.08.00.59.003	Pengembangan SDM Asesor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	71%	Terdilaksananya kursus/pelatihan bagi calon asesor (8 orang)	100%	Kapasitas sumber daya aparatur meningkat	Rp. 343.412.100,00	Rp. 345.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu - Rp. 19.916.997.186,00				
	Nomor	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatorif	Prestasi Maju	Keterangan	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			SKPD	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	1.20	Wajib													
1.20.1.20.10.00.01	OTONOMI DAERAH, PERTAHANAN UMUM, KESELAMATAN UMUM, KEKAWALAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPERAWALAN, DAN PERSANDIAN														
1.20.1.20.10.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
1.20.1.20.10.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIT PERKANTORAN														
1.20.1.20.10.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur pemerintah dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Terbayarnya Perangko dlm daerah	1. 160 lembar	Terlaksananya 250 Surat/Paket Pelayanan Administrasi Pelaksanaan lancar	0,27%	Rp. 8.500.000,00	Rp. 5.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang	
1.20.1.20.10.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur pemerintah dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Terbayarnya belanja jasa telepon	1.12 bulan	"Terjamin pelaksanaan tugas dan terbayarnya bagian rekening, telepon, PDAM, listrik, internet, intranet, dan TV"	29,04%	Rp. 550.000.000,00	Rp. 605.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang	
1.20.1.20.10.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur pemerintah dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pembayaran STNK/Tajik Kendaraan Roda 2	1. 16 Unit	Terjaminnya pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk kelancaran	5,10%	Rp. 48.000.000,00	Rp. 52.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang	
1.20.1.20.10.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur pemerintah dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Terbayarnya biaya gaji pegawai dan pengalokasian anggaran	13 orang, 12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,44%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang	
1.20.1.20.10.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur pemerintah dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor BRBD DIY	12 bulan	Terjaminnya kebersihan gedung kantor dan terbayarnya terbayarnya jasa kebersihan kantor	7,26%	Rp. 199.000.000,00	Rp. 218.900.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang	
1.20.1.20.10.00.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kinerja aparatur pemerintah dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Terpeliharanya alat bermesin	1. 6 jenis	Peralihan kerja berfungsi dengan baik dan mendukung aktifitas kerja	3,99%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang	
1.20.1.20.10.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur pemerintah dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Terpeliharanya Alat kantor	2. 3 jenis	Terlaksananya ATK kantor, Pukdosis PR, dan mendukung kelancaran pelaksanaan	4,23%	Rp. 38.500.000,00	Rp. 42.350.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Suaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja				Pagu Induktif	Prakiraman Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan	
					Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					Tokoh Ukur
1.201.2.01.00.00.01.011	Penyediaan Barang Cadangan Penggandaan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya barang cetak yang mendukung keancaman tugas dan fungsi SKPD	1.1 Jenis	11	2,46%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
1.201.2.01.00.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Peningkatan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya peralatan yang mendukung keancaman tugas dan fungsi SKPD	2.3 Jenis	23	1,45%	Rp. 24.200.000,00	Rp. 26.620.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
1.201.2.01.00.00.01.014	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya surat kabar yang mendukung keancaman tugas dan fungsi SKPD	1.12 bulan	1	0,96%	Rp. 8.800.000,00	Rp. 9.680.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
1.201.2.01.00.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Pasokan Perawatan Urungan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya Tabung gas Per-USA-200	1.36 kali	1	0,96%	Rp. 11.000.000,00	Rp. 12.100.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
1.201.2.01.00.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya perlengkapan pegawai untuk koordinasi dan korelasif dalam dan luar daerah	2.8 jenis	3	19,96%	Rp. 66.000.000,00	Rp. 72.600.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
1.201.2.01.00.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya undangan rapat	5-500 os	1	4,79%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
1.201.2.01.00.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya layanan keamanan yang mendukung keancaman tugas dan fungsi SKPD	1 tahun	1	16,70%	Rp. 266.400.000,00	Rp. 293.040.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
1.201.2.01.00.00.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran yang mendukung keancaman tugas dan fungsi SKPD	1 tahun	12	0,24%	Rp. 3.300.000,00	Rp. 3.620.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
1.201.2.01.00.00.01.029	Pengelolaan Anpis Diantis SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran yang mendukung keancaman tugas dan fungsi SKPD	1 tahun	1	2,46%	Rp. 66.600.000,00	Rp. 73.260.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
<b>1.201.2.01.00.00.02</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Aparatur</b>									<b>Rp. 1.170.000.000,00</b>	<b>Rp. 1.287.000.000,00</b>		
1.201.2.01.00.00.02.007	Pengadaan Perangkat Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya AC yang mendukung keancaman tugas dan fungsi SKPD	1.7 buah	1	14,00%	Rp. 170.000.000,00	Rp. 187.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
1.201.2.01.00.00.02.009	Pengadaan Perakitan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran yang mendukung keancaman tugas dan fungsi SKPD	1.3 Jenis	1	14,00%	Rp. 220.000.000,00	Rp. 242.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
1.201.2.01.00.00.02.010	Pengadaan Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran yang mendukung keancaman tugas dan fungsi SKPD	1.10 unit	1	16%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Suaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Indikator Kinerja			Pagu Induktif	Prakiraman Maju	Keterangan	
					Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target	Jumlah Pagu - Rp. 10.916.997.188,00				
													(6)			(7)	(8)
1.201.2.01.10.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	(3) dan brokasi	Pemertahan Daerah	Program 01-06	(5)	mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	2. Rak	Terjamin pelaksanaan tugas dan keberyanya pemeliharaan dan tersedianya BHN	14%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang			
1.201.2.01.10.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	(3) dan brokasi	Pemertahan Daerah	Program 01-06	(5)	Meminimalkan sarana prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. pemeliharaan instalasi air bersih 2. pemeliharaan pagar 3. pemeliharaan bangunan gedung	terpeliharanya sarana prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	14,00%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang			
1.201.2.01.10.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	(3) dan brokasi	Pemertahan Daerah	Program 01-06	(5)	Meminimalkan sarana prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	3. 1. Biji pak 2. paket	Terbernyanya/terpeliharanya peralatan gedung kantor dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	14%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang			
1.201.2.01.10.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	(3) dan brokasi	Pemertahan Daerah	Program 01-06	(5)	Meminimalkan sarana prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perengkapan gedung kantor terawat	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang			
<b>1.201.2.01.10.00.05</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>										<b>Rp. 185.000.000,00</b>	<b>Rp. 203.500.000,00</b>					
1.201.2.01.10.00.05.012	Publikasi Media, Cetak Dan Elektronik	(3) dan brokasi	Pemertahan Daerah	Program 01-06	(5)	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Liputan Media, Publikasi Media Cetak	Kualitas Sumberdaya aparatur bertambah/meningkat	60%	Rp. 115.000.000,00	Rp. 126.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang			
1.201.2.01.10.00.05.024	Pengembangan Teknologi Informasi	(3) dan brokasi	Pemertahan Daerah	Program 01-06	(5)	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. 40 orang x 1 kali 2. Pelatihan aplikasi sistem informasi	Kualitas sumber daya aparatur bertambah/meningkat	40%	Rp. 70.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang			
<b>1.201.2.01.10.00.06</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>										<b>Rp. 181.000.000,00</b>	<b>Rp. 199.100.000,00</b>					
1.201.2.01.10.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	(3) dan brokasi	Pemertahan Daerah	Program 01-06	(5)	Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	LAKP	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	6%	Rp. 9.900.000,00	Rp. 9.900.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang			
1.201.2.01.10.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	(3) dan brokasi	Pemertahan Daerah	Program 01-06	(5)	Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	LPPD	Tepatnya realisasi anggaran	100%	Rp. 22.000.000,00	Rp. 24.200.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang			
1.201.2.01.10.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Penyusunan Data dan Informasi	(3) dan brokasi	Pemertahan Daerah	Program 01-06	(5)	Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	5 dokumen, 12 bulan	Tersusunnya program/kegiatan yang sinergis dan berkesinambungan	100%	Rp. 130.000.000,00	Rp. 143.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang			
1.201.2.01.10.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	(3) dan brokasi	Pemertahan Daerah	Program 01-06	(5)	Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kesesuaian antar target cakupan kinerja dengan program kegiatan	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	14%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sidang			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Suaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Induktif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Hasil Kegiatan				
					Tokol Ukur (6)	Target (7)	Tokol Ukur (8)	Target (9)			
1.20.1.20.10.00.57	<b>PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA</b> Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemertintah Daerah Mengingat	Pelayanan Lurusung ke Masyarakat	Persentase pemulihan wilayah rawan bencana.	12%	1. Terleaksanya percepatan pemulihan zona pasca bencana. 2. Kajian DRI Sektor Sosial di Kawasan Rawan Bencana.	Rp. 406.000.000,00	Rp. 438.480.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.20.1.20.10.00.57.001											
1.20.1.20.10.00.57.002											
1.20.1.20.10.00.57.003											
1.20.1.20.10.00.57.004											
1.20.1.20.10.00.57.005											
1.20.1.20.10.00.58	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DESA RENDAH</b> Dukungan Operasional PUSKALOPS PB	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Pemertintah Daerah Mengingat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan jumlah Desa Tangguh	70%	1. Terleaksanya Rakernis Operasional Puskalops PB. 2. Terleaksanya honor alet operator Puskalops PB BRBD DIY. 3. Terleaksanya honor petugas administrasi dan supervisor Orang Koordinator Adminis. 4. Terleaksanya peningkatan Kapasitas Petugas Puskalops (Simulation & drill). 5. Terleaksanya Pengadaan Perbaikan dan Peningkatan Puskalops PB DIY (Komputer PC, Printer Scanner, Hardisk Eksternal, Perangkat Jaringan, Perangkat Komunikasi, Handset Eksternal, Perangkat Sambungan Data/Telepon/Internet, Pemancar W.F.I. Pelakan lapangan). 6. Terleaksanya langganan TV Berbayar, Pusa SMS Gateway, Pusa Respon Sateit. 7. Terleaksanya Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan Puskalops PB	Rp. 894.697.199,00	Rp. 1.242.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.20.1.20.10.00.58.027											
1.20.1.20.10.00.58.035											

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Swaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagi Induktif	Prakiraman Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Kuluran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tokoh Ukur	TARGET	Tokoh Ukur	TARGET				Tokoh Ukur	TARGET
1.201.1.201.01.00.58.036	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	1.201.1.201.01.00.58.036	1.201.1.201.01.00.58.036	1.201.1.201.01.00.58.036	1.201.1.201.01.00.58.036	1.201.1.201.01.00.58.036	1.201.1.201.01.00.58.036	1.201.1.201.01.00.58.036	1.201.1.201.01.00.58.036	1.201.1.201.01.00.58.036	1.201.1.201.01.00.58.036		
1.201.1.201.01.00.58.065	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	1.201.1.201.01.00.58.065	1.201.1.201.01.00.58.065	1.201.1.201.01.00.58.065	1.201.1.201.01.00.58.065	1.201.1.201.01.00.58.065	1.201.1.201.01.00.58.065	1.201.1.201.01.00.58.065	1.201.1.201.01.00.58.065	1.201.1.201.01.00.58.065	1.201.1.201.01.00.58.065		
1.201.1.201.01.00.58.066	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	1.201.1.201.01.00.58.066	1.201.1.201.01.00.58.066	1.201.1.201.01.00.58.066	1.201.1.201.01.00.58.066	1.201.1.201.01.00.58.066	1.201.1.201.01.00.58.066	1.201.1.201.01.00.58.066	1.201.1.201.01.00.58.066	1.201.1.201.01.00.58.066	1.201.1.201.01.00.58.066		
1.201.1.201.01.00.58.067	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	1.201.1.201.01.00.58.067	1.201.1.201.01.00.58.067	1.201.1.201.01.00.58.067	1.201.1.201.01.00.58.067	1.201.1.201.01.00.58.067	1.201.1.201.01.00.58.067	1.201.1.201.01.00.58.067	1.201.1.201.01.00.58.067	1.201.1.201.01.00.58.067	1.201.1.201.01.00.58.067		
<b>1.201.1.201.01.00.61</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA</b>												
1.201.1.201.01.00.61.035	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	1.201.1.201.01.00.61.035	1.201.1.201.01.00.61.035	1.201.1.201.01.00.61.035	1.201.1.201.01.00.61.035	1.201.1.201.01.00.61.035	1.201.1.201.01.00.61.035	1.201.1.201.01.00.61.035	1.201.1.201.01.00.61.035	1.201.1.201.01.00.61.035	1.201.1.201.01.00.61.035		
1.201.1.201.01.00.61.036	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	1.201.1.201.01.00.61.036	1.201.1.201.01.00.61.036	1.201.1.201.01.00.61.036	1.201.1.201.01.00.61.036	1.201.1.201.01.00.61.036	1.201.1.201.01.00.61.036	1.201.1.201.01.00.61.036	1.201.1.201.01.00.61.036	1.201.1.201.01.00.61.036	1.201.1.201.01.00.61.036		
1.201.1.201.01.00.61.037	Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi	1.201.1.201.01.00.61.037	1.201.1.201.01.00.61.037	1.201.1.201.01.00.61.037	1.201.1.201.01.00.61.037	1.201.1.201.01.00.61.037	1.201.1.201.01.00.61.037	1.201.1.201.01.00.61.037	1.201.1.201.01.00.61.037	1.201.1.201.01.00.61.037	1.201.1.201.01.00.61.037		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Induktif	Prakiraman Maju	Keterangan		
					Keluasan Kegiatan					Hasil Kegiatan		Jenis Kegiatan
					Hasil Program	Hasil Kegiatan	Target			Tokoh Ukur	Target	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1.20.1.01.00.61.038	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat dan Tim SAR, BRPD DIY	Kinerja aparatur pemerintah daerah	Kelembagaan dan Organisasi	Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	<p>1. Update data pebaran dan logistik, * 2. Mengetahui Kelembagaan masyarakat di Manajemen Logistik di BP, *</p> <p>3. 1 laporan update data logistik, 5. 35 or x 2 hr x 5 angketan,</p> <p>4. Mengetahui Kelembagaan masyarakat di Manajemen Logistik di BP, *</p> <p>4. 35 or x 2 hr x 12 angketan,</p> <p>5. 35 or x 2 hr x 5 angketan,</p> <p>6. 1.000 paket bantuan logistik sengk, 150 terpal, 750 brooding,</p> <p>6. 1.000 paket logistik, 1.000 hr</p>	<p>1. Seragam dan Perlengkapan Lapangan TRC PB BRPD DIY</p> <p>1-50 Org</p> <p>2. 365 hari ( 32 org non PNS, 15 org PNS)</p> <p>3. Laporan paket TRC</p> <p>3-8 org x 3 Shift x 365 hr</p> <p>4. Pakitan TRC</p> <p>4-35 org x 3 hr x 1 angketan</p> <p>5. 1 paket 1 set</p>	<p>Meningkatnya kemampuan TRC dalam PB melalui penyelenggaraan paket TRC dan meningkatkan kecapaian penanganan korban bencana.</p>	Rp. 1.080.000.000,00	Rp. 1.080.000.000,00	Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	Sidang	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD - Kantor Perwakilan Daerah	Nomor	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prestasi Kerja	Keterangan			
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		SKPD	1/2/3
						Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur			Target	Tolok Ukur		
1		Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20		OTONOMI DAERAH, PEMERTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEMAJUAN DAERAH, KESEHATAN, PERTANIAN, PERUMAHAN DAN PERSANDIAN	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat keluar	300 lb	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan		Rp. 9.700.000,00	Rp. 10.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00		Kantor Perwakilan Daerah													
1.20.1.20.11.00.01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran bagian internet	12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan		Rp. 395.400.000,00	Rp. 395.400.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.001		Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran bagian internet	12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan		Rp. 395.400.000,00	Rp. 395.400.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran bagian telepon	12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan		Rp. 24.800.000,00	Rp. 45.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.006		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honor pengemudi kendaraan dinas operasional yang tidak wajib	11 unit	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	1,27%	Rp. 36.240.000,00	Rp. 36.500.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.007		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honor pengemudi barang	2 orang 12 bulan	Tercapainya pelayanan administrasi keuangan	1,86%	Rp. 385.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.008		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honor pengemudi koporan	1 orang 12 bulan			Rp. 18.800.000,00	Rp. 18.800.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.010		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honor pengemudi kendaraan dinas operasional yang tidak wajib	10 orang 12 bulan			Rp. 19.150.000,00	Rp. 19.150.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.011		Penyediaan Barang Cakupan Dan Penggantian	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Antirungun DIY	Kebersihan Antirungun m2	Kenyamanan lingkungan kantor	19,44%	Rp. 379.700.000,00	Rp. 385.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.012		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan gedung mesik	LT : 1.200 m2 LB : 576 m2			Rp. 18.800.000,00	Rp. 18.800.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.014		Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Kantor Menteng	LT : 1.470m2 LB : 1.087m2			Rp. 19.150.000,00	Rp. 19.150.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.015		Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Foruning-Uniting	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	37 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	0,98%	Rp. 14.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.017		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Buang obakan	10 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	0,98%	Rp. 9.960.000,00	Rp. 9.960.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja
1.20.1.20.11.00.01.018		Biaya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kantor Perwakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengandaian	30.000 lembar			Rp. 302.987.000,00	Rp. 302.987.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Soeding Belanja

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indiatif	Praktiran Haju	Metrengan			
					Haali Program		Keluaran Kegiatan				Haali Kegiatan	Jenis Kegiatan		
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)					Took Ukur (10)	Target (11)
1.20.1.20.11.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	Kantor Pevakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	13 orang	24,76%	Rp. 483.600.000,00	Rp. 480.000.000,00	Kantor Pevakilan Daerah	12/13	(15)
1.20.1.20.11.00.01.029	Pengelolaan Asap Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	Kantor Pevakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Asap terpelihara	35.000	0,20%	Rp. 3.927.000,00	Rp. 4.000.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
1.20.1.20.11.00.01.030	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	Kantor Pevakilan Daerah	Terwujudnya administrasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium pegawai administrasi	3 orang	11,79	Rp. 230.200.000,00	Rp. 230.100.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
<b>1.20.1.20.11.00.02</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									<b>Rp. 1.580.472.000,00</b>	<b>Rp. 457.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.00.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	Kantor Pevakilan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas roda 4	3 unit	71,18%	Rp. 11.225.000.000,00	Rp. 0,00	Kantor Pevakilan Daerah		
1.20.1.20.11.00.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	Kantor Pevakilan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor	7 jenis	4,09%	Rp. 64.587.000,00	Rp. 40.400.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
1.20.1.20.11.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	DKI Jabara	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya gedung Arjuna DIT di HPTI	1 gedung	4,23%	Rp. 66.800.000,00	Rp. 70.000.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
1.20.1.20.11.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	DKI Jabara	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan roda 2 yang terpelihara	3 unit	18,06	Rp. 285.495.000,00	Rp. 300.000.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
1.20.1.20.11.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	DKI Jabara	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan roda 6 terpelihara	1 unit	2,01%	Rp. 31.840.000,00	Rp. 40.000.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
1.20.1.20.11.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	DKI Jabara	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor terpelihara	7 jenis	0,43%	Rp. 61.750.000,00	Rp. 1.000.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
<b>1.20.1.20.11.00.06</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									<b>Rp. 120.633.000,00</b>	<b>Rp. 122.800.000,00</b>			
1.20.1.20.11.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	Kantor Pevakilan Daerah	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Nilai JAKRP SKPD	A	5,27	Rp. 6.356.000,00	Rp. 7.000.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
1.20.1.20.11.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	Kantor Pevakilan Daerah	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keseluruhan tahapan pelaksanaan dengan realisasi anggaran SKPD	5%	4,81%	Rp. 5.800.000,00	Rp. 5.800.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
1.20.1.20.11.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	Kantor Pevakilan Daerah	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	ROK, Renstra, Reajp, DPA, DPPA Keparas	5 dokumen	85,47%	Rp. 103.100.000,00	Rp. 104.000.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
1.20.1.20.11.00.06.019	Monev/Revisi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	Kantor Pevakilan Daerah	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keseluruhan tahap target capaian kinerja dengan program kegiatan	95%	4,46%	Rp. 5.377.000,00	Rp. 6.000.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
<b>1.20.1.20.11.00.06</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Pevakilan Daerah</b>									<b>Rp. 524.578.000,00</b>	<b>Rp. 528.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.00.06.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Memngkat	DKI Jabara	Persentase kualitas layanan di bidang informal	60%	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	32 jenis	40,81%	Rp. 143.750.000,00	Rp. 145.000.000,00	Kantor Pevakilan Daerah		
					Persentase kualitas layanan di bidang transportasi	60%	Laundry perkebangan	12 bulan						
					Persentase kualitas layanan Peningapan	60%	Makan minum tamu	12 bulan						
					Peningapan kamar	8 jenis								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indiatif	Praktiran Maju	Meteregan			
					Haali Program		Keluaran Kegiatan				Haali Kegiatan		SKPD	Jenis Kegiatan
					Took Ukar	Target	Took Ukar	Target			Took Ukar	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.201.2011.00.86.002	Pelayanan Pengiran dan Tamu	Kewaji aparatur dan brokresi	Alurbaali Kewaji Pemerintahan Daerah Memingat	DKI Jabarta	Persentase kualitas layanan di bidang informasi	60%	Layanan transportasi dan keprotektan pampiran dan lamu	12 bulan	Tersediaa layanan transportasi dan fasilitas keprotektan	Rp. 56.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Kontor Perwaki Daerah	Selang Bergala	
1.201.2011.00.86.003	Pelayanan Informasi dan Koodisasi	Kewaji aparatur dan brokresi	Alurbaali Kewaji Pemerintahan Daerah Memingat	Ukar Perwaki Daerah	Persentase kualitas layanan di bidang informasi	60%	Jumlah kerjasama dengan kowaji provinsi se Indonesia	1 dokumen	Tersediaa buku diuasi kowaji provinsi se Indonesia, masyarakat DIY di Jakarta	Rp. 152.500.000,00	Rp. 152.000.000,00	Kontor Perwaki Daerah	Selang Bergala	
1.201.2011.00.86.004	Layanan Muah Masyarakat Penarbu Asli DIY di Jakarta	Kewaji aparatur dan brokresi	Alurbaali Kewaji Pemerintahan Daerah Memingat	DKI Jabarta dan DIY	Persentase kualitas layanan di bidang informasi	60%	Muah berama	1 kali	Terdapatnya Masyarakat DIY di Jabarta	Rp. 172.328.000,00	Rp. 170.000.000,00	Kontor Perwaki Daerah	Selang Bergala	
<b>1.20.1.20.11.00.87</b>	<b>PROGRAM PENGINGATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA</b>									<b>Rp. 839.872.000,00</b>	<b>Rp. 860.000.000,00</b>			
1.201.2011.00.87.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat pengembang dan pelestarian budaya meningkat	DKI Jabarta	Persentase peningkatan kualitas promosi potensi daerah	65%	Pameran PRJ	1 event	Meningkatnya kualitas kegiatan pameran promosi potensi daerah	Rp. 799.872.000,00	Rp. 800.000.000,00	Kontor Perwaki Daerah	Selang Bergala	
1.201.2011.00.87.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat pengembang dan pelestarian budaya meningkat	DKI Jabarta	Persentase peningkatan kualitas promosi potensi daerah	65%	Kerab budaya rakyat	1 kali	meningkatnya kualitas kegiatan kerab seni dan budaya	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Kontor Perwaki Daerah	Selang Bergala	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Pamana Praja		Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 454.416.000,00		
Nomor	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Kelembagaan Kegiatan			Hasil Kegiatan		Prekisiun Biaya	Jenis Kegiatan
					Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target		
1	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UNUM, ADMINISTRASI KEJANGKARAN DAERAH, JEREBAN, REFORMASI, DAN PRESANDIA													
1.20.1.20.12.00	Sekretariat Pamana Praja													
1.20.1.20.12.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN													
1.20.1.20.12.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penglim Dokumen	50	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	1,6	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.500.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat Keluar Surat Masuk	150 250						
1.20.1.20.12.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu (roda 2)	2 unit	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	2,7	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.500.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	20 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	5,3	Rp. 10.000.000,00	Rp. 13.000.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.01.011	Penyediaan Bahan Coklat Dan Penggandaan	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Barang obahan	13 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	5,3	Rp. 10.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penggandaan	1000 lembar						
1.20.1.20.12.00.01.013	Penyediaan Perabotan Dan Peralengkapan Kantor	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	1,6	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.500.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perawatan Perundung-Undangan	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Majalah	2 majalah	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	1,6	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.500.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peraturan perundang-undangan	25 peraturan perundang-undangan	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	7,5	Rp. 14.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat Kabar dan majalah	3 SKH	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	16,1	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.01.021	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pejabat dinas dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	Meningkatnya kelancaran administrasi dan koordinasi	43	Rp. 90.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.02	PROGRAM PENGINGATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
1.20.1.20.12.00.02.007	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perengkapan gedung kantor	10 unit	Tersedianya sarana prasarana perlengkapan gedung kantor	11,6	Rp. 27.946.000,00	Rp. 27.946.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.02.009	Pengadaan Perabotan Gedung Kantor	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor	6 unit	Tersedianya sarana prasarana perabotan gedung kantor	12,1	Rp. 29.200.000,00	Rp. 30.000.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang
1.20.1.20.12.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Sekretariat Pamana Praja	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	4 unit	Terpeluhnya kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas)	60,3	Rp. 145.040.000,00	Rp. 1.60.000.000,00	Sekretariat Pamana Praja	Sedang



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Kelembagaan					
					Hasil Program		Kuluanan Kegiatan		Praktisi	Jenis Kegiatan				
					Took Uluur	Target	Took Uluur				Target			
1.20.1.20.12.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelelangan Gedung Kantor	(3) Kinerja aparatur dan brokresi	(4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5) Sekretariat Paramapara Praja	(6) Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	(7) 100%	(8) Perencanaan gedung kantor terpelihara	(9) 10 jenis	(10) Terpenyediaan kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelelangan Gedung Kantor	(11) 8,7	(12) Rp. 21.000.000,00	(13) Rp. 25.000.000,00	(14) Sekretariat Paramapara Praja	(15) Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	(3) Kinerja aparatur dan brokresi	(4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5) Sekretariat Paramapara Praja	(6) Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	(7) 100%	(8) Pemeliharaan gedung kantor terpelihara	(9) 10 jenis	(10) Terpenyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelelangan Gedung Kantor	(11) 7,07	(12) Rp. 17.000.000,00	(13) Rp. 20.000.000,00	(14) Sekretariat Paramapara Praja	(15) Sedang Berjalan
<b>1.20.1.20.12.00.06</b>	<b>PROGRAM PENTINGKATAN PENGEMBARAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>Rp. 28.380.000,00</b>	<b>Rp. 30.380.000,00</b>		
1.20.1.20.12.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	(3) Kinerja aparatur dan brokresi	(4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5) Sekretariat Paramapara Praja	(6) Terwujudnya pejabat eselon keuangan dan pendukung yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	(7) 100%	(8) Nilai Laki SKPD	(9) Skor 65 s.d. 75	(10) Kelancaran pelaksanaan laporan kinerja SKPD	(11) 10,5	(12) Rp. 3.000.000,00	(13) Rp. 3.500.000,00	(14) Sekretariat Paramapara Praja	(15) Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	(3) Kinerja aparatur dan brokresi	(4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5) Sekretariat Paramapara Praja	(6) Terwujudnya pejabat eselon keuangan dan pendukung yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	(7) 100%	(8) Ketersediaan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	(9) 20	(10) Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	(11) 17,6	(12) Rp. 5.000.000,00	(13) Rp. 5.500.000,00	(14) Sekretariat Paramapara Praja	(15) Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	(3) Kinerja aparatur dan brokresi	(4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5) Sekretariat Paramapara Praja	(6) Terwujudnya pejabat eselon keuangan dan pendukung yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	(7) 100%	(8) Terwujudnya DPA	(9) 1 dokumen	(10) Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	(11) 50,6	(12) Rp. 14.380.000,00	(13) Rp. 14.380.000,00	(14) Sekretariat Paramapara Praja	(15) Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	(3) Kinerja aparatur dan brokresi	(4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	(5) Sekretariat Paramapara Praja	(6) Terwujudnya pejabat eselon keuangan dan pendukung yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	(7) 100%	(8) Terwujudnya Laporan RAK	(9) 1 dokumen	(10) Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	(11) 21,14	(12) Rp. 6.000.000,00	(13) Rp. 7.000.000,00	(14) Sekretariat Paramapara Praja	(15) Sedang Berjalan

Nama SKPD : Sekretariat Paramapara Praja Jumlah Pagi : Rp. 464.416.000,00

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan dan Penyeluhan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sastraan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indefinitif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan				Target	Jenis Kegiatan	SOPD	1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	Wajib														
1.2.1.1.21.01.00	<b>KETAHANAN PANGAN</b>														
1.2.1.1.21.01.00.01	<b>Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan</b>														
1.2.1.1.21.01.00.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>														
1.2.1.1.21.01.00.01.001	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Pengiriman dokumen 500 surat 2. Surat keluar 500 surat 3. Surat masuk 750 surat	500 surat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 750.000,00	Rp. 938.750.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.002	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Pembayaran belanja hosting website 2. macan 2. Pembayaran belanja internet 1 bulan 3. Pembayaran belanja listrik 4 kWh meter 4. Pembayaran belanja telepon 4 bulan	12 bulan	Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 215.000.000,00	Rp. 230.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.006	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Buletin pembayaran pajak STHK percontaan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SPPD 2. Buletin pembayaran pajak STHK percontaan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SPPD 3. Buletin pembayaran pajak STHK percontaan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SPPD 4. Buletin pembayaran pajak STHK percontaan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SPPD	18 unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 9.750.000,00	Rp. 10.500.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.007	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 2. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 3. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 4. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat	2 Orang (12 Bulan)	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 35.500.000,00	Rp. 35.500.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.008	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 2. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 3. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat	5 Orang (12 Bulan)	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 132.800.000,00	Rp. 135.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.010	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 2. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat	55.202/12	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 33.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.011	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 2. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat	10 macan bangko cekahan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 25.000.000,00	Rp. 27.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.012	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 2. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat	70.500 lembar	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 23.500.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.015	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 2. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat	1 Palet	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 22.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.017	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 2. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat	2 jenis (12 bulan) 4 jenis (12 bulan)	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 36.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.018	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 2. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 107.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				
1.2.1.1.21.01.00.01.022	Kinerja aparatur dan brokasi	Aktualisasi Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	100%	1. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat 2. Buletin Honorarium Pengabdian Masyarakat	12 bulans	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 110.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluhan	Sedang Berjalan				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Indikator Kinerja											Jumlah Pagu : Rp. 5.717.286.800,00				
	Nomor	Uraian (Rincian Uraian Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan)	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Kelembagaan Kegiatan			Target	Pagu Indikatif	Pola/Indikator	Keterangan	
						Tokoh Ukur	Target	(7)	Tokoh Ukur	Target	(9)				Tokoh Ukur	Target
1.2.1.1.2.1.01.00.01.026	Penyediaan Rekrutasi Sampah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	12 kuitansi dan 100% jasa pemungutan sampah	12 kuitansi	100%	2,02%	Rp. 17.400.000,00	Rp. 18.500.000,00	Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.2.1.1.2.1.01.00.01.029	Pengolahan Asap Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Bukti bayar honorarium pengelola keasapan	1 orang (12 bulan)	100%	2,09%	Rp. 18.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
<b>1.2.1.1.2.1.01.00.02</b>	<b>PROGRAM Peningkatan SIMANA DAN PUSKANTARA APARATUR</b>											<b>Rp. 705.080.300,00</b>	<b>Rp. 741.500.000,00</b>			
1.2.1.1.2.1.01.00.02.007	Pengalihan Perangkat Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Perengkapan gedung kantor	6 jenis	100%	9,08%	Rp. 64.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.2.1.01.00.02.009	Pengalihan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Peralatan gedung kantor	17 jenis	100%	12,63%	Rp. 89.000.300,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.2.1.01.00.02.010	Pengalihan Meubeler	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Meubeler	2 jenis	100%	2,48%	Rp. 17.500.000,00	Rp. 19.500.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.2.1.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Gedung kantor dan peralatannya terpelihara	8 jenis	100%	7,02%	Rp. 49.500.000,00	Rp. 52.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.2.1.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	1. Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara 2. Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara	18 unit 6 unit	100%	30,17%	Rp. 212.750.000,00	Rp. 230.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.2.1.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Perengkapan gedung kantor terpelihara	14 jenis	100%	8,65%	Rp. 61.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.2.1.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Peralatan gedung kantor terpelihara	12 jenis	100%	7,02%	Rp. 49.500.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.2.1.01.00.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Rehabilitasi gedung kantor dan tempat parkir kantor/BIOP DDT	1 paket	100%	22,95%	Rp. 161.800.000,00	Rp. 175.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
<b>1.2.1.1.2.1.01.00.05</b>	<b>PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>											<b>Rp. 47.327.500,00</b>	<b>Rp. 52.000.000,00</b>			
1.2.1.1.2.1.01.00.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Bimbingan teknis bagi fungsionalis PMPH	30 orang	100%	47,54%	Rp. 22.500.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.2.1.01.00.05.007	Penyusunan Pengembangan Kualitas Kelembagaan dan Kelembagaan Fungsional Tertentu	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Penilaian 19 orang pejabat fungsional terentu	19 DUPAK	100%	52,46%	Rp. 4.827.500,00	Rp. 27.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
<b>1.2.1.1.2.1.01.00.06</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Sistem Penganggaran dan Pelaporan Kinerja</b>											<b>Rp. 362.700.000,00</b>	<b>Rp. 382.400.000,00</b>			
1.2.1.1.2.1.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Mula LKJ SKPD	B	100%	2,28%	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.500.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.2.1.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	Kelembagaan pelaporan keasapan terentu	0%	100%	3,77%	Rp. 9.900.000,00	Rp. 10.900.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.2.1.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	100%	100%	R0PK, Renja, RPA, DPA, sistem informasi, dan base kelembagaan pangan	1 tahun	100%	76,02%	Rp. 204.950.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Indikator Kinerja				Pagu-Indikator	Preliminary Maju	Keterangan	
					Took Ukur (6)	TARGET (7)	Took Ukur (8)	TARGET (9)	Took Ukur (10)	TARGET (11)			SKPD	1/2/3
1.2.1.1.2.1.01.06.019	Monevring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Kepala Kantor Kecamatan Pangan dan Penyuluhan	100%	Kesuksesan antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100%	100%	Kelengkapan tugas dan fungsi SKPD	15.93%	Rp. 11.850.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Kesehatan Pangan dan Penyuluhan	(15)
1.2.1.1.21.01.00.17	<b>PROGRAM PENGUNJUTAN DAN PEMERIKSAAN DAERAH RAWAN PANGAN</b>										<b>Rp. 1.117.925.000,00</b>	<b>Rp. 1.200.000.000,00</b>		
1.2.1.1.21.01.00.17.001	Dukungan Berbasis Ketahanan Pangan (DBK)	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Gedung serti Inopigri Kojak Peyren Sembodo Wonoosari Gendudu Wukirsari Harjoto Kaliwungro Bantorejo Tulungrejo Wonoosari	14Desa	Jumlah Desa Rawan Pangan	1. Rapat Kerja Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY 10. Workshop hasil monitoring ketahanan pangan dan replikasi Desa Percontohan 11. Laporan Tahunan DKP 2. Mediasi/Kunjungan Kerja DKP 3. Penyelenggaraan Adhikarya Pangan Nasional (APN) Tingkat DIY 4. Kajian Ketahanan Pangan sebagai Kelangkaan 5. Workshop Evaluasi Kinerja DKP Daerah DIY 6. Workshop Pengembangan Ketahanan Pangan 7. Ekspose 2 Desa Percontohan 8. Monitoring program ketahanan pangan 9. Monitoring replikasi Desa Percontohan	80 orang 60 orang 1 laporan 5 kali/kota 10 sub kategori 1 dokumen 80 orang 55 orang 1 paket 1 DIY 10 desa	49,27%	Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD menurutnya jumlah desa rawan pangan	Rp. 375.000.000,00	Rp. 375.000.000,00	Badan Kesehatan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Belgian
1.2.1.1.21.01.00.17.002	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kojak Peyren Harjoto Harjowalis Kaliwungro Kaliwungro Kembang	14Desa	Jumlah Desa Rawan Pangan	1. Bimtek TPD dan tenaga pendamping 10. Gelar potensi desa 11. Hibah 12. Kajian evaluasi dampak Damapan 13. Bimtek LUD 14. Kajian potensi desa 2. Evaluasi LUD 3. Bimtek manajemen kelompok afektik 4. Gerakan optimalisasi potensi desa 5. Gerakan kemiskinan pangan 6. Kegiatan pelatihan/teknis 6. Kajian pemanfaatan lahan di Bontot Logapan 7. Sosialisasi lomba Damapan 8. Sosialisasi Damapan 9. Mengajar kelompok afektik	40 orang, 1 hari 1 paket 1 paket 1 dokumen 40 orang, 1 hari 40 orang, 2 hari 30 orang, 11 desa 30 orang, 12 desa 1 dokumen 50 orang 40 orang, 6 hari 30 orang, 4 kab 30 orang, 1 hari 30 orang, 1 hari 50 bauran/PTD FSWA	72,65%	Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD menurutnya jumlah desa rawan pangan	Rp. 552.925.000,00	Rp. 610.000.000,00	Badan Kesehatan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Belgian
1.2.1.1.21.01.00.17.003	Penyusunan Peta Ketahanan dan Resiliensi Pangan Daerah FSWA	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Kesehatan Pangan dan Penyuluhan	14Desa	Jumlah Desa Rawan Pangan	1. Bimtek Penyusunan FSWA 2. Workshop Awal Hasil Penyusunan FSWA 3. Workshop Akhir Hasil Penyusunan FSWA 4. Penyusunan Peta FSWA	30 orang, 4 kab 30 orang, 1 hari 30 orang, 1 hari 50 bauran/PTD FSWA	6,57%	Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD menurutnya jumlah desa rawan pangan	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Kesehatan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Belgian
1.2.1.1.21.01.00.17.004	Penyusunan SKRG	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Kesehatan Pangan dan Penyuluhan	14Desa	Jumlah Desa Rawan Pangan	1. Sosialisasi Pedoman/Alak SKRG 2. Pengumpulan dan pengolahan data SKRG per desa/bulan	30 orang, 1 hari, 5 kali	18-40%	Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD menurutnya jumlah desa rawan pangan	Rp. 140.000.000,00	Rp. 155.000.000,00	Badan Kesehatan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Belgian

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 8.717.286.800,00				
	Nomor	Uraian / Bidang Urusan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Pola/rajaan Maju	Keterangan	
						Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur			SKPD	Jenis Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.21.1.21.01.00.18	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN</b>	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Ketersediaan dan cadangan pangan (ton bens)	450Ton Sebata bens	1. Buku NBM sementara	75 buku	Dukungan terhadap pencapaian target RPMD meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan di DIY	12,61%	Rp. 96.000.000,00	Rp. 105.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.21.1.21.01.00.18.001	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Ketersediaan dan cadangan pangan (ton bens)	450Ton Sebata bens	1. Pengkajian cadangan pangan pemerintah 2. Buku NBM tetap	10 ton 75 buku	Dukungan terhadap pencapaian target RPMD meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan di DIY	53,89%	Rp. 410.150.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.21.1.21.01.00.18.002	Pengkajian Cadangan Pangan	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Ketersediaan dan cadangan pangan (ton bens)	450Ton Sebata bens	1. Sosialisai Pengkajian Cadangan Pangan 2. Sosialisai Pengkajian Cadangan Pangan 3. Riset/kegiatan pengkajian cadangan pangan 4. Riset/kegiatan pengkajian cadangan pangan 5. Evaluasi pengkajian cadangan pangan 6. Sosialisai Pengkajian cadangan pangan 7. Bantuan sarana posasana alat pengkajian pangan 8. Studi observasi kajian pemantauan perda cadangan pangan	25 orang 40 orang 40 orang, 6 hari 50 orang, 2 angketan 50 orang	Dukungan terhadap pencapaian target RPMD meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan di DIY						
1.21.1.21.01.00.18.003	Analisis Ketersediaan Pangan	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Ketersediaan dan cadangan pangan (ton bens)	450Ton Sebata bens	1. Buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan angka remban 2. Buku data ketersediaan pangan hari besar nasional/keagamaan 3. Buku kajian kebutuhan non pangan untuk komoditas cabai merah, tomat, dan minyak goreng 35 orang, 6 hari	30 Buku	Dukungan terhadap pencapaian target RPMD meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan di DIY	19,66%	Rp. 199.600.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.21.1.21.01.00.18.004	Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Ketersediaan dan cadangan pangan (ton bens)	450Ton Sebata bens	1. Sosialisai Pemanfaatan Peternakan 2. Evaluasi Hibah/Bansos Pemanfaatan Pakaran 3. Film Kampanye B2SA 4. Publikasi B2SA 5. Sosialisai B2SA 6. Kampanye Pangan Lokal 7. Penyusunan kearifan lokal pemanfaatan peternakan 8. Dummy pangan lokal	60 Orang, 5 Lokasi Peternakan 40 Orang 1 Rakit 4 Media 60 Orang, 3 Lokasi 1 Rakit 1 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian target RPMD meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan di DIY	13,84%	Rp. 105.325.000,00	Rp. 115.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.21.1.21.01.00.19	<b>PROGRAM PENGANEKAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</b>	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pemantauan keamanan pangan	90%			Dukungan terhadap pencapaian target RPMD meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan di DIY		Rp. 1.932.000.000,00	Rp. 2.124.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.21.1.21.01.00.19.001	Gerakan Pola Pangan Bergizi Seimbang dan Aman	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pemantauan keamanan pangan	90%			Dukungan terhadap pencapaian target RPMD meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan di DIY	12,94%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.21.1.21.01.00.19.002	Penyediaan Informasi Produk Pangan Lokal	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pemantauan keamanan pangan	90%			Dukungan terhadap pencapaian target RPMD meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan di DIY	18,12%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 4.717.286.800,00				
	Nomor	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Profilan Maju	Keterangan	
						Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target			SKPD	1/2/3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.2.1.21.01.00.19.003	Kesehatan Masyarakat Masyarakat Meningkat	Kesehatan Masyarakat Masyarakat Meningkat	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase penguasaan dan pembinaan keamanan pangan	90%	1. Bimtek Produk Antara 2. Promosi/pancainan pangan aman/sehat	40 Orang, 2 Hari 2 palet	Dukungan terhadap pencapaian target RPMD terwujudnya penguasaan/pembinaan keamanan pangan	5,69%	Rp. 110.000.000,00	Rp. 1.20.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Belanja	
1.2.1.21.01.00.19.004	Kesehatan Masyarakat Masyarakat Meningkat	Kesehatan Masyarakat Masyarakat Meningkat	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase penguasaan dan pembinaan keamanan pangan	90%	1. Bimtek petugas pasar 2. Sosialisasi desa sehat 3. Sosialisasi kerah sehat 4. Sosialisasi pasar sehat 5. Workshop Hasil Penguasaan Pangan 6. Workshop JKD (Jelajah Keamanan Pangan Daerah) 7. Promosi/pancainan pangan aman/sehat 8. Bimtek pelakas inspektor/petugas pangan yang beradur (post market) 9. Lokakarya penyusunan pedoman kaitin sehat	30 orang 1.000 orang 1.000 orang 500 orang 100 orang, 1 hari 50 orang, 4 kali 1 palet 30 orang, 4 hari 25 orang, 4 hari	Dukungan terhadap pencapaian target RPMD terwujudnya penguasaan/pembinaan keamanan pangan	23,29%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Belanja	
1.2.1.21.01.00.19.005	Kesehatan Masyarakat Masyarakat Meningkat	Kesehatan Masyarakat Masyarakat Meningkat	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase penguasaan dan pembinaan keamanan pangan	90%	1. Workshop Audit Internal 2. Workshop Evaluasi Saikran Nitr OKPPO-DIT 3. Workshop Kaji Ulang Manajemen Lembaga OKPPO DIT 4. Workshop Penyempurnaan dan harmonisasi Dokstsu Lembaga OKPPO DIT	50 orang, 1 hari 50 orang, 1 hari 50 orang, 1 hari 50 orang, 1 hari	Dukungan terhadap pencapaian target RPMD terwujudnya penguasaan/pembinaan keamanan pangan	3,88%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Belanja	
1.2.1.21.01.00.19.007	Kesehatan Masyarakat Masyarakat Meningkat	Kesehatan Masyarakat Masyarakat Meningkat	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase penguasaan dan pembinaan keamanan pangan	90%	1. Bimtek/Penyusunan Ovisku fermentasi biji kakao 2. Desimulasi Prima, PD, PH, fermentasi biji kakao 3. Promosi produk bersertifikat 4. Saesahan/temu usaha pelaku produk bersertifikat 5. Sertifikasi/registrasi dan sertelasi Prima, PD, PH, fermentasi biji kakao 6. Sertifikasi/registrasi dan sertelasi Prima, PD, PH, fermentasi biji kakao	50 orang, 3 hari 50 orang, 1 hari 1 palet 100 orang, 1 hari 30 sertifikasi/registrasi dan sertelasi Prima, PD, PH, fermentasi biji kakao 40 orang, 10 kali	Dukungan terhadap pencapaian target RPMD terwujudnya penguasaan/pembinaan keamanan pangan	23,29%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Belanja	
1.2.1.21.01.00.19.008	Kesehatan Masyarakat Masyarakat Meningkat	Kesehatan Masyarakat Masyarakat Meningkat	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase penguasaan dan pembinaan keamanan pangan	90%	1. Sosialisasi Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) 2. Temu usaha produk bersertifikat	40 orang, 10 Desa/Kurahan 100 orang, 1 hari	Dukungan terhadap pencapaian target RPMD terwujudnya penguasaan/pembinaan keamanan pangan	2,85%	Rp. 55.000.000,00	Rp. 61.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Belanja	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 5.717.286.800,00				
	Nomor	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program	Tingkat	Tolok Ukur	Keluaran Kegiatan	Tingkat	Target	Hasil Kegiatan	Tingkat	Pagu Indikatif	Pelaksanaan Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.2.1.1.21.01.00.19.009	Penyusunan PPH	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase pencapaian dan pemenuhan keharisan pangan	90%	1. Studi orientasi produk IPT 1. Workshop Penyusunan PPH	40 orang, 1 hari 50 orang	Dukung terhadap pencapaian target RPMD mengenai pengendalian konsumsi dan keamanan pangan	2,02%	Rp. 39.000.000,00	Rp. 43.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.21.01.00.19.011	Pengembangan Kapasitas Petugas Pangan dan Program Kelembagaan Pangan	Kesehatan	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase pencapaian dan pemenuhan keharisan pangan	90%	1. Apreciasi pengetahuan mutu produk pertanian 2. Apreciasi pengetahuan kapasitas petugas PMPH 3. Studi orientasi apresiasi pengetahuan mutu produk pertanian 4. Studi orientasi apresiasi pengetahuan kapasitas petugas PMPH	30 orang PPH, 4 hari 30 orang PMPH, 4 hari 30 orang PPH, 2 hari 30 orang PMPH, 2 hari	Dukung terhadap pencapaian target RPMD mengenai pengendalian konsumsi dan keamanan pangan	7,92%	Rp. 153.000.000,00	Rp. 158.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
<b>1.2.1.1.21.01.00.20</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan</b>										<b>Rp. 432.479.000,00</b>	<b>Rp. 466.000.000,00</b>			
1.2.1.1.21.01.00.20.001	Dukungan Kelembagaan Akses Pangan	Kesehatan Masyarakat Meningkat	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	100%	1. Workshop akses pangan (pengembangan, lementindih, zona terpadu) 2. Sosialisasi hasil akses pangan 3. Hasil akses pangan	190 Orang 2 kelompok @ 50 Juka 2 kali rutin tiap bulan	Dukung terhadap pencapaian target RPMD mengenai distribusi dan akses pangan	44,97%	Rp. 190.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.21.01.00.20.002	Analisis Distribusi dan Harga Pangan	Kesehatan Masyarakat Meningkat	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	100%	1. Informasi media 2. Sosialisasi harga pangan	30 orang, 1 hari, 1 leguan	Dukung terhadap pencapaian target RPMD mengenai distribusi dan akses pangan	15,74%	Rp. 66.500.000,00	Rp. 71.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.21.01.00.20.003	Pembudayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPH)	Kesehatan Masyarakat Meningkat	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	100%	1. Peningkatan kapasitas gapoktan kemandirian 2. Sosialisasi LDPH 3. FGD kewirausahaan gapoktan kemandirian 4. Temu kemitraan Gapoktan kemandirian 5. Hasil	30 Orang 10 Orang 30 Orang 40 Orang 1 kelompok @ 20 Juka 25 orang	Dukung terhadap pencapaian target RPMD mengenai distribusi dan akses pangan	17,75%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 83.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
1.2.1.1.21.01.00.20.004	Analisis Pasokan dan Akses Pangan	Kesehatan Masyarakat Meningkat	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	100%	1. Apreciasi pasokan dan akses pangan 2. Data hasil pemantauan dan data akses pangan 3. Sosialisasi pasokan dan akses pangan	25 orang 2 macam (data pasokan dan data akses pangan) 25 orang	Dukung terhadap pencapaian target RPMD mengenai distribusi dan akses pangan	21,53%	Rp. 80.979.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	
<b>1.2.1.1.21.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN</b>										<b>Rp. 2.407.500.000,00</b>	<b>Rp. 2.024.500.000,00</b>			
1.2.1.1.21.01.00.21.001	Peningkatan Kompetensi Dan Kefordanan Tenaga Penyuluh	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	100%	1. Penilaian Penyuluh Teledin 10. Temu Tugak Penyuluh 11. Updating Database Penyuluh 12. Pendampingan Penyuluh dalam Swasembada Padi Jagung Kedelai 13. Sosialisasi Sistem Pelaporan BOP Penyuluh Berbasis Web 14. Honor THL, TB PP Pendamping Sistem LAKUSUSI 2. Penilaian Pelati Berprestasi	3 orang 540 orang 1 dokumen 56 BPJK 516 orang 233 orang, 2 bulan 3 orang	Dukung terhadap pencapaian target RPMD mengenai kapasitas penyuluh	44,10%	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian / Bidang Urusan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pola/ian Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keleuaran Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.2.1.1.21.01.00.21.002	Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan		1. Penilaian Penyuluh Swadaya Berprestasi 3 orang 2. Penilaian Capaian Berprestasi 3 orang 3. Penilaian Lembaga Ekonomi Petani Berprestasi 3 orang 4. Penilaian THL-TPPP Berprestasi 3 orang 5. Penilaian Penyuluh Perikanan Tesis 3 orang 6. Bimtek Penyuluh 60 orang 7. Bimtek dan Pembinaan Penyuluh Swadaya/Swasta Perikanan 40 orang, 4 hari 8. Bimtek dan Pembinaan Penyuluh Swadaya/Swasta Perikanan 40 orang, 4 hari 9. Mengajar penyuluh swadaya/swasta 47 orang, 3 hari 10. Temu teknis penyuluh swadaya/swasta pertanian 40 orang 11. Temu teknis penyuluh swadaya/swasta perikanan 40 orang 12. Temu sate penyuluh tahun 2017 600 orang	100%			Dukungan terhadap pencapaian target RPKMD meningkatkan kapasitas penyuluh	6,02%	Rp. 157.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Bidan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sadang Berjalan
1.2.1.1.21.01.00.21.003	Penyusunan Program Penyuluhan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan		1. Evaluasi Program Penyuluhan 60 orang 2. Sosialisasi program 50 orang 1 dokumen 3. Workshop Penyusunan Program Penyuluhan 40 orang 1 dokumen	100%			Dukungan terhadap pencapaian target RPKMD meningkatkan kapasitas penyuluh	1,71%	Rp. 44.500.000,00	Rp. 49.500.000,00	Bidan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sadang Berjalan
1.2.1.1.21.01.00.21.004	Rehabilitasi dan Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan		1. Kajian Kelembagaan penyuluhan 60 orang 2. Kajian Klat BPSK 56 BPSK 3. Kajian terkait penyuluhan 1 paket 4. Pekan Nasional (PENAS) Tahun 2017 50 KTM + pendamping + pemjhu 160 orang 5. Bimtek dan Pembinaan Kelembagaan Peaku Utama 160 orang 6. Fasilitas Komisi Penyuluhan 1 dokumen 7. Lomba Kelompok Perikanan DTY 3 kelompok 8. Lomba Lantai Trengganas 3 kelompok 9. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan penyuluhan 56 BPSK 10. Penilaian Klas Kelompok 60 kelompok 11. Temu Teknis Kelembagaan kelompok 60 orang 12. Workshop Problem Solving Kelembagaan Petani 40 orang	100%			Dukungan terhadap pencapaian target RPKMD meningkatkan kapasitas penyuluh	48,17%	Rp. 1.256.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Bidan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	Sadang Berjalan



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika	Indikator Kinerja										Keterangan				
	Nomor	Uraian/Ruang Uraian Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif	Prestasi Maju	Jenis Kegiatan	
						Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target
1	1.25.1.25.01.00.01	Wajib				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
1.25.1.25.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika														
1.25.1.25.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN														
1.25.1.25.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	Pengiriman Dokumen	50 pengiriman		100%	Rp. 7.225.000,00	Rp. 8.500.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	Pembayaran tagihan rekening air 45 mg	5700 surat		100%	Rp. 271.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perawatan Kebutuhan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	Pembayaran tagihan rekening listrik	1 Tahun			Rp. 23.750.000,00	Rp. 27.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	Pembayaran tagihan rekening telepon 5 sambungan	1 Tahun			Rp. 42.060.000,00	Rp. 45.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	Kendaraan roda 2	21 unit		100%	Rp. 111.800.000,00	Rp. 140.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	Kendaraan roda 4	18 unit			Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	Budai Pemayanan Pengelola Sampah dan Kespawahan	14 Orang		100%	Rp. 47.060.000,00	Rp. 47.060.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	Budai Pemayanan Jasa Cleaning Service	12 bulan		100%	Rp. 70.617.200,00	Rp. 74.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.014	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	Alat Tulis Kantor	36 Jenis		100%	Rp. 25.867.700,00	Rp. 30.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	1. Barang Cakupan	13 cakupan		100%	Rp. 14.800.250,00	Rp. 16.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	2. Pengadaan dan Penjilidan	16 pengandaan		100%	Rp. 10.868.300,00	Rp. 12.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.018	Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	6 jenis		100%	Rp. 90.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	1. Makanan dan minuman sedang	6000 orang		100%	Rp. 72.000.000,00	Rp. 72.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
1.25.1.25.01.00.01.027	Kinerja aparatur dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan		100%	100%	2. Koordinasi dan daerah	12 bulan		12 bulan	Rp. 554.884.000,00	Rp. 900.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
						100%	100%	Budai pemayanan jasa keamanan kantor/tempat kerja	6 orang / 12 bulan		100%	Rp. 160.644.511,00	Rp. 200.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan
						100%	100%	Tenaga Pendukung	6 orang/bulan		100%	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Desas Komunikasi dan Informatika	Seding Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Jumlah Pagu - Rp. 14.904.814.792,00	Keterangan				
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target			Pelembagaan	Jenis Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.251.125.01.00.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>														
1.251.125.01.00.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Menengah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menengah	Gondomanan	100%	Kendaraan Roda 2	2 Unit	Kendaraan Roda 2	100 %	Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (mobil dinas dan motor dinas) terpenuhi	100 %	Rp. 226.350.000,00	Rp. 730.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai Berjalan
1.251.125.01.00.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Menengah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menengah	Gondomanan	100%	Kendaraan Roda 4	1 Unit	AC	100 %	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perengkapan gedung kantor) terpenuhi	100 %	Rp. 188.555.920,00	Rp. 320.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai Berjalan
1.251.125.01.00.02.009	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Menengah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menengah	Gondomanan	100%	Fisidisk	10 Unit	Fisidisk	100%	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 412.197.300,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai Berjalan
1.251.125.01.00.02.010	Pengadaan Mebeleur	Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Menengah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menengah	Gondomanan	100%	Mein Kelek	5 Unit	Mein Kelek	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebeleur) terpenuhi	100%	Rp. 42.498.300,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai Berjalan
1.251.125.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Menengah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menengah	Gondomanan	100%	Kursi Komiseri setara direktur - leather	1 buah	Kursi Komiseri setara direktur - leather	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kursi komiseri) terpenuhi	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai Berjalan
1.251.125.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Menengah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menengah	Gondomanan	100%	Kendaraan roda 2	16 Unit	Kendaraan roda 2	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	100%	Rp. 453.055.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai Berjalan
1.251.125.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Menengah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menengah	Gondomanan	100%	Mein Kelek manual	15 unit	Mein Kelek manual	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	100%	Rp. 32.125.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai Berjalan
1.251.125.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Menengah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menengah	Gondomanan	100%	Server, Pritner dan switch	1 Tihuan	Server, Pritner dan switch	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perengkapan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 87.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika	Nomor	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saasran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target	Tingkat	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
						Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan						1/2/3	1/2/3			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Tekuk Ukur	Tekuk Ukur	Tekuk Ukur	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.25.1.25.01.00.06		<b>PROGRAM PERINGATAN</b> <b>PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		100%	100%	100%	Komputer	90 Unit							
1.25.1.25.01.00.06.016		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		100%	100%	100%	Nilai LAMP Dinas Kominfo DIY	A=75,5/88S		Kefinansian pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.25.1.25.01.00.06.017		Penyusunan laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		100%	100%	100%	Keseluruhan kegiatan akhir tahun anggaran	10%		Terselenggaranya kegiatan akhir tahun anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun anggaran	100%	Rp. 100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.25.1.25.01.00.06.018		Penyusunan Rencana Program dan Penganggaran DIPA dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		100%	100%	100%	ROPK, Renja, RKA, DPA	1 Tahun		Kefinansian pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.25.1.25.01.00.06.019		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		100%	100%	100%	Keseluruhan antara target capaian kinerja dengan program	100%		Kefinansian pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.25.1.25.01.00.15		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>													<b>Rp. 3.026.866.350,00</b>	<b>Rp. 6.545.000.000,00</b>		
1.25.1.25.01.00.15.003		Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunitas Dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		14/unsur/ bidang	14/unsur/ bidang	100%	1. Pengkaji Website Infok. Kominfo 2. Leaflet 3. Booklet 3. 3000 lembar booklet (3 lembar @ 1000/b) 4. buku 4. 1000 eksemplar 5. 1 palet	1. 12 bulan 2. 3600 lembar leaflet (3 macam @ 1200/b) 3. 3000 lembar booklet (3 lembar @ 1000/b) 4. 1000 eksemplar 5. 1 palet					Rp. 194.862.750,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.25.1.25.01.00.15.006		Pengajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		14/unsur/ bidang	14/unsur/ bidang	87%	1. Pemeliharaan Data Center 2. Bluewin DCS Bidang Lingkungan 3. Standarisasi Keamanan Informasi (ISO 27001) 4. Bimbingan Teles. Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 5. Forum Koordinasi E- Government sebesar 7%	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 6.1 palet 255 peserta 1. 1 kali 2. 1 kali		Dukungan pengajian dan pengembangan Sistem Informasi sebesar 87% untuk 13 uraian/ bidang	87%	Rp. 594.627.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.25.1.25.01.00.15.020		Bimbingan Teles. Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		14/unsur/ bidang	14/unsur/ bidang	6%	1. Forum Koordinasi E- Government sebesar 7%	2. 1 kali		Dukungan bimbingan tele. pengadaan barang dan jasa secara elektronik menjadi 6% untuk 13 uraian/ bidang	6%	Rp. 41.308.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.25.1.25.01.00.15.017		Kerjasama Pengembangan e-Government	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		14/unsur/ bidang	14/unsur/ bidang	7%	2. Forum koordinasi LPSE se DIY	2. 1 kali		Dukungan kerjasama pengembangan e-Government sebesar 7% untuk tercapainya layanan unguilan DCS menjadi 13 uraian/ bidang	7%	Rp. 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.25.1.25.01.00.15.020		Pengelolaan Kelembagaan KPT	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		14/unsur/ bidang	14/unsur/ bidang	100%	Aspirasi masyarakat akan sergketa informasi publik tersedia dengan baik	100%		Aspirasi masyarakat akan sergketa informasi publik tersedia dengan baik	100%	Rp. 1.050.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.25.1.25.01.00.15.021		Pengelolaan Kelembagaan KPTD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		14/unsur/ bidang	14/unsur/ bidang	100%	Aspirasi masyarakat akan penyajian publik tersedia dengan baik	100%		Aspirasi masyarakat akan penyajian publik tersedia dengan baik	100%	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.25.1.25.01.00.18		<b>PROGRAM KERJASAMA</b> <b>INFORMASI DENGAN MASS MEDIA</b>													<b>Rp. 2.676.150.000,00</b>	<b>Rp. 3.000.000.000,00</b>		
1.25.1.25.01.00.18.006		Pengembangan Kemitraan Kemitraan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan		90%	90%	100%	7 jenis			Tersekolangnya peran humas dalam rangka kemitraan kemitraan	100%	Rp. 810.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika	Indikator Kinerja										Zumlah Pagu - Rp. 14.904.814.792,00				
	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program	Kelulusan Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatorif	Pembinaan Mady	Jenis Kegiatan	Keterangan				
1.25.1.25.01.00.18.016	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.25.1.25.01.00.18.016	Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kelembagaan dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan	Peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui media elektronik dan media cetak	90%	100%	Kelembagaan dan brokasi	70,20	Rp. 1.866.150.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Scalng Berjalan		
1.25.1.25.01.00.20	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI</b>														
1.25.1.25.01.00.20.001	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Kelembagaan dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan	Peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui media elektronik dan media cetak	100%	100%	Kelembagaan dan brokasi	30,00	Rp. 4.812.994.350,00	Rp. 5.500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Scalng Berjalan		
1.25.1.25.01.00.20.002	Penyediaan Layanan Pengabdian Secara Elektronik	Kelembagaan dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan	Peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui media elektronik dan media cetak	100%	100%	Kelembagaan dan brokasi	30,00	Rp. 279.511.250,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Scalng Berjalan		
1.25.1.25.01.00.21	<b>PROGRAM PEMERINTAH DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, PERIKLAIMASI, DAN PERIKLAIMASI</b>														
1.25.1.25.01.00.21.001	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Titipan	Kelembagaan dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan	Peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui media elektronik dan media cetak	75%	100%	Kelembagaan dan brokasi	30,00	Rp. 903.463.600,00	Rp. 1.222.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Scalng Berjalan		
1.25.1.25.01.00.21.002	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi	Kelembagaan dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan	Peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui media elektronik dan media cetak	75%	75%	Kelembagaan dan brokasi	30,00	Rp. 29.337.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Scalng Berjalan		
1.25.1.25.01.00.21.004	Kolaborasi Dalam Rencan Informasi Nasional	Kelembagaan dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan	Peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui media elektronik dan media cetak	75%	100%	Kelembagaan dan brokasi	30,00	Rp. 10.835.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Scalng Berjalan		
1.25.1.25.01.00.21.005	Penyediaan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah	Kelembagaan dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan	Peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui media elektronik dan media cetak	75%	100%	Kelembagaan dan brokasi	30,00	Rp. 206.221.000,00	Rp. 208.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Scalng Berjalan		
1.25.1.25.01.00.21.006	Layanan Informasi Publik	Kelembagaan dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan	Peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui media elektronik dan media cetak	75%	100%	Kelembagaan dan brokasi	30,00	Rp. 107.211.200,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Scalng Berjalan		
1.25.1.25.01.00.21.007	Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Publik	Kelembagaan dan brokasi	Kelembagaan dan brokasi	Gondomanan	Peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui media elektronik dan media cetak	75%	75%	Kelembagaan dan brokasi	30,00	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Scalng Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Bidang Usaha Pemertintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Jenis Kegiatan	
					Tekuk Ukur	Target	Tekuk Ukur	Target			Tekuk Ukur	Target		SKPD
(1)	(2)	(3) dan brokasi	(4) Pemerintah Daerah Kratongkat	(5)	(6) Target	(7)	(8) Target	(9)	(10) Penyebutan informasi pembangunan bagi masyarakat yang semakin meningkat sebesar 75 %	(11) Target	(12)	(13) dan Informatika	(14) (15)	(15)
								100%	2. KKM yang berdaya meningkatkan fungsi sosialnya (20 KKM dari 65 KKM)					

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Pagu : Rp. 14.904.814.792,00

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan dan Ansp Daerah	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00				
	Nomor	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saasana Daerah	Lokasi	Hasil Program			Hasil Kegiatan			Pagu Induktif	Pakrean Maju	Keterangan	
						Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target			SKPD	Jenis Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.24	Wajib Kearsipan														
1.24.1.26.01.00	Badan Perencanaan dan Ansp Daerah														
1.24.1.26.01.00.01	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERJUSTAMAN DAN KEARSIPAN														
1.24.1.26.01.00.01.001	Pembangunan Gedung Ansp														
1.26	PERJASTAMAN														
1.26.1.26.01.00	Badan Perencanaan dan Ansp Daerah														
1.26.1.26.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN														
1.26.1.26.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
1.26.1.26.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik														
1.26.1.26.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional														
1.26.1.26.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan														
1.26.1.26.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor														
1.26.1.26.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor														
1.26.1.26.01.00.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman														
1.26.1.26.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
1.26.1.26.01.00.01.014	Penyediaan Perabot Rumah Tangga														
1.26.1.26.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Bakar Dan Peraturan Perundang-Undangan														
1.26.1.26.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman														
1.26.1.26.01.00.01.018	Biaya Bahan Kelembagaan Dan Koordinasi Ke Luar Daerah														

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Peminorahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saarant Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prokiraan Meja	Keterangan					
					Hasil Program		Kebaran Kegiatan				Target	Took Ukur	Hasil Kegiatan	SKPD	1/2/3	(15)
					Took Ukur	Target	Took Ukur	Target								
1.26.1.26.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.01.029	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
<b>1.26.1.26.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PERINGKATAN APARATUR</b>												<b>Rp. 4.475.999.400,00</b>	<b>Rp. 4.805.500.000,00</b>		
1.26.1.26.01.00.02.007	Penyediaan Penerimaan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Penerimaan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.02.057	Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.02.091	Pemeliharaan Jaringan Telepon dan Air	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
<b>1.26.1.26.01.00.05</b>	<b>PROGRAM PERINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR</b>												<b>Rp. 5.150.285.375,00</b>	<b>Rp. 5.051.000.000,00</b>		
1.26.1.26.01.00.05.004	Investasi, Integrasi Dan Penggabungan Barang	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Pemilahan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.05.032	Pengembangan Kualitas SD M	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.05.033	Pengembangan I S O	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.05.050	Pengelolaan dan administrasi aset barang milik daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.26.1.26.01.00.05.079	Pengembangan Program Perpusakaan dan Keaganan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpusakaan dan Arsip Daerah	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ringkasan Uraian Penceritaan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prokiraan Meja	Keterangan	
					Hasil Program		Keputusan Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)				
(1)		(3)	(4)	(5)						(13)	(14)	(15)
<b>1.26.1.26.01.00.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM KEUANGAN DAERAH DAERAH Istimewa KEMERDA DAN KEUANGAN</b>									<b>Rp. 341.513.900,00</b>	<b>Rp. 374.700.000,00</b>	
1.26.1.26.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja dan brokasi	Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perencanaan dan Arsip Daerah	100%	lapk	skor a	kegiatan pelaksanaan dan laporan kinerja skpd	kegiatan pelaksanaan dan laporan kinerja skpd	Rp. 21.988.000,00	Rp. 21.200.000,00	Scoring Berjalan
1.26.1.26.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perencanaan dan Arsip Daerah	100%	laporan tahunan	skor a	laporan tahunan	laporan tahunan			Badan Perencanaan dan Arsip Daerah
1.26.1.26.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Basis dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perencanaan dan Arsip Daerah	100%	Laporan fungsional	1 tahun	Laporan fungsional	pelaporan keuangan dapat diperoleh tepat waktu	Rp. 27.460.000,00	Rp. 30.000.000,00	Scoring Berjalan
1.26.1.26.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perencanaan dan Arsip Daerah	100%	Laporan semester/prognosis	1 tahun	Laporan semester/prognosis	Kelancaran penyusunan dokumen kinerja SKPD	Rp. 258.194.500,00	Rp. 283.000.000,00	Scoring Berjalan
						PK, RKT, RENA dan RMA	1 tahun	ekspose hasil monitoring	peningkatan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 34.011.400,00	Rp. 37.500.000,00	Scoring Berjalan
						moner kegiatan skpd	1 tahun					

Nama SKPD : Badan Perencanaan dan Arsip Daerah Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD - Dinas Pertanahan	Nomor	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikator	Keterangan					
						Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan							
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Pilihan													
		<b>PERTANIAN</b>													
		<b>Dinas Perikanan</b>													
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTARAN</b>															
2.01.2.01.01.00.01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	500 buah	100%	lancarnya pelaksanaan administrasi perantaran	100 %	Rp. 2.095.500,00	Rp. 2.305.050,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Dan Listrik	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	12 bulan	100%	layaknya pelayanan administrasi perantaran	100 %	Rp. 840.794.400,00	Rp. 824.807.840,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	006	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	1 tahun	100%	Lancarnya pelayanan administrasi perantaran	100 %	Rp. 24.686.200,00	Rp. 27.154.820,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	1 tahun	100%	Lancarnya pelayanan administrasi perantaran	100 %	Rp. 131.186.000,00	Rp. 144.304.600,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	1 tahun	100%	Lancarnya pelaksanaan kebersihan kantor	100 %	Rp. 494.787.494,00	Rp. 478.244.243,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	45 jenis	100%	lancarnya pelaksanaan administrasi perantaran	100 %	Rp. 124.466.040,00	Rp. 136.846.644,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	011	Penyediaan Barang Cetak Dan Pengandaian	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	3 jenis	100%	lancarnya pelaksanaan administrasi perantaran	100 %	Rp. 101.193.345,00	Rp. 111.313.680,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	012	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	17 macam	100%	lancarnya pelaksanaan administrasi perantaran	100 %	Rp. 40.379.680,00	Rp. 44.417.648,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	014	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	11 macam	100%	lancarnya pelaksanaan administrasi perantaran	100 %	Rp. 27.820.760,00	Rp. 30.602.836,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perakitan Perunggu-Undangan	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	6 macam	100%	lancarnya pelaksanaan administrasi perantaran	100 %	Rp. 25.304.400,00	Rp. 27.834.840,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	1 tahun	100%	lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi	100 %	Rp. 71.016.000,00	Rp. 78.117.600,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	018	Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	1 tahun	100%	Lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi	100 %	Rp. 453.701.600,00	Rp. 453.701.600,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	022	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	1 tahun	100%	lancarnya keamanan lingkungan perantaran	100 %	Rp. 163.073.235,00	Rp. 179.380.598,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	026	Penyediaan Retribusi Sampah	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	100 %	100%	lancarnya kebersihan lingkungan kantor	100 %	Rp. 4.950.000,00	Rp. 5.445.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.01	029	Pengelolaan Asap Dinamis SKPD	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	1 tahun	100%	Terlaksananya pengelolaan asap Dinas Kantor	100 %	Rp. 67.675.300,00	Rp. 74.442.830,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.02	003	<b>PROGRAM PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b> Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umuharjo	100%	100%	1 tahun	100%	Terwujudnya pembangunan gedung kantor	1 paket	Rp. 1.157.000.000,00	Rp. 3.427.700.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.02	005	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	100%	100%	1 unit	100%	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	3 paket	Rp. 800.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.02	009	Pengadaan Perakitan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis Nanggalan Pakem Pajany Umuharjo	100%	100%	1 paket	100%	Terwujudnya perakitan penunjang kegiatan kantor	100 %	Rp. 629.161.280,00	Rp. 692.077.408,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokalisasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jenis Nanggalan Pakem Pajany	100%	100%	1 paket	100%	Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung perantaran	100 %	Rp. 138.955.764,00	Rp. 152.851.341,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu - Rp. 36.248.243.351,00				
	Nomor	Uraian Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Haal Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	
						Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur			1/2/3	1/2/3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.01.2.01.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jakis Nanggulan Umbulharjo Wates	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	pemeliharaan berkala kendaraan dinas	1 tahun	Terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas	100 %	Rp. 916.559.500,00	Rp. 1.008.226.450,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	2.01.2.01.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jakis Nanggulan Umbulharjo Wates	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala perengkapan gedung perkantoran	1 paket	Terlaksananya pemeliharaan berkala perengkapan gedung perkantoran	100 %	Rp. 61.490.000,00	Rp. 67.639.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	2.01.2.01.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralihan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Jakis Nanggulan Umbulharjo Wates	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala peralihan (komputer, LCD, faximi, mesin tik, dll)	1 paket	Terlaksananya pemeliharaan berkala peralihan kantor	100 %	Rp. 49.005.000,00	Rp. 53.905.500,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	2.01.2.01.01.00.02.042	Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Pakem Rajalan Umbulharjo Peranian	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab gedung perkantoran induk dan upot	1 paket	Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor	100 %	Rp. 1.916.789.200,00	Rp. 444.052.685,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	2.01.2.01.01.00.02.083	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD BPPPH (DAK)	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pertanian Umbulharjo	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembangunan Gedung BPPPH	1 paket	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	50 %	Rp. 2.939.556.492,00	Rp. 2.189.265.100,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	2.01.2.01.01.00.02.087	Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Proteksi dan Sarana Peternakan/DAK)	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pertanian Umbulharjo	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengadaan sarana dan prasarana membangun pemukiman tanaman	1 paket	Meningkatnya kualitas hasil ternak	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	2.01.2.01.01.00.02.088	Rehabilitasi/Rehabilitasi/Rekonstruksi Perbaikan dan Laboratorium Hewan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pertanian Umbulharjo	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab kandang sapi unit Ngiklari	1 unit	Meningkatnya kualitas hasil ternak	100%	Rp. 1.111.728.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	2.01.2.01.01.00.02.110	Pembangunan/rehabilitasi/renovasi dan perbaikan sarana prasarana UPTD BPS/DR (DAK)	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pertanian Umbulharjo	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dukung sarana dan prasarana pembangunan unit perikanan	1 paket	Meningkatnya kualitas pelaksanaan unit perikanan	100 %	Rp. 1.924.177.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	<b>2.01.2.01.01.00.05</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>										<b>Rp. 38.408.150,00</b>	<b>Rp. 42.248.965,00</b>		
	2.01.2.01.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Pemilahan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umbulharjo	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembinaan dan pemilahan angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pegawai negeri	100 %	Rp. 38.408.150,00	Rp. 42.248.965,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	<b>2.01.2.01.01.00.06</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										<b>Rp. 316.774.975,00</b>	<b>Rp. 348.452.475,00</b>		
	2.01.2.01.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umbulharjo	Terwujudnya penata usaha keuangan yang mendukung fungsi SKPD	100%	Tersusunnya blp 2015 dan LPD 2015	2 DOKUMEN	Terevaluasinya kinerja Disan tahun 2015	100 %	Rp. 4.486.900,00	Rp. 4.935.590,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	2.01.2.01.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umbulharjo	Terwujudnya penata usaha keuangan yang mendukung fungsi SKPD	100%	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban semester dan laporan tahunan	3 dokumen	Lengkapnya pelaksanaan administrasi keuangan	100 %	Rp. 10.435.500,00	Rp. 11.479.512,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	2.01.2.01.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Informasi	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umbulharjo	Terwujudnya penata usaha keuangan yang mendukung fungsi SKPD	100%	Tersusunnya RK 1, Renja, RMA, RPA 2018	4 dokumen	Terlaksananya pembangunan perencana tahun 2017	100 %	Rp. 253.238.535,00	Rp. 278.562.389,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	2.01.2.01.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan lokerasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Umbulharjo	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pernapasan kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Laporan evaluasi kegiatan tahun 2017	1 dokumen	Pelaksanaan kegiatan tahun 2017 berjalan sesuai renstra Disan DY	100 %	Rp. 48.613.620,00	Rp. 53.474.962,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
	<b>2.01.2.01.01.00.22</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Produktif Hasil Pertanian</b>										<b>Rp. 8.464.956.433,00</b>	<b>Rp. 9.151.732.749,00</b>		
	2.01.2.01.01.00.22.012	Pengembangan Ternak kambing	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkatkan	Gemuljo Pakem Purusari Sanglah	Perentase peningkatan populasi kambing	3,2%	Bantuan hibah kepada kelompok BinaK, mengembangkan ternak kambing Bogor/domba	4 kelompok 60 orang	Dukungannya terhadap pencapaian jumlah populasi ternak tahun 2017	1,4 %	Rp. 176.000.000,00	Rp. 193.600.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian		Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 36.218.243.351,00		Keterangan	
Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Haal Program		Keluaran Kegiatan		Haal Kegiatan		Pagu Indikatorif	Prakiraan Meju	SKPD	Jenis Kegiatan	
					Haal Utkr	TARGET	Haal Utkr	TARGET	Haal Utkr	TARGET					
2.01.2.01.01.00.22.013	Pengembangan Ternak Sapi Perah	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Bimtek pengembangan ternak kambing perah	30 orang							
							Rehabilitasi ternak bibit kambing perah	1 paket							
							Peningkatan kapasitas SDM recorder ternak kambing perah	30 orang							
							Bimtek pemantauan uji surut	30 orang	Dukungan terhadap pencapaian hasil ternak sapi perah tahun 2017	1 %	Rp. 147.124.973,00	Rp. 95.589.970,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.22.014	Pengembangan Ternak Sapi Potong	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							Bimtek pengembangan ternak sapi perah	60 orang							
							Bantuan bibit ternak sapi potong	3 kelompok	Dukungan terhadap pencapaian jumlah populasi ternak 2017	14,42%	Rp. 302.000.000,00	Rp. 332.750.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
							Bimtek pengembangan kawasan sapi potong	60 orang							
							Bimtek pengembangan pemeliharaan sapi potong	60 orang							
							Bimtek pengembangan kawasan sapi potong	60 orang							
							Perambanan pelepasan sapi potong	4 ekor							
2.01.2.01.01.00.22.016	Pengembangan Ternak Unggas	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Lendah Pongjng Senoblo Wonorejo											
							Bimtek agribisnis pedemakan	60 orang	Dukungan pengembangan unggas terhadap pencapaian populasi peternakan	1 %	Rp. 91.556.997,00	Rp. 30.249.970,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
							Bimtek budidaya laik	60 orang							
2.01.2.01.01.00.22.019	Rehabilitasi Produk Serni Beku Sapi	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							Jumlah Produk serni beku	1 paket	Adaptasi pengkilangan produksi serni beku	2 %	Rp. 1.980.000.000,00	Rp. 2.175.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.22.023	Pengembangan Pembibitan Ternak	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							Peningkatan jumlah bibit ternak	1 paket							
2.01.2.01.01.00.22.025	Penumbuhan HMT di Lahan Marginal	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Bangunpagan Pagen Wadono Wonorejo											
							Bimtek pemeliharaan HMT	30 orang	Ketersediaan HMT	Kab Gunungkidul		Rp. 198.495.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.22.026	Peningkatan Penyalak Hewan Menakl Strategis	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							Pembinaan kelompok pengembangan HMT	5 kelompok							
							Pembinaan paramedik veteriner puskawin	30 orang	Dukungan kegiatan penanggulangan PHMS terhadap pencapaian produksi peternakan tahun 2016	3 %	Rp. 363.000.000,00	Rp. 399.300.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
							pengadaan obat hewan	700 botol							
							pengadaan vaksin	500.000 dosis							
2.01.2.01.01.00.22.027	Penelitian Keselamatan dan Pengaturan Laboratoris	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							terpaparnya kesehatan dan penanganan penyakit	1 paket	dukungan produksi ternak	2 %	Rp. 612.925.280,00	Rp. 674.217.866,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.22.028	Kaji Temp Teknologi Peternakan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							Melaksanakan uji teras teknologi peternakan	1 paket	Adaptasi hasil teras teknologi terhadap jumlah populasi ternak	2 %	Rp. 394.551.500,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.22.029	Pengawasan Lulu Lintas Ternak	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							TERKASANYA PENGAWASAN LAULINTAS TERNAK	1 PAKET	DUKUNGAN PENGAWASAN LAU LINTAS TERNAK TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	2 %	Rp. 275.000.000,00	Rp. 302.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.22.030	Pengembangan Biot HMT di UPTD BRPTDK	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							Terdikannya penumbuhan HMT di UPTD	1 tahun	Dukungan penumbuhan HMT terhadap jumlah ternak di DT	2 %	Rp. 276.503.500,00	Rp. 296.400.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.22.033	Akreditasi/Pemeliharaan Status Akreditasi	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							Terselenggaranya akreditasi laboratorium	1 paket	Adaptasi akreditasi laboratorium terhadap produksi peternakan	1 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.22.040	Diklat Teknis Peternakan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							Pelaksanaan diklat teknis peternakan	5 diklat	Meningkatnya pengetahuan petani dan peternak peternakan	100%	Rp. 322.949.583,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
<b>2.01.2.01.01.00.29</b>	<b>PROGRAM PENGANTARAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN</b>											<b>Rp. 4.281.595.893,00</b>	<b>Rp. 4.380.088.270,00</b>		
2.01.2.01.01.00.29.001	Peningkatan Pengolahan Sumbudaya Ar. Wiyah. Singal dan Pengolahan Trigali Pasipatt (Pondongan WBSHP)	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							Terfungsinya P3A / GP3A	4 kelompok	Dukungan kegiatan pondampingan WISAP terhadap peningkatan jumlah produk tanaman pangan tahun 2017	2 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.29.003	Pembudayaan P3A dan Peningkatan Jaringan Trigali Terseer	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian											
							Pembinaan P3A/GP3A	4 kelompok	Dukungan Pembudayaan P3A tentang peningkatan jumlah produksi tanaman pangan tahun 2017	4 %	Rp. 108.763.600,00	Rp. 119.827.813,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian		Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 36.218.243.351,00		Keterangan	
Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatorif	Prakiraan Meju	SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tokol Ukur	TARGET	Tokol Ukur	TARGET	Tokol Ukur	TARGET					
2.01.2.01.01.00.29.004	Penanganan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.008	Pengembangan Akin Tanaman Pangan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.011	Pelayanan Sertifikasi Padi dan Palawija	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Umbulharjo	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.013	Perencanaan Perbaikan Tanaman Pangan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.015	Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.022	Bimbingan dan Dukungan Sinaru Pengendalian OPT dan Brigade Protaksi	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.027	Analisa Standar dan Pengawasan Mutu Benih	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.030	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan (Loan WISMP)	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.033	Pengamatan dan Avaluasi Keunggulan Hasil Karena OPT Tanaman Pangan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.034	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarna Tanaman Pangan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.035	Identifikasi Varietas Tanaman Pangan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.036	Pengalangan Diklat	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.039	Persejahteraan Buruh/Usa Kary, Kandang Hewan, dan Gula	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.29.040	Pemberdayaan Petani Melalui SUHT	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Meju	Keterangan			
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan				Target	Jenis Kegiatan	SKPD	
					Tokok Ukur	Target	Tokok Ukur	Target						1/2/3
2.01.2.01.01.00.29.041	Diklat Teknis Tanaman Pangan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	0,1%	01.1%	Prakarsaan diklat teknis tanaman pangan	2 diklat	100%	Rp. 84.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Pertanian	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.30	<b>PROGRAM Peningkatan Produktivitas Hortikultura</b>									<b>Rp. 5.003.997.420,00</b>	<b>Rp. 3.395.814.400,00</b>			
2.01.2.01.01.00.30.003	Dukungan Sarana dan Prasarana Pengembangan Buah, Sayur, dan Tanaman	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	Prakarsaan Sertifikasi Kebun/Lahan (Registrasi dan Survei/lahan Kebun/Lahan)	400 kebun/lahan	17,68%	Rp. 567.869.200,00	Rp. 1.111.317.459,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.30.004	Peningkatan Budidaya Hortikultura di Lahan Perumahan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	bantuan hibah bertuk barang lahan perumahan	4 hektar/1 lota	17,68%	Rp. 467.232.700,00	Rp. 996.479.940,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.30.007	Pengembangan Perumahan Hortikultura	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	pelaksanaan sekolah lapang optimalisasi lahan perumahan	4 kelompok		Rp. 1.786.849.900,00	Rp. 1.965.574.890,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.30.008	Dukungan Sarana dan Prasarana Pengembangan Benih Sayuran di Troglak	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	pelaksanaan sekolah lapang pengembangan lahan perumahan	10 kelompok		Rp. 77.000.000,00	Rp. 84.700.000,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.30.010	Pengembangan Buah, Sayur, dan Bofemaka	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	fasilitas sarana prasarana	10 kelompok	11,05%	Rp. 584.175.050,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.30.013	Dukungan Sarana Pengembangan OPT dan Brigade Proteksi Hortikultura	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	pelaksanaan sekolah lapang	220 orang		Rp. 746.055.000,00	Rp. 235.950.000,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.30.017	Observasi Varietas Tanaman Hortikultura	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	fasilitas agensi hayati / nabati	6500 dds agensi hayati	40%	Rp. 11.091.960,00	Rp. 12.201.156,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.30.018	Pelayanan Sertifikasi Hortikultura	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	kegiatan pengendalian opt hortikultura	80 kali	2%	Rp. 38.749.700,00	Rp. 67.336.500,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.30.019	Evaluasi Pasca Lahan dan Bibit/organ Urutan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	kegiatan produksi tanaman hortikultura	1 PAKET	2%	Rp. 41.209.700,00	Rp. 31.195.550,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.30.020	Apresiasi Perencanaan Diklat	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	kegiatan pelatihan sampel benih, pengemasan label benih, pemeriksaan sertifikat, benih dan sertifikat benih	20 unit	3%	Rp. 10.999.010,00	Rp. 12.098.911,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.30.024	Diklat Teknis Hortikultura	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	1%	1%	kegiatan diklat teknis hortikultura	1 paket	2%	Rp. 272.765.200,00	Rp. 285.000.000,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.32	<b>PROGRAM Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian</b>									<b>Rp. 2.866.333.890,00</b>	<b>Rp. 2.899.921.771,00</b>			
2.01.2.01.01.00.32.001	Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	4komoditas	4komoditas	Promosi produk pertanian unggulan DT	8 pameran	3 komoditas	Rp. 749.865.500,00	Rp. 794.971.266,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.32.002	Penyediaan Informasi Persebaran	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	4komoditas	4komoditas	Informasi persebaran	1 paket	5%	Rp. 54.945.700,00	Rp. 60.440.347,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.32.003	Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	4komoditas	4komoditas	Bantuan hibah peralihan pasca panen pertanian	11 paket	4%	Rp. 273.074.900,00	Rp. 205.039.824,00	Dinas Pertanian		
2.01.2.01.01.00.32.006	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	4komoditas	4komoditas	Peningkatan mutu keamanan pangan	1 paket	4%	Rp. 561.819.940,00	Rp. 618.001.924,00	Dinas Pertanian		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perikanan		Jumlah Pagu : Rp. 36.218.243.351,00												
Nomor	Maksud/Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif		Prakiraan Maju		Jenis Kegiatan	
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target	Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Tokol Ukur	Target	Prakiraan Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.32.007	Penggiatan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Perikanan	Jumlah sertifikat jaminan mutu	4komoditas	Bentuk pemantauan temak kerbau	50 orang	Dukungan pengkajian mutu dan keamanan pangan produk perikanan terhadap terhadap hasil produk olahan perikanan segar dan olahan tahun 2017	3 komoditas	Rp. 95.700.000,00	Rp. 105.270.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.32.008	Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Standard Nasional Indonesia (TP, Hortikultura, Akemadikal)	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Perikanan	Jumlah sertifikat jaminan mutu	4komoditas	Bantuan alat pengalangan	1 kelompok	Dukungan sertifikat produk olahan segar terhadap pengkajian kualitas produk	3 komoditas	Rp. 569.226.350,00	Rp. 626.148.985,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.32.009	Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pangan Olahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Perikanan	Jumlah sertifikat jaminan mutu	4komoditas	Sertifikat bers berlabel	4 sertifikat	Dukungan kegiatan terhadap pengkajian NTP	2 %	Rp. 126.500.000,00	Rp. 139.150.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.32.010	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Perikanan	Jumlah sertifikat jaminan mutu	4komoditas	Informasi harga pasar harian, mingguan dan tahunan	1 tahun	Dukungan sistem informasi pasar terhadap hasil produk olahan perikanan segar dan olahan tahun 2017	3 komoditas	Rp. 110.182.800,00	Rp. 131.000.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.00.32.011	Pengembangan Pasar Tani	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Perikanan	Jumlah sertifikat jaminan mutu	4komoditas	Informasi hasil AJUT komoditas perikanan	10 komoditas	Dukungan pemasaran terhadap hasil produk olahan perikanan segar dan olahan tahun 2017	3 komoditas	Rp. 145.018.700,00	Rp. 229.899.395,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Jumlah Pagu : Rp. 26.076.142.377,00	Keeragaman					
						Hasil Program Tolok Ukur	Target	Keuaran Kegiatan Tolok Ukur		Target	Hasil Kegiatan Tolok Ukur	Target	Pagu Indefinitif	Praktikn Maju	
														1/2/3	1/2/3
2	2.02	Pilihan	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02	2.02.01.00.01.001	KEHUTANAN													
2.02	2.02.01.00.01.002	Dinas Kehutanan dan Perkebunan													
2.02	2.02.01.00.01.001	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN													
2.02	2.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat Keluar Surat Masuk Pengiriman Dokumen	3690 surat 8613 surat 550 surat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,61%	Rp. 19.470.000,00	Rp. 2.147.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembayaran Tagihan Rekening Telepon 20 Unit	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	13,66%	Rp. 529.826.000,00	Rp. 382.808.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti Pembayaran KIR/Pajak/STNK kendaraan Dinas/Operasional Roda 2,4, dan 6 yang tepat Waktu	135 unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,95%	Rp. 35.043.800,00	Rp. 38.548.180,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti Pembayaran Honorarium Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat	45 orang	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,98%	Rp. 134.079.110,00	Rp. 147.487.021,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	14,37%	Rp. 486.621.850,00	Rp. 515.284.035,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	70 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,01%	Rp. 177.813.598,00	Rp. 195.594.957,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.011	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berapa Cetakan Berpengandaan Dokumen	52 jenis 494-492 lembar 130 buku	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,95%	Rp. 157.076.150,00	Rp. 172.783.765,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	34 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,37%	Rp. 46.783.935,00	Rp. 51.148.329,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.014	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perabotan Rumah Tangga	46 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,07%	Rp. 44.806.960,00	Rp. 49.287.656,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perabotan Perundang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat Kabar Majalah Buku Penggandaan Umum	6 jenis 2 jenis 6 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,39%	Rp. 47.454.000,00	Rp. 52.199.400,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.017	Penyediaan Mekanis Dan Huwanti	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Mekanis dan Huwanti Rapat Rapat/ Koordinasi Dinas	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,65%	Rp. 58.608.000,00	Rp. 64.468.800,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait di Dalam dan di Luar Daerah	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	18,15%	Rp. 558.074.000,00	Rp. 613.881.400,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Gedung/Tempat Kerja)	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Musyawarah PTT Sebagai Peluang Keamanan Kantor (8 orang)	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,07%	Rp. 218.078.585,00	Rp. 239.886.445,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya administrasi perantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Retribusi Sampah	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,08%	Rp. 1.980.000,00	Rp. 2.178.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.002	PELAYANAN PERINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembangunan Gedung Kantor	2 unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) tempoh	2,86%	Rp. 254.100.000,00	Rp. 254.100.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.003	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terselenggaranya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	14 jenis	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perengkapan gedung)	2,69%	Rp. 335.889.320,00	Rp. 353.098.328,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Soding Berjalan
2.02	2.02.01.00.01.007														

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Indikator Kinerja										Keterangan				
	Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Haal Program		Keluaran Kegiatan		Haal Kegiatan		Pagu Indikatif	Jenis Kegiatan		
						Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.02.009		Pengalihan Peralihan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Mengalihkan sarana prasarana kesehatan tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengalihan Peralihan Kantor	8 jenis	kantor terpuah	2,52%	Rp. 315.710.190,00	Rp. 332.182.026,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.02.022		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Mengalihkan sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 unit	Kebudayaan pemeliharaan sarana prasarana aparatur terpuah	7,69%	Rp. 590.460.500,00	Rp. 1.090.651.045,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.02.024		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Mengalihkan sarana prasarana kesehatan tugas dan fungsi SKPD	100%	Service, Bala Beker Minyak/ Gas dan Pelumas Kendaran Dinas	122 unit	Kebudayaan Pemeliharaan Kendarana Aparatur Terpuah	4,66%	Rp. 900.312.000,00	Rp. 1.037.590.400,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.02.026		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Mengalihkan sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor	6 jenis	Kebudayaan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Terpuah	0,32%	Rp. 49.500.000,00	Rp. 54.450.000,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.02.028		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralihan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Mengalihkan sarana prasarana kesehatan tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin Peralihan Gedung Kantor	20 jenis	Kebudayaan Pemeliharaan Kendarana Aparatur Terpuah	0,95%	Rp. 121.110.000,00	Rp. 133.221.000,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.02.029		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebebur	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Mengalihkan sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Mebebur Kantor	9 jenis	Kebudayaan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Terpuah	0,09%	Rp. 17.537.500,00	Rp. 18.482.500,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.02.034		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengalihan Minyak Kayu Putih	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Mengalihkan sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengalihan Minyak Kayu Putih	2 unit	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pengalihan Minyak Kayu Putih Terpuah	2,87%	Rp. 321.300.995,00	Rp. 353.430.655,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.02.042		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Mengalihkan sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	4 unit	Kebudayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur Terpuah	7,72%	Rp. 420.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.02.050		Rehabilitasi Sedang/Berat Jaln Produksi	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Mengalihkan sarana prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Jaln Produksi Buan Kayu Putih	1.050 meter	Kebudayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur (Jalan Produksi) Terpuah	2,17%	Rp. 253.647.388,00	Rp. 366.681.133,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.02.094		Pemeliharaan Asep Dinas	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Mengalihkan sarana prasarana kesehatan tugas dan fungsi SKPD	100%	Equipose Data Asep Pemeliharaan Asep Dinas	44 orang 12 bulan	Kebudayaan Pemeliharaan Asep Dinas Terpuah	1,82%	Rp. 203.576.310,00	Rp. 233.956.031,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
<b>2.02.2.02.01.00.05</b>		<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>										<b>Rp. 49.126.000,00</b>	<b>Rp. 54.038.400,00</b>		
2.02.2.02.01.00.05.081		Pengalihan Kinerja Bagi Pegawai Karyawan dan Perkebunan	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Terduljadnya peningkatan kemampuan aparatur aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Penilaian Mutu Kerja Penetradangan Bidang Kepegawaian	44 orang 50 orang, 1 hari	Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Penilaian Mutu Kerja) Menenggat	100%	Rp. 49.126.000,00	Rp. 54.038.400,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
<b>2.02.2.02.01.00.06</b>		<b>PROGRAM Peningkatan Pengemangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Redundan</b>										<b>Rp. 411.214.635,00</b>	<b>Rp. 460.136.380,00</b>		
2.02.2.02.01.00.06.016		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Terduljadnya penata usaha laporan kinerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Mali Lali SKPD	A	Kelaksanaan Pelaksanaan Laporan Kinerja SKPD	2,24%	Rp. 9.350.000,00	Rp. 10.285.000,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.06.017		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Terduljadnya penata usaha laporan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Keserjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD	0%	Kelaksanaan Pelaksanaan Keuangan SKPD	6,36%	Rp. 26.597.450,00	Rp. 29.257.195,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.06.018		Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Terduljadnya penata usaha laporan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Dokumen Rencana RMA - DPA 2018, RKAP - DPPA 2017, BOPK, SPH, Statistik Kesehatan dan Perkebunan 2016	1 tahun	Kelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Perencanaan dan Statistik	80,18%	Rp. 315.027.185,00	Rp. 368.927.185,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
2.02.2.02.01.00.06.019		Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokresi	Daerah Menenggat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menenggat	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Terduljadnya penata usaha laporan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Kesesuaian antara Target Capaian Kinerja dengan Program Kegiatan	100%	Kelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan Laporan	11,23%	Rp. 60.240.000,00	Rp. 51.667.000,00	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	Soalng Berjalan
<b>2.02.2.02.01.00.15</b>		<b>PROGRAM OPTIMALISASI SUMBERDAYA HUMAN</b>										<b>Rp. 7.467.319.400,00</b>	<b>Rp. 8.612.294.800,00</b>		



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Kelestimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			1/2/3	1/2/3		
					Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)					Target (11)	
2.02.2.02.01.00.15.030	Perawatan dan Pengkayaan Sumberehya Hutan	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	D1.Yogyakarta Kulonego-Bantul	Presentase peningkatan produksi hasil hutan terhadap tahun dasar	7,22%	200 Ha	Pencapaian dan Perawatan Kawasan Hutan	2 dekumen	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan produksi hasil hutan pada tahun 2017	58,53%	Rp. 4.385.525.000,00	Rp. 5.324.850.600,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan
2.02.2.02.01.00.15.031	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	D1.Yogyakarta	Presentase peningkatan produksi hasil hutan terhadap tahun dasar	7,22%	200 Ha	Pembinaan dan Pemeliharaan Industri Hasil Hutan	20 pelaku industri	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan produksi hasil hutan pada tahun 2017	39,26%	Rp. 2.941.794.400,00	Rp. 3.112.444.200,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan
2.02.2.02.01.00.15.032	Penatausahaan dan Peremban Peredaran Hasil Hutan	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	D1.Yogyakarta	Presentase peningkatan produksi hasil hutan terhadap tahun dasar	7,22%	200 Ha	Pengembangan pemasaran hasil hutan	2 even	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan produksi hasil hutan pada tahun 2017	2,2%	Rp. 140.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan
2.02.2.02.01.00.16	<b>PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b> Rehabilitasi Hutan dan Restorasi Pengembangan Perikanan (Seri)	Ungkulan Hidup dan Pemertanaan Ruang	Kualitas Lingkungan Hidup meningkat	D1.Yogyakarta	Presentase penurunan luas lahan kritis terhadap tahun dasar	1,85%	5 Bdt	Optimisasi Pean Peningkatan Dalam Pengelolaan Hutan	5 Bdt	Dukungan terhadap pencapaian target pengurangan luas lahan kritis pada tahun 2017	100%	Rp. 433.739.250,00	Rp. 520.124.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan
2.02.2.02.01.00.17	<b>PROGRAM PELINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN</b> Perindungan Sumberehya Hutan	Ungkulan Hidup dan Pemertanaan Ruang	Kualitas Lingkungan Hidup meningkat	D1.Yogyakarta	Presentase kerusakan hutan	6,67%	12 bulan	Operasional Pemertanaan Hutan	12 bulan	Dukungan terhadap pencapaian target persentase kerusakan hutan pada tahun 2017	21,81%	Rp. 2.181.000.000,00	Rp. 2.445.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan
2.02.2.02.01.00.17.014	Konservasi Sumberehya Hutan	Ungkulan Hidup dan Pemertanaan Ruang	Kualitas Lingkungan Hidup meningkat	D1.Yogyakarta	Presentase kerusakan hutan	6,67%	12 bulan	Pengamanan Hutan	2 lokasi	Dukungan terhadap pencapaian target persentase kerusakan hutan pada tahun 2017	78,19%	Rp. 7.857.229.500,00	Rp. 8.240.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan
2.02.2.02.01.00.22	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN</b> Pengembangan Tanaman Tahunan Semusuh	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	D1.Yogyakarta	Pengiklitan pendapatan petani perkebunan	3%	5 kegalaban	Pembinaan dan pengembangan budidaya tanaman	2 komoditas	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan pendapatan petani perkebunan pada tahun 2017	6,39%	Rp. 3.390.551.930,00	Rp. 3.692.954.500,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan
2.02.2.02.01.00.22.001	Pengembangan Tanaman Tahunan Semusuh	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	D1.Yogyakarta	Pengiklitan pendapatan petani perkebunan	3%	5 kegalaban	Pembinaan dan pengembangan budidaya tanaman	2 komoditas	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan pendapatan petani perkebunan pada tahun 2017	46,10%	Rp. 2.120.000.000,00	Rp. 2.415.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan
2.02.2.02.01.00.22.002	Pengembangan Tanaman Tahunan Semusuh	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	D1.Yogyakarta	Pengiklitan pendapatan petani perkebunan	3%	5 kegalaban	Pembinaan dan pengembangan budidaya tanaman	2 komoditas	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan pendapatan petani perkebunan pada tahun 2017	7,74%	Rp. 257.000.000,00	Rp. 278.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan
2.02.2.02.01.00.22.003	Perindungan Tanaman dan Peremban Perkebunan	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	D1.Yogyakarta	Pengiklitan pendapatan petani perkebunan	3%	3 kegalaban	Restorasi pengembangan Perkebunan Varietas Unggul 1, 2 dan 3	2 komoditas	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan pendapatan petani perkebunan pada tahun 2017	46,10%	Rp. 1.529.703.380,00	Rp. 1.632.440.500,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan
2.02.2.02.01.00.22.004	Pembinaan Pengolahan Pasca Panen Industri Hasil Perkebunan	Perumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	D1.Yogyakarta	Pengiklitan pendapatan petani perkebunan	3%	3 kegalaban	Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu	3 komoditas	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan pendapatan petani perkebunan pada tahun 2017	20,29%	Rp. 673.368.650,00	Rp. 741.244.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Seling Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Kelistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan dan Perkebunan		Jumlah Pagu : Rp. 26.076.142.377,00													
Nomor	Uraian/Bidang Usaha, Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Tolok Ukur (6)	Target (7)	Tolok Ukur (8)	Target (9)	Tolok Ukur (10)	Target (11)			SKPD	Jenis Kegiatan	
2.02.2.02.01.00.22.005	Pembinaan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Hemisgat	D.I Yogyakarta		Peningkatan pendapatan petani perkebunan	3%	Promosi dan Informasi Produk Perkebunan	4 even						
2.02.2.02.01.00.22.006	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Hemisgat	D.I Yogyakarta		Peningkatan pendapatan petani perkebunan	3%	Pendampingan dan peningkatan kemampuan kapasitas tenaga petani perkebunan	5 komoditas	Dukungan terhadap petani perkebunan pada tahun 2017	Rp. 420.000.000,00	Rp. 485.650.000,00		Dinas Perkebunan dan Perkebunan	Scabing Bayelan
						Peningkatan pendapatan petani perkebunan		Fasilitas sarana prasarana perkebunan	3 komoditas	Dukungan terhadap pencapaian target pendapatan petani perkebunan pada tahun 2017	Rp. 298.480.000,00	Rp. 310.120.000,00		Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Scabing Bayelan
								Pengawasan, pendampingan dan pengawasan pendirian pupuk bersubsidi	4 Kabupaten						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perwisata	Nomor	Uraian/Kidag Urusan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indefiatif	Praktikan Maju	Keterangan				
						Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			SKPD	Jenis Kegiatan			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Tolok Ukur	TARGET	Tolok Ukur	(6)	TARGET	(11)	1/2/3	(14)	(15)	
2	2.04	Pilihan													
2.04	2.04.01.00.01.00.01	Dinas Perwisata													
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTARAN</b>															
2.04.2.04.01.00.01.00.01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Surat Masuk 2. Surat Keluar 3. Pengiriman Dokumen	1.5000 surat 2.7500 surat 3.29 surat	2%			Rp. 1.520.343.985,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.00.02	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pembayaran tagihan rekening telepon 2. Pembayaran tagihan rekening listrik 3. Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan	22%			Rp. 292.000,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.00.07	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Buket Pembayaran Honorarium Pengeloba Keuangan 2. Honorium Pengeloba Kesugawatan	1. 10 orang/bulan 2. 2 orang/bulan	3,1%			Rp. 38.566.000,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.00.08	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan gedung kantor	2.306 m2	5,8%			Rp. 91.688.375,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.01.00	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	62 Jenis	2,6%			Rp. 38.060.000,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.01.011	011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengiriman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Barang cetakan 2. Pengiriman	1. 9 unit/buku 2. 103.000 lembar	2%			Rp. 29.425.000,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.01.012	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26 jenis	1,4%			Rp. 22.009.000,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.01.014	014	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perbaikan rumah tangga	26 jenis	0,6%			Rp. 10.357.600,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.01.015	015	Penyediaan Bahan Baku Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Surat tabar 2. Majalah	1. 4 jenis 2. 1 jenis	0,4%			Rp. 5.742.000,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.01.017	017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Makan dan minum sedang	5111 orang	4,3%			Rp. 68.959.110,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.01.018	018	Rapat/Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah 2. Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	1. 12 bulan 2. 12 bulan	29,7%			Rp. 423.500.000,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.01.01.022	022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jasa keamanan kantor/tempat kerja	1 tahun	25,1%			Rp. 495.000.000,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.02	002	<b>PROGRAM PENGINGATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>											<b>Rp. 1.822.445.170,00</b>		
2.04.2.04.01.00.02.005	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Mengalutnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Testakananya pengadaan kendaraan operasional 2. Testakananya pengadaan kendaraan operasional	1. 2 unit kendaraan roda empat 2. 2 unit kendaraan roda dua	100%			Rp. 715.000.000,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.02.007	007	Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danarjan	Mengalutnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor	6 jenis	16,2%			Rp. 178.200.000,00	Dinas Perwisata	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 34.000.000.000,00			
	Nomor	Uraian (Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan)	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikator	Proknanan Maju	Jenis Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.2.04.01.00.02.009	Pengadaan Perabotan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Mengembangkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perbaikan gedung kantor	6 jenis	Kebudayaan sarana prasarana kantor terpenuhi	16,2%	Rp. 11.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.02.010	Pengadaan Meubelur	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Mengembangkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meubelur	3 jenis	Kebudayaan sarana prasarana aparatur (meubelur) terpenuhi	5,6%	Rp. 96.352.000,00	Rp. 105.987.200,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Mengembangkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab/pemeliharaan Gedung Kantor	2 jenis	Kebudayaan pemeliharaan prasarana aparatur (Gedung kantor) terpenuhi	17,3%	Rp. 3.300.000,00	Rp. 360.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Mengembangkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Reparasi/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional (roda 2 dan roda 4)	2 jenis Roda 2 ( 2 jenis Roda 4 ( 6 unit)	Kebudayaan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	11,1%	Rp. 2.052.500,00	Rp. 471.475.850,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengalangan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Mengembangkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengalangan gedung kantor terpelihara	6 jenis	Kebudayaan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	1,4%	Rp. 26.888.400,00	Rp. 29.377.240,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perabotan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Mengembangkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	perabotan gedung kantor terpelihara	7 jenis	Kebudayaan pemeliharaan prasarana aparatur (perabotan gedung kantor) terpenuhi	2,3%	Rp. 41.140.800,00	Rp. 48.554.880,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelur	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Mengembangkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan Meja Kantor	6 jenis	Kebudayaan pemeliharaan prasarana aparatur (meubelur) terpenuhi	0,9%	Rp. 16.500.000,00	Rp. 18.150.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.02.063	Pemeliharaan Taman	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Mengembangkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	2. Pemeliharaan Kursi Rapat & Kursi Kerja 3. Pemeliharaan Kursi Es III 4. Pemeliharaan Kursi Kerja 5. Pemeliharaan Almari Kayu 6. Pemeliharaan Meja Kursi Tamu/Sos	1 jenis	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan lingkungan kantor	0,3%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.05.001	<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b> Pendiklan Dan Pelatihan Formal	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya	10 orang	Kapasitas Sumber daya Aparatur bertambah/meningkat	25%	Rp. 55.000.000,00	Rp. 60.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.06	<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Penganggaran dan Keuangan</b> Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Terwujudnya rencana usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Nilai Luak SKPD	A > 75 sd 85	Kelengkapan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	5%	Rp. 8.800.000,00	Rp. 8.800.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Terwujudnya rencana usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keserjangan anggaran has dengan realisasi anggaran SKPD	7%	Kelengkapan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 17.996.000,00	Rp. 19.795.600,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Pengembangan Sistem Penganggaran dan Keuangan SKPD serta Pengumpulan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Terwujudnya rencana usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	SPK, Rencana, RKA, DPA, Data informasi Perencanaan	1 tahun	Kelengkapan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	27%	Rp. 15.637.800,00	Rp. 50.420.700,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.06.019	Monev dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat	Danurejan	Terwujudnya rencana usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Kelengkapan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 156.804.852,00	Rp. 172.517.494,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.00.15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA</b>										<b>Rp. 11.236.643.790,00</b>	<b>Rp. 12.360.308.168,00</b>		
2.04.2.04.01.00.15.001	Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	Karjagan Wisatawan Mancanegara Meningkat	Danurejan	Penentasan Kualitas Promosi Wisata	90%	1. Analisis Lama Regat Wisatawan 2. Bize Print Pemasaran 3. Travel Dialog (Kalbar, Jawa Barat, Sumatera Selatan) 4. Dokumen Statistik Kepariwisatahan DIY 5. Maintenance dan Up Date Data Spasial Potensi Pariwisata per Kecamatan Se DIY	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	Tersevidnya informasi hasil kajian yang dapat digunakan untuk pengembangan produk wisata DIY	100%	Rp. 1.770.000.000,00	Rp. 1.947.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata	Indikator Kinerja										Keterangan									
	Nomor	Uraian (Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan)	Prioritas Daerah	Saasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kuluran Kegiatan			Target	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatorif	Prokiraan Moju	Jumlah Pagu : Rp. 34.000.000.000,00		Jenis Kegiatan			
						Took Uluur	Target	Took Uluur	Target	Took Uluur					Target	SKPD		1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
2.04.2.04.01.00.15.005	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	Pertumbuhan Ekonomi	Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Mancanegara	Danurejan											Rp. 9.466.643.290,00	Rp. 10.413.308.169,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan		
							6. Analisis Beasng Wisatawan	1 kegiatan												
							7. Analisis Kepuasan Wisatawan terhadap pelayanan dan Fasilitas Umum di kawasan wisata DIY	1 kegiatan												
							8. Kajian Berkeadilan Promosi Pariwisata terhadap kunjungan wisatawan	1 kegiatan												
							9. Review Rikredusa DIY	1 kegiatan												
							10. Pengembangan Website Visting Jogja	1 kegiatan												
							11. Promosi Pariwisata Luar negeri di kawasan	1 kegiatan												
							12. Promosi Pariwisata Luar negeri di kawasan	1 kegiatan												
							13. Promosi Melalui Media	1 kegiatan												
							14. Jajaja Travel Meet	1 kegiatan												
							15. Promosi Pariwisata luar Negeri di Jepang	1 kegiatan												
							16. Promosi Pariwisata luar Negeri di China	1 kegiatan												
							17. Promosi Pariwisata di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Batam	1 kegiatan												
							18. Promosi Pariwisata di Malaysia dan Singapore	1 kegiatan												
							19. Jogja Forum MICE	1 kegiatan												
							20. Table Top di Balai Negeri (Balik Sibar, Bantul, Bantul, Yogyakarta, Medan)	1 kegiatan												
							21. Pengembangan Website Soremed	1 kegiatan												
							22. Optimalisasi TIC dan TIS	1 kegiatan												
							23. Pembuatan Bahan Promosi	1 kegiatan												
							24. Penyusunan Tabloid Pariwisata	1 kegiatan												
							25. Pelayanan Informasi Pariwisata	1 kegiatan												
							26. Gabaring dengan Paksi Pariwisata	1 kegiatan												
							27. Lunas BAYOF	1 kegiatan												
2.04.2.04.01.00.16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>														<b>Rp. 14.432.183.530,00</b>	<b>Rp. 15.875.401.883,00</b>				
2.04.2.04.01.00.16.002	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Mancanegara	Danurejan		80%									Rp. 5.300.000.000,00	Rp. 5.830.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan		
							1. Pengembangan Sarana Wisata di Jogoroco dan Watulumpang di kawasan wisata Gunung Sewu, Gunungkidul	1 kegiatan												
							2. Pengembangan Sarana Berkeliling Wisata Suraboi, Bantul (Lanjutan )	1 kegiatan												
							3. Fasilitas Sarana Berkeliling Wisata Alam Wababaweng, Dingo Bantul	1 kegiatan												
							4. Fasilitas Sarana Berkeliling Wisata Alam Lambah Pook, Dingo, Bantul	1 kegiatan												
							5. Pengembangan Day Trip Wisata Watulumpang, Semanggi, Gunung Kidul	1 kegiatan												
							6. Pengembangan Sarana Prasarana Berkeliling Wisata Gunung Kidul	1 kegiatan												
							7. Pengembangan Day Trip Wisata Watulumpang, Semin Gunung Kidul	1 kegiatan												
							8. Pembangunan parkir, pengaspalan terbuka dan toilet wisata ( 500 m2, 20 m2) di pantai Gya Cemara Bantul	1 kegiatan												
							9. Pembangunan kios kuliner, pengaspalan terbuka, jakar wisata dan gashob ( 200 m2, 500 m2, 1500 m2, 5 unit) di Banjiranyo	1 kegiatan												

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata	Nomor	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prokiraan Moju	Keterangan		
						Took Uluur	Targett	Took Uluur	Targett	Took Uluur	Targett			SKPD	Jenis Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.04.2.04.01.00.16.020		Penyelenggaraan Relasi Pariwisata	Perubahan Ekonomi	Lama Topografi Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat	Danarjatin	Penertases Kualitas Destinasi wisata (Tingkat Layanan Destinasi Wisata)	80%	1. Diungg Interaktif Luehan Haloboro	1 kegiatan	Peningkatan Jumlah Wisatawan	100%	Rp. 9.132.183.530,00	Rp. 10.045.401.882,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							10. Festival Paingat Tebing	1 kegiatan								
							11. Festival Wisata Budaya dan Drumband Pala Raja dan PA	2 kegiatan								
							12. Festival Wisata Budaya Desa atau Kampung Wisata seluruh DIY	1 kegiatan								
							13. Gathering Automotof	1 kegiatan								
							14. Gelar Seni Tradisi Kawasan Wisata	1 kegiatan								
							15. Indonesia Land Rover Drive	1 kegiatan								
							16. Jambore Automotof	1 kegiatan								
							17. Jawa Summer Camp	1 kegiatan								
							18. Jogja Air Show	1 kegiatan								
							19. Jogja Beach Run	1 kegiatan								
							20. Jogja Bike Rendezvous	1 kegiatan								
							21. Jogja Hard Enduro No Limit Motor Trail	1 kegiatan								
							22. Jogja Parade	1 kegiatan								
							23. Lomba Foto Pariwisata	1 kegiatan								
							24. Lomba Pecuan Kuda Pala Apijat PA Cup 1 kali	1 kegiatan								
							25. Lomba Pecuan Kuda Pala Raja HB Cup 1 kali	1 kegiatan								
							26. Lomba Seni Banguh Budaya Nasional Pala Raja HB dan Apijat PA Cup	2 kegiatan								
							27. Lomba Seni Banguh Perkerut Nasional Pala Raja HB dan Apijat PA Cup	2 kegiatan								
							28. Lomba Seni Sastra Bering Berikau Pala Raja HB dan Apijat PA Cup	2 kegiatan								
							29. Modifikasi Kotes Automotof	1 kegiatan								
							30. Nglanggeran Mountain Bike	1 kegiatan								
							31. Parade Musik Etik	1 kegiatan								
							32. Pawai Pembangunan	1 kegiatan								
							33. Pekan Budaya Tonggob	1 kegiatan								
							34. Pemas Kesenian di TTC Bandara Adisucipto dan TTC Haloboro	1 kegiatan								
							35. Pemas Seni Anggapa MRU di TTC Ball	1 kegiatan								
							36. Selendang Kabut Sura	1 kegiatan								
							4. Festival Batik dan Souvenir Khas Desa	1 kegiatan								
							5. Festival Keranjang	1 kegiatan								
							6. Festival layang-layang	1 kegiatan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata	Jumlah Pagu : Rp. 34.000.000.000,00																			
	Nomor	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikator	Prakiraan Maju	Keterangan									
Hasil Program						Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	SKPD			Jenis Kegiatan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Took Uluur	Target	Took Uluur	Target	Took Uluur	(14)	(15)								
2.04.2.04.01.00.17 2.04.2.04.01.00.17.019	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA</b>  Optimalisasi Kapasitas SWM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	Perumbuhan Ekonomi	Kunjungan Wisatawan Nusantra dan Wisatawan Mancanegara Meningkat	Daerah Istimewa Yogyakarta	(5)	Hasil Program	7. Festival Lintas Komunitas Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp. 5.505.000.000,00	Rp. 5.505.000.000,00							
						Took Uluur	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)						
						Target														
						Took Uluur														
						Target														
						Took Uluur														
						Target														
						Took Uluur														
						Target														
						Took Uluur														
						Target														
						Took Uluur														
						Target														
						Took Uluur														
						Target														
						Took Uluur														
						Target														
						Took Uluur														
						Target														
						Took Uluur														
						Target														
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				
Target																				
Took Uluur																				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 53.675.611.636,00			
	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokus	Hasil Program	Target	Tolok Ukur	Keluaran Kegiatan	Target	Tolok Ukur	Hasil Kegiatan	Target	Paga Indiatif	Praktekaan Maju
Nomor	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.05	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>													
2.05.2.05.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan													
2.05.2.05.01.00.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>													
2.05.2.05.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegiriman Dokumen Surat Keluar Surat Masuk Bilaya Pula Bilaya Pula	12 kali 6.707 buah 4.033 buah	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 3.900.110.000,00	Rp. 3.979.440.000,00	Sidang Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komutasi, Sinar Bata dan Listrik	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biaya Pula	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 1.407.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Dns/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biaya Internet, Pembayaran Tagihan air PDAM 1.500 m3	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 18.000.000,00	Rp. 0,00	Sidang Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biaya Internet, Pembayaran Tagihan Listrik, 4.350.000 WHH	12 bulan 12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 141.170.000,00	Rp. 41.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti Pembayaran Jasa pengelola keuangan/barang Kecelakaan gedung kantor dan telakan	12 bulan Roda 4 : 10 unit BPRP 13 ogbulan, PPP 13 ogbulan, Roda 3 : 6 unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 113.000.000,00	Rp. 115.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	3 Lokasi	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 510.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.011	Penyediaan Barang Coklat Dan Penggandaan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	a. barang cetakan, b.pengandaan, c. jilid,	Dinas 51 jenis, BPRP 50 jenis, PPP 31 Jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 97.000.000,00	Rp. 97.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	a. 13 jenis b. 126.000 lembar c. 233 buku	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 76.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan rumah tangga	Dinas 18 jenis, BPRP 8 jenis, PPP 20 jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 147.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Perubahan Perundang-undangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	a. surat labak, b. majalah, c. Buku Peraturan	Dinas 20 jenis, BPRP 18 jenis, PPP 5 Jenis	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 54.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Makan dan minum rapat	a. 12 bulan b. 12 bulan c. 1 paket	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 26.500.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	a. koordasi dan konsultasi dalam daerah, b. koordasi dan konsultasi luar daerah	9000 os	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 117.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.2.05.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja	1 tahun	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Rp. 828.000.000,00	Rp. 850.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu - Rp. 53.675.611.634,00			
	Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Pagu Indikatif	Prokiaman Meju	Keterangan
						Took Ukur	Target	Target	Took Ukur	Target	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.00.01.02.026		Kinerja aparatur dan birokrasi	Pemintah Daerah Mengingat	Dinas Kelautan dan Perikanan		100%	Kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	Rp. 1.440.000,00	Rp. 1.440.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan
2.05.2.05.01.00.02.003	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Pembangunan Gedung Kantor	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	BPTPB a. Pembangunan Gedung obot (20 m2),Laboratorium (40 m2), Bak Pengolahan Limbah (20 c. 1 paket t.1 paket g. 1 paket m1) c. Pembangunan kert	a. 1 paket b. 1 paket c. 1 paket d. 1 paket e. 1 paket f. 1 paket g. 1 paket h. 1 paket i. 1 paket j. 1 paket k. 1 paket l. 1 paket m. 1 paket n. 1 paket o. 1 paket p. 1 paket q. 1 paket r. 1 paket s. 1 paket t. 1 paket u. 1 paket v. 1 paket w. 1 paket x. 1 paket y. 1 paket z. 1 paket aa. 1 paket ab. 1 paket ac. 1 paket ad. 1 paket ae. 1 paket af. 1 paket ag. 1 paket ah. 1 paket ai. 1 paket aj. 1 paket ak. 1 paket al. 1 paket am. 1 paket an. 1 paket ao. 1 paket ap. 1 paket aq. 1 paket ar. 1 paket as. 1 paket at. 1 paket au. 1 paket av. 1 paket aw. 1 paket ax. 1 paket ay. 1 paket az. 1 paket ba. 1 paket bb. 1 paket bc. 1 paket bd. 1 paket be. 1 paket bf. 1 paket bg. 1 paket bh. 1 paket bi. 1 paket bj. 1 paket bk. 1 paket bl. 1 paket bm. 1 paket bn. 1 paket bo. 1 paket bp. 1 paket bq. 1 paket br. 1 paket bs. 1 paket bt. 1 paket bu. 1 paket bv. 1 paket bw. 1 paket bx. 1 paket by. 1 paket bz. 1 paket ca. 1 paket cb. 1 paket cc. 1 paket cd. 1 paket ce. 1 paket cf. 1 paket cg. 1 paket ch. 1 paket ci. 1 paket cj. 1 paket ck. 1 paket cl. 1 paket cm. 1 paket cn. 1 paket co. 1 paket cp. 1 paket cq. 1 paket cr. 1 paket cs. 1 paket ct. 1 paket cu. 1 paket cv. 1 paket cw. 1 paket cx. 1 paket cy. 1 paket cz. 1 paket da. 1 paket db. 1 paket dc. 1 paket dd. 1 paket de. 1 paket df. 1 paket dg. 1 paket dh. 1 paket di. 1 paket dj. 1 paket dk. 1 paket dl. 1 paket dm. 1 paket dn. 1 paket do. 1 paket dp. 1 paket dq. 1 paket dr. 1 paket ds. 1 paket dt. 1 paket du. 1 paket dv. 1 paket dw. 1 paket dx. 1 paket dy. 1 paket dz. 1 paket ea. 1 paket eb. 1 paket ec. 1 paket ed. 1 paket ee. 1 paket ef. 1 paket eg. 1 paket eh. 1 paket ei. 1 paket ej. 1 paket ek. 1 paket el. 1 paket em. 1 paket en. 1 paket eo. 1 paket ep. 1 paket eq. 1 paket er. 1 paket es. 1 paket et. 1 paket eu. 1 paket ev. 1 paket ew. 1 paket ex. 1 paket ey. 1 paket ez. 1 paket fa. 1 paket fb. 1 paket fc. 1 paket fd. 1 paket fe. 1 paket ff. 1 paket fg. 1 paket fh. 1 paket fi. 1 paket fj. 1 paket fk. 1 paket fl. 1 paket fm. 1 paket fn. 1 paket fo. 1 paket fp. 1 paket fq. 1 paket fr. 1 paket fs. 1 paket ft. 1 paket fu. 1 paket fv. 1 paket fw. 1 paket fx. 1 paket fy. 1 paket fz. 1 paket ga. 1 paket gb. 1 paket gc. 1 paket gd. 1 paket ge. 1 paket gf. 1 paket gh. 1 paket gi. 1 paket gj. 1 paket gk. 1 paket gl. 1 paket gm. 1 paket gn. 1 paket go. 1 paket gp. 1 paket gq. 1 paket gr. 1 paket gs. 1 paket gt. 1 paket gu. 1 paket gv. 1 paket gw. 1 paket gx. 1 paket gy. 1 paket gz. 1 paket ha. 1 paket hb. 1 paket hc. 1 paket hd. 1 paket he. 1 paket hf. 1 paket hg. 1 paket hi. 1 paket hj. 1 paket hk. 1 paket hl. 1 paket hm. 1 paket hn. 1 paket ho. 1 paket hp. 1 paket hq. 1 paket hr. 1 paket hs. 1 paket ht. 1 paket hu. 1 paket hv. 1 paket hw. 1 paket hx. 1 paket hy. 1 paket hz. 1 paket ia. 1 paket ib. 1 paket ic. 1 paket id. 1 paket ie. 1 paket if. 1 paket ig. 1 paket ih. 1 paket ii. 1 paket ij. 1 paket ik. 1 paket il. 1 paket im. 1 paket in. 1 paket io. 1 paket ip. 1 paket iq. 1 paket ir. 1 paket is. 1 paket it. 1 paket iu. 1 paket iv. 1 paket iw. 1 paket ix. 1 paket iy. 1 paket iz. 1 paket ja. 1 paket jb. 1 paket jc. 1 paket jd. 1 paket je. 1 paket jf. 1 paket jg. 1 paket jh. 1 paket ji. 1 paket jj. 1 paket jk. 1 paket jl. 1 paket jm. 1 paket jn. 1 paket jo. 1 paket jp. 1 paket jq. 1 paket jr. 1 paket js. 1 paket jt. 1 paket ju. 1 paket jv. 1 paket jw. 1 paket jx. 1 paket jy. 1 paket jz. 1 paket ka. 1 paket kb. 1 paket kc. 1 paket kd. 1 paket ke. 1 paket kf. 1 paket kg. 1 paket kh. 1 paket ki. 1 paket kj. 1 paket kl. 1 paket km. 1 paket kn. 1 paket ko. 1 paket kp. 1 paket kq. 1 paket kr. 1 paket ks. 1 paket kt. 1 paket ku. 1 paket kv. 1 paket kw. 1 paket kx. 1 paket ky. 1 paket kz. 1 paket la. 1 paket lb. 1 paket lc. 1 paket ld. 1 paket le. 1 paket lf. 1 paket lg. 1 paket lh. 1 paket li. 1 paket lj. 1 paket lk. 1 paket ll. 1 paket lm. 1 paket ln. 1 paket lo. 1 paket lp. 1 paket lq. 1 paket lr. 1 paket ls. 1 paket lt. 1 paket lu. 1 paket lv. 1 paket lw. 1 paket lx. 1 paket ly. 1 paket lz. 1 paket ma. 1 paket mb. 1 paket mc. 1 paket md. 1 paket me. 1 paket mf. 1 paket mg. 1 paket mh. 1 paket mi. 1 paket mj. 1 paket mk. 1 paket ml. 1 paket mn. 1 paket mo. 1 paket mp. 1 paket mq. 1 paket mr. 1 paket ms. 1 paket mt. 1 paket mu. 1 paket mv. 1 paket mw. 1 paket mx. 1 paket my. 1 paket mz. 1 paket na. 1 paket nb. 1 paket nc. 1 paket nd. 1 paket ne. 1 paket nf. 1 paket ng. 1 paket nh. 1 paket ni. 1 paket nj. 1 paket nk. 1 paket nl. 1 paket nm. 1 paket no. 1 paket np. 1 paket nq. 1 paket nr. 1 paket ns. 1 paket nt. 1 paket nu. 1 paket nv. 1 paket nw. 1 paket nx. 1 paket ny. 1 paket nz. 1 paket oa. 1 paket ob. 1 paket oc. 1 paket od. 1 paket oe. 1 paket of. 1 paket og. 1 paket oh. 1 paket oi. 1 paket oj. 1 paket ok. 1 paket ol. 1 paket om. 1 paket on. 1 paket oo. 1 paket op. 1 paket oq. 1 paket or. 1 paket os. 1 paket ot. 1 paket ou. 1 paket ov. 1 paket ow. 1 paket ox. 1 paket oy. 1 paket oz. 1 paket pa. 1 paket pb. 1 paket pc. 1 paket pd. 1 paket pe. 1 paket pf. 1 paket pg. 1 paket ph. 1 paket pi. 1 paket pj. 1 paket pk. 1 paket pl. 1 paket pm. 1 paket pn. 1 paket po. 1 paket pp. 1 paket pq. 1 paket pr. 1 paket ps. 1 paket pt. 1 paket pu. 1 paket pv. 1 paket pw. 1 paket px. 1 paket py. 1 paket pz. 1 paket qa. 1 paket qb. 1 paket qc. 1 paket qd. 1 paket qe. 1 paket qf. 1 paket qg. 1 paket qh. 1 paket qi. 1 paket qj. 1 paket qk. 1 paket ql. 1 paket qm. 1 paket qn. 1 paket qo. 1 paket qp. 1 paket qq. 1 paket qr. 1 paket qs. 1 paket qt. 1 paket qu. 1 paket qv. 1 paket qw. 1 paket qx. 1 paket qy. 1 paket qz. 1 paket ra. 1 paket rb. 1 paket rc. 1 paket rd. 1 paket re. 1 paket rf. 1 paket rg. 1 paket rh. 1 paket ri. 1 paket rj. 1 paket rk. 1 paket rl. 1 paket rm. 1 paket rn. 1 paket ro. 1 paket rp. 1 paket rq. 1 paket rr. 1 paket rs. 1 paket rt. 1 paket ru. 1 paket rv. 1 paket rw. 1 paket rx. 1 paket ry. 1 paket rz. 1 paket sa. 1 paket sb. 1 paket sc. 1 paket sd. 1 paket se. 1 paket sf. 1 paket sg. 1 paket sh. 1 paket si. 1 paket sj. 1 paket sk. 1 paket sl. 1 paket sm. 1 paket sn. 1 paket so. 1 paket sp. 1 paket sq. 1 paket sr. 1 paket ss. 1 paket st. 1 paket su. 1 paket sv. 1 paket sw. 1 paket sx. 1 paket sy. 1 paket sz. 1 paket ta. 1 paket tb. 1 paket tc. 1 paket td. 1 paket te. 1 paket tf. 1 paket tg. 1 paket th. 1 paket ti. 1 paket tj. 1 paket tk. 1 paket tl. 1 paket tm. 1 paket tn. 1 paket to. 1 paket tp. 1 paket tq. 1 paket tr. 1 paket ts. 1 paket tt. 1 paket tu. 1 paket tv. 1 paket tw. 1 paket tx. 1 paket ty. 1 paket tz. 1 paket ua. 1 paket ub. 1 paket uc. 1 paket ud. 1 paket ue. 1 paket uf. 1 paket ug. 1 paket uh. 1 paket ui. 1 paket uj. 1 paket uk. 1 paket ul. 1 paket um. 1 paket un. 1 paket uo. 1 paket up. 1 paket uq. 1 paket ur. 1 paket us. 1 paket ut. 1 paket uu. 1 paket uv. 1 paket uw. 1 paket ux. 1 paket uy. 1 paket uz. 1 paket va. 1 paket vb. 1 paket vc. 1 paket vd. 1 paket ve. 1 paket vf. 1 paket vg. 1 paket vh. 1 paket vi. 1 paket vj. 1 paket vk. 1 paket vl. 1 paket vm. 1 paket vn. 1 paket vo. 1 paket vp. 1 paket vq. 1 paket vr. 1 paket vs. 1 paket vt. 1 paket vu. 1 paket vv. 1 paket vw. 1 paket vx. 1 paket vy. 1 paket vz. 1 paket wa. 1 paket wb. 1 paket wc. 1 paket wd. 1 paket we. 1 paket wf. 1 paket wg. 1 paket wh. 1 paket wi. 1 paket wj. 1 paket wk. 1 paket wl. 1 paket wm. 1 paket wn. 1 paket wo. 1 paket wp. 1 paket wq. 1 paket wr. 1 paket ws. 1 paket wt. 1 paket wu. 1 paket wv. 1 paket ww. 1 paket wx. 1 paket wy. 1 paket wz. 1 paket xa. 1 paket xb. 1 paket xc. 1 paket xd. 1 paket xe. 1 paket xf. 1 paket xg. 1 paket xh. 1 paket xi. 1 paket xj. 1 paket xk. 1 paket xl. 1 paket xm. 1 paket xn. 1 paket xo. 1 paket xp. 1 paket xq. 1 paket xr. 1 paket xs. 1 paket xt. 1 paket xu. 1 paket xv. 1 paket xw. 1 paket xy. 1 paket xz. 1 paket ya. 1 paket yb. 1 paket yc. 1 paket yd. 1 paket ye. 1 paket yf. 1 paket yg. 1 paket yh. 1 paket yi. 1 paket yj. 1 paket yk. 1 paket yl. 1 paket ym. 1 paket yn. 1 paket yo. 1 paket yp. 1 paket yq. 1 paket yr. 1 paket ys. 1 paket yt. 1 paket yu. 1 paket yv. 1 paket yw. 1 paket yx. 1 paket yy. 1 paket yz. 1 paket za. 1 paket zb. 1 paket zc. 1 paket zd. 1 paket ze. 1 paket zf. 1 paket zg. 1 paket zh. 1 paket zi. 1 paket zj. 1 paket zk. 1 paket zl. 1 paket zm. 1 paket zn. 1 paket zo. 1 paket zp. 1 paket zq. 1 paket zr. 1 paket zs. 1 paket zt. 1 paket zu. 1 paket zv. 1 paket zw. 1 paket zx. 1 paket zy. 1 paket zz. 1 paket	Rp. 4.215.000.000,00	Rp. 4.215.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan		
2.05.2.05.01.00.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	a. Kendaraan Roda 4, a. Kendaraan roda 3 b. Kendaraan roda 2	a. 2 unit b. 1 unit c. 10 unit	Kebutuhan sarana prasana aparatur (kendaraan operasional)	100%	Rp. 1.109.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan
2.05.2.05.01.00.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	Perengkapan Gedung Kantor	Dinas 4 jenis, BPTPB 6 jenis, PPP 5 jenis	Kebutuhan sarana prasana aparatur (Gedung/gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 736.700.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan
2.05.2.05.01.00.02.009	Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	Peralatan Gedung Kantor	Dinas 3 jenis, BPTPB 6 jenis, PPP 12 jenis	Kebutuhan sarana prasana aparatur (Gedung/gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 643.200.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan
2.05.2.05.01.00.02.010	Pengadaan Meubeler	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	Meubeler	Dinas 8 jenis, BPTPB 14 jenis, PPP 0 jenis	Kebutuhan sarana prasana aparatur (Meubeler) terpenuhi	100%	Rp. 1.244.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan
2.05.2.05.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	Gedung kantor terpelihara	3 bleksi	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasana aparatur (Gedung/gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 329.750.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan
2.05.2.05.01.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	a.Kendaraan roda 4 b.Kendaraan roda 2 c.Kendaraan roda 3 c.Kapal pengawasan	a. 1 thn b. 1 thn c. 1 unit	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasana aparatur (kendaraan operasional) terpenuhi	100%	Rp. 635.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan
2.05.2.05.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	Perengkapan Gedung kantor terpelihara	Dinas 3 jenis, BPTPB 7 jenis, PPP 2 jenis	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasana aparatur ( perengkapan gedung/gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 47.800.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan
2.05.2.05.01.00.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	Peralatan gedung kantor (komputer, laptop, printer) terpelihara	Dinas 7 jenis, BPTPB 3 jenis, PPP 6 jenis	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasana aparatur (perengkapan gedung/gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 39.320.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan
2.05.2.05.01.00.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	Meubeler gedung kantor terpelihara	Dinas 4 jenis, BPTPB 3 jenis, PPP 3 jenis	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasana aparatur (meubeler) terpenuhi	100%	Rp. 23.300.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan
2.05.2.05.01.00.02.042	Rehabilitasi Sidang/Besang Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumabillas Knerja Pemintah Daerah Mengingat	Program 01-06		100%	a. Bangunan mesor pagawa b. Tuman	a. 2 gedung b. 1 paket	Kebutuhan rehabilitasi sarana prasana aparatur (gedung/gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 3.754.350.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan	Isu/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indiatif			Keterangan				
						Hasil Program		Kuluran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Prakiraman Meju	Jumlah Pagu : Rp. 53.675.611.634,00		
						Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur	Target				1/2/3	(15)
2.05.2.05.01.00.06		(2) <b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.05.2.05.01.00.06.016		Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumababilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Tewujudnya peranta usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Dokumen LKIP 2. Dokumen RK 3. Dokumen RKT dokumen 3). 1 dokumen	100%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu	Rp. 481.500.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.05.2.05.01.00.06.017		Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumababilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Tewujudnya peranta usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keserjanaan Anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu	Rp. 31.500.000,00	Rp. 32.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
2.05.2.05.01.00.06.018		Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumababilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Tewujudnya peranta usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Pencahayaan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan 2). Dokumen RKA dokumen 3). 1 dokumen 4. Dokumen DPA 5. Dokumen DPPA 6. Buku data pokok perikanan dan kelautan 7. Buku analisis data produk perikanan dan kelautan	100%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan SKPD	Rp. 400.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
2.05.2.05.01.00.06.019		Kinerja aparatur dan birokrasi	Alumababilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Tewujudnya peranta usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Laporan Monev Bulanan b. Laporan Monev Triwulan c. Laporan Monev Semesteran d. Laporan Monev Tahunan e. FGD Monev	100%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu	Rp. 45.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
2.05.2.05.01.00.17		<b>PROGRAM Peningkatan Pengawasan Hukum Dalam Penyelenggaraan Sumbervajala Laut</b>										<b>Rp. 738.970.000,00</b>	<b>Rp. 7.10.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.00.17.002		Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan bud daya	3000dokumen	Intermediasi perijinan usaha kelautan dan perikanan	300 org	Dukungan terhadap jumlah dokumen perijinan usaha kelautan dan perikanan	Rp. 110.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
2.05.2.05.01.00.17.008		Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan bud daya	3000dokumen	Sosialisasi perijinan usaha kelautan dan perikanan	300 org	Dukungan terhadap jumlah dokumen perijinan usaha kelautan dan perikanan	Rp. 198.495.000,00	Rp. 230.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
2.05.2.05.01.00.17.011		Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan bud daya	3000dokumen	Operasi terpadu pengawasan di laut	5 kali			Rp. 166.475.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.05.2.05.01.00.17.012		Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan bud daya	3000dokumen	Operasi terpadu pengawasan di laut	1 tahun			Rp. 270.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.05.2.05.01.00.18		<b>PROGRAM Peningkatan Laut dan Prakiraman Iklim</b>										<b>Rp. 450.000.000,00</b>	<b>Rp. 450.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.00.18.004		Liputan Hidro dan Pemantauan Ruang	Kualitas Lingkungan Hidup meningkat	Cala Gecoko Kretek Pajanan Saundakan Tanjungjari Temon Tepus		Urutah pelaksanaan perijinan usaha mitaas bencana alam laut dan prakiraman iklim laut	1000orang	Rehabilitasi Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraman Iklim	30 org x 6 ang x 2 hr	Dukungan terhadap peningkatan pemantauan mitaas bencana alam dan prakiraman iklim laut	Rp. 450.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/Ridang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indiatif			Prakiraan Meju	Keterangan			
					Hasil Program		Kuluran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Target	Target	Target
					Took Uluur	Target	Took Uluur	Target	Took Uluur	Target					
2.05.2.05.01.00.20	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>														
2.05.2.05.01.00.20.003	Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan	Rekumbahan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	88500ton	240 org	Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	Rp. 3.950.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan			
2.05.2.05.01.00.20.004	Pengetahuan Hama dan Penyakit Ikan	Rekumbahan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	88500ton	120 orang	Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	Rp. 1.720.000.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan			
2.05.2.05.01.00.20.015	Pembinaan Mutu, Benih Dan Induk Perikanan	Rekumbahan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	88500ton	120 orang	Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	Rp. 115.500.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan			
2.05.2.05.01.00.20.018	Pelayanan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Cangkungan	88500ton	3 laporan	Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	Rp. 126.000.000,00	Rp. 132.300.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan			
2.05.2.05.01.00.20.019	Peningkatan Induk, bibit unggul budidaya air tawar	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Cangkungan Karangreja Kecamatan Tembung Tesis	88500ton	250 sampel	Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	Rp. 2.275.000.000,00	Rp. 1.400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan			
2.05.2.05.01.00.20.024	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau dan Air Laut	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Sanden Temon Tesis	88500ton	13.000 ekor	Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 1.750.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan			
2.05.2.05.01.00.20.025	Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Cangkungan	88500ton	468 m2	Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap	100%	Rp. 4.794.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan			
<b>2.05.2.05.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>														
2.05.2.05.01.00.21.009	Pengembangan Perikanan Perikanan	Rekumbahan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Cangkungan Temon	8400ton	1 paket	Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap	100%	Rp. 9.196.113.636,00	Rp. 15.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan			
2.05.2.05.01.00.21.017	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap	Rekumbahan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	8400ton	30 orang x 2 hp x 7 hari	Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap	21,8%	Rp. 3.550.000.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Berjalan			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indiatif	Prokrama Meju	Keterangan
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)	Target (11)
2.05.2.05.01.00.21.018	Pengembangan usaha perikanan ikan dan budidaya ikan skala kecil	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	produksi perikanan tangkap	8400ton			Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap	3,99%
2.05.2.05.01.00.21.022	Peningkatan Pelayanan Pelabuhan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	produksi perikanan tangkap	8400ton			Dukung Terhadap Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	14,69%
2.05.2.05.01.00.21.024	Pembinaan dan Pengembangan Suplai Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Gilubo	produksi perikanan tangkap	8400ton			Dukung terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap	100%
<b>2.05.2.05.01.00.23</b>	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOMPOKAN &amp; PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>									
2.05.2.05.01.00.23.003	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gerakan)	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Volume produk olahan hasil Perikanan	78.00ton			Dukung terhadap peningkatan angka konsumsi ikan per kapita dan perikanan	18,76%
2.05.2.05.01.00.23.005	Pelatihan Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Volume produk olahan hasil Perikanan	78.00ton			Dukung terhadap peningkatan angka konsumsi ikan per kapita dan perikanan	25,64%
2.05.2.05.01.00.23.007	Pengawasan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Volume produk olahan hasil Perikanan	78.00ton			Dukung terhadap peningkatan angka ketersediaan hasil perikanan dan perikanan	21,36%
2.05.2.05.01.00.23.010	Promosi Perikanan Dan Restoran Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Volume produk olahan hasil Perikanan	78.00ton			Dukung terhadap peningkatan angka konsumsi ikan per kapita dan perikanan	15,78%

Jumlah Pagu : Rp. 53.675.611.634,00										
										Jenis Kegiatan
										SKPD
										1/2/3
										(14)
										(15)
										(13)
										Rp. 576.162.000,00
										Rp. 350.000.000,00
										Rp. 0,00
										Rp. 1.990.000.000,00
										Rp. 2.140.000.000,00
										Rp. 600.000.000,00
										Rp. 250.000.000,00
										Rp. 660.000.000,00
										Rp. 537.995.000,00
										Rp. 210.000.000,00
										Rp. 700.000.000,00
										Rp. 2.377.995.000,00

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu - Rp. 53.675.611.634,00		Keterangan				
	Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kuluran Kegiatan			Pagu Indefinitif	Prokaiman Meju		Jenis Kegiatan			
						Took Ukur	Target	Took Ukur	Target	Took Ukur					Target		
2.05.2.05.01.00.23.016	(2)	Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan	(3)	Meningkat	(5)	Perikanan	(6)	Target	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Volume produk ebban hasil Perikanan	781 ton	Promosi/publikasi	5 kali	Dukung terhadap peningkatan angka ketersediaan hasil kelautan dan perikanan	Rp. 370.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			
2.05.2.05.01.00.25.007	(2)	Peningkatan Stok Sumberdaya Perikanan	(3)	Meningkat	(5)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Lokasi yang ekosistemnya telah direhabilitasi/konservasi	Sokasi	a. Restocking sumberdaya kelautan b. Peredaran ikan di PUD c. Sosialisasi/pembekalan pelestarian ikan dan laut d. Sosialisasi Pengabdian 301	30 org x 3 kali dan 3 kelompok	Dukung terhadap peningkatan naseo kawasan lindung perikanan total luas perlatan total	Rp. 226.896.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			
2.05.2.05.01.00.25.010	(2)	Pembinaan Pemanfaatan Ruang Pesisir	(3)	Meningkat	(5)	Galar Kretek	Lokasi yang ekosistemnya telah direhabilitasi/konservasi	Sokasi	Pembinaan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir	50 org x 4 kali	Dukung terhadap peningkatan naseo kawasan lindung perikanan total luas perlatan total	Rp. 350.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			
2.05.2.05.01.00.25.011	(2)	Penyediaan sarana prasarana kawasan konservasi perikanan dan perikanan (DOK)	(3)	Meningkat	(5)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Lokasi yang ekosistemnya telah direhabilitasi/konservasi	Sokasi	Rehabilitasi Sumberdaya Kawasan Pesisir	30 org x 3 kali dan 3 kelompok	Dukung terhadap peningkatan naseo kawasan lindung perikanan total luas perlatan total	Rp. 885.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			
2.05.2.05.01.00.25.013	(2)	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	(3)	Meningkat	(5)	Kretek Sanden	Lokasi yang ekosistemnya telah direhabilitasi/konservasi	Sokasi	Rehabilitasi Sumberdaya Kawasan Pesisir	30 org x 3 kali dan 3 kelompok	Dukung terhadap peningkatan naseo kawasan lindung perikanan total luas perlatan total	Rp. 115.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			
2.05.2.05.01.00.26.009	(2)	Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	(3)	Meningkat	(5)	Gresobo Sanden Wates	Persentase kualitas SDM Perikanan dan Kelautan	12%	Fasilitas Jalanan Usaha	30 org x 3 kab	Dukung terhadap peningkatan NTP sektor perikanan	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			
2.05.2.05.01.00.26.010	(2)	Pengembangan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan	(3)	Meningkat	(5)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kualitas SDM Perikanan dan Kelautan	12%	Fasilitas Logistik Kelompok Nelayan	30 org x 1 hr x 3 kab	Optimalisasi Koperasi Nelayan	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			
												<b>Rp. 1.032.250.000,00</b>	<b>Rp. 636.000.000,00</b>				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan										Jumlah Pagu : Rp. 53.675.611.634,00				
Nomor	Uraian/Ringkasan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prokraman Maju	Keterangan				
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			SKPD	Jenis Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Took Ukur (6)	Target (7)	Took Ukur (8)	Target (9)	Took Ukur (10)	Target (11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.00.26.014	Pengembangan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkat	Perikanan	Persentase Kualitas SDM Perikanan dan Kelautan	12,2%	Penguatan sistem Kelembagaan Pembenh Ikan	30 org x 3 hari x 2 angketan	Dukungan terhadap peningkatan NTP sektor perikanan	100%	Rp. 210.000.000,00	Rp. 126.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Borjolan
2.05.2.05.01.00.26.015	Pengembangan Nilai Kemitrahan	Pertumbuhan Ekonomi	Prediktian Masyarakat Meningkat	Dekat Kelautan dan Perikanan	Persentase Kualitas SDM Perikanan dan Kelautan	12,2%	Penelitian kewirausahaan penyuluh	30 org x 6 hari x 1 angketan	Dukungan terhadap peningkatan NTP sektor perikanan	100%	Rp. 272.250.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sidang Borjolan
							Terselenggaranya saran podasan melalui radio	12 kali						
							Sembar kemitrahan bag stakeholder	60 orang	Dukungan terhadap peningkatan NTP sektor perikanan					
							Menanamkan Jwa Cinta Bahan Melaku Kegiatan Bersih Pantai	1000 org						
							Sarasehan tentang kemitrahan bag peduku usaha	30 org						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja										Keterangan			
	Uraian/Rincian Uraian dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program			Kelembagaan Kegiatan			Target	Pagu Indikatif	Praktekan Maju	Jumlah Pagu : Rp. 46.846.377.500,00
					Took Ukur	Target	Target	Took Ukur	Target	Target				
Nomor		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.06	PERDAGANGAN													
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
2.06.2.06.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN													
2.06.2.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengiriman dokumen	30 dokumen	Kelancaran pelayanan Administrasi Perantara	0,25%	Rp. 2.236.326.830,00	Rp. 2.462.152.913,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Surat keluar Surat masuk Pembayaran tagihan rekening listrik	6450 surat 5400 surat 12 bulan	Kelancaran pelayanan Administrasi Perantara	30%	Rp. 5.825.000,00	Rp. 6.407.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan	Kelancaran pelayanan Administrasi Perantara	0,57%	Rp. 12.750.000,00	Rp. 673.992.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bukti pemb. Honorarium pengada barang Bukti pemb. Honorarium pengelola kepegawaian	3 org 12 bin 2 org 12 bin	Kelancaran pelayanan Administrasi Perantara	3,62%	Rp. 81.000.000,00	Rp. 89.100.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan gedung kantor BPTTG ; Kebersihan gedung kantor Indak ;	79,044 m2 13523 m²	Kenyamanan Pelayanan Administrasi perantara	11,93%	Rp. 267.134.400,00	Rp. 293.817.840,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	65 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perantara	3,94%	Rp. 88.594.700,00	Rp. 97.014.170,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Barang cetakan	17 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perantara	3,65%	Rp. 691.500,00	Rp. 89.860.650,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengandaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	185.000 lembar 23 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perantara	1,14%	Rp. 25.410.000,00	Rp. 27.951.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.01.013	Penyediaan Pelembaban Dan Pendinginan Kantor	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan hiburj pemadam kebakaran	15 tabung	Kelancaran pelayanan administrasi perantara	0,24%	Rp. 5.357.000,00	Rp. 5.892.700,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan kebersihan dan pemernah	21 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perantara	0,86%	Rp. 17.925.000,00	Rp. 19.717.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Baku Dan Peralatan Pendukung	Knerja aparatur dan brokasi	Akurabilitas Pemernah Daerah Heninglat	Program 01-06	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	- Buku kepastakaan	2 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perantara	0,83%	Rp. 18.618.000,00	Rp. 20.479.800,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja										Jumlah Pagu : Rp. 46.846.377.500,00				
	Nomor	Uraian Rincian Ususan Peningkatan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Misi Program			Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif	Prakiraan Meja	Mekaranagan	
						Tokoh Ukur	TARGET	Tokoh Ukur	TARGET	Tokoh Ukur	TARGET			1/2/3	1/2/3
2.06.2.06.01.00.01.017		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	- Surat labar Makanan dan minuman sidang	2 Jenis 8000 OS	4,58%	Rp. 102.600.000,00	Rp. 112.860.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.01.018		Bapak-Sapak Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	- Perj dinas luar daerah	12 bl	25,02%	Rp. 560.000.000,00	Rp. 616.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.01.022		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	- Perj dinas dalam daerah Bukti pembayaran jasa keamanan	12 bl 12 bulan	15,90%	Rp. 355.819.230,00	Rp. 391.401.153,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.01.026		Penyediaan Retribusi Sampah	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan	0,15%	Rp. 3.276.000,00	Rp. 3.603.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.02		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>								<b>Rp. 2.665.111.600,00</b>	<b>Rp. 2.922.822.760,00</b>				
2.06.2.06.01.00.02.003		Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	- Koneksi BPTTG	1 Unit	13%	Rp. 335.000.000,00	Rp. 368.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.02.005		Pengadaan Kondans Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	- Koneksi CPSM - Penu pager - Taman - Tempat parkir - Pos satpam	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 9 m <sup>2</sup>							
2.06.2.06.01.00.02.007		Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	- Kondans dinas rods 4	4 unit	29%	Rp. 800.000.000,00	Rp. 880.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.02.009		Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	- Kondans dinas rods 2	5 unit	5%	Rp. 129.311.600,00	Rp. 142.242.760,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.02.010		Pengadaan Meubeler	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Meubelir	4 Jenis	10%	Rp. 254.500.000,00	Rp. 279.950.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.02.022		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Gedung kantor terpelihara	12 jenis	17%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.02.024		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kondans Dinas/Operasional	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	2 jenis	10%	Rp. 275.100.000,00	Rp. 302.610.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.02.026		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	10 jenis	3%	Rp. 88.900.000,00	Rp. 97.790.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		
2.06.2.06.01.00.02.028		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	11 jenis	3%	Rp. 89.300.000,00	Rp. 96.230.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Berjalan		



**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Rincian Ususan Peningkatan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jumlah Pagu : Rp. 46.845.377.500,00			
					Hasil Program		Kuluan Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target	1/2/3	1/2/3	1/2/3
					Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target							
2.06.2.06.01.00.02.033	Pemeliharaan Rutin/Berkala Anasp Aktif Dan Anasp In-Aktif/SABS	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	440 HOK	1. Honor asiparis	2%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bejalan		
2.06.2.06.01.00.05.001	PROGRAN PENGINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	5 Org	Diklat	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bejalan		
2.06.2.06.01.00.06.001	PROGRAN PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEMERJAAN DAN KEUANGAN	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terwujudnya penastapan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1 Tahun	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3%	Rp. 11.000.000,00	Rp. 12.100.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bejalan		
2.06.2.06.01.00.06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan AP/1 Tahun	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terwujudnya penastapan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1 Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	6%	Rp. 26.000.000,00	Rp. 28.600.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bejalan		
2.06.2.06.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembaganan Data dan Informasi	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terwujudnya penastapan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1 Tahun	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD dan Pengembaganan Data dan Informasi	74%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bejalan		
2.06.2.06.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kinerja aparatur dan brokasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terwujudnya penastapan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1 Tahun	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	16%	Rp. 66.000.000,00	Rp. 72.600.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bejalan		
2.06.2.06.01.00.17	PROGRAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Perubahan Ekonomi	Perdagangan Masyarakat	DIY	Jumlah volume ekspor non migas DIY	70.860,4 tkg	Ancasila Kinerja Ekspor 1	Terwujudnya dukungan terhadap Peningkatan Jumlah volume ekspor non migas DIY dari 67,14 Juta Mengingatnya Volume Ekspor Non Migas DIY menjadi 73.857,19 Juta Kg tahun 2017	100%	Rp. 7.150.000.000,00	Rp. 7.865.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bejalan		
2.06.2.06.01.00.17.038	Kegiatan dan Pemasaran Produk Ekspor														

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Rencana Usulan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prokiraan Meja	Jumlah Pagu : Rp. 46.845.377.500,00				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tenis Kegiatan			
					Took Ukur	Target	Took Ukur	Target					Took Ukur	Target	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>2.06.2.06.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DALAM NEGERI</b>											<b>Rp. 17.367.515.070,00</b>	<b>Rp. 20.946.000.000,00</b>		
2.06.2.06.01.00.18.053	Rehabilitasi dan Perbaikan Perumahan Perumahan Dalam Negeri	Rehabilitasi dan Perbaikan Perumahan	Rehabilitasi dan Perbaikan Perumahan	DIY	Jumlah STUP	41230.38buah		Subangsan Dikembangkan 12 bulan	Terwujudnya 4.000 rumah sebesar 88% terhadap target Perumahan Jumlah STUP pada tahun 2017 (dari 46.092 STUP menjadi 49.005 STUP)	Dukung, melalui pencapaian target RPMD atau Perumahan Jumlah STUP dari 48.092 STUP pada tahun 2016 menjadi sejumlah 49.005 STUP pada tahun 2017	50%	Rp. 15.322.515.070,00	Rp. 18.716.500.000,00	Ribas Perumahan dan Perdagangan	Sedang Belajar
2.06.2.06.01.00.18.054	Pelayanan Pengembangan Bisnis	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah STUP	41230.38buah		Dukung Sarana dan Pasaran Perdagangan 5 bulan Pengalaman Pameran 50 Pemasaran Dalam Negeri 10 Pemasaran Pembinaan Pedagang 300 Peg Penyusunan Data Toko Modern 1 paket	Terwujudnya dukungan sebesar 12% terhadap target Perumahan Jumlah STUP pada tahun 2017 (dari 48.092 STUP menjadi 49.005 STUP)	Dukung terhadap pencapaian target RPMD atau Perumahan Jumlah STUP dari 48.092 STUP pada tahun 2016 menjadi sejumlah 49.005 STUP pada tahun 2017	50%	Rp. 2.045.000.000,00	Rp. 2.249.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Belajar
<b>2.06.2.06.01.00.22</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PASAR DOMESTIK</b>											<b>Rp. 1.511.252.000,00</b>	<b>Rp. 1.662.377.200,00</b>		
2.06.2.06.01.00.22.001	Perindungan Pasar Domestik	Kerjasama antara dan brokral	Akuntabilitas Pemerintah Meningkat	DIY	Jumlah produk, barang dan jasa yang diawasi	8000.mah Sample Produk yang Diawasi		Operasi Bazar Nuri Bazar dan Komoditi lainnya 12 bulan	Terwujudnya dukungan 100% terhadap peningkatan jumlah produk barang dan jasa yang diawasi dari 750 produk pada tahun 2016 menjadi 1000 Jumlah Sample Produk yang Diawasi pada tahun 2017	Dukung terhadap pencapaian target RPMD atau Perumahan Jumlah STUP dari 48.092 STUP pada tahun 2016 menjadi sejumlah 49.005 STUP pada tahun 2017	100%	Rp. 1.511.252.000,00	Rp. 1.662.377.200,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Belajar

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Rincian Ususan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keunggulan Kegiatan				Hasil Kegiatan	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan
					Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
2.07	<b>INDUSTRI</b>												
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan												
2.07.2.06.01.00.17	<b>PROGRAM PENGINGKATAN INDUSTRI</b>												
2.07.2.06.01.00.17.094	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai produksi IKM (Ribu Rp)	387.971.065.598Ribu Rp	Lomba ATC 1 kegiatan	Terselenggara 4 kegiatan 100% pendanaan nilai produksi IKM dari 3.664.238.158.000,- pada tahun 2016 menjadi 3.847.471.066.000,- pada tahun 2017.	6. Mula-mula, seluruh pencapaian target RPMD atau Pengeluaran nilai produksi IKM dari 3.664.238.158.000,- pada tahun 2016 menjadi 3.847.471.066.000,- pada tahun 2017.	Rp. 2.703.500.000,00	Rp. 2.973.850.000,00	Sedang Bermanfaat	
2.07.2.06.01.00.22	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH</b>	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	4918,22unit usaha	Lomba ATC 10 ATC	Promosi ATC 10 ATC	Revisibilitas CFSM 4, CFSM 1	Rp. 10.606.678.000,00	Rp. 5.006.845.800,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2.07.2.06.01.00.22.001	Pengembangan dan pembinaan Industri kecil menengah agro dan non agro	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	4918,22unit usaha	Peningkatan Mutu Produk Organik 20 IKM	Terdukungnya dukungan 20% terhadap Peningkatan jumlah IKM dari 49.088 unit pada tahun 2017 menjadi 49.188 UU pada tahun 2017	Dukungannya terhadap pencapaian target 49.088 atau Peningkatan jumlah IKM dari 49.088 unit pada tahun 2017 menjadi 49.188 UU pada tahun 2017	Rp. 2.170.000.000,00	Rp. 2.387.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Keistimewaan**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Uraian Rincian Usulan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Meju	Keterangan				
					Hasil Program		Kuluanan Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan			
					Took Ukur	TARGET	Took Ukur	TARGET					Took Ukur	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.07.2.06.01.00.22.002	Pengembangan dan Peningkatan Industri Kecil Menengah (UKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anak	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	4918,22 unit usaha	4918,22 unit usaha	4918,22 unit usaha	4918,22 unit usaha	4918,22 unit usaha	4918,22 unit usaha	Rp. 7.886.678.000,00	Rp. 2.014.845.800,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bojolan
2.07.2.06.01.00.22.003	Pengembangan dan Fasilitas Keunggulan Intelektual	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah IKM	4918,22 unit usaha	4918,22 unit usaha	4918,22 unit usaha	4918,22 unit usaha	4918,22 unit usaha	4918,22 unit usaha	Rp. 590.000.000,00	Rp. 605.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bojolan
2.07.2.06.01.00.23	<b>PROGRAM PERHATIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF</b>	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah Industri Kreatif	4123,37 unit usaha	4123,37 unit usaha	4123,37 unit usaha	4123,37 unit usaha	4123,37 unit usaha	4123,37 unit usaha	Rp. 2.150.000.000,00	Rp. 2.365.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bojolan
2.07.2.06.01.00.23.001	Pengembangan Industri Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah Industri Kreatif	4123,37 unit usaha	4123,37 unit usaha	4123,37 unit usaha	4123,37 unit usaha	4123,37 unit usaha	4123,37 unit usaha	Rp. 2.150.000.000,00	Rp. 2.365.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sidang Bojolan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Non Kelistimewaan

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 46.845.377.500,00

Nomor	Uraian Rincian Usulan Peningkatan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan	Jenis Kegiatan		
					Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					Tokoh Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Fashion Expo 150 IKM							
							Fashion Show 100 Designer							
							Pameran Fashion FTV : 100 IKM							
							Pameran Industri Kreatif 100 IKM							
							Penyempitan IKM Pokokan Juli 5, angklakan							
							Seminar 200 peserta							

## BAB 6 PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang mengembang misi pelaksanaan pembangunan tahun kelima yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah periode 2012 – 2017. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah DIY Tahun 2017 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2017 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

\*8%(5185□

\$(5\$H[67,0(\$32\*≤\$1\$57\$□

WWG

⊞\$0(1\*18□ %8:212□

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001